



RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)

KABUPATEN KLATEN

TAHUN 2021 - 2026



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa Kabupaten Klaten merupakan jalur strategis penghubung dan berada di tengah pusat ekonomi Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta sehingga memiliki berbagai potensi yang perlu dikembangkan dan dioptimalkan dalam pelaksanaan pembangunan;
- b. bahwa agar hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dan merata di seluruh wilayah, maka diperlukan suatu perencanaan pembangunan yang dapat mengakomodir kebutuhan tersebut;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KLATEN

dan

BUPATI KLATEN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 – 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2020 sampai dengan Tahun 2024.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut RPJPD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Jawa Tengah untuk periode 20 (dua puluh) tahun dari Tahun 2005 sampai dengan Tahun 2025.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 yang selanjutnya disebut RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2023.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun dari Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2026.
13. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah.
14. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi.
15. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi.

16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
18. Program adalah bentuk instrumen Kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai Sasaran dan tujuan pembangunan daerah.
19. Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/Program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
20. Kerangka pendanaan, adalah program dan kegiatan yang disusun untuk mencapai sasaran hasil pembangunan yang pendanaannya diperoleh dari anggaran pemerintah/daerah, sebagai bagian integral dari upaya pembangunan daerah secara utuh.
21. Pembangunan Daerah adalah pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, kesempatan kerja, lapangan berusaha, akses terhadap pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun peningkatan indeks pembangunan manusia.
22. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.

BAB II

RPJMD

Pasal 2

RPJMD merupakan dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam

melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun, terhitung sejak tahun 2021 sampai dengan tahun 2026 dan pelaksanaan lebih lanjut dituangkan dalam RKPD.

Pasal 3

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah yang memuat visi, misi, tujuan, Sasaran, Strategi, arah Kebijakan, dan program pembangunan daerah.
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah.
- (3) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijabarkan dalam RKPD yang dijadikan dasar dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara.
- (4) Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dijadikan dasar dalam penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 4

- (1) RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut :
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
 - c. BAB III : Gambaran Keuangan Daerah;
 - d. BAB IV : Permasalahan dan Isu Strategis Daerah;
 - e. BAB V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran;
 - f. BAB VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah;
 - g. BAB VII : Kerangka Pendanaan pembangunan dan Program Perangkat Daerah;
 - h. BAB VIII : Kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
 - i. BAB IX : Penutup.

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.
- (2) Tata cara pengendalian dan evaluasi RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB IV

PERUBAHAN RPJMD

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD hanya dapat dilakukan apabila:
- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, dan/atau perubahan kebijakan nasional; atau
 - d. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan adanya kerugian terhadap kepentingan daerah dan nasional.
- (2) Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman RKPD dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah.

Pasal 7

Perubahan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Dalam hal RPJMD Tahun 2021-2026 belum diundangkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2022 berpedoman pada RPJPD dan RPJMN.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Klaten.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal

BUPATI KLATEN,

SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

JAKA SAWALDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2021 NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NOMOR TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
TAHUN 2021-2026

I. UMUM

Pada hakekatnya, perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan nasional dengan arah, tujuan, kebijakan, sasaran dan prioritasnya sebagaimana ditetapkan dalam RPJPN. Kebijakan tersebut selanjutnya dituangkan dalam RPJMD dengan tujuan untuk memberikan gambaran mengenai wujud masa depan yang diinginkan kurun waktu lima tahun. RPJMD sebagai rencana jangka menengah selanjutnya diterjemahkan secara kongkrit, spesifik dan operasional menjadi rencana operasional tahunan. Selain untuk mencapai sasaran pembangunan nasional, pembangunan daerah juga bertujuan untuk meningkatkan hasil-hasil pembangunan daerah bagi masyarakat secara adil dan merata agar masyarakat lebih sejahtera.

Dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Bupati berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, perlu disusun Rencana Pembangunan Daerah kurun waktu 5 (lima) tahun.

RPJMD merupakan penjabaran visi, misi, tujuan dan sasaran Kepala Daerah untuk waktu 5 (lima) tahun yang penyusunannya

berpedoman pada RPJPD, dan memperhatikan RPJMN dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah, memuat beberapa hal yaitu:

- a. arah kebijakan keuangan daerah;
- b. strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah, disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

Penyusunan RPJMD dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan perundang-undangan.

RPJMD digunakan sebagai pedoman penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan RKPD pada setiap tahun anggaran. Selain itu juga dijadikan acuan bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Klaten. Oleh karena berbagai urgensi tersebut, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang RPJMD Tahun 2021-2026.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Sistematika RPJMD merujuk pada Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Tata cara pengendalian dan evaluasi berpedoman pada Pasal 268 sampai dengan Pasal 273 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

yang dimaksud merugikan kepentingan daerah dan nasional adalah apabila dokumen RPJMD bertentangan dengan kebijakan daerah dan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

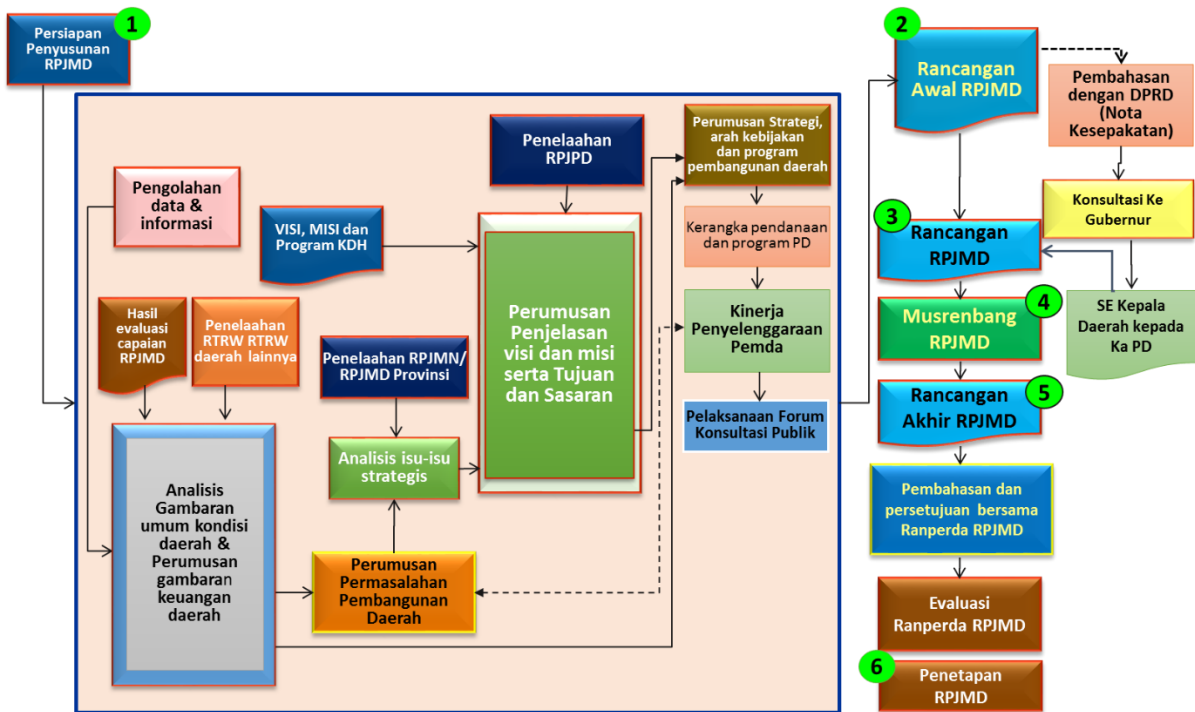
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KLATEN NOMOR ...

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dokumen RPJMD menjadi acuan dalam perencanaan pembangunan daerah selama kurun waktu lima tahun.

Bupati dan Wakil Bupati Klaten masa jabatan 2021-2026 (Sri Mulyani dan Yoga Hardaya) dilantik pada tanggal 26 Februari tahun 2021. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yang penetapannya paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik. Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mencakup 6 (enam) tahapan yaitu persiapan penyusunan RPJMD, penyusunan rancangan awal RPJMD, penyusunan rancangan RPJMD, Musrenbang RPJMD, penyusunan rancangan akhir RPJMD, dan penetapan RPJMD, sebagaimana tergambar pada skema berikut ini.



Gambar 1.1
Tahapan Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten
Tahun 2021-2026

Penyusunan RPJMD menggunakan beberapa pendekatan perencanaan pembangunan, baik dari sisi proses maupun substansi. Pendekatan yang berorientasi pada proses mencakup: (1) pendekatan teknokratik, (2) pendekatan politik, (3) pendekatan partisipatif, dan (4) pendekatan *Bottom-up dan Top-down*. Pendekatan Teknokratik dimaknai sebagai

pendekatan perencanaan yang menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Hal ini ditunjukkan oleh proses penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten dengan melibatkan tenaga ahli yang berkompeten. Pendekatan Politik dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakomodasi kepentingan-kepentingan politik dalam pelaksanaan pembangunan, yang ditunjukkan dengan diakomodirnya saran dan masukan Kepala Daerah dan pokok pikiran anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam dokumen RPJMD. Pendekatan partisipatif dimaknai sebagai pendekatan perencanaan yang mengakodir kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang disampaikan melalui konsultasi publik dan musrenbang RPJMD Klaten. Pendekatan *Buttom-up dan Top-down* dimaknai sebagai pendekatan yang memperhatikan kebijakan dan program-program prioritas pemerintah pusat dan provinsi. Hal ini ditunjukkan dengan penyusunan RPJMD yang memperhatikan kebijakan dalam RPJMN tahun 2020-2024 dan RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023, dan memperhatikan hasil konsultasi dan evaluasi Raperda RPJMD oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Pendekatan dari sisi substansi yang digunakan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten meliputi pendekatan Holistik-Tematik, pendekatan Integratif dan pendekatan Spasial. Pendekatan Holistik-Tematik dalam RPJMD Kabupaten Klaten dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya. Pendekatan Integratif dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan daerah kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Klaten. Pendekatan Spasial dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan pembangunan daerah yang tertuang dalam arah kebijakan pengembangan wilayah.



Gambar 1.2
Pendekatan dalam Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten

Penyusunan RPJMD mengacu pada regulasi terkait perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang dimutakhirkan melalui Kepmendagri Nomor 050-3708 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran tahapan periode keempat RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 (Perda Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009). RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga disusun dengan memperhatikan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 untuk memastikan bahwa setiap kebijakan pembangunan harus memperhatikan rencana struktur ruang, rencana pola ruang, arahan kawasan strategis, serta indikasi program pemanfaatan ruang. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 memiliki kedudukan strategis sebagai pedoman dalam penyusunan RKPD tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah. Dokumen RPJMD juga menjadi acuan dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah. Dokumen RPJMD juga akan menjadi acuan bagi DPRD dan masyarakat dalam melakukan pengawasan dan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 69);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
11. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
13. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
14. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6514);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
27. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 160);
28. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 36);
29. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan pembangunan ekonomi kawasan Kendal - Semarang - Salatiga - Demak -

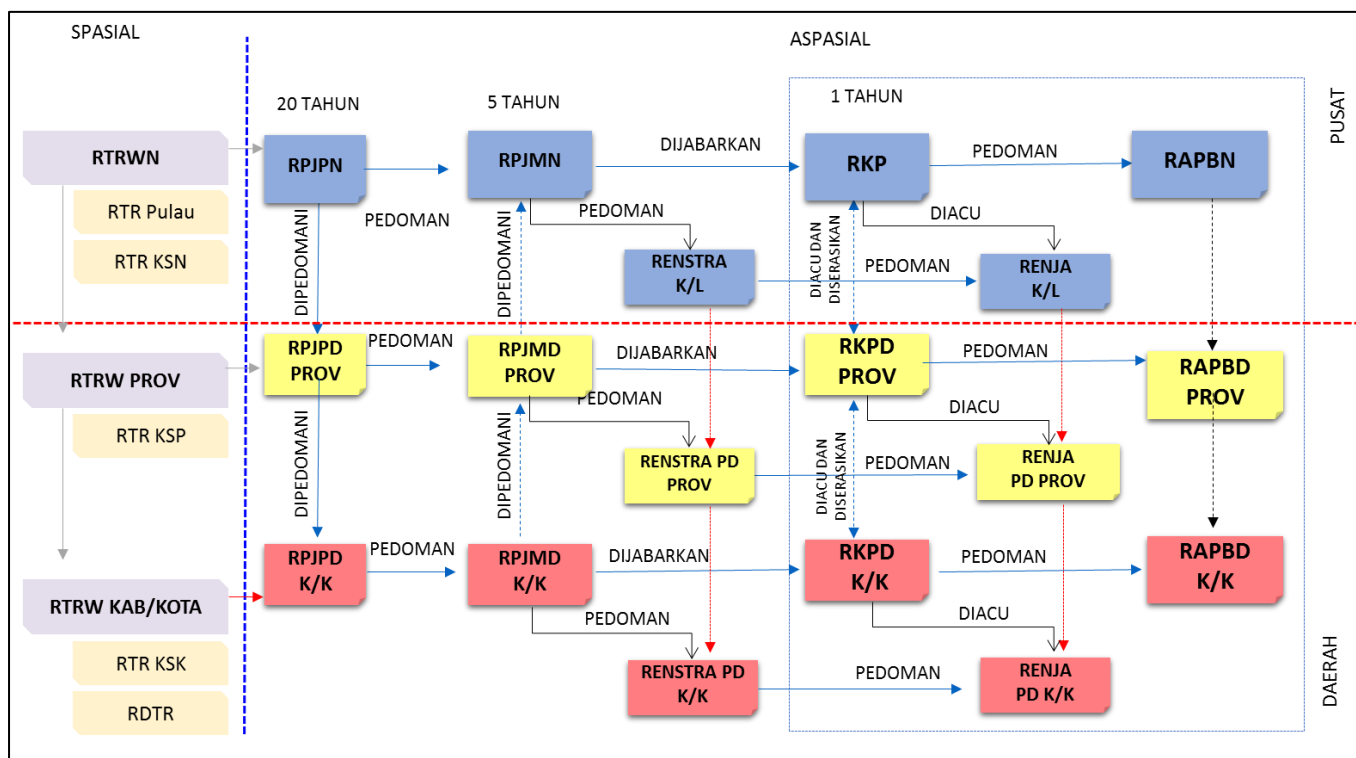
- Grobogan, Kawasan Purworejo - Wonosobo - Magelang - Temanggung, dan Kawasan Brebes - Tegal – Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224);
30. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 31. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2010 Nomor 6, Tambahan Lembaran Provinsi Jawa Tengah Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 121);
 34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2017 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan Penganggaran Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 91);
 35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 110);
 36. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025 6 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 46);
 37. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2011–2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 66);
 38. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
 39. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);
 40. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 26 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Urusan pemerintahan Daerah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten;

41. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 6 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 254);
42. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 168);
43. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten Kota Layak Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 169);
44. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
45. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
46. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
47. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
48. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
49. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) sebagaimana dimutakhirkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
50. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
51. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
52. Peraturan Bupati Klaten No 8 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah di Kabupaten Klaten.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Klaten memiliki keterkaitan dengan dokumen perencanaan di tingkat

nasional, Provinsi Jawa Tengah maupun Kabupaten Klaten. Keterkaitan antar dokumen tersebut menggambarkan hubungan yang selaras antara dokumen RPJMD dengan dokumen perencanaan di tingkat provinsi dan nasional, hubungan yang selaras antara dokumen perencanaan di tingkat kabupaten yang memiliki periode perencanaan berbeda dan hubungan selaras dengan dokumen perencanaan multi sektor.

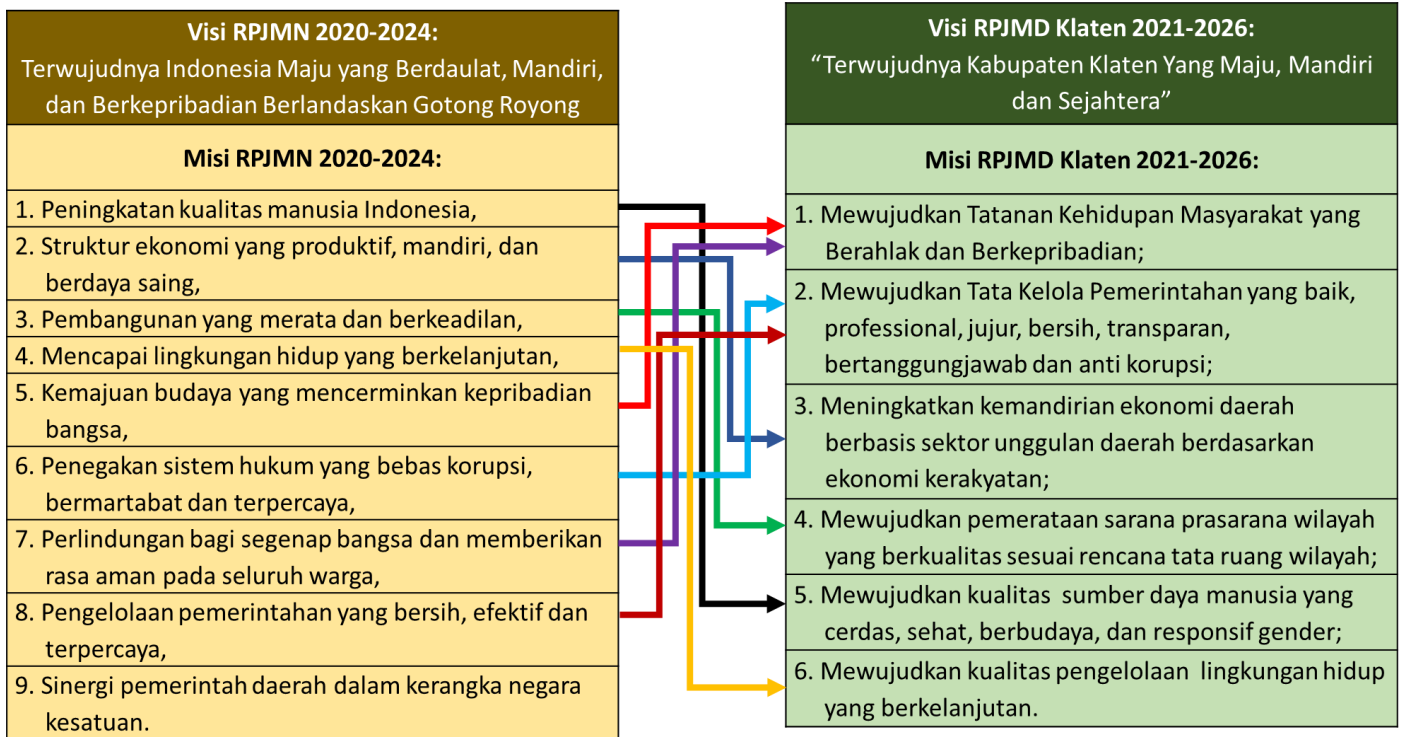


Gambar 1.3
Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Penjelasan keterkaitan antara RPJMD Kabupaten Klaten dengan dokumen perencanaan lainnya sebagai berikut:

A. Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nasional Tahun 2020-2024

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJM Nasional tahun 2020-2024 terutama terkait isu strategis, visi dan misi presiden, sasaran pokok agenda pembangunan, dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJM Nasional.



Gambar 1.4
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMN Tahun 2020-2024

B. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

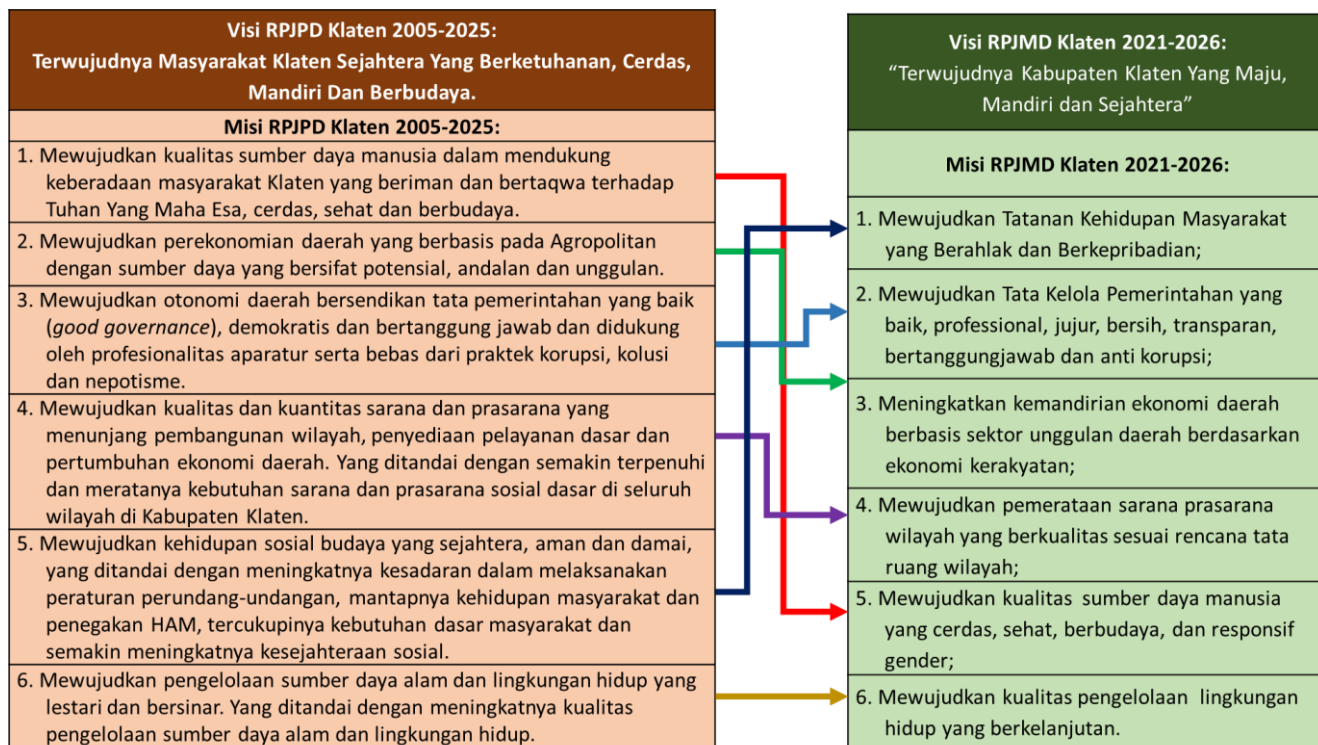
Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten mempedomani dokumen RPJMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 terutama terkait visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan dan program pembangunan daerah.



Gambar 1.5
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

C. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten berpedoman pada dokumen RPJPD Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025, khususnya pada RPJMD tahap ke-4.



Gambar 1.6
Keterkaitan Antara RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 dengan RPJPD Tahun 2005-2025

D. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Klaten

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen RTRW Kabupaten Klaten. Pada saat ini RTRW Kabupaten Klaten masih dalam proses pembahasan Ranperda Perubahan RTRW, meskipun demikian draft perubahan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 sudah dapat menjadi acuan, RPJMD harus memperhatikan struktur ruang, pola ruang dan program penataan ruang. RPJMD berisi program pembangunan, sedangkan RTRW mengarahkan lokasi pelaksanaan program pembangunan tersebut. Penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten bertujuan mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dengan pelaksanaan pembangunan yang berbasis pertanian, industri, dan pariwisata.

E. Dokumen Perencanaan Multi Sektor

Penyusunan RPJMD Kabupaten Klaten memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor yang telah tersusun, antara lain Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD, Rencana Aksi Daerah (RAD) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD), RAD Kelitbangan, dan lain sebagainya. RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 juga harus mengintegrasikan hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Klaten untuk menjamin bahwa pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar pembangunan, dengan memperhatikan potensi

dampak pembangunan melalui penyusunan rekomendasi perbaikan berupa antisipasi, mitigasi, adaptasi dan/atau kompensasi program dan kegiatan.

F. Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah

RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun pada tingkat perangkat daerah.

G. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

RPJMD Kabupaten Klaten setelah ditetapkan akan menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD Kabupaten Klaten tahun 2022 hingga tahun 2026 yang merupakan dokumen perencanaan tahunan daerah.

1.4 Maksud dan Tujuan

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menyediakan rencana pembangunan daerah kurun waktu lima tahun sebagai penjabaran dari visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Klaten agar terarah, terpadu dan berkesinambungan.

RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan tujuan sebagai berikut :

- a. Menggambarkan kondisi daerah, permasalahan dan isu strategis, tujuan dan sasaran, strategi dan arah kebijakan serta program pembangunan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Memberikan arah kebijakan dan prioritas pembangunan tahunan daerah sebagai acuan resmi dalam penyusunan RKPD yang merupakan dokumen perencanaan daerah tahunan, dan Renstra Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan lima tahun perangkat daerah;
- c. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

1.5 Sistematika Penulisan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut.

- | | |
|---------|---|
| Bab I | Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan, dan sistematika penulisan. |
| Bab II | Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah. |
| Bab III | Gambaran Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu; kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu; dan kerangka pendanaan. |
| Bab IV | Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Daerah, berisi tentang permasalahan pembangunan dan isu strategis daerah. |
| Bab V | Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi visi, penjelasan unsur visi, misi, tentang tujuan dan sasaran pembangunan daerah. |
| Bab VI | Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah, berisi tentang Strategi, Arah Kebijakan Pembangunan, dan Program Pembangunan Daerah. |

- Bab VII Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah.
Bab VIII Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, berisi tentang indikator kinerja utama, dan indikator kinerja daerah.
Bab IX Penutup, berisi tentang pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan.

BAB II

GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Kondisi Geografis dan Administrasi

Kabupaten Klaten merupakan salah satu kabupaten yang terletak di bagian selatan Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis Kabupaten Klaten terletak antara 7°32'19" LS sampai 7°48'33" LS dan antara 110°26'14" BT sampai 110°47'51" BT. Adapun batas administratif Kabupaten Klaten adalah:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Boyolali;
Sebelah Timur	:	Kabupaten Sukoharjo;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Gunungkidul (DI Yogyakarta); dan
Sebelah Barat	:	Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta).

Kabupaten Klaten berada pada lokasi yang strategis, karena berada di simpul transportasi yang melayani skala provinsi atau beberapa kabupaten dengan adanya jalan arteri primer yang menghubungkan Kota Surakarta-Yogyakarta, didukung dengan jaringan jalan tol Solo-Yogyakarta, tersedianya terminal tipe A yang sudah melayani angkutan umum antar provinsi dan angkutan umum dalam provinsi. Kabupaten Klaten berada pada jalur transportasi Yogyakarta-Solo-Semarang yang berkembang cukup pesat.

Dari segi posisi dalam sistem pergerakan nasional maupun provinsi, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap peluang *demand* dari kabupaten sekitar. Dampak dari pengembangan ini adalah munculnya simpul-simpul aktivitas baru yang mendorong perkembangan pemanfaatan ruang ke depannya.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Klaten termasuk dalam wilayah pengembangan Subosukawonosraten, merupakan kawasan regional yang memiliki keterkaitan pengembangan secara ekonomi, sosial dan/atau budaya dengan cakupan daerah meliputi Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Sragen dan Kabupaten Klaten. Wilayah pengembangan Subosukawonosraten didasarkan pada sektor unggulan meliputi perdagangan dan jasa, industri, pertanian, pariwisata dan panas bumi.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai *hinterland* dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian, perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta-Surakarta serta termasuk dalam Kawasan Penyangga Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) Borobudur-Yogyakarta-Prambanan.

Luas wilayah Kabupaten Klaten mencapai 70.152,02 ha atau seluas 2,15% dari luas Provinsi Jawa Tengah (3.254.412 ha). Kabupaten Klaten terdiri dari 26 (dua puluh enam) kecamatan yaitu Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas, Trucuk, Kalikotes, Kebonarum, Jogonalan, Manisrenggo, Karangnongko, Ngawen, Ceper, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, Jatinom, Kemalang, Klaten Selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara. Luas wilayah Kabupaten Klaten dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel 2.1.

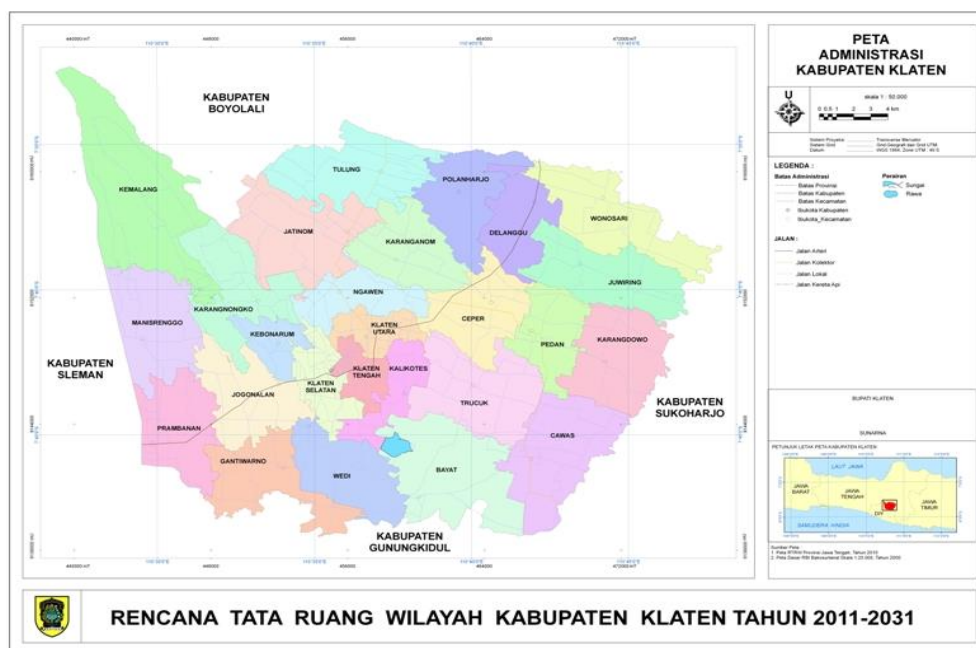
Tabel 2.1
Luas Wilayah Dirinci Per Kecamatan Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Luas Wilayah (ha)	
		Ha	%
1	Prambanan	2.609,46	3,72
2	Gantiwarno	2.644,45	3,77
3	Wedi	2.625,81	3,74
4	Bayat	4.209,70	6,00
5	Cawas	3.593,54	5,12
6	Trucuk	3.468,60	4,91
7	Kalikotes	1.410,87	2,01
8	Kebonarum	1.041,62	1,48
9	Jogonalan	2.759,33	3,93
10	Manisrenggo	3.060,27	4,36
11	Karangnongko	2.949,17	4,20
12	Ngawen	1.845,49	2,63
13	Ceper	2.576,67	3,67
14	Pedan	1.999,90	2,85
15	Karangdowo	3.080,17	4,39
16	Juwiring	3.090,11	4,40
17	Wonosari	3.340,06	4,76
18	Delanggu	2.003,01	2,86
19	Polanharjo	2.521,57	3,59
20	Karanganom	2.561,67	3,65
21	Tulung	3.444,00	4,91
22	Jatinom	3.710,97	5,29
23	Kemalang	6.019,13	8,58
24	Klaten Selatan	1.509,12	2,15
25	Klaten Tengah	959,45	1,37
26	Klaten Utara	1.117,36	1,59
Jumlah		70.152,02	100

Sumber : DPUPR Klaten, 2020

Kecamatan Kemalang memiliki wilayah paling luas dibandingkan kecamatan lainnya (9%), kemudian Kecamatan Bayat (6%). Hal ini dapat menjadi potensi ketersediaan lahan, termasuk didalamnya potensi keanekaragaman hayati dan sumber daya alam. Kawasan perkotaan Klaten ditetapkan berada di Kecamatan Klaten Selatan, Klaten Tengah dan Klaten Utara. Jarak antara kawasan perkotaan Klaten dengan kecamatan yang berbatasan dengan kabupaten lain cukup jauh, karena wilayah Kabupaten Klaten yang cukup luas. Hal ini menyebabkan kesenjangan pembangunan, terutama pembangunan infrastruktur wilayah. Pembangunan infrastruktur seringkali hanya terpusat di kawasan perkotaan, sehingga kecamatan yang jauh dari kawasan perkotaan kurang mendapatkan infrastruktur yang memadai dan berkualitas. Untuk mengurangi kesenjangan wilayah tersebut dapat diminimalkan dengan

pemerataan pembangunan sarana dan prasarana, meningkatkan konektivitas ke seluruh wilayah kecamatan, dan mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di luar kawasan perkotaan sesuai dengan potensi unggulan masing-masing.



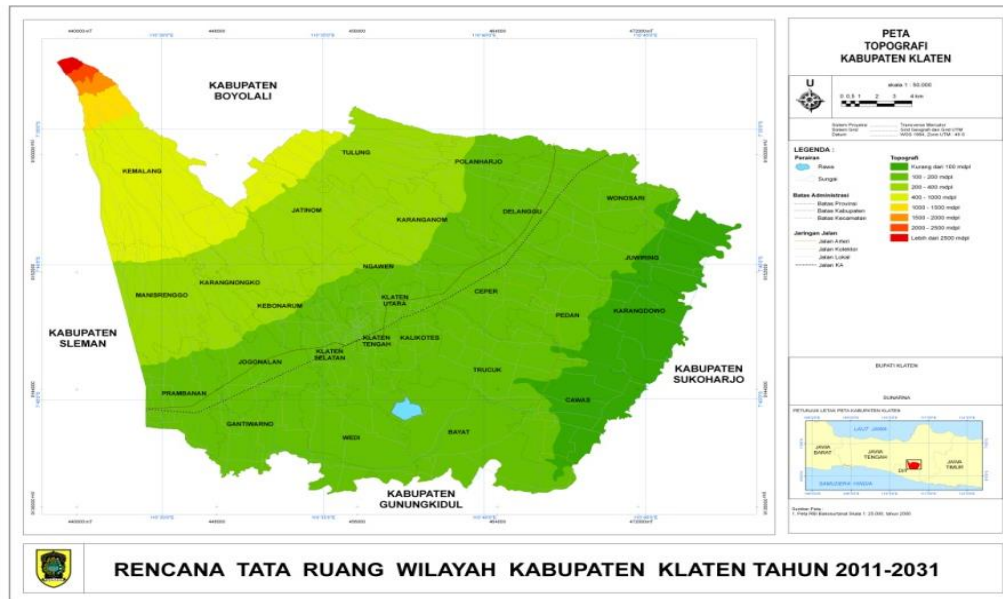
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.1.
Peta Administrasi Kabupaten Klaten

2.1.2. Topografi Wilayah

Secara umum, wilayah Kabupaten Klaten berada pada ketinggian 100 hingga >2000 meter di atas permukaan laut (mdpl). Sekitar 3,72% wilayah Kabupaten Klaten terletak di antara ketinggian 0-100 mdpl, sebanyak 83,52% wilayahnya terletak di antara ketinggian 100-500 mdpl, dan sisanya sebanyak 12,76% terletak di antara ketinggian 500-2500 mdpl. Ketinggian Kabupaten Klaten secara terperinci yaitu:

- Wilayah dengan ketinggian kurang dari 100 mdpl meliputi sebagian dari kecamatan: Juwiring, Karangdowo dan Cawas.
- Wilayah dengan ketinggian antara 100-200 mdpl meliputi Kecamatan Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Cawas (di bagian barat), Trucuk, Kalikotes, Klaten Selatan, Klaten Tengah, Klaten Utara, Kebonarum (di bagian selatan), Ngawen (di bagian selatan dan timur), Ceper, Pedan, Karanganom (di bagian timur), Polanharjo (di bagian timur), Delanggu, Juwiring (di bagian barat) dan Wonosari (di bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 200-400 mdpl meliputi Kecamatan: Manisrenggo, Jogonalan (di bagian utara), Karangnongko, Kebonarum (di bagian utara), Ngawen (di bagian utara), Jatinom, Karanganom (di bagian barat), Tulung (sebagian besar) dan Polanharjo (bagian barat).
- Wilayah dengan ketinggian antara 400-1.000 mdpl meliputi Kecamatan: Kemalang (sebagian besar), Manisrenggo (sebagian besar), Jatinom (sebagian kecil) dan Tulung (sebagian kecil).
- Wilayah dengan ketinggian 1.000-2.000 mdpl berada di Kecamatan Kemalang.



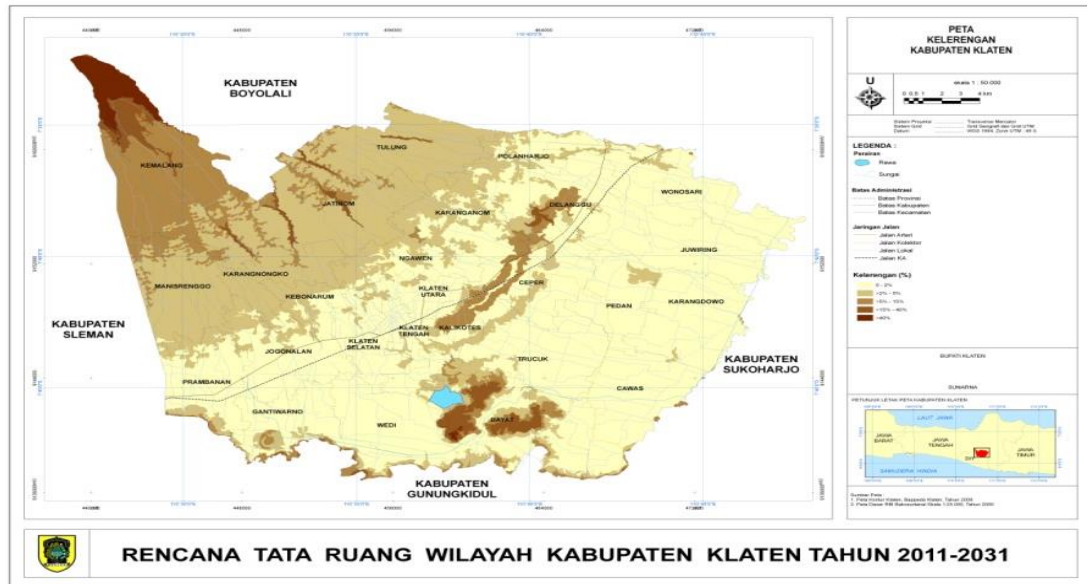
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kabupaten Klaten

Berdasarkan kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Klaten terbagi:

1. Dataran Lereng Gunung Merapi membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom, dan Tulung;
2. Dataran Rendah membujur di tengah meliputi wilayah Kecamatan Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom, dan Polanharjo; dan
3. Dataran Gunung Kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas, dan sebagian Gantiwarno.

Jika dilihat dari kelerengannya, sebagian besar Kabupaten Klaten memiliki kelerengan 0-2% di wilayah bagian tengah ke selatan, kemudian kelerengan lebih dari 2-5%, dan semakin ke utara semakin kelerengan tinggi. Kelerengan lebih dari 40% terdapat di Kecamatan Kemalang karena merupakan lereng Gunung Merapi. Kelerengan 0-2% dan 2-5% masuk dalam kategori datar dan memiliki daya dukung yang baik untuk lahan terbangun, sehingga dapat disimpulkan bahwa hampir seluruh wilayah Kabupaten Klaten secara topografi memiliki daya dukung yang baik untuk kawasan budidaya. Wilayah yang perlu mendapat perhatian adalah wilayah dengan kelerengan lebih dari 25% karena sudah masuk kategori curam, bahkan di beberapa tempat memiliki kelerengan lebih dari 45% yang berarti sangat curam dan sulit untuk dikembangkan sebagai kawasan terbangun.

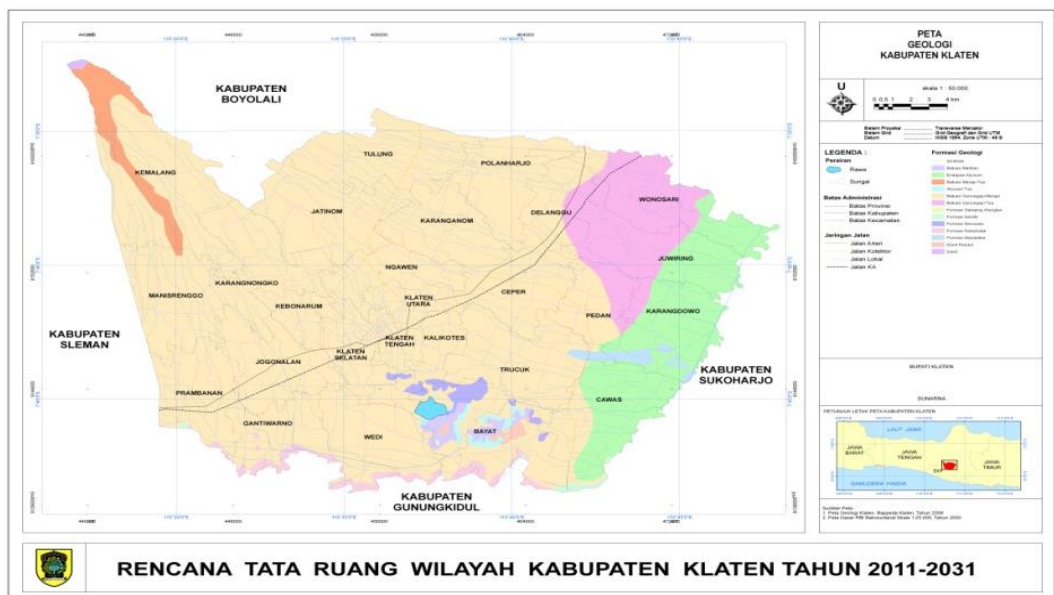


Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.3.
Peta Kelerengan Kabupaten Klaten

2.1.3. Geologi

Geologi permukaan adalah kondisi geologi tanah atau batu yang ada di permukaan dan sebarannya baik lateral maupun vertikal hingga kedalaman batuan dasar serta sifat-sifat keteknikan tanah atau batu tersebut, dalam kaitannya untuk menunjang pengembangan kawasan. Keadaan geologi Kabupaten Klaten diketahui merupakan vulkanik kwarter muda yakni batuan induk yang membentuk lapisan tanah. Jenis batuan yang ada merupakan batuan gunung api merapi. Kondisi geologi wilayah Kabupaten Klaten terdiri dari beberapa jenis batuan, meliputi: Aluvium Tua, Endapan Aluvium, Batuan Gunungapi Merapi, Batuan Gunungapi Tua, Batuan Malihan, Batuan Merapi Tua, Dasit, Pendul, Formasi Gamping Wungkal, Formasi Kebobotak, Formasi Semilir, dan Formasi Wonosari.



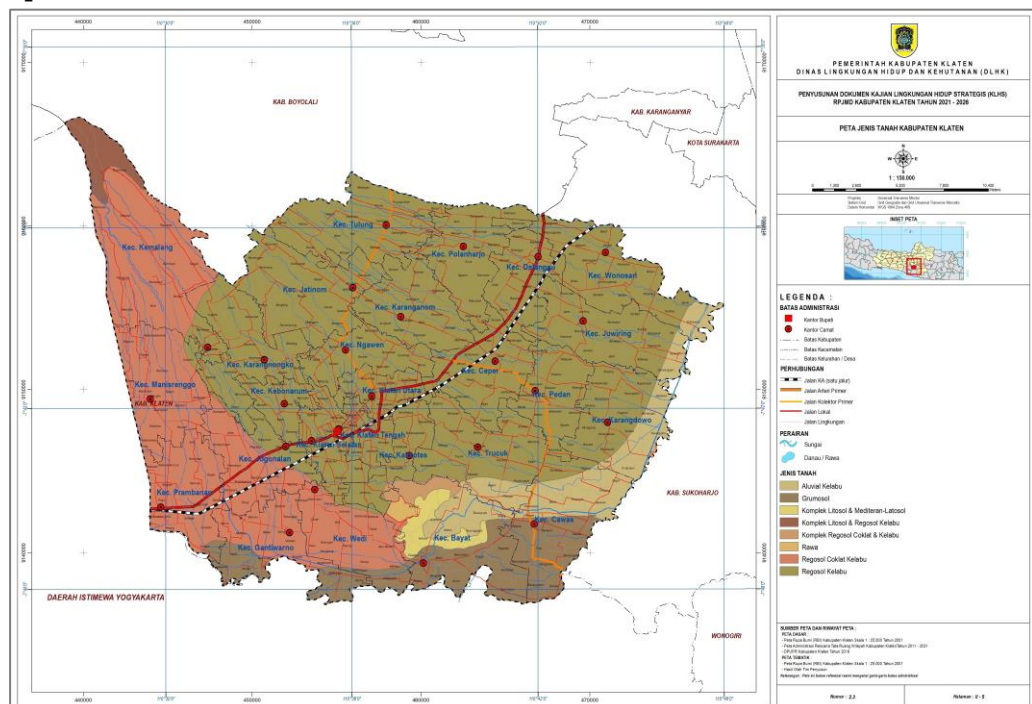
Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kabupaten Klaten

2.1.4. Litologi

Jenis tanah merupakan komponen cukup penting dalam menentukan kesesuaian fungsi kegiatan terkait dengan tingkat kepekaan masing-masing jenis tanah terhadap erosi. Kandungan mineral yang terdapat dalam tanah dapat untuk menduga kemampuan tanah dan kandungan unsur tanah. Jenis tanah di Kabupaten Klaten terdiri dari:

1. Aluvial Kelabu: Bahan induk dari endapan lumpur dan pasir yang terbawa oleh air sungai di dataran rendah. Terdapat di Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, dan Prambanan. Sifat tanah ini tidak peka terhadap erosi. Tanah aluvial secara umum bermorfologi datar dan teratur sehingga cocok untuk kegiatan pertanian.
2. Litosol: Bahan induk dari skis kristalin dan batu tulis terdapat di daerah Kecamatan Bayat. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
3. Regosol Kelabu: Bahan induk abu dan pasir vulkanik intermedier terdapat di Kecamatan Ceper, Trucuk, Klaten Tengah, Kalikotes, Kebonarum, Klaten Selatan, Karangnongko, Ngawen, Klaten Utara, Cawas, Pedan, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Delanggu, Polanharjo, Karanganom, Tulung, dan Jatinom. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
4. Grumusol Kelabu Tua: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Bayat, Cawas sebelah selatan. Sifat tanah ini peka terhadap erosi.
5. Kompleks Regosol Kelabu dan Kelabu Tua: Bahan induk berupa batu kapur napal terdapat di daerah Kecamatan Klaten Tengah dan Kalikotes sebelah selatan. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.
6. Regosol Coklat Kekelabuan: Bahan induk berupa abu dan pasir vulkan intermedier terdapat di daerah Kecamatan Kemalang, Manisrenggo, Prambanan, Jogonalan, Gantiwarno, dan Wedi. Sifat tanah ini sangat peka terhadap erosi.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Gambar 2.5.
Peta Jenis Tanah Kabupaten Klaten

2.1.5. Hidrologi dan Geohidrologi

Kabupaten Klaten memiliki 2 karakteristik hidrologi yaitu air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang berada di atas permukaan tanah seperti air sungai, air rawa, air irigasi, air danau, dan sebagainya. Sementara air tanah (*hidrogeologi*) mencakup mata air, air sumur dangkal dan sumur dalam. Air sumur dangkal adalah air yang keluar dari dalam tanah yang dangkal atau sering disebut sebagai air tanah. Dalamnya lapisan air ini dari permukaan tanah berkisar 5 sampai dengan 15 meter dan berbeda kedalaman antara satu tempat dengan tempat yang lain.

Wilayah Kabupaten Klaten masuk ke dalam Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo dan DAS Opak. Yang termasuk dalam DAS Bengawan Solo meliputi seluruh Kecamatan di Kabupaten Klaten. Luas DAS Bengawan Solo yang ada di Kabupaten Klaten mencapai ± 67.024, 08 ha. Wilayah Kabupaten Klaten yang termasuk dalam DAS Opak yaitu Kecamatan Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan. Luas DAS Opak yang ada di Kabupaten Klaten ± 3.074,27 ha. Berikut merupakan sungai yang melintasi wilayah Kabupaten Klaten dan banyak dimanfaatkan sebagai sumber air permukaan.

Selain memanfaatkan aliran sungai sebagai sumber air, wilayah Kabupaten Klaten juga memiliki sumber air berupa waduk, embung, mata air dan sumber lainnya. Waduk yang ada di Kabupaten Klaten berupa Waduk Rowo Jombor yang ada di Kecamatan Bayat. Waduk Rowo Jombor mempunyai luas 189 hektar. Waduk ini mempunyai kedalaman 4,5 m dan mampu menampung air 4.000.000 m³. Tujuan utama pembuatan waduk Rowo Jombor adalah untuk menampung air dari sungai-sungai di sekitarnya untuk mengendalikan banjir, dan sebagai persediaan air irigasi untuk lahan pertanian di sekelilingnya pada musim kemarau. Namun kemudian juga dimanfaatkan untuk keperluan lain, seperti pariwisata dan perikanan. Untuk mata air yang ada di Kabupaten Klaten sebanyak 206 yang tersebar di 20 kecamatan, dimana 38 diantaranya berlokasi di Kecamatan Tulung. Dari 206 mata air tersebut 17 diantaranya dalam kondisi mati. Sumber air lainnya yaitu embung. Sampai dengan Tahun 2020 di Kabupaten Klaten sudah terbangun 17 embung.

Tabel 2.2
Daftar Embung di Kabupaten Klaten

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
1	Embung Tarubasan	Tarubasan	Karanganom
2	Embung Taskombang	Taskombang	Manisrenggo
3	Embung Pandes	Pandes	Wedi
4	Embung Krakitan I	Krakitan	Bayat
5	Embung Krakitan II	Krakitan	Bayat
6	Embung Kendalsari	Kendalsari	Kemalang
7	Embung Kluwih	Kecemen	Manisrenggo
8	Embung Panggang	Panggang	Kemalang
9	Embung Mranggen	Mranggen	Jatinom
10	Embung Madirdo	Tlogo	Prambanan
11	Embung Karangasem	Karangasem	Cawas
12	Embung Krikilan	Krikilan	Bayat
13	Embung Karangpakel	Karangpakel	Trucuk
14	Embung Tambong Wetan	Tambong wetan	Kalikotes
15	Embung Sidorejo	Sidorejo	Kemalang

No	Nama	Lokasi	
		Desa	Kecamatan
16	Embung Tegalmulyo	Tegalmulyo	Kemalang
17	Embung Tijayan	Tijayan	Manisrenggo

Sumber: DPUPR Kabupaten Klaten, 2021

Hidrogeologi atau air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (*akuifer*) di bawah permukaan tanah. Air tanah dapat diklasifikasikan atas air tanah dangkal dan air tanah dalam, yang masing-masing diupayakan diperoleh besaran potensinya. Berdasar pada tipe akuifernya, akuifer dan produktifitasnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok, yaitu (1) *akuifer* dengan aliran melalui pori antar butir, (2) *akuifer* dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir, serta (3) *akuifer* celah dan pori dengan produktivitas kecil dan daerah air bawah tanah langka.

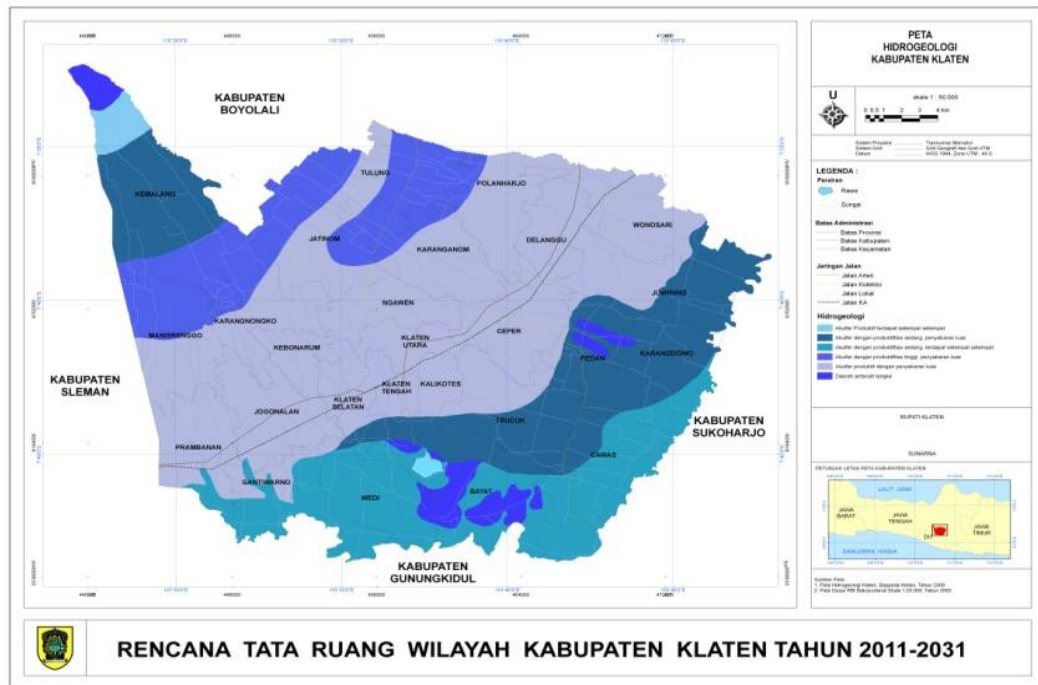
1. *Akuifer* dengan aliran melalui ruang antar butir
 - a. *Akuifer* dengan produktifitas tinggi dan penyebaran luas.
Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang sampai tinggi, kedalaman muka air bawah tanah beragam, umumnya dekat permukaan tanah, di beberapa daerah ada di atas muka tanah, debit sumur umumnya lebih dari 10 l/dt.
 - b. *Akuifer* produktif dengan penyebaran luas
Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang, kedalaman muka air bawah tanah cukup dangkal, debit sumur mencapai 5-10 l/dt, di beberapa tempat 20 l/dt.
 - c. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
Akuifer berlapis banyak, keterusan sedang sampai rendah, kedalaman muka air bawah tanah beragam umumnya dekat permukaan tanah, debit sumur umumnya kurang dari 5 l/dt.
 - d. *Akuifer* berproduksi sedang dengan penyebaran setempat
Akuifer dangkal, keterusan sedang sampai rendah, debit sumur umumnya kurang dari 5 lt/dt.
2. *Akuifer* dengan aliran melalui celahan dan ruang antar butir
 - a. *Akuifer* produktif tinggi dengan penyebaran luas
Akuifer dengan keterusan dan kisaran kedalaman muka air *bawah tanah* sangat beragam, debit umumnya lebih dari 5 l/dt, pemunculan mata air banyak dijumpai, beberapa debitnya mencapai lebih dari 500 l/dt, terutama yang muncul dari lava vesikuler.
 - b. *Akuifer* produktif sedang dengan penyebaran luas
Akuifer dengan keterusan sangat beragam, kedalaman muka air *bawah tanah* umumnya dalam, debit umumnya kurang dari 5 l/dt, mata air umumnya berdebit sedang, muncul terutama pada daerah lekuk lereng
 - c. *Akuifer* produktif dengan penyebaran setempat
Akuifer dengan keterusan sangat beragam, umumnya air bawah tanah *yang tidak* dimanfaatkan karena dalam dan mempunyai penyebaran secara setempat.
3. *Akuifer* bercelah atau sarang produktifitas kecil dan daerah air bawah tanah langka
 - a. *Akuifer* produktifitas kecil dengan penyebaran setempat
Pada umumnya keterusan sangat rendah, setempat air bawah tanah dalam dan dapat ditemui pada bagian lembah, terdapat pada zona lapukan batuan padu.

b. Air bawah tanah langka

Terdapat pada bukit-bukit atau daerah yang mempunyai kualitas air jelek.

Hidrogeologi di wilayah Kabupaten Klaten dibedakan menjadi:

1. Akuifer produktif terdapat setempat;
2. Akuifer dengan produktivitas sedang dan penyebaran luas;
3. Akuifer dengan produktivitas sedang terdapat setempat;
4. Akuifer dengan produktivitas tinggi dan penyebaran luas;
5. Akuifer produktif dengan penyebaran luas; dan
6. Daerah air tanah langka.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.6.
Peta Hidrogeologi Kabupaten Klaten Klimatologi

Menurut pengamatan iklim di stasiun KBB Klaten, Kecamatan Klaten Tengah curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Februari 2020, yaitu 492 mm dengan 16 hari hujan. Sedangkan curah hujan terendah yaitu pada Bulan Juli sebanyak 1 mm dalam 1 hari hujan.

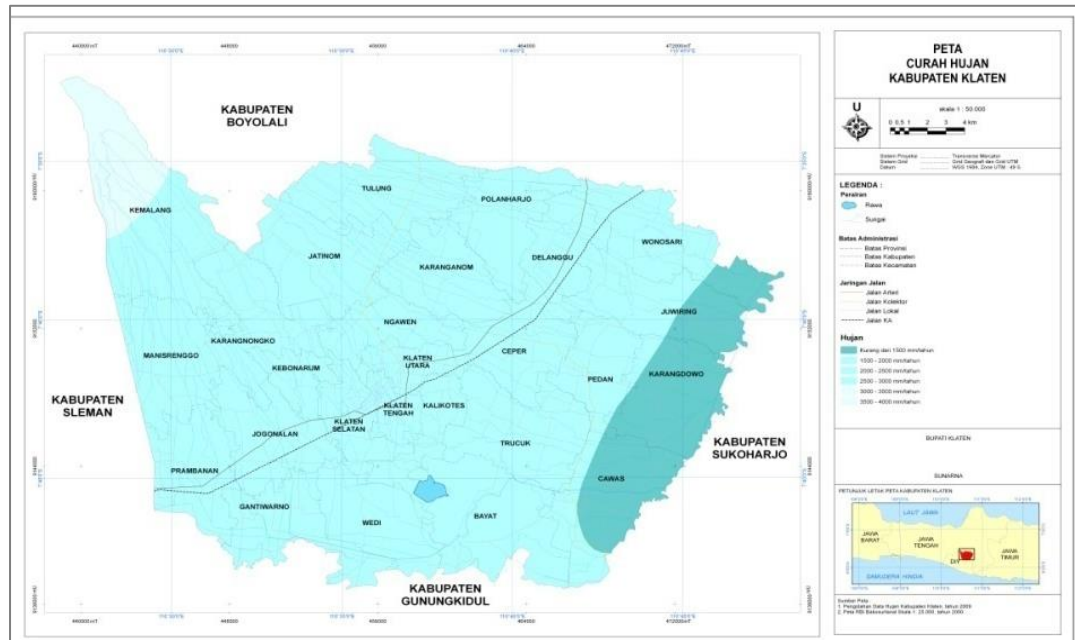
Tabel 2.3
Curah Hujan Menurut Bulan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
Januari	281	17
Februari	492	16
Maret	246	19
April	264	12
Mei	34	8
Juni	22	2
Juli	1	1
Agustus	45	1
September	45	3
Oktober	66	3
November	389	12

Bulan	Jumlah Curah Hujan	Jumlah Hari Hujan
Desember	314	22

Sumber : Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2021

Curah hujan yang tinggi dapat bermanfaat untuk menambah sumber air terutama untuk pertanian, namun di sisi lain dapat menjadi bencana jika kapasitas aliran air melebihi kapasitas saluran drainase yang ada.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.7.
Peta Klimatologi Kabupaten Klaten

2.1.6. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten meliputi lahan sawah dan lahan bukan sawah. Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten luasnya mencapai 34.682,71 ha yang tersebar di seluruh wilayah Kabupaten Klaten. Untuk lahan non sawah di Kabupaten Klaten terdiri dari penggunaan lahan industri, perdagangan dan perkantoran, permukiman, hutan, ladang/ tegalan dan perairan.

Penggunaan lahan pertanian selama 5 (lima) tahun terakhir yaitu Tahun 2016-2020 terjadi perubahan pola penggunaan lahan sawah irigasi. Penggunaan lahan sawah pada tahun 2016 sebesar 33.066 Ha, tahun 2017 sebesar 33.021 Ha, tahun 2018 sebesar 31.943 Ha, tahun 2019 menjadi 31.943 Ha dan tahun 2020 menjadi sebesar 34.628,71 Ha. Perubahan luas Kabupaten Klaten secara administrasi menjadi 70.150,02 Ha di tahun 2020, hal ini berdasarkan pada hasil pengecekan lapangan dan peta administrasi yang mendapat persetujuan Badan Informasi Geospasial (BIG) serta kesepakatan dengan Kementerian ATR/ BPN.

Pada tahun 2016 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,392 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 33,058 Ha; Industri 8,910 Ha; Perusahaan 0,113 Ha, dan Jasa 3,311 Ha. Tahun 2017 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 45,7611 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 40,298 Ha; Industri 4,515 Ha, dan Jasa 0,948 Ha. Tahun 2018 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 63,381 Ha, dengan rincian peruntukan:

Perumahan 48,897 Ha; Industri 13,744 Ha; dan Jasa 0,740 Ha. Tahun 2019 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian seluas 81,700 Ha, dengan perincian peruntukan: Perumahan 55,500 Ha; Industri 18,200 Ha; Perusahaan 0,500 Ha dan Jasa 7,500 Ha. Sedangkan pada tahun 2020 perubahan luasan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian mencapai 93,180 Ha, dengan rincian peruntukan: Perumahan 56,104 Ha; Industri 10,332 Ha; Perusahaan 25,516 Ha dan jasa 1,228. Sebaran penggunaan lahan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Penggunaan Lahan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Kecamatan	Permukiman	Industri, Perdagangan dan Perkantoran	Hutan	Ladang/ Tegalan	Sawah	Perairan	Jumlah
1	Prambanan	1.074,74	38,23	0	16,29	1.447,78	32,42	2.609,45
2	Gantiwarno	707,22	0,00	0	73,63	1.841,83	21,76	2.644,44
3	Wedi	930,73	0,00	0	38,64	1.648,62	7,56	2.625,54
4	Bayat	1.860,02	0,00	631,17	341,52	1.189,55	187,70	4.209,96
5	Cawas	1.174,09	0,00	0	33,25	2.367,14	19,05	3.593,53
6	Trucuk	1.382,45	3,92	0	75,22	2.003,37	3,54	3.468,50
7	Kalikotes	598,36	1,74	17,55	15,48	767,88	9,75	1.410,76
8	Kebonarum	256,63	12,35	0	0,78	767,91	3,95	1.041,62
9	Jogonalan	1.058,27	27,40	0	8,30	1.640,93	25,02	2.759,92
10	Manisrenggo	1.168,64	0,00	0	239,80	1.612,47	39,36	3.060,27
11	Karangnongko	1.133,70	0,00	0	976,59	835,01	3,86	2.949,16
12	Ngawen	652,81	0,53	0	0,00	1.189,38	2,76	1.845,49
13	Ceper	866,14	173,89	0	132,84	1.402,36	1,44	2.576,67
14	Pedan	797,16	7,78	0	332,32	861,51	1,13	1.999,90
15	Karangdowo	844,79	0,00	0	42,04	2.183,60	10,28	3.080,70
16	Juwiring	940,46	19,85	0	55,45	2.063,39	10,86	3.090,02
17	Wonosari	931,84	8,76	0	91,10	2.291,19	17,17	3.340,05
18	Delanggu	601,90	26,42	0	103,10	1.269,80	1,78	2.003,01
19	Polanharjo	560,65	11,88	0	0,00	1.885,53	63,51	2.521,57
20	Karanganom	727,02	8,14	0	63,14	1.757,26	6,11	2.561,67
21	Tulung	1.007,36	4,01	0	691,01	1.717,66	23,95	3.443,99
22	Jatinom	1.361,19	0,00	0	1.799,43	549,67	0,68	3.710,97
23	Kemalang	2.376,44	0,00	901,22	2.583,03	53,80	104,43	6.018,93
24	Klaten Selatan	673,24	5,30	0	14,59	812,81	3,16	1.509,11
25	Klaten Tengah	606,04	26,54	0	35,88	289,15	1,83	959,45
26	Klaten Utara	742,94	52,48	0	88,10	233,10	0,73	1.117,35
Jumlah		25.034,83	429,21	1.549,94	7.851,53	34.682,71	603,81	70.152,02

Sumber : DPUPR, 2021

2.1.7. Potensi Kemampuan Lahan

Berdasarkan hasil analisis kemampuan lahan (tingkat kelas, sub kelas, dan unit pengelolaan) dalam dokumen KLHS RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031, dapat ditentukan nilai potensi kemampuan lahan di Kabupaten Klaten menjadi 3 kelas, yaitu:

1. Tinggi

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan yang tinggi, dengan karakteristik :

- a. Faktor kemiringan lereng dari datar hingga agak miring, memberikan kemudahan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan;
- b. Semakin datar bentuk topografi permukaan lahan, semakin sedikit ancaman terhadap erosi, drainase baik, kapasitas menahan air baik sehingga tanah menjadi gembur dengan kedalaman efektif solum tanah yang dalam;
- c. Meskipun potensi genangan air dan banjir semakin besar untuk daerah-daerah tertentu dengan topografi datar dan dekat dengan sungai, namun berdampak positif pada rendahnya muka air tanah;
- d. Pada daerah-daerah dengan topografi datar hingga agak miring, cenderung memiliki jenis tanah hasil pelapukan, sehingga lebih gembur dan mudah diolah; dan
- e. Pertanian tanaman musiman mudah sekali berkembang dengan periode produksi yang lebih singkat.

2. Sedang

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan sedang, dengan karakteristik :

- a. Pada lahan dengan topografi miring hingga agak curam biasanya terjadi pembatasan pemanfaatan lahan;
- b. Pada fisik lahan seperti ini pemanfaatan lahan seperti bangunan permukiman sangat terbatas karena potensi longsor cukup besar. Pemanfaatan lahan untuk pertanian juga sangat terbatas untuk jenis tanaman tertentu;
- c. Tanaman-tanaman yang tidak terlalu membutuhkan proses pengolahan tanah yang sering, tahan terhadap cuaca, tahan terhadap keterbatasan air, dan memiliki perakaran yang kuat lebih cocok untuk kawasan ini; dan
- d. Kondisi seperti ini juga mendukung untuk jenis tanaman tahunan yang periode produksinya cukup panjang.

3. Rendah

Merupakan kawasan dengan potensi kemampuan lahan rendah, dengan karakteristik :

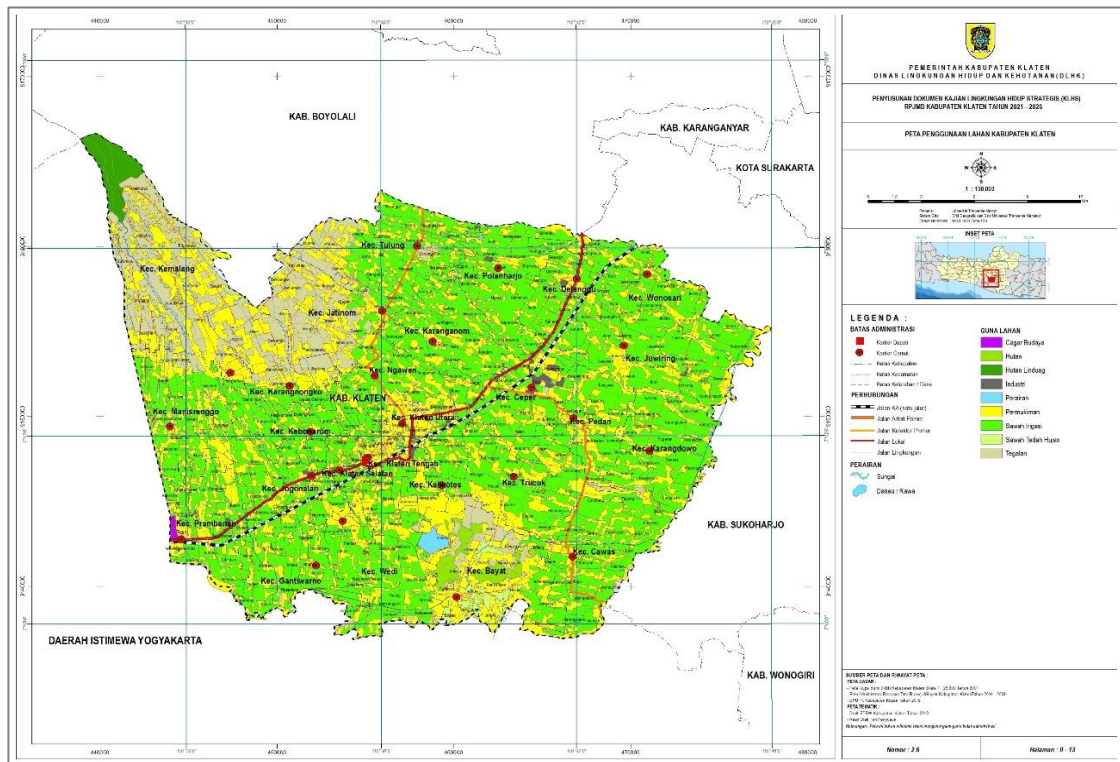
- a. Faktor kemiringan lereng dari curam hingga sangat curam memberikan banyak hambatan dalam penggunaan berbagai jenis pemanfaatan lahan;
- b. Semakin curam bentuk topografi permukaan lahan, semakin besar ancaman terhadap longsor, drainase buruk, kapasitas menahan air tidak baik sehingga tanah menjadi mudah tandus; dan
- c. Kedalaman efektif solum tanah yang tipis menjadikan lapisan atas permukaan tanah menjadi mudah terkikis sehingga hampir sebagian besar daerah seperti ini memiliki jenis tanah dengan sifat fisik batuan induk yang keras dan mudah untuk menyerap air tanpa bisa menahan air.

Potensi kemampuan lahan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel Potensi Kemampuan Lahan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.5
Potensi Kemampuan Lahan Di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Potensi Kemampuan Lahan (Ha)			Jumlah (Ha)
		Tinggi	Sedang	Rendah	
1	Bayat	3.030,4	1.207,6	-	4.238,0
2	Cawas	3.606,1	8,8	-	3.615,0
3	Ceper	2.566,7	8,1	-	2.574,8
4	Delanggu	1.977,7	26,2	-	2.003,9
5	Gantiwarno	2.433,2	228,6	-	2.661,8
6	Jatinom	3.498,0	152,5	-	3.650,5
7	Jogonalan	2.706,3	-	-	2.706,3
8	Juwiring	3.100,4	-	-	3.100,4
9	Kalikotes	1.391,6	-	-	1.391,6
10	Karanganom	2.559,0	-	-	2.559,0
11	Karangdowo	3.085,6	-	-	3.085,6
12	Karangnongko	2.916,9	65,4	-	2.982,3
13	Kebonarum	1.035,5	-	-	1.035,5
14	Kemalang	626,6	4.379,4	885,2	5.891,1
15	Klaten Selatan	1.525,6	-	-	1.525,6
16	Klaten Tengah	956,5	-	-	956,5
17	Klaten Utara	1.118,0	-	-	1.118,0
18	Manisrenggo	2.978,2	120,3	-	3.098,5
19	Ngawen	1.817,2	-	-	1.817,2
20	Pedan	1.998,6	-	-	1.998,6
21	Polanharjo	2.492,3	53,3	-	2.545,6
22	Prambanan	2.592,8	10,4	-	2.603,2
23	Trucuk	3.467,7	0,9	-	3.468,6
24	Tulung	3.367,7	63,6	-	3.431,3
25	Wedi	2.575,2	61,0	-	2.636,2
26	Wonosari	3.328,3	-	-	3.328,3

Sumber : Dokumen KLHS RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.8.
Peta Penggunaan Lahan Kabupaten Klaten

2.1.8. Kondisi Lingkungan Hidup

Kabupaten Klaten memiliki keanekaragaman spesies dan genetik yang menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih memiliki keanekaragaman hayati. Kabupaten Klaten memiliki 3 (tiga) jenis ekosistem berdasarkan kondisi geomorfologinya, yaitu lereng Gunung Merapi yang membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung; dataran rendah meliputi Kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom dan Polanharjo; dan perbukitan/gunung kapur yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas dan sebagian Gantiwarno.

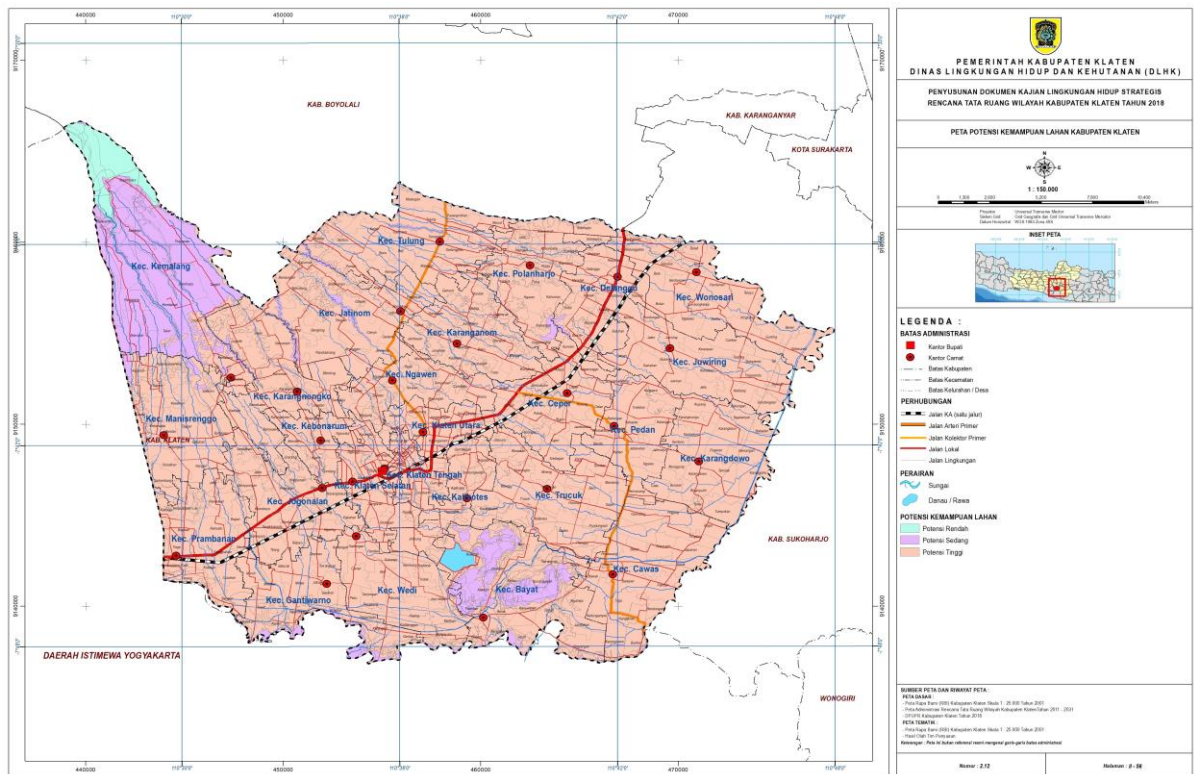
Upaya perlindungan dan pelestarian potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten dilakukan melalui :

1. Lereng Gunung Merapi:
 - a. Penyusunan rencana tata ruang Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya;
 - b. Pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Gunung Merapi dan sekitarnya;
 - c. Penyusunan rencana rinci kawasan resapan air;
 - d. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan resapan air;
 - e. Pembuatan sumur resapan;
 - f. Pelestarian hutan dan reboisasi;
 - g. Gerakan rehabilitasi lahan;
 - h. Pengaturan penambangan pasir dan batu;
 - i. Pendirian hunian tetap (huntap);
 - j. Pembangunan jalur dan sarana evakuasi; dan

- k. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.
2. Dataran rendah:
 - a. Mengarahkan pembangunan dan pengembangan kawasan terbangun pada lahan yang bukan kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
 - b. Menetapkan kawasan lahan pertanian pangan berkelanjutan;
 - c. Mengembangkan produktivitas pertanian;
 - d. Mengendalikan alih fungsi lahan pertanian pangan berkelanjutan; dan
 - e. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.
3. Perbukitan/pegunungan
 - a. Pengolahan sistem terassering dan vegetasi yang mampu menahan dan meresapkan air;
 - b. Gerakan rehabilitasi lahan; dan
 - c. Konservasi hayati dengan penangkaran dan perlindungan habitat.

Beberapa jenis-jenis spesies genetik yang teridentifikasi sebagai keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten diantaranya (*Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026*) :

1. Jenis yang belum diperdagangkan, misalnya :
 - a. Jenis tumbuhan palem raja, palem jawa, dan anggrek jiwa.
 - b. Jenis satwa seperti kuntul bangau, burung hantu, dan ikan gabus.
2. Jenis yang sudah bernilai ekonomi, misalnya :
 - a. Jenis tumbuhan kemuning, dan mindi.
 - b. Jenis satwa : sriti, jalak bali, ikan nila, dan ikan lele.
3. Jenis keanekaragaman hayati di wilayah Taman Nasional Gunung Merapi Kabupaten Klaten (Kecamatan Kemalang), misalnya :
 - a. Satwa liar yang dilindungi : elang alap cina, elang jawa, dan lutung jawa.
 - b. Satwa liar tidak dilindungi : bajing, dan tikus.
4. Jenis yang sudah dibudidayakan, misalnya :
 - a. Tanaman pangan: padi, jagung, dan kedelai.
 - b. Perkebunan: kelapa dalam, dan cengkeh.
 - c. Holtikultura: bawang merah, kubis, alpukat, dan belimbing.
 - d. Pakan ternak: rumput gajah, dan lamtoro gung.
 - e. Obat dan rempa: cengkeh, dan lada.
 - f. Tanaman bahan baku industri: tebu, dan tembakau.
 - g. Peternakan: sapi, dan kambing.
 - h. Kehutanan: jati, dan mahoni.
 - i. Perikanan: nila, dan tawes.
5. Pengetahuan tradisional
 Pengetahuan tradisional dimaksud sebagai suatu pengetahuan yang dimiliki oleh komunal atau masyarakat daerah dan tradisi yang sifatnya turun menurun. Jenis kearifan lingkungan yang diterapkan masyarakat antara lain pelestarian mata air, dan perlindungan sungai/waduk.



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Gambar 2.9.
Peta Potensi Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten

Kondisi lingkungan hidup di Kabupaten Klaten secara umum adalah sebagai berikut (Sumber: Dokumen KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026).

1. Kondisi Ekoregion
 - a. Jenis ekoregion di Kabupaten Klaten diantaranya Dataran Fluvio-vulkan Material Piroklastik, Perbukitan Solusional Karst Jiwohayat Batugamping Terumbu, Perbukitan Struktural Patahan Jiwohayat Batuan Gunungap Tua, Lerengkaki Perbukitan Struktural Patahan Baturagung Batuan Gunungapi Tua, Kerucut Gunungapi Merapi Material Piroklastik, Kaki Gunungapi Merapi Material Piroklastik dan Dataran Kaki Gunungapi Material Piroklastik.
 - b. Jenis ekoregion yang mendominasi adalah Dataran Fluvio-vulkan Material Piroklastik yaitu seluas 50.726,93 Ha atau 72,44 % dari total ekoregion di Kabupaten Klaten.

2. Potensi Ketersediaan Pangan
 - a. Produksi tanaman pangan di Kabupaten Klaten selama tahun 2016 sampai 2019 mengalami perkembangan yang fluktuatif.
 - b. Produksi tanaman pangan tertinggi pada komoditas padi yang merupakan makanan pokok masyarakat Kabupaten Klaten.

3. Potensi Ketersediaan Air
 - a. Luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 1.608 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI)

- b. Secara kewenangan, ada 2 (dua) DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 (lima) DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten.
- c. Sementara sumber air baku di Kabupaten Klaten berasal dari sumber mata air yang berjumlah 69 mata air, waduk, embung dan sungai sejumlah 80 aliran.
4. Kondisi pengelolaan sampah Jumlah perkiraan timbunan sampah per hari tahun 2020 di Kabupaten Klaten sebesar 398.273,1 ton.
5. Indek Kualitas Lingkungan Hidup
- a. Kualitas dan Mutu Air Sungai Berdasarkan uji kualitas air pengambilan sampel dilakukan beberapa titik sungai antara lain Soran, Pusur, Kroman, Merbung, Modin, Kacang Ijo, Dengkeng, Bengawan Solo, beberapa parameter air yang masih memenuhi baku mutu untuk semua sungai yang disampel di Kabupaten Klaten adalah: TDS, TSS, NO₃-N*, As, Co, Boron, Cd*, Cr₆, Pb, Zn, Klorida*, Sianida (CN), dan F. Kondisi sungai dengan kualitas air paling rendah yaitu Sungai Kacang Ijo, kondisi tersebut digambarkan sungai tersebut mempunyai parameter paling banyak yang tidak memenuhi baku mutu air berupa pH*, BOD*, COD*, DO*, Total Fosfat sbg P, Belerang sebagai H₂S. dan Deterjen sebagai MBAS.
- b. Kualitas Udara Untuk melihat kualitas udara di Kabupaten Klaten dapat digambarkan berdasarkan pengukuran udara yang dilakukan di 3 titik sampel yaitu Halaman depan Kantor Pemda Klaten, Taman Perumda Gergunung, Halaman Masjid Al Aqsha Klaten menunjukkan parameter NO₂ dan O₃, maupun SO₂ masih dalam kategori baik, sedangkan CO dalam kategori berbahaya karena rentang ISPU terhitung ialah di atas 500. Tingginya konsentrasi CO disebabkan oleh banyaknya jumlah dan kepadatan kendaraan serta kinerja lalu lintas di Kabupaten Klaten.
- c. Tata guna lahan
- Kabupaten Klaten memiliki lahan kritis yang terletak di Kecamatan Kemalang, Jatinom, Karangnongko, dan Manisrenggo. Luas lahan kritis sebesar 133,01 Ha, lahan sedang/ agak kritis ± 80,34 Ha, sangat kritis ± 696,43 Ha, dan potensial kritis seluas ± 526 Ha
 - Perubahan lahan yang terjadi dalam rentang waktu tahun 2009 hingga 2017 sebesar 0,3 % (dari lahan pertanian menjadi lahan non pertanian).

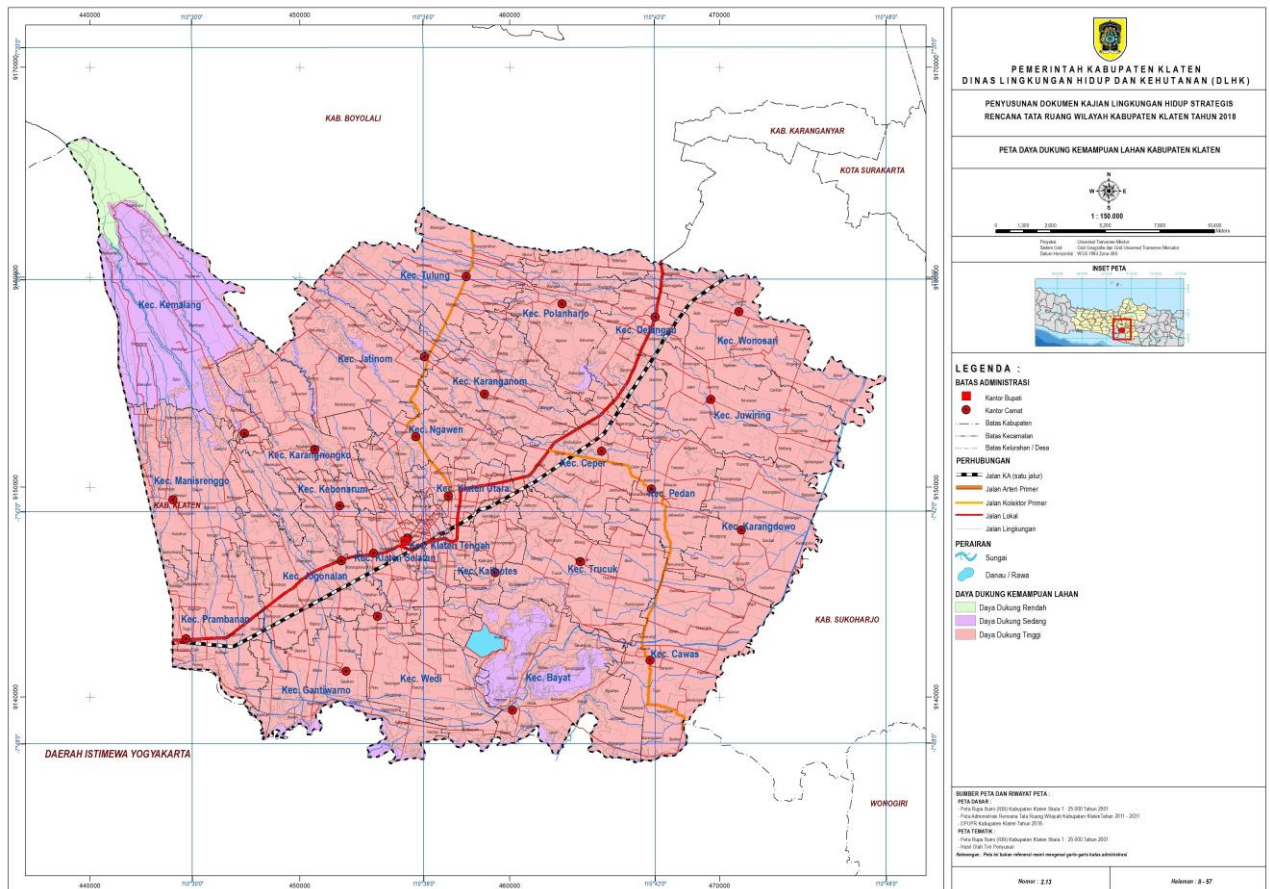
6. Kajian Muatan KLHS

- a. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan
- Daya dukung lahan pada Tahun 2019 S_L (328.063 Ha) > D_L , (301.450 Ha) dan tahun 2030 S_L (169.307 Ha) > D_L , (164.614 Ha). Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan surplus daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.
 - Ketersediaan air maksimal di Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 875.095.074,88 m³/tahun dengan kebutuhan air sebesar 325.470.283,88 m³/tahun, sedangkan pada tahun 2030 ketersediaan air maksimal sebesar 804.593.793,12 m³/tahun dengan kebutuhan air sebesar 328.806.846,19 m³/tahun. Ketersediaan air lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan air, sehingga daya dukung air di Kabupaten Klaten dinyatakan *surplus*.
 - Daya dukung lahan sawah dari tahun 2018 sampai akhir tahun 2030 daya dukung lahan sawah mempunyai nilai $\alpha > 1$, yang berarti bahwa Kabupaten Klaten mampu swasembada pangan.
- b. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup
- Terjadi peningkatan populasi penduduk yang menyebabkan produksi sampah yang juga mengalami peningkatan. Peningkatan produksi sampah akan berdampak negative pada lingkungan hidup jika tidak disertai dengan upaya pengelolaan sampah yang baik.
- c. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam
- Efisiensi pemanfaatan sumberdaya alam yang dilakukan Kabupaten Klaten antara lain :
- Efisiensi pemanfaatan yang dilakukan bersumber dari hasil hutan kayu dan hasil hutan non-kayu
 - Pelaksanaan program pengendalian pemanfaatan ruang monitoring dan pengendalian bangunan, penyusunan rencana detail tata ruang, perencanaan dan koordinasi rencana tata ruang, survei dan pemetaan, penyusunan KLHS RDTR, penyusunan NSPK pemanfaatan ruang dan manual pemanfaatan ruang, pengawasan pemanfaatan ruang sehingga tercapai efisiensi dalam pemanfaatan ruang dan pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.
 - Pembinaan kepada masyarakat dalam pelaksanaan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi keanekaragaman hayati melalui kearifan lokal
 - Pelaksanaan program pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- d. Kinerja layanan/jasa ekosistem
- Penyediaan air berbasis jasa ekosistem, sekitar 52% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang tinggi terhadap penyediaan air. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja jasa pelayanan ekosistem penyedia air cukup mampu dalam

memenenuhi penyediaan air.

- Penyediaan pangan berbasis jasa ekosistem, sekitar 48% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang sangat tinggi terhadap penyediaan bahan pangan. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Klaten mampu dalam pemenuhan kebutuhan beras secara mandiri.
- Sekitar 50% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem sedang dan 22% luasan termasuk jasa ekosistem sangat rendah. Hal ini berarti bahwa Kabupaten Klaten masih mampu menyediakan ruang hidup untuk tumbuh dan berkembang bagi makhluk hidup yang ada di dalamnya.

- e. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim
- Kabupaten Klaten berdasarkan data SIDIK sebanyak 311 desa termasuk pada indeks kerentanan rendah. Hal ini berarti bahwa kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim di Kabupaten Klaten dalam kondisi baik dengan adaptasi yang tinggi.
- f. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati
- Kabupaten Klaten memiliki keanekaragaman spesies dan genetik yang menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten masih memiliki keanekaragaman hayati. Upaya perlindungan dan pelestarian potensi keanekaragaman hayati di Kabupaten Klaten dilakukan melalui :
- Lereng Gunung Merapi
 - Dataran rendah
 - Perbukitan/pegunungan



Sumber: KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Gambar 2.10.
Peta Daya Dukung Kemampuan Lahan Kabupaten Klaten

2.1.9. Potensi Pengembangan Wilayah

Potensi pengembangan wilayah disusun dengan mengacu pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2041, serta memperhatikan kondisi eksisting wilayah di Kabupaten Klaten diarahkan dengan memperhatikan pola ruang yang meliputi kawasan lindung dan kawasan budidaya, dengan penjelasan sebagai berikut:

A. Kawasan Lindung terdiri atas:

1. Badan Air
Dengan luas kurang lebih 455 Ha, terdapat di: Kecamatan Bayat; Kecamatan Cawas; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Johonalan; Kecamatan Juwiring; Kecamatan Karangdowo; Kecamatan Kemalang; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Prambanan; Kecamatan Trucuk; Kecamatan Wedi dan Kecamatan Wonosari.
2. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, berupa kawasan hutan lindung dengan luas kurang lebih 56 (lima puluh enam) hektare terdapat di Kecamatan Bayat.
3. Kawasan konservasi, berupa kawasan pelestarian alam, berupa taman nasional berupa taman nasional gunung merapi dengan luas kurang lebih 901 (sembilan ratus satu) hektare terdapat di Kecamatan Kemalang
4. Kawasan lindung geologi, berupa kawasan cagar alam geologi, berupa Kawasan Keunikan Batuan dan Fosil dengan luas kurang lebih 7 (tujuh) hektare terdapat di Kecamatan Bayat. Kawasan cagar alam

- geologi ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.
5. Kawasan cagar budaya, dengan luas kurang lebih 78 (tujuh puluh delapan) hektare meliputi:
 - a. Candi Bubrah, Candi Lumbung, Candi Sewu, Candi Lor/ Candirejo, Candi Asu/Gana, Candi Plaosan Lor, Candi Plaosan Kidul, dan Candi Sojiwan, di Kecamatan Prambanan;
 - b. Candi Karangnongko dan Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
 - c. Kawasan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
 - d. Kawasan Pesanggrahan Paku Buwono X;
 - e. Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
 - f. Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari;
 - g. Makam Panembahan Romo di Kecamatan Klaten Selatan;
 - h. Makam Kyai Melati di Kecamatan Klaten Tengah;
 - i. Makam Ronggowarsito di Kecamatan Trucuk; dan
 - j. Makam Syeh Domba di Kecamatan Bayat.

B. Kawasan Budidaya; terdiri atas:

1. Badan jalan, dengan luas kurang lebih 375 (tiga ratus tujuh puluh lima) hektare terdapat di: Kecamatan Ceper; Kecamatan Delanggu; Kecamatan Jogonalan; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Polanharjo; dan Kecamatan Prambanan.
2. Kawasan hutan produksi, terdiri atas:
 - a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas, dengan luas kurang lebih 199 (seratus sembilan puluh sembilan) Ha, terdapat di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Wedi.
 - b. Kawasan Hutan Produksi Tetap, dengan luas kurang lebih 394 (tiga ratus sembilan puluh empat) hektare terdapat di Kecamatan Bayat dan Kecamatan Kalikotes.
3. Kawasan Perkebunan Rakyat, dengan luas kurang lebih 2.330 (dua ribu tiga ratus tiga puluh) Ha terdapat di Kecamatan Bayat; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kemalang; dan Kecamatan Manisrenggo.
4. Kawasan pertanian, terdiri atas:
 - a. Kawasan Tanaman Pangan, dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare terdapat diseluruh kecamatan. Ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan dengan luas kurang lebih 32.000 (tiga puluh dua ribu) hektare.
 - b. Kawasan Peternakan, dengan luas kurang lebih 250 (dua ratus lima puluh) hektare terdapat di: Kecamatan Bayat; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Jatinom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kemalang; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Prambanan; dan Kecamatan Tulung.
5. Kawasan perikanan, berupa Kawasan Perikanan Budi Daya, dengan luas kurang lebih 91 (sembilan puluh satu) hektare terdapat di Kecamatan Ceper; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Kalikotes; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangnongko; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Manisrenggo; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Polanharjo; Kecamatan Prambanan; dan Kecamatan Tulung.

6. Kawasan pertambangan dan energi, berupa Kawasan pertambangan mineral berupa Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan dengan luas kurang lebih 88 (delapan puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Jatinom dan Kecamatan Tulung.
7. Kawasan Peruntukan Industri
Kawasan Peruntukan Industri dengan luas kurang lebih 1.671 (seribu enam ratus tujuh puluh satu) hektare terdapat di: Kecamatan Bayat; Kecamatan Cawas; Kecamatan Ceper; Kecamatan Delanggu; Kecamatan Gantiwarno; Kecamatan Jatinom; Kecamatan Jogonalan; Kecamatan Juwiring; Kecamatan Kalikotes; Kecamatan Karanganom; Kecamatan Karangdowo; Kecamatan Kebonarum; Kecamatan Klaten Selatan; Kecamatan Klaten Tengah; Kecamatan Klaten Utara; Kecamatan Ngawen; Kecamatan Pedan; Kecamatan Polanharjo; Kecamatan Prambanan; Kecamatan Trucuk; Kecamatan Tulung; Kecamatan Wedi; dan Kecamatan Wonosari.
8. Kawasan Pariwisata, dengan luas kurang lebih 19 (sembilan belas) hektare terdiri atas:
 - a. Kawasan pariwisata alam, terdapat di:
 - 1). Batu Putih di Kecamatan Bayat;
 - 2). Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
 - 3). Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;
 - 4). Bukit Sidoguro di Kecamatan Bayat;
 - 5). Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
 - 6). Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
 - 7). Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
 - 8). Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
 - 9). Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
 - 10). Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
 - 11). Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganom;
 - 12). Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
 - 13). Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
 - 14). Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
 - 15). Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
 - 16). Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
 - 17). Girpasang di Kecamatan Kemalang;
 - 18). Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
 - 19). Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
 - 20). Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
 - 21). Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
 - 22). Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
 - 23). Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
 - 24). Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
 - 25). Pusur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - 26). Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
 - 27). Obyek Mata Air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung;
 - 28). Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
 - 29). Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.
 - 30). Batu Putih di Kecamatan Bayat;
 - 31). Bukit Cinta di Kecamatan Bayat;
 - 32). Bukit Patrum di Kecamatan Bayat;

- 33). Bukit Sidoguro di Kecamatan Bayat;
- 34). Jombor Permai di Kecamatan Bayat;
- 35). Kawah Putih di Kecamatan Bayat;
- 36). Kawasan Lindung Geologi di Kecamatan Bayat;
- 37). Kebon Asri di Kecamatan Bayat;
- 38). Pesona Puncak Arjuna di Kecamatan Bayat;
- 39). Watu Sepur di Kecamatan Bayat;
- 40). Pemandian Jolotundo di Kecamatan Karanganyar;
- 41). Umbul Brintik di Kecamatan Kebonarum;
- 42). Umbul Brondong di Kecamatan Kebonarum;
- 43). Umbul Pluneng Tirtomulyani di Kecamatan Kebonarum;
- 44). Umbul Pluneng Tirtomulyono di Kecamatan Kebonarum;
- 45). Deles Indah di Kecamatan Kemalang;
- 46). Girpasang di Kecamatan Kemalang;
- 47). Kalitalang di Kecamatan Kemalang;
- 48). Umbul Gedaren di Kecamatan Jatinom;
- 49). Umbul Susuhan di Kecamatan Ngawen;
- 50). Umbul Besuki di Kecamatan Polanharjo;
- 51). Umbul Kemanten di Kecamatan Polanharjo;
- 52). Umbul Ponggok di Kecamatan Polanharjo;
- 53). Umbul Sigedang–Kapilaler di Kecamatan Polanharjo;
- 54). Pусur Tubing di Kecamatan Polanharjo;
- 55). Rivermoon Tubing di Kecamatan Polanharjo;
- 56). Obyek Mata Air Cokro (OMAC) di Kecamatan Tulung;
- 57). Umbul Nilo di Kecamatan Tulung; dan
- 58). Umbul Pelem di Kecamatan Tulung.

b. Kawasan pariwisata buatan terdapat di:

- 1). Museum Gula Jawa Tengah di Kecamatan Jogonalan;
- 2). Tirta Pelangi di Kecamatan Kalikotes;
- 3). Kolam Renang Tirta Indah di Kecamatan Klaten Selatan;
- 4). Kolam Renang Tirta Yudha Bakti di Kecamatan Klaten Selatan;
- 5). Kolam Renang Moon di Kecamatan Klaten Utara;
- 6). Prilon Park di Kecamatan Klaten Utara;
- 7). D'Wangen Ketjeh Resto di Kecamatan Polanharjo;
- 8). Kampung Dolanan Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
- 9). Kawasan Wisata Siblarak di Kecamatan Polanharjo;
- 10). Kolam Renang Tirta Kamandanu di Kecamatan Polanharjo;
- 11). Pemancingan Omah Iwak di Kecamatan Polanharjo;
- 12). Kolam Renang Pancingan 47 di Kecamatan Tulung;
- 13). Kolam Renang Lumintu 1001 di Kecamatan Polanharjo;
- 14). Kolam Renang Sumber Mina di Kecamatan Polanharjo;
- 15). Pemancingan Janti di Kecamatan Polanharjo;
- 16). Ponggok Ciblon di Kecamatan Polanharjo;
- 17). Kolam Renang Galuh Tirtonirmolo di Kecamatan Prambanan;
- 18). Kolam Renang Tirta Kencana Miri di Kecamatan Trucuk;
- 19). Aqua Regia di Kecamatan Tulung;
- 20). Kolam Renang Bale Tirta di Kecamatan Tulung;
- 21). Kolam Renang Pancingan 100 di Kecamatan Tulung;
- 22). Pesona Alam Tirta di Kecamatan Tulung;
- 23). Pemandian Lumban Tirto di Kecamatan Tulung;
- 24). Semego di Kecamatan Tulung;

- 25). Umbul Asri di Kecamatan Tulung; dan
- 26). pengembangan potensi wisata buatan lainnya di seluruh kecamatan.

c. Kawasan Pariwisata budaya, terdapat di:

- 1) Kampung Pecel Ngerangan di Kecamatan Bayat;
- 2) Makam Sunan Pandanaran di Kecamatan Bayat;
- 3) Makam Ki Ageng Gribig di Kecamatan Jatinom;
- 4) Tradisi Yaqowiyu di Kecamatan Jatinom;
- 5) Tugu Waseso dan Menoro Baskoro di Kecamatan Karanganom;
- 6) Candi Merak di Kecamatan Karangnongko;
- 7) Candi Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
- 8) Candi Asu/Gana di Kecamatan Prambanan;
- 9) Candi Bubah di Kecamatan Prambanan;
- 10) Candi Lor/Candirejo di Kecamatan Prambanan;
- 11) Candi Lumbung di Kecamatan Prambanan;
- 12) Candi Plaosan Kidul di Kecamatan Prambanan;
- 13) Candi Plaosan Lor di Kecamatan Prambanan;
- 14) Candi Sewu di Kecamatan Prambanan;
- 15) Candi Sojiwan di Kecamatan Prambanan;
- 16) Makam Ronggo Warsito di Kecamatan Trucuk;
- 17) Makam Ki Ageng Perwito di Kecamatan Wonosari; dan
- 18) Keunikan lokal sebagai desa wisata terdapat di:
 - a) Desa Wisata Gununggajah di Kecamatan Bayat;
 - b) Desa Wisata Jarum di Kecamatan Bayat;
 - c) Desa Wisata Jotangan di Kecamatan Bayat;
 - d) Desa Wisata Krakitan di Kecamatan Bayat;
 - e) Desa Wisata Ngerangan di Kecamatan Bayat;
 - f) Desa Wisata Paseban di Kecamatan Bayat;
 - g) Desa Wisata Tlingsing di Kecamatan Cawas;
 - h) Desa Wisata Pokak di Kecamatan Ceper;
 - i) Desa Wisata Glagah di Kecamatan Jatinom;
 - j) Desa Wisata Mranggen di Kecamatan Jatinom;
 - k) Desa Wisata Plawikan di Kecamatan Jogonalan;
 - l) Desa Wisata Tanjung di Kecamatan Juwiring;
 - m) Desa Wisata Jimbung di Kecamatan Kalikotes;
 - n) Desa Wisata Beku di Kecamatan Karanganom;
 - o) Desa Wisata Soropaten di Kecamatan Karanganom;
 - p) Desa Wisata Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - q) Desa Wisata Malangjiwan di Kecamatan Kebonarum;
 - r) Desa Wisata Ngrundul di Kecamatan Kebonarum;
 - s) Desa Wisata Pluneng di Kecamatan Kebonarum;
 - t) Desa Wisata Balerante di Kecamatan Kemalang;
 - u) Desa Wisata Panggang di Kecamatan Kemalang;
 - v) Desa Wisata Sidorejo di Kecamatan Kemalang;
 - w) Desa Wisata Tegalmulyo di Kecamatan Kemalang;
 - x) Desa Wisata Tlogowatu di Kecamatan Kemalang;
 - y) Desa Wisata Danguran di Kecamatan Klaten Selatan;
 - z) Desa Wisata Nglinggi Kecamatan Klaten Selatan;
 - aa) 2esa Wisata Jomboran Kecamatan Klaten Tengah;
 - bb) Desa Wisata Duwet di Kecamatan Ngawen;
 - cc) Desa Wisata Manjungan di Kecamatan Ngawen;
 - dd) Desa Wisata Nganjat di Kecamatan Polanharjo;
 - ee) Desa Wisata Pongkok di Kecamatan Polanharjo;
 - ff) Desa Wisata Sidowayah di Kecamatan Polanharjo;
 - gg) Desa Wisata Brajan di Kecamatan Prambanan;

- hh) Desa Wisata Bugisan di Kecamatan Prambanan;
- ii) Desa Wisata Kebondalem Kidul di Kecamatan Prambanan;
- jj) Desa Wisata Melikan di Kecamatan Wedi;
- kk) Desa Wisata Pasung di Kecamatan Wedi; dan
- ll) Desa Wisata Sidowarno di Kecamatan Wonosari.

9. Kawasan permukiman, terdiri atas:

- a. Kawasan Permukiman Perkotaan, dengan luas kurang lebih 10.438 (sepuluh ribu empat ratus tiga puluh delapan) hektare terdapat di seluruh kecamatan.
- b. Kawasan Permukiman Perdesaan, dengan luas kurang lebih 20.774 (dua puluh ribu tujuh ratus tujuh puluh empat) hektare terdapat di:
 - 1). Kecamatan Bayat;
 - 2). Kecamatan Cawas;
 - 3). Kecamatan Ceper;
 - 4). Kecamatan Delanggu;
 - 5). Kecamatan Gantiwarno;
 - 6). Kecamatan Jatinom;
 - 7). Kecamatan Jogonalan;
 - 8). Kecamatan Juwiring;
 - 9). Kecamatan Kalikotes;
 - 10). Kecamatan Karanganom;
 - 11). Kecamatan Karangdowo;
 - 12). Kecamatan Karangnongko;
 - 13). Kecamatan Kebonarum;
 - 14). Kecamatan Kemalang;
 - 15). Kecamatan Manisrenggo;
 - 16). Kecamatan Ngawen;
 - 17). Kecamatan Pedan;
 - 18). Kecamatan Polanharjo;
 - 19). Kecamatan Prambanan;
 - 20). Kecamatan Trucuk;
 - 21). Kecamatan Tulung;
 - 22). Kecamatan Wedi; dan
 - 23). Kecamatan Wonosari.

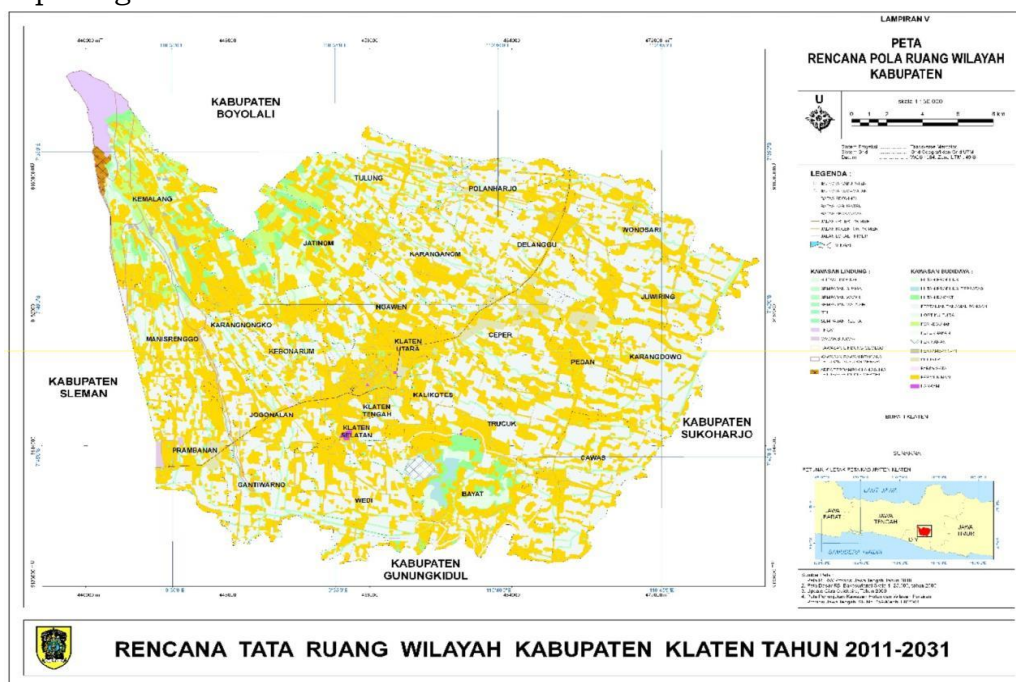
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan, meliputi:

- a. Depo Pendidikan dan Latihan Tempur (Dodiklatpur) dengan luas kurang lebih 28 (dua puluh delapan) hektare terdapat di Kecamatan Klaten Selatan;
- b. Komando Distrik Militer (Kodim) Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Tengah;
- c. Kepolisian Resor (Polres) Klaten terdapat di Kecamatan Klaten Utara;
- d. Lapangan tembak terdapat di Kecamatan Trucuk;
- e. Komando Rayon Militer (Koramil) terdapat di:
 - 1). Komando Rayon Militer 01/Kota di Kecamatan Klaten Tengah;
 - 2). Komando Rayon Militer 02/Jogonalan Kecamatan Jogonalan;
 - 3). Komando Rayon Militer 03/Delanggu di Kecamatan Delanggu;
 - 4). Komando Rayon Militer 04/Pedan di Kecamatan Pedan;
 - 5). Komando Rayon Militer 05/Jatinom di Kecamatan Jatinom;

- 6). Komando Rayon Militer 06/Kebonarum di Kecamatan Klaten Selatan;
 - 7). Komando Rayon Militer 07/Wedi di Kecamatan Wedi; dan
 - 8). Komando Rayon Militer 08/Ngawen di Kecamatan Ngawen;
 - 9). Komando Rayon Militer 09/Prambanan di Kecamatan Prambanan;
 - 10). Komando Rayon Militer 10/Gantiwarno di Kecamatan Gantiwarno;
 - 11). Komando Rayon Militer 11/Karangnongko di Kecamatan Karangnongko;
 - 12). Komando Rayon Militer 12/Manisrenggo di Kecamatan Manisrenggo;
 - 13). Komando Rayon Militer 13/Kemalang di Kecamatan Kemalang;
 - 14). Komando Rayon Militer 14/Karanganom di Kecamatan Karanganom;
 - 15). Komando Rayon Militer 15/Polanharjo di Kecamatan Polanharjo;
 - 16). Komando Rayon Militer 16/Tulung di Kecamatan Tulung;
 - 17). Komando Rayon Militer 17/Karangdowo di Kecamatan Karangdowo;
 - 18). Komando Rayon Militer 18/Bayat di Kecamatan Bayat;
 - 19). Komando Rayon Militer 19/Trucuk di Kecamatan Trucuk;
 - 20). Komando Rayon Militer 20/Cawas di Kecamatan Cawas;
 - 21). Komando Rayon Militer 21/Juwiring di Kecamatan Juwiring;
 - 22). Komando Rayon Militer 22/Wonosari di Kecamatan Wonosari.
 - 23). Komando Rayon Militer 23/Ceper di Kecamatan Ceper; dan
 - 24). Komando Rayon Militer 24/Klaten Utara di Kecamatan Klaten Utara.
- f. Kepolisian Sektor (Polsek) terdapat di:
- 1). Kecamatan Bayat;
 - 2). Kecamatan Cawas;
 - 3). Kecamatan Ceper;
 - 4). Kecamatan Delanggu;
 - 5). Kecamatan Gantiwarno;
 - 6). Kecamatan Jatinom;
 - 7). Kecamatan Jogonalan;
 - 8). Kecamatan Juwiring;
 - 9). Kecamatan Kalikotes;
 - 10). Kecamatan Karanganom;
 - 11). Kecamatan Karangdowo;
 - 12). Kecamatan Karangnongko;
 - 13). Kecamatan Kebonarum;
 - 14). Kecamatan Kemalang;
 - 15). Kecamatan Klaten Tengah;
 - 16). Kecamatan Klaten Utara;
 - 17). Kecamatan Manisrenggo;
 - 18). Kecamatan Ngawen;
 - 19). Kecamatan Pedan;
 - 20). Kecamatan Polanharjo;
 - 21). Kecamatan Prambanan;

- 22). Kecamatan Trucuk;
- 23). Kecamatan Tulung;
- 24). Kecamatan Wedi; dan
- 25). Kecamatan Wonosari.

Peta Pola Ruang untuk kawasan lindung dan kawasan budidaya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.11.
Peta Pola Ruang Kawasan Lindung dan Kawasan Budidaya
Kabupaten Klaten

2.1.10. Wilayah Rawan Bencana

Rawan bencana yang ada di Kabupaten Klaten berupa banjir, gempa bumi dan tanah longsor. Rawan bencana ini terjadi di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Bencana ini terjadi karena beberapa faktor baik faktor alam maupun kelalaian manusia. Frekuensi kejadian bencana di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 2.6
Kejadian Bencana di Kabupaten Klaten 2016-2020

Jenis Bencana	Tahun Ke				
	2016	2017	2018	2019	2020
Banjir	4	5	0	1	32
Tanah longsor	3	4	0	1	8
Puting beliung	5	12	5	6	177
Kekeringan	-	-	1	0	0
Jumlah	12	21	6	8	217

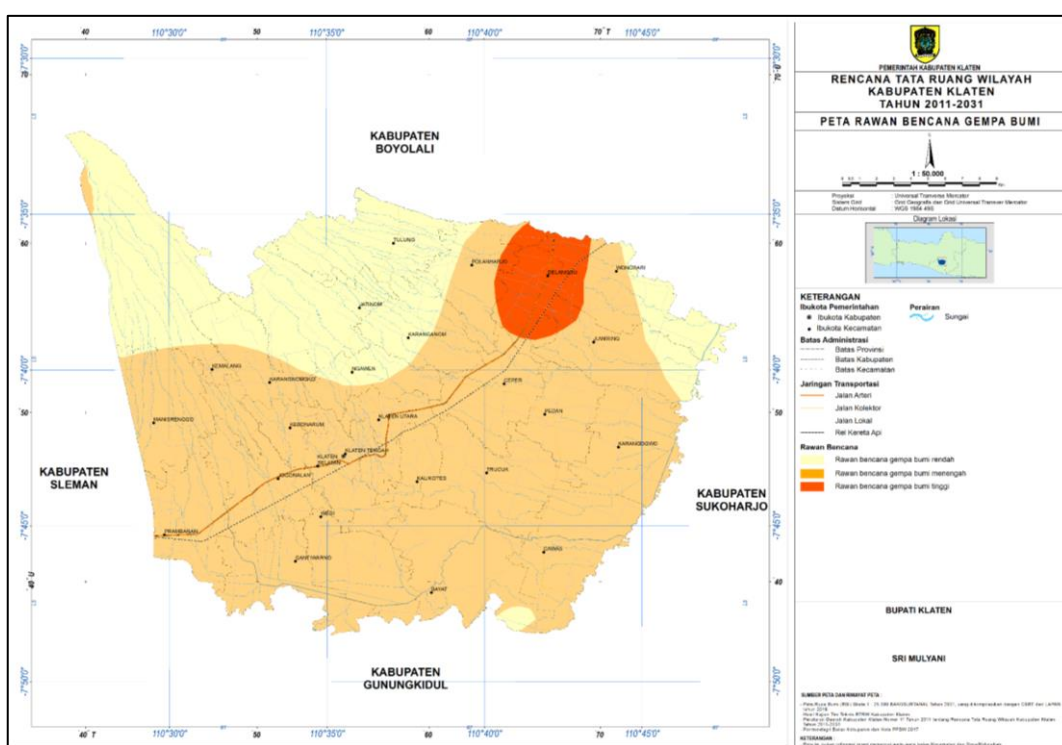
Sumber:BPBD Kab. Klaten, tahun 2021

Dari tabel tersebut terlihat bencana angin puting beliung terjadi setiap tahun di Kabupaten Klaten. Bencana tanah longsor dan banjir juga terjadi hampir setiap tahun. Pada tahun 2020 kejadian bencana sebanyak 217 kali, dimana kejadian angin puting beliung terjadi 177 kali, banjir 32 kali dan tanah

longsor 8 kali. Bencana banjir yang terjadi telah menyebabkan kerusakan bangunan (rumah, fasilitas pendidikan, dan kesehatan) serta lahan pertanian.

Pada tahun 2020, Kecamatan Cawas dan Karangdowo merupakan wilayah yang paling sering terkena banjir. Wilayah di Kabupaten Klaten yang termasuk dalam daerah rawan banjir adalah wilayah yang berada di sepanjang Sungai Bengawan Solo. Wilayah tersebut meliputi sebagian Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Wedi, Bayat, Kalikotes, Cawas, Karangdowo, Juwiring, Wonosari, Pedan, Ceper dan Trucuk.

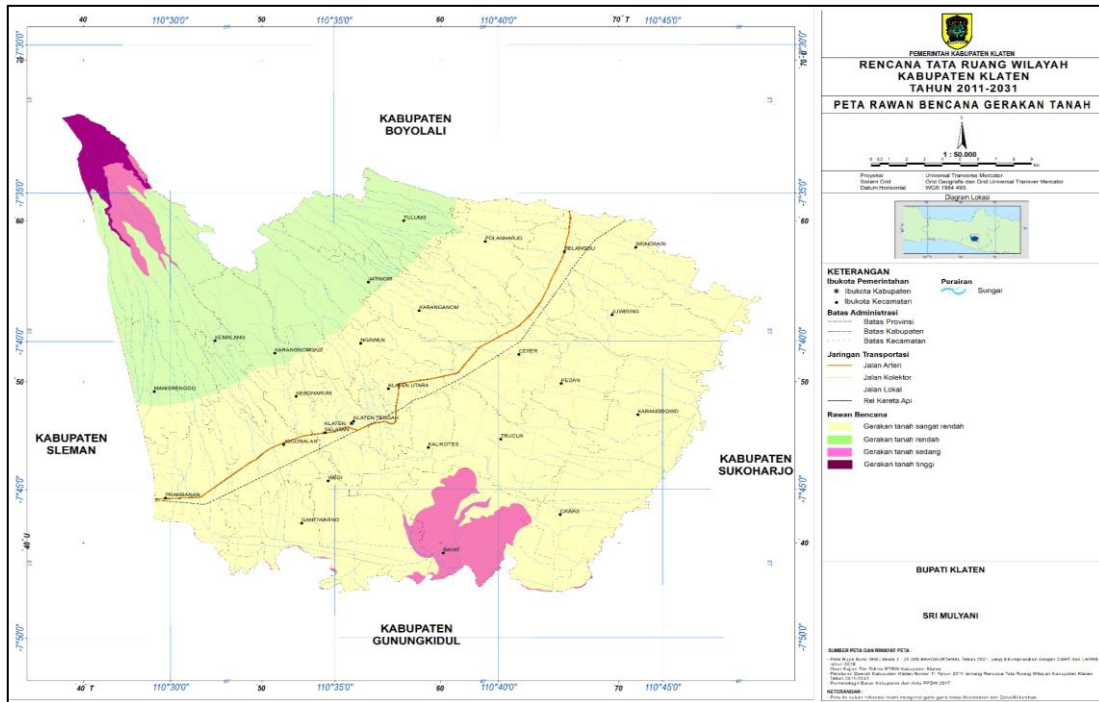
Rawan bencana lainnya yang ada di Kabupaten Klaten adalah gempa bumi dan tanah longsor. Wilayah di Kabupaten Klaten termasuk daerah rawan gempa bumi dengan klasifikasi rendah, menengah hingga tinggi. Sebagian besar wilayah termasuk dalam klasifikasi rendah dan menengah. Sebagian wilayah Kecamatan Polanharjo, Delanggu, Juwiring dan Wonosari termasuk daerah rawan bencana gempa bumi tinggi.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.12.
Peta Rawan Bencana Gempa Bumi Kabupaten Klaten

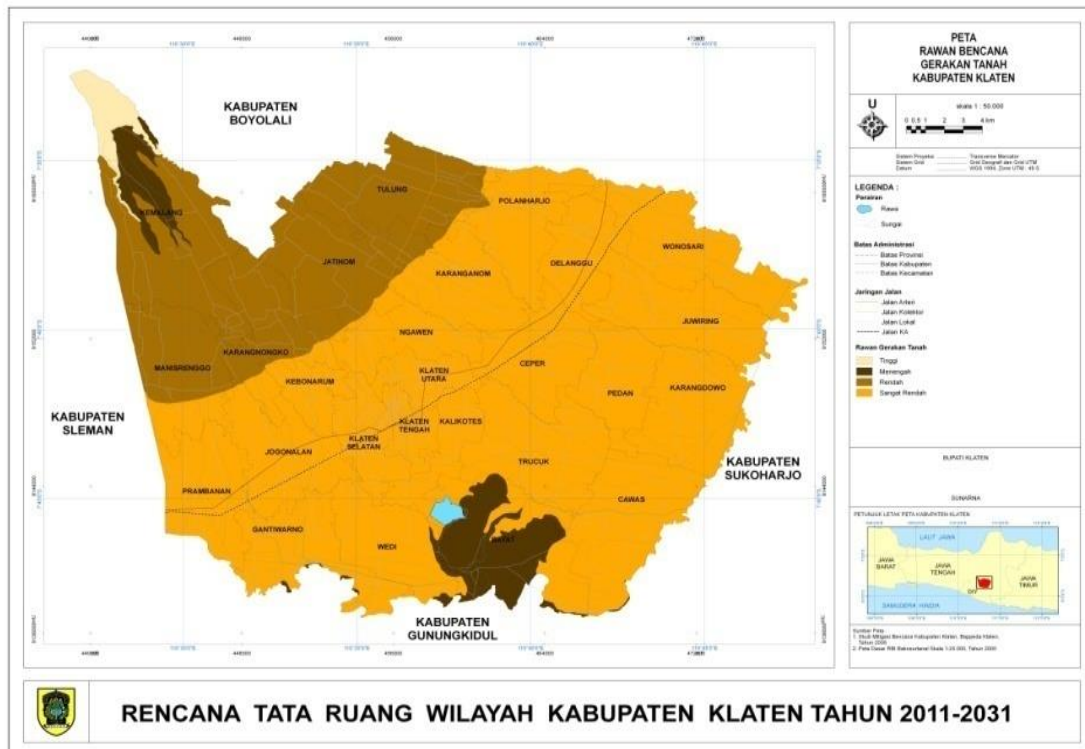
Rawan bencana tanah longsor/ gerakan tanah yang ada di Kabupaten Klaten terdiri dari gerakan tanah sangat rendah hingga tinggi. Gerakan tanah tinggi berada di Kecamatan Kemalang yang merupakan wilayah terdekat dengan Gunung Merapi. Sedangkan untuk gerakan tanah sedang berada di sebagian wilayah Kemalang, Bayat dan Gantiwarno.



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.13.
Peta Rawan Bencana Gerakan Tanah Kabupaten Klaten

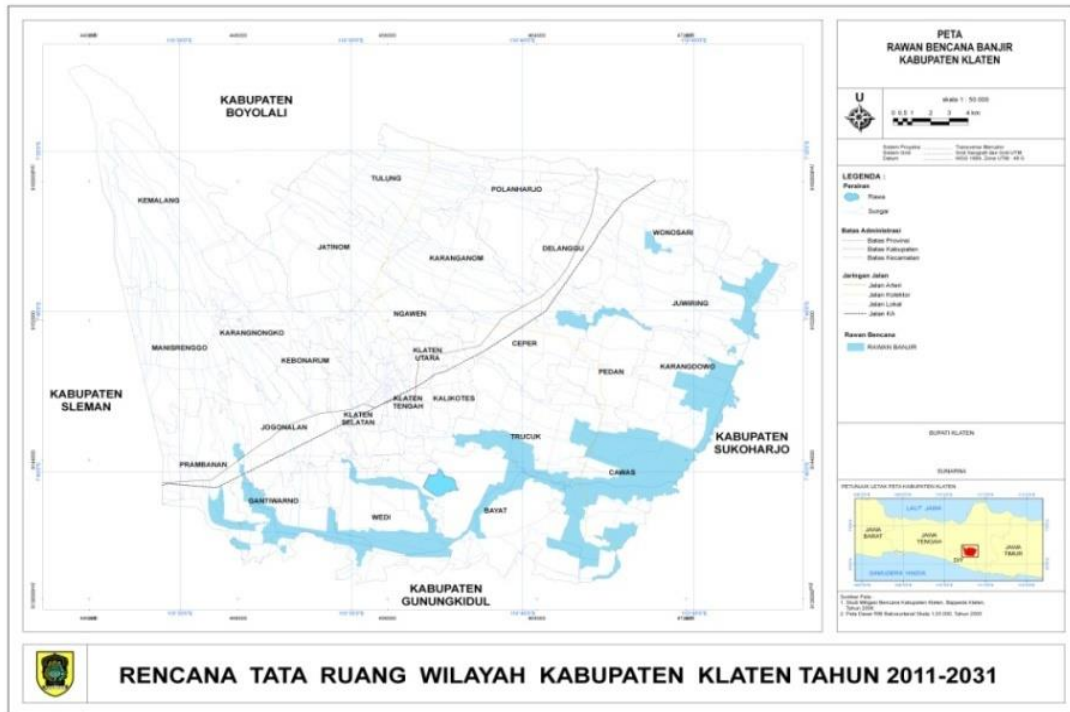
Kawasan rawan bencana alam tanah longsor meliputi : Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi;



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.14.
Peta Kawasan Rawan Gerakan Tanah

Selain kejadian bencana di atas, di Kabupaten Klaten juga terdapat wilayah yang berada di lereng gunung api yaitu Gunung Merapi. Beberapa wilayah di Kabupaten Klaten yang berada di sekitar lereng gunung api termasuk dalam kawasan rawan bencana erupsi gunung api. KRB III merupakan kawasan



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten 2011-2031

Gambar 2.16.
Peta Rawan Bencana Banjir Kabupaten Klaten

Kawasan rawan bencana angin topan mencakup seluruh wilayah di Kabupaten Klaten. Potensi ancaman bencana yang terjadi di Kabupaten Klaten akan semakin membesar seiring meningkatnya kerentanan masyarakat dalam bidang: perekonomian, pendidikan, pengelolaan lingkungan hidup, dan penataan ruang yang mendorong masyarakat menjadi lebih rentan terhadap ancaman bencana.

2.1.11. Aspek Demografi

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Klaten, jumlah penduduk di tahun 2020 sebanyak 1.327.577 jiwa. Jumlah Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Trucuk sebanyak 82.226 jiwa, sedangkan penduduk paling sedikit berada di Kecamatan Kebonarum sebanyak 21.140 jiwa. Jika dilihat dari pertumbuhannya. Laju pertumbuhan penduduk (2019-2020) sebesar 0,6%.

1. Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk

Kepadatan penduduk di suatu wilayah dipengaruhi oleh luas wilayah dan jumlah penduduk masing-masing wilayah. Dengan luas wilayah mencapai 655.56 km² dan jumlah penduduk mencapai 1.327.577 jiwa di tahun 2020 maka kepadatan penduduk di Kabupaten Klaten mencapai 2.025 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Klaten Tengah yaitu 4.805 jiwa/km² sedangkan untuk kepadatan terendah yaitu 781 jiwa/km² terdapat di Kecamatan Kemalang. Sebaran jumlah, pertumbuhan dan kepadatan penduduk dirinci per kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.7
Jumlah, Pertumbuhan dan Kepadatan Penduduk Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Kecamatan	Penduduk (Jiwa)					Laju Pertumbuhan Penduduk Per Tahun (%)	Luas wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk
		2016	2017	2018	2019	2020	2019-2020		
1	Prambanan	51.861	52.112	52.662	52.137	52.957	1,6	24,43	2.168
2	Gantiwarno	40.618	41.060	40.609	40.437	41.443	2,5	25,64	1.616
3	Wedi	53.673	54.068	54.681	54.627	54.672	0,1	24,38	2.242
4	Bayat	64.399	64.680	65.148	65.505	65.771	0,4	39,43	1.668
5	Cawas	60.509	60.047	61.359	61.266	60.704	-0,9	34,47	1.761
6	Trucuk	79.930	79.409	80.740	81.152	82.226	1,3	33,81	2.432
7	Kalikotes	37.465	20.532	20.910	37.993	38.217	0,9	12,98	2.944
8	Kebonarum	20.833	59.808	61.117	20.955	21.140	1,0	9,67	2.186
9	Jogonalan	59.725	43.245	44.181	61.328	61.927	0,2	26,7	2.319
10	Manisrenggo	43.521	37.371	38.247	44.227	44.336	0,1	26,96	1.645
11	Karangnongko	37.613	66.196	66.963	38.327	38.367	1,3	26,74	1.435
12	Ngawen	46.039	48.592	48.831	46.983	47.304	0,0	16,99	2.784
13	Ceper	65.587	46.144	45.176	67.322	68.188	0,6	24,44	2.790
14	Pedan	48.235	60.953	60.686	48.994	49.000	0,8	19,17	2.556
15	Karangdowo	45.617	64.494	64.760	45.300	45.557	-0,9	29,23	1.559
16	Juwiring	60.211	43.917	43.248	60.840	61.325	0,7	29,79	2.059
17	Wonosari	64.846	42.886	42.783	64.943	64.355	0,6	31,14	2.067
18	Delanggu	43.354	47.102	47.585	43.215	43.505	-0,5	18,77	2.318
19	Polanharjo	42.551	55.386	55.283	42.923	43.179	0,6	23,84	1.811
20	Karanganom	47.111	61.475	61.905	47.638	47.406	0,4	24,06	1.970
21	Tulung	54.401	39.467	39.721	55.497	55.805	1,0	32	1.744
22	Jatinom	60.262	46.697	46.697	61.966	62.183	0,7	35,53	1.750
23	Kemalang	38.502	37.877	37.943	39.961	40.343	0,6	51,66	781
24	Klaten Selatan	44.474	48.315	48.416	45.126	45.546	1,3	14,43	3.156
25	Klaten Tengah	41.907	42.361	42.264	42.255	42.865	1,4	8,92	4.805
26	Klaten Utara	47.462	44.518	44.965	48.613	49.256	0,9	10,38	4.745
Jumlah		1.300.706	1.308.712	1.316.880	1.319.530	1.327.577	0,6	655,56	2.025

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

2. Penduduk Menurut Mata Pencaharian

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan jenis pekerjaannya sangat beragam. Sebagian besar penduduk di Kabupaten Klaten memiliki mata pencaharian sebagai buruh harian lepas. Kemudian jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan status pelajar/mahasiswa. Komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
Jumlah Penduduk Kabupaten Klaten Menurut Jenis Pekerjaan
Tahun 2020

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang/Jiwa)	No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang/Jiwa)
1	Belum/tidak bekerja	226.291	46	Juru Masak	59
2	Mengurus rumah tangga	135.582	47	Promotor Acara	1
3	Pelajar/Mahasiswa	244.874	48	Anggota DPR-RI	0
4	Pensiunan	15.318	49	Anggota DPD	0
5	Pegawai Negeri Sipil	18.166	50	Anggota BPK	2
6	Tentara Nasional Indonesia	1.756	51	Presiden	0
7	Kepolisian RI	1.724	52	Wakil Presiden	0
8	Perdagangan	12.280	53	Anggota Mahkamah Konstitusi	1
9	Petani/Pekebun	24.702	54	Anggota Kabinet	0
10	Peternak	746	55	Duta Besar	0
11	Nelayan/Perikanan	33	56	Gubernur	0
12	Industri	506	57	Wakil Gubernur	0
13	Konstruksi	296	58	Bupati	1
14	Transportasi	494	59	Wakil Bupati	0
15	Karyawan Swasta	123.889	60	Walikota	0
16	Karyawan BUMN	4.803	61	Wakil Walikota	0
17	Karyawan BUMD	500	62	Anggota DPRD Provinsi	4
18	Karyawan Honoror	4.085	63	Anggota DPRD Kab	50
19	Buruh Harian Lepas	355.407	64	Dosen	728
20	Buruh Tani/Perkebunan	34.596	65	Guru	10.529
21	Buruh Nelayan/Perikanan	101	66	Pilot	1
22	Buruh Peternakan	205	67	Pengacara	55
23	Pembantu Rumah Tangga	454	68	Notaris	58
24	Tukang Cukur	94	69	Arsitek	34
25	Tukang Listrik	99	70	Akuntan	13
26	Tukang Batu	2.238	71	Konsultan	79
27	Tukang Kayu	4.024	72	Dokter	527
28	Tukang Sol Sepatu	42	73	Bidan	708
29	Tukang Las/Pandai Besi	371	74	Perawat	1.511
30	Tukang Jahit	2.620	75	Apoteker	168
31	Tukang Gigi	21	76	Psikiater/Psikolog	10
32	Penata Rias	176	77	Penyiar Televisi	1
33	Penata Busana	27	78	Penyiar Radio	4
34	Penata Rambut	67	79	Pelaut	426
35	Mekanik	775	80	Peneliti	16
36	Seniman	311	81	Sopir	2.836
37	Tabib	20	82	Pialang	6
38	Parajin	25	83	Paranormal	11
39	Perancang Busana	17	84	Pedagang	22.417
40	Penterjemah	7	85	Perangkat Desa	2.606
41	Imam Mesjid	15	86	Kepala Desa	399
42	Pendeta	125	87	Biarawati	28
43	Pastor	37	88	Wiraswasta	55.103
44	Wartawan	85	89	Lainnya	11.113
45	Ustadz/Mubaligh	68			
Jumlah Total					1.327.577

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

3. Penduduk Menurut Struktur Umur

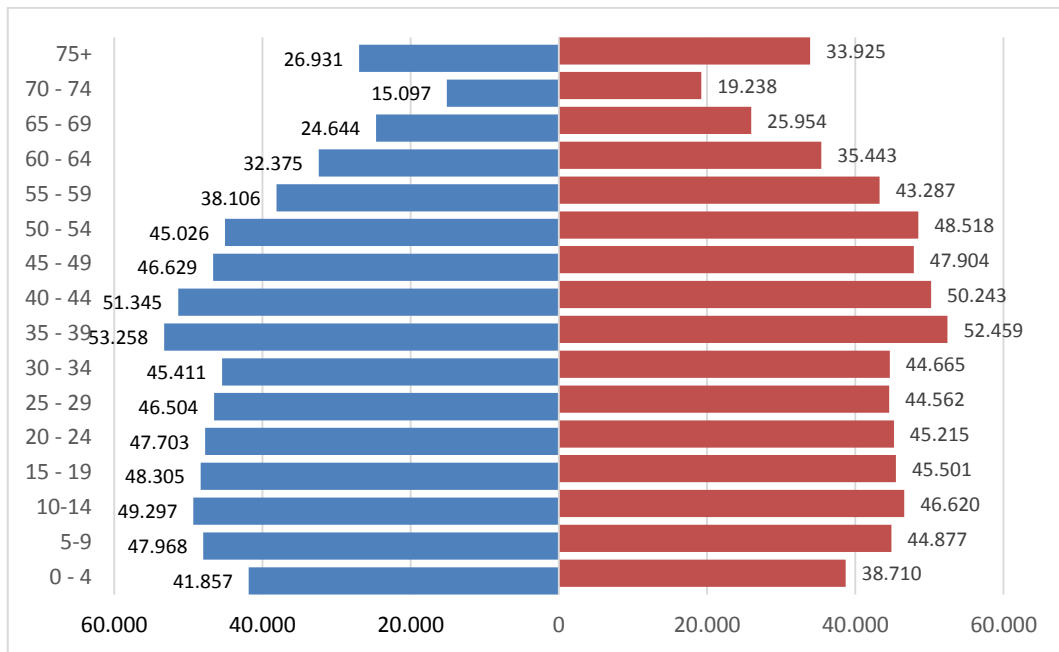
Perkembangan jumlah penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan kelompok umur diketahui bahwa penduduk pada kelompok usia produktif (15-64 tahun) sebanyak 912.459 jiwa, sedangkan penduduk yang belum produktif (<15 tahun) sebanyak 269.329 jiwa dan yang tidak produktif lagi (65 tahun keatas) sebanyak 145.789 jiwa. Sehingga rasio beban ketergantungan sebesar 31,26% yang berarti bahwa setiap 100 orang penduduk usia produktif menanggung sebanyak 31 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.9
Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur
Kabupaten Klaten Tahun 2020

Kelompok Umur	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
0 - 4	41.857	38.710	80.567
5 - 9	47.968	44.877	92.845
10 -14	49.297	46.620	95.917
15 - 19	48.305	45.501	93.806
20 - 24	47.703	45.215	92.918
25 - 29	46.504	44.562	91.066
30 - 34	45.411	44.665	90.076
35 - 39	53.258	52.459	105.717
40 - 44	51.345	50.243	101.588
45 - 49	46.629	47.904	94.533
50 - 54	45.026	48.518	93.544
55 - 59	38.106	43.287	81.393
60 - 64	32.375	35.443	67.818
65 - 69	24.644	25.954	50.598
70 - 74	15.097	19.238	34.335
75+	26.931	33.925	60.856
Jumlah	660.456	667.121	1.327.577

Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Jumlah penduduk laki-laki dan perempuan berdasarkan umur mempunyai pola yang sama, dimana puncaknya berada pada golongan umur 15-64 tahun dan menurun kembali jumlahnya sampai pada golongan umur 65-75+ keatas. Hal tersebut dapat digambarkan pada piramida penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 sebagai berikut.



Sumber :Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2021

Gambar 2.17.
Piramida Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2020

4. Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Kondisi penduduk Kabupaten Klaten berdasarkan tingkat pendidikan sangat beragam, tingkat pendidikan merupakan salah satu indikator kualitas masyarakat itu sendiri. Sebagian besar tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Klaten adalah tamat SD/ sederajat, jumlah terbanyak kedua adalah penduduk dengan tingkat pendidikan tidak/ belum sekolah. Dengan identifikasi terhadap tingkat pendidikan masyarakat dapat menjadi pedoman dalam mengambil kebijakan, utamanya meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.10
Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/ II	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
Prambanan	9.584	5.741	9.875	8.385	16.729	323	1.151	2.716	157	6
Gantiwarno	7.713	4.988	9.032	6.287	13.524	262	734	1.640	77	5
Wedi	9.136	6.256	12.377	8.852	16.636	257	1.102	2.609	109	4
Bayat	13.864	6.403	19.853	10.839	15.482	238	776	2.017	76	6
Cawas	12.526	6.859	12.197	9.707	16.692	428	1.180	2.532	92	9
Trucuk	15.526	9.143	18.886	13.216	21.049	495	1.282	3.163	137	4
Kebonarum	3.336	2.961	3.276	3.377	6.772	195	436	1.071	40	3
Jogonalan	9.390	8.937	13.476	10.017	18.203	288	1.101	2.303	124	9
Manis renggo	8.934	5.254	10.137	7.302	11.778	227	559	1.124	53	10
Karangnongko	8.381	4.296	8.558	6.646	9.159	248	559	1.179	58	3
Ceper	11.437	6.677	13.509	11.001	21.951	466	1.335	3.482	173	17
Pedan	9.085	4.578	11.549	9.997	14.045	221	862	1.993	87	1
Karangdowo	8.701	4.985	10.844	7.830	11.611	284	943	1.801	85	5
Juwiring	9.608	6.586	13.752	11.087	15.631	367	1.006	2.227	73	2
Wonsari	10.886	6.867	12.695	11.817	16.508	316	1.228	2.462	117	4
Dealanggu	6.645	4.253	6.784	6.637	13.922	307	1.206	2.413	130	6
Polanharjo	7.347	4.255	6.903	6.372	12.629	354	990	2.152	116	1
Karanganom	7.743	4.783	9.128	7.440	13.548	344	962	2.205	112	5
Tulung	9.503	6.110	12.242	8.879	14.876	366	764	1.820	71	3
Jatinom	11.525	6.546	16.294	9.723	13.246	304	780	1.680	69	4
Kemalang	8.857	4.048	13.738	6.529	5.276	87	232	513	16	3

Kecamatan	Tidak/ Belum Sekolah	Belum Tamat SD/ Sederajat	Tamat SD/ Sederajat	SLTP/ Sederajat	SLTA/ Sederajat	Diploma I/ II	Akademi/ Diploma III/ Sarjana Muda	Diploma IV/ Strata I	Strata II	Strata III
Ngawen	7.438	4.588	8.335	7.175	14.278	381	952	2.561	142	10
Kalikotes	6.400	4.210	7.906	5.800	10.385	223	664	1.416	74	5
Klaten Utara	7.508	4.657	6.840	6.477	14.851	493	1.702	4.958	517	20
Klaten Tengah	6.131	4.148	6.495	6.087	13.243	324	1.448	3.477	254	13
Klaten Selatan	6.671	4.387	6.633	6.514	14.095	332	1.549	3.445	273	167
Jumlah	233.875	142.516	281.314	213.993	366.119	8.130	25.503	58.959	3.232	325

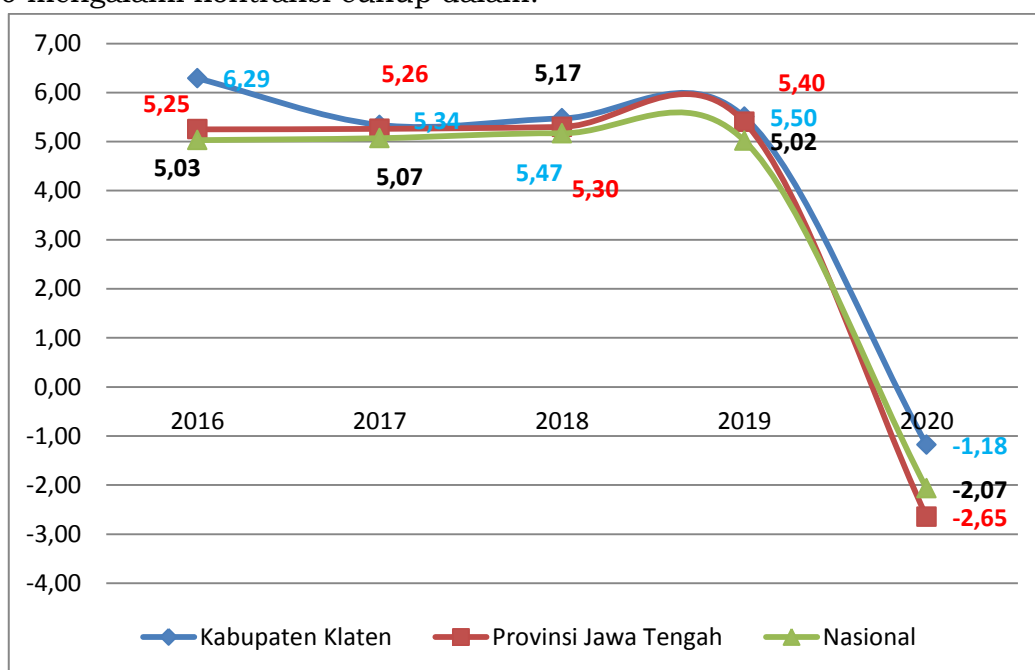
Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2021

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi memberikan gambaran mengenai dampak dari pembangunan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, khususnya dalam rangka pengembangan bidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menggambarkan tingkat perubahan ekonomi yang terjadi di suatu wilayah tertentu. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkelanjutan menjadi salah

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan 2010, tumbuh melambat menjadi -1,18% jika dibanding dengan tahun 2019 sebesar 5,50%. Bahkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga sama di tahun 2020 menunjukkan kontraksi. Akibat dampak Covid-19, perekonomian di Kabupaten Klaten tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam.

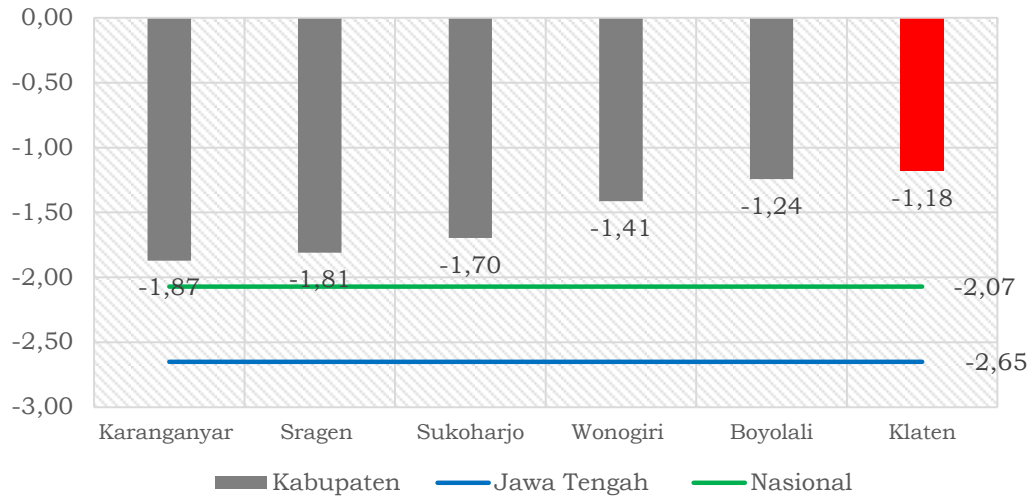


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.18.

Grafik Perbandingan Pertumbuhan Perekonomian Antara Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi Perekonomian di seluruh Indonesia tak terkecuali Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah. Perekonomian di Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,18%. Apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi di Kabupaten sekitar dalam kurun waktu yang sama, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten menempati urutan rendah. Serta masih dibawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.

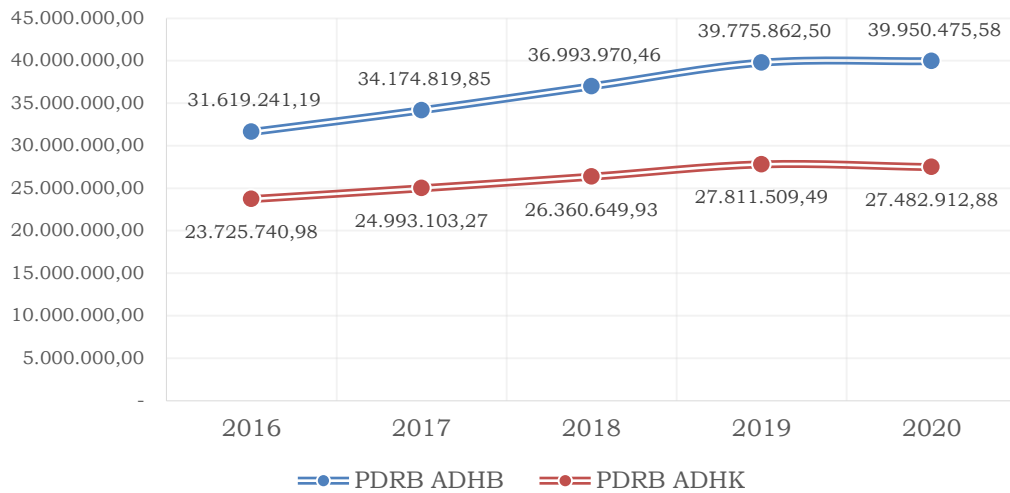


Sumber : BPS Jawa Tengah, 2021

Gambar 2.19.
Posisi Relatif Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.2. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Untuk mengkaji tingkat kesejahteraan dan pemerataan ekonomi masyarakat, maka digunakan indikator perhitungan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Perhitungan PDRB terbagi dalam 2 kategori utama, yaitu Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) dan Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010. Pertumbuhan PDRB ADHB maupun ADHK 2010 kabupaten Klaten meningkat setiap tahunnya. Perkembangan PDRB ADHB pada tahun 2016 sebesar Rp31.619.241,19, dan di tahun 2020 menjadi sebesar Rp39.950.475,58. Untuk PDRB ADHK 2010 tahun 2016 sebesar Rp23.725.740,98, meningkat menjadi sebesar Rp27.482.912,88. Secara jelas dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.20.
Perkembangan PDRB ADHB dan PDRB ADHK 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Nilai PDRB ADHB Kabupaten Klaten selama tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari Rp31.619.241,19 menjadi Rp39.775.862,50. Sedangkan pada tahun 2020 dikarenakan dampak Pandemi Covid-19 nilai PDRB ADHB sebesar Rp 39.950.475,58. Pada tahun 2020 Sektor Industri Pengolahan

masih penyumbang tertinggi sebesar Rp14.936.275,20 ditunjukkan dengan berkembangnya usaha kecil mikro dan industri olahan, tetapi juga ditunjang menguatnya daya beli masyarakat yang menopang tumbuhnya perekonomian daerah, diikuti sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Rp6.145.077,58 meskipun tumbuh melambat, namun apabila dilihat dari nilai investasi mempunyai peluang usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat untuk mengatasi pengangguran. Sementara sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan Rp4.371.379,48. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.11
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3.810.348,98	3.880.677,98	4.085.964,24	4.181.908,12	4.371.379,48
B	Pertambangan dan Penggalian	1.030.613,84	1.112.144,57	1.177.376,22	1.245.553,58	1.253.648,24
C	Industri Pengolahan	11.381.482,63	12.446.837,51	13.611.869,50	14.727.480,24	14.936.275,20
D	Pengadaan Listrik dan Gas	44.053,13	50.784,96	55.741,58	58.861,29	61.152,53
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	13.246,78	14.143,63	14.964,95	16.371,66	17.009,23
F	Konstruksi	1.914.709,83	2.094.601,40	2.333.361,55	2.552.697,54	2.520.283,15
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5.292.431,30	5.631.766,56	6.000.014,15	6.430.015,48	6.145.077,58
H	Transportasi dan Pergudangan	645.183,06	690.596,13	729.681,82	779.971,91	572.539,83
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.091.254,92	1.180.067,24	1.284.456,54	1.404.195,46	1.357.399,84
J	Informasi dan Komunikasi	948.913,65	1.119.938,75	1.252.092,63	1.419.789,34	1.674.713,98
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.081.527,12	1.175.828,75	1.259.961,03	1.321.513,91	1.366.776,47
L	Real Estate	409.338,03	444.310,49	477.618,78	509.514,95	510.799,94
M,N	Jasa Perusahaan	102.585,38	115.088,85	126.797,73	139.716,72	132.489,52
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	792.119,46	844.376,28	882.410,22	908.656,78	910.583,18
P	Jasa Pendidikan	2.160.832,68	2.379.643,26	2.606.214,15	2.881.198,28	2.898.739,98
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	372.019,69	409.870,96	452.676,88	495.228,51	550.782,80
R,S,T,U	Jasa lainnya	528.580,71	584.142,53	642.768,49	703.188,73	670.824,63
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		31.619.241,19	34.174.819,85	36.993.970,46	39.775.862,50	39.950.475,58
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		31.619.241,19	34.174.819,85	36.993.970,46	39.775.862,50	39.950.475,58
PDRB NON PEMERINTAHAN		30.827.121,73	33.330.443,57	36.111.560,24	38.867.205,72	39.039.892,40

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Demikian juga dengan nilai PDRB ADKH Kabupaten Klaten pada periode yang sama dari 2016-2019 meningkat dari Rp23.725.740,98 menjadi Rp27.811.509,49. Sedangkan di tahun 2020 sebesar Rp27.482.912,88.

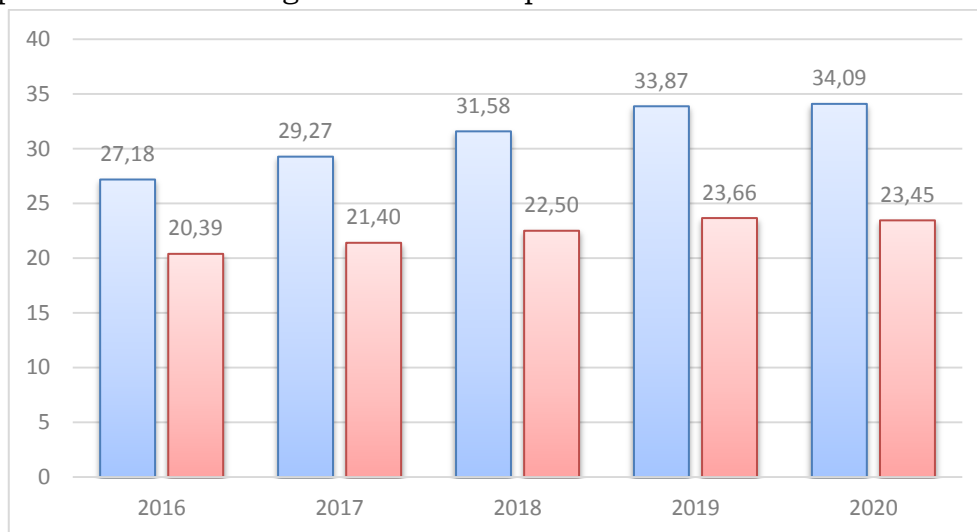
Tabel 2.12
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kategori	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	2.814.072,15	2.845.097,06	2.908.070,61	2.925.616,92	2.987.750,18
B	Pertambangan dan Penggalian	635.553,28	664.166,20	685.313,55	706.900,93	705.045,28
C	Industri Pengolahan	8.004.239,75	8.504.714,04	9.013.718,21	9.601.710,72	9.485.050,46
D	Pengadaan Listrik dan Gas	41.588,12	44.249,82	47.094,12	49.644,40	51.883,91
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	12.047,34	12.826,81	13.532,60	14.308,02	14.735,75
F	Konstruksi	1.435.985,49	1.531.575,76	1.635.233,26	1.745.775,03	1.711.576,48
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.362.061,18	4.531.078,43	4.719.954,10	4.923.412,16	4.687.427,19
H	Transportasi dan Pergudangan	566.772,32	597.101,45	625.692,51	656.720,86	468.118,98
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	883.680,17	944.707,06	1.018.074,62	1.098.344,48	1.043.075,16
J	Informasi dan Komunikasi	908.551,37	1.026.807,26	1.147.054,83	1.282.866,12	1.511.722,42
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	821.907,83	857.588,05	887.591,04	915.313,03	947.598,17
L	Real Estate	361.069,45	382.324,67	401.354,47	420.057,59	419.048,02
M,N	Jasa Perusahaan	77.484,45	83.734,52	90.076,27	96.931,07	90.106,90
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	591.863,52	610.862,34	631.265,14	641.455,60	633.375,54
P	Jasa Pendidikan	1.520.064,74	1.607.474,21	1.720.401,03	1.842.721,54	1.839.363,29
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	260.226,42	282.328,51	307.894,68	336.313,36	364.377,77
R,S,T,U	Jasa lainnya	428.573,40	466.467,08	508.328,89	553.417,66	522.657,38
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO		23.725.740,98	24.993.103,27	26.360.649,93	27.811.509,49	27.482.912,88
PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO TANPA MIGAS		23.725.740,98	24.993.103,27	26.360.649,93	27.811.509,49	27.482.912,88
PDRB NON PEMERINTAHAN		23.133.877,46	24.382.240,93	25.729.384,79	27.170.053,89	26.849.537,34

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

2.2.3. PDRB Perkapita

PDRB perkapita dapat dijadikan salah satu indikator guna melihat keberhasilan pembangunan perekonomian di suatu wilayah. Indikator ini menunjukkan bahwa secara ekonomi setiap penduduk Klaten rata-rata mampu menciptakan PDRB atau nilai tambah sebesar nilai perkapita di masing-masing tahun tersebut. Perkembangan PDRB perkapita di Klaten atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 PDRB perkapita Kabupaten Klaten sebesar 27,18 juta rupiah, naik ditahun 2020 menjadi 34,09 juta rupiah. Berikut perkembangan PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

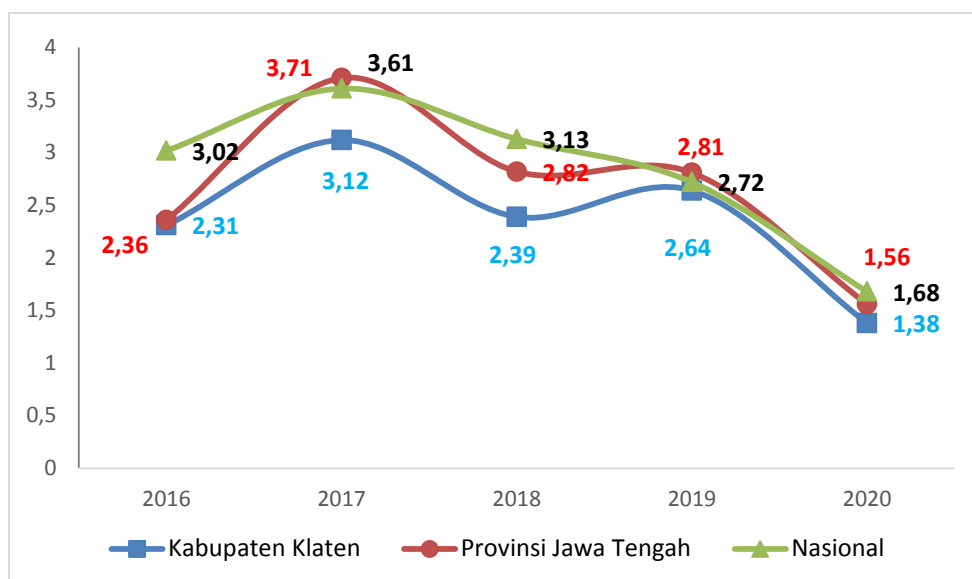


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.21.
PDRB Perkapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

2.2.4. Inflasi

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Klaten lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 2,31% turun di tahun 2020 menjadi sebesar 1,38%.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.22.
Perkembangan Inflasi Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

2.2.5. Garis Kemiskinan

Dalam mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*), yaitu kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran yang dikonseptualisasikan dengan Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100 kilokalori per kapita per hari dan kebutuhan pokok bukan makanan.

Garis Kemiskinan yang digunakan oleh BPS terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) yang terdiri atas 52 jenis komoditi dan Garis Kemiskinan Non Makanan (GKNM) yang terdiri dari 51 jenis komoditi di perkotaan dan 47 jenis komoditi di perdesaan, dimana GK merupakan penjumlahan dari GKM dan GKNM. Penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dikategorikan sebagai penduduk miskin.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK) tingkat Provinsi Jawa Tengah, peranan komoditi makanan terhadap Garis Kemiskinan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Beberapa komoditi makanan dan bukan makanan yang dapat berpengaruh terhadap kenaikan garis kemiskinan, sebagai berikut:

1. Komoditi Makanan

Pada September 2020, jenis komoditi makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK hampir sama di perkotaan maupun di perdesaan. Beras memberi sumbangan sebesar 16,59% di perkotaan dan 18,61% di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (13,95% di perkotaan dan 10,66% di perdesaan). Komoditi lainnya antara lain telur ayam ras (4,04% di perkotaan dan 4,34% di perdesaan), daging ayam ras (3,74% di perkotaan dan 3,65% di perdesaan), gula pasir (3,00% di perkotaan dan 2,90% di perdesaan).

Tabel 2.13
Daftar Komoditi Makanan yang Memberi Pengaruh Besar terhadap
Kenaikan Garis Kemiskinan Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode
September 2020

Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
Makanan	73,56	Makanan	75,44
Beras	16,59	Beras	18,61
Rokok kretek filter	13,95	Rokok kretek filter	10,66
Telur ayam ras	4,04	Telur ayam ras	4,34
Daging ayam ras	3,74	Daging ayam ras	3,65
Gula pasir	3,00	Gula pasir	2,90
Tempe	2,33	Tempe	2,81
Kue basah	2,25	Cabe rawit	2,72
Mie instan	2,18	Kue basah	2,39
Cabe rawit	2,17	Mie instan	2,37
Tahu	2,96	Tahu	2,26
Komoditi makanan lainnya	21,35	Komoditi makanan lainnya	22,74

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021

2. Komoditi Bukan Makanan

Komoditi bukan makanan yang memberikan sumbangan besar, baik pada GK perkotaan maupun perdesaan, meliputi perumahan memberikan sumbangan sebesar 6,85% diperkotaan maupun pedesaan. Bensin, memberikan sumbangan 4,03 diperkotaan dan 3,25 di pedesaan. Listrik (2,61% di perkotaan dan 1,65% di pedesaan) serta komoditi non makanan lainnya (9,69 % di perkotaan dan 10,23 di pedesaan). Untuk lebih lengkapnya dapat dilihat pada pada Tabel dibawah ini.

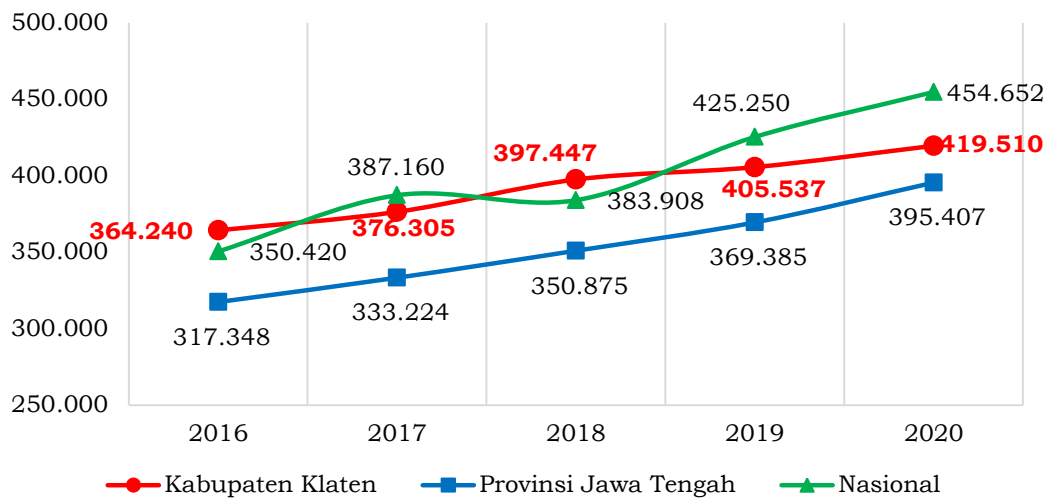
Tabel 2.14
Daftar Komoditi Bukan Makanan yang Berpengaruh Besar
Terhadap Kenaikan Garis Kemiskinan
Tingkat Provinsi Jawa Tengah Periode September 2020

Komoditi	Kota (%)	Komoditi	Desa (%)
Bukan Makanan	26,44	Bukan Makanan	24,56
Perumahan	6,85	Perumahan	6,85
Bensin	4,03	Bensin	3,25
Listrik	2,61	Listrik	1,65
Pendidikan	1,80	Pendidikan	1,35
Perlengkapan mandi	1,46	Kesehatan	1,23
Komoditi non makanan lainnya	9,69	Komoditi non makanan lainnya	10,23

Sumber: BPS, Berita Resmi Statistik Kemiskinan, 2021

Garis Kemiskinan digunakan sebagai suatu batas untuk menentukan miskin atau tidaknya seseorang. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 terus mengalami kenaikan. Garis kemiskinan naik dari Rp364.240,00/ kapita/ bulan di tahun 2016 menjadi Rp419.510,00/ kapita/ bulan di tahun 2020. Kenaikan garis kemiskinan setiap tahunnya berkisar antara 2 sampai 6 persen. Kenaikan tertinggi sebesar 5,62% yang

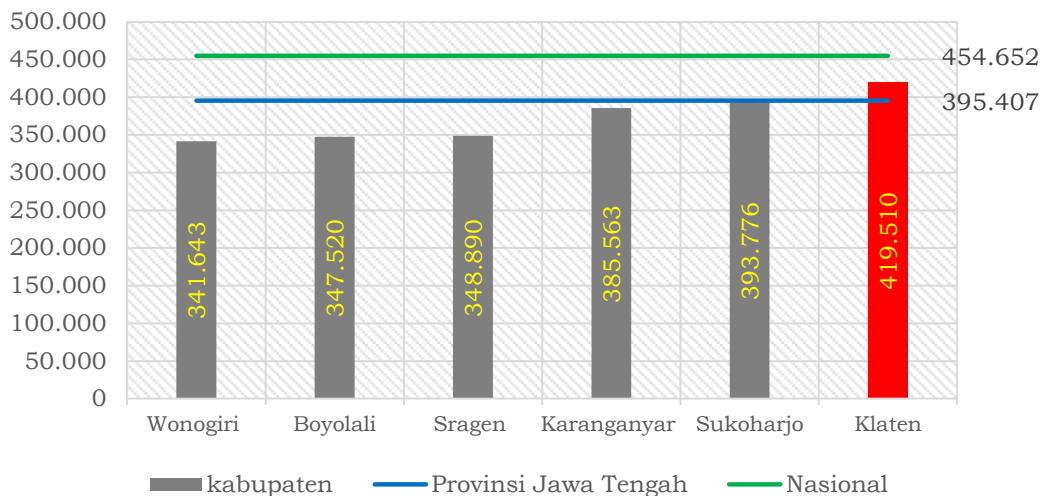
terjadi pada tahun 2018. Sedangkan kenaikan terendah terjadi pada tahun 2019 yaitu sebesar 2,04%. Kondisi tersebut sama halnya dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.23.
Perkembangan Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

Dibandingkan dengan Garis Kemiskinan Provinsi sebesar Rp395.407,00/ kapita/ bulan dan Nasional sebesar Rp454.652,00/ kapita/ bulan pada tahun 2020, Kabupaten Klaten dengan capaian sebesar Rp419.510,00/kapita/bulan berada di atas Provinsi dan dibawah Nasional serta menempati urutan tertinggi bila dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya.



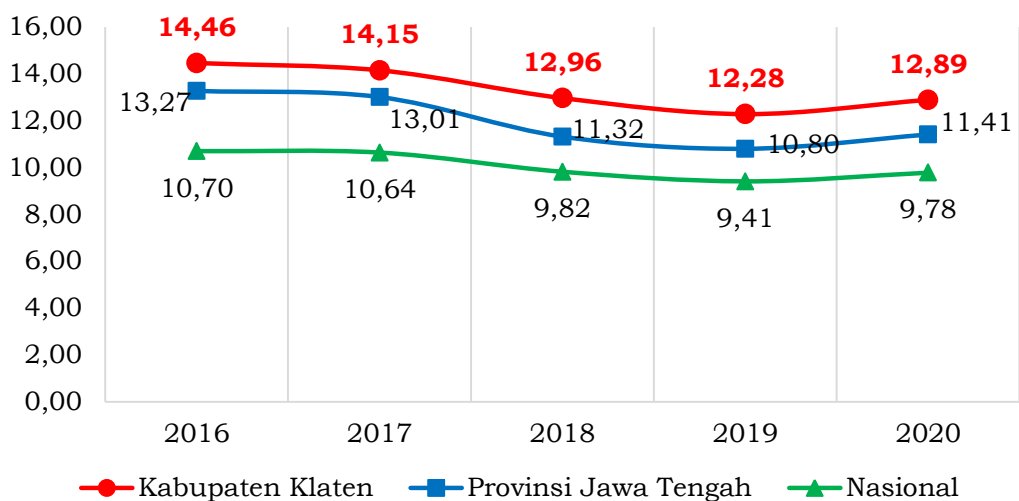
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.24.
Posisi Relatif Garis Kemiskinan Kabupaten Klaten Tahun 2020 (Rupiah/Kapita/Bulan)

2.2.6. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kabupaten Klaten periode 2016-2020 terus mengalami penurunan, tetapi tahun 2020 mengalami kenaikan. Pada periode 2016-2020 persentase penduduk miskin cenderung menurun dari

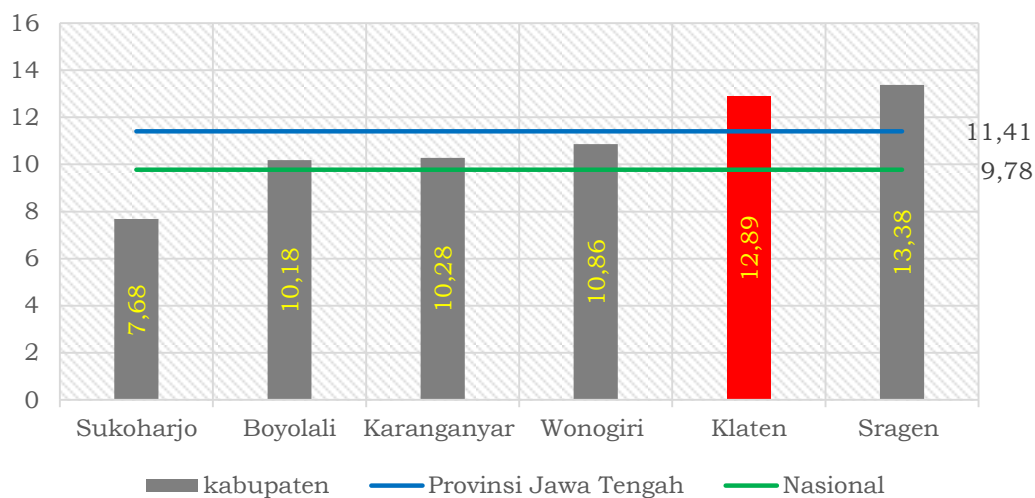
14,46% di tahun 2016 menjadi 12,28% di tahun 2019. Namun pada tahun 2020 meningkat menjadi 12,89%. Kenaikan tersebut dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan peningkatan penduduk miskin.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.25.
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif persentase penduduk miskin Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 12,89% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 11,41% dan Nasional sebesar 9,78% serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sragen sebesar 12,89% dibandingkan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

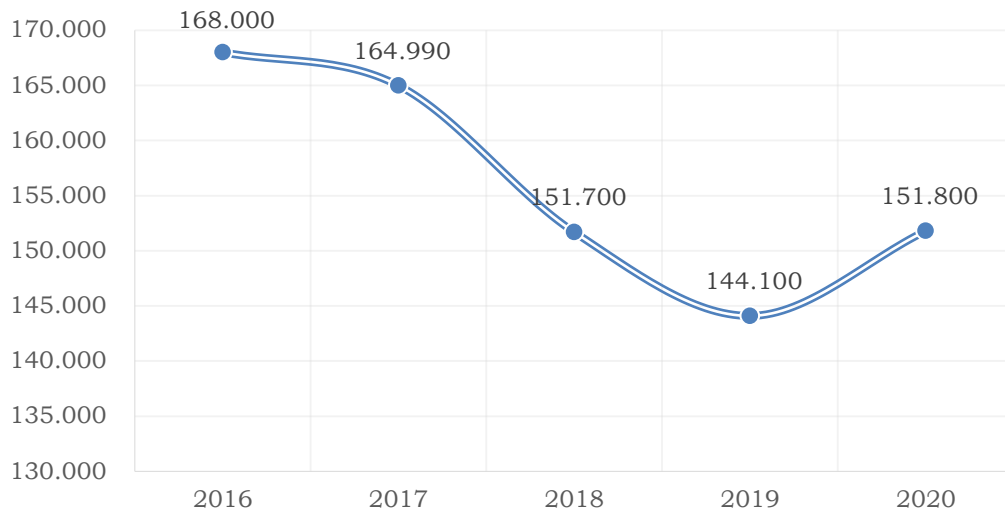


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.26.
Posisi Relatif Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.7. Jumlah Penduduk Miskin

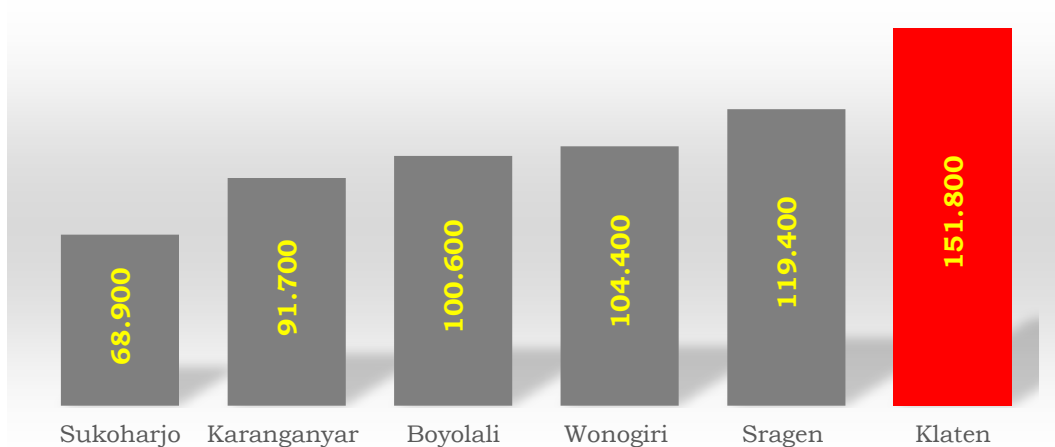
Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Klaten kurun waktu 2016-2019 cenderung menurun dari 168.000 jiwa menjadi 144.100 jiwa. Namun pada periode tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 151.800 jiwa.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.27.
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dibandingkan dengan kabupaten disekitarnya, jumlah penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 mencapai sebesar 151.800 jiwa menempati urutan tertinggi, berbeda dengan peringkat persentase penduduk miskin yang menempati posisi kedua setelah Kabupaten Sragen. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:

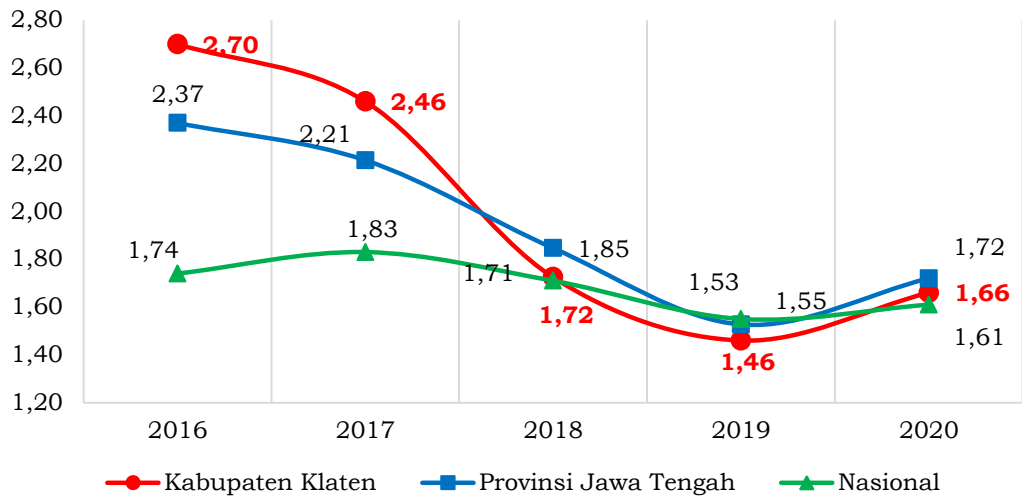


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.28.
Posisi Relatif Jumlah Penduduk Miskin Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.8. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1)

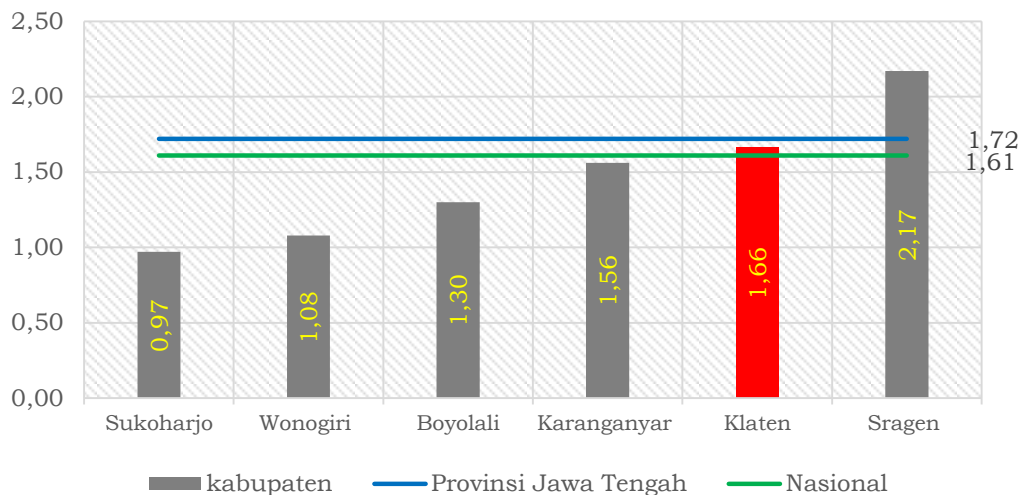
Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Kabupaten Klaten selama kurun waktu 2016-2019 mengalami penurunan dari sebesar 2,70 menjadi 1,46, namun meningkat di tahun 2020 menjadi 1,66. Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran antara penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin besar.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.29.
Perkembangan Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 1,66, lebih rendah dibandingkan dengan nilai provinsi dan di atas rata-rata nasional. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya, kenaikan P1 terbesar kedua setelah Kabupaten Sragen. Secara lengkap dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

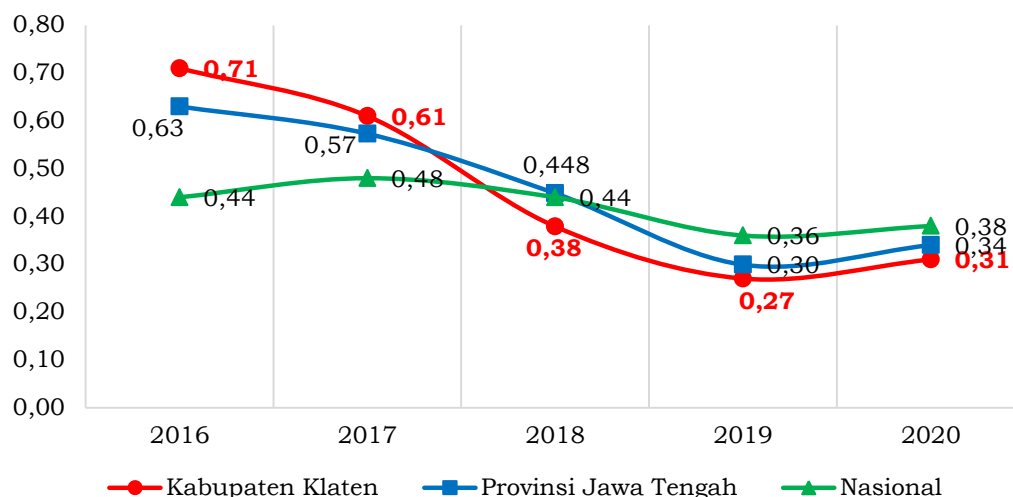


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.30.
Posisi Relatif Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.9. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)

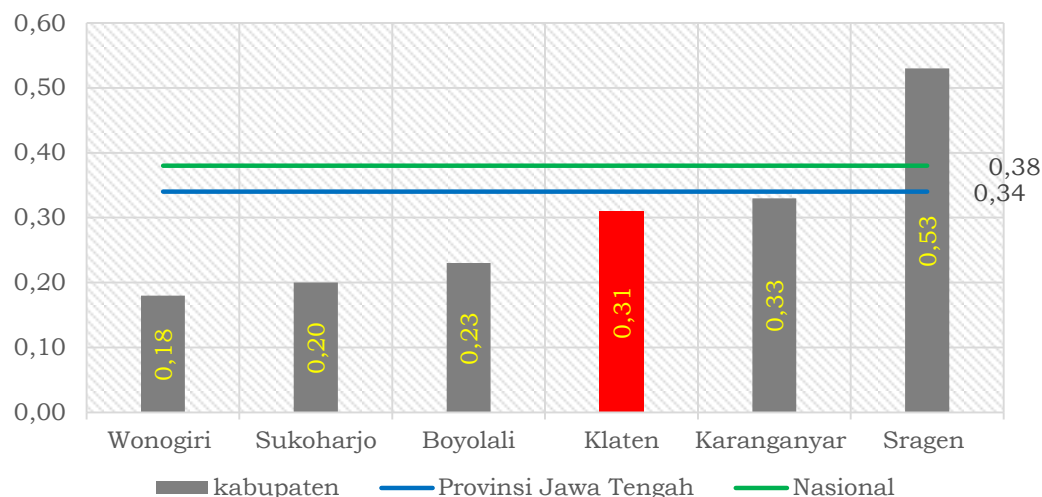
Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran diantara penduduk miskin, semakin tinggi nilai indeks semakin tinggi ketimpangan pengeluaran diantara penduduk miskin. Selama kurun waktu 2016-2019, Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten menurun, yaitu turun dari 0,71 menjadi 0,27, namun ditahun 2020 naik menjadi 0,31. Hal ini mengindikasikan bahwa ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.31.
Indeks keparahan kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional tahun 2016-2020

Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 0,13 berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah sebesar 0,34 dan Nasional sebesar 0,38. Bila dibandingkan dengan kabupaten sekitar, kenaikan Kabupaten Klaten merupakan terbesar ketika setelah Kabupaten Sragen dan Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

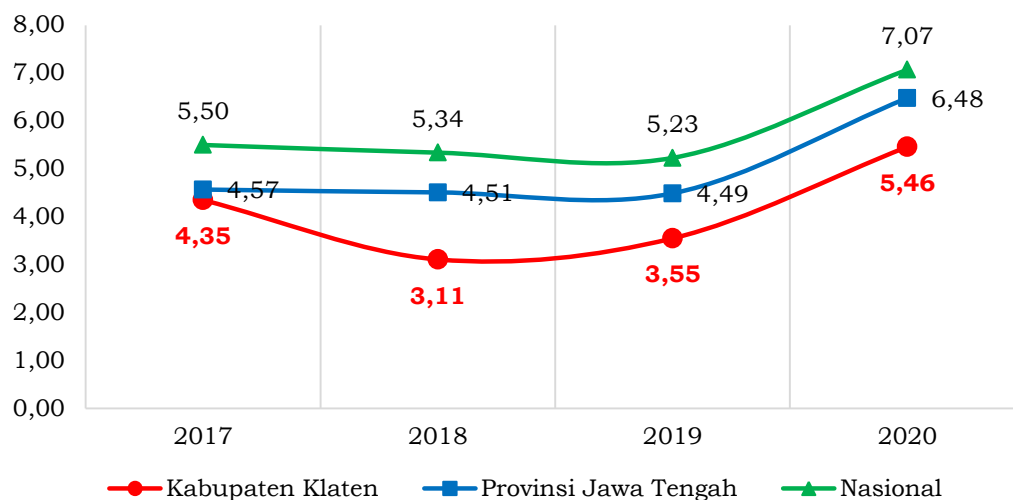


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.32.
Posisi Relatif Indeks Keparahkan Kemiskinan (P2) Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.10. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

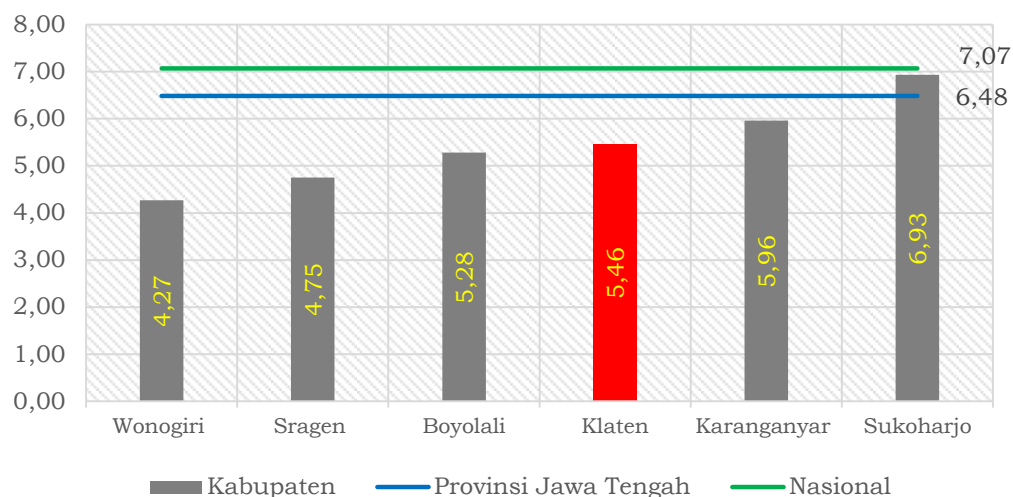
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah indikator yang dapat digunakan untuk mengukur tingkat penawaran tenaga kerja yang tidak digunakan atau tidak terserap oleh pasar kerja. TPT Kabupaten Klaten dalam kurun waktu 2017-2019 turun dari 4,35% menjadi 3,55% di tahun 2019. Angka tersebut meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,46%. Kenaikan pengangguran terbuka pada periode tahun 2020 merupakan dampak terjadinya Pandemi Covid-19 dari sisi ekonomi.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.33.
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020

TPT Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 5,46% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (6,48%) dan Nasional (7,07%) serta dibandingkan dengan Kabupaten sekitar menempati urutan ke-3 tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

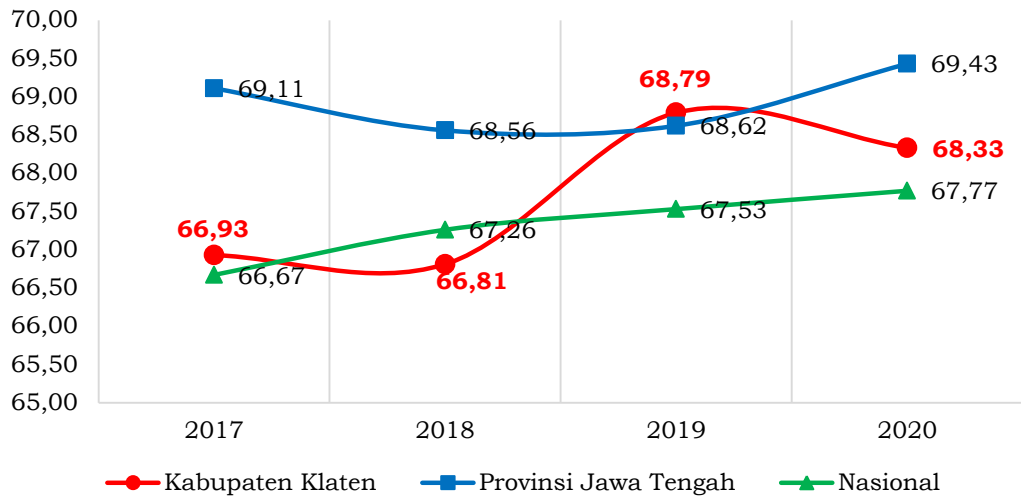


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.34.
Posisi Relatif Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.11. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

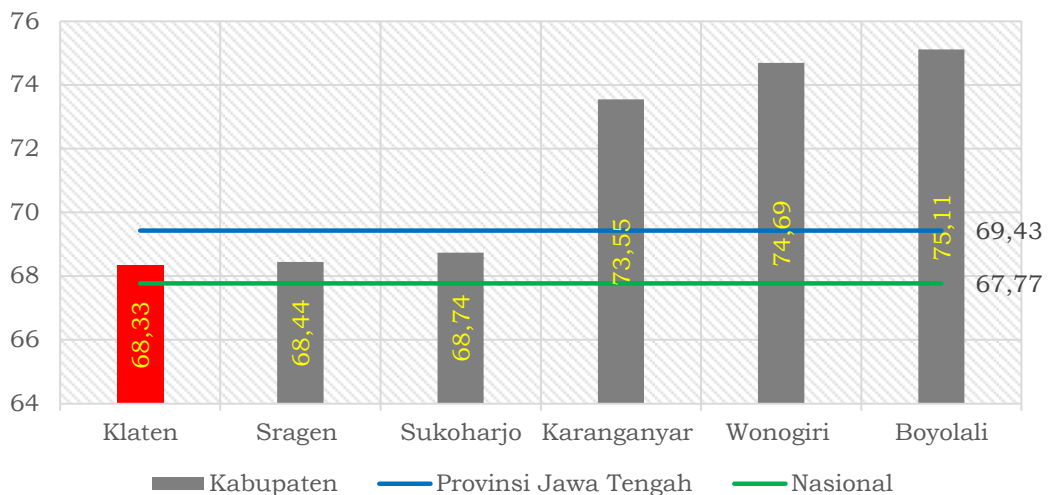
Perkembangan TPAK Kabupaten Klaten dalam kurun waktu tahun 2017 hingga 2020 cenderung fluktuatif dari 66,93% ditahun 2017 menjadi 66,81% ditahun 2018 dan mengalami peningkatan 68,79% ditahun 2019 selanjutnya turun ditahun 2020 sebesar 68,33%. Kondisi tersebut berbeda dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang sama-sama mengalami peningkatan di periode tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.35.
Perkembangan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah Dan Nasional Tahun 2017-2020

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 68,33% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah dan dibawah Nasional, serta dibandingkan dengan Kabupaten sekitarnya menempati urutan terendah. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



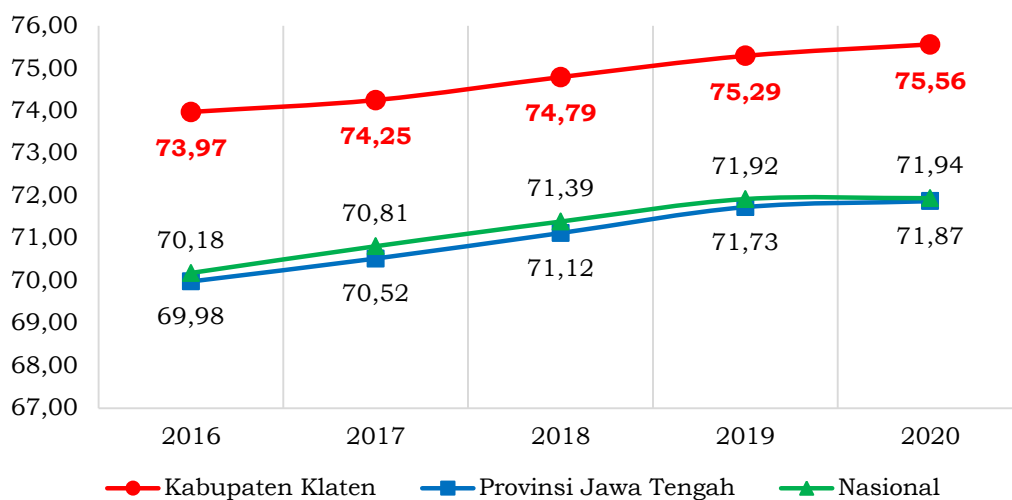
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.36.
Posisi Relatif Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Klaten Tahun 2020

2.2.12. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar: (1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); (2) Pengetahuan (*knowledge*); (3) Standar hidup layak (*decent standard of living*). Indikator pada metode baru meliputi: angka harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita.

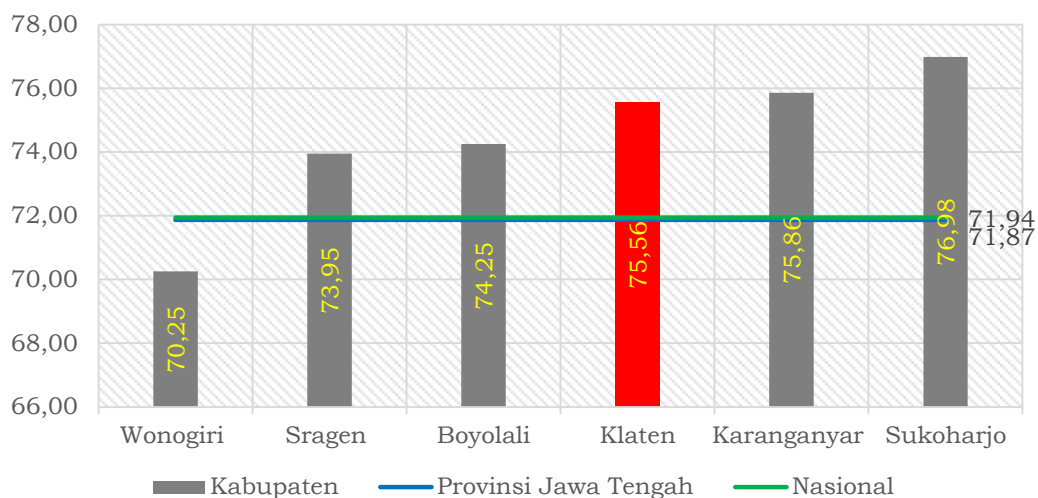
Perkembangan IPM Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 73,97 dan pada tahun 2020 meningkat menjadi sebesar 75,56. Kondisi IPM Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 relevan terhadap perkembangan IPM Provinsi Jawa tengah dan IPM Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.37.
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif IPM Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 75,56 berada di atas Provinsi (71,87) dan Nasional (71,94) serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

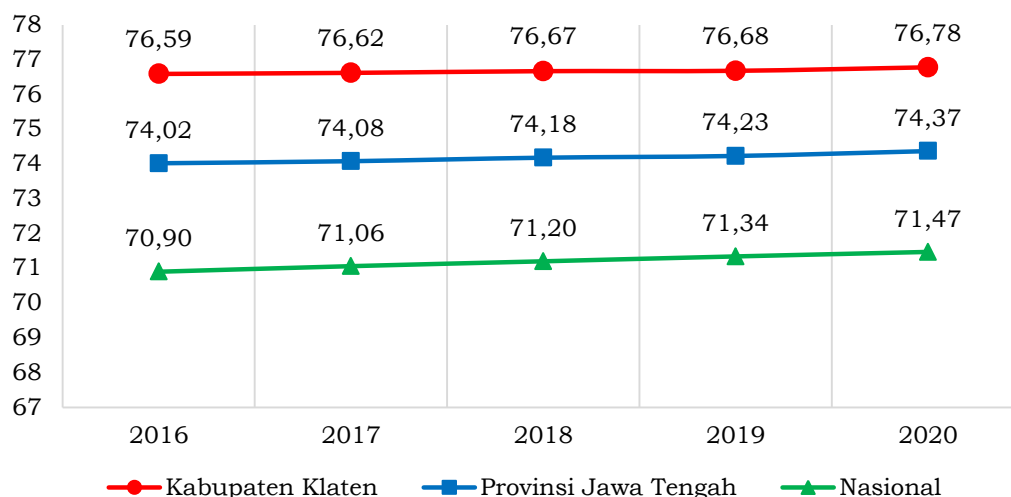
Gambar 2.38.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Tahun 2020

Sementara itu, kondisi komponen pembentuk IPM Kabupaten Klaten terdiri dari Usia Harapan Hidup, Harapan Lama Sekolah, Rata-Rata Lama Sekolah dan Pengeluaran Perkapita sebagai berikut:

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator Usia Harapan Hidup merupakan indikator yang mewakili dimensi umur panjang dan hidup sehat dalam penghitungan IPM. Usia Harapan Hidup saat lahir merupakan indikator yang mencerminkan derajat kesehatan masyarakat pada suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, maupun kualitas kesehatan. Secara tidak langsung, peningkatan Usia Harapan Hidup menunjukkan derajat kesehatan masyarakat semakin baik dalam semua aspek kesehatan.

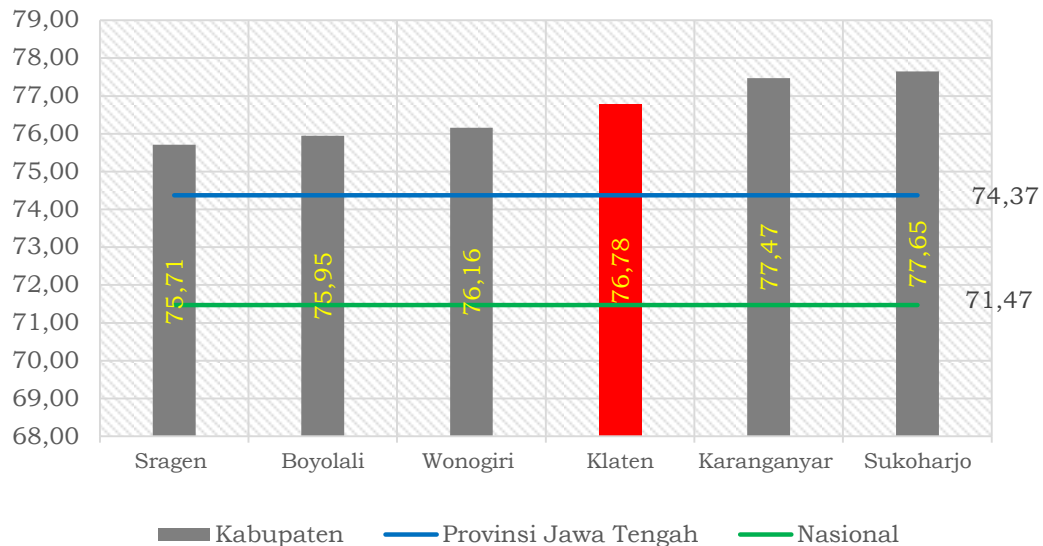
Perkembangan UHH Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 76,59 tahun dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 76,78 tahun. Kondisi UHH Kabupaten Klaten sejalan dengan perkembangan UHH Provinsi Jawa Tengah dan UHH Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.39.
Perkembangan Usia Harapan Hidup Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif UHH Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 76,78 tahun berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (74,37 tahun) dan Nasional (71,47 tahun), serta menempati posisi kedua tertinggi setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



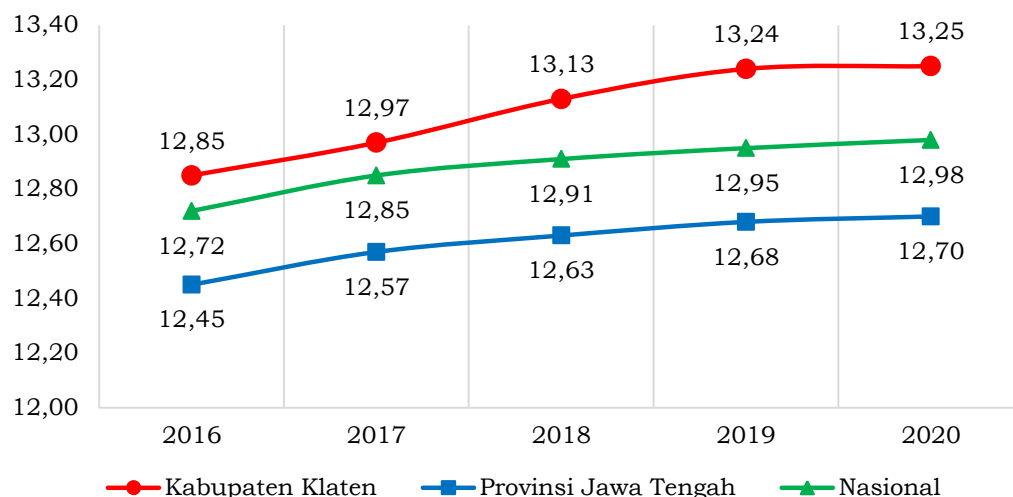
Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.40.
Posisi Relatif Usia Harapan Hidup
Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)

2. Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Dalam penghitungan IPM, dimensi pengetahuan dibentuk dari dua indikator, yaitu harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Cakupan dalam menghitung harapan lama sekolah adalah pendidikan penduduk dari usia 7 tahun ke atas, sementara cakupan penduduk untuk menghitung rata-rata lama sekolah yaitu dari usia 25 tahun ke atas. Rata-rata lama sekolah menggambarkan indikator output pembangunan jangka panjang, sedangkan harapan lama sekolah menggambarkan partisipasi sekolah penduduk umur 7 tahun ke atas. Perlu diketahui, indikator ini merupakan indikator proses pembangunan sebagai ukuran keberhasilan program-program pendidikan jangka pendek. Lebih jauh, rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah dapat memberikan gambaran tentang capaian (*stock*) dan penambahan (*flow*) sumber daya manusia berkualitas di suatu wilayah.

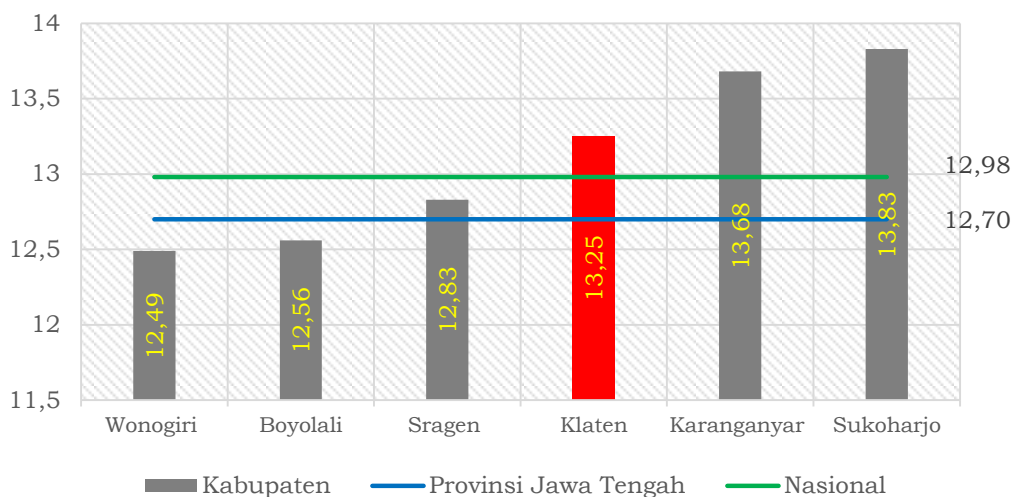
Perkembangan HLS Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami kenaikan dari 12,85 tahun menjadi 13,25 tahun di tahun 2020. Kondisi sama halnya dengan perkembangan HLS Provinsi Jawa Tengah dan HLS Nasional yang mengalami perubahan kinerja positif setiap tahunnya. secara rinci dapat dilihat Gambar berikut.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.41.
Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

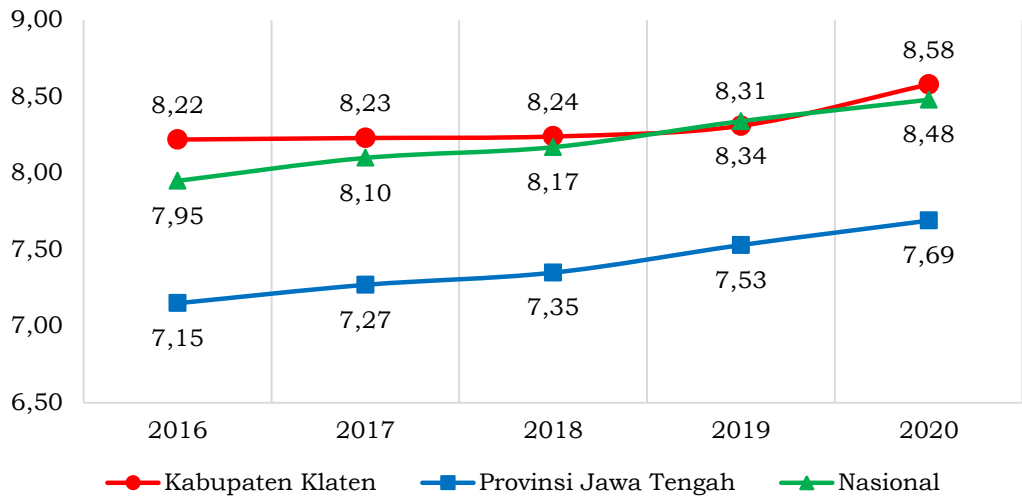
Posisi relatif HLS Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 13,25 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah (12,70 tahun) dan Nasional (12,98 tahun) serta menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.42.
Posisi Relatif Harapan Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)

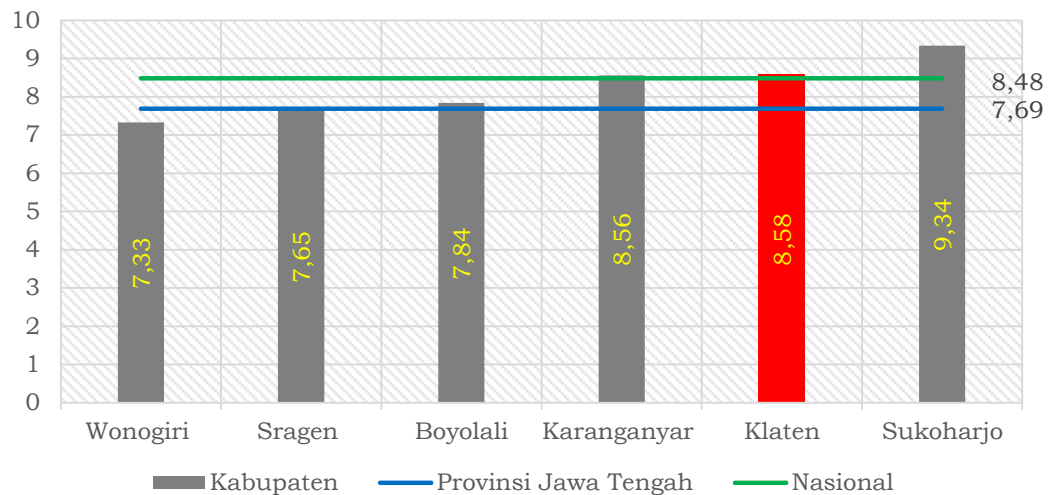
Perkembangan RLS Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, dari sebesar 8,22 tahun menjadi sebesar 8,58 tahun ditahun 2020. Kondisi RLS Kabupaten Klaten relevan dengan perkembangan RLS Provinsi Jawa Tengah dan RLS Nasional, secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.43.
Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (tahun)

Posisi relatif RLS Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 8,58 tahun berada di atas Provinsi Jawa Tengah (7,69 tahun) dan Nasional (8,48 tahun) serta berada menempati posisi tertinggi kedua setelah Kabupaten Sukoharjo. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

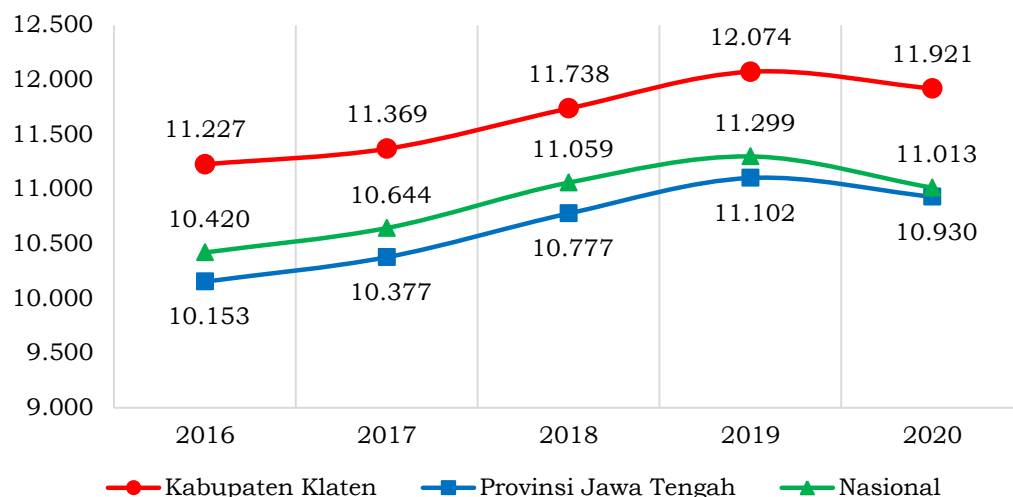


Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.44.
Posisi Relatif Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2020 (tahun)

3. Pengeluaran Per Kapita

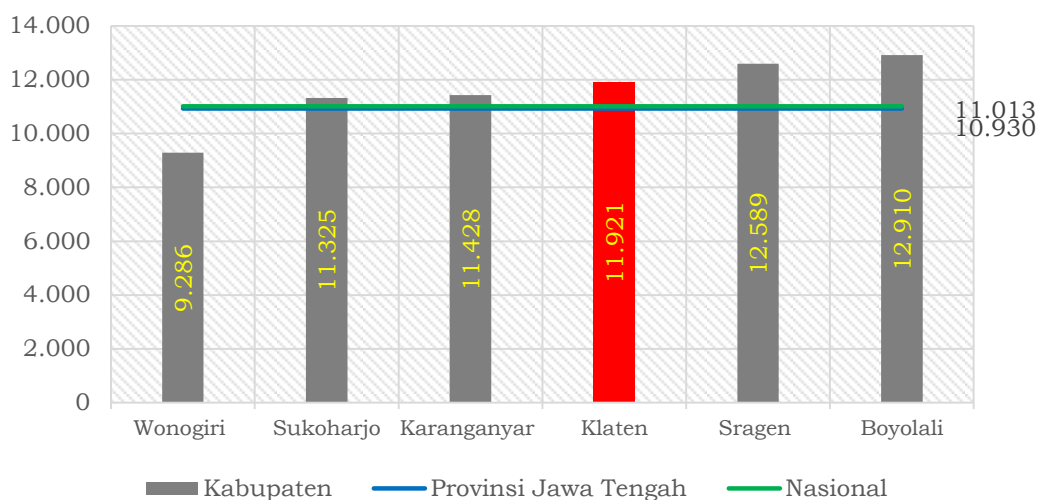
Dimensi standar hidup layak merupakan representasi dari kesejahteraan. Dimensi ini dicerminkan oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Perkembangan pengeluaran per kapita Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 terus mengalami kenaikan, yaitu sebesar Rp11.227ribu dan naik menjadi sebesar Rp12.074 ribu ditahun 2019, namun ditahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi Rp11.921. kondisi tersebut relevan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.45.
Perkembangan Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020 (ribu rupiah)

Posisi relatif pendapatan per kapita Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar Rp11.921 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (Rp10.930) dan Nasional (Rp11.013), serta menempati posisi tertinggi ketiga setelah Kabupaten Boyolali dan Kabupaten Sragen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Kabupaten Klaten, 2021

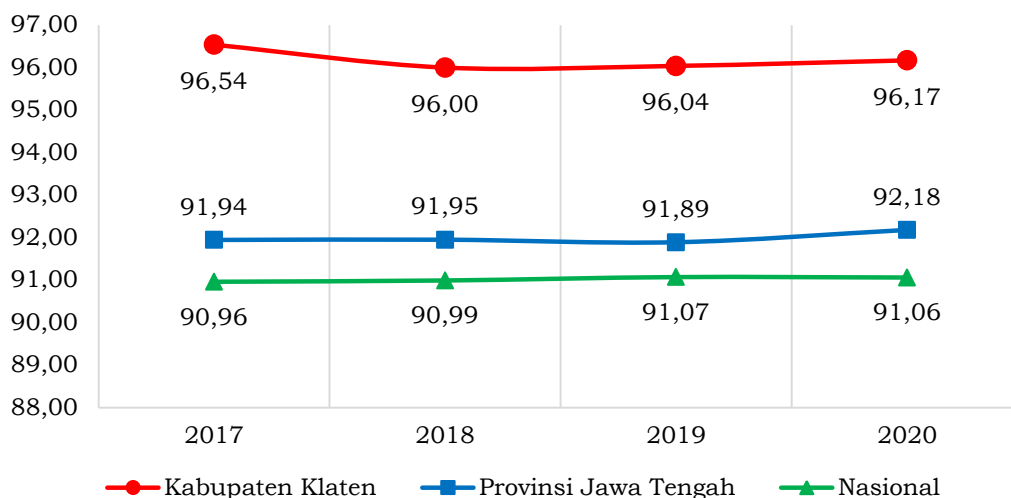
Gambar 2.46.
Posisi Relatif Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2020 (ribu rupiah)

2.2.13. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender merupakan ukuran yang dibentuk dengan cara merasiokan IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Nilai IPG 100 menunjukkan tidak ada kesenjangan antara capaian pembangunan manusia laki-laki dan perempuan. Nilai IPG dibawah 100 menunjukkan bahwa masih ada kesenjangan capaian pembangunan manusia yaitu pembangunan perempuan masih di bawah laki-laki. Begitupula sebaliknya, jika IPG bernilai lebih dari 100 artinya capaian pembangunan laki-laki di bawah perempuan.

IPG disusun dari komponen kesehatan, pendidikan, dan hidup layak sama halnya dengan IPM. Usia Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta pengeluaran per kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin. Dengan kata lain, dinamika IPG dari waktu ke waktu sangat dipengaruhi oleh perubahan dari tiga komponen tersebut.

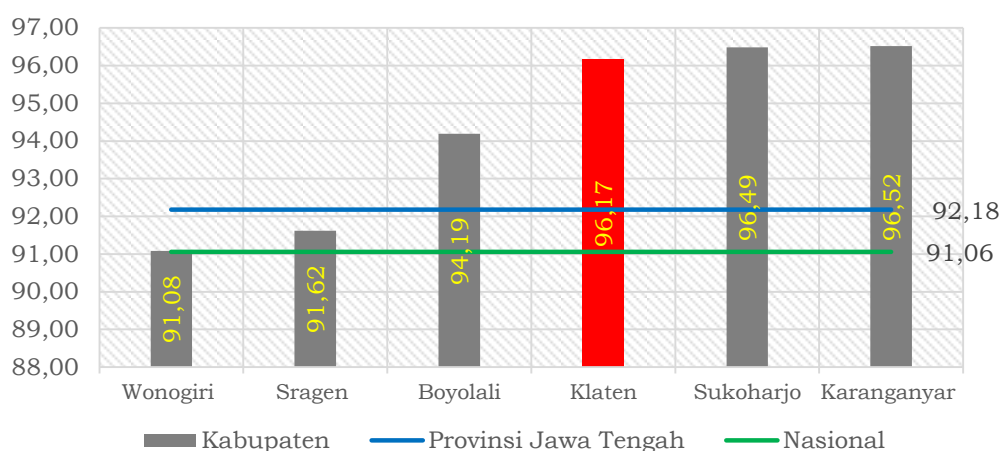
Perkembangan IPG Kabupaten Klaten dari tahun 2017 hingga tahun 2020 mengalami sedikit penurunan, dari sebesar 96,54 menjadi 96,17 ditahun 2020. Kondisi tersebut sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional di periode tahun 2020. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber : BPS Nasional, 2021

Gambar 2.47.
Perkembangan Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2017-2020

Posisi relatif IPG Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 96,17 berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (92,18) dan Nasional (91,06) dan menempati posisi tertinggi di urutan ketiga setelah Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Sukoharjo. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

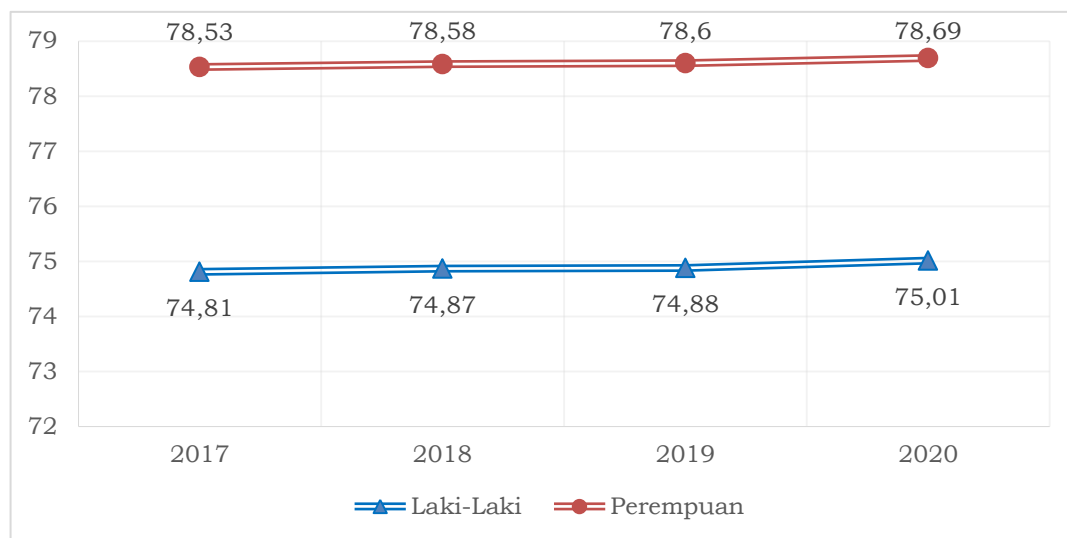
Gambar 2.48.
Posisi Relatif Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten Klaten Tahun 2020

Gambaran komponen pembentuk IPG Kabupaten Klaten terdiri dari Usia Harapan Hidup mewakili dimensi kesehatan, Harapan Lama Sekolah dan Rata-

Rata Lama Sekolah mewakili dimensi pengetahuan, serta Pengeluaran per Kapita mewakili dimensi ekonomi yang disajikan menurut jenis kelamin secara lengkap dapat dijabarkan berikut ini.

1. Usia Harapan Hidup (UHH)

Usia Harapan Hidup menurut jenis kelamin tahun 2017 hingga tahun 2020 Kabupaten Klaten mengalami peningkatan baik laki-laki maupun perempuan. UHH laki-laki lebih rendah dibandingkan UHH perempuan tiap tahunnya. Pada tahun 2020, UHH perempuan mencapai sebesar 78,69 tahun dan UHH laki-laki sebesar 75,01 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

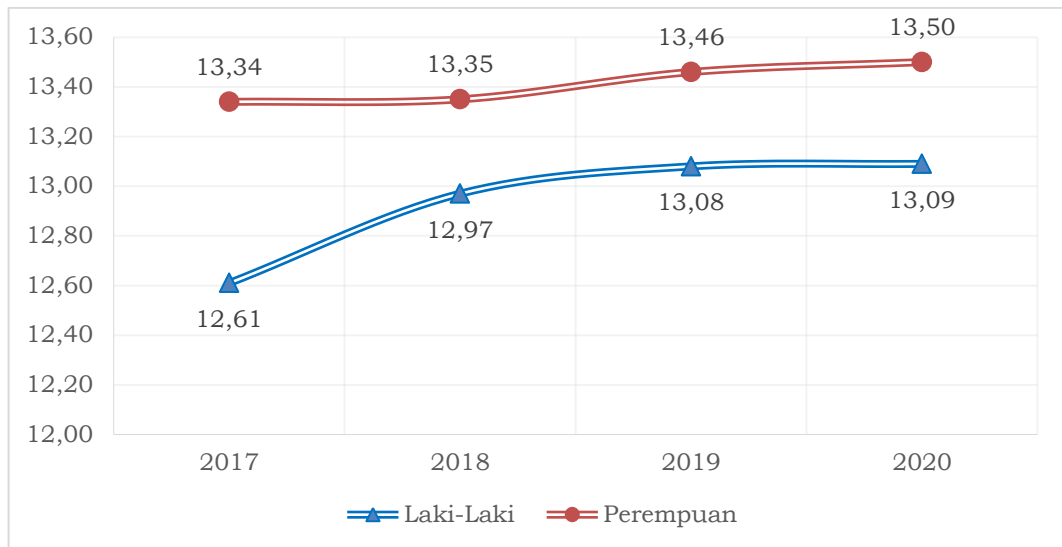


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.49.
Usia Harapan Hidup (UHH) Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

2. Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan lama sekolah berdasarkan jenis kelamin Kabupaten Klaten masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. HLS laki-laki lebih rendah dibandingkan HLS perempuan tiap tahunnya. di tahun 2020 HLS laki-laki sebesar 13,09 tahun dan untuk HLS Perempuan sebesar 13,50 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut ini.

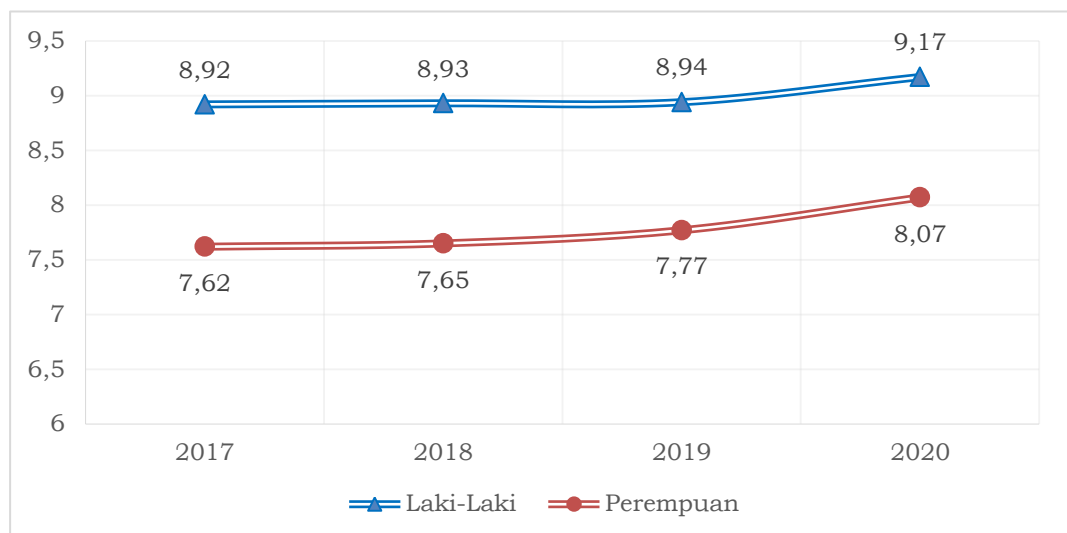


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.50.
Harapan Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

3. Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Rata-rata lama sekolah berdasarkan jenis kelamin di Kabupaten Klaten masing-masing mengalami peningkatan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, RLS laki-laki sebesar 9,17 tahun lebih tinggi dibandingkan RLS perempuan sebesar 8,07 tahun. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

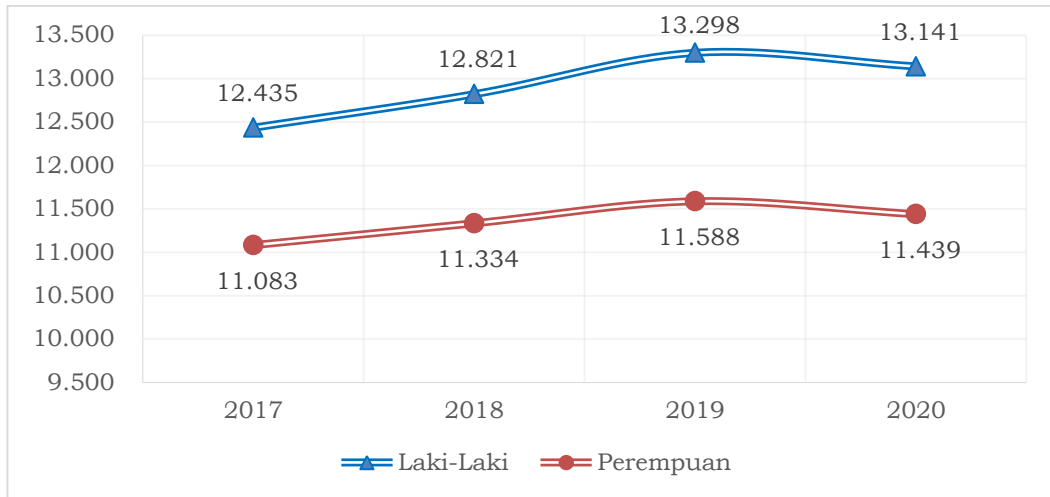


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.51.
Rata-Rata Lama Sekolah Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

4. Pengeluaran Per kapita

Pengeluaran per kapita kabupaten Klaten berdasarkan jenis kelamin masing-masing mengalami kenaikan pada tahun 2017 hingga tahun 2020. Pada tahun 2020, pengeluaran per kapita laki-laki sebesar Rp13.141 lebih tinggi dibandingkan pengeluaran per kapita perempuan sebesar Rp11.439. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



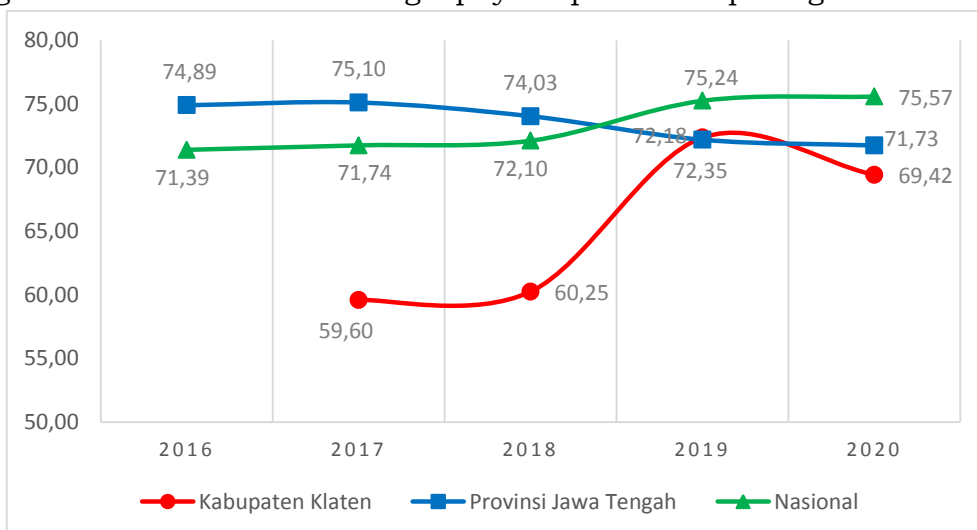
Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.52.
Pengeluaran Perkapita Berdasarkan Jenis Kelamin Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

2.2.14. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi yang disebut sebagai dimensi IDG.

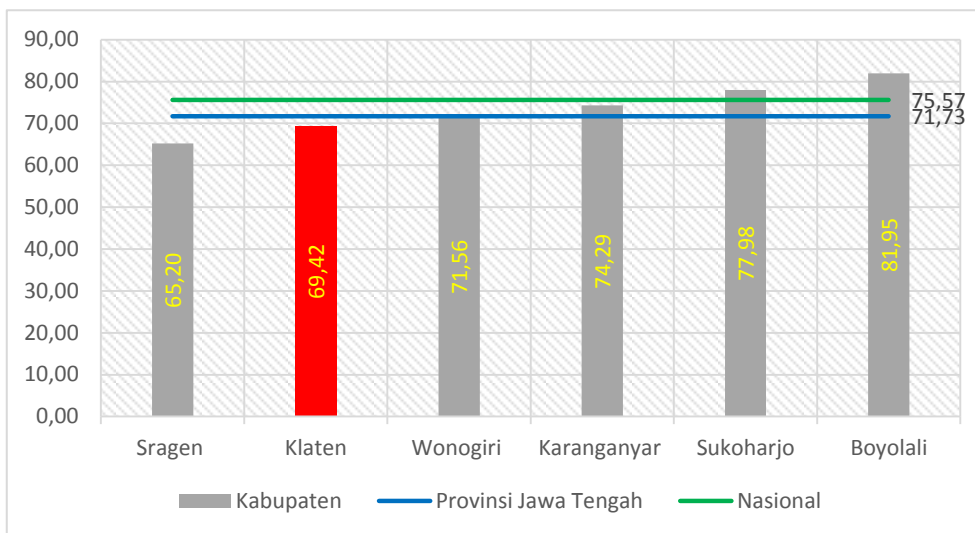
IDG diukur berdasarkan tiga komponen, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Dengan demikian, arah dan perubahan GEM sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen tersebut. Perkembangan IDG pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 mengalami peningkatan, yaitu pada tahun 2017 sebesar 59,60 naik menjadi sebesar 72,35 ditahun 2019, tetapi tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,93 sehingga menjadi 69,42. Kondisi tersebut berbanding lurus dengan Provinsi Jawa Tengah yang juga menurun pada tahun 2020, akan tetapi nasional menunjukkan peningkatan di tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.53.
Perkembangan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Capaian IDG Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 69,42 berada di bawah capaian Provinsi Jawa Tengah sebesar 71,73 dan Nasional sebesar 75,57 serta menempati posisi terendah kedua apabila dibandingkan dengan kabupaten sekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



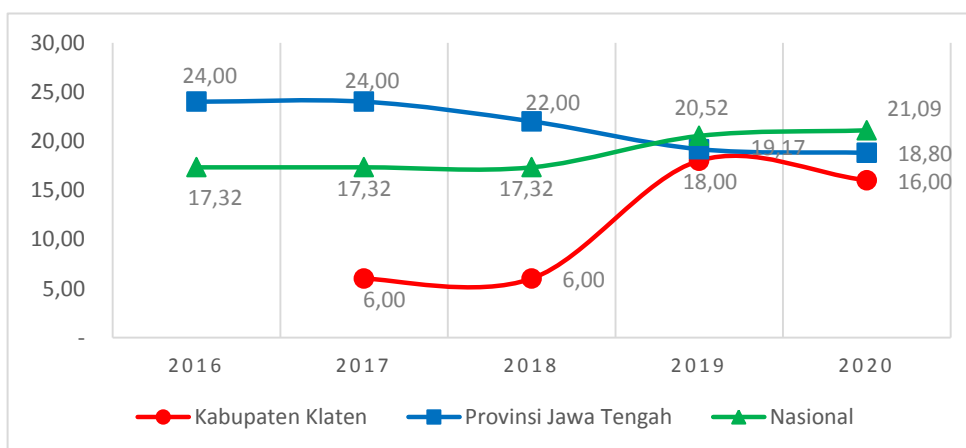
Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.54.
Posisi Relatif Indeks Pemberdayaan Gender Kabupaten Klaten Tahun 2020

Gambaran komponen pembentuk IDG Kabupaten Klaten, yaitu keterwakilan perempuan di parlemen; perempuan sebagai tenaga profesional, manajer, administrasi, dan teknisi; dan sumbangan pendapatan sebagai berikut.

1. Keterwakilan Perempuan di Parlemen

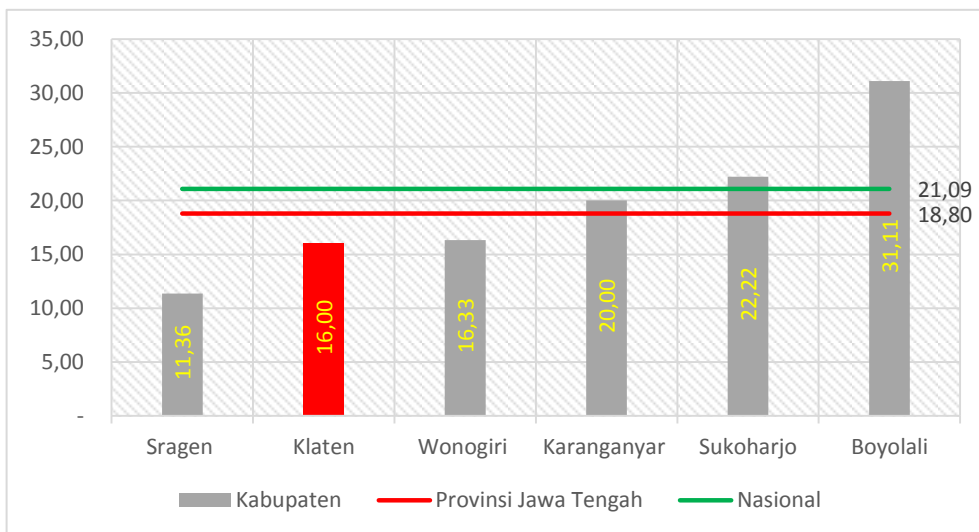
Keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami kenaikan, yaitu dari sebesar 6,00% menjadi 18,00% ditahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 2,00% menjadi 16,00%. Kondisi relevan terhadap perkembangan keterwakilan perempuan di parlemen Provinsi Jawa Tengah dimana periode tahun 2020 yang mengalami penurunan, sementara Nasional menunjukkan peningkatan. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.55.
Keterwakilan Perempuan Di Parlemen Kabupaten Klaten dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif keterwakilan perempuan di parlemen Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 16,00% berada di bawah rata-rata Provinsi Jawa Tengah (18,80%) dan rata-rata Nasional (21,09%), serta menempati posisi terendah kedua setelah Kabupaten Sragen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut.

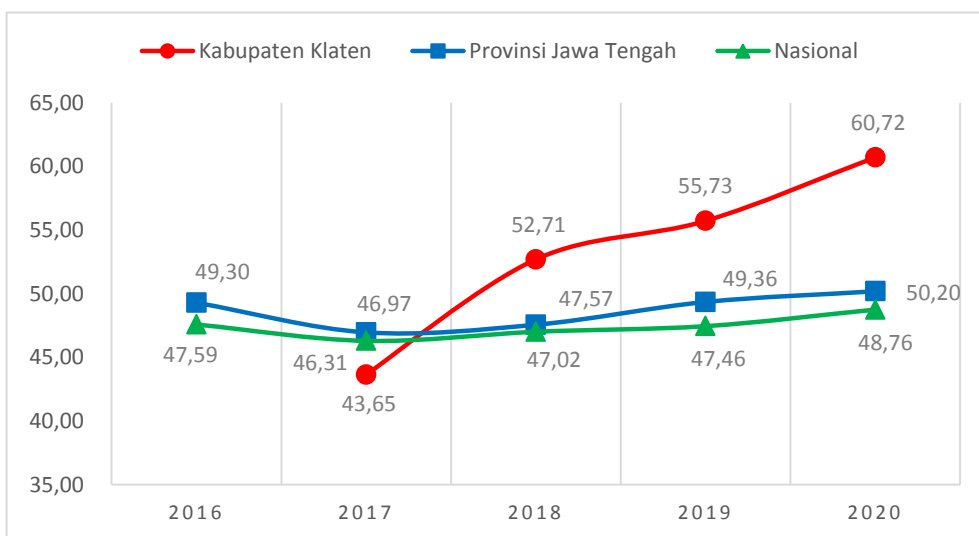


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.56.
Posisi Relatif Keterwakilan Perempuan di Parlemen Kabupaten Klaten Tahun 2020

2. Perempuan sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi

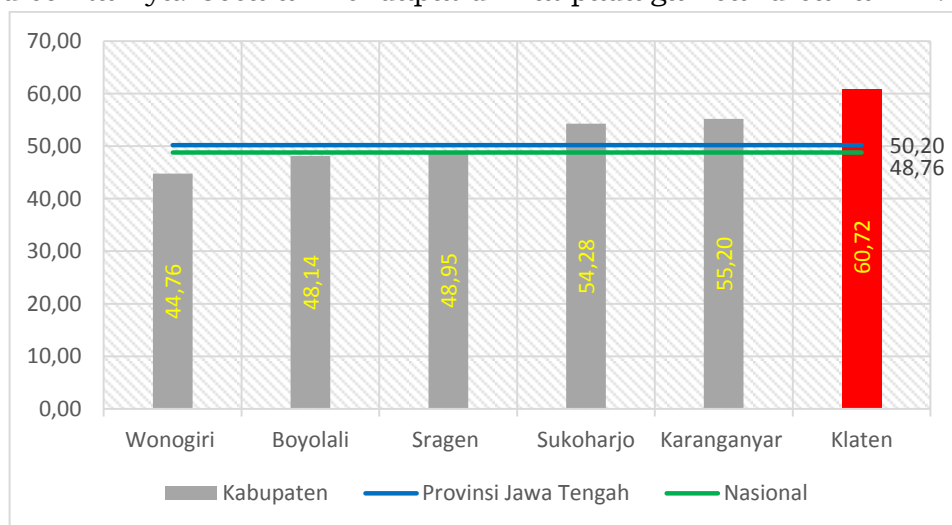
Perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2020 menunjukkan peningkatan, dari sebesar 43,65% menjadi 60,72% ditahun 2020. Kondisi tersebut sama dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional yang mengalami peningkatan di periode tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.57.
Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Klaten Dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 60,72% berada di atas rata-rata Provinsi Jawa Tengah (50,20%) dan Nasional (48,76%), serta menempati posisi tertinggi dibandingkan dengan kabupaten lain disekitarnya. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

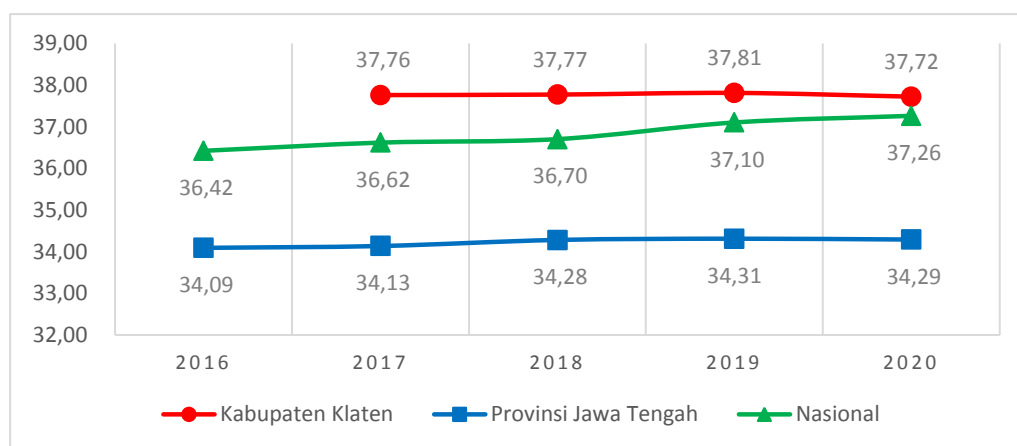


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.58.
Posisi Relatif Perempuan Sebagai Tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kabupaten Klaten Tahun 2020

3. Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja

Sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Klaten pada tahun 2017 hingga tahun 2019 mengalami sedikit kenaikan, dari sebesar 37,76% menjadi 37,81% ditahun 2019m tetapi ditahun 2020 menurun menjadi 37,72%. Kondisi tersebut tidak relevan terhadap perkembangan sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Provinsi Jawa Tengah yang menunjukkan peningkatan dan Nasional yang sedikit mengalami penurunan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut ini.

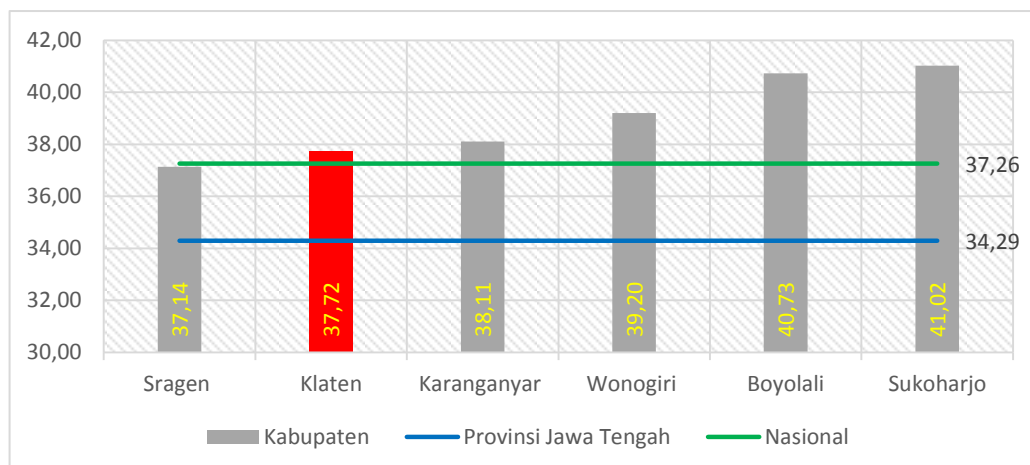


Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.59.
Sumbangan Perempuan dalam Pendapatan Kerja Kabupaten Klaten dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2016-2020

Posisi relatif sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebesar 37,72% berada di atas rata-rata Provinsi (34,29%) dan Nasional (37,26%) serta menempati posisi

terendah kedua setelah Kabupaten Sragen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Sumber: BPS Nasional, 2021

Gambar 2.60.
Posisi Relatif Sumbangan Perempuan Dalam Pendapatan Kerja Kabupat Klaten Tahun 2020

2.3. Aspek Pelayanan Umum

2.3.1. Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

a. Angka Partisipasi Kasar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

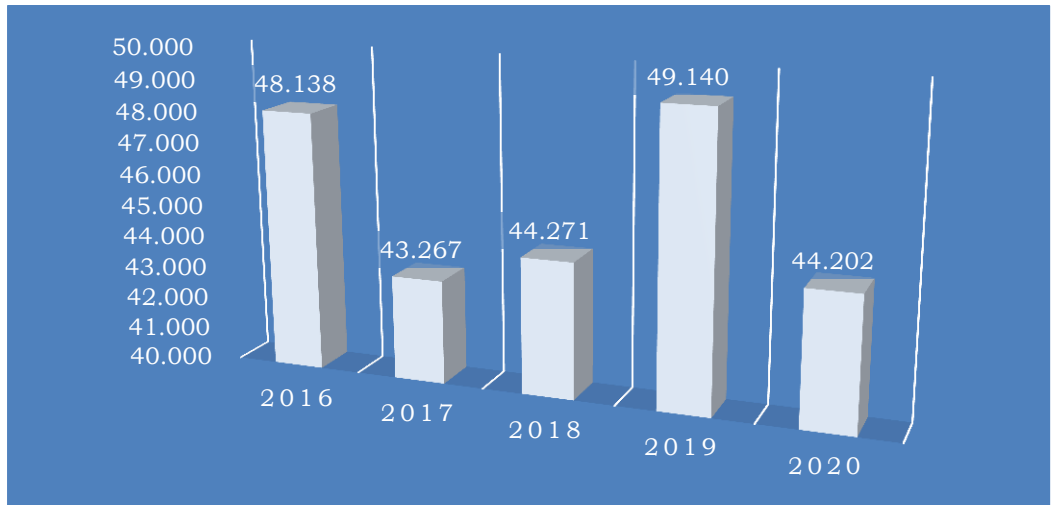
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia enam tahun. Penyelenggaraan PAUD bertujuan untuk memberikan bekal dan kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut khususnya kesiapan dalam memasuki pendidikan dasar. Berikut data jumlah Lembaga, peserta didik dan pendidik Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2020.

Tabel 2.15
Data Pokok Pendidikan Non Formal dan Anak Usia Dini di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Uraian	Lembaga	Pendidik	Peserta Didik		Jumlah
				L	p	
	PAUD	1.521	3.788	22.656	21.546	44.202
1	Satuan PAUD sejenis	125	274	1.314	1.379	2.693
2	Taman Penitipan Anak	30	74	243	219	462
3	Kelompok Bermain	428	1.055	4.119	4.068	8.187
4	RA/ BA	358	888	7.667	7.180	14.847
5	TK	580	1.497	9.313	8.700	18.013

Sumber: Dinas Pendidikan Kab Klaten. 2020

Perkembangan jumlah peserta didik PAUD selama Tahun 2016-2020 di Kabupaten Klaten fluktuatif dan menunjukkan peningkatan, yaitu jumlah peserta didik PAUD pada tahun 2016 sebanyak 48.138 orang pada tahun 2020 menurun menjadi 44.202 orang, seperti yang terlihat pada gambar berikut.

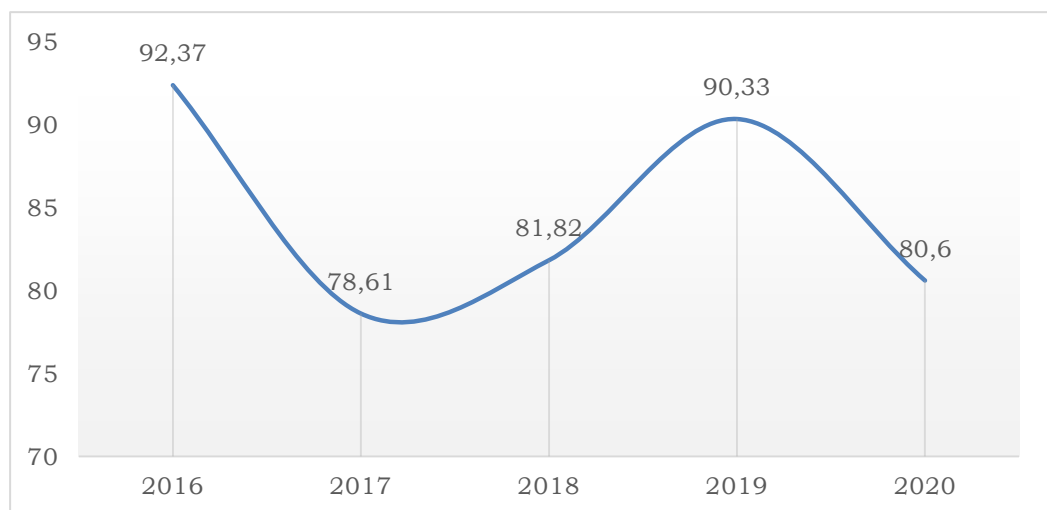


Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah

Gambar 2.61.
Grafik Perkembangan Jumlah Peserta Didik PAUD
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jumlah penduduk usia 0-6 tahun yang menempuh Pendidikan pada jenjang PAUD. Selama kurun waktu 2016-2020, APK PAUD fluktuatif dan cenderung menurun, pada tahun 2016 APK PAUD sebesar 92,37% dan tahun 2020 menurun menjadi 80,60%.

Salah satu penyebab menurunnya APK PAUD adalah masih rendahnya kesadaran orang tua/wali anak usia 4-6 tahun untuk mendaftarkan anak ke lembaga PAUD dengan berbagai alasan, seperti masih dalam pengasuhan orang tua/wali dan/atau belum tega melepaskan anak usia 4-6 tahun untuk bersekolah. Selengkapnya APK PAUD di Kabupaten selama lima tahun 2016-2020 ditampilkan pada gambar berikut.



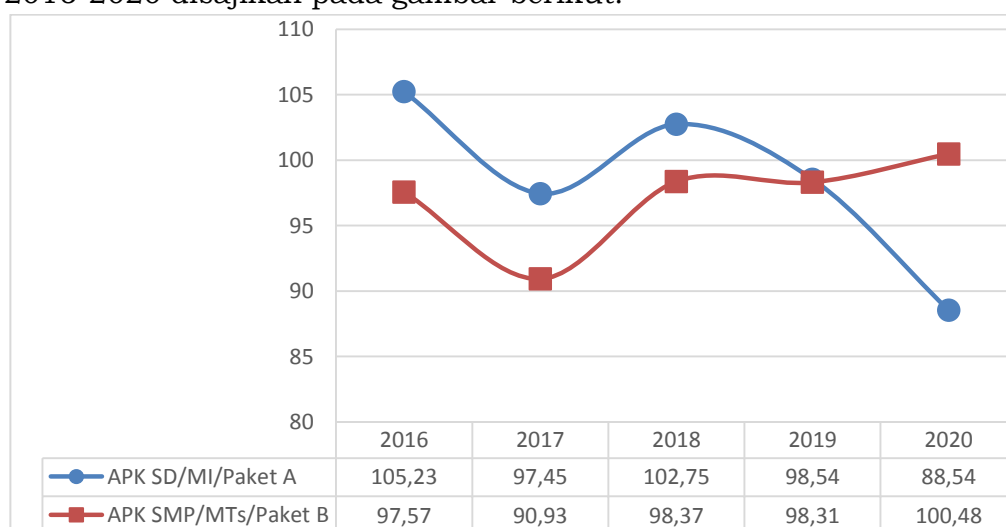
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah

Gambar 2.62.
Grafik Perkembangan APK PAUD Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

b. Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) untuk semua jenjang pendidikan dasar selama Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan. Namun dalam kurun waktu 5 (lima) tahun capaian APK SD/MI/Paket A mengalami kecenderungan menurun, sedangkan APK SMP/MTs/Paket B cenderung meningkat.

APK SD/MI/Paket A di Kabupaten Klaten tahun 2020 menunjukkan penurunan, kondisi ini menunjukkan semakin banyaknya penduduk usia sekolah yang tidak sekolah, salah satunya disebabkan kurangnya pemahaman orang tua/wali mengenai penerapan aturan/juknis Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di satuan pendidikan, belum meratanya sarana pendidikan pada wilayah perbatasan, serta tidak ada pembelajaran tatap muka di sekolah pada masa Pandemi Covid-19, berpengaruh terhadap pandangan sebagian orang tua/wali untuk menunda sesaat pendaftaran pada Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Secara rinci perkembangan APK SD/MI/Paket dan APK SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut.



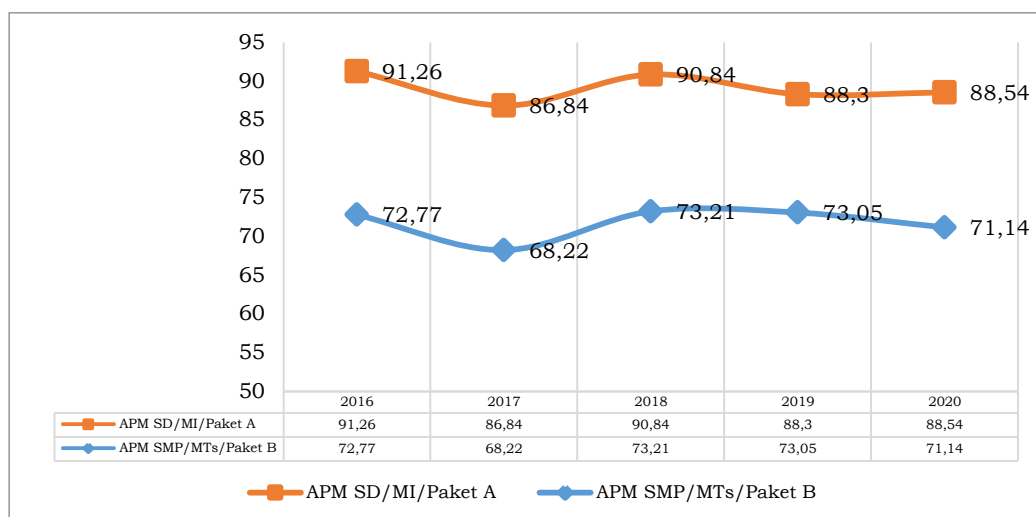
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah

Gambar 2.63.
Grafik Perkembangan APK Pendidikan Dasar dan Menengah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

c. Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) untuk semua jenjang pendidikan dasar dan menengah selama Tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dan kecenderungan menurun baik jenjang pendidikan SD/MI/Paket A maupun jenjang pendidikan SMP/MTs/Paket B. Pada tahun 2020 APM SD/MI/Paket A sebesar 88,54%, dan APM SMP/MTs/Paket B mencapai sebesar 71,14%. Kondisi tersebut harus dilakukan peningkatan APM dengan mendorong agar orang tua menyekolahkan anaknya di jenjang SD pada usia 7 tahun.

Perkembangan APM jenjang Pendidikan SD/MI/Paket A dan SMP/MTs/Paket B di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut:



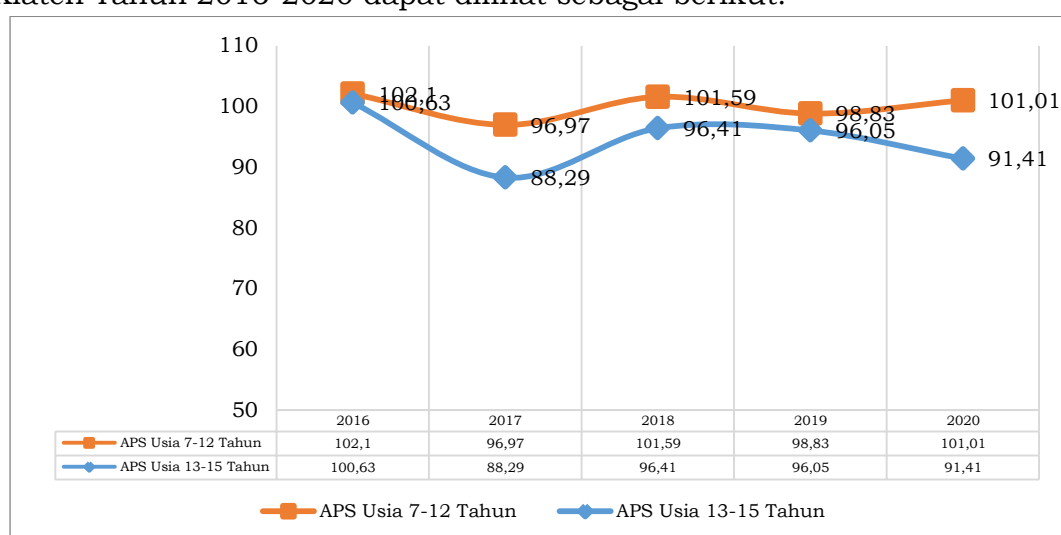
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah

Gambar 2.64.
Grafik Perkembangan APM Pendidikan Dasar dan Menengah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

d. Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) adalah perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Selama tahun 2016-2020, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk usia 7-12 tahun terjadi fluktuatif, pada tahun 2020 mencapai sebesar 101,01%. Sedangkan APS penduduk usia 13-15 tahun cenderung menurun, pada tahun 2020 tercatat sebesar 91,41%. Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagai berikut:



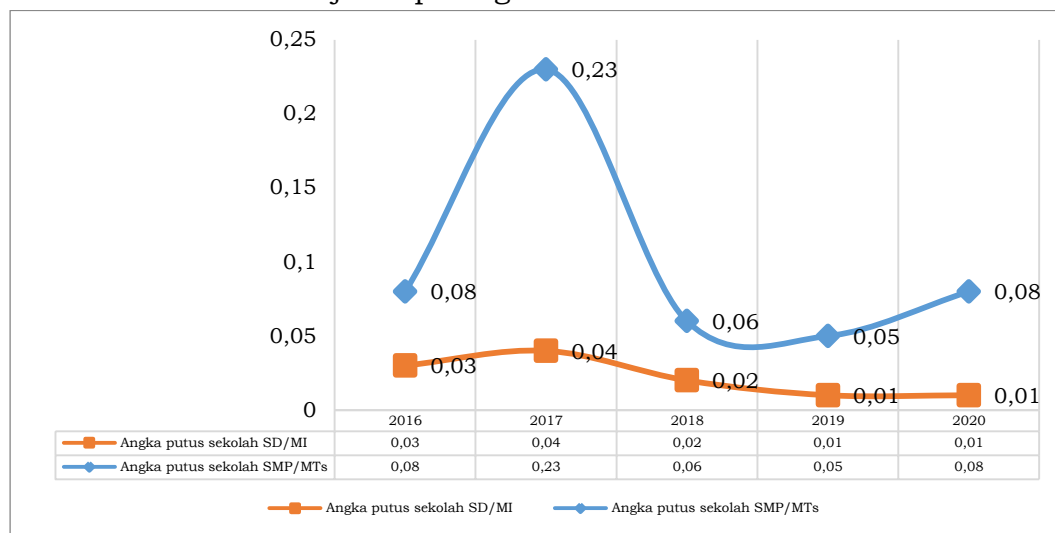
Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Gambar 2.65.
Perkembangan Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

e. Angka Putus Sekolah

Perkembangan Angka Putus Sekolah selama Tahun 2016-2020 untuk semua jenjang pendidikan SD/MI mengalami penurunan, terutama dalam kurun waktu 3 tahun terakhir, tahun 2020 tercatat sebesar 0,01%. Angka tersebut sudah melebihi target yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yaitu sebesar 0,2%. Sementara angka putus sekolah tingkat SMP/MTs menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun sebelumnya, dari 0,05% di tahun 2019 menjadi 0,08% di tahun 2020.

Perkembangan angka putus sekolah di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 disajikan pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten 2021, diolah

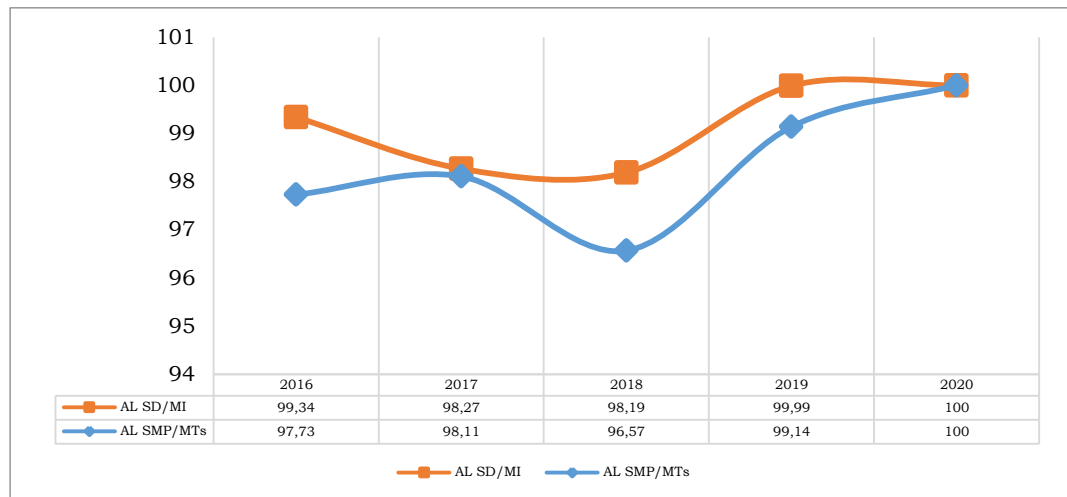
Gambar 2.66.
Perkembangan Angka Putus Sekolah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

f. Angka Kelulusan (AL)

Kondisi Angka Kelulusan (AL) untuk setiap jenjang penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Klaten pada Tahun 2016-2020 cenderung meningkat mencapai 100%. Angka kelulusan jenjang SD/MI maupun SMP/MTs pada tahun 2020 mengalami peningkatan, dari 99,99% menjadi 100% yang berarti bahwa semua peserta didik sekolah SD/MI dan SMP/MTs lulus.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tentang peniadakan Ujian Nasional di karenakan penyebaran Virus Covid-19 yang semakin meningkat Ujian Nasional (UN) dan ujian kesetaraan tidak menjadi syarat kelulusan, tetapi syarat kelulusan berdasarkan nilai raport.

Perkembangan Angka Kelulusan Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

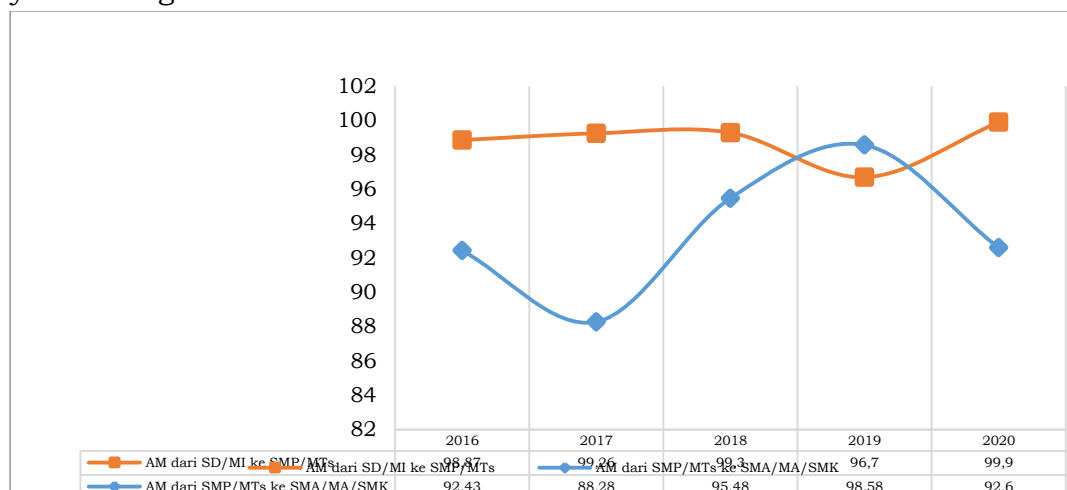
Gambar 2.67.
Perkembangan Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

g. Angka Melanjutkan (AM)

Indikator angka melanjutkan merupakan salah satu indikator untuk mengukur seberapa besar lulusan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang Pendidikan SMP/MTs maupun seberapa besar lulusan SMP/MTs yang melanjutkan ke SMA/SMK/MA. Peserta didik di jenjang pendidikan SD/MI yang melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs pada tahun 2016-2020 terjadi fluktuatif. Capaian angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs mengalami kenaikan dari 98,87% ditahun 2016 meningkat menjadi 99,90% ditahun 2020.

Capaian angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari 92,43% di tahun 2016 meningkat menjadi 98,58% di tahun 2019, kemudian mengalami penurunan di tahun 2020 menjadi 92,6%. Hal ini dipengaruhi oleh penerapan zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.

Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten yaitu sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

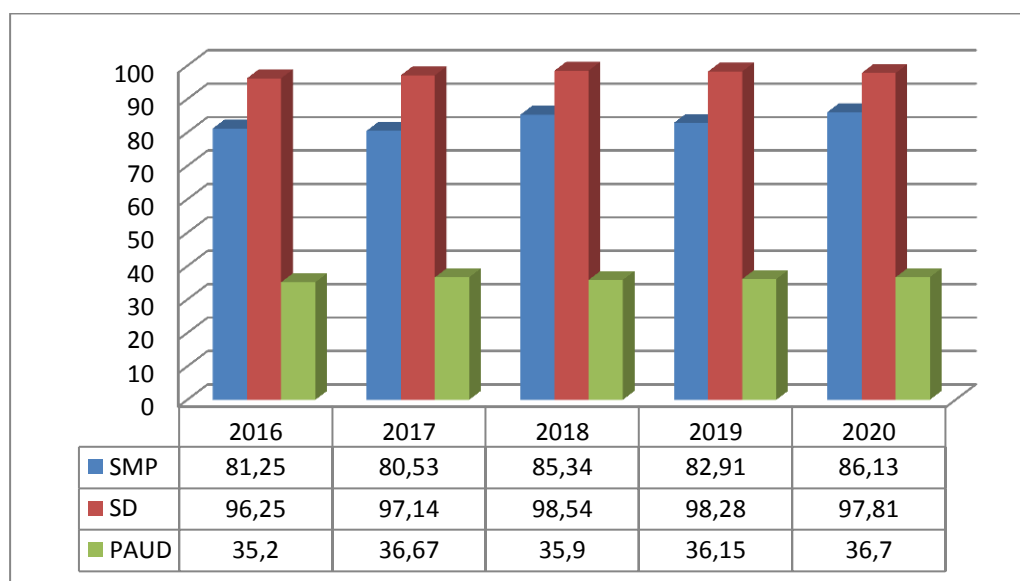
Gambar 2.68.
Perkembangan Angka Melanjutkan (AM) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

h. Akreditasi

Indikator akreditasi merupakan salah satu indikator untuk mengukur kualitas satuan pendidikan dalam mencapai standar nasional pendidikan, yang merupakan penilaian terhadap 8 (delapan) standar. Capaian akreditasi minimal B jenjang SMP mengalami kenaikan dari 81,25% ditahun 2016 meningkat menjadi 86,13% ditahun 2020.

Capaian akreditasi minimal B jenjang SD dari 92,43% di tahun 2016 meningkat menjadi 97,81% di tahun 2020. Sedangkan akreditasi minimal B jenjang PAUD di tahun 2016 sebesar 35,20% meningkat menjadi 36,70% di tahun 2020. Secara umum capaian akredit minimal B jenjang PAUD, SD dan SMP selama 5 (lima) tahun meningkat, namun dari tahun ke tahun perkembangannya fluktuatif kadang. Hal itu disebabkan karena berdirinya sekolah baru yang diselenggarakan masyarakat dan belum dilakukan akreditasi.

Di samping itu akreditasi jenjang PAUD masing rendah, sehingga perlu adanya usaha yang masif agar lembaga PAUD yang terakreditasi bertambah baik kuantitas maupun kualitasnya. Perkembangan capaian akreditasi minimal B jenjang PAUD, SD dan SMP adalah sebagai berikut:



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2020

Gambar 2.69.
Perkembangan Akreditasi Minimal B Satuan Pendidikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

i. Capaian Indikator Lain pada Urusan Pendidikan

Gambaran capaian indikator kinerja urusan Pendidikan meliputi kondisi sarana prasarana, rasio ketersediaan sekolah, rasio ketersediaan guru, proporsi dan partisipasi penduduk. Dalam dunia pendidikan sarana dan prasarana sangat penting guna menunjang penyelenggaraan proses belajar mengajar baik secara langsung maupun tidak langsung dalam satu kesatuan lembaga pendidikan. Kondisi sarana prasarana pendidikan di Kabupaten Klaten untuk jenjang pendidikan SD/MI, sekolah dengan kondisi baik meningkat pada tahun 2020 menjadi sebesar 68,87%. Sedangkan untuk jenjang

pendidikan SMP/MTs, sekolah dengan bangunan kondisi baik pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 74,35%.

Berdasarkan rasio ketersediaan sekolah di Kabupaten Klaten telah terpenuhi termasuk untuk rasio ketersediaan guru serta proporsi dan partisipasi penduduk dalam pendidikan telah terpenuhi. Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah mengindikasikan kemampuan untuk menampung semua penduduk usia sekolah. Hal tersebut mencerminkan kemampuan pemerintah dalam menyelenggarakan layanan pendidikan. Secara rinci capaian indikator tersebut diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.16
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pendidikan
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
SARANA PRASANA						
Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	%	71,09	81,00	79,00	67,18	68,87
Sekolah pendidikan SMP/MTs kondisi bangunan baik	%	85,11	96,30	80,00	87,37	74,35
RASIO KETERSEDIAAN SEKOLAH DAN GURU						
Rasio ketersediaan sekolah/ penduduk usia sekolah pendidikan dasar	%	1 : 79	1 : 74	1 : 78	1 : 74	1 : 71
Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah pendidikan menengah	%	1 : 25	1 : 22	1 : 25	1 : 26	1 : 25
Rasio guru/murid SD/MI dasar	Rasio	1 : 15	1 : 13	1 : 13	1 : 14	1 : 14
Rasio guru terhadap murid SMP/MTs	Rasio	1 : 10	1 : 11	1 : 11	1 : 12	1 : 15
Rasio guru/murid per kelas rata-rata SD/MI	Rasio	1 : 32	1 : 30	1 : 28	1 : 28	1 : 28
Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata SMP/MTs	Rasio	1 : 30	1 : 30	1 : 32	1 : 32	1 : 32
PROPORSI & PARTISIPASI PENDUDUK						
Proporsi murid kelas 1 yang berhasil menamatkan sekolah dasar	%	91,52	96,13	96,11	96,58	100
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	87,83	76,97	84,45	87,07	87,97
Penduduk usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	90,86	92,31	91,98	92,74	94,10

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

j. Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan

Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/ kota sebagaimana sesuai dengan SPM Pendidikan mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan, terdiri atas a) pendidikan anak usia dini; b) pendidikan dasar; dan c) pendidikan kesetaraan. Berdasarkan data dibawah ini, 3 indikator sampai dengan tahun 2020 belum mencapai 100%

sebagaimana target yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018.

Tabel 2.17
Capaian Standar Pelayanan Minimal Pendidikan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	%	75,79	61,74	67,36	73,15	66,92
2	Persentase Warga Negara Usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/MI, SMP/MTs)	%	93,27	87,93	93,18	91,32	91,71
3	Persentase Warga Negara Usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	%	-	-	-	1,44	5,79

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

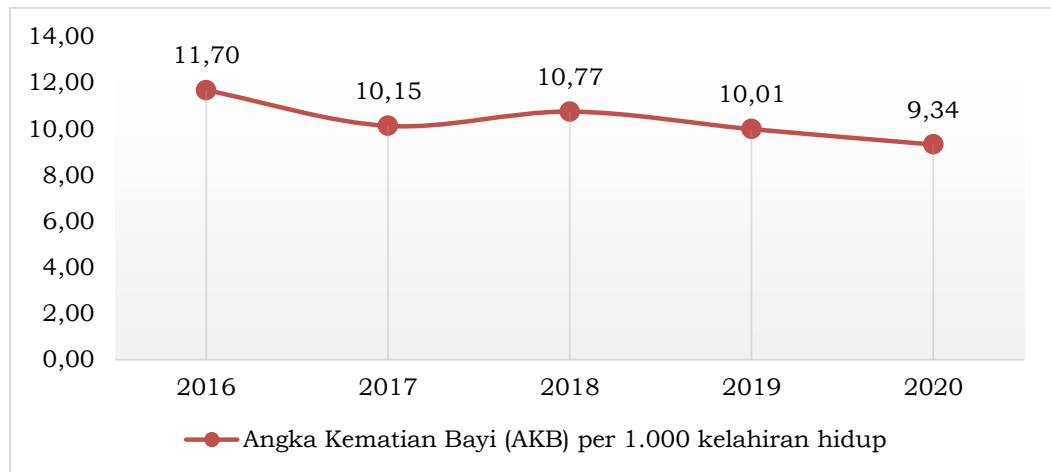
2. Kesehatan

Pembangunan kesehatan bertujuan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang dapat dilihat dari meningkatnya usia harapan hidup. Urusan kesehatan memiliki sumbangan dalam meningkatnya UHH yaitu dengan menekan Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian balita (AKBA), Angka Kematian Ibu (AKI) dan angka kematian karena kesakitan.

a. Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Bayi (AKB) menunjukkan banyaknya kematian bayi usia 0 tahun dari setiap 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu atau dapat dikatakan juga sebagai probabilitas bayi meninggal sebelum mencapai usia satu tahun (dinyatakan dengan per seribu kelahiran hidup).

Perkembangan Angka Kematian Bayi (AKB) per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 terjadi fluktuasi, yaitu 11,7 per 1.000 KH (tahun 2016) menjadi 9,34 per 1.000 KH (tahun 2020). Kondisi AKB per 1.000 kelahiran hidup di Kabupaten Klaten apabila dibandingkan dengan target nasional, telah melampaui target yang ditentukan yaitu 23 per 1.000 KH, meskipun demikian angka ini masih tergolong cukup tinggi. Upaya penurunan AKB dimasa Pandemi COVID-19 terus dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dengan mengoptimalkan bidan desa untuk tetap melakukan kunjungan neonatus (bayi) dan diketahui penyebab terbesar kematian bayi baru lahir adalah asfiksia, prematur dan sepsis. Perkembangan Angka Kematian Bayi di kabupaten klaten dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



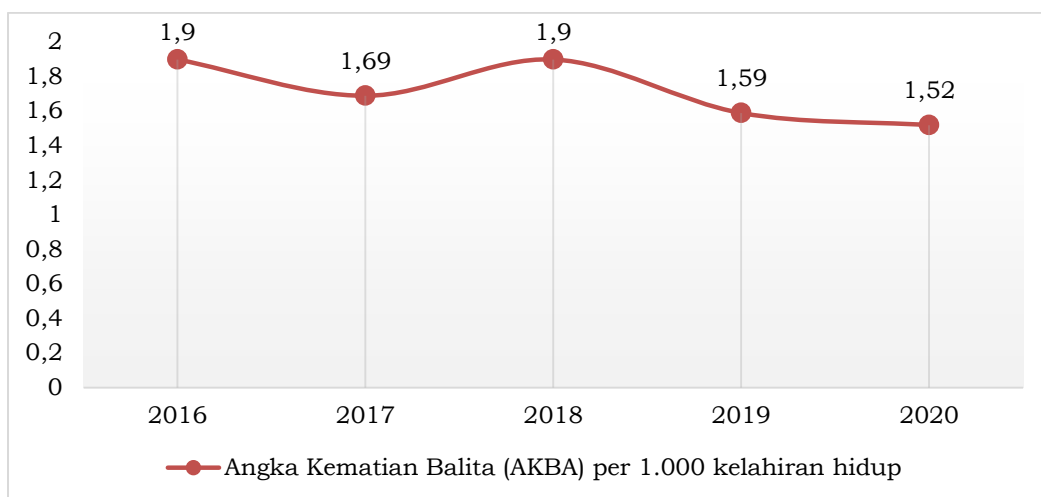
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten 2021, diolah

Gambar 2.70.
Perkembangan Angka Kematian Bayi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

b. Angka Kematian Balita (AKBA) per 1000 kelahiran hidup

Angka Kematian Balita (AKBA) merupakan jumlah kematian anak berusia 0-4 tahun selama satu tahun tertentu per 1.000 anak umur yang sama pada pertengahan tahun itu (termasuk kematian bayi). AKBA Kabupaten Klaten mengalami penurunan cukup signifikan dari 1,90 per 1.000 KH di tahun 2016 menjadi 1,52 per 1.000 KH di tahun 2020.

Di masa Pandemi, pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita masih berjalan walaupun tidak optimal. Kematian balita tetap terjadi akibat adanya penyakit penyerta seperti kelainan jantung, dll. Penurunan AKBA tahun 2020 disebabkan sudah dilakukan berbagai upaya sebagai berikut: 1) memperbaiki perilaku keluarga dan masyarakat, terutama perilaku hidup bersih dan sehat, termasuk upaya mencari pelayanan kesehatan serta memperbaiki akses, memperkuat mutu manajemen terpadu penyakit bayi dan balita, memperbaiki kesehatan lingkungan termasuk air bersih dan sanitasi, pengendalian penyakit menular, dan pemenuhan gizi yang cukup; 2) memperkecil kesenjangan antara perkotaan dan pedesaan; 3) perlunya kontribusi berbagai sektor dalam mendukung upaya mencapai derajat kesehatan balita sangat diperlukan; 4) meningkatkan perlindungan dan pelayanan kesehatan bagi balita dari keluarga miskin. Perkembangan Angka Kematian Balita selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



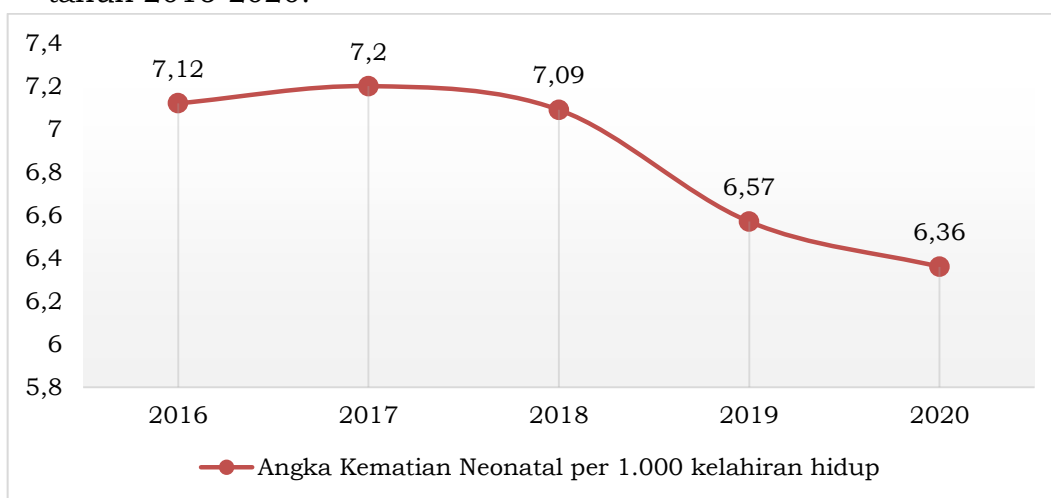
Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Gambar 2.71.
Perkembangan Angka Kematian Balita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

c. Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup

Angka kematian neonatal adalah jumlah kematian neonatal per 1.000 kelahiran hidup. Kematian neonatal (bayi umur 0–28 hari) merupakan 2/3 dari kematian bayi. Kematian neonatal dini/perinatal (bayi umur 0–7 hari) merupakan 2/3 dari kematian neonatal.

Angka Kematian Neonatal per 1.000 kelahiran hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 cenderung menurun, dari 7,12 per 1.000 KH (tahun 2016), menjadi 6,36 per 1.000 KH (tahun 2020). Angka Kematian Neonatal per 1000 kelahiran hidup menurun karena sudah dilakukan upaya, seperti: 1) Melakukan revitalisasi Posyandu, 2) Memperkuat kelembagaan Pokjanal Posyandu, 3) Meningkatkan transformasi KMS ke dalam Buku KIA, 4) Memperkuat kader Posyandu, 5) Kunjungan Neonatus, dan 6) Pemantauan di Posyandu. Berikut perkembangan angka kematian neonatal Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Gambar 2.72.
Perkembangan Angka Kematian Neonatal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

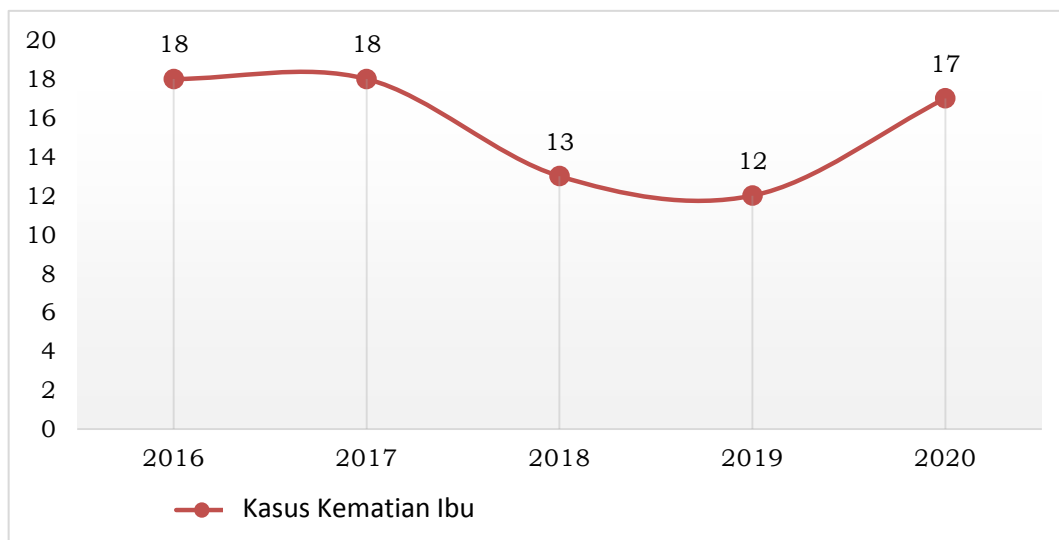
d. Kasus Kematian Ibu

Kasus Kematian Ibu adalah banyaknya kematian perempuan pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilannya atau pengelolaannya, dan bukan karena sebab-sebab lain.

Kasus Kematian Ibu Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 semakin menurun kasusnya, namun pada tahun 2020 ini meningkat kembali dengan adanya 17 kasus. Menurunnya kasus di tahun 2016-2019 tersebut tak lepas dari upaya pemerintah Kabupaten Klaten dengan melakukan langkah-langkah seperti : 1) Melengkapi sarana dan prasarana yang ada di fasilitas kesehatan, baik fasilitas kesehatan dasar atau rujukan, 2) meningkatkan pemahaman masyarakat tentang kehamilan, 3) memberikan jaminan kesehatan khusus untuk ibu hamil.

Sedangkan meningkatnya kasus kematian ibu di tahun 2020 akibat Pandemi COVID-19. Dampak Pandemi Covid-19, ada beberapa ibu hamil yang akan menjalani persalinan namun takut ke fasilitas pelayanan kesehatan, sudah ada faktor resiko sebelum hamil di masa Pandemi dan mempunyai comorbid (penyakit penyerta) dan kurang optimalnya pemeriksaan kehamilan terpadu (ANC Terpadu) yang hanya lewat telepon dan tidak seperti jika bisa memeriksa langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Berikut perkembangan kasus Kematian Ibu di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.



Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Gambar 2.73.
Perkembangan Kasus Kematian Ibu per 100.000 Kelahiran Hidup Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

e. Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis

Gambaran rasio ketersediaan sarana prasarana serta tenaga medis di Kabupaten Klaten sebagai salah satu alat/ indikator untuk mengetahui ketersediaan dalam pelayanan kesehatan kepada penduduk khususnya Kabupaten Klaten.

Berdasarkan data Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis diketahui bahwa rasio posyandu per satuan balita pada setiap

tahunnya meningkat. Sedangkan rasio puskesmas, RS, dokter, dan tenaga medis di Kabupaten Klaten masih diperlukan peningkatan. berikut perkembangan data rasio ketersediaan sarana dan prasarana tenaga medis di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, sebagai catatan data tahun 2020 diambil dari Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan (SISDMK), sedangkan pada tahun 2016-2019 data diambil secara manual sehingga terjadi perbedaan data yang cukup signifikan.

Tabel 2.18
Perkembangan Rasio Ketersediaan Sarpras dan Tenaga Medis
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Rasio posyandu per satuan balita	Rasio	26,16	26,88	27,63	27,99	28,00
Rasio puskesmas	Rasio	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29
Rasio Pustu per satuan penduduk	Rasio	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan penduduk	Rasio	1,302	0,896	0,896	0,237	0,026
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Rasio	0,349	0,253	0,253	0,074	0,05
Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100	100	100	100	100
Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	0	0	100	100	100
Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan laboratorium klinis dan laboratorium air	%	100	100	100	100	100
Persentase sistem informasi kesehatan	%	50	50	50	50	50
Persentase puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	88	88	91	91	91

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

f. Cakupan Kebidanan

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani serta Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 hingga tahun 2020 menunjukkan penurunan. Hal ini menunjukkan masih adanya persalinan yang belum ditolong oleh tenaga kesehatan.

Berikut perkembangan cakupan kebidanan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020:

Tabel 2.19
Perkembangan Cakupan Kebidanan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	%	97,88	101,58	89,01	83,28	84,40
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	%	100	100	99,98	99,99	99,99

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

g. Cakupan Penanganan Gizi

Cakupan desa/kelurahan universal *child immunization* dan cakupan penanganan balita gizi buruk di Kabupaten Klaten periode tahun 2016-2020 sudah mencapai 100% selama lima tahun terakhir. Berikut perkembangan cakupan penanganan gizi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020.

Tabel 2.20
Perkembangan Cakupan Penanganan Gizi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	100	100	100	100	100
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021, diolah

h. Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita Penduduk

Cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten secara keseluruhan menunjukkan penurunan. Dilihat dari beberapa indikator seperti cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA dari 51,0% di tahun 2016 menurun menjadi 29,98% di tahun 2020. Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk) juga mengalami penurunan menjadi 46,04 per 100.000 penduduk di tahun 2020. Angka kejadian Malaria per 100.000 penduduk pada tahun 2020 tercatat sebesar 0,0033 di tahun 2020. Selengkapnya perkembangan cakupan penanganan penyakit yang diderita penduduk di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.21
Perkembangan Cakupan Penanganan Penyakit yang Diderita
Penduduk Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020*
Persentase anak usia 1 tahun yang diimunisasi campak	%	99,6	99,5	101,3	99,8	88,4
Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	%	140	160	120	320	83,33
Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	83,3	72,6	54,1	47,0	29,33
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	%	51,0	45,9	41,0	36,5	29,98
Tingkat prevalensi Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	72,3	128,4	169,6	109,7	46,04
Tingkat kematian karena Tuberkulosis (per 100.000 penduduk)	Per 100.000 penduduk	1,1	1,5	1,9	6,7	1,96
Proporsi jumlah kasus Tuberkulosis yang terdeteksi dalam program DOTS	%	51,0	45,9	41,0	36,5	31,44
Proporsi kasus Tuberkulosis yang diobati dan sembuh dalam program DOTS	%	74,8	66,7	72,7	74,7	71,63
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
Penderita diare yang ditangani	%	7,4	13,2	11,6	9,8	4,4
Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,5	0,7	0,8	0,4	0,0033
Prevalensi HIV/AIDS (persen) dari total populasi	%	0,011	0,012	0,011	0,012	0,011

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2020

Keterangan: *) Data hingga Bulan Desember

i. Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan

Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan. Bahwa urusan kesehatan merupakan urusan wajib dasar yang memiliki 12 indikator SMP yang harus dipenuhi. Berikut capaian SPM urusan kesehatan Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.

Tabel 2.22
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	92,84	92,85	92,51	93,27	93,44
2	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan	%	100	100	99,98	99,99	99,99

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
	persalinan						
3	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	%	97,59	97,57	98,05	97,79	96,70
4	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	94	95,25	96,17	95,77	92,71
5	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	100	100	100	100	31,13
6	Persentase orang usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	NA	32	49	89	73,26
7	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	67,33	85,9	80,51	91,22	73,14
8	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	60	63	68	49	32,38
9	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	30	37	51	100	90,76
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	70	81	98,24	93,14	88,32
11	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	NA	99,65	98,92	49,22	29,28
12	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	NA	64,81	81,72	90,45	86,08

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Capaian indikator SPM persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar pada tahun 2020 adalah nol (0) karena pada tahun tersebut tidak ada pembelajaran tatap muka. Kabupaten Klaten termasuk kategori Kabupaten belum mencapai strata Kabupaten Sehat, hal ini dapat dilihat dari Indeks Keluarga Sehat yang baru memperoleh nilai 0,252. Kondisi ini diperkuat dengan masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular. Sementara itu indikator preventif dan promotif belum mencapai 100%. Hal ini dapat dilihat dari cakupan STBM, dan Rumah tangga berPHBS. Secara lebih lengkap dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.23
Realisasi Indikator Kesehatan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Cakupan Desa/kelurahan <i>Universal Child Immunization (UCI)</i>	%	100	100	100	100	100
2	Non Polio AFP rate per 100.000 penduduk	Per 100.000 penduduk	140	160	120	320	83,33
3	Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	83,3	72,6	54,1	47	29,33
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	%	100	100	100	100	100
5	Penderita diare yang ditangani	%	7,4	13,2	11,6	9,8	6
6	Angka kejadian Malaria	Per 100.000 penduduk	0,5	0,7	0,8	0,4	0,77
7	Indeks Keluarga Sehat	Indeks	NA	NA	0,25	0,25	0,252
8	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	%	5,73	5,4	4,55	6,26	10,61
9	Cakupan STBM	%	0	0	0	2,74	24,9
10	Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100	100	100	100	100
11	Persentase Penduduk Memiliki JKN	%	62,51	65,71	85,71	90,17	89,00
12	Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	100	100	100	100	100
13	Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	100	100	100	100	100
14	Persentase rumah tangga yang berperilaku hidup bersih dan sehat (PHBS)	%	92,82	88,69	89,74	94,35	96,26
15	Cakupan Desa Siaga Aktif	%	100	100	100	100	57,6
16	Angka Kejadian HIV	/1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV	NA	NA	NA	NA	0,14
17	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk	%	72,30	128,44	169,62	109,70	24,26
18	Angka Kejadian DBD	/100.000	60,44	8,6	1,71	27,32	33,45
	Persentase Jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis)	%	4,8	10,7	6,7	5,4	29,4

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

Terdapat penurunan persentase penduduk memiliki JKN dari 90,17 menjadi 89,00 karena rumus perhitungannya beda. Perhitungan lama menggunakan data peserta yang sudah terdaftar baik yang aktif maupun yang tidak aktif, namun di perhitungan yang sekarang yang dihitung hanya yang aktif.

j. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk

Pada tahun 2020, akibat adanya Pandemi Covid-19, mengakibatkan pelayanan kesehatan terganggu. Sebab sebagian besar pelayanan dan termasuk anggaran difokuskan untuk pencegahan dan penanganan Pandemi Covid-19. Dari beberapa indikator yang ada pada cakupan pelayanan kesehatan penduduk di Tahun 2020 hampir semua mengalami penurunan. Sehingga untuk kedepan diperlukan peningkatan pelayanan kesehatan yang tidak hanya difokuskan untuk penanganan Pandemi Covid-19, tetapi juga perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan terutama kesehatan ibu hamil, bayi, balita dan peningkatan fasilitas kesehatan. Masyarakat juga perlu diberikan edukasi tentang kesehatan masyarakat supaya dapat melakukan tindakan pencegahan dan pengobatan ke fasilitas pelayanan kesehatan.

Tabel 2.24
Perkembangan Cakupan Pelayanan Kesehatan Penduduk
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	%	9,10	8,49	9,67	11	9,09
Cakupan kunjungan bayi	%	96,04	99,67	98,36	98,07	96,89
Cakupan puskesmas	%	130	130	130	130	130
Cakupan pembantu puskesmas	%	20,9	20,9	20,9	20,9	20,9
Cakupan kunjungan Ibu hamil K4	%	92,84	92,85	92,51	93,27	93,33
Cakupan pelayanan nifas	%	96,98	97,2	97,54	97,55	96,92
Cakupan neonatus dengan komplikasi yang ditangani	%	54,92	57,05	53,47	56,03	55,63
Cakupan pelayanan anak balita	%	94	95,25	96,17	95,77	92,71

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten, 2021

k. Persentase Dokter IGD RSUD Yang Sudah Mengikuti Pelatihan Kegawatdaruratan Sesuai Standar

Pelatihan kegawatdaruratan adalah pelatihan yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan serta dapat melakukan diagnosa secara tepat dan akurat terhadap pasien trauma, dapat mengerjakan pertolongan secara benar dan sistematis serta mampu menstabilkan pasien untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Kemampuan tersebut harus dimiliki oleh dokter yang bekerja di IGD dengan dibuktikan memiliki sertifikat pelatihan dengan masa berlaku 5 tahun. Sejak tahun 2016, dokter yang ditempatkan di IGD

sudah memiliki sertifikat pelatihan yang masih berlaku. Namun pada tahun 2020 ada dokter yang masa berlaku pelatihan telah habis dan belum bisa melakukan perpanjangan dikarenakan kondisi Pandemi, sehingga capaiannya hanya 84,6%.

Tabel 2.25
Persentase Dokter IGD RSUD Yang Sudah Mengikuti Pelatihan
Kegawatdaruratan Sesuai Standar Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kegawatdaruratan sesuai standar	%	100	100	100	100	84,6

Sumber: RSUD Bagas Waras Kabupaten Klaten, 2021

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

a. Jalan dan Jembatan

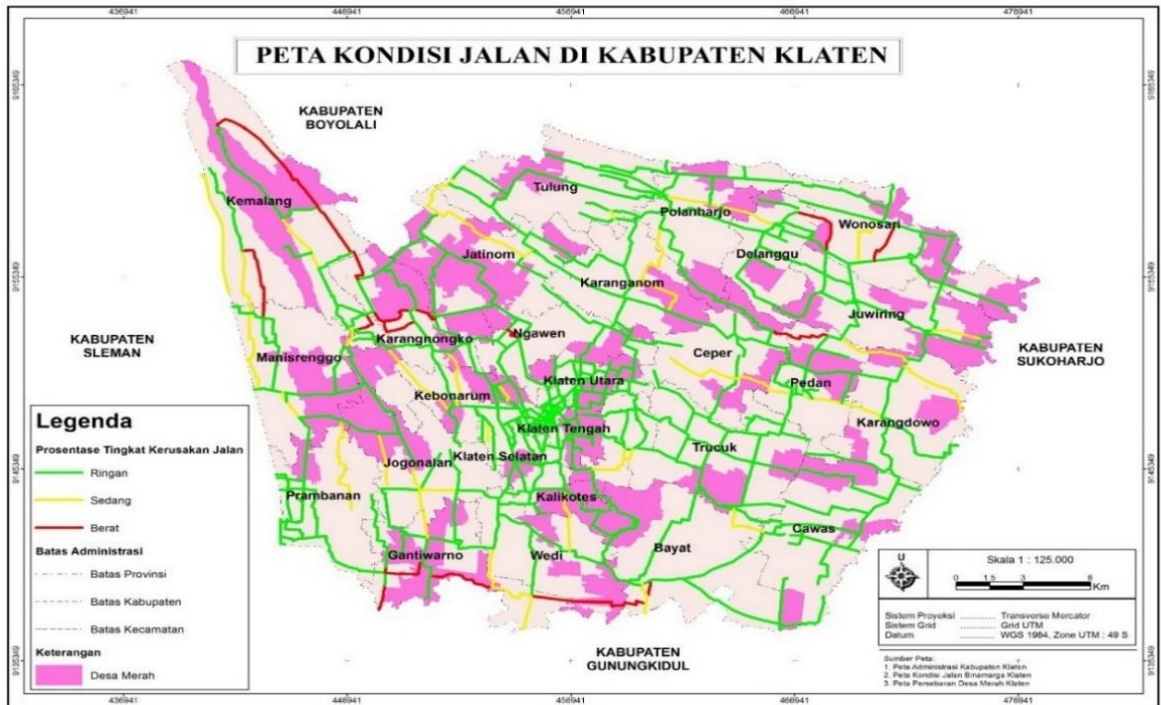
Kondisi jalan di Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan, hal ini dapat dilihat dari data proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, pada tahun 2016 sebesar 61,3% meningkat menjadi 66,25% di tahun 2020. Sementara itu untuk jalan kondisi mantap (baik dan sedang) sampai dengan tahun 2020 mencapai 90,08%. Meskipun kondisi jalan mantap meningkat namun masih terdapat jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 33,75% serta 24,55% jalan dalam kondisi sedang yang perlu ditingkatkan kualitasnya.

Tabel 2.26
Kondisi Jalan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Keadaan	Status Jalan							
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten					
	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020	
I	Jenis Permukaan							
	a. Aspal/Hotmix/Lapen/sandsheet	33,52	41,360	753,94	725,29	725,29	689,66	605,19
	b. Berbatu/Macadam	-	-	3,16	-	-	-	-
	c. Hotmix	-	-	-	-	-	-	-
	d. Kerikil	-	-	-	2,9	2,9	2,1	11,55
	e. Tanah/Jalan Belum Tembus	-	-	12,53	-	-	-	-
	f. Beton	-	-	-	41,44	41,44	77,87	99,14
	Jumlah – I	33.52	41,360	769,63	769,63	769,63	769,63	715.89
II	Kondisi Jalan							
	a. Baik	3,9	25,76	432,91	470,61	517,27	533,56	474,26
	b. Sedang	29,62	15,61	190,92	169,03	140,34	128,47	170,64
	c. Rusak	-	-	63,51	62,9	56,86	52,04	59,44
	d. Rusak Berat	-	-	82,29	67,09	55,16	55,56	11,55
	Jumlah – II	33.52	41,37	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89
III	Kelas Jalan							
	a. Kelas I	-	-	-	-	-	-	-
	b. Kelas II	-	-	-	-	-	-	-
	c. Kelas III	-	41360	-	-	-	-	-
	d. Kelas IIIA	33,52	-	-	-	-	-	-
	e. Kelas IIIB	-	-	-	-	-	-	-
	f. Kelas IIIC	-	-	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89

Keadaan	Status Jalan						
	Jalan Negara	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten				
	2020	2020	2016	2017	2018	2019	2020
g. Kelas IV	-	-	-	-	-	-	-
h. Kelas Tidak Dirinci	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah – III	33,52	41,36	769,63	769,63	769,63	769,63	715,89

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021



Sumber: RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031

Gambar 2.74.
Peta Kondisi Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2020

Total jembatan yang ada di Kabupaten Klaten sampai dengan Tahun 2020 tercatat sebanyak 313 unit jembatan, dimana jembatan dalam kondisi baik sebanyak 200 unit (63,90%), jembatan kondisi sedang dan ringan sebanyak 113 unit (36,10%), untuk jembatan rusak berat tidak ada. Kondisi jembatan di Kabupaten sampai dengan tahun 2020 dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.27
Kondisi Jembatan di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

No	Kondisi Jembatan	Satuan	Tahun			
			2017	2018	2019	2020
a.	Baik	Unit	308	308	311	200
		%	90,59	90,59	91,47	63,90
b.	Sedang dan Ringan	Unit	29	29	29	113
		%	8,53	8,53	8,53	36,10
d.	Rusak Berat	Unit	3	3	0	0
		%	0,89	0,89	0	0
Jumlah			340	340	340	313

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021

Indikator jembatan dalam kondisi baik di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang cukup signifikan, pada tahun 2020 persentase jembatan dalam kondisi baik menurun menjadi 63,90% dikarenakan adanya perubahan SK Bupati terkait jalan kabupaten

dan perubahan kriteria jembatan, dimana jembatan yang memiliki panjang kurang dari 3 meter dianggap sebagai gorong-gorong.

b. Prasarana Sumber Daya Air

Berdasarkan Permen PU PR No. 14 tahun 2015 bahwa luas area layanan irigasi di Kabupaten Klaten sebesar 29.713 ha yang tercakup dalam Daerah Irigasi (DI). Secara kewenangan, ada 2 DI yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, 5 DI yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dan 478 DI yang menjadi kewenangan Kabupaten Klaten. Dengan pembagian kewenangan itu, maka anggaran pengelolaan irigasi bersumber dari APBN, APBD Provinsi Jawa Tengah dan APBD Kabupaten Klaten maupun bersumber dari dana desa. Pengelolaan sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia. Persentase irigasi kondisi baik di Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2016 sampai 2020 mengalami peningkatan cukup signifikan, dari sebesar 22,34% (6.636 Ha) meningkat menjadi 36,17% (10.747 Ha) di tahun 2020. Kondisi Daerah Irigasi (DI) tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.28
Kondisi Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kondisi Daerah Irigasi (DI)	2016		2017		2018		2019		2020	
	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%	Ha	%
Baik	6.636	22,34	7.208	24,26	9.499	31,97	9.945	33,47	10.747	36,17
Rusak sedang	15.476	52,08	15.303	51,50	14.019	47,18	13.822	46,52	15.261	51,36
Rusak berat	7.601	25,58	7.202	24,24	6.195	20,85	5.946	20,01	3.705	12,47

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021

Selain untuk kepentingan irigasi, pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air juga diarahkan untuk penanganan banjir di Kabupaten Klaten. Daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai, juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

c. Drainase

Kondisi drainase di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, saluran drainase ini merupakan salah satu bangunan pelengkap jalan yang memiliki fungsi mengalirkan air sehingga badan jalan tetap kering. Capaian kinerja indikator drainase baik dengan aliran air yang tidak tersumbat tahun 2016 sebesar 60,52% meningkat menjadi 61,44% tahun 2020.

d. Akses Air Minum dan Sanitasi

Cakupan akses air minum di Kabupaten Klaten selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Capaian tahun 2016 sebesar 87,20% meningkat menjadi 91,77% ditahun 2020 dengan perincian untuk wilayah perkotaan sebesar 95,06% dan wilayah perdesaan sebesar 89,81%. Upaya pemenuhan target akses air minum dan sanitasi dilakukan melalui pengembangan layanan PDAM, optimalisasi dana desa dan alokasi dana desa, CSR, DAK, hibah air minum maupun program berbasis masyarakat seperti PAMSIMAS, Program KOTAKU, SANIMAS, USRI, dan program lainnya.

Capaian akses sanitasi di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 telah mencapai angka 100% di perkotaan maupun perdesaan. Untuk peningkatan akses sanitasi dari dasar ke layak dan mengarah ke aman ada beberapa kegiatan yang dilakukan diantaranya bantuan jambanisasi untuk masyarakat miskin, pengadaan truk tinja, pembangunan dan pemeliharaan Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Jomboran. Selengkapnya cakupan akses air minum dan sanitasi di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.29
Cakupan Pelayanan Air Bersih dan Sanitasi di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

NO	SEKTOR	SKALA	Capaian Tahun				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Air Minum	Kabupaten	1.290.796	1.168.413	1.193.028	1.195.297	1.218.317
		%	87,2	87,31	89,15	91,14	91,77
		Perkotaan	531.477	464.778	464.778	483.169	487.910
		%	90,02	90,15	92,48	95,03	95,06
		Perdesaan	759.319	703.635	728.250	719.495	731.327
	%	84,38	84,47	87,15	88,71	89,81	
2	Sanitasi	Kabupaten	1.286.924	1.227.771	1.282.234	1.339.762	1.327.577
		%	88,22	91,75	95,82	100	100
		Perkotaan	487.035	466.889	485.515	502.572	513.253
		%	89,01	92,9	96,61	100	100
		Perdesaan	822.189	757.052	796.719	839.925	814.324
	%	87,43	90,6	95,35	100	100	

Sumber : Bappeda Kabupaten Klaten, 2021

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.30
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	81,06	83,11	85,43	86,02	90,08
Persentase jalan kondisi baik	%	56,25	61,15	67,20	69,33	66,25

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	61,3	61,75	62,25	81,03	63,90
Rasio panjang jalan dengan jumlah penduduk	%	0,00055	0,000549	0,000546	0,000544	0,000541
Persentase jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	%	56,25	61,15	67,20	69,33	69,33
Persentase jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	%	5,12	5,55	5,84	5,92	5,92
Jaringan Irigasi						
Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,53	0,46	0,30	0,32	0,21
Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	22,34	24,26	31,97	33,47	36,17
Baik	ha	6.636	7.208	9.499	9.945	10.474
Rusak sedang	ha	15.476	15.303	14.019	13.822	15.261
Rusak berat	ha	7.601	7.202	6.195	5.946	3.705
Drainase						
Persentase drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	%	60,52	60,75	60,98	61,21	61,44
Air Minum						
Persentase penduduk berakses air minum	%	87,20	87,31	89,15	91,14	91,77
Sanitasi						
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	88,22	91,75	95,82	100	100
Bangunan Gedung						
Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	%	4,76	4,87	4,94	5,03	11
Penataan Ruang						
Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	78,98	78,98	78,98	88	88
Persentase ketidaksesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	21,02	21,02	21,02	12	12

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/ kawasan perkotaan	%	NA	NA	3	3	3
Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	NA	NA	4	28	28
Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	25	30	35	40	45

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten, 2021

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2020 adalah 0, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir ini tidak menangani penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.31
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari.	100	91,77	91,77
2.	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Jumlah/Persentase Warga Negara yang memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik.	100	100	100
RATA-RATA CAPAIAN SPM BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					95,88

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman merupakan kegiatan yang bersifat multi sektor dan berkaitan erat dengan kesejahteraan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman menyatakan bahwa negara bertanggungjawab melindungi seluruh rakyat Indonesia melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman, sehingga masyarakat dapat bertempat tinggal secara layak di lingkungan yang aman, sehat, harmonis, dan berkelanjutan. Perumahan dan permukiman merupakan salah satu unsur utama kesejahteraan masyarakat disamping pangan dan sandang.

Capaian kinerja urusan perumahan dan kawasan permukiman di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja seperti persentase warga negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni dan persentase warga negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah kabupaten/kota yang

memperoleh fasilitasi capaian sampai dengan tahun 2020 sudah 100%. Seperti diketahui kedua indikator tersebut merupakan indikator Standart Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah.

Rasio rumah layak huni di Kabupaten Klaten selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya mengalami peningkatan, dari 92,58% ditahun 2016 menjadi 98,57% di tahun 2020, ini berarti bahwa terdapat 98,57% rumah tangga di Kabupaten Klaten menempati rumah layak huni. Pemerintah telah berupaya dalam meningkatkan kualitas hunian masyarakat, terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu dengan berbagai program yang penganggarannya baik dari pemerintah pusat, provinsi maupun daerah. Sampai dengan tahun 2020, Pemerintah Kabupaten Klaten telah menangani sebesar 17,19% rumah tidak layak huni.

Jumlah rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten di tahun 2016 sebanyak 23.884 unit menjadi 20.608 unit di tahun 2018 atau 6,18% dari 333.567 unit total rumah di Kabupaten Klaten (BPS 2017) tahun 2020 jumlah rumah tidak layak huni masih menyisakan sebesar 15.204 unit. sebaran rumah tidak layak huni Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.32
Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2108	2019	2020
1	Bayat	4.309	4.261	4.157	4.037	3.903
2	Cawas	1.299	1.263	1.159	986	685
3	Ceper	348	295	188	104	30
4	Delanggu	207	190	103	103	32
5	Gantiwarno	461	427	318	189	99
6	Jatinom	1.947	1.890	1.789	1.679	1.299
7	Jogonalan	453	418	321	242	199
8	Juwiring	741	698	576	447	369
9	Kalikotes	386	379	316	265	28
10	Karanganom	518	474	346	230	197
11	Karangdowo	1.075	1.038	950	808	734
12	Karangnongko	1.232	1.201	1.121	1.058	942
13	Kebonarum	167	154	111	75	49
14	Kemalang	1.341	1.314	1.197	1.132	1.029
15	Klaten Selatan	159	141	64	64	42
16	Klaten Tengah	369	360	325	295	260
17	Klaten Utara	195	184	122	68	48
18	Manisrenggo	1.013	975	858	757	684
19	Ngawen	514	492	405	322	291
20	Pedan	414	400	288	213	32
21	Polanharjo	143	119	36	35	10
22	Prambanan	719	695	607	549	332
23	Trucuk	2.842	2.803	2.649	2.461	2.243
24	Tulung	1.051	1.013	903	770	701
25	Wedi	1.248	1.214	1.101	1.011	662
26	Wonosari	733	710	598	462	369
Total RTLH		23.88	23.10	20.60	18.36	15.20

No.	Kecamatan	Tahun				
		2016	2017	2108	2019	2020
		4	8	8	2	4
Total RTLH Tertangani		890	776	2.500	2.246	3.158
Persentase RTLH Tertangani		3,59	3,25	10,82	10,90	17,19

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021

Kebutuhan penyediaan rumah bagi masyarakat setiap tahunnya terus meningkat, kebutuhan tersebut dapat dipenuhi oleh privat sektor dan intervensi pemerintah. Kebutuhan rumah yang tidak dapat terpenuhi disebut dengan *backlog*. Penyebab tingginya angka *backlog* perumahan disebabkan oleh beberapa faktor antara lain semakin banyaknya populasi sehingga kebutuhan terhadap perumahan juga ikut meningkat. Sampai dengan tahun 2020 jumlah KK di Kabupaten Klaten sebanyak 389.674, sedangkan jumlah rumah sebanyak 309.951 unit sehingga total *backlog* rumah di Kabupaten Klaten sebanyak 77.419 unit. Selengkapnya data *backlog* rumah tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.33
Jumlah Backlog Rumah Kabupaten Klaten tahun 2020

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah KK	Jumlah Rumah	Backlog Rumah
1	Bayat	65.255	21.138	18.253	2.375
2	Cawas	47.674	15.651	12.550	1.533
3	Ceper	66.603	22.253	16.086	5.712
4	Delanggu	40.533	13.893	10.934	3.659
5	Gantiwarno	38.512	13.210	10.982	2.133
6	Jatinom	56.180	18.630	14.881	3.488
7	Jogonalan	60.486	20.805	17.397	3.336
8	Juwiring	61.992	20.189	15.898	4.291
9	Kalikotes	8.280	2.879	2.281	598
10	Karanganom	42.227	14.443	11.641	2.802
11	Karangdowo	39.550	13.800	10.298	3.502
12	Karangnongko	38.454	12.586	8.841	3.727
13	Kebonarum	21.440	7.246	5.347	1.899
14	Kemalang	33.710	10.989	9.499	1.490
15	Klaten Selatan	47.899	15.765	13.994	1.854
16	Klaten Tengah	43.071	14.388	12.527	1.861
17	Klaten Utara	48.436	15.810	12.169	4.023
18	Manisrenggo	29.766	11.562	8.886	2.677
19	Ngawen	46.808	15.425	12.383	3.042
20	Pedan	34.046	11.395	8.733	2.662
21	Polanharjo	41.843	14.810	11.208	3.359
22	Prambanan	40.181	13.318	11.859	2.509
23	Trucuk	58.368	19.684	14.977	4.590
24	Tulung	54.627	17.510	13.874	3.636
25	Wedi	35.472	12.602	9.065	2.356
26	Wonosari	58.779	19.693	15.388	4.305
Total		1.160.192	389.674	309.951	77.419

Sumber: Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan SK Bupati Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kabupaten Klaten jumlah luas kawasan kumuh sebesar 236,50 ha. Pemerintah Kabupaten Klaten telah berhasil menata dan menangani kawasan kumuh melalui program KOTAKU dan anggaran yang bersumber dari APBD.

Sampai dengan tahun 2019, areal kumuh di Kabupaten Klaten masih sekitar 0,14% atau masih tersisa 41,65 ha dari total wilayah kawasan kumuh. Capaian tahun 2020 tetap sebesar 0,14% hal ini diakibatkan karena adanya Pandemi Covid-19 yang mengalihkan anggaran penanganan kawasan kumuh ke penanganan Covid-19. Selengkapnya capaian kinerja urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.34
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Satuan				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	%	NA	NA	100	100	100
Persentase Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/ kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	NA	NA	100	100	100
Persentase rekomendasi teknis site plan pengembangan dan pembangunan perumahan	%	100	100	100	100	100
Prosentase Berkurangnya Luasan Permukiman Kumuh di kawasan Perkotaan	%	0,73	0,39	0,46	0,14	0,14
Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	3,59	3,25	10,82	10,90	17,19
Persentase areal kawasan kumuh	%	0,74	0,31	0,46	0,14	0,14
Rasio rumah layak huni	%	92,58	93,91	95,07	97,04	98,57

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten, 2021

Pencapaian SPM urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman pada tahun 2020 adalah 0, dikarenakan Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun terakhir ini tidak menangani penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota maupun fasilitas penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

Tabel 2.35
Jenis Pelayanan Dasar, Target dan Realisasi Pencapaian SPM Bidang Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
1.	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/ kota	Jumlah unit rumah korban bencana yang ditangani pada tahun n	100	0	0
2.	Fasilitas penyediaan	Rumah tangga penerima	100	0	0

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indikator Pencapaian	Kinerja (%)		
			Target	Realisasi	Capaian
	rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.	fasilitasi penggantian hak atas penggunaan tanah dan/ atau bangunan + rumah tangga penerima subsidi uang sewa + rumah tangga penerima penyediaan rumah layak huni			
RATA – RATA CAPAIAN SPM BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN					0

Sumber: biropemotdaks.jatengprov.go.id/spme/index.php/capaian_bidang_kabkota

5. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

1. Jumlah Linmas dan Penegakan Perda

Capaian kinerja pada urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan masyarakat di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) dari tahun 2016-2020 bersifat tetap sebanyak 31 orang. Persentase Satlinmas yang terlatih dan dikukuhkan juga mengalami peningkatan dari sebesar 31% ditahun 2016 menjadi sebesar 41,5% ditahun 2020.

Indikator persentase Penegakan PERDA meningkat dari 91,00% ditahun 2016 menjadi sebesar 92,00% di tahun 2020. Sementara Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020 dan prosentase ketentraman dan ketertiban umum yang terkondisikan juga sudah mencapai 100% sampai dengan tahun 2020, ini menunjukkan setiap gangguan ketentraman dan ketertiban umum yang terjadi bisa diselesaikan dan terkondisikan dengan baik. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.36
Jumlah Linmas dan Penegakan Perda Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Prosentase Ketentraman dan Ketertiban Umum yang Terkondisikan	%	100	100	100	100	100
2	Persentase Penegakan PERDA	%	91,00	91,25	91,5	91,6	92,00
3	persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	%	100	100	100	100	100
4	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)	orang	31	31	31	31	31
5	Persentase Satlinmas yang terlatih dan di kukuhkan	%	31,0	32,2	37,4	39,4	41,5

Sumber : Satpol PP Kabupaten Klaten, 2021

2. Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3)

Pelanggaran K3 di Kabupaten Klaten sangat beragam, pelanggaran yang sering dilakukan oleh masyarakat antara lain terkait dengan ijin reklame, perijinan usaha, ijin menara telekomunikasi, PKL, dan bangunan liar. Capaian indikator tingkat Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 selama kurun waktu 5 tahun terakhir (2016-2020) mengalami peningkatan, dari 90,00% ditahun 2016 menjadi sebesar 92,00% ditahun 2020. Indikator persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan meningkat dari sebesar 91% ditahun 2016 menjadi 91,6% ditahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.37
Penyelesaian Pelanggaran Ketertiban, Ketentraman, dan Keindahan (K3) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)	%	91	91,25	91,5	91	92,00
3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	91	91	91,25	91,5	91,6

Sumber : Satpol PP Kabupaten Klaten, 2021

3. Kebakaran

Cakupan pelayanan kebakaran sebesar 1,1% selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020). Untuk indikator Tingkat Waktu tanggap (*response time rate*) cenderung menurun dari tahun 2016 sebesar 66,60% menjadi 65,00% ditahun 2020. Kejadian kebakaran di Kabupaten Klaten masih cukup tinggi, utamanya di wilayah manajemen kebakaran sehingga tidak terpenuhi layanan kebarakan dalam waktu tanggap oleh petugas pemadam kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) penanganan kebakaran cenderung meningkat dari tahun 2016 sebesar 13 menit menjadi 15,0 menit ditahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.38
Capaian Kinerja Sub-Urusan Kebakaran di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten/kota	%	1,1	1,1	1,1	1,1	1,1
2.	Tingkat waktu tanggap (<i>response time rate</i>) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK)	%	66,6	64,20	70,10	67,63	65,00
3.	Waktu tanggap (<i>response time</i>) penanganan kebakaran	menit	13,0	13,8	15,1	15,9	15,0

Sumber : Satpol PP Kab Klaten, 2021

4. Bencana

Kabupaten Klaten merupakan daerah yang memiliki potensi rawan bencana yang cukup tinggi mulai dari erupsi gunung merapi, gempa bumi, banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan, dan kebakaran hutan. Kabupaten Klaten telah mengukur Indeks Ketahanan Daerah sejak tahun 2019, Indeks Ketahanan Daerah (IKD) merupakan instrumen untuk mengukur kapasitas daerah dengan asumsi bahwa bahaya atau ancaman bencana dan kerentanan di daerah tersebut kondisinya tetap. Berdasarkan data IKD tersebut maka setiap Kabupaten/Kota mampu mengetahui apa saja upaya yang sudah dilakukan dan langkah tindak lanjut yang perlu dilakukan untuk menurunkan resiko.

Capaian IKD Kabupaten Klaten tahun 2019 sebesar 0,12 mengalami peningkatan menjadi 0,92 di tahun 2020 hal ini berarti resiko bencana di Kabupaten Klaten meningkat.

Capaian kinerja yang mewakili indikator SPM yaitu, Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana tahun 2020 sebesar 5,05%. Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana sudah mencapai 100%. Capaian indikator kelompok kelompok relawan bencana yang aktif bersifat tetap selama kurun waktu 2016-2021 yaitu sebesar 40,00%. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.39
Capaian Kinerja Sub-Urusan Bencana di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	NA	NA	NA	0,12	0,92
2.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	5,05	5,05	5,05	5,05	5,05
3.	Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00

Sumber : BPBD Kab Klaten, 2021

Realisasi pencapaian SPM ketentraman dan ketertiban umum dengan indikator Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran pada tahun 2019-2020 capaiannya sudah mencapai 100 %. Indikator presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara pada tahun 2019 tercatat sebesar 91,69 %, capaian tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 92 %. Terkait dengan capaian indikator SPM kebencanaan, indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana tahun 2020 tercatat sebesar 70,12 %; capaian indikator jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan

kesiapsiagaan terhadap bencana dan jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana masing-masing sudah mencapai 100 % ditahun 2020.

Berikut realisasi capaian SPM urusan Ketentraman dan Ketertiban umum sebagai berikut:

Tabel 2.40
Realisasi Capaian SPM Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Jenis pelayanan dasar	indikator	Satuan	Realisasi Capaian SPM Tahun	
				2019	2020
1.	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	%	100	100
2.	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkara	%	91,69	92
3.	Pelayanan Informasi Rawan Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	%	70,00	70,12
4.	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100	100
5.	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100	100

Sumber :Satpol PP dan BPBD Kab Klaten, 2021

6. Sosial

Kinerja pembangunan urusan Sosial di tingkat kabupaten secara garis besar terkait dengan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat miskin, penanganan bencana serta penghormatan nilai-nilai kepahlawanan melalui pengelolaan taman makam pahlawan di tingkat kabupaten. Pemberdayaan sosial di Kabupaten Klaten dapat dilihat dari beberapa indikator yang tersedia. Diantaranya yaitu persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang mendapatkan peningkatan kapasitas, dimana pada tahun 2020 mampu mencapai 96% dari total PSKS yang ada. Dengan peningkatan kapasitas ini diharapkan sumbangsih dan kinerja PSKS untuk berperan serta dalam upaya penanganan permasalahan sosial semakin baik. Selain itu upaya-upaya peningkatan dan pemberdayaan lembaga-lembaga sosial juga dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten untuk meningkatkan keberdayaan panti-panti sosial dan juga wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat yang ada di wilayahnya. Dari segi pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 baru mencapai 60%.

Upaya penanganan terhadap PMKS atau yang saat ini diubah istilahnya menjadi PPKS di Kabupaten Klaten selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 5 tahun (2016-2020), yakni dari 33,11% menjadi 90,32%. Selain itu penanganan PMKS juga diarahkan pada para PMKS yang menjadi sasaran pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) urusan Sosial, dimana capaiannya rata-rata masih sebesar 80%, masih dibawah target SPM yang diharapkan yakni 100%. Sedangkan untuk pemberian jaminan sosial kepada penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial capaiannya di tahun 2020 baru sebesar 27,13%.

Untuk mendukung upaya pengentasan kemiskinan, salah satu hal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah melalui pemberian bantuan sosial kepada rumah tangga miskin dan rentan. Pemutakhiran data dilakukan untuk mendorong Pemerintah Desa agar dapat melaksanakan kegiatan pemutakhiran data lebih maksimal. Saat ini pemutakhiran data DTKS yang dilakukan pemerintah Desa belum optimal, sehingga mempengaruhi validitas data di lapangan. Pemutakhiran data ini menjadi sangat penting karena data tersebut akan dipakai dalam menentukan sasaran pemberian bantuan sosial, jangan sampai bansos yang diberikan tidak tepat sasaran. Dari tahun ke tahun proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah semakin meningkat, dari 33,11% di tahun 2016 menjadi 90,32% di tahun 2020. Upaya tersebut dilakukan untuk mengurangi beban bagi masyarakat miskin dan rentan.

Untuk penanganan bencana, khususnya di masa tanggap darurat bencana, hal yang telah dilakukan adalah pemberian bantuan sosial dan pengevakuasian korban bencana, dimana capaian kinerja untuk dua indikator yang mewakilinya sama-sama mencapai 100% di tiap tahunnya.

Kinerja penghormatan terhadap jasa para pahlawan di Kabupaten Klaten yang salah satunya diwujudkan dengan pengelolaan taman makam pahlawan juga menunjukkan kinerja yang baik. Dari tahun 2016-2020, taman makam pahlawan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Klaten sudah terkelola sesuai dengan standar taman makam pahlawan yang ada.

Selengkapnya kinerja urusan Sosial Kabupaten Klaten dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.41
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Sosial
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase PMKS yang memperoleh bantuan sosial	%	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32
2.	Persentase PMKS yang tertangani	%	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32
3.	Persentase PMKS skala yang memperoleh bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	%	33,11	35,52	48,49	62,26	90,32
4.	Persentase panti sosial yang menerima program pemberdayaan sosial melalui kelompok usaha bersama (KUBE) atau kelompok sosial	%	0,06	0,18	0,31	0	0

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	ekonomi sejenis lainnya						
5.	Persentase panti sosial (Lembaga Kesejahteraan Sosial) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesehatan sosial	%	65,95	72,73	72,73	76	76
6.	Persentase wahana kesejahteraan sosial berbasis masyarakat (WKBSM) yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial	%	0,14	0,14	0,14	0,14	0,14
7.	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
8.	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	%	100	100	100	100	100
9.	Persentase penyandang disabilitas fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	%	13,34	13,2	88,73	73,67	27,13
10	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan kapasitas	%	100	100	100	100	96
11	Persentase PMKS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial diluar panti	%	33,11	35,52	48,49	62,26	80
12	Proporsi rumah tangga miskin dan rentan yang memperoleh bantuan sosial pemerintah (%))	%	21,15	20,01	87,41	86,96	143,08
13	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	%	100	100	100	100	100
14	Persentase Taman Makam Pahlawan sesuai dengan standar pengelolaan Taman Makam Pahlawan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Urusan sosial merupakan urusan wajib pelayanan dasar yang diberikan amanat oleh pemerintah untuk memberikan layanan sesuai dengan Standart Pelayanan Masyarakat yang telah ditetapkan indikator kerjanya. Capaian SPM urusan sosial Kabupaten Klaten pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.42
Pelaksanaan SPM Urusan Sosial Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Program Rehabilitasi Sosial Dasar	Sasaran/ Indikator Kinerja	Indikator	Jumlah Sasaran	Jumlah Populasi	Penanganan PMKS	%
1	Penyandang Disabilitas Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Luar Panti	Persentase jumlah penyandang disabilitas yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi penyandang disabilitas yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	300	6.131	250	83,3
2	Anak Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Anak Terlantar di Luar Panti	Persentase jumlah Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Anak terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di Luar Panti	654	654	84	12,8
3	Lanjut Usia Terlantar	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Penyandang Lanjut Usia Terlantar di Luar Panti	Persentase jumlah penyandang Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Lanjut Usia Terlantar yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	1.971	4.132	2.468	125,2
4	Gelandangan Pengemis	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Gelandangan dan Pengemis di Luar Panti	Persentase jumlah Gelandangan dan Pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti dibagi populasi Gelandangan dan Pengemis yang membutuhkan rehabilitasi sosial dasar di luar panti	151	98	68	45
5	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Korban Bencana Alam dan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah korban bencana alam dan social yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		42	42	100

Sumber: Dinas Sosial P3AKB Kabupaten Klaten, 2020

2.3.2. Urusan Pemerintahan Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Kondisi ketenagakerjaan secara umum di Kabupaten Klaten pada tahun 2016-2020 mengalami kondisi fluktuatif. angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada tahun 2016 s/d 2017 mengalami peningkatan dari 2,51% ditahun 2016 menjadi 4,35% ditahun 2017. Pemerintah Kabupaten Klaten berhasil menurunkan TPT sebesar 0,80% sehingga tahun 2019 menjadi 3,55%, karena adanya dampak Pandemi Covid-19 ditahun 2020 menyebabkan TPT Kabupaten Klaten naik lagi menjadi 5,46%. Capaian indikator rasio penduduk yang bekerja

berbanding lurus dengan capaian indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dari 72,55% ditahun 2016 menjadi 68,12% di tahun 2020.

Dalam rangka memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja, pemerintah mendorong pada perusahaan untuk memberikan hak-hak dasar pekerja/buruh dengan memberikan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Jamsostek). Jaminan tersebut berupa terdaftarnya pekerja ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Dengan masuknya tenaga kerja ke dalam kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan perlindungan kepada tenaga kerja untuk mengatasi resiko atas pekerjaannya tersebut. Besaran pekerja/buruh yang menjadi peserta program Jamsostek pada tahun 2020 sebesar 43,12%. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, salah satu yang mempengaruhi terhadap turunnya peserta program Jamsostek adalah karena adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak terhadap Pemutusan hubungan Kerja (PHK) terhadap buruh/pekerja.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja juga dilakukan melalui pelaksanaan kegiatan peningkatan kompetensi tenaga kerja yang ada. Hanya saja capaian kinerjanya masih sangat rendah, di tahun 2020, persentase tenaga kerja di Kabupaten Klaten yang bersertifikat kompetensi baru sebesar 3,51%. Selain itu, penempatan pencari kerja terdaftar juga menjadi salah satu pekerjaan rumah yang harus diselesaikan karena capaiannya baru sebesar 21,11% ditahun 2020.

Dalam rangka membangun tenaga yang lebih berkualitas dan produktif maka perlu adanya perencanaan tenaga kerja daerah untuk lima tahun kedepan. Selama tahun 2016 sampai dengan 2020 Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja belum menyusun Rencana Tenaga Kerja Daerah (RTKD). Sedangkan Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota tahun 2016 tercatat sebesar 35,15, ditahun 2020 menurun menjadi 21,11 %. Capaian kinerja urusan ketenagakerjaan secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.43
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Angka sengketa pengusaha-pekerja per tahun	%	20	6,38	4,47	10,06	11,98
2.	Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	%	29,41	79	57,10	66,7	55,56
3.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	2,51	4,35	3,11	3,55	5,46
4.	Rasio penduduk yang bekerja	%	72,55	68,31	68,27	64,54	68,12
5.	Besaran pekerja/ buruh yang menjadi peserta program BPJS Ketenagakerjaan	%	22,14	23,55	21,84	27,10	25,01
6.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	%	-	-	-	3,39	3,51
7.	Persentase sengketa	%	100	100	100	100	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	hubungan industrial yang terselesaikan						
8.	Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan	%	35,15	22,19	20,56	17,27	21,11
9.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	%	0	0	0	0	0
10.	Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	35,15	22,19	20,56	17,27	21,11

Sumber: Disperinaker Kabupaten Klaten, 2020

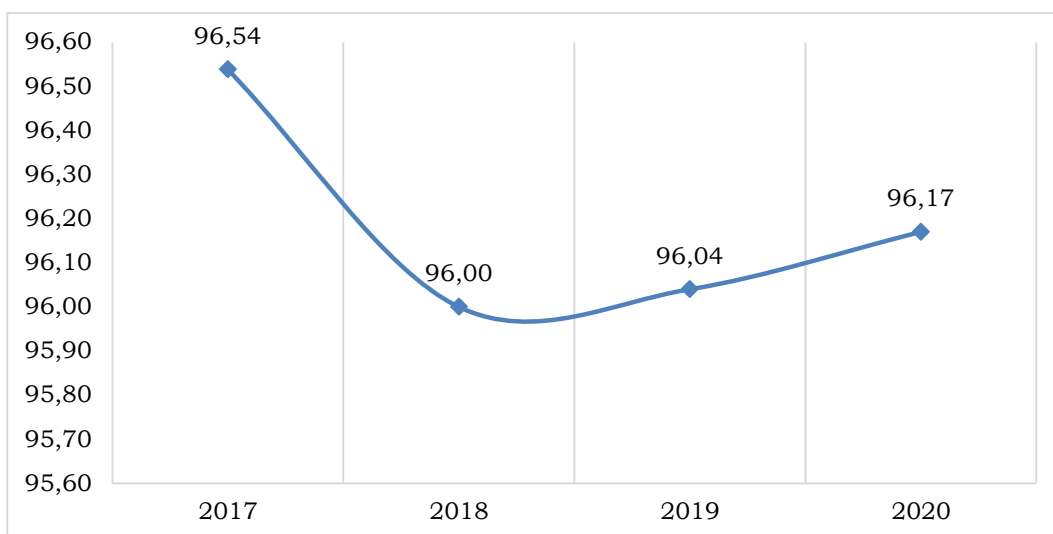
Dalam menghadapi era revolusi industri 4.0 sertifikasi tenaga kerja dan angkatan kerja perlu dititik beratkan pada kompetensi untuk Peningkatan dan pembaharuan skill yang mendasarkan pada kebutuhan era revolusi industri yang mampu memenuhi tenaga kerja dan angkatan kerja sesuai dengan kompetensi dasar industri 4.0 agar bisa bertahan dan memiliki jiwa entrepreneurship pada era revolusi industri 4.0. Pada saat ini banyak lapangan pekerjaan yang mensyaratkan tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi, oleh karena itu kedepan perlu didorong sertifikasi tenaga kerja di berbagai bidang.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan urusan wajib yang mengemban amanah dalam hal kualitas hidup perempuan, perlindungan perempuan, kualitas keluarga, system data gender dan anak, pemenuhan hak anak dan perlindungan khusus anak. Urusan ini memberikan kontribusi penting dalam pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) dan Indeks Pembangunan Gender (IPG).

a. Capaian IPG dan IDG

Perkembangan IPG dan IDG Kabupaten Klaten cukup baik. Sampai dengan tahun 2020, Kabupaten Klaten menempati urutan ke enam se Jawa Tengah dengan capaian IPG 96,17. Capaian IPG ini menunjukkan rendahnya kesenjangan gender serta semakin baiknya pembangunan responsive gender. Hal ini bisa ditunjukkan dari capaian IPM laki-laki sudah mencapai 77,46 dan perempuan 74,47. Perkembangan IPG tahun 2017-2020 semakin menurun, namun penurunannya sangat kecil. Capaian IPG tahun 2017-2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.75.
Grafik Capaian IPG Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

Menurunnya capaian IPG ini dapat dilihat dari indikator pembentuk yaitu pengeluaran perkapita penduduk laki-laki menurun di tahun 2018 ke 2019 dan 2020, sementara untuk penduduk perempuan mengalami stagnasi perkembangan. Sementara itu kesenjangan gender terjadi pada laki-laki khususnya capaian angka harapan hidup dan harapan lama sekolah yang lebih rendah dibandingkan dengan perempuan. Kesenjangan gender yang dialami perempuan yaitu pada capaian rata-rata lama sekolah dan pengeluaran perkapita yang berada dibawah posisi penduduk laki-laki. Selengkapnya dapat disimak pada tabel berikut.

Tabel 2.44
Capaian Indikator Pembentuk IPG 2017-2020

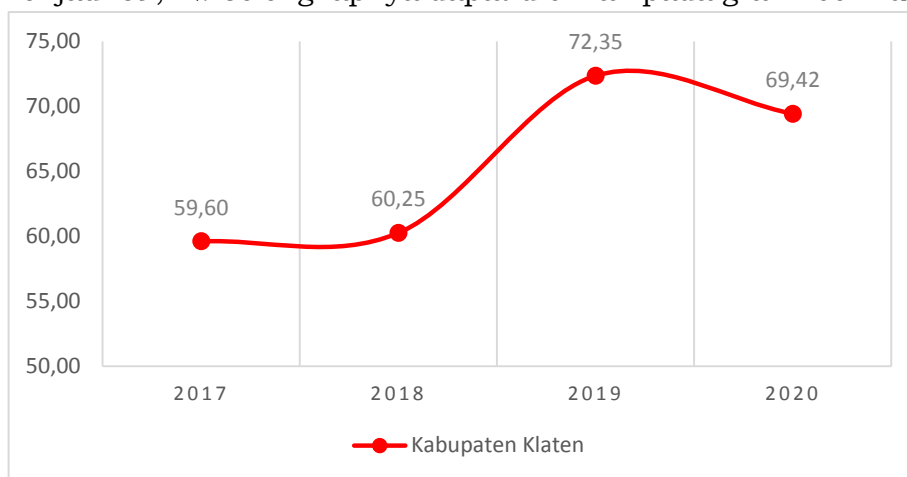
Tahun	Jenis Kelamin	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Usia harapan hidup	Pengeluaran Perkapita
2017	laki-laki	12,61	8,92	74,81	12.435
	perempuan	13,34	7,62	78,53	11.083
2018	laki-laki	12,97	8,93	74,87	12.281
	perempuan	13,35	7,65	78,58	11.334
2019	laki-laki	13,08	8,94	74,88	13.298
	perempuan	13,46	7,77	78,60	11.439
2020	laki-laki	13,09	9,17	75,01	13.141
	perempuan	13,50	8,07	78,69	11.439

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>

Keterangan: Tahun 2016 BPS tidak menghitung IPG Kab/Kota

Urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak juga mengamatkan pencapaian Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang diukur dari persentase keterlibatan perempuan di parlemen, persentase perempuan sebagai tenaga profesional dan persentase sumbangan pendapatan perempuan. Perkembangan IDG menunjukkan hasil yang positif, pada periode 2017-2019 terus menanjak hingga

mencapai 72,35, namun ditahun 2020 menunjukkan penurunan menjadi 69,42. Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut.



Sumber : <https://jateng.bps.go.id/subject/40/gender.html#subjekViewTab3>

Gambar 2.76.
Perkembangan IDG Kab. Klaten 2017-2020

Memperhatikan capaian IDG di Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang semakin baik. Indikator keterlibatan perempuan di parlemen merangkak naik hingga ditahun 2019 mencapai 18,00% dibanding tahun sebelumnya hanya sebesar 6,00%, namun di tahun 2020 turun menjadi 16,00%. Pada indikator perempuan sebagai tenaga profesional juga menunjukkan peningkatan, dari 43,65% ditahun 2017 menjadi 60,72% ditahun 2020. Untuk Indikator sumbangan pendapatan perempuan mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi dari 37,76% ditahun 2017 menjadi 37,72% ditahun 2020. Selengkapnya capaian indikator pembentuk IDG dapat dilihat pada tabel berikut.

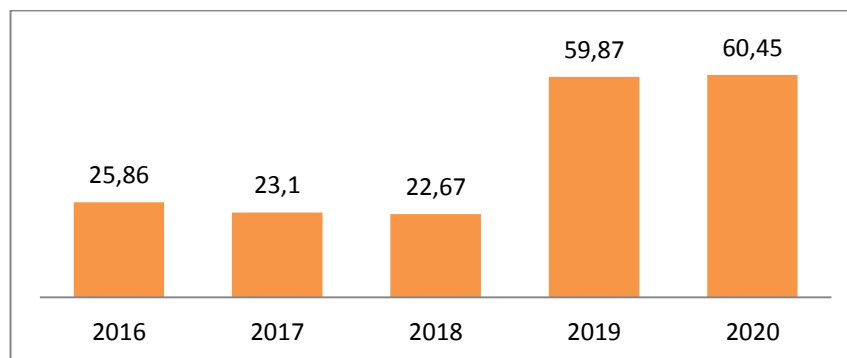
Tabel 2.45
Perkembangan Capaian Indikator Pembentuk IDG 2017-2020

Indikator Pembentuk	2017	2018	2019	2020
Keterlibatan perempuan di Parlemen (Persen)	6,00	6,00	18,00	16,00
Perempuan Sebagai Tenaga Profesional (Persen)	43,65	52,71	55,73	60,72
Sumbangan Pendapatan Perempuan (Persen)	37,76	37,77	37,81	37,72

Sumber: <https://jateng.bps.go.id/indicator/40/138/1/indeks-pembangunan-gender-ipg-.html>

b. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah pada tahun 2016 yaitu 25,86% menurun pada tahun 2018 menjadi 22,67%, meningkat di tahun 2019 menjadi 59,87% dan 2020 mencapai 60,45%. Capaian ini signifikan dengan indikator pembentuk IDG yaitu persentase perempuan profesional yang terus meningkat dari tahun 2016 ke 2020 Selengkapnya dapat disimak pada grafik berikut:

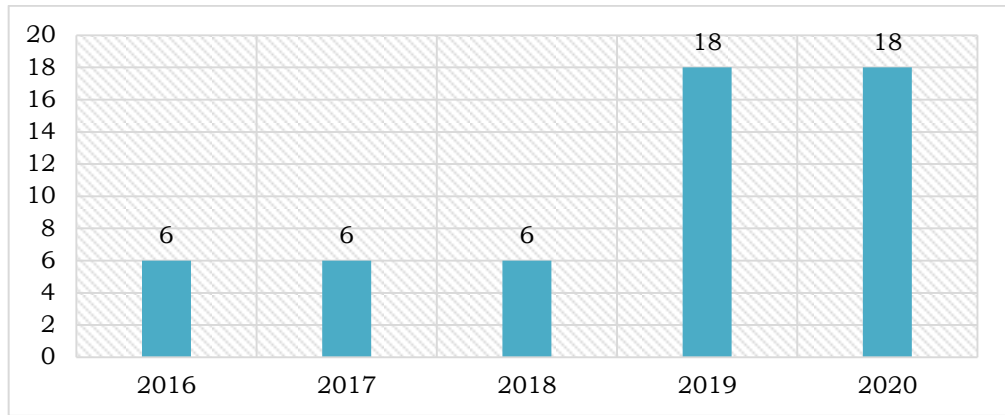


Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.77.
Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

c. Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD

Undang-undang Pemilihan Umum nomor 15 tahun 2011 hingga perubahannya menjadi Undang-undang nomor 7 tahun 2017 telah memberi peluang perempuan sebanyak 30% menjadi wakil di parlemen baik di DPR maupun DPRD provinsi dan kabupaten kota. Peluang pada UU Pemilu nomor 7 tahun 2017 bahkan diperluas termasuk penyelenggara pemilihan umum yang harus menempatkan perempuan sebanyak 30%. Meskipun pencapaian perempuan di legislatif belum memenuhi kuota yang ditetapkan, namun upaya afirmasi ini telah membuahkan hasil, dan mendorong berbagai pihak untuk menempatkan perempuan sebagai bagian dari representasi wakil rakyat. Pencapaian indikator pembentuk IDG ini akan stabil dalam posisi lima tahunan sesuai siklus pemilu, jika capaiannya rendah maka dalam kurun waktu lima tahun posisi indikator akan berpengaruh pada capaian IDG. Proporsi kursi yang diduduki perempuan di DPRD Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 6% meningkat menjadi sebesar 18% ditahun 2019. Hal ini menunjukkan bahwa keikutsertaan perempuan untuk berpartisipasi menjadi anggota DPRD semakin tinggi. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:

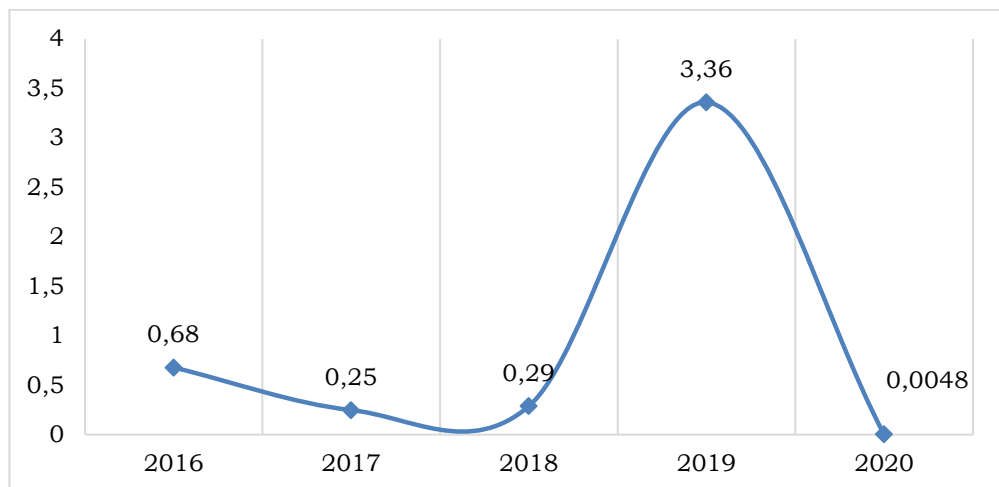


Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.78.
Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPRD Kab. Klaten Tahun 2016-2020

d. Rasio KDRT

Rasio KDRT adalah jumlah KDRT yang dilaporkan dalam periode 1 (satu) tahun per 1.000 rumah tangga. Angka rasio KDRT di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 0,68 meningkat menjadi 3,36 pada tahun 2019, dan sebesar 0,0048 pada tahun 2020. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.79.
Rasio KDRT Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Selengkapnya capaian kinerja urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.46
Capaian Kinerja Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	%	25,86	23,1	22,67	59,87	60,45

No	Indikator	Satuan	Realisasi				
			2016	2017	2018	2019	2020
2	Proporsi Kursi yang Diduduki Perempuan di DPR	%	6	6	6	18	18
3	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	%	74,14	59,99	NA	NA	NA
4	Rasio KDRT	%	0,68	0,25	0,29	3,36	0,0048
5	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks	73,97	96,54	96	96,04	96,17
6	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks	59,59	59,6	60,25	72,35	NA
7	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	%	NA	NA	NA	0,7	0,2
8	Skor Capaian KLA	Skor	NA	630	670	690	NA
9	Persentase perangkat daerah menyusun analisis gender dalam dokumen perencanaan dan penganggaran	%	32,3	32,3	58,1	100	100
10	Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	%	8,1	8,1	9,7	25,0	28,8
11	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100	100	100	100	100
12	Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100	100	100	100	100
13	Persentase desa/kelurahan layak anak	%	3,2	3,2	18,0	62,8	65,1
14	Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	3,69	3,29	3,12	0,57	5,68

Sumber : Dinsos P3AKB Kabupaten Klaten, 2021

3. Pangan

Sebagaimana ketentuan dalam Undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang pangan, salah satunya mengamanatkan ketersediaan dan keamanan pangan, yang menugaskan kepada Kabuapten/Kota untuk selalu menjaga ketersediaan dan keamanan pangan. Berdasarkan KLHS RPJMD, perhitungan data dukung pangan menggunakan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2009 tentang Daya Dukung Lingkungan Hidup dengan pendekatan produksi beras. Daya dukung pangan ditinjau dari komoditas beras dihitung berdasarkan data jumlah penduduk, jumlah produksi padi.

Total produksi padi 2019 mencapai 435.689 ton, dengan konversi Gabah Kering Giling/GKG ke beras sebesar (1 Kg GKG = 0,6384 Kg Beras) maka diperkirakan produksi beras mencapai 278.144 ton. Sementara itu angka konsumsi beras (kg/orang/tahun) sebesar 124,86 maka kebutuhan pangan di Kabupaten Klaten adalah 165.305,53 ton. Nilai tingkat produktivitas tahun 2019 sebesar 0,21 ton/org/hari, menunjukkan bahwa Kabupaten Klaten mengalami surplus dalam pemenuhan kebutuhan pangan (beras) penduduk. Perhitungan daya dukung lahan

sawah 2019 (α) sebesar 2,96 menunjukkan bahwa $\alpha > 1$ sehingga Kabupaten Klaten tersebut mampu swasembada pangan.

Ketersediaan beras merupakan aspek penting dalam pembangunan ketahanan pangan daerah, sehingga ketersediaannya perlu untuk diperhatikan. Selain menjadi bahan makanan, beras juga dapat dijadikan sebagai komoditas unggulan daerah. Kabupaten Klaten merupakan salah satu wilayah yang memiliki komoditas unggulan besar disamping mendapatkan predikat lumbung padi di Provinsi Jawa Tengah. Produksi beras di Kabupaten Klaten berlimpah sehingga pada tahun 2020 produksi padi surplus sebesar 141.068,17 ton. Total penyediaan padi pada tahun 2020 adalah sebesar 267.611,10 ton dengan kebutuhan konsumsi masyarakat sebesar 126.542,93 ton.

Selain padi, salah satu komoditas utama yang memiliki total produksi berlimpah adalah jagung. Pada tahun 2020 penyediaan jagung di Kabupaten Klaten mencapai 76.923,09 ton dari total kebutuhan konsumsi jagung sebesar 1.055,62 ton. Kondisi ini menyebabkan Kabupaten Klaten memiliki surplus terhadap penyediaan jagung sebesar 75.867,46 ton pada tahun 2020. Kondisi yang sama juga ditunjukkan oleh beberapa komoditas lainnya, seperti Kacang Hijau, Kacang Tanah, Ubi Kayu, Daging, Telur, dan Susu serta Ikan. Secara rinci total ketersediaan bahan makanan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.47
Ketersediaan Bahan Makanan di Kabupaten Klaten Tahun 2020

Komoditi	Produksi	Penyediaan	Kebutuhan	+/-	Konsumsi Per Kapita	Faktor Konversi
	(ton)	(ton)	(ton)	(ton)	(kg/kap/tahun)	(100-angka susut)
Padi	450.411,66	267.611,10	126.542,93	141.068,17	95,90	62,74%
Jagung	86.430,44	76.923,09	1.055,62	75.867,46	0,80	89,00%
Kedelai	1.282,34	1.213,87	13.195,30	-11.981,43	10,00	94,66%
Kacang Tanah	912,10	788,87	131,95	656,92	0,10	86,49%
Kacang Hijau	810,36	753,63	263,91	489,73	0,20	93,00%
Ubi Kayu	24.190,76	23.191,68	8.576,95	14.614,73	6,50	95,87%
Ubi Jalar	520,04	457,64	1.319,53	-861,89	1,00	88,00%
Gula	3.195,97	3.164,65	5.827,92	-2.663,27	4,42	99,02%
Daging	10.222,91	9.711,76	8.313,04	1.398,73	6,30	95,00%
Telur	10954,85	10.730,28	8.972,80	1.757,47	6,80	97,95%
Susu	6.133,73	5.170,73	2.771,01	2.399,72	2,10	84,30%
Ikan	28.415,34	27.562,88	20.584,67	6.978,22	15,60	97,00%
Cabai Merah	516,17	500,69	3.853,03	-3.352,34	2,92	97,00%
Cabai Rawit	522,19	516,97	4.816,28	-4.299,31	3,65	99,00%
Bawang Merah	95,00	92,15	3.694,68	-3.602,54	2,80	97,00%

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2021

Neraca Bahan Makanan (NBM) merupakan salah satu alat yang digunakan untuk menganalisis situasi ketersediaan pangan di suatu negara/wilayah dalam kurun waktu tertentu berdasarkan aspek penyediaan dan pemanfaatan pangan. Hasil dari Neraca Bahan Makanan tersebut adalah jumlah pangan yang tersedia di pasar untuk dikonsumsi pada kurun waktu tertentu dalam bentuk energi per kg/kapita/hari, dan

protein per g/kapita/hari. Informasi ketersediaan pangan ini penting sebagai bahan masukan kebijakan terkait dengan perencanaan produksi dan ketersediaan pangan di suatu wilayah. Situasi ketersediaan pangan NBM memberikan gambaran situasi ketersediaan pangan secara rata-rata wilayah, dan tidak menggambarkan situasi ketersediaan pangan individu.

Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH) di Kabupaten Klaten hingga tahun 2019 meningkat menjadi 92,75, namun pada tahun 2020 menurun menjadi 84,80. Hal ini disebabkan akibat adanya Pandemi Covid-19 yang berdampak pada turunnya daya beli masyarakat, sehingga tingkat konsumsi masyarakat terhadap keanekaragaman asupan bahan pangan bergizi berkurang. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten ditunjukkan oleh ketersediaan beras dalam satuan ton per tahun. Kondisi ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang dinamis, yaitu mengalami peningkatan pada tahun 2016-2019 dan mengalami penurunan pada tahun 2020. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama mencapai 279.174,31 ton beras menurun menjadi 267.611,10 ton beras pada tahun 2020. Penurunan produksi padi ini diperkirakan terjadi akibat keterlambatan masa tanam pada tahun 2019 lalu akibat kemarau panjang. Keterlambatan masa tanam tersebut berdampak pada meningkatnya hama seperti tikus dan penyakit tanaman. Ketersediaan pangan utama di Kabupaten Klaten masih dalam batas yang optimal, mengingat kendati mengalami penurunan akan tetapi konsumsi masyarakat masih dapat dipenuhi.

Kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, perbaikan jalan menuju sentra pertanian dan atau jalan yang menghubungkan antar sentra, serta penerapan sistem agribisnis. Dari sisi konsumsi pangan penduduk perlu ada diversifikasi pangan supaya masyarakat tidak hanya bergantung pada satu bahan pokok.

Namun demikian, ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 adalah sebesar 3.003 kkal/perkapita/hari. Kondisi tersebut meningkat secara signifikan dibandingkan capaian tahun 2016 yang hanya mencapai 2.638 kkal/kapita/hari. Selain mengalami peningkatan setiap tahunnya, capaian ketersediaan energi perkapita di Kabupaten Klaten juga telah melewati standar yang ditetapkan dalam hasil WNPG VIII yaitu sebesar 2.200 kkal/perkapita/hari. Berbanding lurus dengan capaian tersebut, ketersediaan protein perkapita di Kabupaten Klaten juga telah mengalami peningkatan secara signifikan serta telah mencapai standar yang telah ditetapkan oleh Nasional. Pada tahun 2020 ketersediaan protein mencapai 80,82 gram/kapita/hari atau mengalami surplus sebesar 23,87 gram/kapita/hari.

Lokasi pemanfaatan lahan pekarangan/rumah pangan lestari mengalami kenaikan pada Tahun 2020. Kenaikan tersebut dikarenakan sudah banyaknya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya

pemanfaatan lahan pekarangan, dan makin sempitnya lahan pekarangan yang dimiliki serta adanya bantuan pengembangan rumah pangan lestari bagi Kelompok Wanita Tani (KWT). Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.48
Lokasi Pemanfaatan Lahan Pekarangan/ Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) Tahun 2016-2020

No	Indikator	Capaian					Jumlah
		2016	2017	2018	2019	2020	
1.	Kelompok	20	22	15	16	49	122
2.	Desa/Kelurahan	20	22	15	16	49	122
3.	Kecamatan	14	13	12	10	21	70

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Namun demikian, di sisi lain untuk penguatan cadangan pangan meningkat signifikan dari 11.250 kg di tahun 2019 menjadi 36.000 kg di tahun 2020. Hal tersebut dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang menganjurkan masyarakat untuk tetap tinggal dirumah, tidak berkerumun atau melakukan aktivitas public lainnya sehingga menurunkan keragaman maupun konsumsi pangan. Di sisi lain dengan adanya kebijakan program pemerintah berupaya pemberian bantuan kebutuhan pangan kepada masyarakat sehingga dapat membantu menguatkan cadangan pangan masyarakat. Untuk mengatasi dan menangani kondisi rawan pangan di daerah di Kabupaten Klaten, pada tahun 2020 penanganannya dilakukan di 4 (empat) lokasi, hal ini mengalami peningkatan jika dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya 1 (satu) lokasi. Periode 2016-2020 masih terdapat desa/wilayah rawan pangan akibat gagal panen, tahun 2020 terdapat 15 desa menjadi prioritas I, 20 desa menjadi prioritas II, dan 33 desa menjadi prioritas III penanganan desa/daerah rawan pangan.

Amanat tentang pengawasan dan pembinaan keamanan pangan tercantum dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Undang-Undang ini mewajibkan pemerintah untuk melakukan pengawasan guna menjamin keamanan pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat. Total pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 kendati telah mengalami peningkatan akan tetapi masih belum berjalan secara optimal. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 baru mencapai 78%. Hal ini berarti masih terdapat banyak produsen makanan yang belum diawasi sehingga berpotensi terhadap terjadinya masalah keamanan pangan di Kabupaten Klaten. Disamping itu, kondisi keamanan pangan di Kabupaten Klaten diprediksikan lebih buruk daripada data statistik yang telah tercantum karena adanya fakta *under reporting* atau fenomena gunung es dimana data kasus keracunan pangan ataupun penyakit karena pangan yang dilaporkan dan tercatat pada lembaga resmi diperkirakan hanya kurang dari 1% dari kejadian yang sesungguhnya.

Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu meningkat. Namun angka tersebut masih di bawah Standar Mutu Nasional yang sebesar 100%. Pelaksanaan kegiatan pengawasan keamanan dan mutu pangan di pusat dan daerah secara

garis besar diarahkan pada kegiatan: (1) koordinasi dan kelembagaan penanganan keamanan pangan segar; dan (2) pemantauan dan pengawasan keamanan pangan segar. Persentase pengawasan pangan segar asal tumbuhan sampai dengan tahun 2020 tercatat sebesar 78%, dan kedepan menjadi tantangan tersendiri untuk terus ditingkatkan. Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.49
Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Tahun				
	2016	2017	2018	2019	2020
Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	57	60	65	73	78

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2021

Secara rinci capaian kinerja Urusan Pangan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.50
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pangan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pencapaian skor Pola Pangan Harapan (PPH)	skor	91,7	91,9	92,5	92,75	84,80
2.	Ketersediaan pangan utama (beras)	ton	239.374,00	225.935,00	265.060,98	279.174,31	267.611,10
3.	Ketersediaan energi per kapita	kcal/kapita/hari	2.638	2.717	2.798	2.881	3.003
4.	Ketersediaan protein per kapita	gram/kapita/hari	71,38	73,52	75,72	77,99	80,87
5.	Penguatan cadangan pangan	Kg	7.725	9.000	12.000	11.250	36.000
6.	Penanganan Daerah Rawan Pangan	lokasi	8	4	2	1	4
7.	Pengawasan dan pembinaan keamanan pangan	persen	57	60	65	73	78

Sumber : DPKPP Kabupaten Klaten, 2021, diolah

4. Pertanian

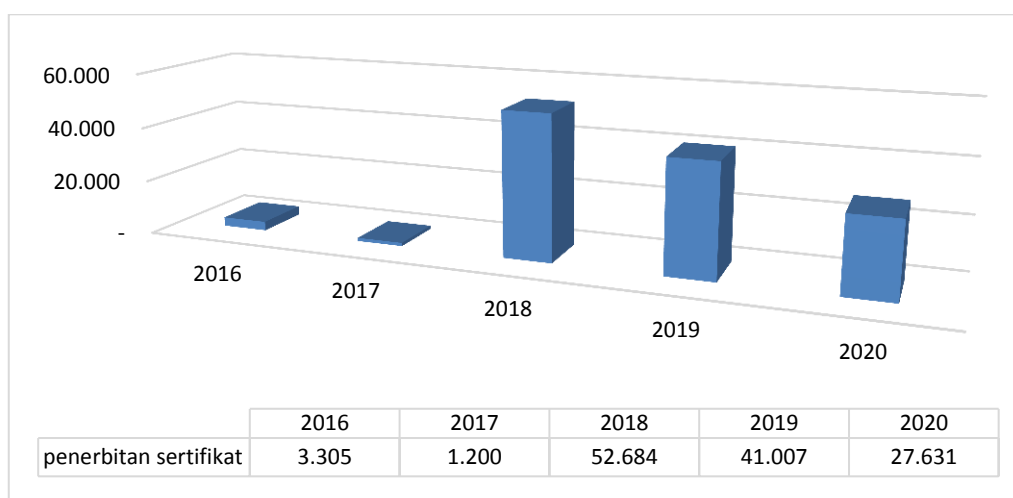
Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten menjadi salah satu indikator pelayanan umum pada urusan pertanahan. Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten pada Tahun 2019, menerbitkan 41.007 sertifikat sedangkan di Tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat. Adapun gambaran penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.51
Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten 2016-2020

No	Detail Kegiatan (Bulan)	Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah (bidang)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Januari	1.456	1.010	2.703	2.851	1.102
2	Februari	1.099	577	2.529	2.999	1.730
3	Maret	1.006	590	3.097	4.667	6.148
4	April	907	1.565	3.653	5.588	5.667
5	Mei	2.539	1.195	4.545	6.232	3.444
6	Juni	1.691	1.450	3.202	4.927	420
7	Juli	875	2.491	5.040	2.495	1.194
8	Agustus	1.236	2.055	5.594	4.818	927
9	September	1.281	2.258	6.209	1.770	1.041
10	Oktober	843	11.236	7.556	1.754	1.342
11	November	1.189	5.485	3.786	1.226	1.286
12	Desember	669	4.365	4.770	1.680	1.310
TOTAL		3.305	1.200	52.684	41.007	25.611

Sumber : Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2020

Penerbitan sertifikat hak atas tanah yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 mengalami peningkatan yang cukup signifikan ditahun 2018, dan tahun selanjutnya cenderung mengalami penurunan, karena terdapat program pemutihan sertifikat dari Pemerintah Pusat.



Sumber : Kantor ATR Kabupaten Klaten, 2020, diolah

Gambar 2.80.
Penerbitan Sertifikat Hak Tanah yang Diterbitkan oleh Kantor
Pertanahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten sampai dengan tahun 2020 tercatat sebanyak 2.042 bidang yang terdiri dari 672 bidang tanah, 338 ruas jalan kabupaten dan 1032 ruas jalan lingkungan. Dari total tanah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Klaten, yang bersertifikat baru 583 bidang tanah dan 4 ruas jalan kabupaten. Sedangkan yang lain masih proses sertifikasi (Sumber: BPKD Kab Klaten, per 31 Maret 2021)”.

5. Lingkungan Hidup

a. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)

Capaian indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) selama kurun waktu tahun 2016-2020 menunjukkan trend peningkatan, dari 39,74 di tahun 2016 menjadi 52,85, hal ini menggambarkan status lingkungan yang kurang baik. IKLH merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu, dimana semakin tinggi nilai IKLH menunjukkan semakin baik kondisinya.

Perhitungan IKLH merupakan komponen dari 30% Indeks Kualitas Udara (IKU); 30% Indeks Kualitas Air (IKA) dan 40% Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Dalam peengujian kualitas air permukaan tahun 2020 dilakukan di 29 titik yang meliputi Rowo Jombor dan 8 Sungai (Woro, Soran, Modin, Kroman, Pusur, Modran, Kacang Ijo, dan Sungai Merbung) menunjukkan indeks Pencemaran air di Kabupaten Klaten sebesar 36,15 (cemar berat, menurut Permen LH No 115 Tahun 2003 Tentang Penentuan Status Mutu Air). Untuk kualitas udara, dari hasil pengukuran di 9 titik diketahui nilai indeks udara Kabupaten Klaten sebesar 76,82 (baik). Cakupan pemantauan terhadap kualitas udara, air dan tutupan lahan sudah dilakukan dengan capaian 100% setipa tahunnya. Selengkapnya, hasil pengukuran IKLH beserta kompositnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.52
Capaian IKLH Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Indeks Kualitas Udara	Indeks Kualitas Air	Indeks Tutupan Lahan	IKLH
1	2016	60,95	16	41,64	39,74
2	2017	83,3	18,28	42,54	47,49
3	2018	83,17	18,28	42,54	47,45
4	2019	82,29	28,46	42,54	50,24
5	2020	76,82	36,15	42,54	52,85

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota di Kabupaten Klaten pada tahun 2018 sebesar 35%, kemudian meningkat di 2019 menjadi 50%. Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya juga sudah mencapai 100%, ini berarti bahwa semua pengaduan terkait lingkungan hidup sudah ditindaklanjuti semua. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Capaian indikator Ruang Terbuka Hijau yang terkelola dengan baik pada tahun 2016-2019 sebesar 100 %, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 66,66 %. Penurunan capaian ini salah satunya disebabkan ada refofusing anggaran untuk penanggulangan Pandemi Covid-19. Pemeritah Kabupaten Klaten juga

telah melakukan rehabilitasi terhadap lahan kritis utamanya yang berada di lereng merapi akibat kegiatan pertambangan dengan capaian pada tahun 2020 sebesar 5,04 % terhadap total lahan kritis.

Tabel 2.53
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	25	25	25	25	50
Cakupan pemantauan kualitas air	%	100	100	100	100	100
Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100	100	100	100	100
Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	0	0	0	0	10
Proporsi luas lahan kritis yang direhabilitasi terhadap luas lahan keseluruhan 15.3.1.(a)	%	NA	NA	NA	4,41	5,04
Persentase RTH publik yang terkelola dengan baik	%	100	100	100	100	66,66
Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen Izin Pengelolaan Limbah B3	%	0	0	76	83	83
Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota	%	0	0	35	50	0
Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100	100	100	100	100
Persentase saka kalpataru yang dibina	%	0	0	100	100	100
Jumlah Tokoh/ lembaga masyarakat /Sekolah / Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	orang	0	0	0	6	0
Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PBLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	NA	NA	100	100	100
Persentase Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang ditangani	%	100	100	100	100	100

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2020

b. Persampahan

Penanganan sampah di Kabupaten Klaten dilakukan dengan 2 cara, yaitu melalui penanganan (pengolahan) dan pengurangan dari sumber sampah. Sampah yang tertangani di TPA selama kurun waktu 5 tahun terakhir capaiannya terus meningkat, dari 12,89% di tahun 2016 menjadi 50,66% di tahun 2020. Seiring dengan kesadaran masyarakat dalam mengelola sampah, pengurangan terhadap timbulan sampah melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat juga terus meningkat, dari 16% di

tahun 2017 menjadi 52,73% di tahun 2020. Untuk penanganan sampah diperkotaan capaian pada tahun 2020 sebesar 98,09%. Selengkapnya kinerja persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.54
Capaian Kinerja Persampahan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase sampah yang tertangani di TPA	%	12,89	14,72	16,16	23,8	50,66
Persentase jumlah sampah yang berkurang melalui 3R, Bank Sampah, Biopori, Sedekah sampah, BSF, Pengolahan setempat	%	NA	16	29	48,02	52,73
Persentase timbulan sampah diperkotaan yang ditangani	%	NA	NA	NA	95,31	98,09

Sumber : DLHK Kabupaten Klaten, 2021

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Salah satu bentuk tertib administrasi kependudukan dapat dilihat dari jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran dan Akte Nikah. Peningkatan/ penurunan jumlah penduduk yang telah memiliki KTP, KK, Akte Kelahiran, dan Akte Nikah menggambarkan tingkat kesadaran masyarakat mengenai identitas/ administrasi kependudukan. Rasio penduduk ber-KTP ditahun 2020 mencapai 0,94 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Pelayanan Pencatatan Sipil dilihat dari akte kematian Pada tahun 2016 tercatat sebanyak 292 akte kematian yang diterbitkan, meningkat cukup signifikan pada tahun 2020 menjadi 10.072 akte kematian yang di terbitkan. Peningkatan tersebut dikarenakan masyarakat sudah memahami tentang pentingnya akte kematian. Pelayanan pencatatan sipil dilihat dari akte perkawinan yang diterbitkan selama kurun waktu lima tahun (2016-2020) tertinggi di tahun 2019 sebanyak 4.102 akte, sementara di tahun 2020 terjadi penurunan menjadi 2.698 akte. Kondisi tersebut dikarenakan tidak semua perkawinan non muslim langsung dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Persentase OPD dalam pemanfaatan data sampai dengan tahun 2020, sebesar 13,73% dari 51 OPD yang ada di Kabupaten Klaten, hal ini berarti bahwa baru 7 OPD yang sudah bekerja sama dan mendapatkan hak akses data kependudukan yang sudah di setujui oleh Dirjen Dukcapil.

Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Tahun 2016-2020.

Tabel 2.55
Capaian Kinerja Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	rasio	0,88	0,9	0,89	0,89	0,94
2.	Penerapan KTP Nasional berbasis NIK		sudah	sudah	sudah	sudah	sudah

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
3.	Cakupan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP)	%	88,47	89,64	89,98	89,91	94,93
4.	Jumlah Pelayanan Akte						
	a. Kelahiran	dok	22.356	23.256	27.755	23.295	19.511
	b. Kematian	dok	292	1.374	2.098	8.431	10.072
	c. Perkawinan	dok	404	903	295	4.102	2.698
	d. Perceraian	dok	58	58	71	63	160
5.	Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan janji kerjasama		-	-	-	-	13,73
6.	Persentase perekaman KTP elektronik	%	90,59	90,14	92,23	94,21	97,87
7.	Cakupan kepemilikan KK	%	94	94,62	94,34	95,28	97,68
8.	Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	24,61	29,6	36,81	42	46,84
9.	Cakupan penerbitan akta kematian	%	100	100	100	100	100
10.	Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100	100	100	100	100
11.	Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100	100	100	100	100
12.	Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100	100	100	100	100
13.	Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100	100	100	100	100
14.	Persentase Ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa/ Kelurahan (LPMD/LPMK) adalah lembaga atau wadah yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra pemerintah Desa atau Kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat dibidang pembangunan. Jumlah LPMD di Kabupaten Klaten selama lima tahun terakhir (2016-2020) jumlahnya tetap yaitu sebanyak 291 LPMD. Pada setiap tahunnya LPMD/LPMK dibina oleh kecamatan dan kabupaten baik melalui program desa/kelurahan binaan yang dilaksanakan secara terpadu maupun program lainnya. Diharapkan dari semua fungsi LPM tersebut dapat membantu selaku wadah mitra kerja pemerintah Desa dalam mewujudkan aspirasi masyarakat di bidang pembangunan.

LPMD di Kabupaten Klaten cukup berkembang dengan adanya peningkatan dari kelompok binaan PKK yang terus meningkat setiap tahunnya dari 26 kelompok ditahun 2016 menjadi 52 kelompok ditahun 2020. PKK aktif jumlahnya cenderung tetap selama lima tahun terakhir sebanyak 428 desa. Jumlah posyandu aktif selama lima tahun terakhir (2016-2020) jumlahnya meningkat dari sebanyak 2.262 unit menjadi 2.313 di tahun 2020 . Hal ini harus terus dipertahankan dan tingkatkan, karena fungsi LPMD sendiri adalah membantu pemerintah desa dalam hal penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan, penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; dan penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan

hidup. Berikut capaian penyelenggaraan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Kabupaten Klaten Tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 2.55.

Tabel 2.56
Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah kelompok binaan PKK	Kelompok	26	39	52	52	52
Jumlah LPMD	Lembaga	391	391	391	391	391
Jumlah PKK aktif (Kelembagaan PKK)	Desa	428	428	428	428	428
Jumlah Posyandu aktif	Unit	2.262	2.272	2.272	2.313	2.313
Jumlah desa yang terfasilitasi dalam kerja sama antar desa	desa	-	-	-	-	-
desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUDES yang tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase PKK Aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Posyandu Aktif	%	100	100	100	100	100
Persentase Posyantek Aktif	%	-	-	11,11	18,18	18,18

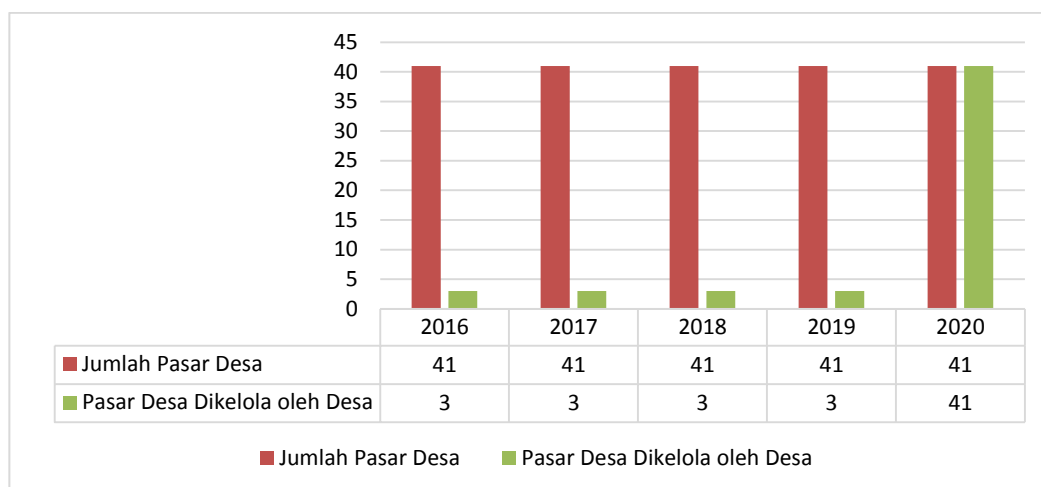
Sumber : Dispermades Kab. Klaten, 2020

Jumlah BUMDes dalam kurun waktu tahun 2016-2020 cenderung menurun, karena belum optimalnya dukungan dana dan komitmen dari Pemerintah Desa. Dari 357 BUMDesa yang ada di Kabupaten Klaten saat ini, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kategori berdasarkan Peraturan Gubernur No. 18 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan BUMDesa Provinsi Jawa Tengah yaitu:

1. BUMDesa Dasar sejumlah 167;
2. BUM Desa Tumbuh sejumlah 159;
3. BUM Desa Berkembang sejumlah 21;
4. BUM Desa Maju sejumlah 10.

Guna pengembangan dan optimalisasi pengelolaan BUMDesa maka, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa telah melakukan pendampingan kepada pengelola BUMDes dalam rangka meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia. Jumlah BUMDes di Kabupaten Klaten sampai tahun 2020 sebanyak 357 BUMDes. Guna memperkuat kerjasama antar desa dan untuk mengantisipasi adanya kecemburuan antar desa diperlukan juga adanya pembentukan Badan Usaha Milik Desa Bersama (Bumdesma) berdasarkan pada potensi ataupun permasalahan yang sama.

Untuk jumlah pasar desa dari tahun ke tahun sama sebanyak 41 pasar desa yang mana dari tahun 2016-2019 hanya 3 pasar desa yang dikelola oleh Pemerintah Desa. Mulai tahun 2020 pengelolaan pasar desa diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Desa. Sedangkan, jumlah kerja sama antar desa dari tahun 2016 s/d 2020 belum ada karena kegiatan tersebut baru akan dilaksanakan di RPJMD 2021 s/d 2026 .



Sumber : Dispermades Kab. Klaten, 2020, data diolah

Gambar 2.81.
Jumlah Lembaga Ekonomi Perdesaan di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Pada tahun 2016 terdapat pembangunan kawasan pedesaan, yaitu pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Desa Kaligayam, Desa Kadilanggon, dan Desa Melikan di Kecamatan Wedi. Pembangunan kawasan perdesaan tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa. Penempatan lokasi tersebut didasarkan pada hasil penelitian Universitas Tidar Kabupaten Magelang. Sedangkan pada Tahun 2017-2018, pembangunan kawasan perdesaan ada 9. Pembangunan kawasan pedesaan, dan masih dalam proses penyusunan RPKP, yaitu:

- 1). Pembangunan kawasan desa sentra batik di Desa Jarum, Banyuripan, Beluk dan Kebon di Kecamatan Bayat. Pembangunan kawasan desa batik tersebut telah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh desa-desa tersebut sebagai sentra penghasil batik di Kabupaten Klaten.
- 2). Pembangunan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik di Desa Tlingsing, Mlese, Balak dan Baran di Kecamatan Cawas. Pembangunan kawasan desa industri lurik dan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 3). Pembangunan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi di Desa Taskombang, Solodiran, Kranggan, dan Nangsri di Kecamatan Manisrenggo. Pembangunan kawasan desa wisata budaya berbasis ekonomi tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 4). Pembangunan kawasan desa wisata alam lereng merapi di Desa Balerante, Sidorejo, dan Bumiharjo di Kecamatan Kemalang. Pembangunan kawasan desa wisata alam lereng merapi tersebut sudah sesuai dengan potensi desa yang terletak di lereng gunung merapi.
- 5). Pembangunan Kawasan Pertanian Organik meliputi Desa Gempol, Desa Jeblog, Desa Ngabeyan dan Desa Pondok Kecamatan Karanganom. Pembangunan kawasan pertanian organik tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 6). Pembangunan Kawasan Wisata Terpadu meliputi Desa Gondang, Desa Basin, Desa Pluneng, Desa Malang jiwana, Desa Karangduren, Desa Ngrundul, dan Desa Menden Kecamatan Kebonarum, Pembangunan

kawasan wisata terpadu tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

- 7). Pembangunan Kawasan Industri Rumah Tanggapan Pangan Lestari, meliputi Desa Kranggan, Desa Keprabon, dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo, Pembangunan kawasan industri rumah tangga dan pangan lestari tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 8). Pembangunan Kawasan Wisata Air dan Pertanian, meliputi Desa Janti, Desa Sidowayah, dan Desa Sidoharjo Kecamatan Polanharjo, Pembangunan kawasan wisata air dan pertanian tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.
- 9). Pembangunan Kawasan Wisata Budaya meliputi Desa Taji, Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Tlogo, Desa Pereng, dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan. Pembangunan kawasan wisata budaya tersebut sudah sesuai dengan potensi yang dimiliki desa.

Tabel 2.57
Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
2016	Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan	Kecamatan Wedi : Ds, Kaligayam, Ds, Kadilanggon, Ds, Melikan	Sudah menyusun RPKP	SK Bupati No, 050/221 Tahun 2016 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan Berbasis Mandiri Pangan di Kab, Klaten
2017	Kawasan Sentra Batik	Kecamatan Bayat : Ds, Jarum, Ds, Banyuripan, Ds, Beluk, Ds, Kebon	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Sentra Industri Lurik dan Pertanian Organik	Kecamatan Cawas : Ds, Tlingsing, Ds, Mlese, Ds, Balak, Baran	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Budaya Berbasis Ekonomi	Kecamatan Manisrenggo : Ds, Taskombang, Ds, Solodiran, Ds, Kranggan, Ds, Nangsri	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Alam Lereng Merapi	Kecamatan Kemalang : Ds, Balerante, Ds, Sidorejo, Ds, Bumiharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/467 Tahun 2017 tentang Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2018	Kawasan Wisata Budaya	Desa Taji, Desa Kemudo, Desa Bugisan, Desa Tlogo, Desa Pereng, dan Desa Kebondalem Kidul Kecamatan Prambanan	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kab, Klaten
	Kawasan Pertanian Organik	Kecamatan Karanganyam : Ds, Gempol, Ds, Jeblog, Ds, Ngabeyan, Ds, Pondok	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Terpadu	Kecamatan Kebonharjo : Ds, Gondang, Ds, Basin, Ds, Pluneng, Ds, Malangjiwan, Ds, Karangduren, Ds,	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten

Tahun	Nama / Tema Kawasan	Lokasi	Tahap Kegiatan	Keterangan
		Ngrundul, Dan Ds, Menden		
	Kawasan IRT dan Pangan Lestari	Kecamatan Polanharjo : Ds, Kranggan, Ds, Keprabon, Ds, Kebonharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
	Kawasan Wisata Air dan Pertanian	Kecamatan Polanharjo : Ds, Janti, Ds, Sidowayah, Ds, Sidoharjo	Proses penyusunan RPKP	SK Bupati No, 050/312 Tahun 2018 tentang Lokasi Pembangunan Perdesaan di Kabupaten Klaten
2019	Kawasan Peternakan Kambing	Kecamatan Ngawen: Ds, Gatak, Ds, Duwet, Ds, Manjung	Proses SK Bupati	
	Kawasan Wisata Air dan Perikanan	Kecamatan Tulung: Ds, Wunut, Ds, Cokro, Ds, Daleman, Ds, Dalangan	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	
	Kawasan Pertanian Terpadu	Kecamatan Delanggu: Ds, Dukuh, Ds, Jetis, Ds, Butuhan, Ds, Banaran, Ds, Bowan, Ds, Sribit, Ds, Mendak, Ds, Krecek, Ds, Karang, Ds, Sabrang, Ds, Tlobong, Ds, Gatak, Ds, Delanggu, Ds, Kepanjen, Ds, Segaran, Ds, Sidomulyo,	Proses Persetujuan Kerjasama antar Desa	
2020	-	-	-	-

Sumber : Dispermades Kab, Klaten, 2021

Dalam rangka pengembangan teknologi tepat guna, Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah melaksanakan pelatihan teknologi tepat guna kepada masyarakat untuk meningkatkan ketrampilan dalam pengelolaan teknologi tepat guna.

Tabel 2.58
Pelatihan Teknologi Tepat Guna Di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1,	Jenis Pelatihan TTG yang telah diberikan	1, Pelatihan Pembuatan Aneka Kripik bahan Singkong Pemanfaatan TTG di Desa Bono peserta dari Desa Bono, Pucangmiliran dan Wunut Kecamatan Tulung	1, Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Bawukan peserta dari Desa Bawukan dan Desa Panggang Kecamatan Kemalang 2, Pelatihan Ternak Lele dengan metode <i>Bioflock</i> Pemanfaatan TTG di Desa Gunung Gajah peserta dari Desa	1, Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Solodiran Kecamatan Manisrenggo 2, Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Kranggan Kecamatan Manisrenggo	1. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jurangjero Kecamatan Karanganom 2. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karang Kecamatan Karanganom	-

No	Uraian	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
			Kebon dan Desa Gununggajah, Bayat 3 Pelatihan Hidroponik Pemanfaatan TTG di Desa Sidowayah peserta dari Desa Sidowayah dan Desa Kebonharjo Kecamatan Polanharjo	3, Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di Desa Taskombang Kecamatan Manisrenggo 4, Pelatihan pembuatan Briket orang dengan bahan sampah organik di desa Nangsri Kecamatan Manisrenggo	3. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Karanganom Kecamatan Karanganom 4. Pelatihan pembuatan briket arang dengan bahan sampah organik di Desa Jungkare Kecamatan Karanganom 5. Pelatihan pertanian hidroponik di Desa Kahuman Kecamatan Ngawen	
2,	Data Perkembangan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) di pedesaan	1, Posyantek Kecamatan Kemalang 2, Posyantek Kecamatan Tulung	1, Posyantek Kec, Karanganom (Keputusan Bupati Klaten No, 414,4/213 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kecamatan Karanganom Kabupaten Klaten) 2, Posyantek Kecamatan Polanharjo (Keputusan Bupati Klaten No, 414,4/214 Tahun 2017 tentang Pembentukan Tim Pengelola POSYANTEK Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten)	1, Posyantek antar desa TA 2018 di Kecamatan Cawas, Kecamatan Wedi 2, Posyantek antar desa TA 2018 di Kecamatan Wedi	1, Posyantek antar desa Kecamatan Manisrenggo 2, Posyantek antar desa Kecamatan Trucuk	-

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Tujuan pembangunan penduduk dan Keluarga Berencana adalah melakukan pengendalian terhadap pertumbuhan penduduk dan melakukan pengaturan jarak kehamilan. Berdasarkan Undang-undang No 23 tahun 2014 kewenangan kabupaten dalam pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah melakukan sinkronisasi kebijakan pengendalian penduduk dari pemerintah pusat dan daerah, pemetaan

perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota, Sedangkan kewenangan sub urusan Keluarga Berencana adalah pelaksanaan advokasi KIE pengendalian penduduk dan KB sesuai dengan kearifan lokal, peningkatan peran penyuluh KB, pengendalian dan pendistribusian alat kontrasepsi, dan peningkatan partisipasi penggunaan alat kontrasepsi, Kewenangan sub urusan Keluarga Sejahtera adalah Pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga dan Pelaksanaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan.

Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Klaten mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 1,07% ditahun 2016 dapat ditekan menjadi 0,30% ditahun 2020, Untuk *Total Fertility Rate* capaiannya tetap selama kurun waktu tiga tahun terakhir (2018-2020) yaitu sebesar 2,1, Angka pemakaian kontrasepsi atau CPR bagi perempuan meninckah usia 15-49 tahun menunjukkan kondisi cukup fluktuatif dari 78,7% ditahun 2016 menurun menjadi 69,7% ditahun 2018 kemudian meningkat dengan capaian ditahun 2020 sebesar 70,9%, Angka ini relatif cukup baik dibandingkan dengan target nasional (65%), penurunan cakupan peserta KB aktif dikarenakan adanya pemutakhiran menggunakan nomor KK, Untuk indikator *unmet need* ditahun 2020 tercatat sebesar 16,95%, Capaian indikator rasio petugas pembantu pembina KB desa (PPKBD) setiap desa atau kelurahan sudah mencapai 100% sejak tahun 2016-2020.

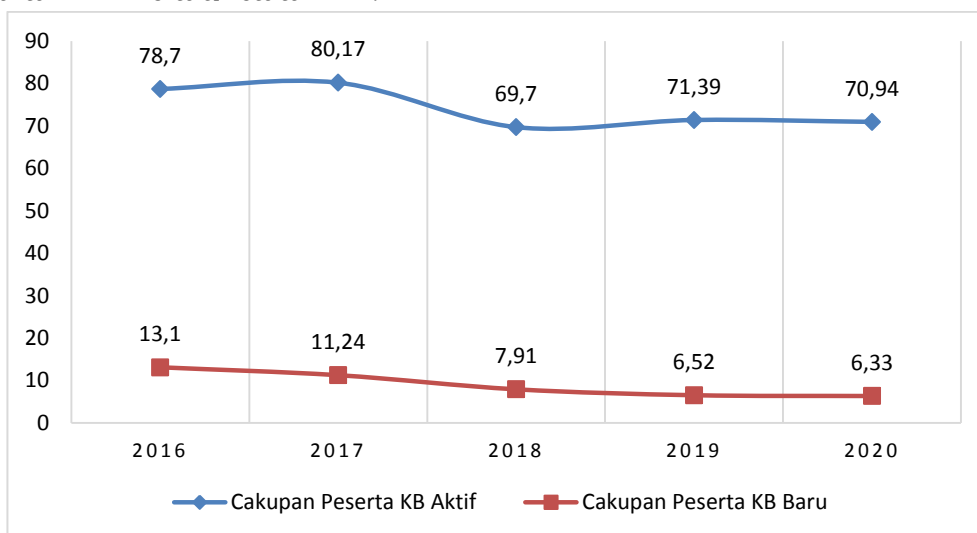
Berikut gambaran pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kabupaten Klaten yang dapat dilihat dari beberapa indikator.

Tabel 2.59
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	%	1,07	1,03	0,46	0,20	0,30
<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Anak per usia subur	-	-	2,1	2,1	2,1
Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 - 49	%	78,7	64,93	69,7	71,39	70,9
Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (<i>unmet need</i>)	%	10,13	9,3	27,3	15,91	16,95
Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	%	100	100	100	100	100
Cakupan anggota BKB yang menjadi peserta KB	%	79,3	77	74,7	78,9	79
Cakupan anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	73,5	60,9	62,9	60,4	70,7
Cakupan anggota BKL yang menjadi peserta KB	%	73,3	69,2	72,4	71,1	73,9
Cakupan anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	75,1	66,3	65,2	69,4	69,2

Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020

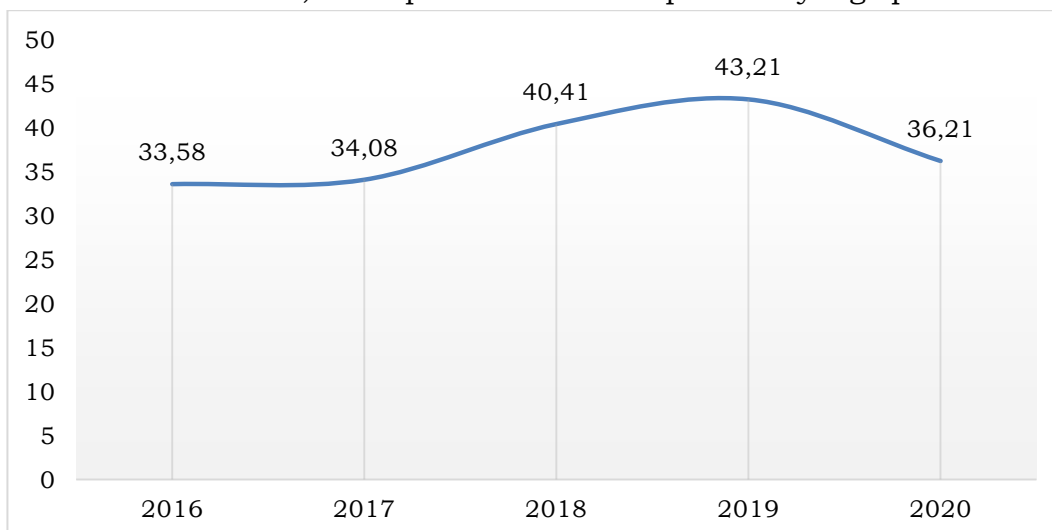
Sama halnya dengan cakupan peserta KB baru juga mengalami penurunan, dari sebesar 13,1% ditahun 2016 menjadi 6,33% ditahun 2020. Kondisi ini menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga akseptor takut untuk datang ke faskes KB, selain itu mulai tahun 2020 tidak ada baksos pelayanan KB melalui safari KB.



Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020, data diolah

Gambar 2.82.
Cakupan peserta KB Aktif dan KB Baru di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Perkembangan persentase keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 tahun 2016-2019 mengalami peningkatan dari 33,58% ditahun 2016 menjadi 43,21% ditahun 2019, tetapi pada tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 7%, Secara umum jumlah keluarga pra sejahtera terus dapat ditekan, data tersebut mengindikasikan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten telah berupaya untuk mengentaskan kemiskinan, meskipun belum mencapai hasil yang optimal.



Sumber : Dinas Sosial, P3AKB Kab, Klaten, 2020, data diolah

Gambar 2.83.
Persentase Keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera 1 di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

9. Perhubungan

Pelayanan Umum pada Pelayanan umum pada urusan perhubungan meliputi perhubungan darat (Lalu Lintas dan Angkutan Jalan/ LLAJ dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan/ASDP), perhubungan laut, perhubungan udara dan perkeretaapian. Pemerintah Daerah hanya mempunyai kewenangan pada perhubungan darat dan laut, namun demikian Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan fasilitasi untuk perkeretaapian. Pelayanan urusan perhubungan dapat dilihat dari jumlah penumpang dan barang yang dapat terangkut oleh angkutan baik darat, laut maupun udara.

a. Perhubungan Darat

1) Terminal Penumpang

Penyelenggaraan urusan perhubungan di Kabupaten Klaten menunjukkan kondisi yang sangat baik, kondisi tersebut dilihat dari capaian indeks kepuasan layanan perhubungan yang mencapai 79,49% di tahun 2020, Kabupaten Klaten memiliki 7 terminal tipe C, persentase terminal yang dikelola dengan baik menunjukkan peningkatan dari 28,57% di tahun 2016, meningkat menjadi 42,86% di tahun 2020. Sesuai dengan Peraturan menteri Perhubungan Nomor: PM 40 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Penyelenggaraan Terminal Penumpang Angkutan Jalan, bahwa standar pelayanan terminal penumpang di terminal penumpang angkutan jalan yang wajib disediakan dan dilaksanakan oleh penyelenggaraan terminal mencakup: (1) layanan keselamatan; (2) pelayanan keamanan; (3) pelayanan kehandalan/keteraturan; (4) pelayanan kenyamanan; (5) pelayanan kemudahan/ keterjangkauan; (6) kesetaraan. Data terminal angkutan penumpang umum di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.60
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum Type C di
Kabupaten Klaten Tahun 2021

No	Terminal	Alamat	Luas	Fasilitas	Keterangan	
1	Penggung	Penggung, Ceper Klaten	4.500 m ²	1	Kantor pengawas	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Loket/retribusi	
				3	Kios/toko/warung makan	
				4	Kamar mandi/WC	
				5	Parkir antar jemput	
				6	Taman/penghijauan	
				7	Loket agen bus	
2	Cawas	Cawas, Klaten	3.000 m ²	1	Kantor pengawas	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Loket/retribusi	
				3	Kios/toko/warung makan	
				4	Kamar mandi/WC	
				5	Musholla	
				6	Ruang tunggu penumpang	
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari Klaten	3.310 m ²	1	Kantor pengawas	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Loket/retribusi	
				3	Kios/toko/warung makan	
				4	Kamar mandi/WC	

No	Terminal	Alamat	Luas	Fasilitas		Keterangan
				5	Parkir antar jemput	
				6	Ruang tunggu penumpang	
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	600 m ²	1	Loket/retribusi	Pasar Klaten dalam proses renovasi (fasilitas sedang tidak ada)
				2	Kios/toko/warung makan	
				3	Ruang tunggu penumpang	
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	3.168 m ²	1	Loket/retribusi	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Kios/toko/warung makan	
				3	Ruang tunggu penumpang	
6	Tulung	Tulung, Klaten	400 m ²	1	Loket/retribusi	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Ruang tunggu penumpang	
7	Delanggu	Karang, Delanggu Klaten	7.000 m ²	1	Kantor pengawas	Pengelolaan oleh Dinas perhubungan
				2	Loket/retribusi	
				3	Kios/toko/warung makan	
				4	Kamar mandi/WC	
				5	Musholla	
				6	Taman/penghijauan	
				7	Ruang tunggu penumpang	
				8	Loket agen bus	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

2) Lalu Lintas Angkutan Jalan (LAJ)

Dalam rangka penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melengkapi jalan dengan fasilitas keselamatan lalu lintas berupa rambu-rambu lalu lintas, persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APILL dan PJU) menunjukkan peningkatan dari 0,14% tahun 2016 meningkat menjadi 0,25% tahun 2020. Persentase pemenuhan guardrail dan marka jalan juga menunjukkan peningkatan dari 2,79% tahun 2016 meningkat menjadi 15,65% tahun 2020. Capaian indikator persentase layanan angkutan darat menunjukkan peningkatan dari 88,90% tahun 2016 menurun menjadi 84,33% tahun 2020.

Pemenuhan rambu-rambu lalu lintas mengalami perkembangan fluktuatif namun cenderung meningkat, meskipun menunjukkan peningkatan, namun capaian tersebut masih relatif rendah. Masih terdapat perlengkapan jalan yang belum terpasang sebesar 40,12%. Berikut tabel persandingan antara kebutuhan dan ketersediaan perlengkapan jalan sampai tahun 2026.

Terkait dengan potensi parkir, pada tahun 2020 jumlah parkir yang sudah dikelola oleh Dinas Perhubungan sebanyak 31 kapling/ lahan, (83,78 %) dari total potensi lahan parkir yang ada sebanyak 27 kapling/ lahan parkir.

Tabel 2.61
Persandingan Kebutuhan dan Ketersediaan Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Jenis	Satuan	Kebutuhan s/d 2025	Perlengkapan jalan terpasang tahun 2020	Target Pemasangan Perlengkapan Jalan Tahun ke-						Terpasang	Persentase	Sisa Kebutuhan
					2021	2022	2023	2024	2025	2026			
1	Rambu lalu lintas biasa	buah	4.570	3.435	227	227	227	227	227		4.570	100,00	-
2	Rambu RPPJ	buah	200	140		12	12	12	12		188	94,00	12
3	Rambu tipe F	buah	100	43		11	11	12	12		89	89,00	11
4	Marka Jalan	m2	67.920	42.920		5.000	5.000	5.000	5.000		62.920	92,64	5.000
5	Traffic Light	unit	33	31			1		1		33	100,00	-
6	Traffic Light ATCS	unit	8	5		2	1				8	100,00	-
7	Guardrail	m	4.240	3.240		200	200	200	200		4.040	95,28	200
8	Paku Marka / Mata Kucing		2.185	1.685		100	100	100	100		2.085	95,42	100
9	Traffic Cone		500	40		92	92	92	92		408	81,60	92
10	Deliniator		500	-		150	150	100	100		500	100,00	-
11	Cermin tikungan	buah	210	85		25	25	25	25		185	88,10	25
12	Zona Selamat Sekolah		30	5		5	5	5	5		25	83,33	5
13	Lampu Kedip / Warning Light		26	11		3	3	3	3		23	88,46	3
14	Rambu elektronik VMS		13	8		1	1	1	1		12	92,31	1
15	Water Barrier		191	66		25	25	25	25		166	86,91	25
16	PJU		15.393	8.756		200	200	200	200		9.556	62,08	5.837
	Jumlah											1449,13	
	Rata-rata			59,88								90,57	

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

3) Perijinan Trayek Angkutan Umum

Rasio ijin trayek di Kabupaten Klaten juga menunjukkan peningkatan dari 0,41% di tahun 2016 meningkat menjadi 1,92% tahun 2020. Persentase kepemilikan KIR angkutan umum di Kabupaten Klaten menunjukkan perkembangan fluktuatif tahun 2016 sebesar 94% menurun menjadi 86,91% tahun 2018, Pada tahun 2019 kepemilikan KIR angkutan umum menunjukkan peningkatan mencapai 93,78%, namun tahun 2020 kembali menurun menjadi 85,53%. Pada tahun 2020 jumlah kendaraan yang lulus uji KIR sebanyak 13.374 unit dengan total Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) sebanyak 8.567 unit (setahun 2 kali uji). Untuk akreditasi tempat uji di Kabupaten Klaten adalah B.

Rute trayek angkutan umum di Kabupaten Klaten dibedakan menjadi dua yaitu rute trayek bus pedesaan dan rute trayek angkutan kota. Untuk rute trayek pedesaan terdapat 16 trayek dengan total panjang trayek 377 km. Sejak Pandemi Covid-19 operasional semua armada angkutan pedesaan tidak menentu hal ini dikarenakan adanya pembatasan mobilitas masyarakat. Berikut rute trayek bus pedesaan (sesuai ijin).

Tabel 2.62
Rute Trayek Bus Pedesaan di Kabupaten Klaten
(sesuai Ijin)

No	Trayek	Panjang Trayek (km)
1	Klaten-Bendo-Wedi-Bayat-Cawas PP	27
2	Klaten-Bendo-Wedi-Bayat-Cawas-Kr.Dowo-Pakis-Delanggu PP	63
3	Bendo-Penggung-Nglajur-Pakis-Tegalondo PP	25
4	Klaten-Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP	30
5	Klaten-Gondang-Kemalang-Sorowono PP	25
6	Prambanan-Bendogantungan-Jonggrangan PP	16
7	Klaten-Jatinom-Tulung PP	14
8	Penggung-Pedan-Cawas-Jentir PP	24
9	Prambanan-Bendogantungan-Penggung-Delanggu PP	32
10	Delanggu-Pakis-Wonosari-Daleman-Kr.Dowo PP	23
11	Delanggu-Pakis-Wonosari-Teloyo PP	10
12	Klaten-Prambanan-Kepurun PP	18
13	Bendogantungan-Wedi-Bayat PP	12
14	Delanggu-Pakis-Cokro-Tulung PP	19
15	Klaten-Gondang-Prambanan-Manisrenggo PP	21
16	Prambanan-Manisrenggo-Kepurun PP	18

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

Untuk rute trayek angkutan kota terdapat 16 jalur trayek dengan total panjang trayek 403 km, saat ini armada angkutan kota sudah banyak yang tidak beroperasi, trayek yang masih berjalan adalah trayek Klaten-Jatinom-Penggung PP (1F) yang beroperasi 1 kali dalam seminggu dan trayek Klaten-Tegalyoso-Kraguman-Srowot PP (1A) yang beroperasi 2 hari sekali. Kondisi ini disebabkan karena masyarakat lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi atau transportasi online yang dirasa lebih praktis dan efisien. berikut data trayek angkutan kota di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.63
Rute Trayek Angkutan Kota di Kabupaten Klaten

No	Kode Trayek	Trayek	Panjang Trayek (km)
1	II C	Delanggu-Juwiring-Kaligawe-Pedan-Karangdowo PP	17
2	I F	Klaten-Jatinom-Pengagung	21
3	I H	Klaten-Jimbung-Bayat-Karangasem PP	20
4	I D	Klaten-Kalikebo-Planggu-Talang-Bawak-Cawas PP	24
5	I J	Klaten-Gayamprit-Basin-Kadilajo-Dompyongan-Tg.mas PP	24
6	I L	Klaten-GOR-Mayungan-Jolotundo-Kayumas-Temuireng PP	23
7	V A	Pulowatu-Beteng-Gabus-Krajan-Ngangkruk PP	46
8	I A	Klaten-Tegalyoso-Kraguman-Srowot PP	16
9	II B	Delanggu-Cokro-Tulung-Maduhan PP	51
10	I B	Klaten-Ngabetan-Beteng	22
11	I E	Pasar Klaten-Ngalas-Depo-Wedi-Canan-Balong PP	19
12	I K	Klaten-Bendogantungan-SPK-Pandes-Wedi-Pasungan-Gempol PP	22
13	I G	klaten-Mireng-Sumber-Bendo-Pedan PP	17
14	I C	Klaten-Perumda-RSI-Karanganom PP	18
15	I I	Klaten-Gayamprit-Karangnongko-Pulowatu PP	19
16	II A	Delanggu-Kepoh-Juwiring-Tanjung-Serenan PP	44

Sumber: Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

b. Perkeretaapian

Kabupaten Klaten dilewati oleh jalur kereta api sebagai salah satu moda transportasi untuk melayani pergerakan orang dan barang. Dengan adanya jalur kereta api diharapkan dapat mengurangi beban lalu lintas angkutan jalan. Jaringan kereta api di Kabupaten Klaten melewati: (1) Kecamatan Wonosari; (2) Kecamatan Delanggu; (3) Kecamatan Juwiring; (4) Kecamatan Ceper; (5) Kecamatan Klaten Utara; (6) Kecamatan Kalikotes; (7) Kecamatan Klaten Kota; (8) Kecamatan Klaten Selatan; (9) Kecamatan Jogonalan; dan (10) Kecamatan Prambanan. Berikut tabel jaringan perlintasan kereta api di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.64
Jaringan Perlintasan Kereta Api Kabupaten Klaten

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
113	119+310	- 7.59966, 110.73009	Sebidang	Jalan Desa	Bolali	Wonosari	Kabupaten	1,5	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
115	119+955	- 7.60303, 110.72535	Sebidang	Raya Wonosari	Sukorejo	Wonosari	Kabupaten	4	Aspal	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		
117	121+184	- 7.6095, 110.71621	Sebidang	Pakis Dalem	Pakis	Wonosari	Kabupaten	6	Beton	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	J	√	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		
118	121+839	- 7.61413, 110.71253	Sebidang	Jalan Desa	Boto	Wonosari	Kabupaten	4	Aspal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	√	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
120	122+830	- 7.62144, 110.7073	Sebidang	Timur Stasiun	Ngatak	Delanggu	Kabupaten	5	Aspal	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : OPS Status Penutupan :		

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
122	123+710	- 7.62809, 110.70298	Sebidang	Jalan Desa	Karang	Juwiring	Kabupaten	1,5	Tanah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
123	124+47	- 7.63378, 110.69954	Sebidang	-	Mrise	Juwiring	Kabupaten	5	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
	124+9/0				Sakung		Kabupaten																								
	125+0/1				Sakung		Kabupaten																								
124	125+040	- 7.63829, 110.69659	Sebidang	Jalan Desa	Sakung	Dlanggo	Kabupaten	1,5	Beton	-	-															TJ			Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
125	125+430	- 7.64126, 110.69465	Sebidang	Kaliwingko	Banaran	Delanggu	Kabupaten	4	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		
241	126+866	- 7.65219, 110.68738	Sebidang	Alternatif	Muru	Ceper	Kabupaten	4	Aspal	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
276	137+408	- 7.70765, 110.61166	Sebidang	Jalan Desa	Sragu			1	Tanah																		TJ				Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan : S
278	137+408		Sebidang	Jalan Desa	Sragu	Klaten Kota	Kabupaten	1,8	Beton	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :
279	137+858	- 7.70958, 110.60805	Sebidang	Borobudur	Karangduwet	Klaten Kota	Kabupaten	5,4	Aspal	v	v	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
280	138+659	- 7.71326, 110.60172	Sebidang	Soka	Tonggolan	Klaten Kota	Kabupaten	6	Aspal	-	-	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
281	138+862	- 7.71403, 110.60003	Sebidang	Seruni	Tonggolan	Klaten Kota	Kabupaten	4,2	Aspal	-	-	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
283	139+472	-7.7167, 110.59521	Sebidang	Krapyak	Tonggalan	Klaten Kota	Nasional	10,8	Aspal	√	√	√	√	√	√	√	√	-	-	√	√	-	-	-	-	-	-	J	-	v	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
284	139+950	-7.71871, 110.59128	Sebidang	Jalan Desa	Merbung 1	Klaten Sltan.	Kabupaten	4,2	Aspal	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
285	140+163	-7.71963, 110.5896	Sebidang	Jalan Desa	Merbung 2	Klaten Sltan.	Kabupaten	4,2	Aspal	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
287	140+696	-7.7219, 110.58535	Sebidang	Jalan Desa	Sumberejo	Klaten Sltan.	Kabupaten	6,6	Aspal	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :
289	141+190	-7.72403, 110.58151	Sebidang	Jalan Desa	Trunuh 1	Klaten Sltan.	Kabupaten	4,8	Aspal	-	-	√	√	√	√	√	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
290	141+596	-7.72576, 110.5783	Sebidang	Jalan Desa	Trunuh 2	Klaten Slt.	Kabupaten	5,4	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :	
293	142+384	-7.73075, 110.56909			Keringan	Klaten Slt.		1,5	Tanah																		TJ			Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan : S	
294	143+070	-7.73214, 110.56646	Sebidang	Jalan Desa	Kutu 1 Sumyung	Jogonolan	Kabupaten	4,2	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :	
295	143+313	-7.73322, 110.56448	Sebidang	Jalan Desa	Kutu 2 Sumyung	Jogonolan	Kabupaten	5,4	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :	
297	144+032	-7.7363, 110.55873	Sebidang	Jalan Desa	Bakung 2	Jogonolan	Kabupaten	4,2	Aspal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :	

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasse	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
299	144+375	- 7.73775, 110.55595	Underpass	Jalan Desa	Kergan Bakung	Jogonolan	Kabupaten	4	Aspal	-	-															TJ			Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :		
301	145+385	- 7.74208, 110.54796	Sebidang	Jalan Desa	Gondangan	Jogonolan	Kabupaten	6	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : OPS Status Penutupan :	
305	146+117	- 7.74542, 110.54178	Sebidang	Jalan Desa	Ketiting	Jogonolan	Kabupaten	3	Aspal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :	
307	147+029	-7.7492, 110.53478	Sebidang	Jalan Desa	Simping	Prambanan	Kabupaten	4	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		
308	148+032	- 7.75356, 110.52673	Sebidang	Jalan Desa	Geneng	Prambanan	Kabupaten	4	Aspal	-	-	▼	▼	▼	▼	▼	▼	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :		

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu														Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.				
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1						WL/Running text		Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka	Ki	Ka
309	148+820	- 7.75693, 110.52041	Sebidang	Jalan Desa	Cucukan	Prambanan	Kabupaten	3	Aspal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan : S		
310	148+835		Sebidang	Jalan Desa	Glonggong	Prambanan	Kabupaten	2,5	Aspal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan : S		
311	149+467		Sebidang	Jalan Desa	Kadisan	Prambanan	Kabupaten	1,5	Tanah																TJ			Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :			
312	149+849	- 7.75771, 110.51139	Sebidang	Jalan Desa	Kongklangan	Prambanan	Kabupaten	2	Beton																TJ			Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :			
315	150+386	- 7.75725, 110.50655	Sebidang	Jalan Desa	Taji	Prambanan	Kabupaten	4	Aspal	-	-	-	-	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	v	v	-	-	TJ	-	-	Palang Pintu : Status Penjagaan : Status Penutupan :

JPL	Km	Koordinat	Jenis Perlintasan	Nama Jalan	Desa / Kelurahan	Kecamatan	Status Jalan	Lebar Jalan (m)	Konst. Jalan	Fasilitas Keselamatan Jalan / Rambu - Rambu																Status Penjagaan	Frontage	FO/Underpasses	Ket.		
										Lampu		Palang pintu		STOP		Andreas Cross		Peringatan 2		Peringatan		Peringatan 1		WL/Running text						Marka	
										Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka	Ki	Ka					Ki	Ka
316	151+225	- 7.75652, 110.49897	Sebidang	Jalan Desa	Kebon Dalem 1	Prambanan	Kabupaten	4,3	Aspal	-	-	v	v	v	v	v	v	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	J	-	-	Palang Pintu : SO Status Penjagaan : OPS Status Penutupan :
317	151+743	- 7.75613, 110.49426	Sebidang	Jalan Desa	Kebon Dalem 2	Prambanan	Kabupaten	4,3	Aspal	-	-																J			Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :	
318	152+046	- 7.75694, 110.49172	Sebidang	Perbatasan	Kebon Dalem 3	Prambanan	Kabupaten	6,4	Aspal	-	-																J			Palang Pintu : SO Status Penjagaan : JJ Status Penutupan :	

Sumber: DAOP IV Jogjakarta

Beberapa ruas jalan di Kabupaten telah dilakukan penghitungan terhadap Level of Service (LOS) atau tingkat pelayanan jalan, merupakan salah satu metode yang digunakan untuk menilai kinerja jalan yang menjadi indikator dari kemacetan. Suatu jalan dikategorikan mengalami kemacetan apabila hasil perhitungan LOS menghasilkan nilai mendekati 1. Dalam menghitung LOS di suatu ruas jalan, terlebih dahulu harus mengetahui kapasitas jalan (C) yang dapat dihitung dengan mengetahui kapasitas dasar, faktor penyesuaian lebar jalan, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian pemisah arah, faktor penyesuaian hambatan samping, dan faktor penyesuaian ukuran kota.

Untuk ruas jalan dengan nilai LOS tinggi terdapat di Jl. Veteran dengan nilai 0,75, sedangkan nilai LOS terendah di Jl. Pramuka dengan nilai 0,23. Rata-rata nilai LOS ruas jalan di Kabupaten Klaten sebesar 0,52. Berikut data penilaian LOS di beberapa ruas jalan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.65
Level Of Service Ruas Jalan di Kabupaten Klaten

No	Ruas / Nama Jalan *)	Fungsi Jalan	Volume Lalu lintas (kend/jam)	Kapasitas (kend/jam)	V/C Ratio	Kecepatan (km/jam)
1	Jl. Perintis Kemerdekaan	Jalan Nasional	1760	3571	0,49	37
2	Jl. Ki Ageng Gribig	Jalan Provinsi	1046	1958	0,53	38
2	Jl. Veteran	Jalan Kabupaten	1390	1855	0,75	33
3	Jl. Pemuda	Jalan Kabupaten	2239	3851	0,58	35
4	Jl. Suraji Tirtonegoro	Jalan Nasional	1765	3571	0,49	36
5	Jl. Diponegoro	Jalan Nasional	1065	1979	0,54	36
6	Jl. KH Hasyim Asy'ari	Jalan Nasional	1054	1850	0,57	35
7	Jl. Kartini	Jalan Nasional	892	1850	0,48	37
8	Jl. Dewi Sartika	Jalan Kabupaten	857	1466	0,58	35
9	Jl. Merbabu	Jalan Kabupaten	1305	3851	0,34	38
10	Jl. Pramuka	Jalan Kabupaten	341	1466	0,23	40
11	Jl. Mayor Kusmanto	Jalan Kabupaten	1179	1958	0,60	35
12	Jl. Mayor Sunaryo	Jalan Kabupaten	1217	1958	0,62	35
Rata-rata			1255	2435	0,52	

Sumber : Dinas Perhubungan dan BPS Kabupaten Klaten, 2020

Perkembangan capaian kinerja pembangunan urusan perhubungan secara lengkap dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian Kinerja Urusan Perhubungan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks kepuasan layanan perhubungan	Indeks	78,762	78,762	78,953	79,016	79,49
Persentase layanan angkutan darat	%	88,90	86,79	86,36	85,88	84,33
Pemasangan Rambu-rambu	unit	100	100	118	227	221
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan	%	0,14	0,27	0,14	0,27	0,25

Indikator	Satuan	Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
keamanan transportasi darat (rambu, APILL dan PJU)						
Persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (guardrail dan marka jalan)	%	2,79	23,18	27,38	27,90	15,65
Rasio ijin trayek	rasio	0,41	0,36	0,36	0,42	0,21
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	rasio	0,039	0,048	0,046	0,046	0,071
Jumlah orang/ barang yang terangkut angkutan umum	Orang/ unit	78.231	76.375	75.573	74.213	14.882
Jumlah orang/ barang melalui dermaga/ bandara/ terminal per tahun	Orang/ unit	243.681	246.882	239.388	203.682	43.691
Jumlah Pelabuhan Laut/Udara/Terminal Bis	Unit	7	7	7	7	7
Persentase terminal Penumpang Type C dalam kondisi baik	%	28,57	37,5	75	57,14	42,86
Persentase kepemilikan KIR angkutan umum	%	94,00	87,15	86,91	93,78	85,53
Persentase kendaraan wajib bermotor yang wajib uji yang lulus uji KIR	%	84,74	80,80	81,00	84,03	78,06
Jumlah uji kir angkutan umum	unit	550	498	527	482	235
Jumlah kendaraan melanggar (dimensi berat dan KIR mati	kendaraan	1.890	1.764	371	295	60
Jumlah kecelakaan lalulintas	kejadian	770	643	917	986	1.003

Sumber : Dinas Perhubungan dan BPS Kabupaten Klaten, 2020

Dari tabel diatas teridentifikasi bahwa penyebab turunnya kondisi terminal dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 dikarenakan terbatasnya anggaran pemeliharaan terutama pada tahun 2020, akibat adanya Pandemi Covid 19 yang berdampak terhadap *refocussing* anggaran di semua kegiatan. Selain itu semakin marak dan mudahnya akses terhadap angkutan berbasis aplikasi/ online menyebabkan menurunnya jumlah penumpang angkutan umum, juga kemudahan akses untuk memiliki kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4 juga turut berdampak pada menurunnya penggunaan angkutan umum.

10. Komunikasi dan Informatika

Memasuki era 4,0 komunikasi dan informatika merupakan bagian penting bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, Sarana/ prasarana komunikasi dan informatika yang berkembang pesat telah merevolusi cara hidup manusia, baik cara berkomunikasi, cara belajar, cara

bekerja, cara berbisnis dan lain sebagainya, Dengan teknologi komunikasi dan informasi, segala aktivitas manusia dapat dilakukan melalui cara baru, inovatif, instan, transparan, akurat, tepat waktu dan efektif, Selain itu, semua proses pelaksanaan kegiatan serta konten dapat ditransformasikan dari fisik dan status menjadi digital, mobile, virtual, serta personal dengan demikian kecepatan kinerja akan meningkat.

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) adalah istilah selimut yang mencakup semua teknologi dan layanan yang terlibat dalam komputasi, manajemen data, penyediaan telekomunikasi, dan internet, Semua teknologi ini berhubungan dengan transmisi dan penerimaan informasi, TIK menembus semua aspek kehidupan, menyediakan cara-cara yang lebih baru, lebih baik, dan lebih cepat bagi orang-orang untuk berinteraksi, membangun jaringan, mencari bantuan, mendapatkan akses ke informasi dan belajar.

Pemanfaatan TIK dalam proses penyelenggaraan pemerintah (*e-government*) sangat penting dalam peningkatan kualitas pelayanan publik yang efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas, Pemanfaatan TIK tersebut salah satunya dilakukan melalui penyediaan data yang akurat, muthakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagikan serta dikelola secara seksama, terintegrasi dan berkelanjutan sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.

Berdasarkan amanat peraturan Presiden tersebut penyelenggaraan urusan komunikasi dan informasi daerah sangat erat kaitannya dalam mengakomodir ketersediaan data dan informasi daerah, Dalam mengakomodir amanat Peraturan Presiden tersebut Pemerintah Kabupaten Klaten telah memiliki 1 website utama yaitu *www,klatenkab,go,id*, Namun keberadaan website tersebut masih perlu terus ditingkatkan mengingat ketersediaan data tidak hanya di ukur dari adanya website, namun juga pengelolaan website yang harus terus terupdate, Kurangnya informasi yang disampaikan di website Kabupaten Klaten disebabkan karena masih rendahnya kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia serta sarana dan prasarana dan bidang komunikasi dan informasi, Maka perlu tingkatkan dalam pengelolaan website yang harus terus terupdate dengan data-data terbaru sehingga penggunaan juga akan lebih optimal dan mempermudah membantu masyarakat memperoleh informasi, dan pemerintah dalam pengambilan keputusan, Kurangnya informasi.

Upaya pemerintah untuk mengakselerasi transformasi digital salah satunya melalui percepatan perluasan akses dan peningkatan pembangunan infrastruktur digital, Cakupan layanan telekomunikasi di Kabupaten masih tergolong rendah capaian berkisar 50-55%, hal ini dikarenakan masih banyaknya wilayah yang minim akan akses internet, Untuk itu perlu meningkatkan layanan berkualitas dan jangkauan luas dalam penyediaan akses telekomunikasi jaringan 4G dan internet kecepatan tinggi.

Di era reformasi sekarang ini dibutuhkan adanya keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel dan melibatkan masyarakat di dalam pengambilan keputusannya, Pemerintah dituntut untuk terbuka dan tidak menutupi apa yang dilakukan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik di Kabupaten Klaten tahun 2020 skor sebesar 95,7, Perlu dorongan yang lebih besar untuk menjadikan keterbukaan informasi sebagai budaya dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, agar menyampaikan informasi lebih transparan kepada masyarakat,

Jaringan internet dan ruang publik merupakan dua komponen dunia teknologi yang sangat erat kaitannya, Keberadaan jaringan internet di ruang publik sangat membantu masyarakat dalam mengakses segala hal yang dibutuhkan, untuk mengurangi kesenjangan akses internet pemerintah Kabupaten Klaten hingga tahun 2020 telah menambahkan akses internet di ruang publik Kabupaten hingga 70%, Secara umum capaian kinerja urusan komunikasi dan informatika selengkapny dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.67
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Komunikasi dan Informatika
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase Pengembangan dan pemberdayaan Kelompok Informasi Masyarakat di Tingkat Kecamatan	%	-	-	61,5	73	75
2	Cakupan Layanan Telekomunikasi	%	-	-	52,2	53,6	56,5
3	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	-	-	36	60
4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Per Komisi Informasi 5 th 2016)	Indeks	58,48	30	77,1	78,7	95,7
5	Persentase informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/kota yang disampaikan ke masyarakat	%	50	50	65	75	65
6	Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	1,96	7,84	17,65	29,41	54,90
7	Persentase penambahan akses internet di ruang publik	%	3,33	13,33	33,33	50,00	70,00
8	Persentase layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	%	3,70	9,26	16,67	27,78	40,74

Sumber : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

11. Koperasi, Usaha kecil, dan Menengah

Koperasi Usaha Kecil dan Menengah sebagai bagian pengembangan ekonomi daerah di Kabupaten Klaten diantaranya meliputi koperasi dan KUD, Hal ini mengingat posisi dan manfaat dari koperasi maupun KUD yang menyentuh sampai lapisan bawah, dan dapat dijadikan sebagai wahana paguyuban maupun kelompok usaha masyarakat.

Kondisi umum Urusan Koperasi dan UMKM di kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat dari beberapa indikator. Perkembangan kinerja koperasi ditunjukkan dengan koperasi aktif yang mengalami kenaikan dari 713 koperasi aktif di tahun 2019 meningkat menjadi 717 koperasi ditahun 2020, hal tersebut dikarenakan adanya pembinaan yang lebih intens kepada pengurus koperasi. Persentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas, meningkat dari 6,2% pada tahun 2016 menjadi 14,45% pada tahun 2020. Persentase permohonan ijin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi dari tahun 2016 sebesar 2,84% menjadi 16,70% di tahun 2020. Persentase permohonan ijin

pembukaan cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi sebesar 2,90% di tahun 2016 menjadi 6,30% di tahun 2020. Persentase Koperasi yang berkualitas dari sebesar 38,94% ditahun 2016 menjadi 42,80% di tahun 2020. Persentase koperasi aktif dari sebesar 60,02% di tahun 2016 menjadi 66,94% di tahun 2020. Persentase koperasi yang patuh sebesar 18,94% ditahun 2016 menjadi 23,10% di tahun 2020. Persentase koperasi yang sehat sebesar 14,41% di tahun 2016 menjadi 19,78% di tahun 2020. Persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan, sebesar 10,84% di tahun 2019 menjadi 25,84% di tahun 2020. Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan dari 12,35% di tahun 2016 menjadi 17,80% pada tahun 2020. Terdapat satu indikator dengan capaian menurun, yaitu indikator persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya, sebesar 17,71% pada 2016 menjadi sebesar 9,34% pada 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2020 penilaian kesehatan koperasi hanya dapat dilakukan pada 9 KSP, sehingga menyebabkan persentase capaian berkurang.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah menetapkan 7 (tujuh) produk unggulan daerah dengan Keputusan Bupati Nomor 050/84 Tahun 2016 yaitu batik, lurik, konveksi, mebel, logam, keramik dan tembakau (tembakau asep dan tembakau rajangan). Disamping itu Kabupaten Klaten juga telah memiliki 11 (sebelas) klaster UMKM yaitu klaster batik, lurik, konveksi, keramik, mebel, logam, handycraft, makanan olahan, lereng merapi, desa wisata dan minapolitan sebagaimana yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nomor 050/91 Tahun 2017.

Pengembangan dan pemberdayaan UMKM melalui pola klaster dan penetapan produk unggulan daerah diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal serta dapat menjadi daya ungkit bagi pertumbuhan sektor dan sub sektor lainnya, selain itu juga diharapkan dapat menjadi *trademark* dan *brand image* bagi Kabupaten Klaten.

Kinerja usaha kecil dan menengah ditunjukkan dengan indikator jumlah usaha mikro/kecil pada tahun 2019 sebanyak 50.027 mengalami kenaikan menjadi 50.070 pada tahun 2020 dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan ulang pada tahun 2019 yang memunculkan *by name by address* untuk masing-masing pelaku usaha, Capaian indikator terkait usaha mikro/ kecil selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) antara lain: pertumbuhan usaha mikro dari 0,062% menjadi sebesar 0,111%; persentase usaha mikro yang dibina, dari sebesar 1,94% menjadi sebesar 3,86%; dan persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan sebesar 0,257% pada 2020. Persentase pelaku usaha mikro yang diberikan difasilitasi atau pendampingan pada kurun waktu lima tahun terakhir yaitu tahun 2016-2020 selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, pada tahun 2016 tercatat sebesar 0,017% menjadi 0,060% di tahun 2020.

Capaian kinerja indikator urusan Koperasi dan UMKM di kabupaten Klaten di tahun 2016 hingga tahun 2020 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.68
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Koperasi dan UMKM
Tahun 2016-2020

No,	Indikator	Satuan	Capain				
			2016	2017	2018	2019	2020
A,	Koperasi						
1	Koperasi	unit	943	883	886	889	893
2	KUD	unit	34	34	34	34	34
3	Koperasi Aktif	unit	566	581	710	713	717
4	Koperasi Tidak Aktif	unit	377	302	176	176	176
5	Koperasi Sehat	unit	12	25	34	42	50
6	Koperasi Cukup Sehat	unit	554	567	347	346	352
7	Persentase Koperasi berkualitas dan sangat berkualitas	%	6,2	7,6	9,3	11,9	14,45
8	Persentase permohonan ijin Usaha Simpan Pinjam yang memperoleh Rekomendasi	%	2,84	5,55	9,70	13,10	16,70
9	Persentase permohonan ijin pembukaan cabang, cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh Rekomendasi	%	2,90	3,25	3,50	4,90	6,30
10	Persentase Koperasi yang berkualitas	%	38,94	39,68	41,01	41,85	42,80
11	Persentase koperasi aktif	%	60,02	63,80	65,14	66,25	66,94
12	Persentase Koperasi yang patuh	%	18,94	19,68	20,01	21,85	23,10
13	Persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasinya	%	17,71	21,50	30,14	42,61	9,34
14	Persentase Pengurus/ Pengawas/ Pengelola Koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	10,84	16,66	20,66	23,84	25,84
15	Persentase Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan	%	12,35	14,40	15,60	16,10	17,80
16	Persentase Koperasi yang telah mengakses Lembaga Keuangan	%	12,35	14,40	15,60	16,10	17,80
B,	Usaha Kecil dan Menengah						
1	Jumlah Pengusaha						
	Pengusaha Mikro/Kecil	Orang	34.673	34.680	34.686	50.027	50.070
	Pengusaha Menengah	Orang	5.024	5.026	5.028	5.030	5.030
3	Pertumbuhan usaha mikro	%	0,062	0,072	0,077	0,098	0,111
4	Persentase usaha mikro yang melakukan kemitraan	%	0,17	0,18	0,2	0,23	0,257
5	Persentase usaha mikro yang dibina	%	1,94	2,21	2,72	3,09	3,86
6	Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitasi/ pendampingan	%	0,017	0,049	0,058	0,046	0,060

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM Kabupaten Klaten, 2021, diolah

12. Penanaman Modal

Peningkatan investasi baik Penanaman Modal Asing (PMA) maupun Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) menjadi tujuan utama dalam pembangunan penanaman modal di Kabupaten Klaten, Nilai investasi PMDN Tahun 2020 sebesar Rp.698.896.464 milyar rupiah, kondisi Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap

penanaman modal dalam negeri, Hal ini dapat dilihat dari capaian nilai realisasi PMDN tahun 2020 -64%.

Penanaman Modal Asing (PMA) di Kabupaten Klaten tahun 2016 tercatat sebesar US\$ 6,373,000, mengalami peningkatan menjadi US\$ 11,491,000 di tahun 2019. Tahun 2020 PMA menurun dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 menjadi sebesar US\$ 4,721,000,-. Tahun 2020 realisasi PMA menurun sebesar 59%, hal ini disebabkan oleh pengaruh Pandemi Covid-19. Pelaku usaha baik PMDN maupun PMA mengalami kendala dalam melaksanakan usahanya, baik dalam proses konstruksi maupun produksi, Pembatasan jam kerja karyawan dan pembatasan kegiatan ekspor impor membuat proses produksi terhambat sehingga realisasi investasinya pun menurun.

Untuk jumlah investor PMA di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 sebanyak 5 investor, dimana capaian tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan capaian tahun 2019, sejumlah 15 investor. Selain karena faktor kondisi Pandemi Covid-19, hal lain yang menyebabkan sedikitnya PMA yang berinvestasi di Kabupaten Klaten adalah calon investor PMA mengalami kendala terkait ketersediaan lahan industri. Namun berbeda dengan capaian jumlah investor PMDN, dimana capaian pada tahun 2020 mengalami kenaikan. Di tahun 2019 jumlah investor PMDN sebanyak 870 investor/pelaku usaha menjadi 2.478 investor/pelaku usaha di tahun 2020. Kenaikan jumlah investor/pelaku usaha PMDN disebabkan karena banyaknya pelaku usaha di sektor UMKM.

Capaian rasio tenaga kerja baik PMA maupun PMDN mengalami penurunan dari tahun ke tahun, hal ini disebabkan karena PMDN/PMA yang masuk ke Kabupaten Klaten cenderung pada industri yang padat modal dan berbasis mesin/ digital, serta tenaga kerja yang dibutuhkan harus memenuhi kualifikasi dan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan mereka, sehingga serapan tenaga kerja tergolong rendah.

Peningkatan investasi di Kabupaten Klaten masih mengalami beberapa kendala, antara lain ketersediaan sarana dan prasarana, khususnya dari sarana transportasi yang kurang mendukung, penyediaan sumber air, penyediaan sumberdaya listrik yang memadai, penetapan kawasan peruntukan industri daerah, penyiapan profil investasi, promosi investasi dan pelayanan perijinan yang kurang optimal dan belum terintegrasi antar OPD teknis. Penyederhanaan perijinan dan insentif bagi para investor dalam berinvestasi akan mendorong semakin bertambahnya investor yang akan melakukan penanaman modal di Kabupaten Klaten.

Seperti dilihat pada capaian jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang sempat mengalami penurunan di tahun 2019, dari 3.091 izin di tahun 2018, menuurn menjadi 2.987 di tahun 2019. Hal ini disebabkan karena tahun 2019 merupakan masa transisi implementasi Peraturan Pemerintah No 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik dengan adanya sistem aplikasi Online Single Submission (OSS) yang membuat para pelaku usaha harus melakukan penyesuaian dengan aturan baru tersebut, tetapi capaian di tahun 2020 mengalami kenaikan menjadi 7.885 izin. Hal tersebut membuktikan bahwa dengan diterapkannya OSS membuat pelayanan perizinan semakin mudah.

Perkembangan kinerja urusan penanaman modal di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.69
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Penanaman Modal
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah investor berskala nasional (PMDN)	investor	21	41	67	870	4,743
2.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN)	Rp (dlm ribu)	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464
3.	Rasio daya serap tenaga kerja (PMDN)	orang	136	68	27	21	3
4.	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMDN	%	203	296	-7	733	-64
5.	Jumlah investor berskala nasional (PMA)	investor	53	43	39	15	5
6.	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMA)	US\$ (dlm ribu)	6.373	10.257	3.091	11.491	4.721
7.	Rasio daya serap tenaga kerja (PMA)	orang	28	2	14	224	12
8.	Persentase Kenaikan / penurunan Nilai Realisasi PMA	%	1,415	61	-70	272	-59
9.	Jumlah pelayanan perizinan dan non perizinan yang diterbitkan	dok	3.865	2.154	3.056	2.987	7.885
10.	Jumlah Pelayanan Pengaduan yang tertangani	dok	12	12	24	14	16

Sumber : DPMPTSP Kab, Klaten, 2021

13. Kepemudaan dan Olah Raga

Organisasi kepemudaan memegang peran penting dalam mengkokohkan fungsi pemuda sebagai agen perubahan, kekuatan moral dan kontrol sosial, Tahun 2020 persentase organisasi pemuda yang aktif di Kabupaten Klaten sebesar 76%, kondisi ini semakin meningkat jika dibandingkan tahun 2019 hanya sebesar 69%.

Pelatihan wirausaha muda pemula bertujuan untuk mencetak pemuda yang berjiwa kewirausahaan secara masif sesuai dengan tujuan pembangunan kepemudaan. Persentase wirausaha muda pemula di tahun 2020 sebesar 19,76% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya (2019) sebesar 17,45%. Keberadaan wirausaha muda diharapkan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat dan mengurangi pengangguran. Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri di tahun 2020 sebesar 1,02%, meningkat dibandingkan tahun 2019 sebesar 0,99%. Kenaikan tersebut lebih dikarenakan banyaknya pemutusan hubungan kerja, dampak Pandemi Covid-19 yang membuat mereka banting stir menjadi wirausaha muda (*online maupun offline*) demi mempertahankan keseimbangan ekonomi keluarga.

Tingkat partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan juga mengalami peningkatan di tahun 2020 sebesar 4,15%, dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 4,07%. Walaupun sedang dalam masa Pandemi Covid-19, pemuda masih tetap aktif di dalam

organisasi kepemudaan yang tergabung dalam KNPI (Komite Nasional Pemuda Indonesia). Namun penghitungan persentase tersebut tidak memperhitungkan tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kemasyarakatan hanya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan saja, yang merupakan tupoksi Bidang Pemuda dan Olahraga.

Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan berbagai kebijakan dan program di bidang Kepemudaan dan Olahraga, hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas pemuda dan olahraga, Cakupan pembinaan olahraga sampai dengan tahun 2020 sebanyak 36 cabang olahraga, Untuk pelatih yang bersertifikasi capaiannya meningkat dari 55 orang ditahun 2016 menjadi 80 orang di tahun 2020, Jumlah atlet berprestasi (KONI) capaian tahun 2020 menurun menjadi 100 orang apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2019 yang tercatat sebesar 175 orang, Untuk jumlah prestasi olahraga juga menurun, capaian tahun 2020 adalah Nol (0) dibandingkan tahun sebelumnya yang tercatat 83 orang, Jumlah prestasi olahraga yang menurun di tahun 2020 dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyak *event* Kepemudaan dan Olahraga ditiadakan, Untuk meningkatkan prestasi olahraga pemenuhan terhadap sarana dan prasarana keolahragaan harus diperhatikan oleh Pemerintah, disamping juga harus di dukung oleh pelatih yang berkualitas (bersertifikat).

Peningkatan prestasi olahraga di tahun 2020 sebesar 35,4%, cenderung mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar 37,87%. Penurunan capaian prestasi tersebut lebih disebabkan karena kondisi Pandemi Covid-19, yang diharuskan menghindari kerumunan, sehingga tidak memungkinkan untuk diadakan seleksi daerah maupun pengiriman atlit untuk mengikuti kejuaraan ke luar daerah. Capaian kinerja pada urusan kepemudaan dan olahraga selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.70
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kepemudaan dan Olahraga
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	0,96	0,95	0,97	0,99	1,02
2.	Tingkat Partisipasi pemuda yang aktif dalam organisasi kepemudaan dan organisasi kemasyarakatan	%	3,96	3,91	3,99	4,07	4,15
3.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	%	55	69	69	69	76
4.	Persentase wirausaha muda pemula	%	11,24	13,16	15,36	17,45	19,76
5.	Peningkatan Prestasi Olahraga	%	36,88	20	36,3	37,87	35,4
6.	Cakupan pembinaan olahraga	Cabor	34	36	36	36	36
7.	Cakupan Pelatih yang bersertifikasi	Orang	55	57	60	67	80
8.	Cakupan pembinaan atlet muda	Orang	465	390	475	500	330
9.	Jumlah atlet berprestasi	Orang	166	5	167	178	111

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	(Dinas)						
10.	Jumlah atlet berprestasi (KONI)	Orang	150	165	188	175	100
11.	Jumlah prestasi olahraga	Orang	103	32	120	83	0

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

14. Statistik

Peran statistik sangat penting artinya bagi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan aspek kehidupan masyarakat dalam pembangunan, Data statistik mampu memberikan arah yang obyektif bagi kebijakan pemerintah, Pembangunan akan jauh lebih mahal apabila tanpa data yang menunjang, Maka dari itu ketersediaan data yang tepat, akurat dan *up to date* sangat dibutuhkan demi menunjang proses penentuan kebijakan dalam proses perencanaan pembangunan, Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standart data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data indonesia di Kabupaten Klaten baru mencapai 25% di tahun 2020 dari total sektor yang diamanatkan, Kondisi ini juga diperparah dengan ketersediaan data yang sebagian masih belum tepat, akurat dan up to date, Selain disebabkan oleh ketergantungan pada instansi vertikal penyedia data ketidaktepatan data juga disebabkan oleh *inkonsistensi* data serta *dualisme* data.

Tabel 2.71
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	0	10	15	20	25

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

15. Persandian

Keamanan informasi pada suatu organisasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian utama, untuk melihat hasil kelengkapan dan kematangan kemandirian informasi diperlu dilakukan pengukuran Indeks KAMI, Indeks KAMI merupakan suatu aplikasi untuk mengevaluasi tingkat kematangan, tingkat kelengkapan penerapan SNI ISO/IEC 27001:2009 serta peta area tata kelola keamanan sistem informasi di suatu instansi pemerintah, Pemerintah Kabupaten Klaten selama 5 tahun ini belum pernah melakukan Evaluasi keamanan Indeks KAMI sehingga capaian nya masih 0 (nol), Oleh karena itu perlu dilakukan pengukuran tingkat kelengkapan dan tingkat kematangan keamanan informasi ditahun tahun berikutnya.

Pemanfaatan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik saat ini sangat dibutuhkan untuk bertransformasi menuju penerapan *e-government*, Capaian Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik di Kabupaten Klaten tahun 2020 sebesar 38,00% meningkat 9,00% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 2.72
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Persandian Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	%	22	28	27	29	38

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Klaten, 2021

16. Kebudayaan

Capaian kinerja urusan kebudayaan Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 dapat dilihat melalui beberapa indikator yaitu penyelenggaraan festival seni dan budaya yang cenderung meningkat, pada tahun 2016 terdapat 30 *event* seni dan budaya yang terselenggara, kondisi ini meningkat menjadi 40 *event* di tahun 2019, karena adanya Pandemi Covid-19 *event* seni dan budaya di tahun 2020 hanya terlaksana sebanyak 7 *event*. Objek diduga cagar budaya (ODCB) yang dilestarikan mengalami peningkatan sebanyak 98 ODCB menjadi 132 ODCB di tahun 2020, dari 132 ODCB tersebut baru 13 objek sudah mendapatkan SK penetapan sebagai cagar budaya, sehingga masih terdapat 113 ODCB yang belum ditetapkan sebagai cagar budaya. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan direvitalisasi terhadap karya budaya yaitu 1 tarian (tari cangikan) dan telah mengelola cagar budaya secara terpadu yaitu candi plaosan, candi sojiwan, dan makam pandanaran.

Tabel 2.73
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kebudayaan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Penyelenggaraan festival seni dan budaya	Event	30	31	31	40	7
2.	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Lokasi	93	93	93	98	132
3.	Jumlah karya budaya yang direvitalisasi dan inventarisasi	Karya budaya	0	0	0	0	1
4.	Jumlah cagar budaya yang dikelola secara terpadu	Cagar budaya	0	0	0	0	3

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

17. Perpustakaan

Salah satu perpustakaan yang memiliki koleksi paling lengkap di Kabupaten Klaten adalah perpustakaan daerah, perpustakaan ini pada tahun 2020 mendapatkan penambahan koleksi buku yang jumlahnya cukup besar. Pada tahun 2020 jumlah koleksi Perpustakaan Daerah sebanyak 49.786 eksemplar dengan koleksi judul mencapai 37.457 eksemplar. Adapun kunjungan perpustakaan pada tahun 2020 sejumlah 70,878 kunjungan. Koleksi dan judul buku pada tahun 2020 tidak mengalami perubahan disebabkan oleh adanya pengalokasian ulang anggaran oleh Pemerintah Kabupaten Klaten terkait dengan penanganan Pandemi Covid-19. Kondisi tersebut menyebabkan anggaran penyediaan buku koleksi terpengkas dan tidak dilakukan pengadaan buku pada tahun tersebut.

Pada tahun 2019 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 83.511 orang, kondisi ini menurun di tahun 2020 menjadi 70.878 orang. Untuk

capaian minat baca masyarakat juga mengalami penurunan dari 6,29% di tahun 2019 menurun menjadi 5,34% di tahun 2020. Penurunan ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang berpengaruh terhadap jumlah kunjungan perpustakaan, kendati mengalami penurunan jumlah kunjungan, kepuasan masyarakat terhadap layanan perpustakaan justru meningkat dari 70,25 pada tahun 2019 menjadi 77,92 pada tahun 2020, Secara rinci capaian kinerja urusan perpustakaan dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.74
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perpustakaan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	orang/ pengunjung	40.003	41.225	68.346	83.511	70.878
2.	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eks,	43.979	44.687	45.362	49.786	49.786
3.	Jumlah rata-rata pengunjung perpustakaan/tahun	orang/ pengunjung	53,667	60,793	60,793	60,793	60,793
4.	Jumlah koleksi judul buku perpustakaan	eks	35,535	35,561	35,898	37,457	37,457
5.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan kearsipan	indeks	67,84	67,92	67,28	70,25	77,92
6.	Persentase budaya baca masyarakat	%	3,01	3,11	5,15	6,29	5,34
7.	Persentase perpustakaan yang dibina	%	11,25	11,51	11,51	13,55	21,99

Sumber: Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab, Klaten, 2021

18. Kearsipan

Indikator indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kearsipan pada tahun 2020 mencapai 77,92. Nilai indeks tersebut apabila dikonversi kedalam status mutu layanan berada pada kategori B atau baik. Meningkatnya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten disebabkan oleh meningkatnya kualitas layanan yang diberikan sehingga berkontribusi terhadap kepuasan pengunjung maupun pengakses arsip.

Indeks Kearsipan adalah indeks atau angka yang diberikan oleh instansi vertikal/Disarpus Provisnis Jawa Tengah/ANRI kepada Dinas Arsip dan Perpustakaan yang merupakan hasil monitoring pengawasan pelaksanaan lembaga kearsipan daerah. Indeks Kearsipan dapat digunakan untuk melihat seberapa baik pengelolaan kearsipan yang dilakukan oleh Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten, baik yang berhubungan dengan ketersediaan sarana dan prasarana, SDM, maupun mekanisme yang dilakukan dalam pengelolaan arsip. Nilai Indeks Kearsipan pada tahun 2019 tercatat sebesar 89 dan pada tahun 2020 mencapai 95 atau berada pada kondisi yang baik serta meningkat setiap tahunnya. Salah satu indikator

yang mendukung terhadap baiknya Indeks Kearsipan di Kabupaten Klaten adalah capaian persentase arsip yang diakuisisi telah mencapai 100%.

Berbanding terbalik dengan capaian 3 indikator diatas, capaian indikator pengawasan internal dan arsip yang dialihmediakan masih belum optimal. Pengawasan internal yang dilakukan baru 9,8% pada tahun 2020 sedangkan arsip yang dialihmedian baru dilakukan pada tahun 2020 dengan capaian sebesar 25,85%.

Sesuai dengan Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusutan Arsip, pemusnahan arsip dilakukan terhadap arsip yang tidak memiliki nilai guna, telah habis masa retensinya dan berketerangan dimusnahkan berdasarkan Jadwal Retensi Arsip (JRA), tidak ada peraturan perundang-undangan yang melarang dan tidak berkaitan dengan penyelesaian proses suatu perkara. Jadwal Retensi Arsip (JRA) adalah daftar yang berisi sekurang-kurangnya jangka waktu penyimpanan atau retensi, jenis arsip, dan keterangan yang berisi rekomendasi tentang penetapan suatu jenis arsip dimusnahkan, dinilai kembali, atau dipermanenkan yang dipergunakan sebagai pedoman penyusutan dan penyelamatan arsip.

Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten selaku Lembaga Kearsipan Daerah telah melaksanakan pemusnahan arsip sesuai daftar arsip usul musnah sampai dengan tahun 2011 sebanyak 68.764 arsip. Arsip usul musnah yaitu arsip yang masa retensinya telah habis atau terlampaui sehingga dinyatakan musnah. Masa retensi arsip ini sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun. Hingga saat ini, pemusnahan arsip belum dilaksanakan kembali karena menunggu penetapan Jadwal Retensi Arsip

Tabel 2.75
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Kerasipan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan dan kearsipan	Indeks	67,84	67,92	67,28	70,25	77,92
2.	Indeks Kearsipan	Indeks	-	31	63	89	95
3.	Persentase arsip yang diakuisisi	%	62,03	65,14	72,77	81,91	100
4.	Persentase pengawasan kearsipan internal	%	0	0	7,84	9,8	9,8
5.	Persentase arsip yang dialihmediakan	%	0	0	0	0	25,85

Sumber : Dinas Arsip dan Perpustakaan Kab, Klaten, 2021

2.3.3. Layanan Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Urusan pariwisata menjadi pintu gerbang promosi/pemasaran terhadap jasa-jasa wisata/obyek wisata yang berkembang di masyarakat. Empat pilar utama dalam pengembangan kepariwisataan meliputi industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran dan kelembagaan pariwisata untuk senantiasa diupayakan penanganan yang terpadu lintas sektor, sehingga dapat menggambarkan satu bentuk daya tarik yang sinergi dalam menarik wisata, tidak terkecuali seni dan budaya tradisi yang masih sangat membutuhkan sentuhan dan dukungan prasarana lebih lanjut.

Pembangunan pariwisata memiliki posisi strategis karena pariwisata memiliki daya ungkit tinggi terhadap perekonomian lokal dan provinsi.

Pengembangan pariwisata Kabupaten Klaten dapat dilihat antar lain dari produk wisata, Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain: Deles Indah, Gunung Watu Prau, Pegunungan Kidul, Kawasan Keunikan batuan dan fosil, Umbul Pelem dan Umbul Manten

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubrah, Candi Gana, Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Masjid Al-Aqsho, Makam Syech Domba, Makam Syeh Kewel, Makam Sunan Pandanaran , Makam Ki Ageng Gribig, Makam R Ng, Ronggowarsito, Makam Panembahan Romo, Makam Kyai Melati, Situs Kaliworo dan Situs Wonoboyo

c. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula, Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles,

d. Jumlah Objek Wisata dan Pengunjung

Jumlah pengunjung wisata ke Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan, namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi Covid 19 maka terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata karena banyak obyek wisata yang tidak beroperasi, selain itu untuk event-event pariwisata tingkat Kabupaten juga hanya diadakan secara terbatas di tingkat Desa/Kecamatan, Lama kunjungan wisata di Kabupaten Klaten rata-rata selama 1 (satu) hari, Hal ini disebabkan kebanyakan para wisatawan, baik nusantara maupun mancanegara hanya sekedar berkunjung di tempat obyek wisata saja dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta, Kondisi ini mengakibatkan penurunan PAD sektor pariwisata tahun 2020.

Dengan ditetapkannya Borobudur-Yogyakarta-Prambanan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang merupakan program super prioritas nasional serta dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll), yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) maupun melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun untuk berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pelatihan-pelatihan (pelatihan guide, manajemen pariwisata, penguatan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dll), peningkatan promosi pariwisata, penataan kembali obyek wisata berbasis kawasan, penguatan kelembagaan

kepariwisataan (Pokdarwis, ASITA, Travel agent, pengembangan *Tourist Information Centre*), menggelar event-event unggulan daerah yang spektakuler, perlu adanya pemaketan pariwisata serta pengembangan desa wisata. Hal ini perlu menjadi perhatian serius agar kunjungan wisata meningkat dan lama kunjungan wisatawan bertambah, serta PAD sektor pariwisata meningkat.

Jumlah pengunjung wisata ke Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2019 menunjukkan peningkatan signifikan, namun pada tahun 2020 dikarenakan kondisi Pandemi Covid-19 maka terjadi penurunan jumlah kunjungan wisata dari 4.066.583 orang di tahun 2019 menurun menjadi 1.421.366 orang di tahun 2020. Lama kunjungan wisata di Kabupaten Klaten rata-rata selama 1 hari, hal ini perlu menjadi perhatian serius agar di tahun-tahun mendatang kunjungan dan lama tinggal wisatawan semakin meningkat. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2.76
Data Kunjungan Wisatawan Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Obyek Wisata	obyek	82	82	82	82	120
2.	Kunjungan wisata	orang	377,781	2,414,980	2,706,218	4,066,583	1,421,366
3.	Lama kunjungan Wisata	Hari	1	1	1	1	1
4.	PAD (Pajak dan Retribusi daerah)	Rp	5,490,059,624	6,895,508,782	8,668,908,216	12,648,036,829	8,530,240,217

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab, Klaten, 2021

Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata yang terkelola pada tahun 2016-2018 mengalami perkembangan yang stagnan, hal ini dikarenakan partisipasi masyarakat dan pihak swasta belum maksimal dan masih beranggapan bahwa pariwisata belum bisa memberikan dampak terhadap perekonomian. Sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 60,4% jika dibanding pada tahun 2019 sebesar 49,4%.

Untuk memperkenalkan produk pariwisata di Kabupaten Klaten diperlukan adanya promosi guna memperkenalkan obyek wisata. Tanpa promosi yang efektif dan efisien, maka obyek wisata tidak dapat dikenal dan tingkat kunjungan wisatawan menjadi rendah. Tingkat intensitas promosi pariwisata pada tahun 2016-2018 mengalami peningkatan dari 12,32% ditahun 2016 menjadi 81,3% ditahun 2019, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 57,5% hal ini dikarenakan ditutupnya objek wisata akibat dampak Pandemi Covid-19.

Persentase sumberdaya manusia pariwisata yang berkompeten selama kurun waktu lima tahun terakhir dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan sebesar 18,97% pada tahun 2016 dan pada tahun 2020 sebesar 21,29%, meskipun begitu kapasitas sumberdaya manusia pariwisata masih perlu ditingkatkan kembali. Sedangkan untuk persentase pelaku ekonomi kreatif yang difasilitasi HKI dari tahun 2016-2019 capaiannya 0, tahun 2020

terdapat 5 orang yang sudah difasilitasi GKI. Secara rinci pencapaian kinerja urusan pariwisata sebagai berikut.

Tabel 2.77
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Pariwisata
Tahun 2016-2021

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Prosentase Daya Tarik Wisata Kawasan Strategis Pariwisata dan Destinasi Pariwisata Terkelola	%	30,7	30,7	30,7	49,4	60,4
2.	Tingkat Intensitas Promosi Pariwisata Terupload di 3 Platfom media sosial (Facebook, Twitter, Instagram)	%	12,32	19,4	58,3	81,3	57,5
3.	Jumlah Pelaku Ekraf yang difasilitasi HKI	Orang	0	0	0	0	5
4.	Prosentase SDM Pariwisata yang berkompeten	%	18,97	19,43	19,68	20,93	21,29

Sumber: Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga Kab, Klaten, 2021

2. Pertanian

Pengembangan pertanian di Kabupaten Klaten akan dipengaruhi oleh kapasitas daya dukung dan daya tampung, terutama perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan lahan. Perhitungan antara ketersediaan lahan dilakukan melalui perhitungan ketersediaan lahan dengan pendekatan nilai produksi pangan utama, nilai produktivitas pangan utama, harga satuan jenis komoditas. Dalam perhitungan ini, faktor konversi yang digunakan untuk menyetarakan produk non beras dengan beras adalah harga. Ketersediaan lahan dari hasil perhitungan tahun 2019 sebesar 328.063 Ha. Perhitungan kebutuhan lahan dilakukan dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak per penduduk. Kemampuan lingkungan hidup dalam pemenuhan lahan untuk hidup layak dihitung dengan memperhitungkan luas lahan yang dibutuhkan untuk kebutuhan hidup layak perpenduduk. Kebutuhan lahan di Kabupaten Klaten di tahun 2019 sebesar 301.450 Ha.

Penentuan status daya dukung lahan Kabupaten Klaten berdasarkan perhitungan ketersediaan dan kebutuhan lahan. Berdasarkan KLHS RPJMD, hasil perhitungan tahun 2019 dapat diketahui SL (328.063 Ha) > DL (301.450 Ha). Hal ini berarti bahwa daya dukung lahan dinyatakan pada tahun 2019 dinyatakan surplus. Kondisi tersebut berarti bahwa daya dukung lahan masih dapat memenuhi kebutuhan.

Tingkat produktivitas padi/ bahan pangan utama lokal di Kabupaten Klaten semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya luas lahan pertanian ke non pertanian pada tahun 2020 sebesar 93,18 Ha serta adanya puso dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama wereng batang coklat (WBC), tikus, penggerek batang dan sundep. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi, produktivitas padi pada tahun 2019 meningkat dibandingkan dengan tahun 2018 karena implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Produksi dan produktifitas cabe selama 5

tahun cenderung fluktuatif dan belum optimal, faktor yang mempengaruhi antara lain cabe merupakan komoditas yang rentan dengan serangan hama penyakit tanaman dan harganya selalu fluktuatif dipasaran.

Perkembangan produksi dan produktivitas tanaman pangan dan hortikultura (cabe) Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.78
Perkembangan Produksi dan Produktivitas Tanaman Pangan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	2016		2017		2018		2019		2020	
		Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)	Produksi (Ton)	Provitas (Kwt/ha)
1	Padi	426,028	57,87	380,268	51,41	459,044	62,19	469,873,51	67,16	449,093,28	63,33
2	Jagung	72,583	74,97	90,343	81,50	81,981	79,66	102,952,94	90,76	99,087,90	89,38
3	Kedelai	2,759	18,12	4,440	19,87	7,026	19,76	2,559,81	16,28	1,039,92	19,12
4	Kacang Tanah	1,784	14,58	1,527	16,79	1,816	14,01	1,495,21	14,42	1,157,73	13,21
5	Kacang Hijau	260	8,72	285	12,50	81	11,31	537,75	15,91	1,984,97	10,77
6	Ubi Kayu	32,224	392,11	9,778	224,99	9,370	261,80	21,078,17	291,13	27,296,04	273,81
7	Ubi Jalar	356	143,55	251	119,28	297	103,67	555,18	128,51	332,89	134,77
8	Cabe	1698	4,53	1459	4,57	948	9,43	2762	9,66	2463	8,92

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Tingkat produktivitas padi/ bahan pangan utama lokal di Kabupaten Klaten semakin menurun, salah satu penyebabnya adalah berkurangnya luas lahan pertanian ke non pertanian pada tahun 2020 sebesar 93,18 Ha, serta adanya puso dan serangan organisme pengganggu tanaman (OPT), terutama wereng batang coklat (WBC), tikus, penggerek batang dan sundep. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas tanaman pangan terutama padi.

Produktivitas padi pada tahun 2019 meningkat sebesar 4,97 % dibandingkan dengan tahun 2018 yaitu dari 62,19 kwt/ha menjadi 67,16 kwt/ha, hal tersebut dikarenakan implementasi intensifikasi pertanian yang cukup baik dan penerapan teknologi di bidang pertanian. Sedangkan di tahun 2020 produktivitas padi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 3,83 %, hal ini dipengaruhi oleh adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan berkurangnya aktivitas pembinaan dan penyuluhan pertanian di lapangan, sehingga secara tidak langsung berpengaruh pada produksi dan produktivitas padi.

Produksi dan produktivitas cabe selama 5 tahun cenderung fluktuatif dan belum optimal, faktor yang mempengaruhi antara lain cabe merupakan komoditas yang rentan dengan serangan hama penyakit tanaman dan harganya selalu fluktuatif dipasaran.

Komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten adalah tembakau rajangan dan tembakau asepan, produksi tertinggi tembakau rajangan dicapai pada tahun 2019 sebesar 2.038,14 ton. Sedangkan untuk produksi tertinggi tembakau asepan dicapai pada tahun yang sama sebesar 1.487,05 ton. Dari sisi produktivitas tembakau rajangan cenderung menurun, dari sebesar 4,83 ton/Ha ditahun 2016 menurun menjadi 1,28 ton/Ha tahun 2020. Sedangkan untuk produktivitas tembakau asepan cenderung meningkat dari 0,98 ton/Ha ditahun 2016 menjadi 1,03 ton/Ha ditahun 2020. Produktivitas komoditas tembakau rajangan dan asepan selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.79
Luas Panen, Produksi dan Produktivitas Komoditas Tembakau Rajangan dan Asepan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Rajangan			Asepan		
		Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)	Luas Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Produktivitas (Ton/Ha)
1	2020	1.590,60	2.038,13	1,28	1.440,60	1.487,00	1,03
2	2019	1.684,31	2,038,14	1,21	1,516,42	1.487,05	0,98
3	2018	1.016,52	1,147,27	1,3	940,98	1.073,05	1,14
4	2017	1.073,50	1,233,53	1,15	958,00	1.070,72	1,12
5	2016	674,00	815,04	4,83	1.060,24	1.038,53	0,98

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Kabupaten Klaten juga mempunyai produksi tanaman perkebunan selain tembakau asepan dan rajangan yang menjadi komoditas andalan dan unggulan di Kabupaten Klaten, seperti Tembakau Vorstenland, Kelapa Dalam, Kelapa Hibrida, Kelapa Deres, Kopi Arabica, Kopi Robusta, Cengkeh, Lada, dan Tebu. Produksi tertinggi ditahun 2020 adalah Kelapa dalam dengan total produksi 4.322,36 ton, sedangkan produksi terendah adalah kopi robusta dengan total produksi 12,94 ton. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.80
Produksi Perkebunan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Jenis Komoditas	Produksi (Ton)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tembakau Vorstenland	303.930	239.455	129.115	11.600	0
2.	Kelapa Dalam	4.097,63	4.697,58	4.588,66	4.048,18	4.322,36
3.	Kelapa Hibrida	45.510	45.600	44.133	29.340	29.940
4.	Kelapa Deres	99.470	98.740	92.464	87.150	78.840
5.	Kopi Arabica	105,25	81,32	81,52	43,32	162,20
6.	Kopi Robusta	9,80	9,99	10,15	9,82	12,94
7.	Cengkeh	44,22	45,63	47,04	36,50	49,75
8.	Lada	13.150	12.110	13.150	11.400	17.700
9.	Tebu	6.289,000	3.258,940	824.760	3.316,970	3.202,97

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Populasi sapi potong selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari 88.343 ekor di tahun 2016 menjadi 104.321 ekor di tahun 2020, sedangkan untuk populasi ternak ayam baik untuk ayam bukan ras, ayam pedaging dan ayam petelur pada tahun 2017 mengalami peningkatan dikarenakan adanya permintaan terhadap ayam di pasar domestik lebih menyukai daging ayam (*white meat*) dibanding dengan daging merah (*red meat*), begitu juga dengan populasi ternak lainnya di Kabupaten Klaten yang rata-rata mengalami kenaikan. Hal ini dipengaruhi oleh peningkatan permintaan terhadap daging, susu, telur yang menyebabkan kenaikan jumlah populasi ternak di tiap tahunnya, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap kebutuhan gizi, meningkatnya pertumbuhan penduduk setiap tahun, perkembangan teknologi dan informasi di bidang peternakan dan adanya Program Asuransi Usaha Ternak Sapi (AUTS). Untuk populasi ternak ruminansia besar dan ruminansia kecil meliputi sapi potong, sapi perah, kambing dan domba

periode 2016-2020 terus mengalami peningkatan. Tahun 2016 populasi ternak ruminansia besar dan kecil 220.970 ekor, meningkat menjadi 264.463 ekor ditahun 2020. Selengkapnya populasi ternak pada tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel 2.79.

Tabel 2.81
Populasi Ternak di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Ternak	Populasi Ternak (ekor)				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Sapi Potong	88,343	88,850	100,259	102,431	104,312
2	Sapi Perah	5,795	6,098	6,784	6,443	6,807
3	Kambing	88,343	88,957	96,596	101,402	105,782
4	Domba	38,489	38,570	45,204	46,963	47,562
5	Ayam Bukan Ras	2,801,581	3,256,177	2,245,443	2,532,676	2,109,668
6	Ayam Pedaging	2,898,344	3,385,400	2,475,187	3,896,788	2,489,800
7	Ayam Petelur	867,822	930,234	746,422	832,764	900,342
8	Itik	395,436	575,100	425,473	430,329	397,012
9	Burung Puyuh	451,193	452,332	519,566	535,244	363,563

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Perkembangan produksi susu, daging dan telur pada tahun 2020 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019, Tahun 2017 produksi daging tinggi, disebabkan karena kenaikan konsumsi terhadap daging naik. Hal tersebut karena dipengaruhi berbagai kondisi diantaranya adalah:

1. Ternak yang dipotong tahun 2017 untuk ayam dan domba tinggi
2. Pertumbuhan ekonomi nasional
3. Isu politik,
4. Nilai tukar rupiah

Selengkapnya produksi peternakan tahun 2016-2020 disajikan pada Tabel berikut.

Tabel 2.82
Produksi Peternakan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis	Produksi				
		2016	2017	2018	2019	2020*)
1	Susu (Liter)	4,878,66	5,903,181	4,411,440	4,978,442	4,456,373
2	Daging (ton)	5,400	13,538	6,796	7,048	7,200
3	Telur (kg)*	15,931,010	13,323,579	12,773,977	17,745,666	15,038,594

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Pemberantasan penyakit ternak menurut jenisnya (vaksinasi) di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun dari tahun 2016-2020 perkembangannya stagnan yaitu sebanyak 6.000 ekor tiap tahunnya, hal ini dikarenakan terbatasnya anggaran. Selengkapnya untuk Pemberantasan penyakit ternak menurut jenisnya (vaksinasi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 sebagai berikut.

Tabel 2.83
Pemberantasan Penyakit Ternak Menuurt Jenisnya (Vaksinasi)
di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Antrax		Septicaemia Epizootica (Penyakit mulut dan Kuku)
		Pakai Operasional	Non Operasional	
1.	2020	1.900	4.100	0
2.	2019	2,000	4.000	0
3.	2018	2,000	4.000	0
4.	2017	2,000	4.000	0
5.	2016	2,000	4.000	0

Sumber: DPKPP Kab Klaten, 2021, diolah

Sebagai upaya untuk mendukung peningkatan ketahanan pangan daerah Kabupaten Klaten sudah memiliki beberapa kelompok tani. dengan cakupan bina kelompok tani yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Selama tahun 2016-2020 jumlah darma tirta sebanyak 316 kelompok dan kelompok tani sampai dengan tahun 2020 sebanyak 1.728 kelompok, yang secara rinci disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.84
Jumlah Darma Tirta dan Kelompok Tani di Kabupaten Klaten
Tahun 2020

No	Kecamatan	Darma Tirta	Kelompok Tani
1	Prambanan	16	35
2	Gantiwarno	14	36
3	Wedi	11	38
4	Bayat	5	36
5	Cawas	17	50
6	Trucuk	18	48
7	Kalikotes	7	40
8	Kebonarum	4	16
9	Jogonalan	16	48
10	Manisrenggo	16	49
11	Karangnongko	3	46
12	Ngawen	8	32
13	Ceper	18	49
14	Pedan	14	32
15	Karangdowo	18	48
16	Juwiring	19	49
17	Wonosari	18	48
18	Delanggu	16	48
19	Polanharjo	18	48
20	Karanganom	17	48
21	Tulung	12	48
22	Jatinom	8	57
23	Kemalang	0	53
24	Klaten Selatan	10	33
25	Klaten Tengah	5	17
26	Klaten Utara	8	16
	2020	316	1.728
	2019	316	1.068
	2018	316	1.068
	2017	316	1.068
	2016	316	1.036

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Jumlah kelompok tani yang terbentuk pada tahun 2016 sebanyak 1.036 kelompok dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 1.728 kelompok yang terdiri dari kelompok tani pemula sebanyak 1.053 kelompok, kelompok tani Lanjut sebanyak 531 kelompok, kelompok tani Madya sebanyak 135 kelompok dan kelompok tani Utama sebanyak 9 kelompok, sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.85
Jumlah Kelompok Tani Berdasarkan Klasifikasi
Tahun 2016-2020

No	Kelas Poktan	tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Pemula	416	448	448	448	1.053
2	Lanjut	455	455	455	455	531
3	Madya	162	162	162	162	135
4	Utama	3	3	3	3	9
	Total	1.036	1.036	1.036	1.036	1.728

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Jumlah poktan yang ada di Kabupaten Klaten tahun 2020 sejumlah 1.728 poktan yang tersebar di 401 desa/kelurahan. Sedangkan jumlah penyuluh/ petugas PPL (PNS dan P3K) ada 165 orang, sehingga 1 PPL rata-rata harus mengampu 10 poktan. Idealnya sesuai dengan program kementan adalah 1 desa 1 penyuluh dan sebaiknya 1 penyuluh membina 3 poktan. Ketersediaan prasarana pertanian meliputi infrastruktur irigasi untuk jaringan irigasi tersier dan kuartir dalam kondisi baik/fungsional tahun 2020 baru mencapai 3,22%, sedangkan ketersediaan prasarana penyuluhan untuk Balai Penyuluh Pertanian (BPP) di kecamatan beserta sarana pendukungnya pada tahun 2020 tercatat sebesar 26%. Luasan lahan pengairan dari Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.86
Luasa Lahan Pengairan di Kabupaten Klaten (Hektar) Tahun 2016-2021

No	Tahun	Pengairan Teknis	Pengairan $\frac{1}{2}$ Teknis	Pengairan Sederhana	Tadah Hujan	Jumlah
1.	2020	18.590,7	9.602,9	1.981,0	1.596,4	31.771,1
2.	2019	18,629	9,627	1,992	1,616	31,863
3.	2018	18,649	9,661	2,002	1,631	31,943
4.	2017	18,971	10,358	2,027	1,665	33,021
5.	2016	18,993	10,380	2,028	1,665	33,066

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya selama periode 2016-2020 belum optimal, hal ini menjadi tantangan kedepan untuk terus ditingkatkan. Luasan cakupan penanganan gangguan organisme pengganggu tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian tahun 2020 mencapai 55%. Selengkapya luas tambah serang OPT dan bencana alam pada tanaman padi dan sawah menurut jenis organismenua dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.87
Luas Tambah Serangan Organisme Pengganggu Tanaman dan Bencana Alam Pada Tanaman Padi Sawah Menurut Jenis Organisme di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Pengerek Batang	Wereng Coklat	Tikus	Tungro	BLB/ Kresek	Blas	Puso	B. Alam	Luas tambah serangan Opt (ha)
2020	1.014	4	545	0	0	0	0	0	2.217
2019	1.014	4	545	0	0	0	0	0	1.717
2018	1.701	0	304	0	322	107	8	146	2.437
2017	1.454	682	27	56	380	56	746	3.006	2.667
2016	1.816	8	23	5	490	401	173	1.858	2.744

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021, diolah

Program pengembangan agropolitan merupakan program yang sangat strategis, sehingga perlu dikembangkan dan diaplikasikan untuk pengembangan kawasan pertanian agropolitan secara umum di Kabupaten Klaten, mengingat potensi lokal yang ada, khususnya untuk pengembangan agropolitan di wilayah lereng merapi yang mempunyai berbagai macam potensi berupa tanaman hortikultura (lada, cengkeh, kopi, sayur-sayuran dan buah-buahan), makanan olahan (kopi petruk, kopi merapi, minuman rempah, berbagai macam keripik, sambal dll), batik lereng merapi, kerajinan bambu, peternakan kambing dan potensi pariwisata (Deles Indah, Kalitalang, Pesanggrahan Pakubuwono, Embung Sidomulyo, Girpasang, Bendungan Kali Krakal, Tanaman Hidroponik, dll). Selain di daerah lereng merapi program tersebut perlu juga dikembangkan di kawasan lain guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Dalam pengembangan kawasan agropolitan program pengembangan pertanian terpadu memiliki peranan penting dalam mendukung kawasan tersebut, di dalam memadukan potensi-potensi agro yang ada kawasan lereng merapi. Sedangkan replikasi program pengembangan pertanian terpadu berbasis teknologi dilaksanakan di UBBT Humo Desa Semangkak, Kecamatan Klaten Tengah sebagai lokasi inti basisnya, dengan lahan seluas 7 Ha (4 Ha untuk pertanian, tanam padi) dan 3 Ha untuk sarana prasarana pendukung berupa gedung pelatihan, gedung pertemuan, showroom dan rumah dinas sudah dibangun, sedangkan untuk sarana dan pendukung untuk pengembangan hortikultura (sayur-sayuran, buah-buahan, tanaman obat, peternakan dan jalan setapak), gazebo-gazebo dan cafe bertingkat untuk memandangi view merapi dan sarana prasarana lainnya, maupun peningkatan kapasitas sumberdaya manusia baik PPL atau kelompok tani, diharapkan akan segera dibangun yang saat ini dalam proses perencanaan. Selanjutnya UBBT tersebut dapat dijadikan sebagai pusat Inkubasi Pertanian dan Pusat Pendidikan, Pelatihan, Pengembangan Pertanian Terpadu dan Agrowisata.

Program ini merupakan salah satu bentuk kerjasama antara pemerintah kabupaten Klaten dengan Badan Tenaga Nuklir Republik Indonesia sejak tahun 2015 dan telah berakhir pada tahun 2019. Konsep pertanian terpadu ini menggabungkan berbagai teknik budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan perikanan yang bertujuan untuk saling mendukung dan mencakup berbagai fungsi pembibitan, informasi, komunikasi, pusat pangan, lumbung pangan, edukasi dan pariwisata.

Termasuk untuk program pemurnian varietas Padi Rojolele Srinar dan Srinuk yang merupakan kerjasama dengan BATAN, dan saat ini sudah melalui semua uji tahapan baik pada uji adaptasi (multi lokasi), uji hama

penyakit, uji kualitas hasil dan uji rasa, serta pelepasan varietas dan saat ini sudah masuk pada tahapan pengusulan hak paten dan penyiapan kelembagaannya, untuk selanjutnya perlu adanya budidaya pengembangan varietas padi bagi kelompok tani serta membangun jejaring guna mempromosikan dan memasarkan hasil produk tersebut.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan juga produk unggulan bidang pertanian yang ada di Kabupaten Klaten (rojolele srinar dan srinuk serta perlu adanya penelitian bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll).

3. Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang berperan sebagai penggerak utama perekonomian di daerah, untuk mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, mengurangi pengangguran dan menurunkan angka kemiskinan. Jumlah sarana perdagangan di Kabupaten Klaten yang tersedia pada tahun 2020 yaitu toko swalayan sebanyak 604, pasar umum atau rakyat sebanyak 85 unit, pasar hewan sebanyak 7 unit, pasar buah sebanyak 0 unit, Pasar Sepeda sebanyak 4 unit, pasar burung sebanyak 0 unit, serta pasar klitikan 1 unit. Total jumlah pasar menurut jenisnya sampai dengan tahun 2020 sebanyak 710 unit. Untuk jumlah pasar hewan pada tahun 2016-2019 sebanyak 12 (dua belas) unit, namun pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 7 (tujuh) unit dikarenakan untuk pengelolaannya ada yang dikembalikan ke desa sebanyak 3 (tiga) unit dan yang sudah tidak operasional sebanyak 2 (dua) unit dikarenakan sudah tidak ada pedagangnya.

Menurut jenis pasar yang ada di Kabupaten Klaten, jumlah toko swalayan paling mendominasi sejak tahun 2016 dan terus bertambah setiap tahunnya, hal ini disebabkan karena tuntutan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan jaman dan gaya hidup masyarakat serta kondisi iklim usaha yang kondusif di daerah. Disamping itu pemerintah juga memberikan kemudahan kepada pelaku usaha atau masyarakat untuk mendirikan toko swalayan dengan syarat-syarat tertentu sesuai peraturan yang berlaku.

Dari sejumlah 51 pasar tradisional milik pemerintah daerah masih banyak yang belum di revitalisasi, sampai dengan tahun 2017 baru terdapat 14 pasar yang direvitalisasi, sehingga masih menyisakan 36 pasar yang belum direvitalisasi, data jumlah pasar menurut jenis pasar dapat dilihat pada terlihat pada Tabel berikut:

Tabel 2.88
Pasar Menurut Jenisnya di Kabupaten Klaten
Tahun 2016–2020

Jenis Pasar	2016	2017	2018	2019	2020
Toko Swalayan	398	417	556	573	604
Pasar Umum/Rakyat	55	57	85	85	85
Pasar Hewan	12	12	12	12	7
Pasar Buah	1	1	1	1	0
Pasar Sepeda	4	4	4	4	4
Lain-Lain / Pasar Burung	1	1	1	0	0
Pasar Klitikan	1	1	1	1	1
Jumlah	472	493	660	676	701

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Cakupan bina kelompok usaha informal di tahun 2016 tercatat cukup tinggi yaitu sebesar 9,77%, namun di tahun 2020 mengalami penurunan karena adanya dampak Pandemi Covid-19 menjadi 8,26%. Dalam peningkatan potensi perdagangan di Kabupaten Klaten dilakukan penataan pasar dan penerbitan ijin usaha terhadap usaha perdagangan, dilihat dari persentase rekomendasi ijin usaha perdagangan yang diterbitkan dari tahun 2016-2020 menunjukkan trend meningkat, dari 83% pada tahun 2016 meningkat menjadi 98% pada tahun 2020 dengan persentase pasar yang di awasi telah mencapai 100%.

Selain itu sejalan dengan kebijakan dalam Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mengamanatkan bahwa pada tahun 2018 pelaksanaan metrologi legal diserahkan kewenangannya dari provinsi ke kabupaten. Dalam hal ini Kabupaten Klaten telah memiliki Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Tera/Tera Ulang yang akan melakukan Tera/Tera Ulang kepada wajib tera dalam rangka optimalisasi perlindungan konsumen demi terwujudnya usaha perdagangan yang aman tertib dan terkendali. Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang tahun 2020 baru sebesar 5% sehingga diperlukan kesiapan penyediaan sarana prasarana dan sumberdaya manusia guna mendukung kelembagaan unit pengelola meteorologi.

Terkait penerimaan pendapatan yang berasal dari retribusi pasar, terdapat kenaikan dari tahun 2016 sampai dengan 2019, akan tetapi pada tahun 2020 terjadi penurunan sebesar Rp. 417.923.199,- atau sekitar 8% dari penerimaan retribusi pasar tahun 2019, hal ini disebabkan karena dilepasnya 40 unit pasar desa yang tidak lagi dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Klaten tetapi dikelola oleh pemerintah desa masing-masing, sehingga tidak dapat menarik retribusi pasar desa tersebut.

Capaian kinerja urusan bidang perdagangan tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 2.89
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan perdagangan
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Cakupan Bina Kelompok Usaha	persen	9,77	5,9	7,34	7,38	8,26
2.	Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	%	83	93	84	86	98
3.	Persentase pasar rakyat/tradisional terevitalisasi	%	18	22	26	30	30
4.	Persentase PKL yang terbina	%	0	0	8,5	17,1	25,7
5.	Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	3.839.844.430	4.157.526.799	4.685.207.764	5.034.789.532	4.616.866.333
6.	Persentase pasar yang diawasi	%	100	100	100	100	100
7.	Persentase lonjakan harga komoditas kebutuhan pokok dan barang penting (18 bapokting)	%	6	11	11	11	6
8.	Persentase Kinerja Pupuk	%	97,78	94,63	98,56	97,07	95,89

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
9.	Nilai ekspor	U\$	18.652.664	19.634.383	20.667.772	454.331.478	90.224.786
10.	Persentase pelaku usaha yang telah melakukan tera ulang	%	3,12	3,50	3,75	4,2	5
11.	Jumlah event promosi produk dalam negeri	%	6	7	7	7	3
12.	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	3,63	3,87	4,14	4,31	-4,79

Sumber : Disdagkop dan UKM Kabupaten Klaten, 2021

Potensi komoditas ekspor di Kabupaten Klaten meliputi 7 jenis komoditas antara lain produk textile, kayu, rempah, briket arang, plastik, perikanan dan perkebunan. Komoditas kayu merupakan salah satu komoditas ekspor yang mengalami perkembangan yang cukup baik, dengan produk olahannya berupa mebel dengan negara tujuan ke China, Netherland dan Jerman. Komoditas tersebut unggul pada ketersediaan bahan baku kayu yang sudah mempunyai Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sebagai syarat produk ekspor untuk mebel. Disamping itu juga ada komoditas tekstil dengan negara tujuan Korea, Amerika, Perancis dan Jepang. Untuk komoditas perkebunan terdapat vanili yang memiliki banyak kegunaan, selain untuk membuat minuman juga bisa digunakan untuk menambah rasa pada makanan, dengan negara tujuan ke Belgia. Komoditas rempah diekspor ke Swedia, komoditas briket arang di ekspor ke Brazil dan Oman dan Komoditas perikanan ke negara tujuan Los Angeles.

Komoditas dengan jumlah terbanyak yang di ekspor yaitu berupa Kayu selalu mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2016 sejumlah 8 (delapan) perusahaan yang melakukan ekspor dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 12 (dua belas) perusahaan. Sedangkan untuk komoditas rempah, plastik, perkebunan dan perikanan dari tahun ke tahun masih stagnan. Untuk mengetahui perkembangan komoditas ekport di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.90
Komoditas Ekspor Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Jenis Komoditas	Jumlah Perusahaan				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Kayu	8	9	11	12	12
2	Textile	3	4	4	5	5
3	Rempah	1	1	1	1	1
4	Plastik	1	1	1	1	1
5	Perkebunan	1	1	1	1	1
6	Briket Arang	2	3	3	4	4
7	Perikanan	1	1	1	1	1

Sumber: Disperindag Prov. Jateng, 2021 data diolah

4. Perindustrian

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif, capaian tahun 2016 sebesar 0,59% mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 0,03%, kemudian di tahun 2020 meningkat cukup drastis menjadi 8,03%. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain: 1) Meningkatnya

koordinasi pembangunan industri dengan dinas/ lembaga lainnya; 2) Meningkatnya penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN); 3) Perbaikan kemudahan perizinan, promosi investasi dan fasilitasi pemberian insentif investasi; dan 4) Penguatan daya beli masyarakat.

Komponen PDRB Kabupaten Klaten, sektor industri manufaktur dibentuk oleh sub sektor industri besar, menengah, kecil dan rumah tangga. Sektor industri sebagai sektor andalan memberikan andil yang besar bagi perekonomian di Kabupaten Klaten yaitu memberikan sumbangan terhadap PDRB sebesar 34,50% (9.601.710,72 juta) pada tahun 2019 dan pada tahun 2020 menjadi sebesar 34,51% (Rp.9,486.050,46 juta). Basis ekonomi untuk sektor industri manufaktur berdasarkan sebaran di tingkat kecamatan yang menempati 5 (lima) besar adalah: (1) Kecamatan Ceper; (2) Kecamatan Trucuk; (3) Kecamatan Wedi; (4) Kecamatan Prambanan; dan (5) Kecamatan Jogonalan,

Perusahaan industri besar dan sedang menurut kecamatan di Kabupaten Klaten Tahun 2018 terdiri dari berbagai bidang industri seperti industri makanan dan minuman, tembakau, tekstil, pakaian jadi, kayu dan furniture, kertas dan percetakan, serta logam dan besi, industri besar dan sedang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari keseluruhan sektor industri selama tahun 2016-2020 yang mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan pengembangan industri kecil dan menengah dilakukan melalui pola klaster, Sampai dengan saat ini terdapat 11 (sebelas) Klaster yang terdiri dari: (1) Klaster Batik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Kalikotes, Kemalang, Manisrenggo dan Prambanan (2) Klaster Lurik yang tersebar di Kecamatan Bayat, Cawas, Pedan, Trucuk, Juwiring dan Karangdowo (3) Klaster Konveksi yang tersebar di Kecamatan Wedi, Ngawen, Jogonalan, Pedan, Karangnom dan Wonosari (4) Klaster Logam yang tersebar di Kecamatan Ceper, Karangnom, Polanharjo, Delanggu dan Wonosari (5) Klaster Keramik yang tersebar di Kecamatan Wedi dan Bayat (6) Klaster Makanan Olahan yang tersebar di Kecamatan Wedi, Jogonalan, kalikotes, Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan dan Kemalang (7) Klaster Lereng Merapi di Kecamatan Kemalang (8) Klaster Mebel tersebar di Kecamatan Cawas, Trucuk, Klaten Utara dan Juwiring (9) Klaster Desa Wisata tersebar di Kecamatan Prambanan, Ngawen, Wedi, Cawas, Bayat, Polanharjo, Tulung, Karangnongko, Kebonarum dan Kemalang (10) Klaster Handycraft tersebar di Kecamatan Ceper, Klaten Utara, Klaten Selatan, Juwiring, Wonosari, Bayat, Pedan, Kemalang, Karangnongko dan Polanharjo (11) Klaster Minapolitan yang tersebar di Kecamatan Karangnom, Tulung, Polanharjo, Klaten Selatan, Kebonarum dan Ngawen.

Sedangkan untuk sentra industri tembakau terdapat di Kecamatan Prambanan, Kemalang, Karangnongko, Manisrenggo, Kebonarum, Wedi, Klaten Selatan, Klaten Utara, Ngawen, Kalikotes, Tulung, Jatinom, Karangnom, Gantiwarno, Jogonalan, Trucuk, Karangdowo, Pedan, Wonosari dan Ceper. Perkembangan jumlah industri dan tenaga kerja menurut kelompok usaha Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.91
Jumlah Industri dan Tenaga Kerja Menurut Kelompok Usaha di
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kelompok Industri		Jumlah Unit Usaha	Jumlah Tenaga Kerja	Investasi (Jutaan Rp)	Nilai Produksi (Jutaan Rp)	
I	INDUSTRI BESAR / MENENGAH					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	70	2,100	140,200	1,742,048,134	
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	262	21,000	2,223,100	1,157,048,530	
Sub Jumlah I		2020	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2019	332	23,100	2,363,300	7,124,233,890
		2018	137	12,832	588,25	2,896,201,908
		2017	135	12,825	587,95	2,894,754,530
		2016	134	12,818	627,64	2,893,307,876
II	INDUSTRI KECIL					
1	Industri Logam Mesin Kimia dan Aneka (ILMKA)	1,826	5,478	9,130	2,277,656	
2	Industri Hasil Pertanian dan Kehutanan	6,177	18,531	30,885	1,861,496,473	
Sub Jumlah II		2020	8,003	24,009	40,015	994,378,670
		2019	7,333	21,999	36,665	914,208,008
		2018	34,686	141,210	991,81	4,138,094,610
		2017	34,680	141,182	991,61	4,137,639,268
		2016	34,666	141,125	991,21	4,135,984,709
Jumlah I + II		2020	8,335	47,109	2,403,315	8,118,612,560
		2019	7,665	45,099	2,399,965	8,038,441,898
		2018	34,823	154,042	1,580,06	7,034,296,518
		2017	34,815	154,007	1,579,56	7,032,393,798
		2016	34,800	153,943	1,618,85	7,029,292,585

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021, diolah

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa pertumbuhan industri menengah dan besar pada tahun 2019 tidak mengalami penambahan jumlah unit usaha maupun tenaga kerja dibandingkan dengan tahun 2020. Jumlah unit usaha kecil pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020, hal ini disebabkan pada tahun 2015-2018 belum ada pendataan pasti (*by name*), sedangkan mulai tahun 2019 sudah ada data yang pasti (*by name*).

Untuk industri mebel dari sejumlah 1.322 unit usaha yang tergabung dalam klaster mebel sampai dengan tahun 2019 baru terdapat 276 unit usaha yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK), sehingga masih cukup banyak yang perlu difasilitasi dan di dorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salah satu persyaratan ekspor mebel ke Eropa dan beberapa negara lainnya. Di sisi lain dari 8,335 IKM yang memiliki daya saing pada Tahun 2020 yang sebesar 3,5% menurun jika dibandingkan tahun 2019 mencapai 3,9% sehingga masih diperlukan upaya untuk terus dapat meningkatkan daya saing bagi IKM di Kabupaten Klaten.

Capaian indikator urusan perindustrian Kabupaten Klaten dari Tahun 2016-2020 bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.92
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perindustrian
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Pertumbuhan Industri	%	0,59	0,59	0,03	1,47	8,03
2.	Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	33,74	34,03	34,19	34,50	34,51
3.	Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan	%	6,15	6,25	5,98	6,52	-1,21

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

Pertumbuhan industri di Kabupaten Klaten, baik industri kecil, menengah maupun industri besar dari tahun 2016-2020 mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif. Kinerja usaha kecil, menengah dan besar ditunjukkan dengan jumlah usaha mikro, kecil pada tahun 2016 sebanyak 34.673 IKM mengalami penurunan menjadi 8.335 IKM pada tahun 2020, hal ini dikarenakan adanya pelaksanaan kegiatan pendataan yang *memunculkan by name by address* bagi pelaku industri melalui aplikasi Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) secara online yang disediakan oleh Kementerian Perindustrian Republik Indonesia pada tahun 2019 serta adanya dampak Pandemi Covid-19.

Cakupan bina kelompok Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang telah dilaksanakan di Kabupaten Klaten dipergunakan untuk peningkatan kualitas Sumberdaya Manusia (SDM) yang berkualitas melalui pelatihan-pelatihan, sedangkan untuk pelaksanaan pemberian bantuan sarana prasarana produksi kepada IKM belum bisa dilaksanakan karena kebijakan tentang pemberian hibah. Perkembangan cakupan bina kelompok IKM di Kabupaten Klaten menunjukkan pertumbuhan yang cukup signifikan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2019. Pada tahun 2016 cakupan bina kelompok IKM sebesar 0,02% dan pada tahun 2019 sebesar 0,31%.

Untuk persentase cakupan bina kelompok industry pada tahun 2020 menurun menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19. Untuk tahun 2018 jumlah kelompok pengrajin menunjukkan jumlah yang menurun dari 34.686 IKM menjadi 7.665 IKM pada tahun 2019. Oleh karena dilaksanakan updating oleh bidang perindustrian dan bidang Koperasi dan UKM, sehingga jumlah data terbagi menjadi IKM dan UKM. Data rinci mengenai cakupan bina kelompok IKM terlihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.93
Jumlah IKM Yang Dibina Tahun 2016 - 2020

No	Tahun	Jumlah IKM	Jumlah IKM dibina	Persentase
1.	2016	34.673	785	0,02
2.	2017	34.680	800	0,02
3.	2018	34.686	1.095	0,03
4.	2019	7.665	2.340	0,31
5.	2020	8.335	1.020	0,12

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

5. Transmigrasi

Pelaksanaan urusan transmigrasi yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Klaten adalah fasilitasi pemberangkatan transmigran yang penentuan jumlahnya ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2016 sampai tahun 2020, pemenuhan kuota calon transmigran yang diberangkatkan mengalami penurunan khususnya di tahun 2019 dan 2020. Tahun 2019 persentase pengiriman transmigran hanya 70% dari kuota yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 karena adanya Pandemi Covid-19 tidak ada pemberangkatan transmigran.

Tabel 2.94
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Transmigrasi
Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pengiriman transmigran ke lokasi transmigrasi	%	100	100	100	70	0

Sumber : Disperinaker Kab, Klaten, 2021

6. Kelautan dan Perikanan

Sumber daya air yang melimpah di Kabupaten Klaten mendorong petani dan masyarakat memanfaatkan potensi air untuk budidaya ikan di sawah dan kolam guna meningkatkan perekonomian masyarakat. Areal objek perikanan di Kabupaten Klaten dikelompokkan menjadi 6 jenis, yaitu kolam, sawah, keramba, waduk, sungai dan genangan air, Berikut luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.95
Luas Areal Obyek Perikanan dan Jenisnya
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
2020	46,27	0	0,314	180	178,9	1.737,79	2.143,28
2019	46,27	0	0,314	180	178,9	1.737,79	2.143,28
2018	42,6	12,25	1,61	180	178,9	1.737,79	2.153,15
2017	39,06	2,6	1,56	180	178,9	1.737,79	2.139,91
2016	47,28	22,1	2,57	180	177,9	1.733,39	2.163,32

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Penebaran benih ikan pada kolam memiliki proporsi paling besar dibandingkan areal objek perikanan lainnya, tahun 2016 benih ikan yang disebar di kolam mencapai 393,831,41 dan merupakan capaian tertinggi selama lima tahun terakhir. Untuk tahun 2020 benih ikan yang disebar sebanyak 108,572,68. Berikut penebaran benih menurut luas areal objek perikanan di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.96
Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Objek Perikanan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
2020	108.572,68	-	0	1,000	451,82	-	110.024,93
2019	137.655,7	0	0	1,000	0	0	138.655,7
2018	134.814,7	0	0	0	1,170	0	135.984,7
2017	273.353,10	0	0	2,000	0	0	275.353,10

Tahun	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk	Sungai	Genangan Air	Jumlah
2016	393.831,41	1.255,00	4.975,38	0	1.540.000	0	1.940.061,79

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Penebaran benih ikan (*restocking*) di perairan umum selain untuk menjaga ekosistem guna menjaga keseimbangan alam serta memberikan mata pencaharian kepada nelayan tangkap yang berdampak pada peningkatan pendapatan dan peningkatan gizi keluarga. Tebar benih ikan dari tahun 2016-2020 berkembang secara fluktuatif, tertinggi pada tahun 2016 sebesar 1.540.000 ekor dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 481.000 ekor. Hal ini dikarenakan adanya *refocusing* anggaran akibat dampak Pandemi Covid-19.

Tabel 2.97
Penebaran Benih Ikan di Perairan Umum Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Tahun	Jumlah Lokasi	Jenis Ikan		Total
			Lele	Nila	
1	2016	10	665.003	875.000	1.540.003
2	2017	10	610.000	300.000	910.000
3	2018	0	-	-	-
4	2019	5	-	1.000.000	1.000.000
5	2020	1	-	481.000	481.000

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Produksi perikanan di Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang fluktuatif, capaian di tahun 2016 sebesar 28.316,84 ton mengalami penurunan di tahun 2018 menjadi 26.680,87 ton, tahun 2019 mengalami peningkatan menjadi 28.229,38 ton. Peningkatan produksi perikanan dipengaruhi oleh adanya bantuan benih ikan, sedangkan penurunan produksi, salah satu penyebab yaitu adanya bencana banjir yang melanda lahan pembudidaya.

Perkembangan tingkat konsumsi ikan masyarakat dari tahun ke tahun mengalami peningkatan, pada tahun 2019 sebesar 20,04 Kg/kapita/Tahun meningkat menjadi 20,28 Kg/kapita/Tahun di tahun 2020 dengan jumlah produk olahan ikan tahun 2020 mencapai 682.000 kilogram, namun demikian untuk tingkat konsumsi ikan masih perlu ditingkatkan. Berikut perkembangan produksi perikanan dan konsumsi ikan Kabupaten Klaten.

Tabel 2.98
Perkembangan Produksi Perikanan dan Konsumsi Ikan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Produksi benih ikan	ekor	133.000.780	131.106.900	132.814.750	137.635.312	109.000.000
Produksi perikanan (budidaya)	ton	28.316,54	25.029,97	26.680,87	28.229,38	27.603,83
Produksi perikanan (tangkap)	ton	496	506	516	153	184
Konsumsi ikan	kg/kapita / tahun	17,78	18,50	19,18	20,04	20,28

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Pemerintah Kabupaten Klaten menaruh perhatian besar terhadap tingkat kesejahteraan nelayan, cakupan bina kelompok nelayan yang sudah dilakukan sampai dengan tahun 2020 sebanyak 299 pokdakan (Kelompok Budidaya Ikan). Untuk produksi perikanan kelompok nelayan mengalami penurunan yang cukup signifikan dari 496,2 ton di tahun 2016 menjadi 184 ton di tahun 2020.

Tabel 2.99
Realisasi Kelompok Nelayan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Cakupan bina kelompok nelayan	pokdakan	299	299	299	299	299
Produksi perikanan kelompok nelayan	ton	496,2	506,1	516,5	153	184

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Jumlah produk olahan ikan di Kabupaten Klaten terdiri dari berbagai berbagai jenis ikan yang diolah baik sebagai ikan asin maupun ikan olahan lainnya. Capainnya dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 sebanyak 9.707.225 kg menjadi 15.260.368 kg pada tahun 2020. Selengkapnya untuk jumlah produk olahan ikan dapat dilihat sebagaimana pada tabel berikut.

Tabel 2.100
Realisasi Peredaran Ikan Olahan dan Jenis Serta Harga di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

Jenis Ikan	Volume (kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai (.000 Rp)
I. IKAN ASIN			
01. Teri No.1	145.300	35.000	5.085.500
02. Teri No.2	136.850	25.000	3.421.250
03. Layur	155.750	20.000	3.115.000
04. Balur	130.650	20.000	2.613.000
05. Siam	134.755	4.500	606.398
06. Kinanthi	125.354	12.000	1.504.248
07. Petek	169.690	12.000	2.036.280
08. Jlantir	65.625	11.000	721.875
09. Krese	254.295	25.000	6.357.375
10. Kelapan	62.550	13.000	813.150
11. Tungkul	65.809	11.000	723.899
12. Tongkol	155.750	15.000	2.336.250
Jumlah I	1.602.378		29.334.225
II. IKAN OLAHAN			
01. Pindang Bandeng	1.025.200	30.000	30.756.000
02. Bandeng Presto	958.550	32.000	30.673.600
03. Pindang Tongkol	523.120	22.000	11.508.640
04. Pindang Belanak	517.550	27.000	13.973.850
05. Terasi	50.140	15.000	752.100
06. Ebi	189.750	55.000	10.436.250
07. Kerupuk Udang	952.700	25.000	23.817.500

Jenis Ikan	Volume (kg)	Harga Rata-rata (Rp)	Nilai (.000 Rp)
08. Keripik Belut	2.584.010	120.000	310.081.200
09. Nila Goreng	3.915.020	50.000	195.751.000
10. Lele Goreng	2.674.300	25.000	66.857.500
11. Wader Goreng	267.650	40.000	10.706.000
Jumlah II	13.657.990		705.313.640
Jumlah Total 2020	15.260.368		734.647.865
2019	14.186.418		695.959.565
2018	11.335.298		519.996.965
2017	10.962.090		453.871.565
2016	9.707.225		399.527.915

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

2.3.4. Unsur Penunjang Pemerintahan

Pemerintah daerah diberikan kewenangan berdasarkan urusan wajib, dan urusan pilihan, selain itu juga di berikan kewenangan untuk melaksanakan urusan penunjang pemerintahan dalam bidang Perencanaan Pembangunan, Keuangan, Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan, Pengawasan, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, dan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1. Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan memiliki fungsi strategis dalam menyelesaikan permasalahan dan meningkatkan kinerja program-program pembangunan daerah, Perencanaan pembangunan daerah bersifat komprehensif dan mencakup seluruh urusan pemerintahan daerah dan penugasan lain dari Pemerintah. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten harus sinergis dengan rencana pembangunan dari Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Secara rinci capaian indikator fungsi penunjang perencanaan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.101
Perkembangan Bidang Perencanaan Pembangunan
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
2.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
3.	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
4.	Tersedianya dokumen RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada
5.	Penjabaran Konsistensi Program RPJMD kedalam	%	90	95	96,13	94,5	100

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
	RKPD						
6.	Penjabaran Konsistensi Program RKPD kedalam APBD	%	90	95	98	98,8	100
7.	Kesesuaian rencana pembangunan dengan RTRW	%	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Berdasarkan tabel tersebut diatas terkait ketersediaan dokumen perencanaan seperti RPJMD, RPKPD, dan RTRW yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA konsisten ada selama tahun 2016-2020, Pelaksanaan program kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran strategis urusan perencanaan terus meningkat, pada tahun 2020 berhasil dengan baik dengan capaian kriteria “Sangat Tinggi” (interval nilai realisasi kinerja $100\% \leq 100\%$).

Adapun faktor pendorong keberhasilan capaian kinerja ini di antaranya adalah :

- 1) Penetapan indikator kinerja dalam mencapai sasaran strategis Bappeda sudah berorientasi pada hasil (outcome) karena sudah dibuat cascading dari level atas sampai yang terendah;
- 2) Pengukuran indikator lebih jelas karena sudah disesuaikan dengan regulasi terkait sehingga mempunyai rumus penghitungan yang jelas juga;
- 3) Adanya komitmen bersama dalam peningkatan kinerja.

Tabel 2.102
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Perencanaan Pembangunan Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	%	90	90	88,37	94,5	100
2.	Tersedianya Dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	%	90	95	95,83	98,8	100

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, Klaten, 2021

2. Keuangan

a. Opini BPK terhadap laporan keuangan

Opini auditor eksternal (BPK) atas penyajian laporan keuangan pemerintah yaitu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), komponennya meliputi: Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, Opini BPK secara bertingkat terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.103
Opini BPK pada Laporan Keuangan Kabupaten Klaten

Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Opini BPK pada Laporan Keuangan	opini	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP

Sumber : BPKD Kab, Klaten, 2021

Pada tabel tersebut diatas menunjukkan bahwa selama kurun waktu tahun 2018-2020 hasil Opini BPK Kabupaten Klaten mengalami peningkatan dari WDP (Wajar Dengan Pengecualian menjadi WTP (Wajar Tanpa Pengecualian), WTP artinya laporan keuangan di Kabupaten Klaten dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material, dan dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik.

b. Penetapan APBD

Dalam melaksanakan penetapan APBD selama kurun waktu lima tahun terakhir (2016-2020) Pemerintah Kabupaten Klaten melaksakannya secara konsisten dan tepat waktu. Hal ini menunjukkan kinerja perangkat daerah yang baik dan tertib. Berikut gambaran perkembangan penetapan APBD di Kabupaten Klaten:

Tabel 2.104
Perkembangan Penetapan APBD Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	2016	2017	2018	2019	2020
Penetapan APBD	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu

Sumber : BPKD Kab, Klaten, 2021

c. Capaian Indikator Keuangan Daerah Lainnya

Capaian indikator keuangan daerah lainnya diukur melalui indikator persentase penyerapan anggaran pemerintah daerah dengan capain tahun 2020 sebesar 83,38%, dengan sisa belanja sebesar 16,82% menjadi SILPA pada tahun berikutnya. Capaian penyerapan dana kurang dari 100% tersebut salah satunya disebabkan oleh adanya penghematan atau sisa lelang karena penawaran yang diajukan oleh pihak ketiga dibawah harga PAGU.

Penyelesaian persertifikatan tanah milik pemerintah daerah mengalami peningkatan dari 51,6% ditahun 2016 menjadi 54,31% pada tahun 2020, Untuk rasio PAD mengalami kondisi fluktuatif tahun 2016 tercatat sebesar 9,93% naik menjadi 15,36% ditahun 2018 kemudian mengalami penurunan dengan capaian 13,37% di tahun 2020.

Penyusunan RKA-SKPD sejak adanya aplikasi penganggaran tidak mengalami kendala dalam hal penyusunannya, sehingga selalu tepat waktu sesuai dengan surat edaran bupati tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD. Sementara untuk penyusunan laporan keuangan SKPD, batas waktu penyusunan diasumsikan sama dengan batas waktu penyusunan laporan keuangan kabupaten. Namun sejak ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, maka menjadi jelas bahwa batas waktu penyusunan laporan keuangan SKPD adalah 2 bulan sejak berakhirnya tahun anggaran yang bersangkutan. Capaian dalam kurun waktu tahun 2016-2020 selalu mencapai target dan tepat waktu. Gambaran capaian indikator tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.105
Capaian Indikator Keuangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

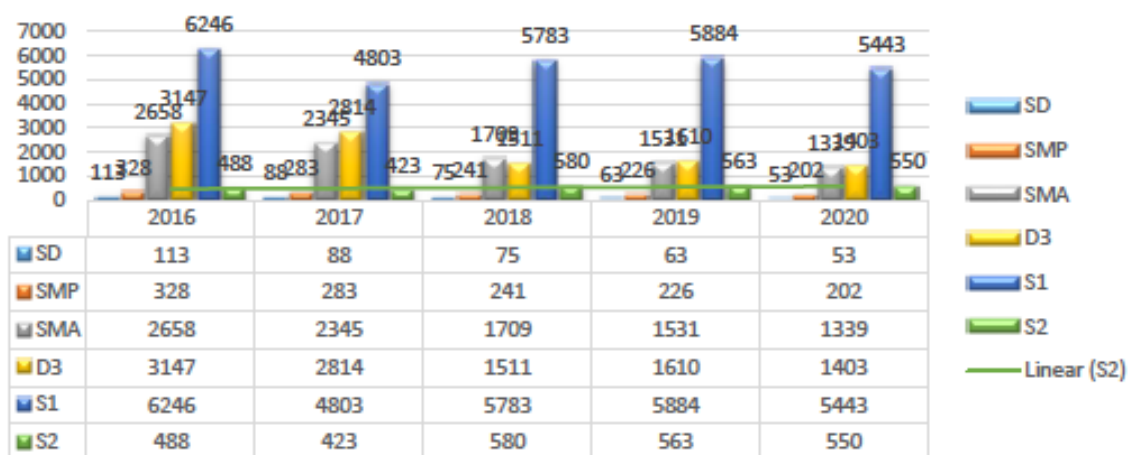
Indikator	Satuan	2016	2017	2018	2019	2020
Persentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	85	81	87,82	86,7	83,38
Persentase penyelesaian pensertifikatan tanah milik Pemerintah Daerah	%	51,6	51,6	52,57	53,44	54,31
Rasio PAD	%	9,93	14,4	15,36	11,59	13,37
Persentase OPD menyusun RKA-SKPD tepat waktu	%	100	100	100	100	100
Persentase OPD menyusun laporan keuangan tepat waktu	%	100	100	100	100	100

Sumber : BPKD Kab, Klaten, 2021

3. Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan

Berdasarkan data Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) Kabupaten Klaten, pada Tahun 2020 jumlah Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Klaten sebanyak 8,990 orang. Sebagian besar jenjang pendidikan para ASN adalah sarjana strata 1. Pendidikan dan pelatihan memiliki peran strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur yaitu aparatur pegawai yang profesional baik dalam hal kompetensi, sikap dan perilaku yang diharapkan sesuai dengan tugas dan peranannya masing-masing.

Berikut profil jumlah pegawai berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten tahun 2016-2020.



Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.84.
Profil Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenjang Pendidikan di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Jumlah jabatan pada instansi pemerintah di Kabupaten Klaten tahun 2020 menurun jika dibandingkan pada tahun 2019. Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah tahun 2020 sebanyak 24 orang, jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah sebanyak 2,517 orang, sedangkan jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi

pemerintah sebanyak 6,449 orang. Berikut perkembangan jabatan ASN di Kabupaten Klaten.

Tabel 2.106
Jabatan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah	ASN	22	21	27	26	24
Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah	ASN	4,073	3,450	2,935	2,855	2,517
Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	ASN	8,833	7,179	6,963	6,940	6,449

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal bersifat fluktuatif dan menurun tajam pada tahun 2020, dimana pada tahun 2016 tercatat sebesar 95,43% menurun drastis menjadi 11,26% pada tahun 2020. Untuk pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural tahun 2020 tercatat sebesar 60,13%, hanya mengalami sedikit dibandingkan tahun sebelumnya (sebesar 60,25% pada tahun 2019). Penurunan tersebut dikarenakan adanya dampak Pandemi Covid-19 yang mengubah pola kerja *work form office* menjadi *work form home*, serta meniadakan tatap muka secara langsung dengan jumlah peserta yang banyak.

Berikut data ASN dan pejabat ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan tahun 2016-2020.

Tabel 2.107
ASN & Pejabat ASN yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal	%	95,43	78,52	99	116	11,26
Persentase Pejabat ASN yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan struktural	%	32,29	44,98	52,46	60,25	60,13

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Capaian Indeks Profesionalitas ASN tahun 2019 sebesar 77,5 meningkat menjadi sebesar 78,06 di tahun 2020, untuk indeks sistem merit Kabupaten Klaten tahun 2020 capaiannya sebesar 160,5. Indeks sistem merit merupakan angka pengukuran kebijakan dan manajemen ASN berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dilakukan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi. Persentase pembinaan disiplin ASN mengalami peningkatan, dari 78% di tahun 2016 menjadi 100% di tahun 2020.

Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi tahun 2018 sebesar 101,29 % dan 2020 sebesar 82,8%. Untuk tahun 2016 sampai dengan 2019 tidak ada penerimaan CPNS, sehingga pemenuhan kualifikasi CASN sesuai formasi tidak maksimal karena ada GAP yang cukup besar pada keputusan

penetapan formasi dari Kementerian PAN RB dibandingkan usulan dari Pemerintah Kabupaten Klaten. Untuk indikator persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai baik baru diukur dari SKP tahunan dari seluruh ASN yang ada di Kabupaten Klaten, capaian tahun 2016-2020 sebesar 99%.

Persentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan ditahun 2016 sebesar 78%, mengalami perkembangan yang cukup fluktuatif sampai dengan tahun 2020 capaian sebesar 100%. Data ini sudah mencakup data terkait penyelesaian kasus pelanggaran disiplin dan penyelesaian kasus perceraian PNS. Capaian indikator persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah tahun tahun 2016 sebesar 100%, tahun 2017-2019 mengalami penurunan dengan capaian ditahun 2019 sebesar 42%, kemudian ditahun 2020 kembali tercapai 100 %. Pemenuhan kebutuhan ASN sesuai permintaan OPD belum bisa terealisasi maksimal karena terbatasnya ASN yang ada.

Persentase ASN yang mendapatkan peningkatan kapasitas ditahun 2016 sebesar 95,43%, dan menurun di tahun 2020 menjadi 11,26%. Penurunan ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 yang membatasi pertemuan serta mobilitas ASN. Data ini belum merangkum data peningkatan kapasitas dari seluruh OPD di Kabupaten Klaten yang penganggarannya diluar BKPPD Klaten. Berikut data manajemen pengelolaan ASN tahun 2016-2020.

Tabel 2.108
Manajemen Pengelolaan ASN Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Indeks Profesionalitas ASN	indeks	N/a	81,29	62	77,5	78,06
Indeks Sistem Merit	indeks	N/a	N/a	N/a	N/a	160,5
Persentase ASN yang mengikuti diklat	%	95,43	78,52	99	116	11,26
Persentase layanan sumber daya aparatur	%	76,74	93,66	93,75	95	90
Persentase Pembinaan Disiplin ASN	%	78	48	52	56	100
Persentase informasi kepegawaian yang akurat	%	98,73	94	90	80	54
Persentase Pengembangan Aparatur	%	66,04	76	83	96	70
Persentase kualifikasi calon ASN sesuai formasi	%	-	-	101,29	-	82,8
Persentase penilaian kinerja ASN yang bernilai "baik"	%	99	99	99	99	99
Persentase mutasi ASN sesuai kebutuhan perangkat daerah	%	100	39,8	56	42	100

Sumber : BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

4. Penelitian dan Pengembangan

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, yang dimaksud dengan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan, perekayasa, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan yang selanjutnya disebut kelitbangan utama adalah kegiatan ilmiah yang bertujuan menghasilkan pemahaman/cara baru dan/atau mengembangkan penerapan praktisnya dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi lingkup penyelenggaraan pemerintahan dalam

negeri. Implementasi terhadap penelitian dan pengembangan di Kabupaten Klaten dilihat berdasarkan hasil kreatifitas masyarakat dan berbagai riset yang dimenangkan melalui krenova maupun dari kategori pemenang riset, Indikator tersebut menunjukkan ide dan kreasi masyarakat terhadap penemuan atau karya di bidang Iptek.

Persentase inovasi yang diterapkan di Kabupaten Klaten 2020 sudah mencapai 85%. Jumlah peserta yang mengikuti krenova mengalami penurunan dari 20 peserta di tahun 2016, peserta di tahun 2020 hanya 5 orang. Sedangkan jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah sudah terlaksana 34 inovasi dari target 19 inovasi(178%).

Secara rinci capaian kinerja pembangunan urusan penelitian dan pengembangan sebagai berikut:

Tabel 2.109
Perkembangan Capaian Kinerja Pembangunan Fungsi Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No,	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase inovasi yang diterapkan	%	45,45	63,64	60,00	85,71	85,00
2.	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	Peserta	20	22	31	36	5
3.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	Jenis Inovasi	10	14	16	21	34

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

Inovasi daerah di Kabupaten Klaten tahun 2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.110
Capaian Inovasi Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Nama OPD
1	TITIP BANDAKU	Penyelamatan Arsip Daerah rawan bencana yang berbentuk data digital dan digital baik perorangan maupun lembaga,	Dinas Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Klaten
2	SIMBAT (Sistem Informasi Manajemen Obat)	Sistem Informasi Management Obat Puskesmas digunakan untuk mempermudah penatausahaan persediaan obat di Puskesmas	Dinas Kesehatan
3	SIMPUS GIZKIA	Aplikasi di 34 puskesmas untuk pencatatan dan pelaporan data-data pelayanan kesehatan terhadap ibu dan anak	Dinas Kesehatan
4	SIMPUS	Aplikasi di 34 puskesmas untuk manajemen pelayanan kesehatan dari pendaftaran sampai penerimaan obat	Puskesmas
5	Matur Dokter	Merupakan Inovasi Bupati Kepala Daerah Kab, Klaten di bidang Kesehatan Untuk kemudahan akses masyarakat dalam kesehatan, mendapat layanan respon cepat terutama masalah gawat darurat kesehatan melalui aplikasi di android secara gratis, Matur Dokter merupakan kegiatan pengembangan dari PSC 119, Program Ini telah di launching oleh Bupati Katen pada Desember 2019 Jenis-jenis layanan : a. Gawat Darurat Kesehatan 24 jam b. Konsultasi kesehatan c. Info Sehat	Dinas Kesehatan Kabupaten Klaten

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Nama OPD
		<p>d. Tips Kesehatan e. Berita Sehat f. Forum Sehat g. Informasi Kamar Tidur Kosong di RS h. Pelayanan Ambulance</p> <p>Pelaksana Kegiatan :</p> <p>a. Tim Matur Dokter Dinas Kesehatan Kab, Klaten b. Tim Matur Dokter 34 Puskesmas Kabupaten Klaten</p> <p>Sarana dan Prasarana</p> <p>a. 15 Ambulance Matur Dokter (2 di Dinkes, 13 di Puskesmas) b. 3 Motor Matur Dokter c. Aplikasi Matur Dokter dan Aplikasi khusus driver ambulance d. Perangkat HT di Dinas Kesehatan dan 34 Puskesmas</p> <p>a. Aplikasi Matur Dokter : Diunduh dari Play Store Handphone Android b. whatsapp : 0822 60000 910 c. Telepon : 0822 60000 910 (0272 3391 330) email : maturdokter@gmail.com instagram : maturdokterkabklaten facebook : maturdokterkabklaten Twitter : maturdokterkabklaten</p>	
6	Apik (Ayo Pknik ke Klaten)	Sebuah aplikasi yang berbasis Internet yang menyajikan Obyek wisata, Kebudayaan dan Olahraga yang berada di Kabupaten Klaten yang menyajikan juga Informasi pendukung yang berkaitan dengan Obyek wisata tersebut	Disparbudpora
7	Aplikasi e-Awas Om (Eling Waspada Omo Penyakit) diganti Matur Tani	Aplikasi yang berbasis android untuk memudahkan masyarakat/petani di Kab, Klaten dalam memperoleh informasi mengenai OPT dan cara pengendalian berdasar prinsip PHT (pengendalian hama terpadu),	DPKPP
8	Alat Pemanen Air Hujan	Alat yang berfungsi menampung air hujan yang bisa dimanfaatkan sebagai cadangan air pada saat musim kemarau	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
9	BIOGAS	Alat pengolah sampah organik menjadi biogas yang bisa dimanfaatkan sebagai energi gas	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
10	BIOPORI	Lubang lubang di sekitar lingkungan kantor yang berfungsi menyerap air hujan agar kembali ke tanah sekitar sekaligus berfungsi sebagai tempat pembuatan kompos skala kecil	Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan
11	sistaru,klatenkab ,go,id	Sistem pelayanan informasi tata ruang yang berbasis online yang bisa diakses oleh masyarakat dan pelaku usaha yang ingin mendapatkan informasi tentang tata ruang sesuai Perda Kabupaten Klaten nomor 11 tahun 2011 tentang RTRW Kabuapten Klaten Tahun 2011-2031	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang
12	Buku Matur Jujur	Pembentukan budaya baru dengan cara berbeda, yang dilakukan melalui pendidikan karakter di semua pusat pendidikan (keluarga, sekolah, dan masyarakat), dengan sekolah sebagai lokomotif, Sebagai penghubung tri pusat pendidikan, dibutuhkan sarana yang mudah, murah,	Dinas Pendidikan

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Nama OPD
		fleksibel, dengan anak difasilitasi media berani menulis/ mengungkapkan dengan "matur jujur" terhadap apa yang dilihat, dilakukan/dikerja	
13	KARSA TANDING (KERJASAMA IMPLEMENTASI RUMAH SAKIT TANPA DINDING)	Model Pelaksanaan Promosi kesehatan melalui kerja sama stakeholder, mempercepat layanan informasi dan promosi, terjalannya komunikasi dan kerjasama antara rumah sakit dan mitra fasilitas kesehatan, dan menunjukkan kehadiran pemerintah dalam pembangunan kesehatan	RSD Bagas Waras Klaten
14	SI KREEASI (SISTEM KEUANGAN RUMAH SAKIT YANG EFISIEN, EFEKTIF, AKUNTABEL DAN TERINTEGRASI)	Menyajikan data pendapatan Rumah Sakit Bagas Waras Kab, Klaten dengan cepat sehingga dapat diketahui secara cepat kondisi keuangan yang aman	RSD Bagas Waras Klaten
15	ANJUNGAN MANDIRI ANTRIAN POLIKLINIK	Antrian pasien menuju ke poliklinik dengan tujuan agar pasien tertib dalam mengantri sehingga pasien datang awal mendapat nomor urutan awal,	RSD Bagas Waras Klaten
16	SISTEM ANTRIAN FARMASI	Waktu tunggu dalam kefarmasian yang bertujuan untuk mengetahui waktu pasien dalam menunggu racikan obat	RSD Bagas Waras Klaten
17	Aplikasi SAPA (SMS layanan Kepegawaian)	a. Mengetahui Status usulan Karpeg, Karis, Karsu, Ijin belajar, Ijin Penggunaan gelar; b. Pemberitahuan Kepada PNS yang akan memasuki BUP dan pemberitahuan usulan pensiun sudah dalam proses; c. Pemberitahuan yang sifatnya segera yang berkaitan dengan kegiatan BKPPD	BKPPD
18	Aplikasi SIAP (sistem informasi Anjungan Layanan Kepegawaian)	a. Meningkatkan kualitas layanan kepegawaian ; b. Memenuhi kebutuhan informasi standar tentang kepegawaian tanpa harus bertatap muka langsung dengan petugas (cek layanan kepegawaian spt : Karis, Karsu, ijin gelar , ijin belajar, informasi kepegawaian, Statistisk kepegawaian, Cek data PNS, Cek surat	BKPPD
19	Mutasi masuk PNS dengan Tes CAT (Computer Assisted Test)	Untuk menghilangkan parktek pungutan dalam mutasi masuk	BKPPD
20	Penyelesaian Surat Keputusan Pensiun PNS	Pemberitahuan dini PNS yang akan Pensiun dan penyampaian SK pensiun langsung ke alamat PNS yang pensiun	BKPPD
21	Aplikasi BOS	Sistem Pengelolaan Dana Bos berbasis IT Yang Terintegrasi Dengan data Keuangan Daerah	BPKD
22	APL, SENSUS	verifikasi data sensus yang dulu dilakukan secara manual dan makan banyak waktu, sekarang sdh bisa dilakukan dengan lebih cepat dan meminimalisir kesalahan dalam penginputan data sensus,	BPKD
23	SIDIA	Pencocokan dan penghitungan stok opname persediaan yang dulu dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi sehingga laoran persediaan lebih akurat,	BPKD
24	APL,REKONSILIA	Aplikasi untuk rekonsiliasi Aset Daerah yang	BPKD

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Nama OPD
	SI	dahulu masih dilakukan secara manual sekarang sudah menggunakan aplikasi, sehingga mempermudah dan mempercepat rekonsiliasi aset serta laporan lebih akurat	
25	e-PBB (pbb,klatenkab,go ,id)	Aplikasi Untuk mengetahui berapa besaran pajak PBB yang harus di bayar oleh Wajib Pajak secara Online dengan internet (Cloud System) caranya cukup memasukkan NOP PBB	BPKD
26	e-BPHTB (bphtb,klatenkab, go,id)	Aplikasi Untuk mengetahui informasi BPHTB secara Online	BPKD
27	Pajak Online	Penambahan Loker pembayaran PBB-P2 yang semula baru bisa lewat Bank Jateng dan Bumdes, di tahun 2019 sudah bisa melalui Tokopedia, Indomaret dan Go Pay	BPKD
28	NAS BPKD	NAS adalah singkatan dari Network Attached Storage yaitu sebuah piranti penyimpanan data dengan sistem operasi yang di khususkan untuk melayani kebutuhan backup dan share data, NAS dapat di akses langsung melalui jaringan dengan protokol seperti TCP/IP	BPKD
29	Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Mikro	Program pinjaman bunga rendah dengan subsidi bunga bagi pelaku usaha mikro dari APBD Kabupaten Klaten untuk membantu akses permodalan ke lembaga jasa keuangan formal, Pelaku usaha mikro yang layak menerima subsidi bunga adalah penduduk Kabupaten Klaten dan menjalankan usaha di wilayah Kabupaten Klaten, memiliki IUMK, dengan jenis usaha ekonomi produktif, Plafon pinjaman maksimal Rp, 50,000,000,- bagi perorangan dan tidak untuk tujuan konsumtif, Besaran subsidi bunga adalah 80% dari bunga kredit per bulan dalam tahun anggaran berjalan, sesuai suku bunga yang berlaku pada Lembaga Jasa Keuangan (LJK) Penyalur, LJK Penyalur yang ditunjuk untuk program subsidi bunga adalah PT BPR Bank Klaten (Perseroda) dan PR BPR BKK Klaten (Perseroda)	Bag, Perekonomian
30	SMARD ON LINE	Pelayanan OnLine Disdukcapil ke Desa-desa meliputi : Ubdate Data,Pembetulan Data, Akta Kelahiran OnLine, Akta Kematian On Line	Disdukcapil
31	PELAUT BALA	Memberikan Pelayanan kepada kaum Divabel, Disabilitas, dan Berkebutuhan Khusus	Disdukcapil
32	BUAH HATI	Memberikan Pelayanan kepada masyarakat tentang Akta Kelahiran secara Online lewat Program SIAK	Disdukcapil
33	Roadmap Pengembangan Usaha RojoLele Srinar, Srinuk dan Sriten (Penguatan Lumbung Padi Kabupaten)	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai bentuk upaya menindaklanjuti dimiliki aset khas Klaten yaitu Rojolele Srinuk dan Rojolele Srinar untuk perlu adanya pembuatan penyusunan Roadmap pengembangan usaha padi rojolele sebagai upaya langkah-langkah yang efektif berdaya guna dan berhasil guna serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani di Kabupaten Klaten, Pengembangan usaha padi rojolele merupakan salah satu upaya untuk mengembalikan Klaten sebagai Lumbung 	Bappeda

No	Nama Inovasi	Deskripsi Singkat Inovasi	Nama OPD
		Padi Nasional dengan kualitas dan kuantitas produksi pangan yang meningkat pesat yang mana juga menjadi prioritas Smart City Klaten, Upaya dalam penguatan lumbung padi di Kabupaten Klaten juga bertujuan untuk mewujudkan swasembada beras secara berkelanjutan,	
34	Pelayanan izin Penelitian, Magang (PKL) dan KKN dengan Sistem Online	<ul style="list-style-type: none"> • Pelayanan izin Penelitian, Magang (Praktek Kerja Lapangan) dan Kuliah Kerja Nyata dengan Sistem Online, Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan penyebaran Covid-19, Pemohon izin dapat mengajukan izinnnya dengan mengirim persyaratan ke email Bappeda, Kemudian pemohon izin akan mendapatkan konfirmasi dari Bappeda, • Pertama apabila persyaratan sudah benar dan lengkap maka akan dilakukan proses pembuatan surat izin dan akan mengirimkan balik surat izin ke alamat email pemohon, • Kedua, apabila persyaratannya ada yang salah atau masih kurang maka pemohon harus melengkapinya atau membenarkannya, 	Bappeda

Sumber : Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, 2021

2.3.5. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Salah satu unsur dalam rangka menuju sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah adanya sistem pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pengawasan dilakukan terhadap kebijakan maupun pelaksanaan program dan kegiatan di daerah, baik yang bersifat pelaksanaan tugas dan fungsi, berabagai program dan kegiatan pembangunan kemasayarakatan maupun kegiatan lainnya dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 sebagaimana telah diperbaharui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 8 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah.

Pemerintah Kabupaten Klaten menyusun *Roadmap* Reformasi Birokrasi pada Tahun 2017 dengan mengeluarkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 tentang *Roadmap* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019. Dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 Pemerintah Kabupaten Klaten memulai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada tahun 2018 dan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi dirilis pada tahun 2019, Sedangkan untuk penilaian indeks reformasi birokrasi tahun 2019 sampai dengan saat ini belum keluar nilainya.

Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten tahun 2019 adalah 57,55 atau kategori “CC”. Untuk Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2019 masih dalam proses penilaian, dan tahun 2020 baru akan dilaksanakan penilaian pada tahun 2021, dengan rincian sebagaimana yang tersaji dalam tabel berikut:

Tabel 2.111
Hasil Penilaian Komponen Indeks Refomasi Birokrasi
Kabupaten Klaten Tahun 2019

No,	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai
A,	Komponen Pengungkit		
1.	Manajemen Perubahan	5,00	1,58
2.	Penataan Peraturan Perundangan	5,00	1,54
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	1,05
4.	Penataan Tata Laksana	5,00	2,22
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	9,92
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,07
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,36
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	2,78
	Total Komponen Pengungkit (A)	60,00	25,51
B,	Komponen Hasil		
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	8,45
2.	Survei Internal Integritas Organisasi	6,00	4,86
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	6,63
4.	Opini BPK	3,00	3,00
5.	Servei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	9,10
	Total Komponen Hasil (B)	40,00	32,04
	Indeks Reformasi Birokrasi (A+B)	100,00	57,55

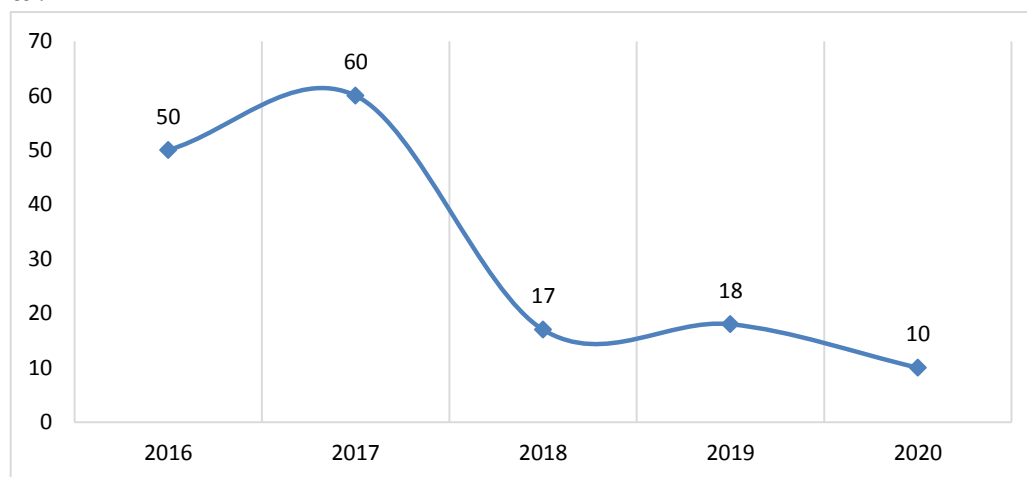
Sumber : Sekretariat Daerah Kab, Klaten, 2021

Fungsi pengawasan yang dilaksanakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di Kabupaten Klaten antara lain dilaksanakan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat Provinsi Jawa Tengah dan Inspektorat Kabupaten Klaten. Kondisi pelaporan terhadap penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Klaten mengalami kondisi yang baik mengingat opini BPK terhadap laporan keuangan sejak tahun 2018 berstatus Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Selain opini BPK, terdapat satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, Indikator tersebut adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) tahun 2019 dengan nilai B (61,32).

Tindak lanjut terhadap temuan di Kabupaten Klaten pada tahun 2020 telah mencapai 100%. Adapun jumlah temuan BPK pada tahun 2020 sebanyak 6 temuan. Namun Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK pada tahun 2020 sebesar 83,61%, kondisi ini terus menurun sejak tahun 2016.

Unsur pengawasan dalam penyelenggaraan pemerintah daerah merupakan bagian dari Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) yang diwujudkan dalam sebuah sistem dalam mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik, Sistem pengendalian ini pencapaian keberhasilannya dikenal dengan Maturitas SPIP, yaitu tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah dalam mencapai tujuan pengendalian intern. Hasil penilaian terhadap Maturitas SPIP di Kabupaten Klaten merupakan kebijakan dan prosedur sistem pengendalian internal yang diimplementasikan, serta dilakukan evaluasi atas pengendalian intern. Pemerintah Kabupaten Klaten perlu pengembangan strategi untuk meningkatkan kualitas maturitas SPIP pada level yang semakin baik. Jumlah pelanggaran pegawai di Kabupaten Klaten semakin

menurun dari tahun ke tahun. Di tahun 2020 hanya terjadi 10 kasus pelanggaran pegawai.



Sumber: BKPPD Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.85.
Jumlah Pelanggaran Pegawai di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Dari hasil penyelesaian kasus Pelanggaran disiplin pegawai di Kabupaten Klaten kasus tersebut meliputi :

- Pelanggaran disiplin karena penyalahgunaan wewenang;
- Pelanggaran disiplin karena pelanggaran kesusilaan;
- Pelanggaran disiplin karena pelanggaran netralitas ASN.

Gambaran capaian urusan pengawasan meliputi indikator Persentase tindak lanjut temuan, Persentase pelanggaran pegawai, jumlah temuan BPK, dan persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, sebagai berikut.

Tabel 2.112
Persentase, Jumlah, dan Tindak Lanjut Temuan BPK di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase tindak lanjut temuan	%	70,50	71,70	75,98	84,36	100,00
Jumlah temuan BPK	temuan	16	18	18	17	6
Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK	%	95,30	94,61	89,45	85,00	83,61

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa dalam perkembangannya persentase tindak lanjut jumlah temuan semakin meningkat, namun jumlah temuan BPK semakin menurun. Untuk tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK selama tahun 2016-2020 cenderung menurun. Capaian indikator Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK sebesar 83,61% di tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2016 sebesar 95,30%. Temuan yang ditindak lanjuti merupakan akumulasi dari temuan mulai tahun 2009, sehingga sulit ditindaklanjuti karena pejabat sudah ganti/meninggal sedangkan pejabat yang baru tidak.

Inspektorat Kabupaten Klaten telah memenuhi kapabilitas level 3 (*integrated*) dengan karakteristik bahwa kebijakan, proses dan prosedur APiP telah ditetapkan, didokumentasikan dan terintegrasi satu sama lain serta merupakan

insfratrstruktur organisasi. Manajemen serta praktik profesionalisme APIP telah mapan dan seragam diterapkan di seluruh kegiatan pengawasan, serta APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian intern.

Dalam pelaksanaan tugasnya Inspektorat telah membuat program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko yang bertujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan penerapan SPIP di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten yang bertujuan untuk mencapai pengelolaan keuangan negara yang efektif, efisien dan akuntabel dalam mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan. Berdasarkan hasil Quality Assurance penilaian Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Klaten per tanggal 17 Januari 2020 nilai Maturitas Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Kabupaten Klaten adalah 3 (terdefinisi).

Capaian maturitas SPIP dan kapabilitas APIP di Kabupaten klaten tahun 2016-2020 sebagaimana yang ada dalam Tabel berikut:

Tabel 2.113
Capaian Maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Kapabilitas APIP	Level	21	2	2	3	3
Maturitas SPIP	Level	1,12	2,29	2,29	3,00	3,00

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021

Dalam pelaksanaan pengawasan baik yang berbentuk audit, reviu, evaluasi, verifikasi dan validasi, pendampingan dan asistensi serta konsultasi yang menjadi tugas Inspektorat, disusun program kerja pengawasan tahunan yang berbasis risiko dengan tujuan untuk mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah dalam kondisi yang optimal untuk mencapai tujuannya. Hal ini selaras dengan kegiatan penjaminan yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu menyelenggaraan kegiatan pengawasan intern dalam memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi dan efektifitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah.

Hasil pelaksanaan pengawasan baik pengawasan intern reguler maupun pengawasan intern khusus yang terdiri dari pengawasan dengan tujuan tertentu maupun pengaduan dengan capaian sebagai berikut :

Tabel 2.114
Persentase Pelaksanaan Pengawasan Intern Reguler dan Khusus Di Kabupaten Klaten Tahun 2016 - 2020

No	Indikator	% Capaian				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Persentase pelaksanaan pengawasan intern reguler	100	100	100	100	100
2	Persentase pelaksanaan pengawasan intern khusus	100	100	100	100	100

Sumber : Inspektorat Kabupaten Klaten, 2021

Untuk meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi dan dalam rangka pencegahan korupsi di Kabupaten Klaten, bersama Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) dilaksanakan Survei Penilaian Integritas (SPI). Survei ini dilakukan untuk memetakan dan memonitor risiko korupsi, serta memiliki tujuan untuk meningkatkan kesadaran Risiko Korupsi dan perbaikan sistem antikorupsi.

2.3.6. Unsur Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Pemerintahan umum di daerah merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan bupati sebagai kepala pemerintahan ditingkat kabupaten. Penyelenggaraan urusan pemerintah umum lebih banyak pada pelaksanaan pembinaan dan koordinasi dalam mendukung pelaksanaan tugas, fungsi dan pemantauan pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan pemerintah di daerah. Pelaksanaan pembinaan yang dilakukan mengarah pada pembinaan wawasan kebangsaan, pembinaan kerukunan antarsuku dan intrasuku, umat beragama, ras, dan golongan, dan penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Sementara itu, pada kegiatan koordinasi dilakukan pada pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di daerah dan untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul.

Pelaksanaan urusan pemerintahan umum di Kabupaten Klaten yang sifatnya rutinitas terlaksana dengan baik. Pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan sudah dapat mengakomodir segala kebutuhan yang ada dalam target pimpinan di daerah. Segala bentuk pelaporan yang dibutuhkan sebagai bahan informasi pembangunan daerah mampu dipenuhi setiap tahun sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan, antara lain penyampaian LPPD sudah tepat waktu. OPD pengampu SPM menyampaikan laporan capaian tepat waktu, dokumen administrasi kepala daerah dapat diterbitkan dan bentuk-bentuk kerjasama sudah ditindaklanjuti.

Penyelenggaraan koordinasi terhadap pengembangan kewilayahan juga sudah berjalan dengan baik. Berbagai dokumen administrasi kewilayahan sudah tersedia sesuai dengan aturan yang berlaku dan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat sudah dilaksanakan dan ditetapkan dalam peraturan bupati, Hal-hal lain seperti dibidang hukum, ekonomi dan sosial yang berkaitan dengan tugas pemerintahan umum sudah berjalan dan memenuhi target. Namun yang masih perlu diperhatikan dengan kualitas pelayanannya, terutama yang berhubungan langsung dimasyarakat. Kualitas pelayanan dalam penyelenggaraan pemerintahan umum juga perlu dilaksanakan dengan baik, tidak terlepas dari upaya pengembangan organisasi dan manajemen perangkat daerah dalam upaya-upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Perangkat daerah juga menerapkan standar pelayanan dengan baik melalui proses penyusunan, menetapkan, dan mempublikasikan hasilnya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan evaluasi berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap

penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*).

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten dari Tahun 2018 sampai dengan 2019 menunjukkan peningkatan. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang dijadikan sebagai media pertanggungjawaban kinerja dan sebagai alat pengendalian manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah juga perlu mendapatkan peringkat yang baik. Untuk meningkatkan kualitas dari SAKIP itu sendiri, perlu koordinasi yang ketat antar instansi sejak perencanaan, penetapan indikator, penerapan anggaran berbasis kinerja sampai pada evaluasi atas pelaksanaan kinerja. Nilai SAKIP di Kabupaten Klaten mengalami perkembangan yang cukup baik karena meningkat dari 60,33 menjadi 61,32 pada tahun 2019.

Tabel 2.115
Hasil Penilaian Komponen Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No,	Komponen yang Dinilai	Bobot	Nilai				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Perencanaan Kinerja	30		17,60	19,94	20,79	20,79
2.	Pengukuran Kinerja	25		11,74	14,83	15,16	15,16
3.	Pelaporan Kinerja	15		9,34	9,43	10,21	10,21
4.	Evaluasi Eksternal	10		4,66	5,74	5,03	5,03
5.	Capaian Kinerja	20		9,68	10,39	10,14	10,14
6.	Nilai Hasil Evaluasi	100		53,02	60,33	61,32	61,32
7.	Tingkat Akuntabilitas Kinerja			CC	B	B	B

Sumber : Sekretariat Daerah Kab, Klaten, 2021

Dari tabel tersebut di atas dapat dilihat bahwa nilai akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2019 menunjukkan nilai yang baik hal ini didukung dengan peningkatan nilai yang cukup tinggi pada komponen perencanaan kinerja. Peningkatan ini dikarenakan kerja keras perencana Perangkat Daerah dalam penyusunan dokumen perencanaan, salah satunya dengan menjaga konsistensi antara dokumen perencanaan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang. Sedangkan Indeks Reformasi Birokrasi tahun 2020 baru akan dilaksanakan penilaian pada tahun 2021.

Berdasarkan pada hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2018 dengan total ukuran sampel sebanyak 250 responden dapat ditarik kesimpulan skor IKM keseluruhan unit layanan sebesar 81,08. Nilai tersebut berada pada rentang skala 76,61- 88,30 sehingga dapat dikatakan bahwa secara keseluruhan masyarakat menilai “Baik” terhadap kinerja pelayanan Pemerintah Kabupaten Klaten.

Sedangkan hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2019 dengan menggunakan variabel 9 unsur pelayanan yang telah dilaksanakan pada 85 unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 79,41. Hasil survei kepuasan masyarakat (SKM) Pemerintah Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yang telah dilaksanakan pada 46 Unit pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten memperoleh skor Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,5. Dibandingkan dengan IKM Kabupaten Klaten Tahun 2019, maka pada tahun 2020 mengalami peningkatan.

Secara keseluruhan, ukuran capaian kinerja pada urusan pemerintahan umum di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.116
Capaian Kinerja Sekretariat Daerah di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Peringkat Nilai SAKIP	Skor	47,89	53,01	60,33	61,32	NA
SAKIP Aspek Pelaporan	%	9,12	9,34	9,43	10,21	NA
Nilai Kematangan/Maturitas Organisasi	Skor	-	-	-	-	31,2
Nilai Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD)	Skor	3,1658	3,2138	3,0353	3,2109	NA
Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	79,14	79,94	81,08	81,31	81,88

Sumber : Sekretariat Daerah Kab, Klaten, 2021

2. Sekretaria DPRD

Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD saat ini, komposisi anggota DPRD Kabupaten Klaten hasil Pemilu Tahun 2019 berdasarkan Fraksi dan jumlah anggota terdiri dari: 1), Fraksi PDIP Sebanyak 19 orang, 2), Fraksi Golkar 7 orang, 3), Fraksi Gerindra sebanyak 5 orang, 4), Fraksi PAN sebanyak 4 orang, 5), Fraksi Keadilan Sejahtera 5 orang, 6), Fraksi DPN (Demokrat Pembangunan Nasional) 6 orang, 7), Fraksi PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) sebanyak 4 orang.

Berdasarkan struktur organisasi, DPRD Kabupaten Klaten sebanyak 50 orang, terbagi ke dalam: Pimpinan DPRD sebanyak 4 orang dan 4 komisi, Sedangkan komposisi Komisi, terdiri: (i) Komisi I sebanyak 10 orang, (ii) Komisi II sebanyak 12 orang, (iii) Komisi III sebanyak 13 orang, dan (iv) Komisi IV sebanyak 11 orang.

Sekretariat DPRD dalam mendukung pencapaian visi jangka menengah daerah diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Gambaran kinerja Sekretariat DPRD selama tahun 2016-2020 disajikan pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.117
Capaian Kinerja Sekretariat Dewan di Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Indikator	Satuan	Tahun				
		2016	2017	2018	2019	2020
Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pembentukan Perda	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Penganggaran.	%	100	100	100	100	100
Persentase pelayanan Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitasi Pengawasan	%	100	100	100	100	100

Sumber : Setwan DPRDKabupaten Klaten, 2021

Dalam fungsi pembentukan Perda selama Tahun 2016–2020 telah menghasilkan Perda sejumlah 76 dari yang direncanakan sejumlah 80 Perda. Disamping itu, Sekretariat DPRD dalam mendukung tugas dan fungsi DPRD telah menghasilkan sebanyak 197 Keputusan DPRD; 50 keputusan Pimpinan

DPRD; Keputusan Panitia Anggaran sebanyak 34 keputusan dan keputusan panitia musyawarah sebanyak 67 keputusan.

Berdasarkan data capaian kinerja Sekretariat DPRD terhadap dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal fasilitasi penganggaran dan pengawasan sebagaimana tabel di atas, selama Tahun 2016-2020 dengan rerata 100%, artinya antara yang direncanakan dan terealisasi sama.

2.3.7. Kesatuan Bangsa dan Politik

Berdasarkan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota yang melaksanakan urusan pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Capaian kinerja bidang kesatuan bangsa dan politik Kabupaten Klaten diukur berdasarkan indikator persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan sudah mencapai 100%. Capaian indikator Organisasi Kemasyarakatan yangg dibina dan mendapatkan pengawasan pada tahun 2020 sudah mencapai 100%. Untuk persentase potensi konflik SARA yang tertangani sudah mencapai 100%. Pemerintah Kabupaten Klaten telah melaksanakan peningkatan wawasan kebangsaan kepada masyarakat dengan capaian 100% di tahun 2019. Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu baru mencapai 50%. Partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak nya pada pemilu/ pilkada di Kabupaten Klaten, tahun 2019 tercatat sebesar 82,34% sedangkan tahun 2020 menurun menjadi 81%.

Berikut capaian kinerja urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.118
Capaian Kinerja Pembangunan Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2016-2020

No	Indikator	Satuan	Capaian				
			2016	2017	2018	2019	2020
1.	Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100	100	100	100	100
2.	Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	-	-	-	100	100
3.	Prosentase potensi konflik SARA yang tertangani	%	100	100	100	100	100
4.	Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	100	100	100	100	0
5.	Persentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba	%	100	200	100	100	50
6.	Persentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	%	100	100	100	240	216
7.	Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	40	40	50	50	50
8.	Persentase partisipasi masyarakat dalam pemilu/ pilkada	%	-	-	70,85	82,34	81,00

Sumber : Kesbangpol Kab Klaten, 2021

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

Daya saing daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan dengan tetap terbuka pada persaingan dengan provinsi lainnya yang berdekatan, domestik atau internasional. Aspek daya saing daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi dan sumber daya manusia.

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Analisis kinerja atas aspek kemampuan ekonomi daerah dilakukan terhadap indikator pengeluaran konsumsi rumah tangga perkapita, produktivitas pertanian, dan potensi pariwisata.

1. Konsumsi Rumah Tangga perkapita

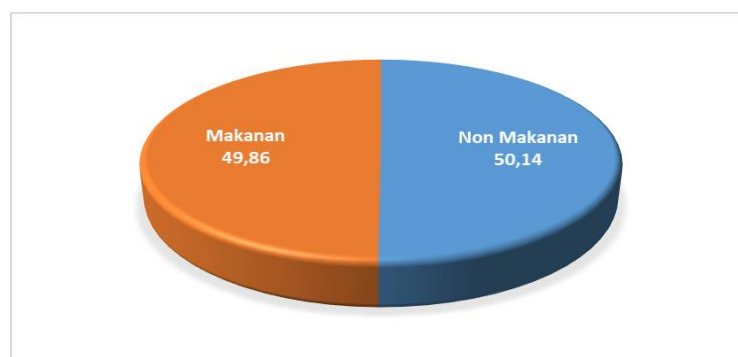
Konsumsi Rumah Tangga menjadi salah satu ukuran kesejahteraan masyarakat, Secara teori peningkatan konsumsi rumah tangga dipacu oleh adanya penambahan penduduk, peningkatan pendapatan masyarakat maupun perubahan pola konsumsi masyarakat. Peningkatan permintaan atau konsumsi merupakan pangsa pasar yang dapat menggerakkan roda perekonomian dapat berjalan lebih cepat dan akan menggerakkan sektor-sektor usaha lainnya untuk memenuhi permintaan tersebut. Namun perlu diwaspadai bahwa tingginya tingkat konsumsi biasanya akan dibarengi dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah, terutama barang dan jasa yang tidak bisa diproduksi oleh wilayah lokal. Akibat tingginya barang dari luar daerah maka secara teori akan menurunkan angka PDRB.

Tabel 2.119
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Menurut PDRB ADHB
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No,	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1,	Jumlah Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB (Rupiah)	23,853,927,63	26,006,334,03	27,992,971,91	30,070,348,53	NA
2,	Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga ADHB	75,44	76,10	75,67	75,56	NA

Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Pengeluaran rumah tangga terdiri dari pengeluaran makanan dan bukan makanan, yang menggambarkan bagaimana penduduk mengalokasikan kebutuhan rumah tangganya. Walaupun harga antar daerah berbeda, namun nilai pengeluaran rumah tangga masih menunjukkan perbedaan tingkat kesejahteraan penduduk antar wilayah. Rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk Kabupaten Klaten tahun 2020 tercatat sebesar Rp.955.532 per kapita per bulan, tahun 2020 sebesar 49,86% pengeluarn perkapita digunakan untuk kebutuhan makanan atau sebesar Rp476,383, sedangkan untuk kebutuhan non makanan sebesar 50,14% atau sebesar Rp.479.149.



Sumber: BPS Kabupaten Klaten, 2021

Gambar 2.86.
Pengeluaran PerKapita Sebulan Menurut Kelompok Komoditas di Kabupaten Klaten Tahun 2020

2. Produktivitas Pertanian

Pada Tahun 2020 berdasarkan pemakaian lahan pertanian untuk penggunaan lahan sawah 31,771 Ha dan untuk lahan pertanian bukan sawah sebesar 6,575 Ha. Sedangkan untuk lahan bukan pertanian seluas 27,210 Ha. Menurut sistem penggunaan air di Kabupaten Klaten, menunjukkan bahwa sawah dengan sistem pengairan teknis seluas 18,629 Ha, sistem pengairan setengah teknis seluas 10,627 Ha; sistem pengairan sederhana seluas 1,992 Ha, serta sistem tadah hujan seluas 1,616 Ha.

Penggunaan lahan di Kabupaten Klaten setiap tahunnya selalu berubah dan cenderung mengikuti pertambahan jumlah penduduk, serta perluasan kegiatan perekonomian, Jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten semakin menurun setiap tahunnya, lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian. Dari luasan sawah yang ada, tingkat produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar di Kabupaten Klaten semakin meningkat hingga tahun 2019. Namun di tahun 2020 terjadi penurunan produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya.

Untuk mengatasi perubahan lahan dan mengganti produksi pertanian yang hilang akibat perubahan lahan pertanian perlu dikembangkan pola pertanian terpadu yang merupakan integrasi antara bidang tanaman pangan, bidang peternakan, dan bidang perikanan yang diharapkan kedepan bisa menjadi Kawasan Agropolitan.

Adapun Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.120
Luas Lahan Pertanian dan Bukan Lahan Pertanian Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
Prambanan	1,219,6	12,0	1,211,4	2,443
Gantiwarno	1,607,5	155,0	801,5	2,564
Wedi	,540,8	18,0	879,2	2,438
Bayat	808,4	784,1	2,350,4	3,943
Cawas	2,135,7	46,0	1,265,3	3,447
Trucuk	1,870,3	2,0	1,508,7	3,381
Kalikotes	708,0	8,0	582,0	1,298
Kebonarum	702,3	2,0	262,7	967
Jogonalan	1,467,1	1,0	1,201,9	2,670
Manisrenggo	1,429,7	138,4	1,127,9	2,696

Kecamatan	Lahan Pertanian Sawah	Lahan Pertanian Bukan Sawah	Lahan Bukan Pertanian	Jumlah
Karangnongko	722,9	850,5	1,100,6	2,674
Ngawen	1,019,1	8,0	669,9	1,697
Ceper	1,403,0	7,0	1,035,0	2,445
Pedan	836,2	444,3	636,5	1,917
Karangdowo	2,044,0	69,0	810,0	2,923
Juwiring	1,934,8	12,0	1,032,2	2,979
Wonosari	2,126,9	14,0	973,1	3,114
Delanggu	1,254,4	1,0	622,6	1,878
Polanharjo	1,732,9	92,0	559,1	2,384
Karanganom	1,624,5	11,0	770,5	2,406
Tulung	1,665,7	466,5	1,067,8	3,200
Jatinom	572,0	1,541,1	1,439,8	3,553
Kemalang	25,4	1,847,8	3,292,8	5,166
Klaten Selatan	766,5	2,9	673,6	1,443
Klaten Tengah	277,1	1,0	613,9	892
Klaten Utara	276,2	39,9	721,9	1,038
2020	31,771	6,575	27,210	65,556
2019	31,863	6,578	27,115	65,556
2018	32,943	6,579	27,034	65,556
2017	33,021	6,581	25,954	65,556
2016	33,066	6,581	25,909	65,556

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Lahan Perlindungan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2PB) di Kabupaten Klaten seluas 32,451 Ha sebagaimana telah ditetapkan dalam Perda Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Dengan adanya LP2PB tersebut alih fungsi lahan pertanian dapat dikendalikan dengan rata-rata perubahan lahan pertanian 56 Ha di luar LP2PB, Luas perubahan penggunaan tanah pertanian ke non pertanian menurut kecamatan dan penggunaannya disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.121
Luas Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian Ke Non Pertanian Menurut Penggunaannya di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Dari Sawah & Tegalan (Ha)	Peruntukkan Bangunan Tanah (Ha)				Jumlah (Ha)
		Perumahan	Industri	Perusahaan	Jasa	
2016	45,392	33,058	8,910	0,113	3,311	45,392
2017	45,761	40,298	4,515	0	0,948	45,761
2018	63,381	48,897	13,744	0	0,740	63,381
2019	81,600	55,500	18,200	0,500	7,500	81,600
2020	93,180	56,104	10,332	25,516	1,228	93,180

Sumber: DPKPP Kab, Klaten, 2021

Kabupaten Klaten ditetapkan sebagai lumbung pangan Jawa Tengah bahkan Nasional, dengan luas pertanian mencapai 32 ribu hektar, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang di kembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Pembangunan pertanian di Kabupaten Klaten dikembangkan dengan sistem Pertanian Terpadu berbasis pada teknologi dengan konsep kawasan unggulan.

Salah satu potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, karena selama selalu surplus. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa di kembangkan seperti jagung, hortikultura,

buah-buahan dan tanaman perkebunan. Sedangkan untuk kedelai masih perlu dilakukan penelitian dan pengembangan varietas unggul yang cocok.

Komoditas hasil pertanian yang ada di Kabupaten Klaten sebagai berikut:

Tabel 2.122
Komoditas Pertanian Di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Padi		Jagung (Produksi/ton)	Kedelai (Produksi /ton)	Produksi Tanaman Sayuran (ton)				
		Luas Panen (ha)	Produktivitas (ton/ha)			Bawang Merah	Cabai	Kubis	Petsai	Tomat
1	Prambanan	2,079	7	7,387	57	1,240	1,523	-	-	6
2	Gantiwarno	2,613	6	2,981	-	290	149	-	-	45
3	Wedi	2,889	7	2,773	78	-	14	-	-	24
4	Bayat	1,099	6	7,607	48	-	129	-	-	-
5	Cawas	4,144	7	267	1,818	-	-	-	-	-
6	Trucuk	3,742	6	9,672	153	230	69	-	-	-
7	Kalikotes	1,235	7	4,308	-	329	152	-	-	-
8	Kebonarum	1,752	7	-	-	-	-	-	-	-
9	Jogonalan	3,128	7	12,233	41	301	9,428	-	12	107
10	Manisrenggo	2,581	7	3,188	-	440	2,766	-	533	488
11	Karangnongko	2,180	7	1,526	-	240	1,438	-	32	-
12	Ngawen	3,085	7	2,808	-	-	-	-	-	-
13	Ceper	2,759	7	7,138	22	356	2,271	-	-	222
14	Pedan	1,621	7	4,162	18	-	1,204	-	486	90
15	Karangdowo	4,479	7	1,037	293	-	-	-	-	-
16	Juwiring	4,824	7	8	-	-	-	-	-	-
17	Wonosari	5,567	7	75	-	-	-	-	-	-
18	Delanggu	3,915	7	52	-	-	-	-	-	-
19	Polanharjo	5,377	7	15	24	-	131	-	-	91
20	Karanganom	3,376	6	1,590	-	-	313	-	-	121
21	Tulung	2,743	6	23,113	-	250	1,024	40	341	265
22	Jatinom	1,141	7	9,612	-	-	5,627	-	148	572
23	Kemalang	100	6	-	-	-	42	-	-	-
24	Klaten Selatan	1,789	7	270	-	-	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	714	7	547	7	-	-	-	-	-
26	Klaten Utara	627	7	587	-	-	-	-	-	-
Jumlah		69,559	175	102,956	2,559	3,676	26,280	40	1,552	2,031

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Tabel 2.123
Lanjutan Tabel Komoditas Pertanian di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Produksi Tanaman Biofarmaka (kg)				Produksi Buah-Buahan (ton)						Produksi Tanaman Perkebuna (ton)			
		Jahe	Lengkuas	Kencur	Kunyit	Mangga	Durian	Jeruk	Pisang	Pepaya	Salak	Kelapa	Kopi	Tebu	Tembakau
1	Prambanan	-	-	-	-	400	3	-	627	1,490	-	290	-	117	180
2	Gantiwarno	-	-	-	-	7,125	-	177	3,887	153	-	135	-	3,610	267
3	Wedi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339	-	2,023	5
4	Bayat	4,600	100	110	340	45,781	2	-	18,519	6,520	-	227	-	1,727	49
5	Cawas	-	-	-	-	73	-	73	3,075	-	-	58	-	-	-
6	Trucuk	-	-	-	-	205	-	-	333	168	-	120	-	-	570
7	Kalikotes	-	-	-	-	117	-	-	93	150	-	56	-	187	11
8	Kebonarum	-	-	-	-	383	-	-	70	61	2	80	-	85	21
9	Jogonalan	-	-	-	-	9,523	383	130	1,309	6,192	-	197	-	5,931	257
10	Manisrenggo	-	-	-	-	3,380	328	-	4,126	1,981	325	303	7	810	975
11	Karangnongko	-	-	-	-	999	2,414	2,249	1,410	1,472	-	429	2	962	33
12	Ngawen	-	-	-	-	-	-	-	106	95	-	17	-	298	13
13	Ceper	64	136	27	-	72	-	-	101	38	-	168	-	2,006	268
14	Pedan	-	-	-	-	2,108	-	-	155	496	-	0	-	1,128	335
15	Karangdowo	-	-	-	-	6,022	182	-	950	2,677	-	5	-	-	56
16	Juwiring	-	-	-	-	1,529	-	-	7,434	-	-	408	-	2,138	-
17	Wonosari	-	-	-	-	-	-	-	355	552	-	218	-	1,741	-
18	Delanggu	-	-	-	-	3,112	6	-	610	824	-	101	-	-	-
19	Polanharjo	200	110	-	20	642	-	51	5,033	563	-	13	-	179	-
20	Karanganom	-	-	-	-	1,053	10	-	137	-	-	137	-	1,313	6
21	Tulung	2	-	-	-	2,390	12,308	602	5,427	816	-	266	3	145	142
22	Jatinom	-	-	-	-	1,642	7,350	5,288	9,393	5,328	-	335	3	6,322	44
23	Kemalang	-	-	-	-	1,204	230,781	-	2,420	5,890	-	538	160	-	261
24	Klaten Selatan	-	-	-	-	672	5	-	146	99	-	18	-	-	41
25	Klaten Tengah	-	-	-	-	255	-	-	79	-	-	52	-	182	-
26	Klaten Utara	-	-	-	-	648	-	-	515	3,401	-	7	-	1,056	10
Jumlah		4,866	346	137	360	89,335	253,772	8,570	66,310	38,966	327	4,518	175	31,960	3,544

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Di Kabupaten Klaten juga terdapat potensi peternakan yang tersebar di seluruh wilayah, Ternak yang ada di Kabupaten Klaten meliputi sapi, kerbau, kuda, domba, kambing, babi, kelinci, unggas dan lainnya, Hasil peternakan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.124
Komoditas Peternakan Di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Sapi	Sapi Perah	Kerbau	Kuda	Itik	Ayam Buras	Ayam Pedaging	Ayam Petelur	Domba	Kambing	Babi	Entok	Angsa	Kelinci	Burung Puyuh
1	Prambanan	5,253	-	19	12	13,972	102,959	182,354	5,232	1,773	4,156	34	414	329	399	21,869
2	Gantiwarno	4,644	-	27	9	11,495	96,094	177,830	21,261	1,549	3,233	-	343	-	332	51,384
3	Wedi	4,382	-	21	7	12,422	95,540	134,080	26,894	1,340	2,833	54	523	303	281	16,385
4	Bayat	4,702	-	11	-	18,135	100,944	254,748	99,534	1,192	5,227	-	668	340	408	57,882
5	Cawas	3,368	-	16	8	13,514	102,316	105,362	19,806	994	4,029	56	775	-	280	-
6	Trucuk	4,025	-	14	-	16,198	100,567	114,391	29,416	1,963	4,586	65	713	42	305	-
7	Kalikotes	1,632	-	29	6	16,633	107,639	119,745	44,458	1,375	2,910	-	683	262	420	18,049
8	Kebonarum	1,861	-	33	11	12,852	106,554	87,617	34,898	1,450	2,610	74	671	125	352	6,408
9	Jogonalan	6,061	-	26	10	14,887	116,424	204,388	112,980	2,220	5,196	320	632	162	511	29,126
10	Manisrenggo	7,591	125	21	4	16,423	94,336	198,059	50,272	2,399	8,298	-	710	278	309	28,168
11	Karangnongko	8,726	223	30	9	14,976	115,662	136,682	-	1,806	7,724	-	709	289	480	11,014
12	Ngawen	2,050	27	19	10	14,391	111,319	94,427	42,245	2,471	2,337	97	534	-	278	22,076
13	Ceper	1,537	-	27	8	15,579	121,705	168,888	26,172	2,175	3,875	-	834	324	409	32,517
14	Pedan	2,431	-	28	9	13,668	121,495	88,635	22,888	1,667	3,692	171	787	298	903	7,510
15	Karangdowo	2,144	-	25	6	14,183	104,378	134,291	23,406	1,663	3,133	58	753	84	275	-
16	Juwiring	1,285	-	27	16	23,393	105,341	146,118	26,206	1,662	3,456	-	737	427	401	17,531
17	Wonosari	1,373	-	29	7	15,433	107,027	134,729	-	1,833	3,228	56	542	56	318	18,344
18	Delanggu	1,214	-	19	9	20,283	100,252	134,844	21,221	1,978	2,597	53	873	29	251	17,852
19	Polanharjo	1,164	-	22	13	44,662	80,489	114,893	30,832	2,122	2,536	-	914	261	270	31,236
20	Karanganom	1,715	78	34	9	16,927	84,303	152,552	42,754	3,117	2,412	-	838	262	298	15,607
21	Tulung	8,394	1,494	27	9	20,557	111,175	263,609	35,509	1,918	3,883	87	904	287	242	65,798
22	Jatinom	11,882	2,882	26	14	15,644	106,789	254,230	78,766	3,151	7,094	-	694	219	228	30,635
23	Kemalang	11,296	1,410	3	14	15,040	90,375	200,908	14,277	1,793	5,421	-	918	227	321	-
24	Klaten Selatan	1,303	-	33	7	13,994	41,974	122,481	11,064	964	2,234	30	617	161	243	14,076
25	Klaten Tengah	1,099	-	25	10	12,877	44,486	75,441	-	1,197	2,418	45	567	133	365	-
26	Klaten Utara	1,299	-	20	9	12,191	62,533	95,486	12,673	1,192	2,275	18	667	231	496	21,777
Jumlah		102,431	6,239	611	226	430,329	2,532,676	3,896,788	832,764	46,964	101,393	1,218	18,020	5,129	9,375	535,244

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Sektor perikanan juga merupakan potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan di Kabupaten Klaten, Pusat-pusat pertumbuhan tersebut berjenjang yang berkaitan dengan kegiatan agribisnis perikanan darat (Kawasan Minapolitan) sebagai suatu sistem yang secara ruang terdapat pada desa-desa di Kecamatan Karananom, Kecamatan Tulung, Kecamatan Polanharjo, Kecamatan Kebonarum, Kecamatan Ngawen, dan Kecamatan Klaten Selatan, Pengembangan perikanan di Kabupaten Klaten dapat dilakukan di kolam, sawah, keramba, waduk, dan sungai, Kecamatan Polanharjo merupakan wilayah yang memiliki hasil perikanan tertinggi di Kabupaten Klaten dibandingkan dengan wilayah lainnya, Sebaran perikanan menurut areal obyek perikanan di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

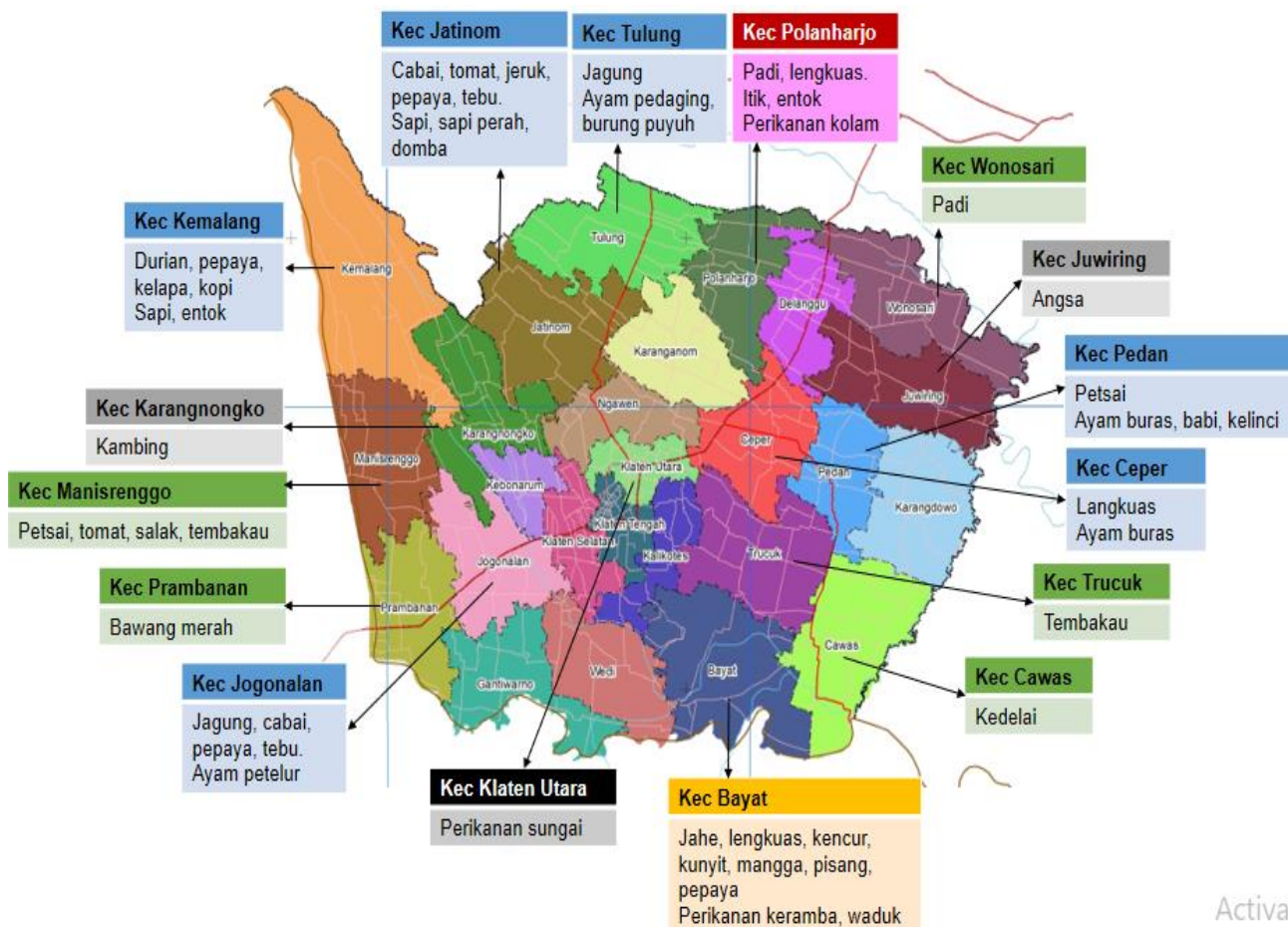
Tabel 2.125
Penebaran Benih Ikan Menurut Areal Obyek Perikanan
di Kabupaten Klaten Tahun 2020

No,	Kecamatan	Kolam	Sawah	Keramba	Waduk/ Rawa	Sungai	Genangan air	Jumlah
1	Prambanan	1,783,545	0	0	0	0	0	1,783,55
2	Gantiwarno	2,297,086	0	0	0	0	0	2,297,09
3	Wedi	627,068	0	0	0	0	0	627,07
4	Bayat	-	0	0	1,000	0	0	1,000,00
5	Cawas	18,862,171	0	0	0	0	0	18,862,17
6	Trucuk	764,335	0	0	0	0	0	764,34
7	Kalikotes	284,556	0	0	0	0	0	284,56
8	Kebonarum	2,537,000	0	0	0	0	0	2,537,00
9	Jogonalan	-	0	0	0	0	0	0,00
10	Manisrenggo	5,422,635	0	0	0	0	0	5,422,64
11	Karangnongko	3,478,351	0	0	0	0	0	3,478,35
12	Ngawen	6,870,901	0	0	0	452	0	7,322,72
13	Ceper	1,501,925	0	0	0	0	0	1,501,92
14	Pedan	1,550,421	0	0	0	0	0	1,550,42
15	Karangdowo	3,398,100	0	0	0	0	0	3,398,10
16	Juwiring	1,180,000	0	0	0	0	0	1,180,00
17	Wonosari	1,360,680	0	0	0	0	0	1,360,68
18	Delanggu	101,062	0	0	0	0	0	101,06
19	Polanharjo	17,272,700	0	0	0	0	0	17,272,70
20	Karanganom	530,878	0	0	0	0	0	530,88
21	Tulung	36,459,691	0	0	0	0	0	36,459,69
22	Jatinom	-	0	0	0	0	0	0,00
23	Kemalang	-	0	0	0	0	0	0,00
24	Klaten Selatan	1,208,775	0	0	0	0	0	1,208,78
25	Klaten Tengah	60,000	0	0	0	0	0	60,00
26	Klaten Utara	1,020,800	0	0	0	0	0	1,020,80

No,	Kecamatan	Kolam	Sawah	Karamba	Waduk/ Rawa	Sungai	Genangan air	Jumlah
	Jumlah 2020	108,572,68	0,00	0,00	1,000,00	451,82	0,00	110,024,49
	Jumlah 2019	137,655,71	0,00	0,00	1,000,00	0,00	0,00	138,655,71
	Jumlah 2018	134,814,75	0,00	0,00	0,00	1,170,00	0,00	135,984,75
	Jumlah 2017	154,433,50	230,00	4,335,79	0,00	920,000,00	120,000,00	1,198,999,29
	Jumlah 2016	393,831,39	1,255,00	4,975,37	0,00	1,540,000,00	0,00	1,940,061,76

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Berdasarkan tabel diatas dalam penebaran benih ikan tahun 2020 lebih rendah dibandingkan dengan 2019, sehingga mempengaruhi produksi perikanan budidaya dan perikanan tangkap juga lebih rendah yaitu sebesar 27,603,83 ton dan 184 ton, Berikut ini dapat dilihat sebaran komoditas pertanian, peternakan, dan perikanan yang dominan di Kabupaten Klaten.



Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Gambar 2.87.
Sebaran Komoditas Pertanian, Peternakan dan Perikanan Dominan di Kabupaten Klaten

3. Potensi Pariwisata

Kabupaten Klaten memiliki potensi pariwisata yang dapat dikembangkan lebih lanjut guna menggerakkan roda perekonomian masyarakat, Produk pariwisata di Kabupaten Klaten mencakup:

a. Jenis Kekayaan Wisata Alam

Jenis kekayaan wisata alam di Kabupaten Klaten antara lain: Deles Indah, Gunung Watu Prau, Pegunungan Kidul, Kawasan Keunikan batuan dan fosil, Umbul Pelem, Umbul brintik, Umbul Brondong, Umbul Manten dan sebagainya,

b. Jenis Kekayaan Wisata Budaya

Jenis kekayaan wisata budaya di Kabupaten Klaten antara lain: Candi Plaosan, Candi Lumbung, Candi Bubah, Candi Gana, Candi Sojiwan, Candi Merak, Candi Karangnongko, Candi Sewu, Masjid Jimbung, Masjid Golo, Masjid Jawi, Makam Syekh Domba, Makam Syekh Kewel, Makam Ki Ageng Gribig, Makam R, Ng, Ronggowarsito, Situs Kaliworo, dan Situs Wonoboyo, Makam Sunan Pandanaran, dan Makam Kyai Mlati,

c. Tempat Bersejarah

Tempat bersejarah yang ada di Kabupaten Klaten diantaranya: Monumen Juang 45 Klaten, Monumen PARATA MBKD Pos X-I, Museum Gula, Jawa Tengah di Jogonalan, Monumen Patung Kemerdekaan Soekarno, Goa Jepang dan Pesanggrahan Pakubuwono di Deles.

d. Jumlah Objek Wisata dan Pengunjung

Perkembangan jumlah obyek wisata dan pengunjung di Kabupaten Klaten dalam kurun waktu Tahun 2016-2020 menunjukkan peningkatan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut,

Tabel 2.126
Jumlah Obyek Wisata, Pengunjung, Lama Tinggal dan Rata-rata Pengeluaran Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) Tahun 2016-2020

Tahun	Jumlah Obyek Wisata (Objek)	Pengunjung (orang)		Lama Tinggal (Hari)		Rata-Rata Pengeluaran (Rp000)	
		Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman	Wisnus	Wisman
2016	82	377,409	372	1	1	750	1,500
2017	82	2,224,294	190,686	1	1	1,000	2,000
2018	82	2,483,945	222,373	1	1	1,000	2,000
2019	82	3,883,024	183,559	1	1	1,200	2,500
2020	82	1,399,167	22,199	1	1	1,000	1,500

Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten, 2020

Sebagaimana tabel di atas, dapat dilihat bahwa jumlah pengunjung obyek wisata pada tahun 2016-2020 mengalami kenaikan dan didominasi oleh wisatawan nusantara, sedangkan wisatawan mancanegara relatif lebih sedikit, Salah satu faktor kenaikan jumlah pengunjung disebabkan adanya penataan beberapa obyek wisata dan

meningkatnya jumlah pengunjung pada beberapa perayaan lokal seperti Maleman, Syawalan dan Yaqowiyu, Pada tahun 2020 jumlah kunjungan wisata mengalami penurunan, karena banyak objek wisata yang tidak beroperasi akibat dampak Pandemi Covid-19, selain itu untuk event- event pariwisata tingkat Kabupaten hanya diadakan secara terbatas di tingkat Desa dan Kecamatan.

Rata-rata lama tinggal wisatawan hanya satu hari baik itu wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara, hal ini disebabkan karena wisatawan hanya singgah atau berkunjung di tempat obyek wisata yang di tuju dan lebih menyukai menginap di Yogyakarta ataupun Surakarta, Untuk rata-rata pengeluaran wisatawan di Kabupaten Klaten relatif belum begitu besar, wisatawan nusantara berkisar antara Rp750,000 sampai Rp1,200,000 dan wisatawan mancanegara berkisar Rp1,500,000 sampai Rp2,500,000,-

Sumbangan sektor pariwisata terhadap PAD tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.127
Sumbangan Retribusi Pariwisata Terhadap PAD Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

No	Jenis Objek Wisata Perayaan	Target (Rp000)					Realisasi (Rp000)				
		2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	Perayaan Padusan	52,500	52,500	57,500	63,250	0	52,500	57,500	58,000	64,005	0
2	Perayaan Maleman	28,000	28,000	28,000	30,800	0	28,000	28,000	28,000	30,800	0
3	Perayaan Syawalan	51,700	51,700	53,000	58,300	0	51,700	52,500	53,000	58,500	0
4	Perayaan Yaqowiyu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Deles Indah	14,000	14,000	25,000	25,000	0	14,000	15,600	11,800	4,200	0
6	OMAC	600,000	600,000	1,680,500	1,730,500	450,000	609,976	739,919	953,500	1,689,580	265,788
7	Jombor Permai	65,000	65,000	68,000	74,800	400,000	65,495	68,050	71,750	67,175	423,235
8	Makam Pandanaran	134,000	114,000	180,000	180,000	65,600	143,300	144,500	143,700	161,700	100,400
9	Makam Ronggowar- sito	1,800	1,800	2,000	2,200	0	1,890	2,000	2,050	2,435	0
10	Pemandian Jolotundo	24,200	24,200	77,000	84,700	45,765	24,200	50,170	81,820	120,065	45,765
11	Candi Plaosan	5,000	50,000	100,000	110,000	0	53,883	80,454	220,227	153,027	0
12	Makam Ki Ageng Gribig	3,000	3,000	3,000	3,300	0	3,000	3,030	3,041	4,030	0
13	Lain-lain	21,350	21,350	21,350	21,350	10,000	23,850	13,450	10,980	28,880	207,629
Jumlah		1,000,550	1,025,550	2,295,350	2,384,200	971,365	1,071,794	1,255,173	1,637,868	2,384,397	1,042,817

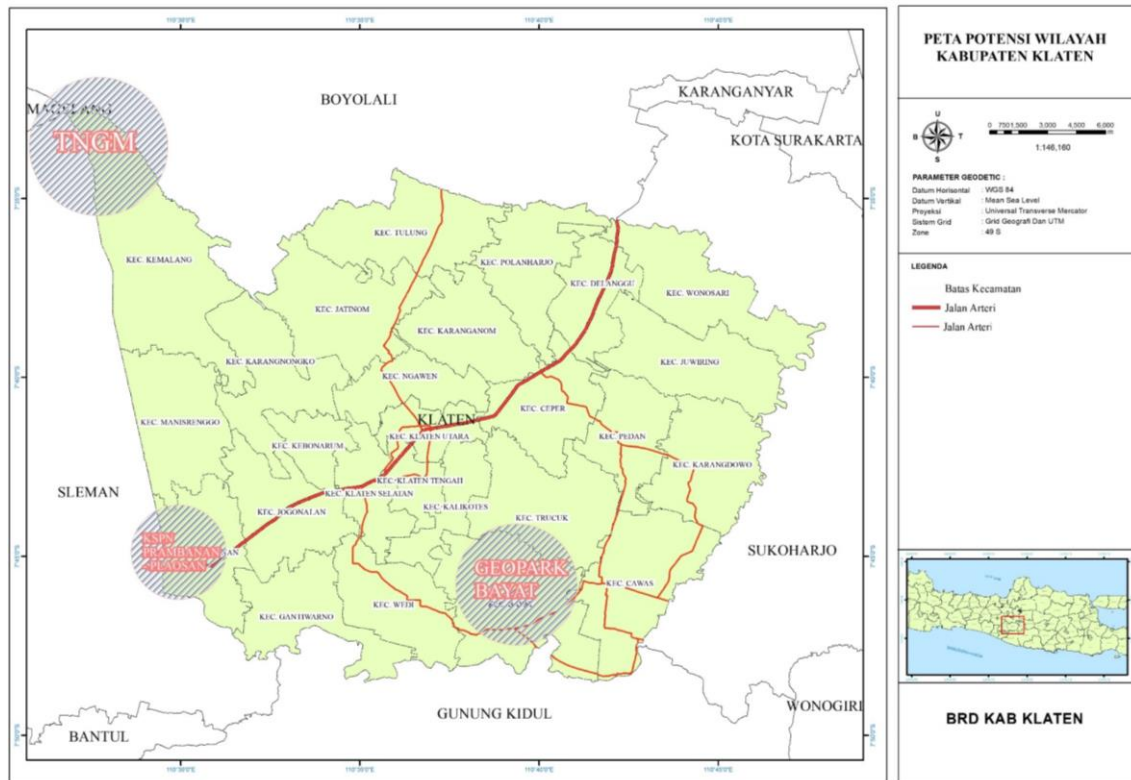
Sumber: Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Klaten , 2020

Sebagaimana tabel tersebut di atas, terlihat bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD pada tahun 2016–2020 mengalami fluktuasi dimana realisasi pendapatan dibandingkan dengan mencapai rata-rata diatas target, hanya pada tahun 2018 realisasi tidak memenuhi target. Permasalahan yang dijumpai dalam pengembangan pariwisata di Kabupaten Klaten adalah isu pelestarian lingkungan belum menjadi perhatian dalam pembangunan destinasi, petugas pendamping/ *guide* wisatawan belum optimal, serta dengan adanya wabah Pandemi Covid-19 sangat berdampak pada sektor pariwisata dan ekonomi kreatif yang melibatkan berbagai sektor, baik sektor pariwisata, pertanian, perdagangan, industri, tenaga kerja dan jasa (perhotelan, restoran, transportasi dll), yang otomatis akan mempengaruhi tingkat kunjungan dan lama tinggal wisatawan baik wisatawan domestik maupun mancanegara, menurunnya Pendapatan Asli Daerah maupun melambatnya tingkat pertumbuhan ekonomi serta meningkatnya angka pengangguran bagi pelaku industri pariwisata dan pelaku usaha, dikarenakan menurunnya tingkat pendapatan masyarakat serta situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan untuk membuka tempat wisata maupun berwisata. Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya pelatihan-pelatihan (pelatihan *guide*, manajemen pariwisata, penguatan kelembagaan, pengembangan dan peningkatan kualitas SDM dll), peningkatan promosi pariwisata, penataan kembali obyek wisata berbasis kawasan, penguatan kelembagaan kepariwisataan (Pokdarwis, ASITA, Travel agent, *Tourist Information Centre*), menggelar event-event unggulan daerah yang spektakuler, perlu adanya pemaketan pariwisata serta pengembangan desa wisata, Potensi pariwisata di Kabupaten Klaten meliputi:

- a. Kawasan strategis pariwisata nasional Prambanan dan sekitarnya,
- b. Kawasan Taman Nasional Gunung Merapi
- c. Poros budaya kraton Jogya dan Surakarta
- d. Klaten kota seribu umbul (mata air) sabuk mata air lereng merapi, potensi pengembangan wisata air
- e. Sumbu alam Merapi gunung sewu (bagian dari Cagar Biosfer UNESCO Merbabu-Merapi-Gunung Sewu), Rowo Jombor Purba dan geologi bayat sebagai salah satu batuan dasar /basement pulau jawa.

Dalam rangka pelestarian (konservasi), edukasi dan pembangunan perekonomian masyarakat secara berkelanjutan, warisan Geologi Bayat diusulkan untuk ditetapkan sebagai taman bumi (Geopark), sesuai Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2019 tentang Taman Bumi (Geopark), Aspek Pendukung Pengembangan Geopark Bayat meliputi:

- a. Keunikan Geologi Bayat,
- b. Keindahan alam Bayat,
- c. Lokasi tidak terlalu jauh dari Kota (Jogjakarta maupun Solo),
- d. Kampus Lapangan Geologi,
- e. Sentra Batik di Bayat,
- f. Sentra Kerajinan Keramik Wedi-Bayat,
- g. Termasuk dalam Kawasan Strategis Klaten- Sukoharjo - Wonosari (Kesukosari),
- h. Dekat dengan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (Prambanan)
- i. Rencana Revitalisasi Rowo Jombor (Perpres 79 Th 2019),



Sumber : DRD Kab Klaten, 2020

Gambar 2.88.
Peta Potensi Pariwisata Unggulan di Kabupaten Klaten

Potensi desa wisata, meliputi:

Kecamatan	Desa Wisata
Bayat	<ul style="list-style-type: none"> Banyuripan: Wisata Budaya Gunung Gajah: Wisata Alam Jotangan: Wisata Alam Jarum: Wisata Budaya Kebon: Wisata Budaya Krakitan: Wisata Alam Ngerangan: Wisata Budaya Paseban: Wisata Religi
Cawas	Tlingsing: Wisata Budaya
Ceper	Pokak: Wisata Alam
Jatinom	<ul style="list-style-type: none"> Jatinom: Wisata Budaya Socokangsi: Wisata Alam
Juwiring	Kenaiban: Wisata Budaya, Wisata Alam
Kalikotes	Gemblegan: Wisata Budaya
Karanganom	<ul style="list-style-type: none"> Beku: Wisata Alam Jambeyan: Wisata Alam Soropaten: Wisata Budaya
Karangnongko	Karangnongko: Wisata Budaya
Kebonarum	<ul style="list-style-type: none"> Basin: Wisata Alam Malang Jiwan: Wisata Alam Pluneng: Wisata Alam
Kemalang	<ul style="list-style-type: none"> Balerante: Wisata Alam Panggang: Wisata Alam Sidorejo: Wisata Alam Tegalmulyo: Wisata Budaya, Wisata Alam, Wisata

Kecamatan	Desa Wisata
	Kuliner
Klaten Selatan	<ul style="list-style-type: none"> Danguran: Wisata Budaya Nglinggi: Wisata Alam
Klaten Tengah	Jomboran: Wisata Alam
Ngawen	Soran: Wisata Alam
Polanharjo	<ul style="list-style-type: none"> Kauman: Wisata Buatan Nganjat: Wisata Alam Ponggok: Wisata Alam Sidowayah: Wisata Alam, Wisata Buatan Wangen: Wisata Alam
Prambanan	<ul style="list-style-type: none"> Brajan: Wisata Alam Bugisan: Wisata Budaya Kebondalem Kidul: Wisata Budaya Pereng: Wisata Alam
Tulung	<ul style="list-style-type: none"> Bono: Wisata Buatan Wunut: Wisata Alam
Trucuk	Palar: Wisata Religi
Wedi	Melikan: Wisata Edukasi
Wonosari	Sidowarno: Wisata Budaya

Kabupaten Klaten memiliki banyak potensi desa wisata, berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah nomor 53 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 2 Tahun 2019 tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Provinsi Jawa Tengah, desa wisata ditetapkan dengan Ketetapan gubernur atau bupati/ walikota dan diklasifikasikan menjadi desa wisata maju, berkembang atau rintisan berdasarkan penilaian tim penetapan desa wisata.

Desa wisata rintisan adalah desa wisata yang berpotensi dapat dikembangkan menjadi desa wisata dengan sarana, prasarana dan fasilitas wisata yang terbatas, serta kesadaran masyarakat terhadap potensi wisata mulai tumbuh, mulai dikunjungi wisatawan dan sudah ada pengelolanya. Desa wisata berkembang adalah desa wisata yang mengintegrasikan berbagai potensi alam, budaya dan hasil buatan manusia menjadi destinasi wisata, sudah mulai dikenal dan dikunjungi wisatawan dengan sarana dan prasarana yang perlu dikembangkan serta telah menciptakan aktifitas ekonomi masyarakat setempat dan memiliki tata kelola lembaga yang baik.

Desa wisata maju adalah desa wisata yang sudah menjadi destinasi wisata yang dikenal dan banyak dikunjungi masyarakat dengan sarana, prasarana dan fasilitas pariwisata memadai dan mampu melakukan aktifitas pengembangan kapasitas (SDM, Usaha Pariwisata, Kelembagaan, Produk). Berikut desa wisata di Kabupaten Klaten yang sudah di tetapkan dengan SK Bupati.

Tabel 2.128
Desa Wisata Ber SK Bupati di Kabupaten Klaten

Kecamatan	Desa Wisata	No SK	Tanggal SK	Klasifikasi
Bayat	Desa Jarum	556/254	22/09/2020	Maju
	Desa Ngerangan	556/249	11/09/2020	Berkembang
	Desa Gununggajah	556/336	25/11/2020	Berkembang
	Desa Krakitan	556/43	03/03/2021	Rintisan
Ceper	Desa Pokak	556/252	22/09/2020	Rintisan

Kecamatan	Desa Wisata	No SK	Tanggal SK	Klasifikasi
Jatinom	Desa Glagah	556/45	03/03/2021	Rintisan
Juwiring	Desa Tanjung	556/44	03/03/2021	Rintisan
Kalikotes	Desa Jimbung	556/39	03/03/2021	Rintisan
Karangnongko	Desa Karangnongko	556/43	03/03/2021	Rintisan
Kebonarum	Desa Ngrundul	556/243	11/09/2020	Berkembang
	Desa Malangjiwan	556/335	25/11/2020	Berkembang
Kemalang	Desa Tegalmulyo	556/245	11/09/2020	Rintisan
	Desa Tlogowatu	556/246	11/09/2020	Rintisan
Klaten Selatan	Desa Nglinggi	556/40	03/03/2021	Rintisan
Polanharjo	Desa Ponggok	556/244	11/09/2020	Maju
	Desa Sidowayah	556/41	03/03/2021	Berkembang
Prambanan	Desa Kebondalem Kidul	556/247	11/09/2020	Maju
	Desa Bugisan	556/253	22/09/2020	Maju
Wedi	Desa Melikan	556/248	11/09/2020	Rintisan

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020

Desa wisata tersebut menjadi salah satu klaster pengembangan Usaha Kecil Menengah (UMKM) yang dikembangkan di Kabupaten Klaten, bersama dengan 11 Klaster UMKM lainnya yaitu klaster lurik, batik, keramik, makanan olahan, klaster lereng merapi, minapolitan, klaster logam, klaster mebel, klaster konveksi, klaster handicraft dan klaster desa wisata.

Obyek wisata lain yang ada di Kabupaten Klaten meliputi kolam renang, pemancingan, candi, makam, pemandangan alam, museum dan lainnya yang tersebar di beberapa wilayah di Kabupaten Klaten. Obyek wisata kolam renang dan pemancingan yang paling banyak di Kabupaten Klaten sebanyak 58 obyek wisata dengan jumlah terbanyak terdapat di Kecamatan Polanharjo yaitu 31 obyek wisata, Obyek wisata berupa candi paling banyak terdapat di Kecamatan Prambanan. Sebaran obyek wisata yang ada di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.129
Obyek Wisata Di Kabupaten Klaten

No	Kecamatan	Kolam Rng, Pemancingan	Candi Purbakala	Makam	Pemandangan Alam	Museum	Lainnya
1	Prambanan	1	7	-	1	1	2
2	Gantiwarno	-	-	-	-	-	-
3	Wedi	1	-	-	-	1	1
4	Bayat	1	-	5	5	1	3
5	Cawas	-	-	2	-	-	-
6	Trucuk	2	-	5	-	-	-
7	Kalikotes	1	-	-	-	-	-
8	Kebonarum	5	-	-	-	-	2
9	Jogonalan	1	-	-	-	1	-
10	Manisrenggo	-	-	-	-	-	-
11	Karangnongko	-	1	-	1	-	-
12	Ngawen	2	-	5	-	-	-
13	Ceper	-	-	-	-	-	1
14	Pedan	2	-	1	-	-	-
15	Karangdowo	-	-	-	-	-	-
16	Juwiring	-	-	-	-	-	-
17	Wonosari	-	-	-	-	-	-
18	Delanggu	1	-	2	-	-	-
19	Polanharjo	28	-	2	-	-	1
20	Karanganom	2	-	2	-	-	-
21	Tulung	6	-	1	-	-	-

No	Kecamatan	Kolam Rng, Pemancingan	Candi Purbakala	Makam	Pemandangan Alam	Museum	Lainnya
22	Jatinom	-	-	1	1	-	-
23	Kemalang	-	-	1	-	-	2
24	Klaten Selatan	2	-	-	-	-	-
25	Klaten Tengah	-	-	1	-	-	-
26	Klaten Utara	3	-	2	-	-	-
Jumlah		58	8	30	8	4	12

Sumber : Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan, 2021, diolah

Potensi pariwisata yang cukup besar di Kabupaten Klaten menggerakkan masyarakat untuk berusaha pada sektor pariwisata dengan mengembangkan biro perjalanan, hote, home stay, dan rumah makan, Sampai dengan tahun 2020 jumlah usaha yang bergerak dalam bidang pariwisata di Kabupaten Klaten mencapai 371, dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.130
Jumlah Biro Perjalanan Wisata, Hotel, Home Stay Dan Rumah Makan di Kabupaten Klaten Berdasarkan Kecamatan di Tahun 2020

No	Kecamatan	Biro Perjalanan Wisata	Hotel	Home Stay	Rumah Makan	Jumlah
1	Prambanan		26	10	17	53
2	Gantiwarno				3	3
3	Wedi	1		5	6	12
4	Bayat	1		37	21	59
5	Cawas			5	4	9
6	Trucuk	3			3	6
7	Kalikotes				2	2
8	Kebonarum	1			4	5
9	Jogonalan		2		6	8
10	Manisrenggo				12	12
11	Karangnongko				3	3
12	Ngawen	1			6	7
13	Ceper	3	3		11	17
14	Pedan	1			9	10
15	Karangdowo				2	2
16	Juwiring	1			2	3
17	Wonosari		1		4	5
18	Delanggu		1		10	11
19	Polanharjo			14	15	20
20	Karanganom				5	5
21	Tulung				6	6
22	Jatinom	1			9	10
23	Kemalang		2	1	3	3
24	Klaten Selatan	5	2	2	11	20
25	Klaten Tengah	5	13		18	36
26	Klaten Utara	8	3		33	44

No	Kecamatan	Biro Perjalanan Wisata	Hotel	Home Stay	Rumah Makan	Jumlah
Jumlah		31	53	74	225	371

Sumber : Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda dan Olah Raga, 2020, diolah

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

1. Perhubungan

Peningkatan jumlah sarana angkutan publik, menuntut ketersediaan prasarana perhubungan jalan yang memadai untuk pengangkutan barang dan jasa. Adapun kondisi sarana perhubungan pada saat salah satunya dicerminkan dari keberadaan sarana transportasi darat yang terdiri dari mobil barang, kendaraan khusus dan angkutan publik.

Tabel 2.131
Jumlah Sarana Angkutan (Umum dan Pribadi) di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Jenis Kendaraan	2016	2017	2018	2019	2020
Mobil Barang	10,657	9,622	9,001	8,553	8,072
Mobil Bus					
Umum	464	397	395	407	391
Bus Besar	44	65	79	63	91
Bus Sedang	131	261	211	224	215
Bus Kecil	289	71	105	120	85
Bukan Umum	137	105	114	116	97
Kendaraan khusus/ Alat Berat	9	6	6	32	7
Jumlah	11,731	10,527	9,911	9,108	8,567

Sumber : Dinas Perubungan Kabupaten Klaten, 2021

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 34 Tahun 2006 tentang Jalan dalam pasal 2 menyebutkan: 1) jalan dilengkapi dengan perlengkapan jalan; 2) perlengkapan jalan terdiri atas perlengkapan yang berkaitan langsung dan berkaitan tidak langsung dengan pengguna jalan. Perlengkapan jalan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan adalah bangunan atau alat yang dimaksudkan untuk keselamatan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta kemudahan bagi pengguna jalan dalam berlalu lintas. Perlengkapan jalan ini meliputi: rambu-rambu (termasuk nomor ruas jalan), marka jalan, Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL), lampu jalan, alat pengendali dan alat pengamanan pengguna jalan, serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada di jalan dan di luar jalan seperti tempat parkir dan halte bus.

Sarana dan prasarana fasilitas perlengkapan jalan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.132
Sarana dan Prasarana Fasilitas Perlengkapan Jalan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	Persentase
				2016	2017	2018	2019	2020		
1	Rambu lalu lintas biasa	3,979	buah	81	247	100	227	227	882	22,17
2	Rambu RPPJ	200	buah	11	12	13	0	0	36	18,00

No	Jenis Rambu	Kebutuhan	Satuan	Terpasang					Total Terpasang	Persentase
				2016	2017	2018	2019	2020		
3	Rambu Tipe F	100	buah	0	12	5	0	0	17	17,00
4	Marka Jalan	34,965	m ²	0	8,280	9,92	465	5,715	24,385	69,74
5	Traffic Light	40	unit	0	0	0	2	0	2	5,00
6	Guardrail	3,000	m	1,060	520	468	200	104	2,353	78,40
7	Paku marka/ mata kucing	97,125	buah	0	0	0	0	0	0	0,00
8	Traffic cone	500	buah	40	0	0	0	0	40	8,00
9	Deliniator	10,000	buah	0	0	0	0	0	0	0,00
10	Cermin Tikungan	50	buah	10	13	10	30	22	85	170,00
11	Zona Selamat sekolah	50	unit	0	0	0	5	0	5	10,00
12	Lampu kedip	20	buah	5	0	0	6	0	11	55,00
13	Rambu elektronik	40	unit	2	6	0	0	0	8	20,00
14	Water Barrier	100	buah	0	0	26	20	20	66	66,00

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

Jumlah terminal angkutan penumpang umum/sub terminal di Kabupaten untuk mendukung transportasi darat sebanyak 8 lokasi, terdiri dari 1 terminal Tipe A yang pengelolaannya menjadi kewenangan pemerintah provinsi dan 7 terminal Tipe C yang dikelola oleh pemerintah daerah. Data terminal angkutan penumpang umum pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.133
Data Terminal Angkutan Penumpang Umum
Kabupaten Klaten Tahun 2020

No	Nama Terminal	Alamat	Tipe	Luas
1	Ir Soekarno	Klaten Tengah	A	32.760 m ²
2	Penggung	Penggung, Ceper	C	4500 m ²
3	Teloyo	Teloyo, Wonosari	C	3310 m ²
4	Pasar Klaten	Klaten Tengah	C	600 m ²
5	Bendogantungan	Bendogantungan, Klaten Selatan	C	3168 m ²
6	Tulung	Tulung	C	400 m ²
7	Manisrenggo	Manisrenggo	C	1785 m ²
8	Delanggu	Karang	C	7000 m ²

Sumber : Dinas Perhubungan Kabupaten Klaten, 2021

2. Pasar

Pasar merupakan sarana pendukung keberhasilan pembangunan ekonomi daerah dalam melaksanakan fungsinya sebagai sarana distribusi, penyeimbang harga dan promosi produk daerah, sedangkan fasilitas pasar di Kabupaten Klaten menurut kepemilikannya dapat dibedakan menjadi: 1) milik pemerintah; 2) milik desa, dan 3) milik perorangan. Perkembangan jumlah pasar kios, los dan pedagang tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.134
Jumlah Pasar Kios, Los dan Pedagang Menurut Kecamatan
Di Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Kecamatan	Pasar			Jumlah		
	Pemerintahan	Desa	Perorangan	Kios	Los	Pedagang
01 Prambanan	2	1	-	101	9	169
02 Gantiwarno	2	1	-	39	18	93
03 Wedi	3	2	-	248	54	803
04 Bayat	3	2	-	276	30	923
05 Cawas	4	4	-	109	23	229
06 Trucuk	2	3	-	118	80	384
07 Kalikotes	1	2	-	20	8	109
08 Kebonarum	1	-	-	8	-	5
09 Jogonalan	1	2	-	60	13	266
10 Manisrenggo	1	2	-	74	5	106
11 Karangnongko	1	-	-	76	4	94
12 Ngawen	1	2	-	20	6	114
13 Ceper	-	1	1	224	53	456
14 Pedan	1	1	-	75	5	281
15 Karangdowo	1	2	-	173	1	456
16 Juwiring	3	1	-	174	6	283
17 Wonosari	2	1	-	50	2	140
18 Delanggu	1	-	-	321	2	208
19 Polanharjo	-	1	-	18	4	5
20 Karanganom	3	-	-	91	8	396
21 Tulung	2	5	-	51	9	122
22 Jatinom	2	3	-	189	6	642
23 Kemalang	2	-	-	2	71	1,032
24 Klaten Selatan	1	-	-	36	2	138
25 Klaten Tengah	7	-	-	634	16	1,987
26 Klaten Utara	3	-	-	61	13	160
Jumlah 2020	50	36	1	3,248	448	9,601
2019	51	35	1	3,248	524	11,752
2018	49	33	2	2,163	922	10,532
2017	49	33	1	5,859	922	17,981
2016	50	41	2	2,993	791	11,293

Sumber : Dinas Perdagangan, Koperasi dan UMKM dan Dispermasdes Kabupaten Klaten, 2020

3. Jaringan Transportasi

Panjang jalan berdasarkan jenis jalan menurut kecamatan di Kabupaten Klaten meliputi: 1) jalan provinsi; 2) jalan kabupaten; 3) jalan poros desa, dan (4) jalan lingkungan. Dari tabel dibawah ini dapat dilihat kecamatan-kecamatan yang dilalui jalan provinsi, yaitu: 1) Kecamatan Cawas 8,100 km; 2) Kecamatan Pedan 6,100 km; 3) Kecamatan Tulung 6,000 km; serta 4) Kecamatan Ceper 5,000 km, Jenis/ kategori jalan kabupaten yang tersebar di seluruh kecamatan adalah 1) Kecamatan Gantiwarno 47,540 km; 2) Kecamatan Klaten Tengah 42,880 km; 3) Kecamatan Prambanan 39,140 km; dan 4) Kecamatan Karangnongko 38,320 km.

Tabel 2.135
Panjang Jalan Berdasar Jenis Jalan Menurut Kecamatan
Tahun 2019 (dalam km)

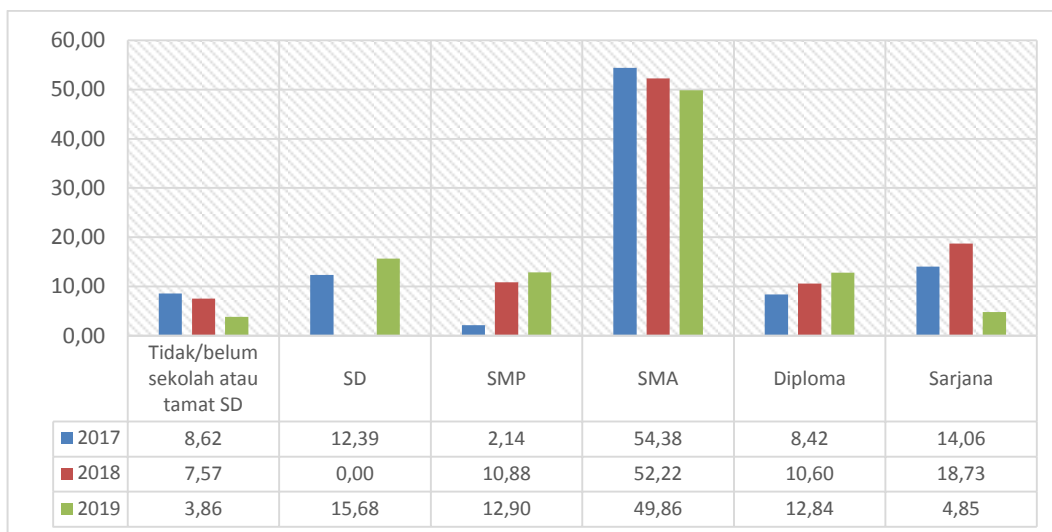
No	Kecamatan	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Poros Desa	Jalan Lingkungan
1	Prambanan	-	39,140	78,580	43,350
2	Gantiwarno	-	47,540	136,950	27,900
3	Wedi	-	24,880	88,068	48,160
4	Bayat	-	25,630	87,815	93,130
5	Cawas	8,100	37,180	101,215	87,335
6	Trucuk	0,940	36,920	104,635	98,287
7	Kalikotes	-	20,580	84,688	74,373
8	Kebonarum	-	20,440	42,825	10,725
9	Jogonalan	-	25,970	81,141	65,710
10	Manisrenggo	-	28,430	105,840	51,050
11	Karangngongko	-	38,320	74,540	37,735
12	Ngawen	2,900	25,220	64,460	58,700
13	Ceper	5,000	16,370	81,570	77,255
14	Pedan	6,100	25,210	64,520	75,005
15	Karangdowo	-	22,140	107,315	37,319
16	Juwiring	-	31,190	121,645	83,074
17	Wonosari	-	31,020	54,810	57,820
18	Delanggu	-	20,920	57,543	57,415
19	Polanharjo	-	28,610	95,266	56,275
20	Karanganom	-	26,200	100,650	81,088
21	Tulung	6,000	37,370	107,330	79,390
22	Jatinom	4,400	33,060	83,550	98,780
23	Kemalang	-	35,810	137,450	26,100
24	Klaten Selatan	-	26,700	59,280	30,404
25	Klaten Tengah	-	42,880	24,850	13,460
26	Klaten Utara	1,400	29,230	24,500	24,770
	JUMLAH	34,840	776,960	2,171,006	1,494,610

Sumber: Kabupaten Klaten Dalam Angka, 2019

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia

1. Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Pendidikan Yang Ditamatkan

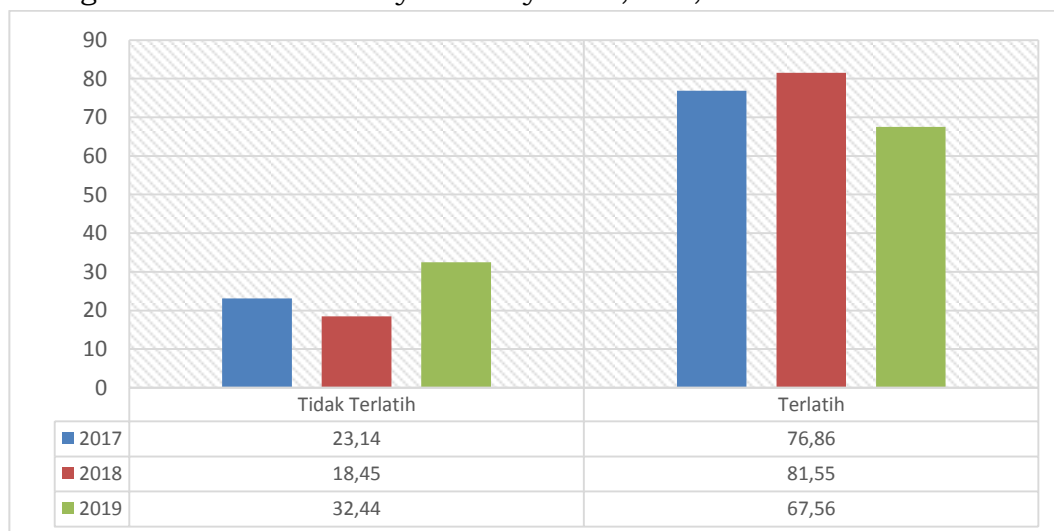
Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Kabupaten Klaten di dominasi penduduk dengan tingkat pendidikan SMA ditahun 2019 sebesar 49,86% sedikit menurun jika dibandingkan dengan tahun 2017 mencapai 54,38%. Porsi paling banyak kedua ditahun 2019 ditempati oleh penduduk yang memiliki tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) sebesar 15,68% kondisi tersebut jika dibandingkan dengan tahun 2017 sebesar 12,39%. Sedangkan persentase paling rendah dipegang oleh penduduk tingkat pendidikan tidak/belum sekolah atau tamat SD ditahun 2019 sebesar 3,86% turun dibanding tahun sebelumnya sebesar 8,62%. Salah satu cara mengatasi dengan meningkatkan pelatihan-pelatihan melalui Balai Latihan Kerja (BLK).



Sumber: Sakernas, 2021

Gambar 2.89.
Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tingkat Pendidikan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

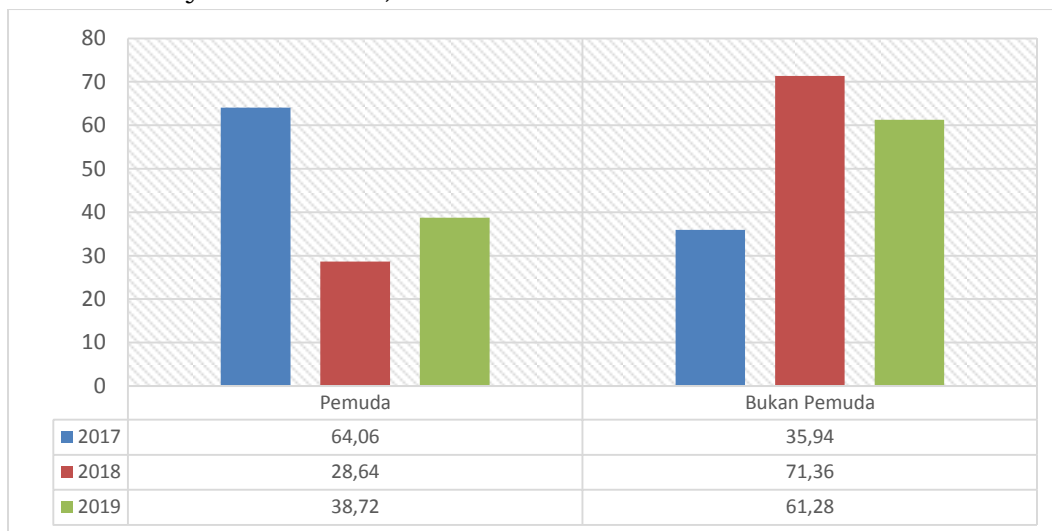
Persentase penduduk menganggur terbuka berdasarkan keterampilan ditahun 2019 yang terlatih sebanyak 67,56% menurun dibanding tahun 2018 sebanyak 81,55%. Sementara penduduk yang tidak mendapatkan pelatihan di tahun 2019 sebanyak 32,44% meningkat dibandingkan tahun sebelumnya sebanyak 18,45%,



Sumber: Sakernas, 2021

Gambar 2.90.
Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Keterampilan Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

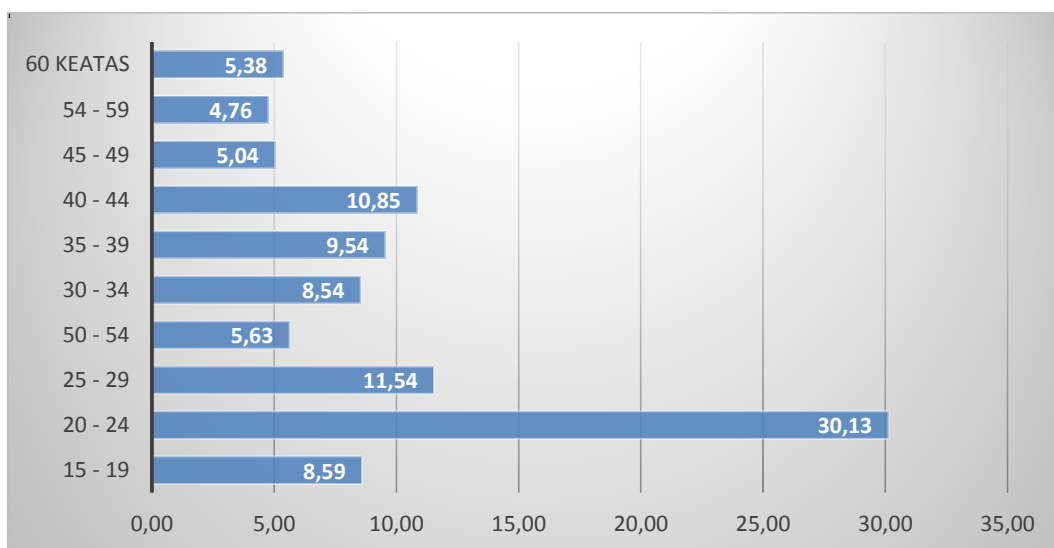
Berdasarkan klasifikasi pemuda, persentase penduduk menganggur terbuka, pada tahun 2019 didominasi oleh penduduk pada rentang usia bukan pemuda (> 30 tahun) sebesar 61,28% menurun dibandingkan tahun 2018 sebesar 71,36%. Sementara penduduk menganggur terbuka berdasarkan klasifikasi pemuda (usia 16-30 tahun) ditahun 2019 tercatat sebesar 38,72% meningkat dibandingkan sebelumnya sebesar 28,64%.



Sumber: Sakernas, 2021

Gambar 2.91.
Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Pemuda Di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

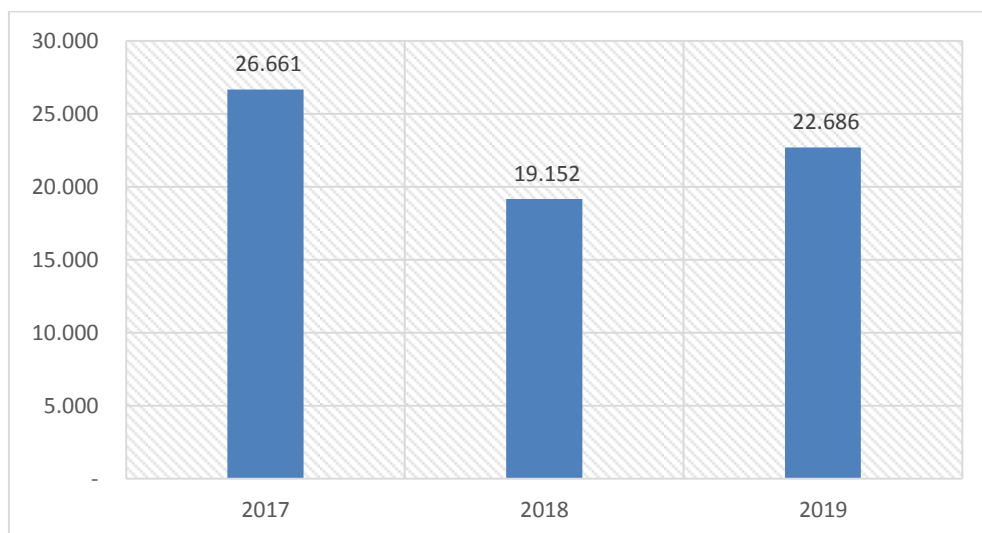
Persentase penduduk menganggur terbuka berdasarkan klasifikasi kelompok umur, terbanyak ditahun 2019 berada di usia 20-24 tahun sebesar 30,13%, disusul kelompok usia 25-29 tahun sebesar 11,54%. Sementara untuk kelompok umur terendah di usia 54-49 tahun sebesar 4,76%. Selengkapnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini:



Sumber: Sakernas, 2021

Gambar 2.92.
Persentase Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Klasifikasi Kelompok Umur di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

Jumlah penduduk menganggur terbuka tidak ada klasifikasi ditahun 2019 sebanyak 22,686 jiwa, meningkat dibandingkan tahun 2018 sebesar 19,152 jiwa,



Sumber: Sakernas, 2021

Gambar 2.93.
Jumlah Penduduk Menganggur Terbuka Berdasarkan Tidak Ada Klasifikasi di Kabupaten Klaten Tahun 2017-2019

2. Tingkat Ketergantungan (Rasio Ketergantungan)

Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 mengalami pergeseran namun tidak signifikan, yaitu pada tahun 2016 sebesar 43,46% menjadi 45,49% di tahun 2020. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk usia produktif paling tidak menanggung beban 45 orang usia tidak produktif.

Tabel 2.136
Rasio Beban Tanggungan (RBT) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Penduduk Kelompok Umur			Jumlah Penduduk	Persentase RBT
	0-14	15-64	65+		
2016	267,469	906,650	126,587	1,300,706	43,46%
2017	275,208	907,665	125,839	1,308,712	44,18%
2018	263,474	911,174	142,232	1,316,880	44,53%
2019	272,466	903,579	147,564	1,323,609	46,49%
2020	269,329	912,459	145,789	1,327,577	45,49%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021

Jumlah Kepala Keluarga (KK) yang semula sejumlah 457,224 KK pada Tahun 2019 menjadi 472,569 KK pada Tahun 2020 (atau bertambah sebanyak 15,345 KK). Hal ini disebabkan adanya penertiban administrasi kependudukan (setiap penduduk yang sudah menikah wajib memiliki KK tersendiri).

Tabel 2.137
Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Tahun	Kepala Keluarga (KK)
2016	420,819
2017	436,506

Tahun	Kepala Keluarga (KK)
2018	431,153
2019	457,224
2020	472,569

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Klaten, 2021

2.5. Analisis Capaian Hasil Kinerja RPJMD Tahun 2016-2021

Berdasarkan hasil evaluasi RPJMD sampai dengan Tahun 2020 diperoleh bahwa jumlah program RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 sejumlah 164 program dan jumlah program RKPD Tahun 2020 sejumlah program. Dikarenakan adanya kebijakan dari Pemerintah Pusat dalam melaksanakan ketentuan Pasal 232 ayat (1) UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah yang kemudian terbit Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, maka dalam RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 terdapat 164 (seratus enam puluh empat) program yang dijabarkan dalam 335 indikator program RPJMD 2016-2021. Adapun capaian indikator program dalam RPJMD 2016-2021 sampai dengan tahun anggaran 2020 sesuai dengan Permendagri 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

- a. Tercapai, sejumlah 138 Indikator atau sebesar 40,82,76%;
- b. Akan tercapai, sejumlah 51 indikator atau sebesar 15,08;
- c. Perlu upaya keras, sejumlah 149 indikator atau sebesar 44,08.

Sampai dengan triwulan IV tahun 2020 terdapat indikator yang belum tercapai dikarenakan adanya Pandemi Covid 19 yang berpengaruh terhadap kondisi perekonomian nasional dan regional. Selain itu upaya pencapaian target yang tidak maksimal dikarenakan adanya reconfusing dan realokasi anggaran untuk pencegahan dan penanganan wabah Pandemi Covid-19. Secara lengkap hasil evaluasi terhadap capaian indikator program di RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.138
Capaian Indikator Kinerja RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR																			
1	URUSAN PENDIDIKAN																		
1	1)	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah anak umur 0-6 tahun yang mengikuti program PAUD	48.430	48.025	43.027	43.328	43.631	43.937	48.025	43.027	44.271	49.140	49.140	43.937	49.140	111,84	Tercapai	
2			Angka Partisipasi Kasar PAUD	92,19	92,37	92,48	92,59	92,79	92,99	92,37	78,61	81,82	90	90,33	92,99	90,33	97,14	Akan Tercapai	
3	2)	Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	94,53	94,53	95,03	97,65	97,85	98,05	105,23	97,45	102,75	98,54	98,54	98,05	98,54	100,50	Tercapai	
4			Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	87,58	87,58	88,08	91,13	91,33	91,53	97,57	90,93	98,37	98,31	98,31	91,53	98,31	107,41	Tercapai	
5			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	81,60	91,26	86,84	87,04	87,24	87,44	91,26	86,84	90,84	88,30	88,3	87,44	88,30	100,98	Tercapai	
6			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	63,94	72,77	68,22	68,42	68,62	68,82	72,77	68,22	73,27	73,05	73,05	68,82	73,05	106,15	Tercapai	
7			Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,64	96,64	96,65	88,48	88,68	88,88	92,43	88,28	95,48	97,73	97,73	88,88	97,73	109,96	Tercapai	
8			Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,02	0,02	0,02	0,03	0,02	0,01	0,03	0,04	0,02	0,01	0,01	0,01	0,01	100,00	Tercapai	
9			Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0,10	0,1	0,1	0,18	0,13	0,08	0,08	0,23	0,06	0,05	0,05	0,08	0,05	62,50	Perlu Upaya Keras	
10			Angka Kelulusan SD/MI	97,78	97,78	97,79	98,47	98,27	98,87	99,34	98,27	98,19	99,99	99,99	98,87	99,99	101,13	Tercapai	
11			Angka Kelulusan SMP/MTs	95,55	95,55	95,65	98,13	98,15	98,17	97,73	98,11	96,57	99,14	99,14	98,17	99,14	100,99	Tercapai	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	12	3)	Pendidikan Non Formal	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,78	99,57	99,62	99,72	99,73	99,74	99,57	99,62	99,57	100	99,66	99,74	99,66	99,92	Akan Tercapai
	13	4)	Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Prosentase Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D4	86,42	87,83	76,97	79,97	82,97	86	87,83	76,97	79,97	87	87,07	86,00	87,07	101,24	Tercapai
	14			Prosentase Kepala Sekolah SD/MI berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	98,08	98,76	98,27	98,47	98,67	98,87	98,76	98,27	99,00	99	99,17	98,87	99,17	100,30	Tercapai
	15			Prosentase Kepala Sekolah SMP/MTs berkualifikasi S1/D4 dan bersertifikat Kepala Sekolah	96,58	96,78	93,55	93,75	93,95	94,15	96,78	93,55	96,92	97	97,1	94,15	97,10	103,13	Tercapai
	16			Rasio Guru terhadap murid jenjang SD/ MI	1 : 12	1 : 13	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1:13	1:14	01.13	0,05	0,05	1 : 15	0,05	98,67	Akan Tercapai
	17			Rasio Guru terhadap murid jenjang SMP/ MTs	1 : 11	1 : 12	1 : 14	1 : 15	1 : 15	1 : 15	1:12	1:14	01.11	0,05	0,05	1 : 15	0,05	96,00	Akan Tercapai
	18	5)	Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	96,64	92,43	88,28	88,78	89,28	89,78	92,43	88,28	95,48	98	97,73	89,78	97,73	108,85	Tercapai
	19	6)	Pengembangan budaya dan pembinaan perpustakaan	Penduduk yang berusia > 15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	99,78	99,57	99,62	99,72	98,73	98,74	99,57	99,62	99,57	100	99,65	98,74	99,65	100,92	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	20	7)	Pengadaan bantuan Operasional Sekolah SD dan SMP	Penyediaan pendanaan biaya operasional sekolah	144.988	143.598	144.998	143.929	145.256	146.656	143.598	144.998	143.929	141.263	138.459	146.656	138.459	94,41	Akan Tercapai
2	URUSAN KESEHATAN																		
	1	1)	Upaya Kesehatan Masyarakat	Cakupan Pelayanan Ibu hamil (K4)	91,72	95	96	97	98	99	92,84	92,85	92,51	93,27	57,37	99,00	57,37	57,95	Perlu Upaya Keras
	2			Cakupan Pelayanan Ibu Nifas (KF3)	96,3	96	97	98	99	100	96,98	97,2	97,54	97,55	60,21	100,00	60,21	60,21	Perlu Upaya Keras
	3			Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi baru lahir (KN3)	95,72	96	97	98	99	100	97,59	97,57	98,05	97,79	60,99	100,00	60,99	60,99	Perlu Upaya Keras
	4			Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	90,79	94	95	96	97	98	94	95,25	96,17	95,77	55,08	98,00	55,08	56,20	Perlu Upaya Keras
	5			Cakupan skrining Kesehatan pada anak pendidikan dasar (penjaringan kesehatan)	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6			Cakupan Kunjungan Bayi	98,96	90	99	99,2	99,4	99,6	96,04	99,67	98,36	98,07	62,37	99,60	62,37	62,62	Perlu Upaya Keras
	7			Cakupan BBLR	5,22	5,25	5,14	5,1	5,06	5,02	5,25	5,14	5,34	5,55	6,1	5,02	6,10	121,51	Tercapai
	8			Cakupan Anemia Wanita Usia Subur		0	0	35	33	30	0	0	24,5	0	0	30,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	9	2)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada usia produktif (15-59) thn	-	20	30	50	70	90	20	30	49	89	47	90,00	47,00	52,22	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	10			Cakupan skrining Kesehatan sesuai standar pada lansia (>= 60 th)	10	10	30	70	90	100	10	30	80,51	91,22	48,13	100,00	48,13	48,13	Perlu Upaya Keras
	11			Cakupan Pelayanan kesehatan orang dengan TBC	70,44	100	100	100	100	100	81,88	99,65	99	95,3	8	100,00	8,00	8,00	Perlu Upaya Keras
	12			Cakupan Pelayanan Kesehatan penderita hipertensi	56,7	60	70	80	90	100	60	70	68	49,4	20	100,00	20,00	20,00	Perlu Upaya Keras
	13			Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Diabetis mellitus	76	30	40	50	70	90	30	40	51	126	81	90,00	81,00	90,00	Akan Tercapai
	14			Cakupan Pelayanan Kesehatan openderit Gangguan jiwa berat	70	70	80	90	100	100	70	80	98,24	89	62,27	100,00	62,27	62,27	Perlu Upaya Keras
	15			Cakupan Pelayanan skrining Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi HIV	12	20	70	75	80	90	27,48	64,81	82,24	90	55,8	90,00	55,80	62,00	Perlu Upaya Keras
	16			Non Polio AFP Rate 2/100.000 Anak Usia <15 Tahun	100	100	100	100	100	100	100	100	120	320	66,67	100,00	66,67	66,67	Perlu Upaya Keras
	17			Verifikasi Sinyal KLB > 75 Alert	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	18			Discharded Campak > 2/100.000 Penduduk	100	100	100	100	100	100	100	100	183,3	100	70	100,00	70,00	70,00	Perlu Upaya Keras
	19			Proporsi KLB PD3I Ditanggulangi < 24 Jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	20			Respon PIE (Penyakit Infeksi Emerging) < 24 Jam	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	21			Persentase Kabupaten Yang Mencapai 80% IDL Pada Bayi	80	80	85	90	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	22			Persentase Anak Usia 0 - 11 Bulan Yang Mendapat Imunisasi Dasar Lengkap	90	90	92	92,5	93	95	98,7	95,05	100,5	88,27	72,7	95,00	72,70	76,53	Perlu Upaya Keras
	23			Cakupan Bias C/DT/TD	98	98	98	98	98	98	98,8	98,72	98	98	0	98,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	24	3)	Obat dan Perbekalan Kesehatan	Cakupan obat generik berlogo dalam persediaan obat	95,83	96	97	98	99	100	96	97	95,99	99	98	100,00	98,00	98,00	Akan Tercapai
	25	4)	Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan apotik, toko obat dan tempat penjualan makanan yang dilakukan pengawasan	50	50	50	55	58	100	50	50	100	100	95	100,00	95,00	95,00	Akan Tercapai
	26			Cakupan sekolah yang dilakukan pemeriksaan jajanan anak sekolah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	27	5)	Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan desa siaga aktif	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	70,5	100,00	70,50	70,50	Perlu Upaya Keras
	28			Kebijakan Yang Dibuat	1	2	3	5	7	9	4	4	11	9	10	9,00	10,00	111,11	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	29			Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	74	75,2	75,4	75,5	75,7	80	75,2	75,4	89,7	80	94,35	80,00	94,35	117,94	Tercapai
	30			Persentase Desa Yang Memanfaatkan CSR Untuk kesehatan	8	10	12	14	20	24	6	8	61,38	19	24	24,00	24,00	100,00	Tercapai
	31			Proporsi Posyandu Mandiri	42	20	25	47	49	51	42	44	45,99	46	52,38	51,00	52,38	102,71	Tercapai
	32			Persentase Desa Didampingi SMD MMD	80	80	100	100	100	100	80	100	100	100	50	100,00	50,00	50,00	Perlu Upaya Keras
	33	6)	Perbaiki Gizi masyarakat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	34			Cakupan bayi yang dapat ASI Eksklusif	73,59	78	78	79	80	81	81,6	72	75,27	82,62	81,02	81,00	81,02	100,02	Tercapai
	35			Cakupan Balita Stunting	26,1	27,6	27,7	27,3	27	26,8	27,6	27,2	7,1	7	12,8	26,80	12,80	47,76	Perlu Upaya Keras
	36			Cakupan Balita Wasting	8,4	11	11	10,8	10,5	10,2	10,9	10,5	10,9	3,48	4,8	10,20	4,80	47,06	Perlu Upaya Keras
	37			Cakupan Balita Underweight	16,1	18,5	18,5	18,3	18,1	18	19,1	18	5,3	6,4	10,2	18,00	10,20	56,67	Perlu Upaya Keras
	38			Cakupan Balita Gizi Lebih (Obes)	1,69	5	4,9	2,8	2,5	2,3	1,38	1,13	2,22	4,03	1,5	2,30	1,50	65,22	Perlu Upaya Keras
	39			Partisipasi Posyandu (D/S)	8,14	82	82	85	85	85	81,4	81,6	82,35	82,41	81,3	85,00	81,30	95,65	Akan Tercapai
	40	7)	Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan desa open defecation free (ODF)	14	40	60	100	100	100	19,95	32,92	79,55	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	41			Cakupan Tablet Tambah Darah Bagi Remaja	20	0	20	25	30	40	0	26,342	94,05	97,8	0	40,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	42			Persentase pengelolaan limbah medis dan non medis	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	43	8)	Standarisasi Pelayanan Kesehatan	Akreditasi Puskesmas & RSUD	20,59	20,59	47,06	32,35	20,59	47,06	20,59	47,06	100	20,59	100	47,06	100,00	212,49	Tercapai
	44	9)	Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	10	5	5	5	5	5	5	5	10	11,49	3,2	5,00	3,20	64,00	Perlu Upaya Keras
	45	10)	Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan sarana prasarana Puskesmas/Puskesmas Pembantu dan jaringannya	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,28	0	0	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	0,29	100,00	Tercapai
	46			Rasio Pustu per satuan penduduk	0,23	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22	100,00	Tercapai
	47	11)	Pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/Rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/Rumah sakit mata	Ratio tempat tidur Rumah sakit per satuan penduduk	1,34	1,34	1,34	1,38	1,38	1,38	1,34	1,38	1,38	1,64	1,78	1,38	1,78	128,99	Tercapai
	48	12)	Peningkatan Pelayanan Kesehatan	BOR (Bed Occupancy Ratio) Angka Penggunaan tempat tidur	14,7	50	55	62	65	70	52,55	42,04	49,1	69,3	56,4	70,00	56,40	80,57	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	49	13)	Pemeliharaan sarana prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit paru paru/Rumah Sakit mata	Persentase sarana dan prasarana yang terpelihara	100	100	100	97	100	100	100	100	97	95,38	96,59	100,00	96,59	96,59	Akan Tercapai
3	URUSAN PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG																		
	1	1)	Pembangunan Jalan dan Jembatan	Prosentase jembatan dalam kondisi baik	60,90	61,30	61,75	62,25	81,32	81,90	61,30	61,75	81,12	81,32	81,32	81,90	81,32	99,29	Akan Tercapai
	2			Prosentase jalan dalam kondisi baik	49,51	55,26	56,92	58,68	61,49	64,41	56,25	61,15	67,2	69,33	66,25	83,17	66,25	79,66	Perlu Upaya Keras
	3	2)	Pembangunan Turap/Talud/ Bronjong	Prosentase panjang talud jalan yang dibangun	0	0	15,69	41,18	60,78	80,39	0	15,69	41,18	0	0	80,39	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	4	3)	Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Prosentase volume jalan yang dipelihara (m)	12,02	25,85	43,09	54,31	66,33	83,17	25,85	43,09	63,25	71	86	83,17	85,68	103,02	Tercapai
	5	4)	Penataan trotoar jalan	Prosentase rasio trotoar yang tertata	54	54,50	55,50	56	57,58	59,16	54,5	55,50	1.555	57,58	0	59,16	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6	5)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebnamargaan	Prosentase sarana dan prasarana kebinamargaan yang tersedia	60,38	60,38	92,45	92,45	100	100	60,38	92,45	0	0	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	7	6)	Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya	Prosentase irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	20	22,2	24,26	26	28	30	22,20	24,26	31,97	28	69,67	30,00	69,67	232,23	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8	7)	Pengembangan Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya	Prosentase Sungai, Danau dan Sumber Daya Air yang dikelola dalam kondisi baik	69,67	71,96	74,26	76,56	78,86	81,16	71,96	74,26	67,82	78,86	78,86	81,16	78,86	97,17	Akan Tercapai
	9	8)	Pembinaan dan Pengembangan bidang ketenagalistrikan	Jumlah penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang	795	145	1028	250	250	250	145	1.028	776	776	0	250,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	10	9)	Pembangunan Drainase /Gorong-Gorong	Prosentase layanan Drainase	65	66	66,95	71	71,2	71,5	66,00	66,95	53,63	98,89	73,05	71,50	73,05	102,17	Tercapai
	11	10)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan air minum dan air limbah	Prosentase layanan Air Minum / Air Bersih	69,68	77,26	85	89	91,37	94,25	77,26	84,84	89,15	80,16	80,16	94,25	80,16	85,05	Akan Tercapai
	12			Prosentase layanan Air Limbah	60,52	70,29	80,26	92,5	94,37	96,25	70,39	80,26	95,92	100	100	96,25	100,00	103,90	Tercapai
	13	11)	Pembangunan dan Pengelolaan Bangunan Gedung	Persentase gedung kantor dan non kantor yang terbangun /jumlah gedung pemerintah yang terbangun	13,11	8	13	11	19	5	13,11	34,43	17	13	2	5,00	2,00	40,00	Perlu Upaya Keras
	14	12)	Pembangunan infrastruktur perdesaan dan perkotaan	Prosentase Luasan Permukiman Kumuh di kawasan perkotaan	0,78	0,58	0,39	0,19	0	0	0,73	0,39	0,46	41,65	21,9	0,00	21,90	0,00	Perlu Upaya Keras
	15	13)	Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Cakupan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	30	30	42	54	66	78	30	42	54	66	78	78,00	78,00	100,00	Tercapai
	16			Persentase Kenaikan Bangunan Ber-ijin (IMB)	19,42	19,42	30,5	47,69	65,13	82,56	19,42	30,25	1,75	2,11	82,56	82,56	82,56	100,00	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	17	14)	Perencanaan Tata Ruang	Prosentase Dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	12,5	12,25	25	43,75	62,5	81,25	12,5	25	43,75	62,5	81,25	81,25	81,25	100,00	Tercapai
	18	15)	Pemanfaatan Ruang	Prosentase Peningkatan Pelayanan Ketataruangan	0	20	25	30	35	60	20	25	30	35	60	60,00	60,00	100,00	Tercapai
4	URUSAN SOSIAL																		
	1	1)	Pemberdayaan fakir Miskin, Komunitas Adat terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	Persentase PMKS yang mendapatkan bantuan	94	41,78	42,78	97	98	99	41,78	31,31	99,72	47,78	98,4	99,00	98,40	99,39	Akan Tercapai
	2	2)	Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	Persentase (%) anak terlantar, dan lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial	5,1	65,38	26	26	28	30	5,3	24	92,89	16,12	30	30,00	30,00	100,00	Tercapai
	3			Persentase kehadiran pengunjung makam yang bersejarah	-	88,94	90,28	91	100	100	88,94	90,28	89,32	0	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	4	3)	Pembinaan para penyandang cacat dan trauma	Persentase difabel, trauma, dan korban bencana yang telah mendapat bantuan	18	0	0	0	26	28	0	0	88,73	30,50	28	28,00	28,00	100,00	Tercapai
	5	4)	Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	Persentase organisasi/lembaga kesejahteraan sosial yang menerima pembinaan dan bantuan	100	100	100	100	100	100	100	100	30,50	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	6			Prosentase Organisasi / lembaga yang terfasilitasi	-	36,39	35,67	70	90	100	36,39	36,67	70	90	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	7	5)	Pembinaan eks Penyandang Penyakit Sosial (eks narapidana, PSK, Narkoba, Penyakit lainnya)	Cakupan penanganan PMKS	40,78	41,78	42,78	43,78	44,78	99	33,16	35,52	70,66	62,26	90,32	99,00	90,32	91,23	Akan Tercapai
	8	6)	Peningkatan Penanggulangan Narkoba, Penyakit Menular Seksual (PMS) termasuk HIV/AIDS	Persentase kehadiran peserta sosialisasi	0	0	77,58	88	80	80	0	77,58	95,71	91,43	97,14	80,00	97,14	121,43	Tercapai
	9	7)	Peningkatan Keagamaan	Persentase kehadiran masyarakat	64,29	64,29	74,34	85	90	90	64,29	74,34	85	90	90	90,00	90,00	100,00	Tercapai
	10	8)	Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Desa Tangguh Bencana desa	0	1	3	3	2	2	0	1	2	2	2	2,00	2,00	100,00	Tercapai
	11			Jumlah relawan yang terlatih tanggap bencana	0	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225	225,00	225,00	100,00	Tercapai
	12			Sekolah Siaga Bencana Sekolah	0	15	15	15	15	15	15	15	15	15	2	15,00	2,00	13,33	Perlu Upaya Keras
	13			Sekolah Sungai	0	1	1	2	3	3	0	0	1	1	1	3,00	1,00	33,33	Perlu Upaya Keras
	14	9)	Penanganan Darurat Bencana	Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	15			Persentase korban bencana skala kabupaten/kota yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	16			Persentase tercukupinya kebutuhan logistik untuk korban bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	17	10)	Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Cakupan penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi Paska Bencana	100	100	100	100	100	100	100	81,5	81,5	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	18	11)	Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	Cakupan kawasan rawan bencana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
5	URUSAN PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN																		
	1	1)	Perbaikan Perumahan akibat bencana alam/sosial	Prosentase Rumah Layak Huni	92,58	93,82	95,05	96,29	97,53	98,76	93,82	95,05	96,29	95,57	98,36	98,76	98,36	99,59	Akan Tercapai
	2	2)	Pengembangan Perumahan	Jumlah pengembangan PSU (perumahan)	0	0	0	0	5	10	0	0	0	0	1	10,00	1,00	10,00	Perlu Upaya Keras
6	URUSAN KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																		
	1	1)	Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda dan tokoh wanita yang tersosialisasi wawasan kebangsaan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	0	10,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	2	2)	Peningkatan dan Pembinaan Kehidupan Sosial Politik	Prosentase peningkatan kepesertaan pemilih dalam pemilu	5	2	2	4	5	6	2	2	4	12	0	6,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	3			Prosentase Ormas aktif yang terbina	70	75	80	80	85	85	75	80	80	100	40	85,00	40,00	47,06	Perlu Upaya Keras
	4	3)	Peningkatan Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Prosentase Anggota korsik yang terlatih	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	5			Prosentase pendataan dan pemetaan masalah ketahanan seni budaya, agama, ekonomi, dan masyarakat	0	100	100	100	0	100	100	100	100	0	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6	4)	Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	Prosentase peningkatan lingkungan yang aman dan nyaman	90	90	92	94	96	98	90	92	100	93,5	96	98,00	96,00	97,96	Akan Tercapai
	7			Prosentase penyelesaian konflik sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	8	5)	Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal	Prosentase keamanan, ketertiban masyarakat dan pencegahan tindak kriminal yang terpelihara	15	100	100	20	49	49	15	15	94	75	100	49,00	100,00	204,08	Tercapai
	9			Prosentase penurunan kasus penyalahgunaan Narkoba	2	2	2	4	4	4	2	4	4	4		4,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	10			Prosentase koordinasi Komunitas Intelijen Daerah (Kominda) yang terlaksana	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
	11	6)	Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan	Cakupan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga ketertiban dan keamanan	91	91	92	94	96	98	3650	92	94	89,63	98	98,00	98,00	100,00	Tercapai
	12			Cakupan petugas perlindungan masyarakat (desa/kelurahan)	31	31	31	31	31	31	31	31	100	100	100	31,00	100,00	322,58	Tercapai
	13	7)	Peningkatan Pemberantasan Penyakit Masyarakat (Pekat)	Persentase penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah di Kabupaten	90,91	91	91	91,50	91,75	92,00	91	91,25	91,5	91,6	92	92,00	92,00	100,00	Tercapai
	14			Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)	91	91	91,25	91,50	91,75	92,00	91	91,25	91,5	91	91	92,00	91,00	98,91	Akan Tercapai
	15	8)	Peningkatan Penanganan Bencana Kebakaran	Prosentase anggota pemadam kebakaran yang terlatih	0	0	0	15	13	12	0	0	1	4	3	12,00	3,00	25,00	Perlu Upaya Keras
	16	9)	Penanganan Darurat Bencana	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100	-	1.100	94	96	98	0	100	94	100	98	98,00	98,00	100,00	Tercapai
	17			Tingkat waktu tanggap daerah layanan wilayah	40	50	64	70	75	75	50	64	7	7	7	75,00	7,00	9,33	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	18	10)	Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan	Persentase konsumen yang terlindungi	70	70	72	74	75	75	69	70	71	71	74	75,00	74,00	98,67	Akan Tercapai
URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR																			
7	URUSAN TENAGA KERJA																		
	1	1)	Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio daya serap tenaga kerja	1.754,45	1.754,45	1.774,50	0	0	0	1.997,14	1.770	0	0	0	0,00	0,00	0!	Perlu Upaya Keras
	2			Angka partisipasi angkatan kerja	67,79	67,56	67,10	0	0	0	84,76	66,93	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	3			Rasio penduduk yang bekerja	0,97	1	,01	0	0	0	0	2	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	4			Besaran tenaga kerja yang mendapatkan pelatihan kewirausahaan	0	0	0	56	58	60	0	0	56,67	59,26	50	60,00	50,00	83,33	Perlu Upaya Keras
	5	2)	Peningkatan Kesempatan Kerja	Partisipasi angkatan kerja perempuan	97,25	97	97,25	0	0	0	97,25	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6			Besaran pencari kerja yang terdaftar yang ditempatkan	0	0	22	25,20	25,30	25,40	0	22,19	20,56	17,16	21,11	25,40	21,11	83,11	Perlu Upaya Keras
	7	3)	Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan	Keselamatan dan Perlindungan	9,24	9	9	0	0	0	8,69	0	0	0	0	0,00	0,00	#DIV/0!	Perlu Upaya Keras
	8			Besaran kasus yang diselesaikan dengan Perjanjian Bersama (PB)	0	0	78,95	79,50	80	80,50	0	78,95	57,10	66,67	55,56	80,50	55,56	69,02	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	9			Angka sengketa pengusaha - pekerja per tahun	0	0	6,38	6,20	6,10	6,00	0	6,38	4,47	10,06	11,96	6,00	11,96	199,33	Perlu Upaya Keras
8	URUSAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK																		
	1	1)	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Persentase OPD yang menerapkan PPRG	0	50	55	60	65	70	0	0	20	76,47	70	70,00	70,00	100,00	Tercapai
	2	2)	Peningkatan Kualitas Hidup terhadap Perlindungan Perempuan dan Anak	Rasio anak yang memerlukan perlindungan khusus	5,21	5,21	5,1	5	4,9	4,80	3,69	3,29	3,12	0,57	3,22	4,80	3,22	67,08	Perlu Upaya Keras
	3			Rasio perempuan korban kekerasan	2,18	1,54	1,5	1,45	1,40	1,35	1,54	0,25	0,44	3,36	1,15	1,35	1,15	85,19	Akan Tercapai
	4	3)	Peningkatan peran serta anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan	Prosentase forum anak yang terlibat dalam pengambilan kebijakan	3,49	3,4	5,2	94,01	100	100	3,49	3,49	4,9	11,72	42,64	100,00	42,64	42,64	Perlu Upaya Keras
9	URUSAN PANGAN																		
	1	1)	Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Skor Pola Pangan Harapan	91,71	92,00	92,25	92,50	92,75	93	92	92,25	92,5	92,75	83	93,00	83,00	89,25	Akan Tercapai
	2	2)	Peningkatan ketahanan pangan	Alokasi pupuk bersubsidi	59.750	57.530	54.350	63.450	88.035	88.035	57.530	54.350	58.125	53.363	40.306	88.035	40.306	45,78	Perlu Upaya Keras
	3			Penerimaan pendapatan DBHCHT	15.168.602.000	14.282.125.000	15.666.717.000	14.944.437.000	15.039.148.000	14.964.426.000	14.282.125.000	15.666.717.000	14.944.437.000	15.196.498.000	11.833.000.000	14.964.426.000	11.833.000.000	79,07	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	URUSAN LINGKUNGAN HIDUP																		
	1	1)	Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL/UKL-UPL	48	59	70	77	81	83	59	70	93,75	100	80	83,00	80,00	96,39	Akan Tercapai
	2			Persentase pembinaan dan pengawasan terkait ketaatan pengganggu jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, AMDAL, UKL-UPL oleh Pemerintah Daerah Kabupaten	70	71	80	82	85	88	71	80	78,5	100	88	88,00	88,00	100,00	Tercapai
	3			Pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang di terbitkan oleh Pemerintah daerah Kabupaten/Kota, lokasi usaha dan dampaknya di Daerah kabupaten/kota	80	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	4			Cakupan pemantauan terhadap kualitas lingkungan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	5	2)	Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Cakupan penghijauan wilayah rawan longsor dan sumber mata air	5	5	9	18	27	36	5	9	100	35	20	36,00	20,00	55,56	Perlu Upaya Keras
	6			Prosentase turus jalan yang tertanami berbagai jenis tanaman bunga	0	0	20	40	60	80	0	20	0	1,03	80	80,00	80,00	100,00	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	3)	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan SDA dan LH	Persentase kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan lingkungan hidup	100	100	100	100	100	100	100	100	100	85	100,00	85,00	85,00	Akan Tercapai	
	8	4)	Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan data informasi lingkungan yang dapat diakses masyarakat	40	100	100	100	100	100	100	100	100	63	100,00	63,00	63,00	Perlu Upaya Keras	
	9	5)	Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Prosentase layanan pengelolaan persampahan perkotaan	13,93	12,89	14,49	15,20	16,63	17,21	12,89	14,49	80	45,38	50,66	17,21	50,66	294,36	Tercapai
	10			Prosentase pengelolaan sampah berbasis masyarakat	2,5	2,5	5,0	7,5	10	12,5	2,5	5	0	73,57	81,25	12,50	81,25	650,00	Tercapai
	11	6)	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luasan RTH publik sebesar 20 % dari luas wilayah kota / kawasan perkotaan	294,58	0,000784	0,36	0,7	0,15	0,125	0,000784	0,36	0,36	0,15	0,125	0,13	0,13	100,00	Tercapai
11	URUSAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL																		
	1	1)	Penataan administrasi kependudukan	Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk	0,85	0,88	0,90	0,9	0,9	0,91	0,88	0,9	0,9	0,9	0,94	0,91	0,94	103,30	Tercapai
	2			Cakupan penerbitan KTP	85,33	88,47	89,64	89,98	90,3	90,58	88,47	89,63	89,98	89,91	94,93	90,58	94,93	104,80	Tercapai
	3			Cakupan penerbitan akte kelahiran Penduduk usia 1-18 tahun	86,24	77,75	80,84	89,53	92,81	92,18	89,73	89,18	89,53	91,2	91,6	92,18	91,60	99,37	Akan Tercapai
	4			Keluarga mempunyai KK	0	94	94,67	95,5	96,7	98	94	94,62	95,5	96,47	97,8	98,00	97,80	99,80	Akan Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5			Penduduk berakte kelahiran	0	85,2	87,5	90	93,7	95,8	85,2	87,5	89,53	91,28	91,6	95,80	91,60	95,62	Akan Tercapai
	6			Keluarga yang mempunyai akte nikah (yang non Muslim)	0	226.797	238.546	250.500	263.150	295.850	226.797	238.546	250.500	251.123	253.671	295.850	253.671	85,74	Akan Tercapai
	7			Penerbitan Akte kematian		366	1.031	1.731	2.400	2.950	356	1031	1731	1.800	243	2.950	243	8,24	Perlu Upaya Keras
12	URUSAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA																		
	1	1)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa / Kelurahan	Prosentase peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa	13	13,00	35	47	77	89	13	35	37	75	75	89,00	75,00	84,27	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase desa yang menyusun APBDes tepat waktu sesuai peraturan	15	15,00	31	46	72	87	15	31	48	59	77	87,00	77,00	88,51	Akan Tercapai
	3	3)	Pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga (Peningkatan Kesejahteraan Keluarga)	Prosentase jumlah desa binaan PKK dlm satu periode RPJMD	13	26,00	39	52	65	78	26	39	96,8	65	78	78,00	78,00	100,00	Tercapai
	4	4)	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Prosentase Peningkatan Administrasi Perencanaan Desa	0	0	0	0	100	0	0	0	0	95	0	0,00	0,00	-	Perlu Upaya Keras
	5	5)	Peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan	Prosentase peningkatan pemanfaatan teknologi tepat guna	7	7	29	46	64	82	7	29	46	63,64	64	82,00	64,00	78,05	Perlu Upaya Keras
	6	6)	Pengembangan lembaga ekonomi pedesaan	Prosentase peningkatan pembentukan BUMDes	14	29	43	51	58	64	29	43	58	77	91	64,00	91,00	142,19	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	7	7)	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	Prosentase kelompok pelestarian adat istiadat	7	7	7	17	33	67	7	7	17	33	1.337	67,00	1.337	1.995,52	Tercapai
13	URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA																		
	1	1)	Keluarga berencana	Meningkatnya angka pemakaian alat kontrasepsi (CPR)	75,9	78,7	64,37	64,37	65,00	65,03	78,7	64,93	73,24	71,39	70,72	65,03	70,72	108,75	Tercapai
	2			Menurunnya tingkat putus pakai kontrasepsi / Drop Out KB	5,5	6	5,3	5,3	5,10	4,98	6	3,9	4,99	9,05	24,29	4,98	24,29	487,75	Tercapai
	3			Menurunnya angka kebutuhan berKB yang tidak terlayani (unmet need)	14,3	10	9	9	8,97	8,94	10,13	9,3	17,4	15,91	17,01	8,94	17,01	190,27	Tercapai
	4	2)	Kesehatan Reproduksi Remaja	Menurunnya angka kelahiran pada remaja kelompok usia 15-19 tahun (age specific fertility Rate/ ASFR 15-29 years old)	41	40	39	37	35,00	33	40	39	2,7	35,54	0,42	33,00	0,42	1,27	Tercapai
	5	3)	Peningkatan pemberdayaan keluarga sejahtera	Persentase keluarga Sejahtera I dan Prasejahtera	0	0	0	0	0	28	0	0	38,6	43,21	36,21	28,00	36,21	129,32	Tercapai
	6	4)	Pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/ KR yang Mandiri	Persentase peserta KB mandiri	86,31	39,88	90	90	91,00	0	246.281	245.785	39,79	63,3	40,48	0,00	40,48	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	7	5)	Promosi Kesehatan Ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat	Persentase Bina Keluarga Balita (BKB) aktif	66	70	75	0	75	0	70	75	88,21	72,43	21,53	0,00	21,53	0,00	Perlu Upaya Keras
	8			Persentase Bina Keluarga Remaja (BKR) aktif	55	65	75	0	75	0	65	75	88,26	70,74	24,11	0,00	24,11	0,00	Perlu Upaya Keras
	9			Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL) aktif	70	75	80	0	80	0	75	80	91,65	74,84	11,76	0,00	11,76	0,00	Perlu Upaya Keras
	10			Persentase Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) aktif	45	50	60	0	65	0	50	60	124,7	72,73	58,7	0,00	58,70	0,00	Perlu Upaya Keras
	11	6)	Pelayanan Kontrasepsi	DO KB	18,95	18	14	16	15	0	18	14	4,99	9,05	24,74	0,00	24,74	0,00	Perlu Upaya Keras
	12			Unmet Need	10	17	15	9,5	9	0	17	13	17,4	15,91	17,01	0,00	17,01	0,00	Perlu Upaya Keras
	13	7)	Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi dan Konseling KRR	Peserta KB Mandiri	86,31	54,56		89	90	0	54,56	0	39,79	63,3	40,48	0,00	40,48	0,00	Perlu Upaya Keras
	14	8)	Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	Persentase keluarga Pra sejahtera dan KS I	38,8	33,58	34,06	32	30	0	33,58	34,08	38,5	43,21	42,69	0,00	42,69	0,00	Perlu Upaya Keras
	15	9)	Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga	Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Balita (BKB)	621	621	622	636	641	0	621	622	561	561	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	16			Jumlah tenaga pendamping kelompok Bina Keluarga Remaja (BKR)	271	266	266	281	286	0	266	266	248	228	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	17			Jumlah tenaga pendamping kelompok Persentase Bina Keluarga Lansia (BKL)	469	464	464	479	484	0	464	464	439	408	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	18			Jumlah tenaga pendamping kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS)	581	576	558	591	596	0	576	558	737	495	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	19	10)	Pengembangan Bahan Informasi Tentang Pengasuhan dan Pembinaan Tumbuh Kembang Anak	Persentase anggota kelompok BKB, BKR dan BKR yang aktif mengikuti kegiatan	17	17	19	20	21	0	17	16	0	69,13	14,18	0,00	14,18	0,00	Perlu Upaya Keras
14	URUSAN PERHUBUNGAN																		
	1	1)	Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Prosentase dokumen perencanaan prasarana dan fasilitas perhubungan yang tersusun	0	0	0	50	50	75	0	0	97,84	0	0	75,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	Prosentase perlengkapan jalan terpasang	22,67	27,85	31,53	33,88	36,96	40,03	27,85	31,53	87,8	83,33	75,37	40,03	75,37	188,29	Tercapai
	3	3)	Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ	Prosentase perlengkapan jalan terpasang dalam kondisi baik	72	76	82	85	86	87	76	82	80,53	87	48,43	87,00	48,43	55,67	Perlu Upaya Keras
	4	4)	Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Prosentase Sarana dan Prasarana Perhubungan Terpasang	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	88,33	77,78	77,78	77,78	77,78	77,78	88,33	77,78	88,06	Akan Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	5)	Peningkatan pelayanan angkutan	Indeks kepuasan layanan angkutan umum	60	63,04	78,85	69,42	72,17	74,82	63,04	67,25	93	79,016	106	74,82	106,00	141,67	Tercapai
	6	6)	Peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Prosentase Kepemilikan KIR angkutan umum	87,83	87,83	87,83	87,84	87,85	87,86	87,83	87,83	90,56	60,8	89	87,86	89,00	101,30	Tercapai
15	URUSAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA																		
	1	1)	Kerjasama informasi dengan Mass Media	Persentase event Kabupaten Terpublikasi	0	-	-	85	90	92	0	0	85	98	57	92,00	57,00	61,96	Perlu Upaya Keras
	2			Persentase keterbukaan informasi publik terhadap Badan Publik	0	-	-	54	60	65	0	0	77	74	95	65,00	95,00	146,15	Tercapai
	3			Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui Media Massa	80	85	95	100	100	100	85	95	96	98	-	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	4			Persentase dokumentasi kegiatan Kepala Daerah	90	85	73	100	100	100	95	73	98	98	98,611	100,00	98,61	98,61	Akan Tercapai
	5			Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui Media Sosial	90	94	94	100	100	100	95	95	96	98		100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6			Persentase publikasi kegiatan Kepala Daerah melalui penyuluhan dengan media papan ruang	90	80	74	100	100	100	90	74	96	98	98	100,00	98,00	98,00	Akan Tercapai
	7			Persentase kegiatan Pemerintah melalui radio	96	100	34	90	90	90	100	34	90	95	95	90,00	95,00	105,56	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8			Penyebaran publikasi kegiatan pemerintah melalui komunikasi budaya	0	70	93	95	95	95	70	93	95	95	0	95,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	9	2)	Pengembangan Komunikasi, informasi, dan Media Massa	Cakupan layanan telekomunikasi	32,20	32,20	52,20	52,20	53,60	55,08	32,20	52,20	52,00	53,6	54	55,08	54,00	98,04	Akan Tercapai
	10			Cakupan pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tk. Kecamatan	15	30	46	61,50	73	84,60	30	46	61,50	73	83	84,60	83,00	98,11	Akan Tercapai
	11			Persentase pelayanan publik dan non publik berbasis e-government	10,0	10	14	40	60	80	10	14	35	49	100	80,00	100,00	125,00	Tercapai
	12	3)	Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi	Persentase SDM bidang komunikasi dan informasi yang terlatih	0			0	33	66,67	0	0		39	100	66,67	100,00	149,99	Tercapai
16	URUSAN KOPERASI DAN UMKM																		
	1	1)	Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	Persentase pertumbuhan UMKM	0,04550	0,09	0,18	0,27240	0,36	0	0,0910	0,1817	0,27	0,08	0,078	0,41	0,08	19,19	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM	Persentase promosi produk UKM	10	10,00	30,00	40	50	60	10	30	40	0,35	0,002	60,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	3	3)	Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi	Persentase koperasi aktif	72,20	70,58	80,07	80,20	80,18	80,59	70,58	80,07	80,2	80,20	77,91	80,59	77,91	96,67	Akan Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4			Persentase pertumbuhan koperasi	0,012	0,027	-0,068	0,012	0,028	0,037	0,027	-0,059	0,01	0,034	0,031	0,04	0,03	83,78	Perlu Upaya Keras
	5			Persentase manajer koperasi yang bersertifikasi	4,39	4,12	5,89	9,76	11,68	13,53	4,12	5,89	9,76	8,21	0	13,53	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
17	URUSAN PENANAMAN MODAL																		
	1	1)	Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Jumlah nilai investasi berskala Nasional (PMDN/PMA):											0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	2			PMDN (d/m ribu Rp)	89.208.500	89.208.500	90.823.173	92.621.473	94.659.145	97.025.624	62.385.300	247.327.200	229.788.500	1.914.915.766	698.896.464	970.256.2.372	698.896.464	89.208.500	Tercapai
	3			PMA (d/m ribu US\$)	11.278,00	11.278	11.549	11.832	12.128	12.437	6.372	10.257	3.091	11.490	4.721	12.437	4.721	37,96	Perlu Upaya Keras
	4			Jumlah investor berskala Nasional (PMDN/PMA):	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	5			PMDN	12	12	13	14	15	16	5	21	67	870	4.743	16,00	4.743	29.643,75	Tercapai
	6			PMA	5	5	5	5	5	5	53	43	39	15	5	5,00	5,00	100,00	Tercapai
	7			Peningkatan Pendapatan BUMD	3.240.000.000	4.082.400.000	4.572.288.000	4.892.348.160	5.088.042.086	5.291.563.770	4.090.119.172	4.589.886.518	5.175.168.808	6.508.914.000	7.148.100.580	529.156.376.986	7.148.100.580	135,08	Tercapai
	8	2)	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Rasio daya serap tenaga kerja:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	9			PMDN	189	238	397	417	438	460	136	68	27	21	3	460,00	3,00	0,65	Perlu Upaya Keras
	10			PMA	46	294	294	294	294	294	28	2	14	224	12	294,00	12,00	4,08	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	11			Prosentase kenaikan/penurunan realisasi investasi:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00	-	Perlu Upaya Keras	
	12			PMDN	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50	203	296	-7	733,00	-64	2,50	-64,00	-2.560	Perlu Upaya Keras
	13			PMA	0	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55	1415	61	-70	272,00	-59	2,55	-59,00	-2.313	Perlu Upaya Keras
	14			Lama Proses Perizinan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	10	10	14,00	10,00	71,43	Perlu Upaya Keras
	15			Nilai Survey Kepuasan Masyarakat	84,50	84	80	80	80	80	84	80,00	80,52	78,3	81,86	80,00	81,86	102,33	Tercapai
	16			Lamanya proses perijinan	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14,00	14,00	100,00	Tercapai
18	URUSAN KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA																		
	1	1)	Peningkatan Peran Serta kepemudaan	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	60	64	66	66	69	69	64	66,00	68,97	93,00	60	69,00	60,00	86,96	Akan Tercapai
	2	2)	Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga	Persentase Sarana dan Prasarana Olahraga yang Representatif	2	2	15	0	25	20	2	15	11	11	11	20,00	11,00	55,00	Perlu Upaya Keras
	3	3)	Peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda	Persentase Wirausaha Muda yang Dibina (Keluarga Miskin)	15	0	15	20	20	25	0	15	15	95	0	25,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	4	4)	Upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba	Persentase peningkatan peserta yang mengikuti penyuluhan narkoba	10	0	0	10	10	10	0	0	10	82	0	10,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	5	5)	Pembinaan dan pemasyarakatan olahraga	Persentase cabang olahraga yang rutin mengikuti kompetisi	77	80	80	80	80	83	80	80	82	95	45	83,00	45,00	54,22	Perlu Upaya Keras
	6	6)	Pembinaan pemuda dan olahraga	Persentase kenaikan pemuda yang berpartisipasi dalam peringatan Hari Besar Nasional	10	10	15	15	20	20	10	15	15	90	18	20,00	18,00	90,00	Akan Tercapai
	7			Persentase Kehadiran Peserta	0	87,14	93,33	90	90	90	87,14	93,33	90	90	70	90,00	70,00	77,78	Perlu Upaya Keras
19	URUSAN STATISTIK																		
	1	1)	Pengembangan data/informasi	Persentase dokumen profil daerah yang tersedia	7,14	17	33	42,86	71,43	100	7,14	14,29	47	0	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
20	URUSAN PERSANDIAN																		
	1	1)	Peningkatan Persandian Daerah	Persentase pengamanan informasi persandian yang terimplementasi	0	-	-	0	23,5	25	0	-	-	36	35	25,00	35,00	140,00	Tercapai
21	URUSAN KEBUDAYAAN																		
	1	1)	Pengelolaan Kekayaan Budaya	Persentase Kenaikan Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya	5	6	6	6	6	6	6	6	6	3,125	23	6,00	23,00	383,33	Tercapai
	2	2)	Pengembangan Nilai Budaya	Persentase Benda, Situs, Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	7	8	9	10	11	12	8	9	10	14,3	9	12,00	9,00	75,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	3	3)	Pengelolaan Keragaman Budaya	Persentase Kenaikan Organisasi Kebudayaan/Kelompok Kesenian yang Difasilitasi	5	5	5	5	5	5	5	5	95	1	5,00	1,00	20,00	Perlu Upaya Keras	
	4	4)	Pengembangan kerjasama pengelolaan kekayaan budaya	Persentase Fasilitasi Pementasan Budaya Daerah	0	0	96	100	100	100,00	0	95	0	0	0	100,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
22	URUSAN PERPUSTAKAAN																		
	1	1)	Pengembangan budaya baca dan pembinaan perpustakaan	Prosentase Kenaikan Kunjungan Masyarakat	0	4	5	10	10	10	10	10	8	15,63	20	10,00	20,00	200,00	Tercapai
23	URUSAN KEARSIPAN																		
	1	1)	Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/Arsip Daerah	Prosentase Kenaikan Koleksi Arsip	68.700	5	5	5	5	5	5	5	8	11,16	-66,98	5,00	-66,98	- 1.339,54	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Peningkatan kualitas pelayanan informasi	Prosentase Peningkatan SKPD dan desa/kelurahan yang memiliki pengelolaan arsip standar	10	10	10	10	10	10	10	10	13	10	8,72	10,00	8,72	87,20	Akan Tercapai
	3	3)	Perbaiki sistem administrasi kearsipan	Prosentase peningkatan kelengkapan administrasi kearsipan	0	0	10	0	20	10	0	10	0	20	10	10	10	100	Tercapai
	URUSAN PILIHAN																		
24	URUSAN KELUATAN DAN PERIKANAN																		

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	1)	Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikanan budidaya (ton)	27.831	28.164	29.009	30.396	31.302	31.467	28.660	29.515	26.681	28123	20.003	31467,00	20003,00	63,57	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan tangkap (ton)	486	496	506	516	526	537	469	506	561	153	86	537,00	85,95	16,01	Perlu Upaya Keras
	3	3)	Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi ikan (kg/kapita/tahun)	13	15,14	16,43	18,72	19,91	20,41	15,14	17,20	19,18	20,4	20,28	20,41	20,28	99,36	Akan Tercapai
25	URUSAN PARIWISATA																		
	1	1)	Pengembangan Kemitraan	Persentase kenaikan lembaga pariwisata yang bermitra	5	5	6	10	10	12	5	6	13	94	1	12,00	1,00	8,33	Perlu Upaya Keras
	2	2)	Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Rata-rata lama kunjungan wisatawan	0,5	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1,00	1,00	100,00	Tercapai
	3	3)	Pengembangan Destinasi Pariwisata	Persentase destinasi wisata andalan	17	17	17	17	22	28	17	17	25	25	47	28,00	47,00	167,86	Tercapai
26	URUSAN PERTANIAN																		
	1	1)	Peningkatan Kesejahteraan Petani	Persentase kelompok tani kelas utama	4	29,3	30,2	31,19	31,19	32,50	4	5	31,19	31,19	31,19	32,50	31,19	95,97	Akan Tercapai
	2	2)	Peningkatan Ketahanan Pangan	Produktifitas Padi (kwt/ha)	63,97	63,98	63,99	63,99	64	64,01	63,98	63,99	62,59	67,32	64	64,01	63,53	99,25	Akan Tercapai
	3			Produktifitas Jagung (kwt/ha)	85,12	85,14	85,15	85,16	85,18	85,18	74,97	85,05	81,95	93,35	81	85,18	80,83	94,89	Akan Tercapai
	4			Produktifitas Kedelai (kwt/ha)	22,16	22,18	22,21	22,22	22,26	22,31	18,12	17,47	20,13	16,37	21	22,31	20,63	92,47	Akan Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	5	3)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Mengikuti agro ekspo Soropadan (kali)	2	2	2	2	2	1	2	2	2	2	2,00	2,00	100,00	Tercapai	
	6	4)	Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan	Fasilitasi operasional Penyuluh	209	235	205	209	209	209	209	205	205	152	209,00	152,00	72,73	Perlu Upaya Keras	
	7	5)	Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan	Produksi Tembakau Rajang (ton)	815	1.972	1.037	1.087	1.091	1.092	815	1.037	1.744	1750	1092,00	1558,79	142,75	Tercapai	
	8			Produksi Tembakau Asepan (ton)	1.164	1.165	808	952	1.167	946	1.038	808	1.514	2595	2.309	946	2.309	244,08	Tercapai
	9	6)	Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak	Populasi sapi (ekor)	99.438	106.399	97.954	104.450	108.628	112.973	93.788	97.954	100.259	102.431	91.706	112.973	91.706	81,18	Perlu Upaya Keras
	10	7)	Peningkatan Produksi Hasil Peternakan	Produksi Daging Sapi (ton)	2.140	2.289	2.450	2.621	2.805	3.001	2.289	2.450	2.154,6	2010	324	3.001	324	10,80	Perlu Upaya Keras
	11	8)	Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Peternakan	Pembinaan usaha peternakan rakyat	180	200	200	200	225	235	185	200	200	200	70	235,00	70,00	29,79	Perlu Upaya Keras
27	URUSAN PERDAGANGAN																		
	1	1)	Perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan	Persentase UMKM yang memiliki sertifikasi produk SPIPIRT dan halal	0,318	0,364	0,407	0,458	0,521	0,584	0,634	0,407	0,458	0,38	0,19	0,58	0,19	32,53	Perlu Upaya Keras
	2			Persentase cakupan pelayanan UTP	3	3	3,2	3,2	3,3	15	2,95	3	3,1	3,2	14	15,00	14,00	93,33	Akan Tercapai
	3			Inflasi tahunan	3	3,5% (+1)	3,5% (+1)	3,5% (+1)	3,5% (+1)	3,5% (+1)	2,00	3	2,39	2,6	1,46	3,5% (+1)	1,46	-	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	4			Persentase konsumen yang terlindungi	-	100	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	5	2)	Peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri	Persentase pasar PEMDA yang direvitalisasi	30,61	2,041	8,163	4,062	4,062	4,082	2,041	8,163	4,00	3,92	0	4082,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6	3)	Pembinaan pedagang kakilima dan asongan	Persentase PKL dan asongan yang terdaftar	66,67	72,22	77,78	61,95	65,65	69,56	72,22	77,78	61,95	48,4	36,26	69,56	36,26	52,13	Perlu Upaya Keras
28	URUSAN PERINDUSTRIAN																		
	1	1)	Pengembangan industri kecil dan menengah	Jumlah industri menengah dan besar	0	132	135	0	0	0	132	135	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	2			Jumlah Produk yang memiliki ISO dan SNI	0	57	60	0	0	0	57	60	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	3			Persentase IKM yang memiliki ISO dan SNI	0	-	-	6,2	6,6	7	0	0	6,4	6,7	6,7	7,00	6,70	95,71	Akan Tercapai
	4			Debitur penerima KUR	6.650	-	-	30.534	30.700	30.900	32.126	28.034	34.555	37.495	37.495	30900,00	37495,00	121,34	Tercapai
	5	2)	Peningkatan kemampuan teknologi industri	Jumlah IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	63	67	70	0	0	0	68	71	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	6			Jumlah IKM Meubel yang memiliki SVLK	0	171	231	0	0	0	180	183	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	7			Persentase IKM yang memiliki standar produk teknologi manufaktur	0	-	0	3,60	3,80	4	0	0	3,6	3,85	3,85	4,00	3,85	96,25	Akan Tercapai
	8			Persentase IKM mebel yang memiliki SVLK	0	-	0	11	11,5	12	0	0	11	9,59	9,59	12,00	9,59	79,92	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	9	3)	Pengembangan sentra-sentra industri potensial	Laju pengembangan sentra industri	0	-	0	0	0,05	0	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
29	URUSAN TRANSMIGRASI																			
	1	1)	Pengembangan wilayah Transmigrasi	Persentase calon transmigrasi yang ditempatkan	7	31	32	33	34	35	19	4	7	14	0	35,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	2	2)	Transmigrasi Lokal	Persentase calon transmigrasi yang sudah disosialisasi	0	0	41,33	42	42,5	43	0	41,33	12,67	71,4	0	43,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras	
	URUSAN PENUNJANG PEMERINTAHAN																			
30	URUSAN PERENCANAAN																			
	1	1)	Perencanaan pembangunan daerah	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	0	Tercapai
	2			Tersedianya dokumen perencanaan RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	0	Tercapai
	3			Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	0	Tercapai
	4			Penjabaran konsistensi program RPJMD ke dalam RKPD	85	90	95	95	100	100	90	95	96,13	94,5	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
5			Penjabaran konsistensi program RKPD ke dalam APBD	85	90	95	95	100	100	90	95	98	98,8	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
6	2)	Perencanaan bidang ekonomi	Prosentase konsistensi kesesuaian rencana pembangunan daerah dengan rencana pembangunan bidang ekonomi	55	55	60	65	70	75	55	60	65	70	75	75,00	75,00	100,00	Tercapai
7			Prosentase ketersediaan data dan informasi di bidang ekonomi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Tercapai
8			Prosentase jumlah perusahaan yang berkontribusi terhadap pembangunan daerah	22,73	25,97	25,97	26,62	27,27	27,92	25,97	25,97	12,67	11	15	27,92	15,00	53,72	Perlu Upaya Keras
9	3)	Perencanaan bidang sosial budaya	Persentase Konsistensi Perencanaan Bidang Sosial Budaya dengan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Sosial Budaya	79	83	85	87	90	92	83	85	87	90	92	92,00	92,00	100,00	Tercapai
10			Persentase ketersediaan data dasar dan informasi perencanaan bidang sosial budaya	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
11	4)	Perencanaan prasarana wilayah dan sumber daya alam	Ketersediaan data dan informasi di bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	100,00	Tercapai
12			Kesesuaian rencana pembangunan dengan dokumen RTRW	100	100	100	100	100	100	100	Ada	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	13	5)	Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah	Prosentase ketercapaian target rencana pembangunan daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai	
31	URUSAN KEUANGAN																		
	1	1)	Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Kenaikan PAD	7,14	17,61	50,3	7,24	7,34	7,44	17,61	50,30	7,61	-21	6,33	7,44	6,33	85,08	Akan Tercapai
	2			Laporan Keuangan Pemerintah Daerah disusun tepat waktu maksimal 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran	3	3	3	3	3	2	3	3	3	3	3	2,00	3,00	150,00	Tercapai
	3			Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disampaikan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir	6	6	6	6	6	5	6	6	6	6	6	5,00	6,00	120,00	Tercapai
	4			Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan tepat waktu/tidak tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	tepat waktu	100,00	Tercapai
	5			Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	51,6	51,6	51,6	52,5	53,00	53,5	51,6	51,6	53,09	54,85	55,13	53,50	55,13	103,05	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6			Raperda APBD disetujui paling lama 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan	84	85	81	82	83	84	85	81	87,62	86,75	83,33	84,00	83,33	99,20	Akan Tercapai
7			Persentase tanah pemkab yang bersertifikat	51,6	51,6	51,6	52,5	53,00	53,5	51,6	51,6	53,09	54,85	55,13	53,50	55,13	103,05	Tercapai
8			Meningkatkan Pengelolaan aset daerah	0,72	0,74	0,74	0	0	0	0,74	0,74	0	0	0	0,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
9			Rasio jumlah pasar terhadap total jumlah pedagang	0	0,27	0,27	0,27	0,72	0,72	0,00	0,00	0,72	0,67	0	0,72	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
10			Persentase pendapatan pasar terhadap PAD	1,5	1,52	1,53	1,54	1,56	1,58	1,71	1,12	1,54	1,63	0	1,58	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
32	URUSAN KEPEGAWAIAN DIKLAT																	
1	1)	Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	Prosentase ASN yang mengikuti diklat	95	95	95	60	100	100	95,43	78,52	99	116	11,26	100,00	11,26	11,26	Perlu Upaya Keras
2	2)	Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	Persentase layanan sumber daya aparatur	76	13	57,14	94	95	95	76,74	93,96	100	100	11,26	95,00	11,26	11,85	Perlu Upaya Keras
3			Prosentase Pembinaan Disiplin ASN	0	50	60	80	100	100	78	48	100	56	95	100,00	95,00	95,00	Akan Tercapai
4			Prosentase informasi kepegawaian yang akurat	0	100	100	80	100	100	98,73	94	100	100	98	100,00	98,00	98,00	Akan Tercapai
5			Prosentase Pengembangan Aparatur	0	42,3	76	80	100	100	66,04	76	83	87	77,74	100,00	77,74	77,74	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM				KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
						2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2				3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	URUSAN PENELITIAN PENGEMBANGAN																		
	1	1)	Penelitian dan Pengembangan	Jumlah peserta yang mengikuti lomba krenova	29	20	22	25	30	30	20	22	21	22	0	30,00	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras
	2			Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan daerah	7	10	12	16	18	19	10	14	19	21	34	19,00	34,00	178,95	Tercapai
34	URUSAN PENGAWASAN																		
	1	1)	Peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Persentase OPD yang memiliki maturitas level III		20	20	27	40	60	20	20	28	100	3	60,00	3,00	5,00	Perlu Upaya Keras
	2			Persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pengawasan		86	82	77	85	90	86	71,7	75,98	84,36	91,81	90,00	91,81	102,01	Tercapai
	3			Persentase pengaduan masyarakat terselesaikan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	71,67	100,00	71,67	71,67	Perlu Upaya Keras
	4	2)	Peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	Persentase aparatur pengawasan yang mengikuti diklat pengawasan		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	5			Persentase aparatur pengawasan yang telah dinilai angka kreditnya		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	6	3)	Penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan	Persentase pemeriksaan program tahunan	42	48	50	100	100	100	48	50	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
35	URUSAN FUNGSI LAINNYA																		

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM		KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	1	1)	Peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat Daerah	Persentase Tersedianya Rencana Kerja Tahunan DPRD Kabupaten	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	2			Persentase Tersusun dan terintegrasinya program-program kerja DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, fungsi pembentukan Perda dan fungsi anggaran dalam RPJM maupun RKPD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	3			Persentase Terintegrasinya program-program DPRD untuk melaksanakan fungsi pengawasan, pembentukan Perda dan anggaran ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen anggaran setwan DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	4			Persentase produk Perda terbentuk	100	100	100	100	100	100	100	100	92,31	50	100,00	50,00	50,00	Perlu Upaya Keras
	5			Persentase produk pengawasan DPRD	100	100	100	100	100	100	100	100	92,86	75	100,00	75,00	75,00	Perlu Upaya Keras
	6			Persentase Produk Perda anggaran pemerintahan daerah tersusun	100	100	100	100	100	100	100	100	66,67	100,00	66,67	66,67	Perlu Upaya Keras	
	7	2)	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Persentase OPD yang menyusun LKjIP secara benar	50	53,02	90	90	90	92	50,11	90	29,41	29,41	92,16	0,00	0,00	Perlu Upaya Keras

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS	
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%		
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	8	3)	Peningkatan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan	Persentase jumlah kebijakan tentang Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai Peraturan Pemerintah	60	84,54	81,71	83	85	87	80,84	81,71	19,61	83,33	66,67	87,00	66,67	76,63	Perlu Upaya Keras
	9	4)	Peningkatan pelayanan daerah/wakil kepala daerah	Persentase pelaporan penyelenggaraan pemerintahan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
	10			Persentase kelancaran pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	78	100,00	78,00	78,00	Perlu Upaya Keras
	11			Persentase Pendampingan Keprotokolan Kepala Daerah	100	0	94	100	100	100	0	95	95	98	98	100,00	98,00	98,00	Akan Tercapai
	12	5)	Peningkatan Kerjasama antar pemerintah daerah	Persentase peningkatan kerjasama daerah	10	10	15	15	15	15	10	15	69	29,7	10	15,00	10,00	66,67	Perlu Upaya Keras
	13	6)	Pengembangan Wilayah Perbatasan	Kejelasan batas antar kabupaten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	90	25	50,00	25,00	50,00	Perlu Upaya Keras
	14			Jumlah obyek rupa bumi yang terbakukan	50	50	50	50	50	50	50	50	50	70	22	50,00	22,00	44,00	Perlu Upaya Keras
	15	7)	Peningkatan Koordinasi, Pembinaan, Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Kecamatan	Persentase kecamatan yang mampu melaksanakan tata kelola administrasi kecamatan secara baik	0	0	70	80	90	100	0	70	76	89,7	89,7	100,00	89,70	89,70	Akan Tercapai
	16	8)	Penataan peraturan perundang-undangan	Persentase raperda yang terselesaikan	15	90	100	28	12	20	23	23	100	92,31	83,33	20,00	83,33	416,67	Tercapai

NO	INDIKATOR KINERJA PROGRAM			KONDISI KINERJA AWAL RPJMD	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM					CAPAIAN KINERJA PROGRAM					KONDISI KINERJA PADA AKHIR RPJMD			STATUS
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	TARGET	REALISASI	%	
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17			Persentase produk hukum yang terdigitalisasi	100	90	100	113	77	90	113	108	100	64,94	85,25	90,00	85,25	94,72	Akan Tercapai
18	9)	Penyuluhan pelayanan bantuan hukum dan HAM	Persentase penanganan permasalahan / kasus hukum dan HAM	2	100	100	6	6	4	4	4	100	100	90	4,00	90,00	2.250,00	Tercapai
19	10)	Peningkatan Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan	Persentase administrasi pelaksanaan kegiatan OPD yang dimonitor	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
20			Kesesuaian pekerjaan fisik antara rencana (spesifikasi waktu pelaksanaan) dengan kondisi capain lapangan	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	39,95	100,00	39,95	39,95	Perlu Upaya Keras
21			Persentase OPD yang menyampaikan laporan perkembangan fisik dan keuangan tepat waktu	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
22	11)	Peningkatan Pelayanan Pemilihan Penyedia Barang/Jasa	Persentase penyelesaian dokumen regulasi pengadaan barang dan jasa	100	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
23			Persentase pengadaan barang dan jasa secara elektronik yang diselesaikan	100	0	100	100	100	100	0	100	100	100	100	100,00	100,00	100,00	Tercapai
24	12)	Intensifikasi penanganan pengaduan masyarakat	Persentase aduan masyarakat yang tertangani	12	0	60	70	72	74	0	60	73	92	100	74,00	100,00	135,14	Tercapai

Sumber: LKJIP Kabupaten Klaten

BAB III

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

3.1. Kondisi Perekonomian Nasional dan Daerah

3.1.1. Kondisi Perekonomian Nasional

Perekonomian Indonesia pada tahun 2020 mengalami tekanan besar akibat Pandemi Covid-19. Kontraksi pertumbuhan ekonomi Indonesia secara keseluruhan tahun 2020 sebesar 2,1 persen, merupakan yang pertama kali sejak krisis ekonomi Asia tahun 1997/1998. Hal ini berpotensi membawa Indonesia turun ke dalam kategori negara berpendapatan menengah-bawah (*lower middle income countries*), setelah sempat masuk ke kategori negara berpendapatan menengah-atas (*upper middle income countries*) pada tahun 2019.

Perlambatan pertumbuhan Indonesia tahun 2020 terjadi pada semua komponen PDB, baik dari sisi pengeluaran, lapangan usaha, maupun wilayah. Dari sisi PDB pengeluaran, pada tahun 2020, konsumsi masyarakat yang meliputi konsumsi rumah tangga dan Lembaga Non-Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPRM), berkontraksi sebesar 2,7 persen. Hal ini disebabkan oleh berkurangnya permintaan dan penurunan daya beli masyarakat sebagai dampak pembatasan sosial yang diberlakukan hampir sepanjang 2020. Untuk konsumsi LNPRM, penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang diselenggarakan pada akhir 2020, tidak dapat mendorong pertumbuhan secara signifikan.

Pada tahun 2021 ekonomi Indonesia diharapkan tumbuh hingga 4,8 persen, dengan kisaran 4,5–5,3 persen. Namun, proses pemulihan ini berpotensi berjalan lambat, dipengaruhi oleh penambahan kasus Covid-19 harian yang masih tinggi serta munculnya varian baru virus Corona. Keberhasilan kebijakan penanganan Covid-19 akan menjadi kunci meningkatnya keyakinan masyarakat serta dunia usaha, yang kemudian dapat meningkatkan konsumsi dan investasi. Pemberian vaksin Covid-19 juga akan memulihkan keyakinan masyarakat dalam melakukan aktivitas ekonomi. Perkembangan vaksinasi Indonesia menunjukkan perkembangan positif dan terus bergulir sejak Januari 2021.

Investasi diharapkan menjadi kunci pemulihan ekonomi agar mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan meningkatkan kapasitas produktif perekonomian. Pemulihan ekonomi secara bertahap dan alokasi belanja modal yang lebih besar, diperkirakan mampu mendorong pertumbuhan investasi hingga 6,2 persen pada tahun 2021.

Konsumsi masyarakat diperkirakan pulih seiring dengan perbaikan daya beli masyarakat dan berangsur normalnya perekonomian sebagai dampak positif vaksinasi. Konsumsi masyarakat diperkirakan akan tumbuh 3,7 persen, sementara konsumsi pemerintah diperkirakan tumbuh 4,8 persen. Hal ini dipengaruhi oleh stimulus PEN serta program vaksinasi. Kinerja ekspor diperkirakan mengalami akselerasi seiring dengan pemulihan ekonomi global, utamanya mitra dagang utama Indonesia, yaitu Cina, dan peningkatan harga komoditas internasional. Dikombinasikan dengan pemanfaatan beberapa perjanjian perdagangan bilateral maupun regional, kinerja ekspor Indonesia diperkirakan meningkat 11,5 persen. Sementara itu, impor diperkirakan tumbuh 12,9 persen, didorong oleh perbaikan permintaan domestik secara bertahap.

Tahun 2022 merupakan tahun kunci dalam mengejar pencapaian target pertumbuhan ekonomi jangka menengah dan panjang karena tahun 2022 menjadi titik awal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 dan peningkatan daya saing

perekonomian yang terkoreksi akibat Covid-19. Pengalaman negara lain menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi akan berlangsung sepenuhnya ketika Covid-19 berhasil dikendalikan. Bantuan dari Pemerintah perlu tetap diberikan kepada dunia usaha dan rumah tangga untuk memastikan pemulihan ekonomi berjalan dengan cepat, seiring dengan peningkatan efektivitas pengendalian Covid-19, termasuk proses vaksinasi. Sementara itu, peningkatan daya saing perekonomian dilakukan melalui reformasi struktural yang mencakup perbaikan iklim investasi, peningkatan riset dan inovasi, perluasan pembangunan infrastruktur, dan peningkatan kualitas SDM. Melalui langkah akselerasi pemulihan ekonomi dan reformasi struktural, kinerja ekonomi Indonesia pada tahun 2022 diperkirakan akan mengalami peningkatan.

Kondisi perekonomian global diperkirakan relatif baik pada tahun 2022. Meskipun pertumbuhannya lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya, pertumbuhan ekonomi global tahun 2022 diperkirakan masih berada pada tingkat yang relatif tinggi, yakni 4,2 persen. Hal ini sejalan dengan meningkatnya volume perdagangan global yang diperkirakan tumbuh tinggi, sebesar 6,3 persen. Kondisi ini didukung oleh berhasilnya penanganan pandemi Covid-19 dan besarnya stimulus yang diberikan oleh berbagai pemerintah negara dunia. Kembali meningkatnya kasus Covid-19 atau kendala pada proses vaksinasi berpotensi menyebabkan terhambatnya pemulihan aktivitas ekonomi global.

Peningkatan harga komoditas internasional, yang dipicu oleh pulihnya permintaan dunia, juga berkontribusi pada tingginya pertumbuhan ekonomi. Harga komoditas yang tinggi akan mampu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya dari sisi ekspor, tetapi juga konsumsi dan investasi. Hingga awal tahun 2021, harga komoditas ekspor utama Indonesia seperti batu bara, kelapa sawit, dan nikel berada pada tingkat yang tinggi. Namun demikian, harga komoditas batubara dan kelapa sawit berpotensi menghadapi penurunan harga akibat pemulihan ekonomi pascapandemi Covid-19 yang lebih mengarah ke *Green Recovery*.

Keberhasilan pengendalian Covid-19 masih menjadi kunci utama bagi upaya pemulihan ekonomi dalam negeri. Upaya pengendalian pandemi Covid-19 telah menunjukkan perbaikan, tercermin dari penurunan kasus harian dan terus meningkatnya jumlah vaksinasi. Pemerintah perlu terus meningkatkan efektivitas pengendalian untuk menurunkan kasus penularan dan melakukan vaksinasi dengan target mencapai herd immunity pada awal tahun 2022. Hal ini menjadi tantangan strategis yang perlu dipercepat dan ditingkatkan efektivitasnya untuk menjamin berlangsungnya pemulihan ekonomi.

Dampak yang ditimbulkan oleh pandemi Covid-19 juga menjadi tantangan pencapaian sasaran ekonomi tahun 2022. Akibat pandemi Covid-19, sebagian dunia usaha telah bangkrut dan menutup permanen usahanya. Perusahaan yang bertahan mengalami tekanan dari sisi neraca keuangan. Konsumsi rumah tangga juga tertekan karena pendapatannya menurun secara signifikan, bahkan tidak sedikit yang kehilangan pekerjaan dan sumber pendapatan. Kelas menengah juga masih menahan konsumsi, seiring dengan tingkat keyakinan konsumen yang masih pada zona pesimis. Tanpa adanya upaya untuk mengembalikan kondisi dunia usaha dan rumah tangga kembali ke tingkat sebelum krisis, pemulihan ekonomi akan berjalan lambat.

Dari sisi moneter, prospek pemulihan ekonomi AS yang diperkirakan lebih cepat, serta rencana normalisasi kebijakan moneter di beberapa negara berpotensi meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar Rupiah pada tahun 2022, yang

ditransmisikan melalui arus modal keluar (*capital outflow*) dari emerging markets, termasuk salah satunya Indonesia.

3.1.2. Kondisi Perekonomian Jawa Tengah

Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah mengalami perbaikan pada tahun 2020. Berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) pada 5 Februari 2021, perekonomian Jawa Tengah pada triwulan IV 2020 tumbuh -3,34% (yoy), lebih baik dari pencapaian triwulan III 2020 sebesar -3,79% (yoy). Meningkatnya mobilitas masyarakat mendorong peningkatan aktivitas ekonomi di Jawa Tengah. Kinerja perekonomian Jawa Tengah tersebut berada di bawah pertumbuhan ekonomi nasional yang sebesar -2,19% (yoy) dan kawasan Jawa (-2,60%; yoy). Sementara itu, secara triwulanan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Jawa Tengah tumbuh -1,89% (qtq), tumbuh lebih rendah dibandingkan 4,79% (qtq) pada triwulan sebelumnya.

Kondisi perbaikan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah didorong peningkatan aktivitas investasi dan ekspor luar negeri. Perbaikan kinerja investasi didorong pembangunan infrastruktur pemerintah. Sementara peningkatan permintaan mendorong perbaikan ekspor luar negeri nonmigas Jawa Tengah terutama komoditas kayu dan barang dari kayu. Meski Pandemi Covid-19 masih melanda global, permintaan produk furnitur dari Jawa Tengah justru mengalami peningkatan. Selain dari pembeli yang lama, berbagai pelaku usaha mencatat adanya penambahan pembeli baru dari berbagai negara dari kawasan Eropa, Timur Tengah, hingga Australia.

Berdasarkan lapangan usaha utama, perbaikan perekonomian pada tahun 2020 terjadi pada Pertanian, Industri, Konstruksi dan Perdagangan. Pertumbuhan lapangan usaha pertanian meningkat cukup pesat yaitu sebesar 7,56% (yoy). Peningkatan sektor primer tersebut disebabkan adanya peningkatan luas panen pada tanaman pangan. Namun, pertumbuhan subsektor peternakan masih belum membaik disebabkan permintaan hewan ternak yang masih rendah ditengah masih minimnya kegiatan yang melibatkan masyarakat. Sektor industri pengolahan, meskipun masih mengalami kontraksi, juga tercatat membaik seiring menguatnya permintaan luar negeri terhadap komoditas garmen, kayu olahan, dan alas kaki. Perbaikan perekonomian juga didorong oleh sektor informasi dan komunikasi, serta sektor jasa kesehatan yang mengalami peningkatan permintaan pada masa Pandemi Covid-19.

Dengan perkembangan hingga tahun 2020, perekonomian Jawa Tengah pada 2020 tumbuh -2,65% (yoy), atau lebih rendah dibanding tahun 2019 yang sebesar 5,40% (yoy). Sebagaimana perkiraan sebelumnya, wabah Covid-19 telah membuat seluruh elemen perekonomian mengalami pelemahan. Dari sisi pengeluaran, sumbangan terbesar pelemahan tersebut bersumber dari investasi dan konsumsi rumah tangga. Momen peningkatan investasi yang telah direncanakan di 2020 terhalang oleh Pandemi Covid-19. Berbagai program strategis pemerintah yang dicanangkan di Jawa Tengah terpaksa ditunda dalam beberapa waktu. Investor pun menahan menanam modal ke Jawa Tengah tercermin dari penanaman modal asing (PMA) yang tumbuh -70,88% (yoy) dan penanaman modal dalam negeri (PMDN) tumbuh -33,12% (yoy), selama 2020. Relokasi pabrik tekstil dari wilayah lain ke Jawa Tengah yang direncanakan pada akhir triwulan II 2020, tertunda hingga periode yang belum dapat ditentukan.

Provinsi Jawa Tengah secara keseluruhan tahun 2020 mengalami penurunan tekanan inflasi dibandingkan tahun 2019. Inflasi Provinsi Jawa Tengah pada 2020 tercatat sebesar 1,55% (yoy), melanjutkan tren penurunan yang telah

berlangsung sejak triwulan I 2020 (3,25%; yoy). Penurunan tekanan inflasi Jawa Tengah pada tahun 2020 mencerminkan penurunan permintaan konsumsi masyarakat, sejalan dengan kelesuan kinerja perekonomian pada masa pandemi. Hal ini terutama berlangsung pada komoditas-komoditas pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas Dan Bahan Bakar Lainnya, serta Kelompok Transportasi. Selanjutnya, Pemerintah juga berusaha menjaga ketahanan daya beli masyarakat melalui beberapa kebijakan tarif, khususnya tarif komoditas energi.

Secara umum perekonomian Provinsi Jawa Tengah pada 2021 diperkirakan akan lebih baik dibanding 2020. Ditinjau dari sisi pengeluaran, peningkatan pertumbuhan ekonomi tahun 2021 didorong oleh seluruh komponen pengeluaran. Konsumsi rumah tangga meningkat didorong keyakinan konsumen yang membaik disertai masuknya hari besar keagamaan nasional. Sementara itu, peningkatan investasi sejalan prospek investasi pabrik baru dan akselerasi pembangunan proyek strategis. Sementara pada sisi lapangan usaha, peningkatan diperkirakan terjadi pada lapangan usaha industri pengolahan, konstruksi, dan perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor.

Konsumsi diperkirakan meningkat pada 2021 sejalan perbaikan pendapatan dan ekspektasi masyarakat. Pemulihan konsumsi turut didukung oleh optimisme konsumen yang membaik, terutama optimisme perbaikan pendapatan. Selain itu, ekspektasi masyarakat juga membaik seiring optimisme tersedianya vaksin pada tahun 2021. Pemulihan investasi Jawa Tengah diperkirakan berlanjut pada 2021. Daya saing investasi Jawa Tengah yang cukup baik bersumber dari tenaga kerja yang kompetitif dan kawasan industri di berbagai daerah. Perbaikan kinerja investasi pada 2021 turut ditopang oleh berlanjutnya pembangunan proyek infrastruktur setelah sempat tertunda pada 2020. Perbaikan kinerja ekspor mendukung berlanjutnya pemulihan ekonomi Jawa Tengah pada 2021. Perbaikan perekonomian global yang diperkirakan berlanjut pada negara tujuan ekspor Jawa Tengah, mendorong perbaikan ekspor. Lapangan usaha terdampak Covid-19 diperkirakan membaik di tahun 2021.

Lapangan usaha industri pengolahan menjadi motor utama pemulihan ekonomi. Relokasi pabrik ke Jawa Tengah akan semakin menambah peningkatan produksi industri pengolahan Jawa Tengah. Perbaikan industri dan pergerakan masyarakat, mendorong perbaikan sektor perdagangan. Selanjutnya, lapangan usaha konstruksi juga membaik di tahun 2021. Meningkatnya aktivitas konstruksi terutama bersumber dari pembangunan proyek infrastruktur. Selain dari sektor pemerintah, pihak swasta juga diperkirakan meningkatkan aktivitas investasi bangunan. Sektor transportasi akan meningkat di 2021 seiring pulihnya sektor pariwisata, konsumsi domestik, dan perjalanan bisnis.

Inflasi tahunan Jawa Tengah tahun 2021 diperkirakan mengalami peningkatan. Faktor utama yang diperkirakan mendorong peningkatan laju inflasi berasal dari Kelompok Makanan, Minuman, Dan Tembakau; Kelompok Transportasi; serta Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Lainnya.

3.1.3. Kondisi Perekonomian Kabupaten Klaten

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten dari tahun 2016 – 2020 masing-masing sebesar 5,17 persen (2016); 5,34 persen (2017); 5,47 persen (2018); 5,50 persen (2019) dan pada tahun 2020 mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,18 persen. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2019 yakni sebesar 5,50 persen. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Klaten pada tahun 2020 yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas

dasar harga konstan 2010, lebih rendah dari tahun sebelumnya yaitu -1,18% (2019= 5,50%). Bahkan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Tengah dan Nasional juga sama di tahun 2020 menunjukkan kontraksi. Akibat dampak Covid-19, Perekonomian di Kabupaten Klaten tahun 2020 mengalami kontraksi cukup dalam. Pandemi Covid-19 yang terjadi sepanjang tahun 2020 secara nyata mempengaruhi Perekonomian Kabupaten Klaten untuk pertama kalinya ditahun 2020 mengalami kontraksi sebesar -1,18%.

Dari sisi pengeluaran, selama periode 2016 – 2020, produk yang dikonsumsi di wilayah domestik sebagian besar masih untuk memenuhi kebutuhan konsumsi akhir rumah tangga (di atas 75 persen). Ekspor juga mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 32 - 39 persen produk Kabupaten Klaten diperdagangkan ke luar daerah, baik ke luar kabupaten maupun ke luar Indonesia. Demikian halnya dengan impor mempunyai peran yang relatif besar, karena sekitar 38 - 46 persen permintaan domestik masih dipenuhi oleh produk dari impor. Pengeluaran untuk kapital (PMTB) memberi kontribusi sekitar 20 - 23 persen, sedangkan kontribusi konsumsi akhir pemerintah berada pada rentang 6-8 persen. Hal ini menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam menyerap produk domestik tidak terlalu besar. Pada tahun 2016-2020 perdagangan di Kabupaten Klaten yang direpresentasikan oleh transaksi ekspor dan impor, menunjukkan bahwa nilai ekspor selalu lebih rendah dari nilai impor, yang berarti bahwa perdagangan di Kabupaten Klaten selalu menunjukkan posisi “defisit”.

Perkembangan inflasi di Kabupaten Klaten dalam Kurun waktu tahun 2016-2020 relatif terkendali cukup baik di angka rata-rata 1%-3%. Bahkan tingkat inflasi di Kabupaten Klaten lebih baik dibandingkan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional dalam periode tersebut. Tingkat inflasi di Kabupaten Klaten pada tahun 2016 sebesar 2,31% turun ditahun 2020 menjadi sebesar 1,48%.

Lapangan usaha yang mengalami kontraksi pertumbuhan terdalam diantaranya Transportasi dan Pergudangan sebesar 28,72 persen, Jasa Perusahaan sebesar 7,04 persen, Jasa Lainnya sebesar 5,56 persen, Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 5,03 persen, Perdagangan Besar dan Eceran Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 4,79 persen.

Beberapa lapangan usaha masih mengalami pertumbuhan ekonomi positif, diantaranya; Informasi dan komunikasi sebesar 17,84 persen; Jasa Kesehatan dan Kegiatan sosial sebesar 8,34 persen; Pengadaan Listrik dan Gas sebesar 4,51 persen; Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 3,53 persen; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang sebesar 2,99 persen; dan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 2,12 persen.

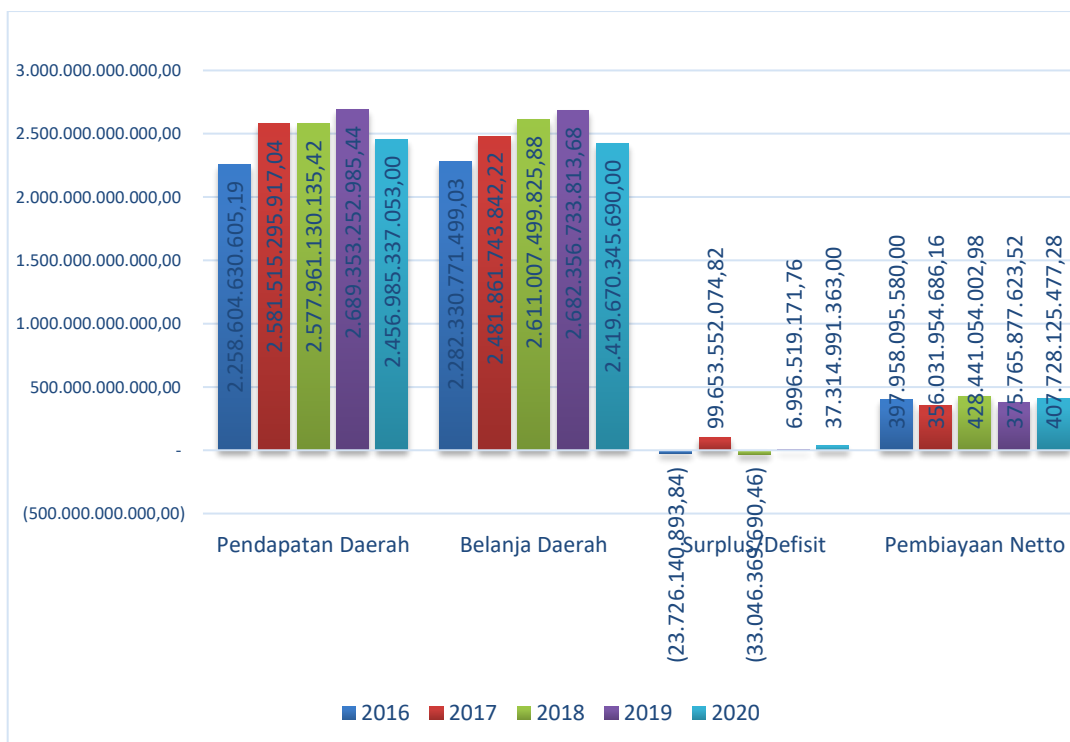
3.2. Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan gambaran tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam penyusunan RPJMD menganalisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan terlebih dahulu dianalisis terhadap perkembangan pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai dengan kewenangan

daerah. Analisis juga dilakukan terhadap perkembangan neraca daerah, meliputi: aset dan hutang daerah serta ekuitas dana.

Dalam rangka memberikan gambaran secara komprehensif atas anggaran daerah pada tahun 2016-2020, diperlukan suatu deskripsi ringkas mengenai pelaksanaan APBD secara agregatif. Hal ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang kondisi fiskal atau keuangan daerah Kabupaten Klaten. Deskripsi kinerja pelaksanaan APBD dilakukan pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah; Belanja Daerah yang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer; serta Pembiayaan Daerah yang meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan.

Perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja tahun 2016 hingga tahun 2019 secara umum menunjukkan peningkatan, namun pada tahun 2020 terjadi penurunan pendapatan sebesar 8,64 persen dan belanja sebesar 9,79 persen. Dari sisi surplus/defisit dan pembiayaan, pada tahun 2020 terjadi peningkatan surplus sebesar 433,34 persen dan Pembiayaan Netto sebesar 8,51 persen. Defisit yang terjadi pada tahun 2016 dan 2018, sebagian besar dibiayai oleh SiLPA tahun sebelumnya, sehingga resiko fiskal yang timbul dari defisit tersebut tidak signifikan. Proporsi SiLPA terhadap total Penerimaan Pembiayaan tahun 2016-2020, rata-rata sebesar 97,62 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



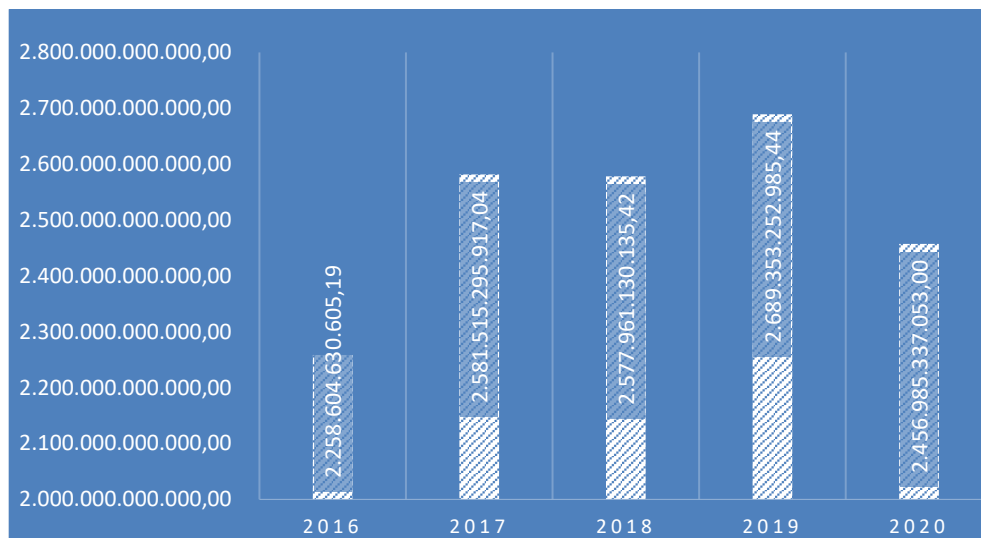
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.1.
Perkembangan APBD Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

3.2.1. Kinerja Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Sumber Pendapatan daerah Kabupaten Klaten terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2019 cenderung meningkat, namun

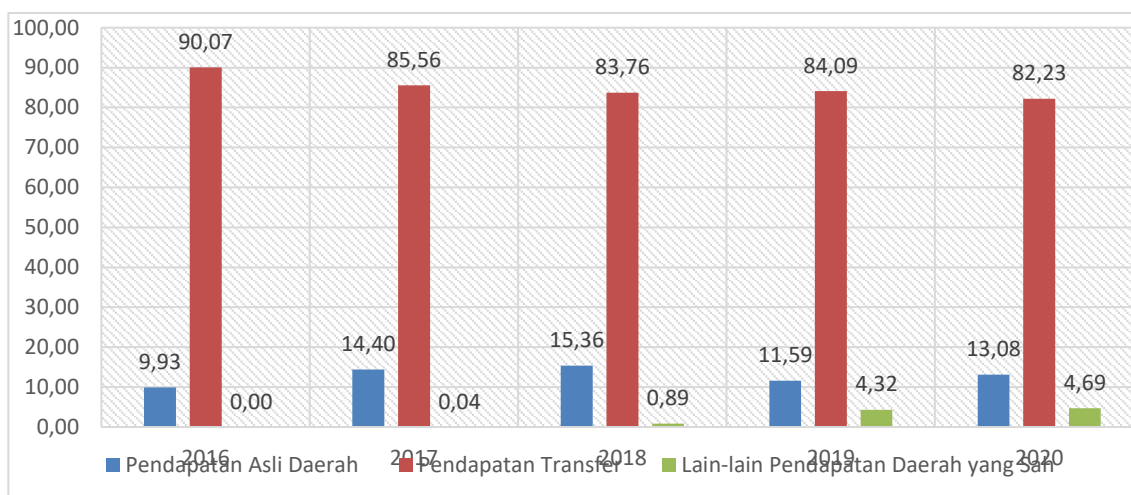
pada tahun 2020 mengalami penurunan 8,64 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.2.
Grafik Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

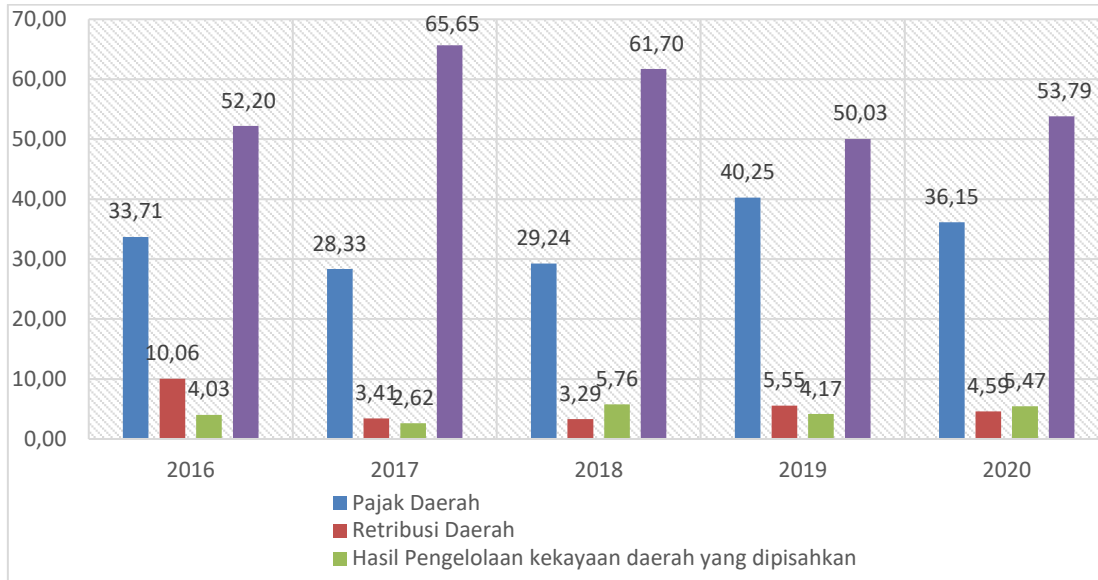
Proporsi Pendapatan Transfer masih mendominasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 yaitu sebesar di atas 70 persen atau dari total Pendapatan Daerah tiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Klaten secara umum masih sangat tergantung pada Pendapatan Transfer dalam mendanai belanja daerahnya. Dengan kata lain derajat kemandirian keuangan daerah masih rendah, terlihat dari proporsi Pendapatan Asli Daerah berkisar antara 9,93 persen hingga 15,36 persen. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.3.
Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

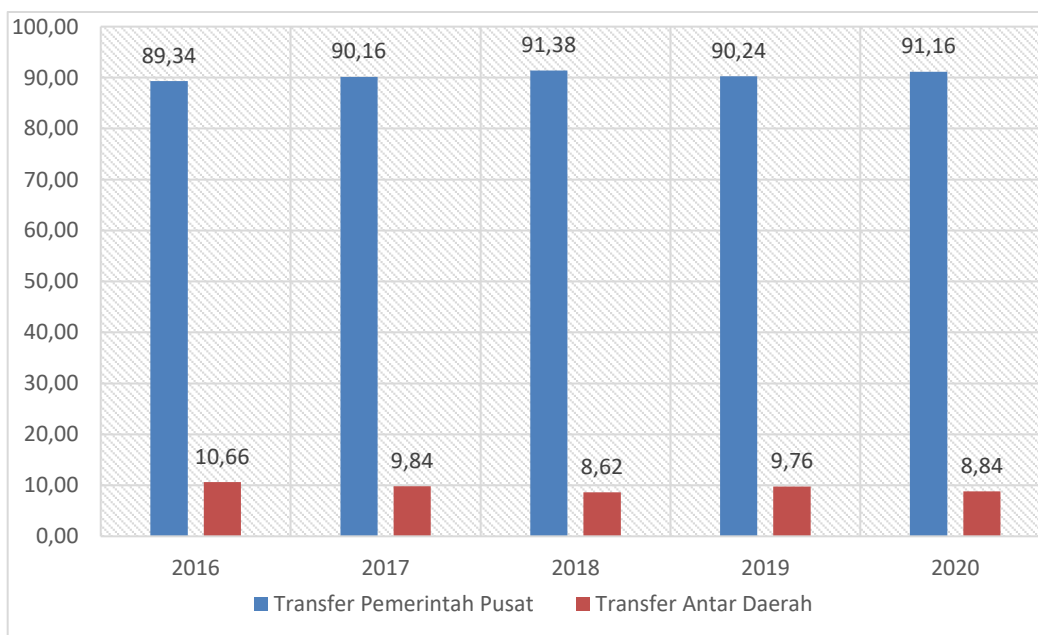
Pendapatan Daerah Rretribusi Daerah, dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.4.
Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

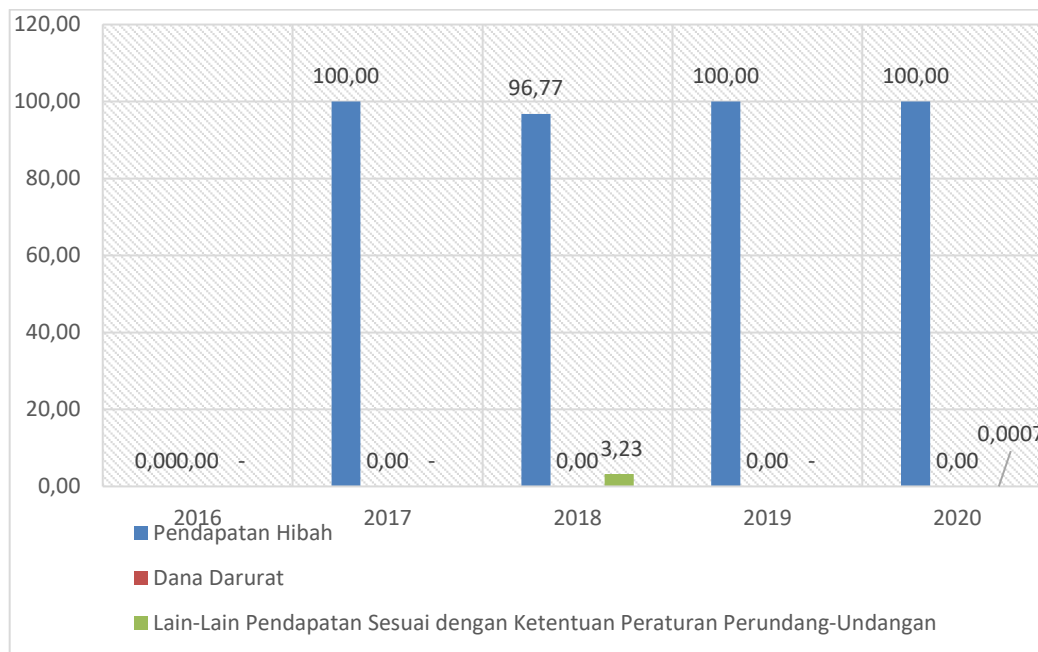
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat memberikan kontribusi tertinggi dari total pendapatan transfer Kabupaten Klaten tahun 2016-2020, dengan proporsi terhadap total Pendapatan Transfer di atas 89% per tahun. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.5.
Grafik Kontribusi Unsur Pendapatan Transfer Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah paling besar berasal dari Pendapatan Hibah, sebagaimana terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.6.
Grafik Kontribusi Unsur Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Berdasarkan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020, diketahui bahwa rata-rata pertumbuhan Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 adalah sebesar 16,84%. Angka tersebut dipengaruhi dari angka rata-rata pertumbuhan dari semua komponen pendapatan daerah baik Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, maupun Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Secara rinci Realisasi Pendapatan Daerah beserta rata-rata pertumbuhan Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.
Rata-rata Pertumbuhan dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016–2020

KODE REKENING	URAIAN	2016	2017	2018	2019	2020
1	PENDAPATAN DAERAH	2,258,604,630,605.19	2,581,515,295,917.04	2,577,961,130,135.42	2,689,353,252,985.44	2,578,135,836,354.00
1.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	224,197,408,481.19	371,718,439,306.04	395,884,244,135.42	311,648,401,655.44	329,963,261,898.00
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	75,574,747,729.00	105,290,677,595.00	115,771,908,527.00	125,444,617,676.00	116,132,536,269.00
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,559,038,217.00	12,668,781,932.00	13,030,982,654.00	17,296,912,453.00	14,760,621,483.00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	9,025,861,668.00	9,742,870,570.00	22,811,147,630.00	12,988,398,308.00	17,577,664,499.00
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	117,037,760,867.19	244,016,109,209.04	244,270,205,324.42	155,918,473,218.44	181,492,439,647.00
1.2	PENDAPATAN TRANSFER	2,034,407,222,124.00	2,208,854,116,720.00	2,159,179,984,888.00	2,261,406,993,817.00	2,133,001,834,456.00
1.2.1	Transfer Pemerintah Pusat	1,817,481,533,481.00	1,991,449,941,319.00	1,973,068,360,661.00	2,040,734,631,378.00	1,954,407,857,576.00
1.2.1.1	Dana Perimbangan	1,573,615,108,481.00	1,624,715,625,119.00	1,652,127,767,661.00	1,666,073,637,378.00	1,516,494,102,076.00
1.2.1.2	Dana Insentif Daerah	0.00	55,646,870,000.00	0.00	0.00	57,067,155,000.00
1.2.1.5	Dana Desa	243,866,425,000.00	311,087,446,200.00	320,940,593,000.00	374,660,994,000.00	380,846,600,500.00
1.2.2	Transfer Antar-Daerah	216,925,688,643.00	217,404,175,401.00	186,111,624,227.00	220,672,362,439.00	178,593,976,880.00
1.2.2.1	Pendapatan Bagi Hasil	143,325,208,643.00	171,067,103,920.00	175,902,080,227.00	188,228,865,439.00	163,789,663,880.00
1.2.2.2	Bantuan Keuangan	73,600,480,000.00	46,337,071,481.00	10,209,544,000.00	32,443,497,000.00	14,804,313,000.00
1.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	0.00	942,739,891.00	22,896,901,112.00	116,297,857,513.00	115,170,740,000.00
1.3.1	Pendapatan Hibah	0.00	942,739,891.00	22,157,277,976.00	116,297,857,513.00	115,170,740,000.00
1.3.3	Lain-lain Pendapatan Sesuai Dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	0.00	0.00	739,623,136.00	0.00	0.00

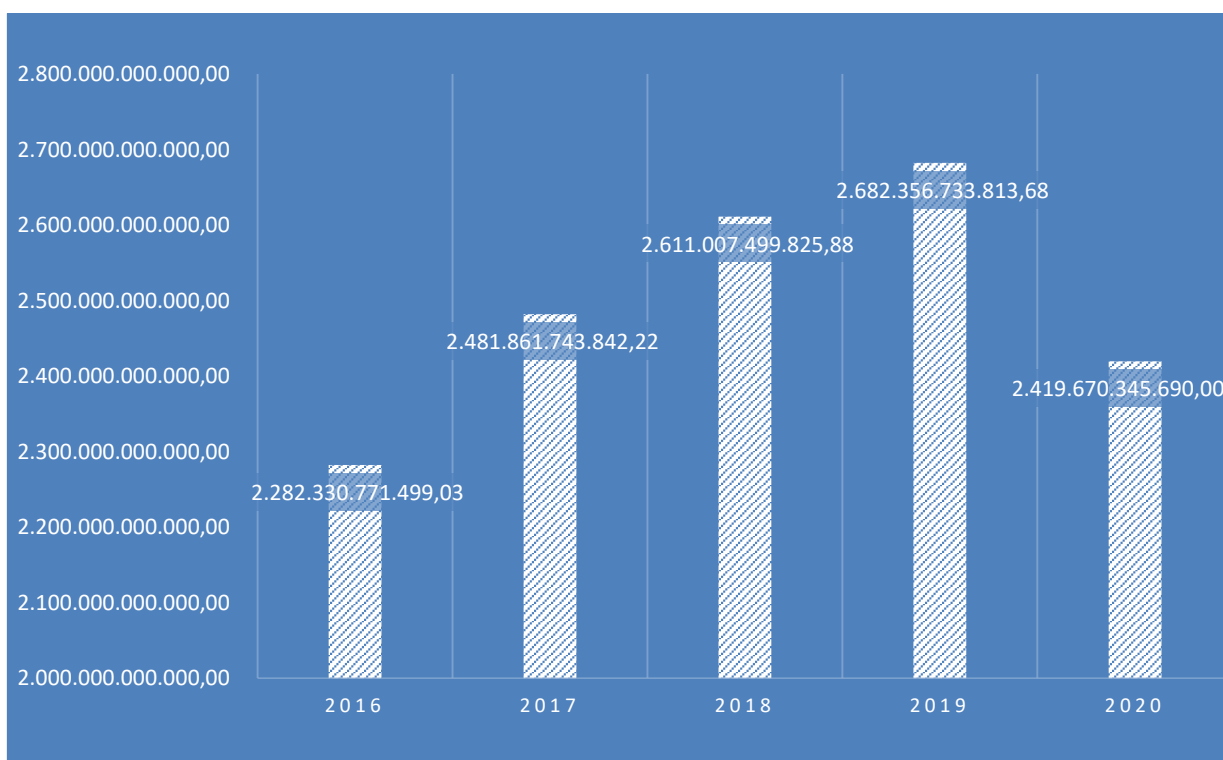
Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

3.2.2. Kinerja Belanja Daerah

Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Belanja Daerah untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah, serta Urusan Pemerintahan Penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga, dan Belanja Transfer. Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya. Belanja Transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja Daerah Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 mengalami peningkatan dari tahun 2016 hingga tahun 2019. Namun Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten tahun 2020 menurun sebesar 9,79 persen dibandingkan pendapatan daerah tahun 2019. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:

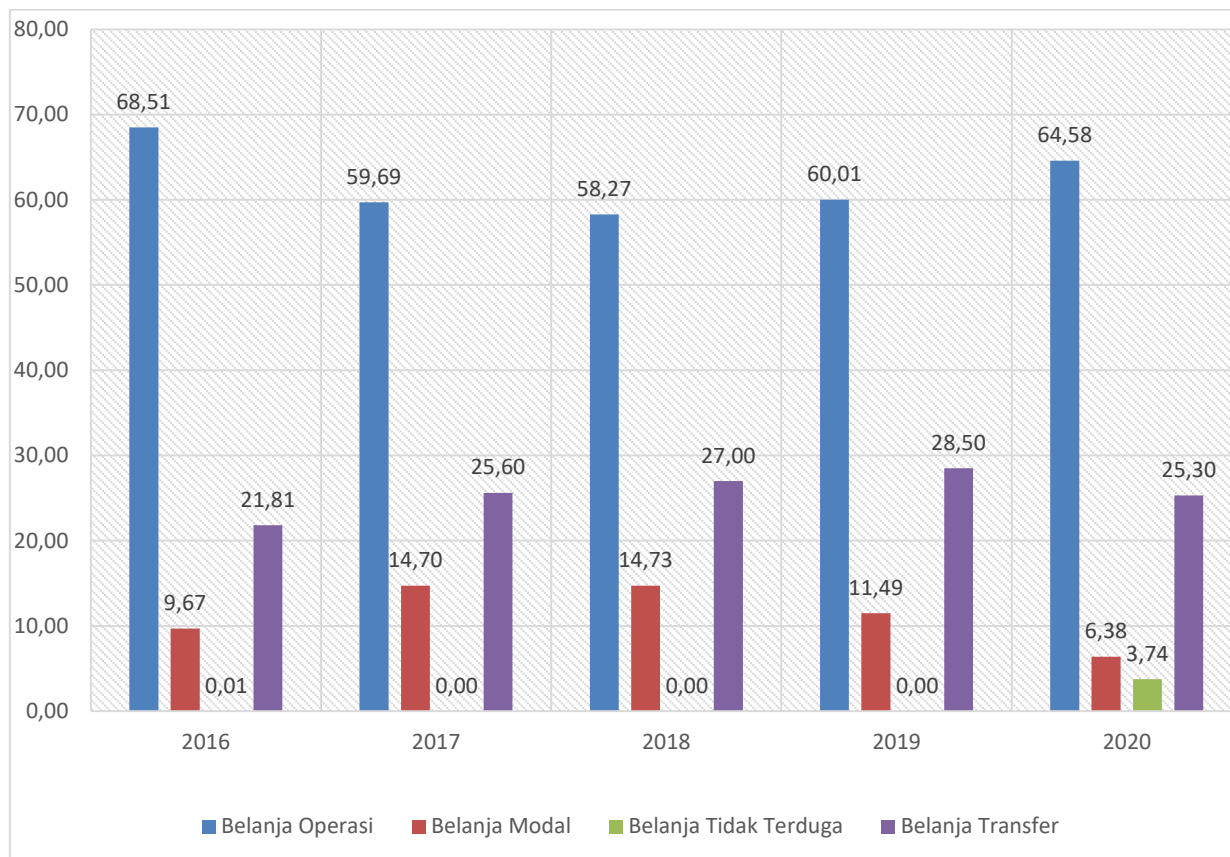


Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.7.
Grafik Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Proporsi Belanja Operasi mendominasi Belanja Daerah Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 antara 58-68% dari total Belanja Daerah tiap tahunnya, diikuti Belanja Transfer dan Belanja Modal. Unsur Belanja Tak Terduga hanya ada pada tahun 2016 sebesar 0,01% dan tahun 2020 sebesar 3,74% dari total Belanja Daerah tahun berkenaan. Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 besar karena

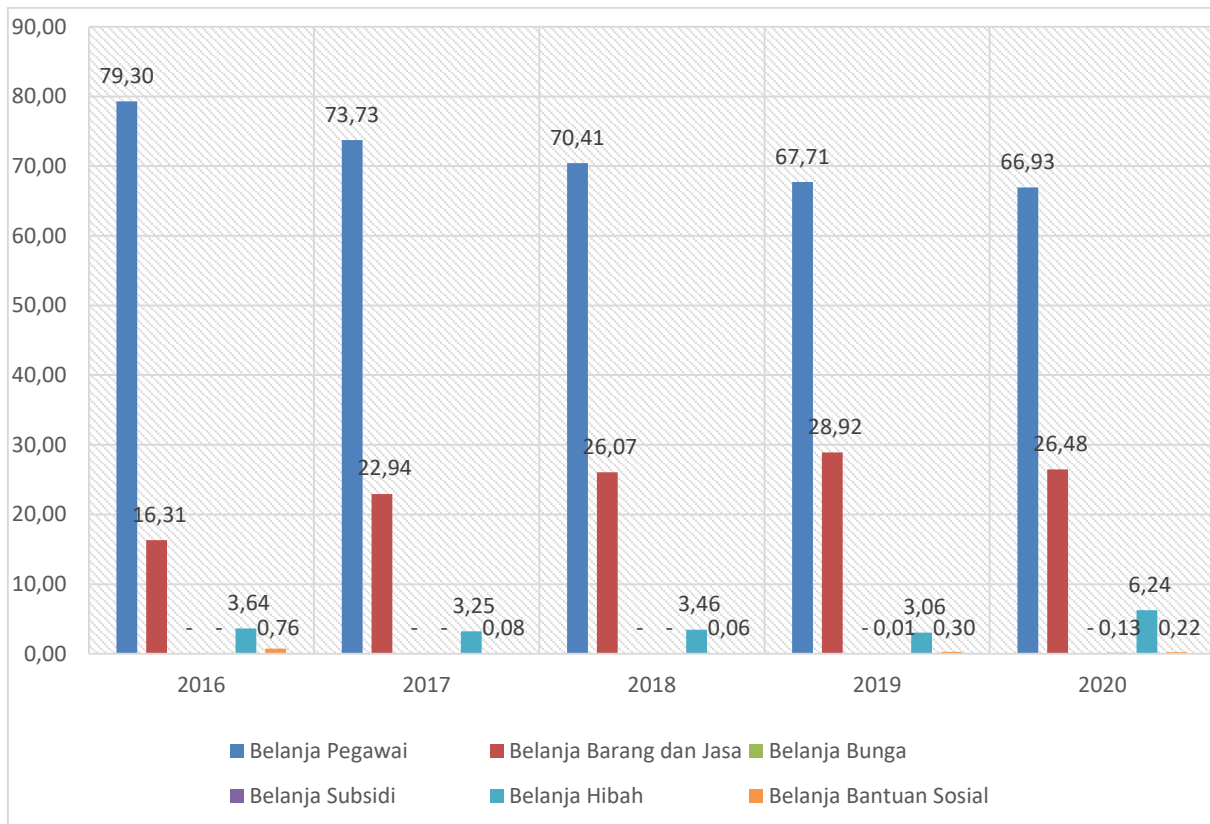
adanya kebijakan *refocusing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.8.
Grafik Proporsi Unsur Belanja Daerah Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

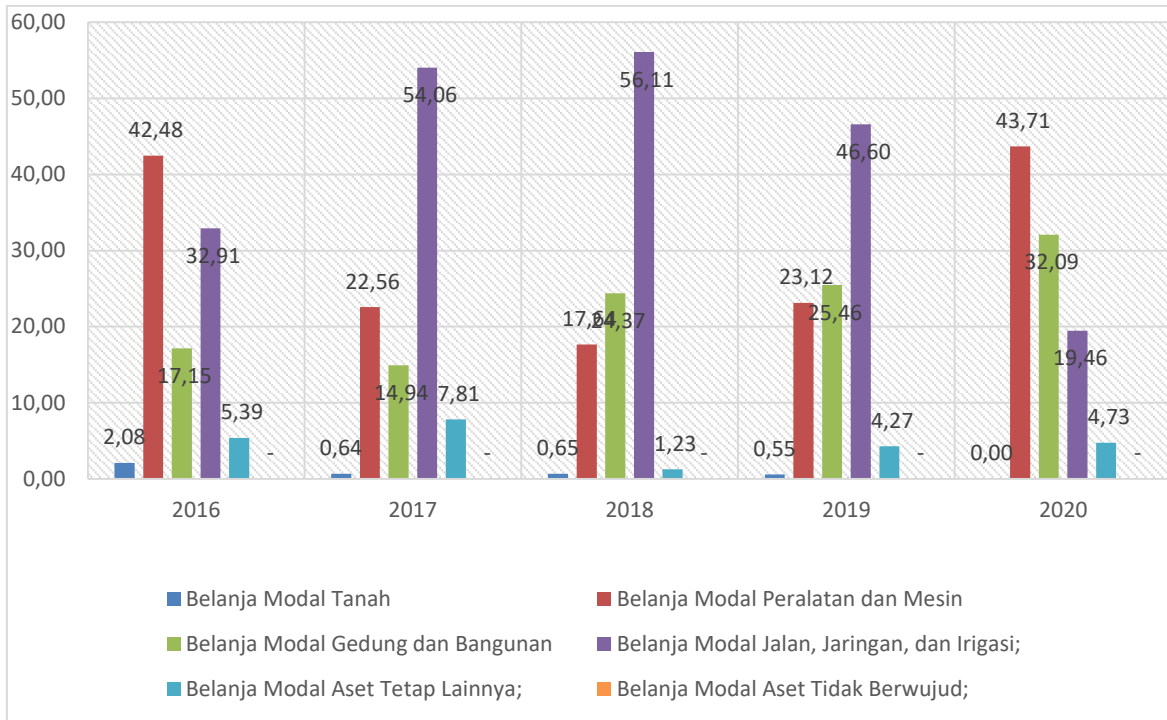
Proporsi Belanja Pegawai mendominasi Belanja Operasi Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 pada kisaran antara 66% hingga 79% dari total Belanja Operasi tiap tahunnya, diikuti Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 proporsi Belanja Pegawai terhadap total Belanja Operasi mengalami penurunan dari 79,30% menjadi sebesar 66,93%. Sedangkan proporsi Belanja Barang dan Jasa terhadap total Belanja Operasi mengalami kenaikan dari 16,31% menjadi sebesar 26,48%. Dibandingkan tahun 2019, proporsi Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa terhadap Belanja Operasi mengalami penurunan, sedangkan proporsi Belanja Hibah terhadap total Belanja Operasi mengalami kenaikan dari 3,06% menjadi sebesar 6,24%. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.9.
Grafik Proporsi Unsur Belanja Operasi Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

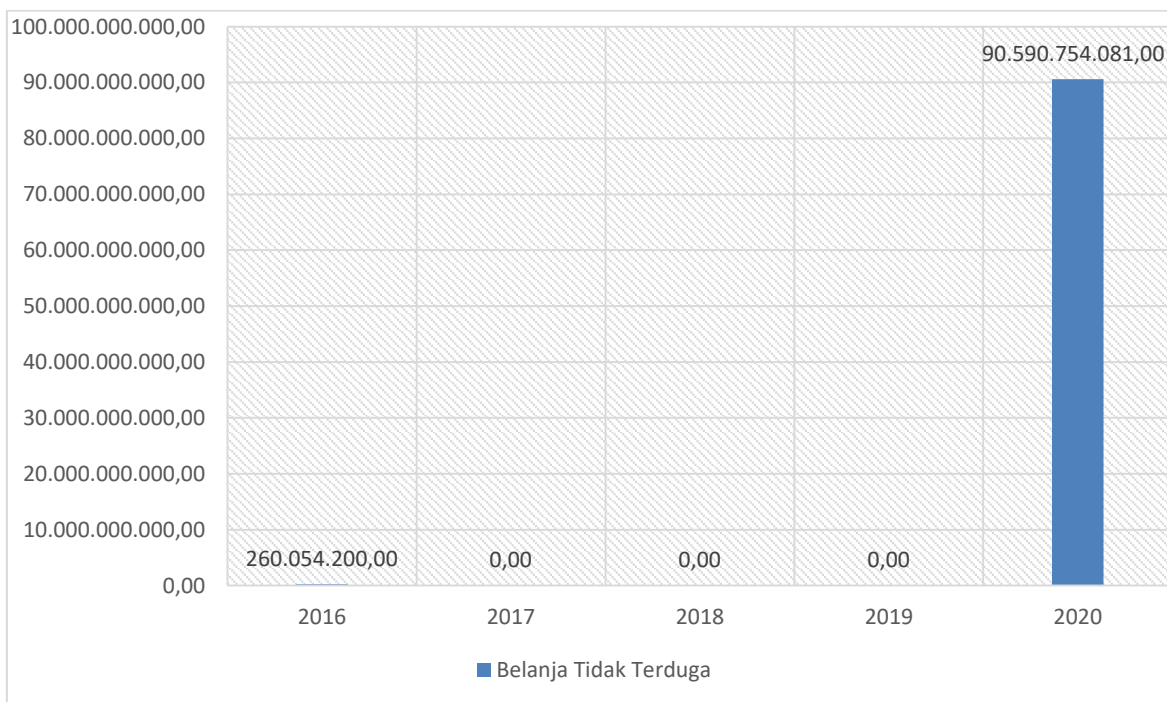
Proporsi unsur Belanja Modal terhadap total Belanja Modal, secara umum didominasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Belanja Modal Jalan, Jaringan Dan Irigasi, dan Belanja Modal Gedung Dan Bangunan. Unsur Belanja Modal dalam kurun waktu tahun 2019 hingga tahun 2020, proporsi Belanja Modal Peralatan dan Mesin, Proporsi Belanja Gedung dan Bangunan, dan Proporsi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya mengalami kenaikan terhadap total Belanja Modal, sedangkan proporsi Belanja Modal Tanah dan proporsi Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi mengalami penurunan terhadap total Belanja Modal. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.10.
Grafik Proporsi Unsur Belanja Modal Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

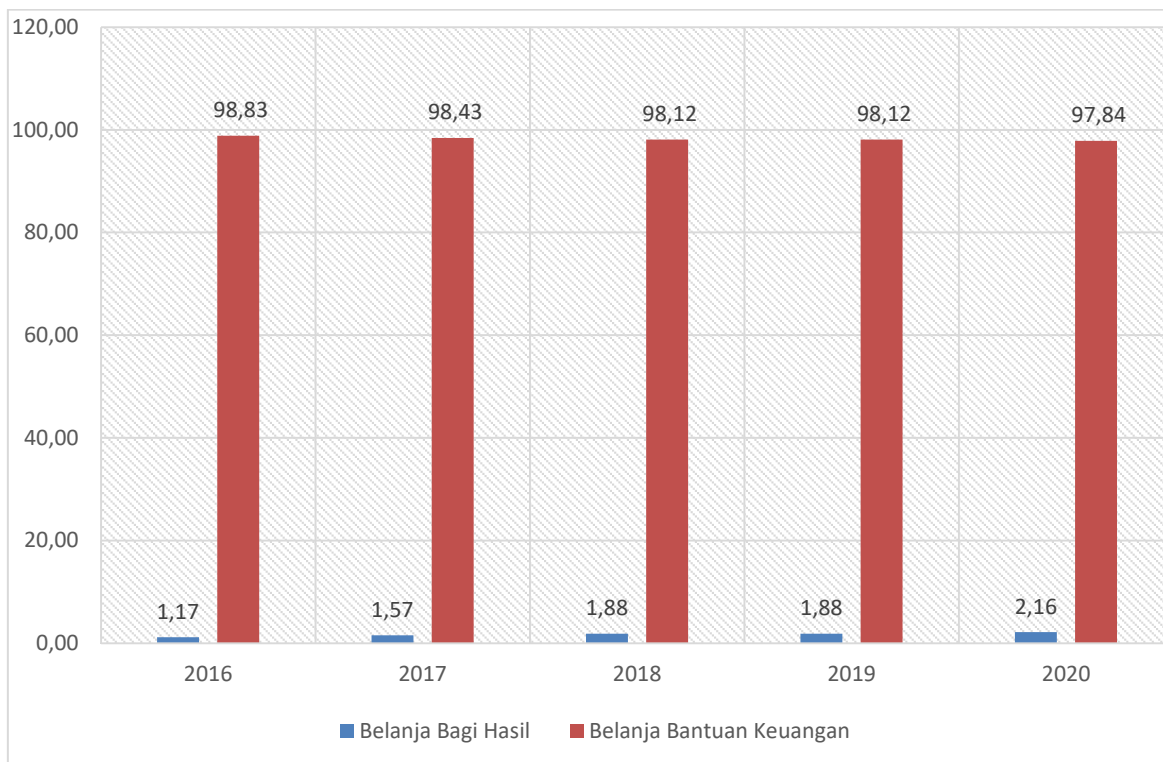
Belanja Tidak Terduga pada tahun 2020 mengalami kenaikan signifikan dibandingkan tahun 2016, Sedangkan belanja tidak terduga pada tahun 2017 hingga tahun 2019 tidak ada. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.11.
Grafik Unsur Belanja Tidak Terduga Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Belanja bantuan keuangan mendominasi Belanja Transfer dalam kurun waktu tahun 2016 hingga tahun 2020 seperti terlihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.12.
Grafik Proporsi Unsur Belanja Transfer Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

Secara rinci Realisasi Belanja Daerah beserta rata-rata proporsi unsur Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.2.
Perkembangan Belanja Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)	Rata-rata Proporsi (%)
2	Belanja Daerah	2.282.330.771.499,03	2.481.861.743.842,22	2.611.007.499.825,88	2.682.356.733.813,68	2.419.670.345.690,00	100,00
2.1.	Belanja Operasi	1.563.576.411.511,03	1.481.520.782.617	1.521.442.608.529,88	1.609.749.628.450,68	1.562.521.349.604,00	62,21
2.1.1.	Belanja Pegawai	1.239.843.399.717,00	1.092.314.834.122,40	1.071.242.466.613,00	1.089.951.573.950,00	1.045.730.394.418,00	71,61
2.1.2.	Belanja Barang dan Jasa	255.081.046.746,03	339.931.253.564,82	396.683.616.799,88	465.549.491.950,68	413.743.112.529	24,15
2.1.3.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Subsidi	-	-	-	122.478.000,00	1.988.515.348,00	0,03
2.1.5.	Belanja Hibah	56.841.540.048,00	48.124.969.930,00	52.609.000.117,00	49.234.334.550,00	97.547.602.309,00	3,93
2.1.6.	Belanja Bantuan Sosial	11.810.425.000,00	1.149.725.000,00	907.525.000,00	4.891.750.000,00	3.511.725.000,00	0,28
2.2.	Belanja Modal	220.759.237.283,00	364.937.481.638	384.574.980.960	308.145.403.976	154.300.411.712,00	11,39
2.2.1.	Belanja Modal Tanah	4.601.391.750,00	2.327.070.670,00	2.513.931.353,00	1.708.996.625,00	-	0,79
2.2.2.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	93.767.955.597,00	82.340.073.312,00	67.824.005.481,00	71.235.825.711,00	67.444.068.728,00	29,90
2.2.3.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	37.855.211.146,00	54.509.322.159,00	93.727.349.976,00	78.462.410.768,00	49.518.428.837,00	22,80
2.2.4.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;	72.641.123.070,00	197.273.695.766,00	215.775.344.210,00	143.580.718.481,00	30.032.863.863,00	41,83
2.2.5.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;	11.893.555.720,00	28.487.319.731,00	4.734.349.940,00	13.157.452.391,00	7.305.050.284,00	4,69
2.2.6.	Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;	-	-	-	-	-	-
2.3.	Belanja Tidak Terduga	260.054.200,00	-	-	-	90.590.754.081,00	0,75
2.3.1	Belanja Tidak Terduga	260.054.200,00	-	-	-	90.590.754.081,00	100,00
2.4.	Belanja Transfer	497.735.068.505,00	635.403.479.587	704.989.910.336,00	764.461.701.387,00	612.257.830.293,00	25,64
2.4.1	Belanja Bagi Hasil	5.826.321.071,00	9.970.076.237	13.263.553.836,00	14.346.947.667,00	13.255.263.593,00	1,73
2.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	491.908.747.434,00	625.433.403.350	691.726.356.500,00	750.114.753.720,00	599.002.566.700,00	98,27

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten, 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.2.3. Kinerja Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah dirinci menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, jenis, obyek, dan rincian obyek Pembiayaan Daerah. Pembiayaan Daerah. Penerimaan pembiayaan daerah berasal dari SiLPA dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal daerah dan pembentukan dana cadangan.

Selisih Penerimaan Pembiayaan terhadap Pengeluaran Pembiayaan merupakan Pembiayaan Netto yang digunakan untuk menutup defisit anggaran. Pembiayaan Netto Kabupaten Klaten tahun 2016 hingga tahun 2020 mengalami fluktuatif. Pembiayaan Netto tahun 2020 mencapai sebesar Rp.407.728.125.477,28,00 dengan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.408.728.125.477,28 dan Pengeluaran Pembiayaan sebesar Rp.1.000.000.000,00 secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.3.
Perkembangan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	408.728.125.477,28
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	382.728.125.477,28
3.1.2.	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	-	26.000.000.000,00
3.1.3.	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	63.231.687,00	-	-	-	-
3.1.4.	Penerimaan Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.5.	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.1.6.	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00	27.249.000.000,00	19.500.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-
3.2.2.	Penyertaan Modal Daerah	5.304.000.000,00	13.200.000.000,00	19.249.000.000,00	9.500.000.000,00	1.000.000.000,00
3.2.3.	Pembentukan Dana Cadangan	3.000.000.000,00	5.000.000.000,00	8.000.000.000,00	10.000.000.000,00	-
3.2.4.	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	-	-
3.2.5.	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-	-	-
	Pembiayaan Netto	397.958.095.580,00	356.031.954.686,16	428.441.054.002,98	375.765.877.623,52	407.728.125.477,28
	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Tahun Berkeanaan	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	395.394.684.312,52	382.762.396.795,28	445.043.116.840,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.2.4. Neraca Daerah

Analisis neraca daerah bertujuan untuk mengetahui kemampuan keuangan Pemerintah Daerah melalui perhitungan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio aktivitas serta kemampuan aset daerah untuk penyediaan dana pembangunan daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas.

Neraca Daerah merupakan salah satu unsur dari laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Neraca Daerah sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah. Neraca daerah dapat memberikan informasi kepada manajemen pemerintahan daerah mengenai likuiditas dan fleksibilitas keuangan daerah. Neraca daerah dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah, dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif dan dapat mendorong terciptanya tata pemerintahan yang baik (*good governance*). Kinerja Neraca Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu Tahun 2017-2020 yang telah di audit dapat dilihat pada Tabel 3.4.

Tabel 3.4.
Pertumbuhan Neraca Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertumbuhan
ASET					
ASET LANCAR	554,188,344,902.01	535,978,337,508.06	530,020,197,774.62	667,032,607,795.67	7.15
Kas	455,698,293,160.98	396,452,845,568.30	383,026,986,445.28	449,078,121,320.28	0.29
Piutang	63,965,210,823.86	82,718,770,070.20	90,772,786,631.35	96,886,207,751.46	15.26
Piutang Lain-lain	3,782,438,614.00	3,645,388,614.00	3,645,388,614.00	3,580,925,026.00	-1.80
Penyisihan Piutang	- 42,978,700,332.28	-38,806,420,714.40	-43,932,404,079.30	-48,882,627,822.90	4.92
Beban Dibayar Dimuka	590,700,392.38	338,831,168.40	282,868,105.00	321,505,058.17	-15.17
Persediaan	73,130,402,243.07	91,628,922,801.56	96,224,572,058.29	166,048,476,462.66	34.29
INVESTASI JANGKA PANJANG	133,715,351,862.86	160,632,633,734.00	177,259,457,618.00	178,945,272,695.00	10.48
ASET TETAP	2,958,585,555,502.37	3,247,115,789,661.39	3,288,202,270,228.38	2,556,910,271,392.16	-3.74
Tanah	1,281,651,012,843.00	1,287,177,420,488.00	1,298,731,595,034.00	832,215,833,323.00	-11.53
Peralatan dan Mesin	716,935,744,066.98	752,440,542,842.99	694,227,255,074.98	781,817,876,877.00	3.28
Gedung dan Bangunan	701,477,235,200.18	837,035,387,730.18	959,821,457,641.18	955,733,620,648.00	11.19
Jalan, Jaringan dan Instalasi	1,019,259,420,540.00	1,233,401,897,099.00	1,371,375,922,895.00	1,563,883,565,527.06	15.41
Aset Tetap Lainnya	339,502,207,078.21	371,547,796,694.22	266,094,477,791.22	268,305,695,189.98	-6.04
Konstruksi Dalam Pengerjaan	100,702,381,485.00	83,388,457,979.00	31,192,682,048.00	57,293,192,856.00	1.30

URAIAN	2017	2018	2019	2020	Rata2 Pertumbuhan
Akumulasi Penyusutan	-1,200,942,445,711.00	-1,317,875,713,172.00	-1,333,241,120,256.00	-1,902,339,513,028.89	17.86
DANA CADANGAN	8,422,000,455.00	17,296,766,858.00	29,234,792,846.00	0.00	24.80
ASET LAINNYA	71,821,862,345.00	40,300,602,657.00	132,682,270,442.00	163,889,719,155.51	69.62
JUMLAH ASET	3,726,733,115,067.25	4,001,324,130,418.45	4,157,398,988,909.00	3,566,777,871,038.34	-0.98
KEWAJIBAN					
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	12,014,878,813.00	14,184,935,215.78	14,356,397,757.00	20,876,092,289.00	21.56
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	12,786,400.00	1,058,161,255.78	117,985,335.00	29,775,000.00	2,670.69
Pendapatan Diterima Dimuka	765,686,875.00	1,601,231,506.00	1,533,052,459.00	1,036,228,404.00	24.15
Utang Beban	4,896,212,678.00	5,285,668,839.00	6,227,103,632.00	13,502,079,212.00	47.53
Utang Jangka Pendek Lainnya	6,340,192,860.00	6,239,873,615.00	6,478,256,331.00	6,308,009,673.00	-0.13
JUMLAH KEWAJIBAN	12,014,878,813.00	14,184,935,215.78	14,356,397,757.00	20,876,092,289.00	21.56
EKUITAS	3,714,718,236,254.25	3,987,139,195,202.67	4,143,042,591,152.00	3,545,901,778,749.34	-1.06
EKUITAS	3,714,718,236,254.25	3,987,139,195,202.67	4,143,042,591,152.00	3,545,901,778,749.34	-1.06
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	3,726,733,115,067.25	4,001,324,130,418.45	4,157,398,988,909.00	3,566,777,871,038.34	-0.98

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021

Untuk mengetahui kondisi rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten, dilakukan analisis terhadap rasio likuiditas, solvabilitas, dan rasio aktivitas. Secara lengkap, perkembangan rasio keuangan Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020 tersaji pada Tabel 3.5.

Tabel 3.5.
Analisis Rasio Keuangan
Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2017-2020

No	Uraian	2017	2018	2019	2020
1.	Rasio lancar (current ratio)	46.13	37.79	36.92	31.95
2.	Rasio quick (quick ratio)	43.57	34.04	33.26	26.32
3.	Rasio total hutang terhadap total aset	0.003	0.004	0.003	0.006
4.	Rasio hutang terhadap modal	0.003	0.004	0.003	0.006

Berdasarkan Tabel 3.5, rasio keuangan yang dianalisis terdiri atas rasio likuiditas, solvabilitas dan aktivitas. Rasio likuiditas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Rasio likuiditas yang digunakan dalam analisis yaitu:

1. Rasio Lancar

Rasio lancar menunjukkan kemampuan untuk membayar hutang yang segera harus dipenuhi dengan aktiva lancar. Berdasarkan tabel 3.2.2 di atas, rasio lancar pada dari Tahun 2017 sampai dengan 2020 cukup besar yaitu berkisar antara 31 s/d 46. Hal ini berarti kemampuan membayar hutang jangka pendek dengan menggunakan seluruh aset lancar Pemerintah Kabupaten Klaten cukup besar.

2. Rasio Quick (*Quick Ratio*)

Rasio Quick menunjukkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid. Berdasarkan tabel 3.12 di atas Rasio Quick pada Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 cukup besar berkisar antara 26 s/d 43. Hal ini berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam membayar kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aset yang lebih lancar (likuid) cukup baik.

Sedangkan Rasio Solvabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan Pemerintah Daerah dalam memenuhi kewajiban jangka panjang. Rasio Solvabilitas terdiri atas:

1. Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset

Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset menunjukkan seberapa besar pengaruh hutang terhadap aktiva, dimana semakin besar nilainya akan semakin besar pula pengaruh hutang terhadap pembiayaan dan menandakan semakin besar risiko yang dihadapi oleh Pemerintah. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0.003 s/d 0.006. Hal ini berarti pengaruh hutang terhadap aktiva sangat kecil.

2. Rasio Hutang Terhadap Modal

Rasio Hutang Terhadap Modal menunjukkan seberapa perlu hutang jika dibandingkan dengan kemampuan modal yang dimiliki, dimana semakin kecil nilainya berarti semakin mandiri, tidak tergantung pembiayaan dari pihak lain. Besar Rasio Total Hutang Terhadap Total Aset dari Tahun 2017 sampai dengan tahun 2020 sebesar 0.003 s/d 0.006. Hal ini menunjukkan bahwa nilai total

hutang berada jauh di bawah nilai modal yang dimiliki Kabupaten Klaten. Sehingga dapat disimpulkan bahwa Klaten tidak tergantung pada hutang.

3.2.5. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada kebijakan Pendapatan, Pembelanjaan serta Pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah. Efisiensi serta efektivitas Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

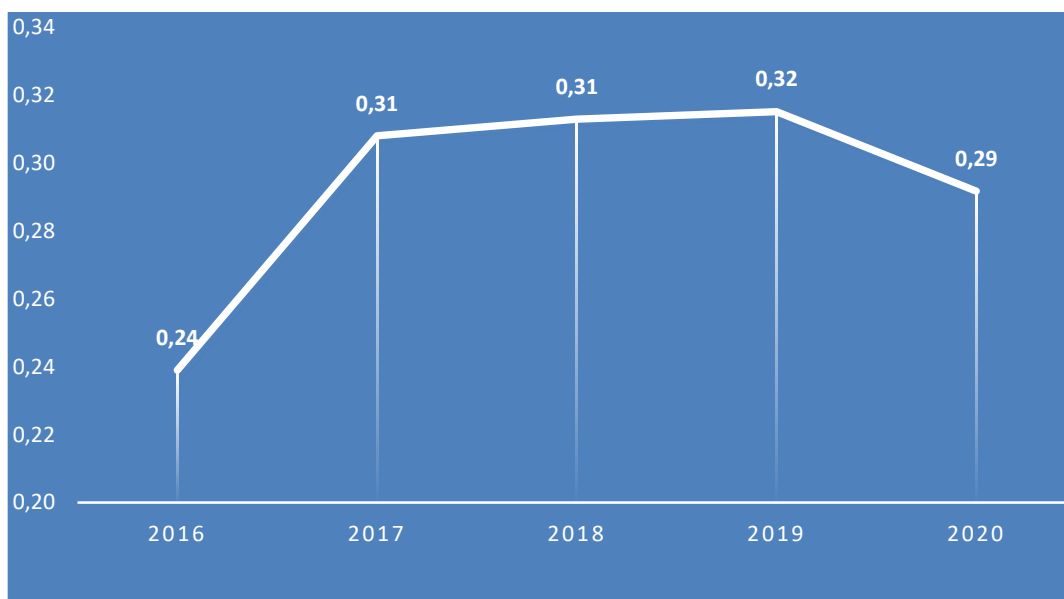
3.3. Analisis Pendapatan Daerah

3.3.1. Rasio Pajak

Rasio pajak (*tax ratio*) di tingkat daerah merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak daerah dengan PDRB. Rasio pajak dapat digunakan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat dalam membayar pajak, mengukur kinerja perpajakan, dan melihat potensi pajak yang dimiliki. PDRB sangat erat kaitannya dengan potensi pajak daerah karena dapat menggambarkan kegiatan ekonomi masyarakat. Jika pertumbuhan ekonomi daerah baik tentunya akan menjadi potensi penerimaan pajak di wilayah tersebut.

PDRB yang akan digunakan dalam analisis ini adalah PDRB Atas Dasar Harga Berlaku yang merupakan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan patokan harga pada setiap tahun. Nilai PDRB ini pada umumnya digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi yang terjadi di suatu wilayah. Perhitungan rasio pajak memberikan gambaran hubungan antara penerimaan pajak daerah di wilayah tersebut dengan PDRB-nya.

Rasio pajak Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2019 mengalami peningkatan, menjadi 0,32 persen, namun tahun 2020 turun menjadi sebesar 0,29 persen. Rata-rata pajak yang bisa dipungut oleh Pemerintah Kabupaten Klaten selama tahun 2016 hingga tahun 2020 sebesar 0,29 persen dari PDRB. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



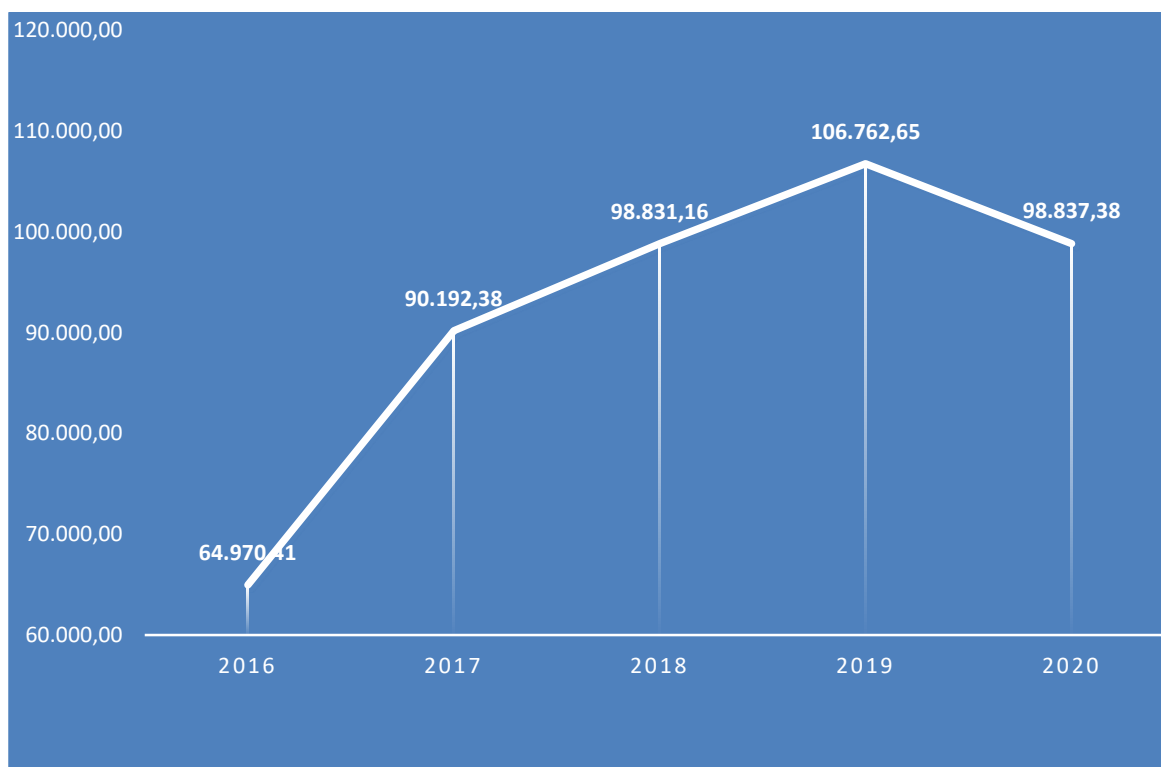
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.13.
Grafik Rasio Pajak Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

3.3.2. Pajak Per Kapita

Pajak per kapita memang belum banyak digunakan dalam menghitung tingkat keberhasilan pajak sebagai sumber pendapatan daerah. Namun pajak per kapita dapat digunakan sebagai alternatif alat hitung efektifitas pemungutan pajak daerah. Pajak per kapita merupakan perbandingan antara jumlah penerimaan pajak yang dihasilkan suatu daerah dengan jumlah penduduknya. Pajak per kapita menunjukkan kontribusi setiap penduduk pada pajak daerah.

Pajak per kapita Kabupaten Klaten pada tahun 2014 hingga tahun 2018 mengalami peningkatan, yaitu dari tahun 2016 sebesar Rp.64.970,41, dan tahun 2020 menjadi sebesar Rp.98.837,00, meskipun tahun 2020 menurun dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.106.762,65. Rata-rata rasio pajak per kapita Kabupaten Klaten tahun 2016 hingga tahun 2020 adalah Rp.91.918,80, berarti secara rata-rata setiap penduduk yang ada di Kabupaten Klaten memberikan kontribusi lebih dari Rp.90.000,00 per tahun untuk pendapatan daerah melalui pajak daerah, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

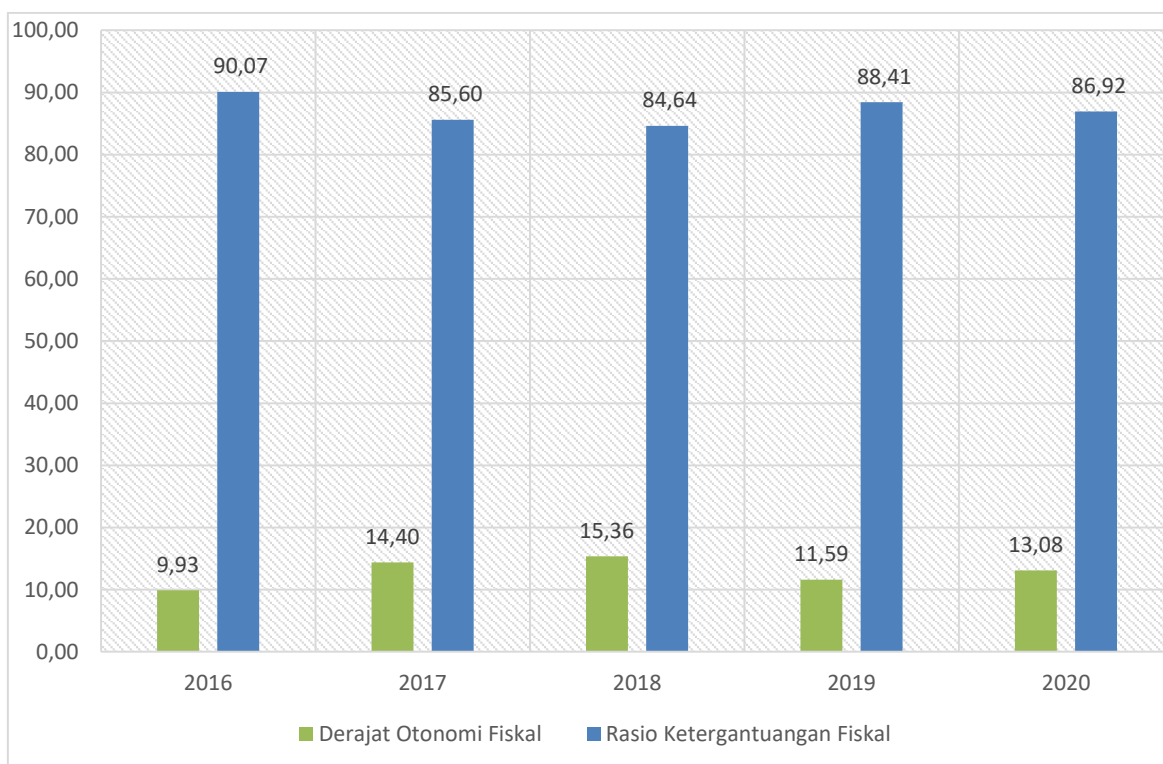
Gambar 3.14.
Grafik Pajak Per Kapita Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

3.3.3. Rasio Ketergantungan Daerah

Rasio ketergantungan daerah menggambarkan tingkat ketergantungan suatu daerah terhadap bantuan pihak eksternal, baik itu Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah lain. Rasio ini ditunjukkan oleh perbandingan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan (derajat desentralisasi fiskal) dan rasio Dana Transfer terhadap total Pendapatan (rasio ketergantungan fiskal).

Derajat desentralisasi fiskal memiliki makna yang berkebalikan dengan rasio ketergantungan fiskal. Semakin besar angka derajat desentralisasi fiskal maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka rasio ketergantungan fiskal, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki derajat desentralisasi fiskal yang tinggi sekaligus rasio ketergantungan fiskal yang rendah.

Potret derajat desentralisasi fiskal dan rasio ketergantungan fiskal Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020, yaitu setiap tahun derajat desentralisasi fiskal terjadi fluktuasi dengan kecenderungan meningkat, namun masih lebih rendah dibandingkan rasio ketergantungan fiskal. Hal ini mengindikasikan Kabupaten Klaten memiliki ketergantungan daerah yang tinggi, disebabkan oleh rendahnya pendapatan yang bersumber dari PAD. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

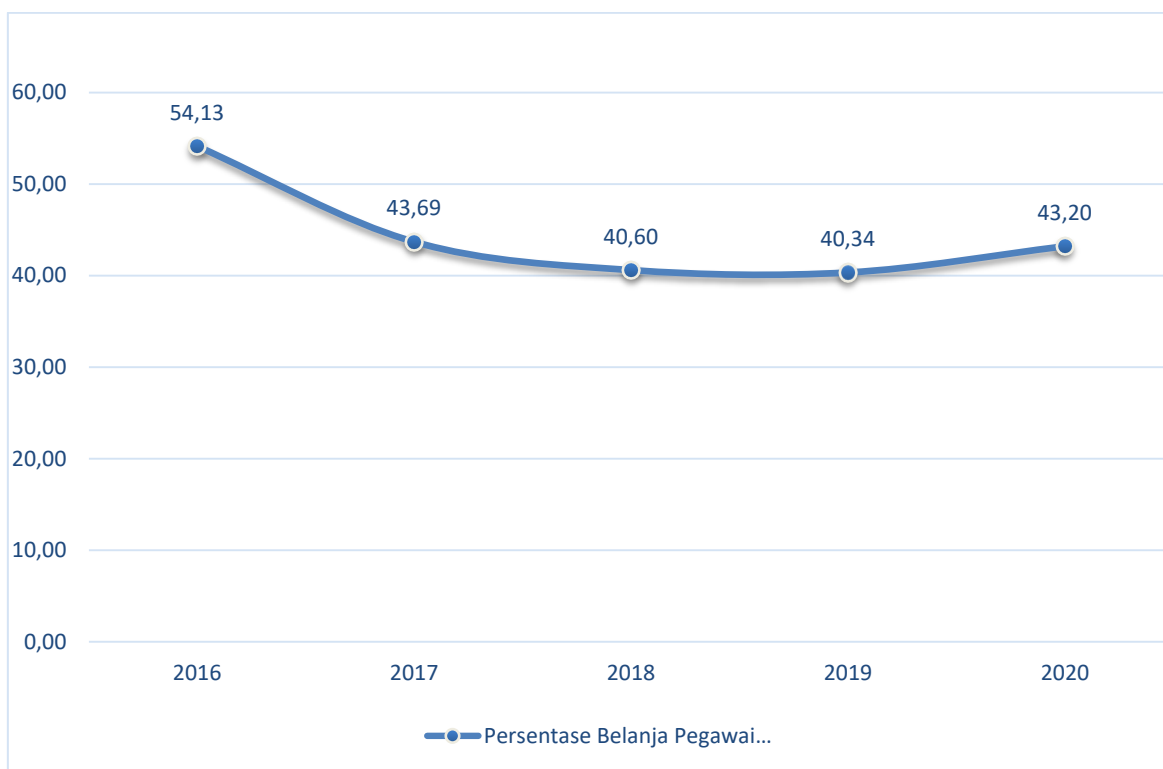
Gambar 3.15.
Grafik Derajat Desentralisasi Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal
Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

3.3.4. Proporsi Penggunaan Anggaran

3.3.4.1. Rasio Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur

Tujuan penghitungan rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur untuk mengetahui proporsi Belanja Pegawai terhadap total Pengeluaran (Belanja ditambahkan Pembiayaan Pengeluaran). Data rasio ini menggambarkan bahwa semakin tinggi angka rasionya maka semakin besar proporsi APBD yang dialokasikan untuk belanja pegawai. Begitu pula sebaliknya, semakin kecil angka rasio Belanja Pegawai maka semakin kecil proporsi APBD yang dialokasikan untuk Belanja Pegawai APBD.

Perkembangan rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur Kabupaten Klaten dari tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami penurunan dari 54,13% menjadi sebesar 43,20% dari total pengeluaran. Dilihat dari kondisi 2 tahun terakhir, rasio tahun 2020 mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2019 (40,34%). Kinerja rasio belanja pemenuhan kebutuhan aparatur dengan rata-rata menurun sebesar 5,29% per tahun, secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.16.
Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

3.3.4.2. Rasio Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran

Rasio Belanja Modal terhadap total Pengeluaran mencerminkan porsi belanja daerah yang dibelanjakan untuk membiayai Belanja Modal. Belanja Modal ditambah Belanja Barang dan Jasa merupakan belanja pemerintah daerah yang mempunyai pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah, di samping pengaruh dari sektor swasta, rumah tangga, dan luar negeri. Realisasi Belanja Modal akan memiliki *multiplier effect* dalam menggerakkan roda perekonomian daerah. Oleh karena itu, semakin tinggi angka rasionya, diharapkan akan semakin baik pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, semakin rendah angkanya semakin berkurang pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi.

Rasio Belanja Modal terhadap total Pengeluaran Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung menurun, yaitu penurunan terjadi sejak tahun 2017 sebesar 14,60% dan tahun 2020 menjadi sebesar 6,37%. Belanja Modal pada tahun 2020 turun drastis karena ada kebijakan *refocussing* anggaran dalam rangka penanganan Covid-19 yang membutuhkan anggaran sangat besar.

Secara rinci rasio Belanja Modal terhadap total Pengeluaran Kabupaten Klaten tahun 2016-2020 dapat dilihat pada gambar berikut:



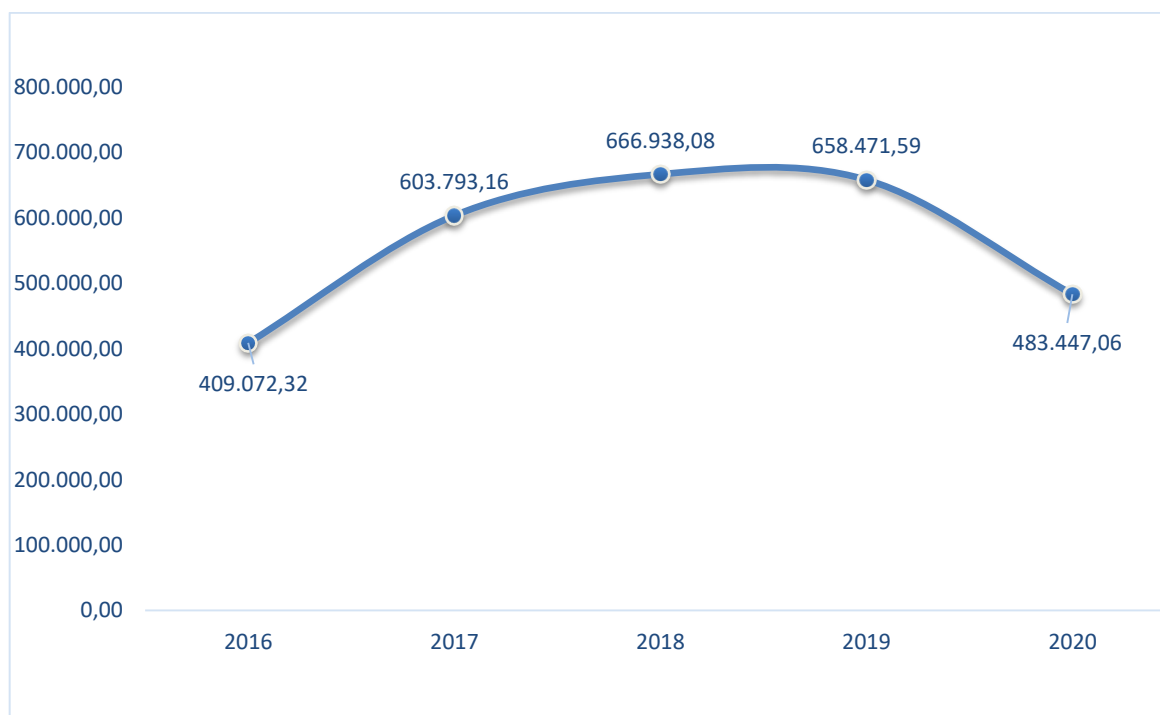
Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.17.
Rasio Belanja Modal Terhadap Total Pengeluaran Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

3.3.4.3. Rasio Belanja Modal Per Kapita

Rasio belanja modal per kapita menunjukkan seberapa besar total pengeluaran yang dialokasikan pemerintah untuk pembangunan infrastruktur daerah per penduduk. Rasio belanja modal per kapita memiliki hubungan yang erat dengan pertumbuhan ekonomi karena belanja modal merupakan salah satu jenis belanja pemerintah yang menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi. Rasio ini bermanfaat untuk menunjukkan perhatian pemerintah dalam meningkatkan perekonomian penduduknya dari pembangunan infrastruktur yang dikeluarkan.

Rasio belanja modal per kapita Kabupaten Klaten pada tahun 2016 hingga tahun 2020 cenderung mengalami kenaikan. Sementara itu jika dibandingkan kondisi 2 tahun terakhir, rasio tahun 2020 sebesar Rp.483.447,06 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp.658.471,59. Hal ini menandakan anggaran belanja modal dalam perbaikan kondisi perekonomian penduduk melalui pembangunan infrastruktur terjadi penurunan. Penurunan ini akibat adanya *refocusing* penanganan Pandemi Covid-19. Secara rinci dapat dilihat pada gambar berikut:



Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Gambar 3.18.
Rasio Belanja Modal Per Kapita Kabupaten Klaten
Tahun 2016-2020

3.3.5. Analisis Pembiayaan

Analisis pembiayaan bertujuan untuk memperoleh gambaran dari pengaruh kebijakan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten pada tahun-tahun anggaran sebelumnya terhadap surplus/defisit belanja daerah sebagai bahan untuk menentukan kebijakan pembiayaan di masa datang dalam rangka penghitungan kapasitas pendanaan pembangunan daerah Kabupaten Klaten. Analisis Pembiayaan didapatkan dengan menghitung defisit riil, komposisi penutup defisit riil dan Realisasi Sisa Lebih Perhitungan APBD Pemerintah Kabupaten Klaten selama kurun waktu tahun 2016-2020 sebagai berikut:

3.3.5.1. Sumber Penutup Defisit Riil

Pemerintah Kabupaten Klaten melakukan langkah kebijakan anggaran untuk menutup defisit riil anggaran Pemerintah Daerah tahun 2016-2020 sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)
1	Realisasi Pendapatan Daerah	2.258.604.630.605,19	2.581.515.295.917,04	2.577.961.130.135,42	2.689.353.252.985,44	2.578.135.836.354,00
	Dikurangi					
2	Realisasi Belanja Daerah	2.282.330.771.499,03	2.481.861.743.842,22	2.611.007.499.825,88	2.682.356.733.813,68	2.419.670.345.690,00
3	Pengeluaran Pembiayaan Daerah	8.304.000.000,00	18.200.000.000,00	27.249.000.000,00	19.500.000.000,00	1.000.000.000,00
A	Defisit riil	-32.030.140.893,84	81.453.552.074,82	-60.295.369.690,46	-12.503.480.828,24	36.314.991.363,00
	Ditutup oleh realisasi Penerimaan Pembiayaan:					
4	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	382.728.125.477,28

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020*) (Rp)
5	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
6	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang diPisahkan	63.231.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Penerimaan penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	Total Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah	406.262.095.580,00	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	408.728.125.477,28
A-B	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	374.231.954.686,16	455.685.506.760,98	395.394.684.312,52	382.762.396.795,28	445.043.116.840,28

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

Berdasarkan tabel tersebut, gambaran komposisi penutup defisit riil adalah sebagai berikut:

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No.	Uraian	Proporsi dari Total Defisit Riil				
		2016 (%)	2017 (%)	2018 (%)	2019 (%)	2020**) (%)
	Defisit Riil	-32.030.140.893,84	81.453.552.074,82	-60.295.369.690,46	-12.503.480.828,24	36.314.991.363,00
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya	406.198.863.893,00	374.231.954.686,16	455.690.054.002,98	395.265.877.623,52	382.728.125.477,28
2	Pencairan Dana Cadangan	0,00	0,00	0,00	0,00	26.000.000.000,00
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang di Pisahkan	63.231.687,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Penerimaan Piutang Daerah	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkenaan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.3.5.2. Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran

Gambaran tentang komposisi sisa lebih perhitungan anggaran diperlukan untuk mengetahui kinerja APBD Kabupaten Klaten tahun sebelumnya yang lebih rasional dan terukur, sebagai berikut:

Tabel 3.8.
Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016		2017		2018		2019		2020*)		Rata-Rata Pertumbuhan*)
		Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	Rp	% dari SiLPA	
	Jumlah SiLPA	406.198.863.893,00		374.231.954.686,16		455.690.054.002,98		395.265.877.623,52		382.728.125.477,28		
1	Pelampauan penerimaan PAD	20.497.700.481,19	5,05	36.205.998.306,04	9,67	22.113.810.635,42	4,85	18.996.924.174,44	4,81	74.728.093.198,00	19,53	8,78
2	Pelampauan penerimaan dana transfer	68.556.374.304,00	16,88	-66.000.238.182,00	-17,64	7.773.239.171,00	1,71	-45.169.353.588,00	-11,43	-126.390.755.932,00	-33,02	-8,70
3	Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah	-5.000.000.000,00	-1,23	-1.867.280.109,00	-0,50	2.641.901.112,00	0,58	-515.142.487,00	-0,13	-885.202.900,00	-0,23	-0,30
4	Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya	285.118.648.213,97	70,19	487.347.026.745,78	130,23	362.111.186.152,10	79,46	409.578.775.384,84	103,62	-231.560.306.873,76	-60,50	64,60
5	Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kegiatan lanjutan	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.4. Kerangka Pendanaan

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Penghitungan kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan pendapatan daerah guna membiayai pembangunan. Penghitungan kerangka pendanaan didahului dengan penyusunan asumsi, kemudian ditetapkan proyeksi pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah, dan pengalokasian untuk belanja daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah.

3.4.1. Proyeksi Pendapatan Daerah

Proyeksi pendapatan daerah disusun dengan memperhatikan kondisi perekonomian daerah yang belum begitu stabil pada tahun 2021 dan 2022 karena masih terpengaruh pandemi Covid-19, kemudian tahun 2023 hingga tahun 2026 diharapkan pertumbuhan ekonomi semakin baik sehingga berpengaruh terhadap pendapatan daerah, baik yang bersumber dari pendapatan asli daerah maupun pendapatan tranfer dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.

Proyeksi Pendapatan PAD di tahun 2023 sampai dengan 2026 ada peningkatan target dengan asumsi Pandemi Covid-19 sudah terkendali dan roda perekonomian dapat berjalan baik secara normal biasa maupun normal baru. Peningkatan PAD yang signifikan tersebut ditunjang dengan adanya upaya percepatan di berbagai sektor diantaranya :

1. Sektor Pajak Daerah
 - a. Penguatan pembangunan sektor ekonomi perkotaan (zona ekonomi perkotaan) dengan menarik investor untuk pembangunan hotel bintang 3 keatas, pusat perbelanjaan modern, dan pusat kuliner;
 - b. Pembangunan kawasan-kawasan perumahan non subsidi;
 - c. Penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di tahun 2023 dan 2026;
 - d. Penyelenggaraan event-event hiburan tingkat nasional dan internasional (pariwisata);
 - e. Menarik Investasi dalam rangka pembukaan lapangan kerja baru sehingga masyarakat memperoleh penghasilan lebih.
2. Sektor Retribusi Daerah
 - a. Pembangunan spot-spot pariwisata baru terkait retribusi jasa pariwisata
 - b. Keterdukungan pembangunan kawasan ekonomi dan perumahan terkait retribusi bangunan gedung (IMB)
3. Sektor Pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
 - a. Penempatan/peningkatan investasi jangka pendek sesuai ketentuan Permendagri 77 Tahun 2021 tentang pedoman teknis pengelolaan keuda
4. Sektor Lain-lain PAD yang sah
 - a. Penguatan pelayanan BLUD kesehatan baik secara infrastruktur maupun SDM;
 - b. Pendirian BLUD kesehatan baru di tahun 2026;
 - c. Pendorongan pendirian BLUD non kesehatan.

Beberapa asumsi-asumsi yang digunakan untuk memproyeksikan pendapatan daerah sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi diproyeksikan mengalami peningkatan secara gradual dari sebesar 2,52% pada tahun 2022 menjadi 5,47% pada tahun 2026. Pengaruh pandemi Covid-19 diperkirakan mulai berkurang pada tahun 2022 setelah pelaksanaan vaksin Covid-19 yang ditargetkan selesai pada bulan April tahun 2022. Disamping itu kebijakan pemerintah sudah diarahkan pada upaya pemulihan ekonomi, yang akan berdampak pada semakin menggeliatnya aktivitas perekonomian. Diharapkan dengan semakin pulihnya perekonomian akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan pendapatan daerah yang semakin baik.
2. Potensi perekonomian Kabupaten Klaten diperkirakan akan semakin berkembang dengan adanya pembangunan Jalan Tol Solo-Jogja dan rencana adanya pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yang merupakan program super prioritas nasional akan berkontribusi terhadap peningkatan investasi di bidang pariwisata, perdagangan, dan industri yang berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.
3. Pendapatan Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan dengan mengupayakan peningkatan pendapatan dari Dana Transfer dengan cara penciptaan iklim usaha yang kondusif, penyehatan iklim ketenagakerjaan, penegakan peraturan perundangan, serta meningkatkan keamanan dan ketertiban hingga di tingkat kecamatan dan kelurahan.
4. Potensi Pendapatan Asli Daerah diperkirakan akan mengalami peningkatan utamanya dari sektor pajak daerah, retribusi daerah dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah. Dari sektor pajak dan retribusi daerah akan mengalami peningkatan dengan penyesuaian tarif pajak/retribusi daerah, pemungutan pajak dan retribusi daerah menggunakan teknologi informasi dan melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah akan mengalami peningkatan melalui optimalisasi pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Proyeksi pendapatan daerah tahun 2021-2026 tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 3.9.
Proyeksi Pendapatan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	PENDAPATAN	2.520.987.884.551	2.508.342.505.200	2.536.777.602.200	2.567.152.606.200	2.599.068.166.200	2.687.852.118.200
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.063.886.351	274.449.465.000	302.884.562.000	333.259.566.000	365.175.126.000	453.959.078.000
4.1.1	Pajak Daerah	103.372.962.000	113.710.259.000	126.281.284.000	138.909.413.000	153.800.355.000	170.180.390.000
4.1.2	Retribusi Daerah	13.967.805.000	15.673.215.000	17.325.109.000	18.566.543.000	19.862.311.000	22.291.856.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.197.839.911	13.273.183.000	14.586.842.000	16.916.184.000	19.261.993.000	23.625.093.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.525.279.440	131.792.808.000	144.691.327.000	158.867.426.000	172.250.467.000	237.861.739.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.968.844.129.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000
4.2.1.5	Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000
5	BELANJA	3.250.527.783.541	2.666.268.973.200	2.687.641.205.200	2.803.037.995.200	2.747.343.549.200	2.831.093.513.200
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.311.721.298	1.853.589.539.200	1.800.879.808.200	1.946.300.592.200	1.881.622.430.200	1.921.982.120.200
5.1.1	Belanja Pegawai	1.217.830.195.949	1.223.919.345.200	1.230.038.941.200	1.236.189.136.200	1.242.370.083.200	1.248.581.933.200
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	591.166.498.849	578.636.597.000	519.331.950.000	613.602.539.000	587.743.430.000	621.891.270.000
5.1.4	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.024.680.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	37.920.026.500	39.422.057.000	39.422.057.000	84.422.057.000	39.422.057.000	39.422.057.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.395.000.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000
5.2	BELANJA MODAL	202.968.198.796	229.117.780.000	304.777.451.000	273.366.501.000	280.731.546.000	322.240.862.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	11.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	598.542.381.800	572.561.654.000	573.983.946.000	575.370.902.000	576.989.573.000	578.870.531.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700	12.938.348.000	14.360.640.000	15.747.596.000	17.366.267.000	19.247.225.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	586.808.305.100	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(189.865.375.343)	(157.926.468.000)	(150.863.603.000)	(235.885.389.000)	(148.275.383.000)	(143.241.395.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	240.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	195.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	45.000.000.000	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	189.865.375.343	157.926.468.000	150.863.603.000	235.885.389.000	148.275.383.000	143.241.395.000
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

3.4.2. Analisis Pengeluaran Periodik Wajib dan Mengikat Serta Prioritas Utama

Pengeluaran wajib dan mengikat Kabupaten Klaten dari tahun 2016-2020 dengan perkembangan fluktuatif, kondisi sangat dipengaruhi oleh prioritas pembangunan daerah. Pengeluaran wajib dan mengikat serta prioritas utama secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.10.
Pengeluaran Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten Tahun 2016-2020

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
1	Belanja Operasi	1.239.843.399.717	1.092.314.834.122	1.071.242.466.613	1.089.951.573.950	1.045.730.394.418	0,90
1.	Belanja Pegawai	1.239.843.399.717	1.092.314.834.122	1.071.242.466.613	1.089.951.573.950	1.045.730.394.418	0,90
2.	Belanja Barang dan						

No	Uraian	2016 (Rp)	2017 (Rp)	2018 (Rp)	2019 (Rp)	2020 *) (Rp)	Rata-rata Pertumbuhan (%)
	Jasa						
3.	Belanja Bunga						
4.	Belanja Subsidi						
5.	Belanja Hibah						
6.	Belanja Bantuan Sosial						
2	Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	-	8,18
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	-	-	-	-	-	0,00
2.	Penyertaan modal daerah						
3.	Pembentukan dana cadangan	3.000.000.000	5.000.000.000	8.000.000.000	10.000.000.000	-	30,33
4.	Pemberian pinjaman daerah						
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	TOTAL (1+2)	1.242.843.399.717	1.097.314.834.122	1.079.242.466.613	1.099.951.573.950	1.045.730.394.418	4,54

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan : *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

3.4.3. Analisis Proyeksi Belanja dan Pembiayaan Daerah

Analisis kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 tahun ke depan. Langkah awal yang dilakukan adalah mengidentifikasi seluruh penerimaan daerah dan ke pos-pos mana sumber penerimaan tersebut akan dialokasikan. Suatu kapasitas riil keuangan daerah adalah total penerimaan daerah setelah dikurangkan dengan berbagai pos atau belanja dan pengeluaran pembiayaan yang wajib dan mengikat serta prioritas utama.

Sebelum dialokasikan ke berbagai pos belanja dan pengeluaran, besaran masing-masing sumber penerimaan memiliki kebijakan pengalokasian yang harus diperhatikan, antara lain:

1. Penerimaan retribusi pajak diupayakan alokasi belanjanya pada program atau kegiatan yang berhubungan langsung dengan peningkatan layanan dimana retribusi pajak tersebut dipungut.
2. Penerimaan dari pendapatan hasil pengelolaan aset daerah yang dipisahkan dialokasikan kembali untuk upaya-upaya peningkatan kapasitas dimana dana penyertaan dialokasikan sehingga menghasilkan tingkat pengembalian investasi terbaik bagi kas daerah.
3. Penerimaan dana alokasi umum diprioritaskan bagi belanja umum pegawai dan operasional rutin pemerintahan daerah.
4. Penerimaan dari dana alokasi khusus dialokasikan sesuai dengan tujuan dimana dana tersebut dialokasikan.
5. Penerimaan dana bagi hasil agar dialokasikan secara memadai untuk perbaikan layanan atau perbaikan lingkungan sesuai jenis dana bagi hasil didapat.

Tabel 3.11.
Proyeksi Belanja dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Wajib dan Mengikat serta Prioritas Utama Kabupaten Klaten

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Belanja Operasi	1.217.830.195.949	1.223.919.346.929	1.230.038.943.663	1.236.189.138.382	1.242.370.084.074	1.248.581.934.494
1.	Belanja Pegawai	1.217.830.195.949	1.223.919.346.929	1.230.038.943.663	1.236.189.138.382	1.242.370.084.074	1.248.581.934.494
2.	Belanja Barang dan Jasa						
3.	Belanja Bunga						
4.	Belanja Subsidi						
5.	Belanja Hibah						
6.	Belanja Bantuan Sosial						
2	Belanja Modal	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000	75.000.000.000
3	Belanja Tidak Terduga						
	Belanja Tidak Terduga						
4	Belanja Transfer	598.542.381.800	572.561.652.417	573.983.944.290	575.370.900.570	576.989.571.600	578.870.529.590
1.	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700	12.938.347.317	14.360.639.190	15.747.595.470	17.366.266.500	19.247.224.490
2.	Belanja Bantuan Keuangan	586.808.305.100	559.623.305.100	559.623.305.100	559.623.305.100	559.623.305.100	559.623.305.100
2	Pengeluaran Pembiayaan						
1.	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo						
2.	Penyertaan modal daerah						
3.	Pembentukan dana cadangan						
4.	Pemberian pinjaman daerah						

No	Uraian	Proyeksi					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
5.	Pengeluaran pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran yang Wajib Mengikat serta Prioritas Utama	1.891.372.577.749	1.871.480.999.345	1.879.022.887.954	1.886.560.038.951	1.894.359.655.673	1.902.452.464.084

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Keterangan: *) Diisi sesuai dengan ketersediaan data

Dari beberapa analisis diatas maka Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten untuk mendanai pembangunan daerah adalah sebagai berikut:

Tabel 3.12.
Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten

No	Uraian	Proyeksi Tahun					
		2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
1	Pendapatan	2.520.987.884.551	2.508.342.505.200	2.536.777.602.200	2.567.152.606.200	2.599.068.166.200	2.687.852.118.200
2	Pencairan dana cadangan (sesuai Perda)	-	-	-	45.000.000.000	-	-
3	Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	195.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000
	Total penerimaan	2.729.853.259.894	2.686.268.973.200	2.707.641.205.200	2.808.037.995.200	2.767.343.549.200	2.851.093.513.200
	Dikurangi:						
4	Total Belanja Wajib dan Pengeluaran Yang Wajib Mengikat Sert Prioritas Utama	1.891.372.577.749	1.871.480.999.200	1.879.022.887.200	1.886.560.038.200	1.894.359.656.200	1.902.452.464.200
	Kapasitas riil kemampuan keuangan	838.480.682.145	814.787.974.000	828.618.318.000	921.477.957.000	872.983.893.000	948.641.049.000

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Kebijakan jangka menengah Tahun 2022-2026 masing-masing komponen belanja daerah sebagai berikut.

1. Belanja Operasi

a. Belanja Pegawai

Belanja pegawai akan menampung kebutuhan: Gaji Pegawai beserta tunjangan untuk keperluan 12 bulan, beserta THR dan Gaji ke 13; Gaji anggota DPRD; Tambahan Penghasilan PNS; dan Insentif Pajak dan Retribusi daerah.

b. Belanja Barang Dan Jasa

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/ jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/ jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga.

c. Belanja Bunga

Digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga Utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman.

d. Belanja Subsidi

Belanja subsidi sebagaimana digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/ atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau oleh masyarakat.

e. Belanja Hibah

Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/ atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.

f. Belanja Bantuan Sosial

Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. Keadaan tertentu dapat berkelanjutan diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.

2. Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk pemenuhan kebutuhan infrastruktur yang menjadi prioritas pembangunan daerah.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

4. Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa. Didalamnya memuat kewajiban bagi hasil pajak/retribusi paling sedikit sebesar 10% dari target APBD pada Tahun berkenaan dan Kewajiban Alokasi Dana Desa yang bersumber dari paling sedikit 10% dari alokasi Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi hasil Pajak/bukan pajak dari pemerintah pusat.

Kebijakan jangka menengah penerimaan pembiayaan daerah tahun 2022-2026 diarahkan pada Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA); dan Pencairan Dana Cadangan.

Kebijakan jangka menengah pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2022-2026 diarahkan pada Penyertaan modal daerah, dan Pembentukan dana cadangan.

Secara keseluruhan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 3.13.
Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	PENDAPATAN	2.520.987.884.551	2.508.342.505.200	2.536.777.602.200	2.567.152.606.200	2.599.068.166.200	2.687.852.118.200
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.063.886.351	274.449.465.000	302.884.562.000	333.259.566.000	365.175.126.000	453.959.078.000
4.1.1	Pajak Daerah	103.372.962.000	113.710.259.000	126.281.284.000	138.909.413.000	153.800.355.000	170.180.390.000
4.1.2	Retribusi Daerah	13.967.805.000	15.673.215.000	17.325.109.000	18.566.543.000	19.862.311.000	22.291.856.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.197.839.911	13.273.183.000	14.586.842.000	16.916.184.000	19.261.993.000	23.625.093.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.525.279.440	131.792.808.000	144.691.327.000	158.867.426.000	172.250.467.000	237.861.739.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.968.844.129.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000
4.2.1.5	Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
	DAERAH YANG SAH						
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000
5	BELANJA	3.250.527.783.541	2.666.268.973.200	2.687.641.205.200	2.803.037.995.200	2.747.343.549.200	2.831.093.513.200
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.311.721.298	1.853.589.539.200	1.800.879.808.200	1.946.300.592.200	1.881.622.430.200	1.921.982.120.200
5.1.1	Belanja Pegawai	1.217.830.195.949	1.223.919.345.200	1.230.038.941.200	1.236.189.136.200	1.242.370.083.200	1.248.581.933.200
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	591.166.498.849	578.636.597.000	519.331.950.000	613.602.539.000	587.743.430.000	621.891.270.000
5.1.4	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.024.680.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	37.920.026.500	39.422.057.000	39.422.057.000	84.422.057.000	39.422.057.000	39.422.057.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.395.000.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000
5.2	BELANJA MODAL	202.968.198.796	229.117.780.000	304.777.451.000	273.366.501.000	280.731.546.000	322.240.862.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	11.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
5.4	BELANJA TRANSFER	598.542.381.800	572.561.654.000	573.983.946.000	575.370.902.000	576.989.573.000	578.870.531.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700	12.938.348.000	14.360.640.000	15.747.596.000	17.366.267.000	19.247.225.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	586.808.305.100	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(189.865.375.343)	(157.926.468.000)	(150.863.603.000)	(235.885.389.000)	(148.275.383.000)	(143.241.395.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	240.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	195.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	45.000.000.000	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	189.865.375.343	157.926.468.000	150.863.603.000	235.885.389.000	148.275.383.000	143.241.395.000
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

BAB IV

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

Identifikasi permasalahan pembangunan terhadap seluruh bidang urusan penyelenggaraan pemerintahan. Permasalahan pembangunan diidentifikasi berdasarkan pada kondisi yang tergambar pada Bab II, sehingga dapat diketahui permasalahan pembangunan pada setiap urusan yang harus diselesaikan sampai dengan tahun 2026.

4.2.1. Urusan Wajib Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian APK PAUD usia 0-6 tahun, pada tahun 2020 tercatat sebesar 80,60% hal ini menunjukkan masih terdapat 19,40% anak usia 0-6 yang belum sekolah PAUD, dan sebagian PAUD tidak membuka pendaftaran karena adanya Pandemi Covid-19, serta tingkat kesadaran orang tua untuk menyekolahkan anak usia 0-6 tahun masih kurang;
- b. Masih rendahnya APM SD/MI/Paket A hal ini terlihat pada data APM SD/MI/Paket A masih sebesar 88,54% dan data APM SMP/MTs/Paket B sebesar 71,14%;
- c. Masih terdapat angka putus sekolah jenjang APM SD/MI/Paket A dan APM SMP/MTs/ Paket B masing-masing sebesar 0,01 dan 0,08%;
- d. Masih cukup tingginya capaian indikator penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan, pada tahun 2020 sebesar 5,79%; dan
- e. Belum semua gedung sekolah SD dan SMP dalam kondisi baik, pada tahun 2020 Kondisi sekolah SD dalam kondisi baik sebesar 68,87% dan SMP sebesar 74,35%.

2. Kesehatan

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Kesehatan adalah sebagai berikut:

- a. Masih adanya angka kematian bayi pada tahun 2020 sebesar 9,34 per 1.000 kelahiran hidup, masih adanya angka kematian balita sebesar 1,52 per 1.000 kelahiran hidup, dan masih adanya angka kematian neonatal sebesar 6,36 per 1.000 kelahiran hidup;
- b. Masih adanya kasus kematian ibu, pada tahun 2020 kasus kematian ibu meningkat dibandingkan tahun 2019 yaitu menjadi 17 kasus dari 12 kasus pada tahun 2019;
- c. Menurunnya cakupan penanganan penyakit menular, hal ini ditunjukkan bahwa cakupan balita pneumonia yang ditangani menurun dari sebesar 47,0% pada tahun 2019 menjadi 29,33% pada tahun 2020;
- d. Belum optimalnya pemenuhan tenaga dokter dan medis yang tersedia pada pelayanan kesehatan, yaitu rasio dokter per satuan penduduk

sebesar 0,026 dan rasio tenaga medis per satuan penduduk sebesar 0,050;

- e. Belum terpenuhinya capaian Standar Pelayanan Minimal Kesehatan, dengan capaian di bawah 100%;
- f. Rendahnya indeks keluarga sehat yang baru mencapai 0,252 sehingga Kabupaten Klaten termasuk kategori kabupaten belum mencapai strata kabupaten sehat;
- g. Masih ditemukannya kasus penyakit seperti DBD, Diare, Stunting, Pneumonia dan kasus penyakit tidak menular;
- h. Rendahnya indikator preventif dan promotif, belum mencapai 100%. terlihat dari cakupan STBM masih sebesar 24,9% dan Rumah tangga ber PHBS sebesar 96,26%; dan
- i. Kondisi Pandemi Covid-19 mengakibatkan cakupan kunjungan ibu hamil K4, cakupan pelayanan nifas, cakupan pelayanan neonatus dengan komplikasi dan cakupan pelayanan anak balita mengalami penurunan. Data yang ada menunjukkan cakupan pelayanan nifas sebesar 96,92% pada tahun 2020 dan sebesar 97,55% pada tahun 2019. Cakupan neonatus turun menjadi 55,63% pada tahun 2020 dan sebesar 56,03% pada tahun 2019, cakupan pelayanan anak balita turun dari 95,77% pada tahun 2019 menjadi sebesar 92,71%.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyelenggaraan jalan di Kabupaten Klaten, dilihat dari tingkat kerusakan jalan, pada tahun 2020 jalan rusak dan rusak berat yang perlu ditangani sebesar 9,92% serta 23,83% jalan dalam kondisi sedang yang perlu ditingkatkan kualitasnya;
- b. Belum optimalnya kualitas drainase, dilihat dari capaian drainase dalam kondisi baik yang baru mencapai 61,44% pada tahun 2020;
- c. Masih terdapat penduduk yang belum mendapatkan akses terhadap air minum sebesar 8,23%;
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan bangunan gedung dilihat dari rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan baru 11 %;
- e. Perda RTRW sedang dalam proses revisi sehingga perencanaan belum ada bagian wilayah perkotaan yang ditetapkan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) sebagai penjabaran operasional RTRW Kabupaten/Kota; dan
- f. Kurangnya pemenuhan ruang terbuka hijau di wilayah perkotaan, terlihat dari persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sebesar 3% pada tahun 2020.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut:

- a. Masih terdapat kawasan kumuh yang belum tertangani sesuai dengan SK Bupati Nomor 050/373/2014 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan Pemukiman Kumuh sebesar 0,14 % (41,65 Ha);
- b. Masih terdapat rumah tidak layak huni di Kabupaten Klaten sebesar 1,43%;

- c. Belum optimalnya penyediaan sarana dan prasarana umum kawasan permukiman; dan
- d. Backlog perumahan yang masih cukup tinggi, sebesar 77.419 unit di tahun 2020.

5. Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Permasalahan pada penyelenggaraan urusan Ketentraman dan Ketertiban serta perlindungan masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya penyediaan sumber daya manusia perlindungan masyarakat (SDM Linmas) yang terlatih dan kukuhkan, pada tahun 2020 tercatat sebesar 41,5%;
- b. Belum optimalnya cakupan pelayanan kebakaran, dilihat dari cakupan pelayanan bencana kebakaran tahun 2020 sebesar 1,1%;
- c. Masih rendahnya warga yang mendapatkan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yaitu 5,05%; dan
- d. Belum optimalnya dukungan kelompok peduli bencana terlihat dari Kelompok relawan bencana aktif sebesar 40,00%.

6. Sosial

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sosial diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemutakhiran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), sampai dengan tahun 2020 persentase pemuktakhiran baru mencapai 60%;
- a. Masih rendahnya cakupan Wahana Kesejahteraan Sosial Keluarga Berbasis Masyarakat (WKBSM) dalam menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial. Data menunjukkan persentase WKBSM yang menyediakan sarana dan prasarana sebesar 0,14%;
- b. Belum optimalnya cakupan penyandang disabilitas yang menerima jaminan sosisal, data yang ada menunjukkan penyandang cacat fisik dan mental, serta lanjut usia tidak potensial yang telah menerima jaminan sosial sebesar 27,13% menurun dibandingkan dengan tahun 2019 sebesar 73,67%; dan
- c. Belum terpenuhinya standar pelayanan minimal urusan sosial, dimana dari target yang diharapkan adalah 100% per tahun, namun hanya perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial yang dapat terpenuhi targetnya.

4.2.2. Urusan Wajib Yang Bukan Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Ketenagakerjaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Semakin meningkatnya TPT di Kabupaten Klaten, pada tahun 2016 sebesar 2,51% pada tahun 2020 menjadi sebesar 5,46%;
- b. Meningkatnya angka sengketa pengusaha dengan pekerja. pada tahun 2019 sebesar 10,06%, meningkat menjadi sebesar 11,98% pada tahun 2020;
- c. Penyelesaian kasus ketenagakerjaan melalui perjanjian bersama belum optimal, yakni baru mencapai 55,56%;
- d. Pemenuhan hak pekerja/buruh dalam hal kepesertaan program BPJS Ketenagakerjaan masih rendah, pada tahun 2020 baru mencapai 25,01%;

- e. Masih sangat rendahnya kompetensi tenaga kerja, dilihat dari tenaga kerja memiliki sertifikat kompetensi yang hanya 3,51%; dan
- f. Belum optimalnya upaya penempatan tenaga kerja terdaftar, tahun 2020 hanya mampu menempatkan 21,11 pencari kerja terdaftar.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya capaian IPG yaitu tahun 2017 sebesar 96,54 tahun 2020 sebesar 96,17 berada di ranking 6 di Jawa Tengah;
- b. Persentase perempuan di parlemen, berhasil ditingkatkan dari 6 persen menjadi 18 persen, namun belum memenuhi kuota 30 % perempuan di parlemen sebagaimana yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017;
- c. Belum semua OPD memiliki data pilah gender dan anak, data menunjukkan OPD yang memiliki data pilah gender dan anak baru 28,8%;
- d. Belum semua desa/ kelurahan layak anak, data menunjukkan pada tahun 2020 desa/ kelurahan layak anak tercatat sebesar 65,1%; dan
- e. Rasio KDRT meningkat dari 0,68 tahun 2016 menjadi 3,36 tahun 2019, dan pada tahun 2020 sebesar 0,0048%.

3. Pangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pangan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2019 skor Pola Pangan Harapan (PPH) sebesar 92,75% menurun 7,95% di tahun 2020 menjadi 84,80%;
- b. Menurunnya ketersediaan pangan utama untuk beras sebesar 11.563,21 ton. Pada tahun 2019 ketersediaan pangan utama untuk beras sebesar 279.174,31 ton dan pada tahun 2020 sebesar 267.611,10 ton; dan
- c. Standar pengawasan dan pembinaan terhadap keamanan pangan tahun 2020 masih lemah, yaitu sebesar 78% sedangkan Standar Mutu Nasional sebesar 100%.

4. Pertanahan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanahan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah yang Diterbitkan Kantor Pertanahan tahun 2019 sebanyak 41.007 sertifikat sedangkan pada tahun 2020 hanya menerbitkan 25.611 sertifikat; dan
- b. Masih terdapat tanah milik pemerintah daerah yang belum bersertifikat.

5. Lingkungan Hidup

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Lingkungan Hidup diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian IKLH, tahun 2020 sebesar 52,85, dengan status lingkungan kurang baik;

- b. Belum optimalnya rehabilitasi terhadap lahan kritis, tahun 2020 baru 5,04 %;
- c. Belum optimalnya pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, capaian 2020 sebesar 66,66%; dan
- d. Pembinaan dan pengawasan terhadap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang capaian ditahun 2020 menurun menjadi 0 % apabila dibandingkan tahun 2019 sebesar 50%;
- e. Belum optimalnya penanganan sampah yang ditangani di TPA, capaian tahun 2020 sebesar 50,66 %.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kependudukan dan Catatan Sipil diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum semua penduduk wajib KTP memiliki KTP, tahun 2020 penerbitan KTP sebesar 94,93%;
- b. Belum optimalnya pelaporan peristiwa penting (kematian dan perkawinan) dari masyarakat ke Dinas Dukcapil yang berpengaruh terhadap jumlah penerbitan akta kematian dan perkawinan. Tahun 2020 penerbitan akte kematian sebanyak 10.072, dan penerbitan akte perkawinan sebanyak 2.698; dan
- c. Belum semua OPD memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama. Data yang ada menunjukkan 7 OPD (13,73%) yang melaksanakan Kerjasama dan mendapatkan hak akses dengan persetujuan Dirjen Dukcapil.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan dan pemenuhan kriteria BUMDes maju. Pada tahun 2020 jumlah BUMDesa maju sebesar 10 BUMDes;
- b. Belum optimalnya pembangunan kawasan perdesaan, dari 10 kawasan perdesaan yang ada baru 1 kawasan perdesaan yang telah menyusun Rencana Pembangunan Kawasan Perdesaan (RPKP) yaitu kawasan perdesaan di Kecamatan Wedi;
- c. Belum optimalnya kapasitas aparat pemerintah desa baru 25% dari jumlah desa yang sudah optimal;
- d. Belum optimalnya pengelolaan tata laksana administrasi dan pertanggungjawaban keuangan desa rata-rata 30% tidak tepat waktu; dan
- e. Masih ada 105 balai/kantor kepala desa yang belum disertifikatkan dari 391 desa di Kabupaten Klaten

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diuraikan sebagai berikut:

- a. Angka *Total Fertility Rate* (TFR) pada tahun 2020 sebesar 2,1%;
- b. Belum optimalnya capaian CPR. Data yang ada menunjukkan capaian CPR masih diangka 70,90%; dan

- c. Masih tingginya *unmet need*. Data yang ada menunjukkan bahwa *unmet need* di tahun 2020 yaitu masih sebesar 16,95%.

9. Perhubungan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perhubungan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengelolaan terminal tipe C. Persentase terminal yang dikelola dengan baik tahun 2020 sebesar 42,86%;
- b. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari persentase pemenuhan sarana dan prasarana keselamatan dan keamanan transportasi darat (rambu, APIL dan PJU) baru mencapai 0,25% tahun 2020. Persentase pemenuhan guardrail dan marka jalan baru mencapai 15,65% tahun 2020;
- c. Tingginya tingkat pelanggaran lalu lintas di bidang angkutan, dilihat dari jumlah angka kecelakaan lalu lintas yang terus bertambah selama lima tahun terakhir, data tahun 2019 angka kecelakaan laulintas sebanyak 986 kejadian, meningkat menjadi 1.003 di tahun 2020; dan
- d. Belum optimalnya penyelenggaraan pengujian kendaraan bermotor, dilihat dari jumlah uji KIR angkutan umum tahun 2020 baru mencapai 85,53%.

10. Komunikasi dan Informatika

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Komunikasi dan Informatika diuraikan sebagai berikut:

- a. Perlu Optimalisasi Sumber daya manusia serta sarana dan prasarana dalam pengelolaan *website* Kabupaten Klaten, sehingga ketersediaan data lebih lengkap dan terupdate secara berkala;
- b. Masih Rendahnya utilisasi jaringan mobile *broadband*, dilihat dari cakupan telekomunikasi di tahun 2020 masih sebesar 56,5%;
- c. Belum optimalnya pemberian informasi terkait program dan kebijakan pemerintah kabupaten/ kota yang disampaikan ke masyarakat di tahun 2020 capaiannya sebesar 65,00%;
- d. Masih rendahnya layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi, di tahun 2020 baru tercapai 40,74%; dan
- e. Perlu peningkatan dalam akses *internet* di ruang publik, yang tercapai 70% di tahun 2020 (ruang publik kewenangan pemerintah daerah).

11. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah diuraikan sebagai berikut:

- a. Rendahnya upaya optimalisasi kualitas koperasi terkait kelembagaan dan pelayanan koperasi ditunjukkan persentase koperasi berkualitas dan sangat berkualitas masih sebesar 14,45%;
- b. Belum seluruh Koperasi yang berkinerja baik dalam kelembagaan, keuangan serta kemanfaatan bagi anggota koperasi sebagai badan hukum aktif, ditunjukkan persentase koperasi yang berkualitas atau masih aktif masih sebesar 42,80%;
- c. Belum optimalnya pengawasan kepatuhan kepada seluruh koperasi untuk menjalankan peraturan yang berlaku, ditunjukkan persentase koperasi patuh sebesar 23,10%;

- d. Rendahnya penilaian kesehatan koperasi pada KSP/USP, ditunjukkan persentase KSP/USP yang ternilai kesehatan koperasi sebesar 9,34%;
- e. Rendahnya pertumbuhan usaha mikro pada tahun 2020 sebesar 0,111%;
- f. Belum optimalnya pembinaan pelaku usaha mikro, tahun 2020 persentase usaha mikro yang dibina masih sebesar 3,86%;
- g. Masih rendahnya fasilitasi akses bantuan permodalan bagi usaha mikro, hal ini ditunjukkan bahwa jumlah pelaku usaha mikro yang mengajukan bantuan modal usaha dari program bantuan presiden sebanyak 54.176 pelaku usaha mikro pada tahun 2020; dan
- h. Jumlah pelaku usaha mikro yang melakukan pola kemitraan masih rendah, yaitu sebesar 0,257%.

12. Penanaman Modal

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penanaman Modal diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah investor berskala nasional (PMA), sehingga perlu ditingkatkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, dari 15 investor di tahun 2015 menjadi 5 investor di tahun 2020 hal ini dikarenakan adanya Pandemi Covid-19 sehingga investor lebih berhati-hati dalam menanamkan modalnya;
- b. Belum optimalnya realisasi investasi berskala nasional (PMA dan PMDN), terlihat dari nilai realisasi investasi sebesar Rp. 698,90 milyar rupiah (menurun sebesar -64%) pada tahun 2020 dan nilai realisasi investasi PMA sebesar US\$ 4.721.000 (menurun sebesar -59%).

13. Kepemudaan dan Olahraga

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kepemudaan dan Olahraga diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum semua organisasi kepemudaan aktif, terlihat pada tahun 2020 baru sebesar 76% yang aktif;
- b. Masih ada pelatih yang belum bersertifikat, tahun 2020 baru sebesar 80 orang pelatih yang bersertifikat;
- c. Menurunnya pembinaan atlet muda terlihat dari penurunan jumlah atlet muda yang dibina pada tahun 2020 sebanyak 330 orang, sementara tahun 2019 sebanyak 500 orang;
- d. Belum optimalnya peningkatan wirausaha muda pemula, terlihat dari persentase wirausaha muda pemula dari 17,45 % ditahun 2019 menjadi sebesar 19,76 % ditahun 2020.

14. Statistik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Statistik diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya ketersediaan statistik sektoral di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten, yang baru mencapai 25%.
- b. Penerapan *single data* melalui aplikasi satu data Kabupaten Kabupaten Klaten belum optimal.

15. Persandian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Persandian diuraikan sebagai berikut:

- a. Sertifikasi keamanan informasi standar nasional belum terlaksana;
- b. Penggunaan sertifikat elektronik dan tanda tangan elektronik diperangkat daerah belum berjalan; dan
- c. Sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik, pada tahun 2020 baru sebesar 38 %, sehingga perlu untuk ditingkatkan mengingat semakin marak dan rawannya kejahatan dunia maya (*cyber crime*).

16. Kebudayaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kebudayaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya penyelenggaraan festival seni dan budaya selama Pandemi Covid-19, dari 40 event ditahun 2019 menjadi 7 event ditahun 2020;
- b. Jumlah karya budaya yang direvitalisasi baru 1 cagar budaya; dan
- c. Belum semua cagar budaya dikelola secara terpadu sampai dengan tahun 2020 masih sebanyak 3 cagar budaya.

17. Perpustakaan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perpustakaan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya jumlah pengunjung perpustakaan disebabkan oleh adanya Pandemi Covid-19, pada tahun 2019 jumlah kunjungan perpustakaan mencapai 83.511 akan tetapi pada tahun 2020 menurun menjadi 70.878 orang;
- b. Menurunnya budaya membaca masyarakat, pada tahun 2019, minat baca tercatat sebesar 6,29%, pada tahun 2020 menurun menjadi 5,34%;
- c. Masih rendahnya cakupan pembinaan perpustakaan, pada tahun 2020 tercatat sebesar 21,99%; dan
- d. Belum optimalnya pelayanan perpustakaan, pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap pelayanan perpustakaan dan kearsipan sebesar 77,92.

18. Kearsipan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kearsipan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya capaian persentase arsip yang dialihmediakan, pada tahun 2020 baru 25,85% arsip yang dilakukan alih media;
- b. Belum optimalnya pengawasan arsip internal. Data menunjukkan pengawasan internal kearsipan sebesar 9,8%; dan
- c. Belum optimalnya pelayanan kearsipan, pada tahun 2020 Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pelayanan Perpustakaan dan Kearsipan sebesar 77,92.

4.2.3. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pariwisata diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pengembangan pemasaran pariwisata, pengembangan destinasi pariwisata, serta penataan kawasan pariwisata yang dapat memiliki daya tarik, terlihat dari jumlah obyek

wisata dari tahun 2016-2020 stagnan, yaitu sebanyak 82 obyek dengan kunjungan masih didominasi oleh wisatawan lokal (Klaten, Solo Raya dan DIY), belum adanya pola atau paket perjalanan wisata (*travel pattern*) antar destinasi yang ada serta lama kunjungan wisata baik

- b. Rata-rata lama tinggal Wisatawan Nusantara (Wisnus) dan Wisatawan Mancanegara (Wisman) hanya 1 (satu) hari, sehingga perlu dipikirkan untuk menarik wisatawan agar lebih lama tinggal di Kabupaten Klaten;
- c. Menurunnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor pariwisata sebesar Rp.4.117.796.612,00, pada tahun 2019 sebesar Rp.12.648.036.829,00 dan pada tahun 2020 menurun menjadi Rp. 8.530.240.217,00, hal ini sebagai dampak dari adanya Pandemi Covid-19; dan
- d. Belum terbentuknya kelembagaan ekonomi kreatif, rencana induk pembangunan ekonomi kreatif, pendataan ekonomi kreatif serta fasilitas sarana prasarana pendukung ekonomi kreatif.

2. Pertanian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Pertanian diuraikan sebagai berikut:

- a. Luas lahan pertanian yang semakin menurun setiap tahunnya, akibat lahan sawah yang banyak beralih fungsi menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian;
- b. Menurunnya produktivitas padi sebagai bahan pangan utama lokal sebesar 0,1%, dari 67,32 Kw/Ha menjadi 67,22 Kw/Ha di tahun 2020, hal ini akibat jumlah luas lahan pertanian di Kabupaten Klaten semakin menurun setiap tahunnya, lahan sawah beralih fungsi menjadi lahan terbangun/ lahan bukan pertanian, serta tidak optimalnya pengembangan usaha-usaha pertanian.;
- c. Belum optimalnya cakupan bina kelompok tani, pada tahun 2020 tercatat 32,50% dari total kelompok tani sebanyak 1.068 kelompok. Kondisi ini dipengaruhi oleh rendahnya kuantitas SDM penyuluh pertanian serta adanya dampak Pandemi Covid-19 yang membatasi kegiatan pertemuan dengan kelompok tani.
- d. Belum terpenuhinya standar minimal berupa sarana prasarana dan sumberdaya manusia pendukung di UBBT Humo sebagai pusat atau *pilot project* pengembangan konsep pertanian terpadu, agrowisata dan agropolitan, sehingga konsep tersebut belum dapat diaplikasikan dan dilaksanakan di lapangan atau di kawasan secara terpadu, terarah dan berkelanjutan.

3. Perdagangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perdagangan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya cakupan bina kelompok dan bina usaha informal pada tahun 2020 tercatat sebesar 8,26%;
- b. Masih kurangnya ketersediaan sarana prasarana pasar yang representatif, terlihat dari indikator persentase pasar rakyat/ tradisional terevitalisasi, sampai dengan tahun 2020 baru sebesar 30%;
- c. Belum optimalnya penataan dan pemberdayaan PKL, persentase PKL yang terbina hingga tahun 2020 baru 25,7%;

- d. Menurunnya pendapatan retribusi pasar, pada tahun 2019 sebesar Rp.5.034.789.532,00 menjadi Rp.4.616.866.333,00 pada tahun 2020;
- e. Menurunnya persentase kinerja pupuk tahun 2020 menjadi 95,89% pada tahun 2020 dibandingkan tahun 2019 sebesar 97,07%;
- f. Menurunnya *event* promosi produk dalam negeri yang diselenggarakan pada tahun 2020 akibat Pandemi Covid-19 sebanyak 3 *event* dibanding tahun 2019 sebanyak 7 *event*; dan
- g. Menurunnya pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan pada tahun 2020, mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19 menjadi sebesar -4,79%.

4. Perindustrian

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perindustrian diuraikan sebagai berikut:

- a. Masih rendahnya unit usaha mebel yang memiliki Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SVLK) sehingga perlu difasilitasi dan didorong untuk mendapatkan SVLK sebagai salahsatu syarat ekspor mebel ke eropa; dan
- b. Masih rendahnya Industri Kecil Menengah (IKM) yang memiliki daya saing sehingga masih diperlukan upaya meningkatkan daya saing IKM;
- c. Menurunnya pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan di tahun 2020, tercatat sebesar -1,21 % karena mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19;
- d. Cakupan bina kelompok industri mengalami penurunan menjadi sebesar 0,12% dikarenakan refocusing anggaran dampak adanya Pandemi Covid-19.

5. Transmigrasi

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Transmigrasi adalah sebagai berikut:

Semakin menurunnya pemenuhan kuota yang diberikan untuk pemberangkatan calon transmigran, dimana tahun 2019 hanya 70% dari kuota yang terpenuhi dan di tahun 2020 tidak ada pemberangkatan transmigran karena Pandemi Covid-19;

6. Kelautan dan Perikanan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kelautan dan Perikanan diuraikan sebagai berikut:

- a. Menurunnya produksi benih ikan pada tahun 2020 sebesar 109.000.000 ekor dibandingkan tahun 2019 sebesar 137.635.312 ekor;
- b. Menurunnya produksi perikanan pada tahun 2020 sebesar 27.603,83 ton dibandingkan tahun 2019 sebesar 28.276,03 ton. Dan untuk produksi perikanan kelompok nelayan pada tahun 2020 sebesar 184 ton dibandingkan tahun 2019 yang mencapai 516,5 ton;
- c. Rendahnya cakupan bina kelompok nelayan stagnan pada 299 Pembudidaya Ikan Kecil (Pokdakan); dan
- d. Masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di kalangan masyarakat, tingkat konsumsi ikan di Kabupaten Klaten baru mencapai 20,28%.

4.2.4. Unsur Penunjang Pemerintahan

1. Perencanaan Pembangunan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Perencanaan Pembangunan diuraikan sebagai berikut:

- a. Perubahan regulasi/ kebijakan perencanaan pembangunan daerah yang dinamis yang harus segera diikuti, seperti Permendagri No. 70 Tahun 2019 dan Permendagri 90 Tahun 2019 jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020;
- b. Rendahnya kualitas dan kuantitas SDM ASN perencana pada urusan perencanaan pembangunan;
- c. Mutasi ASN perencana yang dinamis sehingga perlu dilakukan pendampingan intensif dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Data pendukung perencanaan pembangunan berupa data statistik, hasil monitoring dan evaluasi, serta hasil penelitian belum cukup memadai dalam mendukung perencanaan pembangunan yang ideal.

2. Keuangan

Permasalahan dalam urusan Penunjang Keuangan Daerah adalah :

- a. Masih rendahnya proporsi PAD terhadap Total APBD, pada tahun 2020 proporsi PAD terhadap APBD sebesar 13,37% terutama optimalisasi peningkatan pajak daerah; dan
- b. Masih rendahnya proporsi tanah milik pemda yang bersertifikat, pada tahun 2020 baru mencapai sebesar 54,31%.

3. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Permasalahan dalam urusan penunjang Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah :

- a. Rendahnya manajemen pengelolaan ASN, terlihat dari Indeks Sistem Merit sebesar 160,5 dan Persentase Pengembangan Aparatur sebesar 70%; dan
- b. Masih rendahnya Profesionalitas ASN terlihat dari Indeks Profesionalitas ASN sebesar 78,06;
- c. Persentase ASN yang mengikuti diklat baru 11,26% dan persentase informasi kepegawaian yang akurat tahun 2020 sebesar 54%, menurun dibandingkan tahun 2019 yang sudah mencapai 80%.

4. Penelitian dan Pengembangan

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Penelitian dan Pengembangan diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum semua hasil inovasi dapat diterapkan, baru 85 % ditahun 2020;
- b. Kurangnya partisipasi dan kreativitas masyarakat dalam mendukung inovasi daerah, tahun 2020 hanya 5 orang yang mengikutu lomba krenova dari 30 target yang ditetapkan; dan
- c. Terbatasnya kapasitas perangkat daerah dalam pengembangan mutu, desain dan produk inovasi daerah, serta kerjasama inovasi daerah, sebanyak 34 inovasi kebijakan inovasi yang diterapkan daerah dari total perangkat daerah.

4.2.5. Unsur Pengawasan Pemerintahan

Permasalahan dalam urusan penunjang Pengawasan adalah:

- a. Profesionalitas dan kompetensi APIP masih perlu ditingkatkan;
- b. Belum optimalnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
- c. Persentase tindaklanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, pada tahun 2020 turun menjadi sebesar 83,61% dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 95,30%.

4.2.6. Unsur Pemerintahan Umum

1. Sekretariat Daerah

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat Daerah diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya manajemen penyelenggaraan pemerintahan;
- b. Masih rendahnya nilai kematangan/maturitas organisasi; dan
- c. Belum optimalnya manajemen dalam penyelenggaraan pemerintahan, dilihat dari Peringkat nilai SAKIP sebesar 61,32, nilai kematangan/maturitas organisasi sebesar 31,2 dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 83,5; dan
- d. Belum optimalnya pencapaian peringkat nilai SAKIP masih sebesar 61,32 (B), kondisi ini dipengaruhi komponen pembentuk SAKIP dimana pencapaian terbesar pada perencanaan kinerja, sehingga perlu ditingkatkan komponen pembentuk SAKIP lainnya.

2. Sekretariat DPRD

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Sekretariat DPRD adalah sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya pelayanan Sekretariat DPRD kepada anggota DPRD

3. Kesatuan Bangsa dan Politik

Permasalahan yang masih dihadapi dalam pelaksanaan urusan Kesatuan Bangsa dan Politik diuraikan sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya sosialisasi Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) ditunjukkan pada tahun 2020 persentase penurunan kasus penyalahgunaan narkoba masih sebesar 50%; dan
- b. Masih rendahnya Persentase partisipasi masyarakat pemilu/pemilukada yaitu sebesar 81 % pada tahun 2020.

4.2. Isu-Isu Strategis

4.2.1 Lingkungan Strategis

Hasil telaah dari gambaran kondisi daerah, serta isu-isu global, nasional, dan regional, terutama kondisi terkini yang dipengaruhi oleh Pandemi Covid-19 dan perubahan kebijakan nasional, maka diidentifikasi kondisi lingkungan strategis pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 sebagai berikut.

1. Isu dan Tantangan Pembangunan Berkelanjutan (SDG's)

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/ *Sustainable Development Goals* (SDGs) adalah pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang menjamin keadilan dan terlaksananya tata kelola yang mampu

menjaga peningkatan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya. TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; dan (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.



Sumber: <https://www.sdg2030indonesia.org/>

Gambar 4.1.
Tujuan SDGs

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional, yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur serta indikasi dukungan pembiayaannya.

Indonesia berkomitmen melaksanakan TPB/SDGs untuk transformasi peradaban global yang lebih adil, damai, sejahtera, dan berkelanjutan diwujudkan dengan Perpres Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. SDGs berisi 17 Tujuan dan 169 Target yang dikelompokkan menjadi 4 pilar yaitu pilar pembangunan sosial, pembangunan ekonomi, pembangunan lingkungan serta pembangunan hukum dan tata kelola.


- Pilar sosial mencakup jenis urusan yang berkenaan dengan masyarakat atau kepentingan umum. Jenis urusan yang dikelompokkan pada tema sosial, antara lain pendidikan, kesehatan, pangan, ketenagakerjaan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
- Pilar ekonomi mencakup jenis urusan energi dan sumber daya mineral, keuangan, perindustrian, koperasi, usaha kecil dan menengah,



pariwisata, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik dan sosial (terkait rasio gini).


- Pilar Lingkungan mencakup jenis urusan lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan ruang, perhubungan, ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat, dan kehutanan.
- Pilar Hukum dan tata kelola mencakup jenis urusan ketenteraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat terutama dalam memberikan keadilan dan penguatan masyarakat yang inklusif, statistik, administrasi kependudukan dan catatan sipil, komunikasi dan informatika. Tata kelola kelembagaan berkenaan dengan penyelenggaraan kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di semua tingkatan.




Permasalahan capaian TPB/SDGs berdasarkan KLHS RPJMD Kabupaten Klaten yang dikelompokkan menjadi empat pilar yaitu:




Tabel 4.1
Permasalahan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026


Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
Pilar Sosial		
	<p>Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 1.2.1*/SBT: Masih adanya penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan sebesar 12,28%. • 1.3.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan, kondisi saat ini masih sebesar 90,71%. • 1.3.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan capaian proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, kondisi saat ini masih sebesar 62%. • 1.3.1.(d)/TTC: Belum memiliki indikator jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan dalam target daerah. • 1.4.1.(a)/SST: Masih adanya perempuan pernah kawin umur 15-49 tahun yang proses melahirkan terakhirnya bukan di fasilitas kesehatan sebesar 0,07%. • 1.4.1.(b)/SST: Masih adanya anak umur 12-23 bulan yang tidak menerima imunisasi dasar lengkap sebesar 11,73%. • 1.4.1.(d)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak dan berkelanjutan sebesar 8,86%. • 1.4.1.(e)/SST: Masih adanya masyarakat yang belum mendapatkan akses sanitasi layak sebesar 0,21%. • 1.4.1.(g)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI sederajat masih 88,3%. • 1.4.1.(h)/SBT: Belum optimalnya pencapaian Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs sederajat masih sebesar 73,05%. • 1.5.1*/SBT: Masih adanya jumlah korban meninggal, hilang, dan terkena dampak bencana per 100.000 orang. • 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial berada di atas target nasional.





Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
		<ul style="list-style-type: none"> • 1.5.1.(b)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial berada di atas target nasional. • 1.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan pendampingan psikososial korban bencana sosial berada di atas target nasional. • 1.5.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah daerah bencana alam/bencana sosial yang mendapat pendidikan layanan khusus, kondisi saat ini masih sebanyak 26 sekolah. • 1.5.1.(e)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) sebesar 120. • 1.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi langsung akibat bencana sebesar Rp.2.123.314.343,00. • 1.5.3*/SST: Masih perlunya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) dan melakukan pembaharuan secara berkala. • 1.a.1*/TBC: Menurunnya proporsi sumber daya yang dialokasikan oleh pemerintah secara langsung untuk program pemberantasan kemiskinan menjadi 41,51%.
 <p>2 MENGAKHIRI KELAPARAN</p>	<p>Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 2.1.1*/TTC: Belum adanya data prevalensi ketidakcukupan pangan. • 2.1.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan prevalensi kekurangan gizi (<i>underweight</i>) pada anak balita. • 2.1.2*/TAD 1: Belum adanya data prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada Skala Pengalaman Kerawanan Pangan. • 2.1.2.(a)/TAD 2: Belum adanya data penduduk dengan asupan kalori minimum di bawah 1400 kkal/kapita/hari. • 2.2.1*/SBT: Masih perlunya penurunan prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita, kondisi saat ini masih sebesar 7,1%. • 2.2.1.(a)/TAD 1: Belum adanya data prevalensi stunting pada anak di bawah dua tahun/balita. • 2.2.2*/SST: Masih adanya prevalensi malnutrisi (berat badan/tinggi badan) anak pada usia kurang dari 5 tahun sebesar 7,3%. • 2.2.2.(a)/SST: Masih adanya prevalensi anemia pada ibu hamil sebesar 9,28%. • 2.2.2.(b)/SST: Masih adanya bayi usia kurang dari 6 bulan yang tidak mendapatkan ASI eksklusif sebesar 17,85%. • 2.2.2.(c)/SST: Masih perlunya mempertahankan kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH). • 2.3.1*/TTC: Belum adanya data Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja).
 <p>3 KESEHATAN YANG BAIK DAN KESEJAHTERAAN</p>	<p>Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 3.2.2*/ SBT: Masih tingginya Angka Kematian Neonatal (AKN) yaitu sebesar 56,03 per 1000 kelahiran hidup. • 3.3.5*/SBT: Masih tingginya jumlah orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta) sebesar 28



Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
		<p>jiwa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 3.4.1.(a)/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≤18 tahun. • 3.4.1.(b)/TBC: Masih tingginya prevalensi tekanan darah tinggi sebesar 49%. • 3.4.1.(c)/TBC: Masih tingginya prevalensi obesitas pada penduduk umur ≥18 tahun sebesar 51%. • 3.4.2*/TAD: Belum adanya data angka kematian (insidens rate) akibat bunuh diri. • 3.5.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah penyalahguna narkoba dan pengguna alkohol yang merugikan, yang mengakses layanan rehabilitasi medis. • 3.5.2*/TAD: Belum adanya data terkait konsumsi alkohol (liter per kapita) oleh penduduk umur ≥ 15 tahun dalam satu tahun terakhir. • 3.7.1.(b)/SBT: Masih terbatasnya angka penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) cara <i>modern</i> masih sebesar 22,22%. • 3.8.1.(a)/SBT: Masih tingginya kondisi <i>unmet need</i> pelayanan kesehatan yaitu sebesar 15,91%. • 3.8.2*/SST: Belum sepenuhnya jumlah penduduk dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat. • 3.8.2.(a)/SST: Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebesar 90,71%. • 3.9.3.(a)/TAD: Belum adanya data terkait proporsi kematian akibat keracunan. • 3.a.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase merokok pada penduduk umur ≥15 tahun. • 3.b.1.(a)/SST: Perlu peningkatan ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas. • 3.c.1*/TTC: Belum memiliki indikator kepadatan dan distribusi tenaga kesehatan pada target daerah.
	<p>Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 4.1.1*/TTC: Belum adanya data proporsi anak-anak dan remaja yang mencapai standar kemampuan minimum dalam: (i) membaca, (ii) matematika pada target daerah • 4.1.1.(d)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ sederajat, kondisi saat ini masih 98,54%. • 4.1.1.(e)/SBT: Perlu peningkatan Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/ sederajat, kondisi saat ini masih 98,31%. • 4.1.1.(g)/SST: Perlu mempertahankan dan meningkatkan rata-rata lama sekolah penduduk umur ≥15 tahun berada di atas target nasional. • 4.4.1*/TAD: Belum adanya data terkait proporsi remaja dan dewasa dengan keterampilan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). • 4.6.1.(a)/SST: Masih adanya penduduk umur ≥15 tahun yang tidak melek aksara sebesar 0,34%. • 4.6.1.(b)/TTC: Belum adanya data persentase angka melek aksara penduduk umur 15-24 tahun dan umur 15-59 tahun. • 4.a.1*/TTC: Belum adanya data proporsi sekolah dengan akses ke: (a) listrik (b) internet untuk tujuan pengajaran, (c) komputer untuk tujuan pengajaran, (d) infrastruktur dan materi memadai bagi siswa disabilitas, (e) air minum layak, (f) fasilitas sanitasi dasar per jenis kelamin, (g) fasilitas cuci tangan

Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
		<p>(terdiri air, sanitasi, dan higienis bagi semua (WASH)).</p> <ul style="list-style-type: none"> • 4.c.1*/SST: Masih adanya guru TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan PLB yang belum bersertifikat pendidik sebesar 12,93%.
 <p>5 KESETARAAN GENDER</p>	<p>Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 5.1.1*/SBT: Masih terbatasnya jumlah kebijakan yang responsif gender dalam mendukung pemberdayaan perempuan yaitu saat ini masih berjumlah 1 dokumen. • 5.2.2*/TBC: Perlu penurunan proporsi perempuan dewasa dan anak perempuan (umur 15-64 tahun) mengalami kekerasan (fisik, seksual, atau emosional) oleh pasangan atau mantan pasangan dalam 12 bulan terakhir. • 5.3.1*/TAD: Belum adanya data proporsi perempuan umur 20-24 tahun yang berstatus kawin atau berstatus hidup bersama sebelum umur 15 tahun dan sebelum umur 18 tahun. • 5.3.1.(a)/TBC: Perlu peningkatan median usia kawin pertama perempuan pernah kawin umur 25-49 tahun. • 5.5.1*/SBT: Masih terbatasnya proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah. • 5.b.1*/TAD: Belum adanya data proporsi individu yang menguasai/ memiliki telepon genggam.
Pilar Ekonomi		
 <p>7 ENERGI BERSIH DAN TERJANGKAU</p>	<p>Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua</p>	<p>-</p>
 <p>8 PEKERJAAN LAYAK DAN PERTUMBUHAN EKONOMI</p>	<p>Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 8.3.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan persentase akses UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) ke layanan keuangan berada di atas target nasional, masih sekitar 30% koperasi dalam kondisi tidak aktif. • 8.5.1*/SST: Masih perlu mempertahankan upah rata-rata per jam pekerja berada di atas target nasional. • 8.5.2*/SBT: Masih perlunya penurunan tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis kelamin dan kelompok umur, Tingkat pengangguran terbuka masih 3,55%. • 8.5.2.(a)/TAD: Belum adanya data terkait jumlah tingkat setengah pengangguran. • 8.6.1*/TAD: Belum adanya data terkait persentase usia muda (15-24 tahun) yang sedang tidak sekolah, bekerja atau mengikuti pelatihan (NEET). • 8.9.1*/SST: Masih perlu mempertahankan proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB berada di atas target nasional. • 8.9.1.(b)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah kunjungan wisatawan nusantara berada di atas target nasional. • 8.9.1.(c)/SST: Masih perlu mempertahankan jumlah devisa sektor pariwisata berada di atas target nasional.

Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
<p>9 INFRASTRUKTUR, INDUSTRI DAN INOVASI</p> 	<p>Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 9.2.2*/TTC: Belum adanya data proporsi tenaga kerja pada sektor industri manufaktur. • 9.3.1*/TTC: Belum memiliki indikator terkait proporsi nilai tambah industri kecil terhadap total nilai tambah industri dalam target daerah. • 9.3.2*/TTC: Belum memiliki indikator terkait proporsi industri kecil dengan pinjaman atau kredit dalam target daerah. • 9.c.1*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan proporsi penduduk yang terlayani <i>mobile broadband</i> berada di atas target nasional, proporsi penduduk yang tidak terlayani <i>mobile broadband</i> sebesar 46,1%. • 9.c.1.(a)/SST: Masih perlu mempertahankan proporsi individu yang menguasai/memiliki telepon genggam berada di atas target nasional, individu yang tidak menguasai/ memiliki telepon genggam saat ini sebesar 30,94%. • 9.c.1.(b)/SST: Masih perlu meningkatkan proporsi individu yang menggunakan Internet berada di atas target nasional, individu yang tidak menggunakan Internet masih sebesar 47,21%.
<p>10 MENGURANGI KETIMPANGAN</p> 	<p>Mengurangi Kesenjangan Intra dan Antarnegara</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 10.1.1*/TAD 1: Belum memiliki sistem informasi data terkait koefisien gini. • 10.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur menjadi 7-8%, kondisi saat ini sebesar 12,28%. • 10.1.1.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah daerah tertinggal yang terentaskan pada target daerah. • 10.1.1.(c)/SBT: Masih adanya desa tertinggal sebanyak 59 desa. • 10.1.1.(d)/SBT: Masih perlunya peningkatan jumlah Desa Mandiri, kondisi saat ini masih sebesar 7 desa. • 10.1.1.(e)/TAD 2: Belum adanya data rata-rata pertumbuhan ekonomi di daerah tertinggal pada target daerah • 10.1.1.(f)/TBC: Masih adanya angka persentase penduduk miskin di daerah tertinggal masih sebesar 54%. • 10.2.1*/TAD 2: Belum adanya data proporsi penduduk yang hidup di bawah 50 persen dari median pendapatan, menurut jenis kelamin dan penyandang difabilitas pada target daerah. • 10.3.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan Indeks Kebebasan Sipil, indeks kebebasan saat ini masih sebesar 76,21%. • 10.3.1.(d)/TAD: Belum adanya data jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelanggaran diskriminasi menurut hukum HAM Internasional. • 10.4.1.(b)/TBC: Masih perlunya peningkatan proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan, kondisi saat ini sebesar 62%.
<p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p> 	<p>Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 17.6.2.(b)/TAD: Belum adanya data tingkat penetrasi akses tetap pitalebar (<i>fixed broadband</i>) di Perkotaan dan di Perdesaan. • 17.8.1.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase kabupaten 3T yang terjangkau layanan akses telekomunikasi universal dan internet, akses

Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
		<p>telekomunikasi universal dan internet masih sebesar 53,6%.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 17.17.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). • 17.17.1.(b)/TAD: Belum adanya data jumlah alokasi pemerintah untuk penyiapan proyek, transaksi proyek, dan dukungan pemerintah dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU). • 17.19.2.(b)/TAD: Perlunya peningkatan upaya-upaya dalam peningkatan data registrasi terkait kelahiran dan kematian (<i>Vital Statistics Register</i>).
Pilar Lingkungan		
 <p>6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI</p>	<p>Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 6.1.1.(a)/SST: Masih adanya rumah tangga yang tidak memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak sebesar 8,86%. • 6.1.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, kondisi saat ini masih 2,025 m3/detik. • 6.1.1.(c)/SBT: Masih adanya penduduk yang belum memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan, kondisi saat ini masih 91,14%. • 6.2.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data proporsi populasi yang memiliki fasilitas cuci tangan dengan sabun dan air. • 6.2.1.(b)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak menjadi 100%, kondisi saat ini 99,79%. • 6.2.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). • 6.2.1.(d)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah desa/kelurahan yang <i>Open Defecation Free (ODF)/ Stop Buang Air Besar Sembarangan (SBS)</i>. • 6.2.1.(e)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah infrastruktur air limbah dengan sistem terpusat skala kota, kawasan dan komunal. • 6.2.1.(f)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat, kondisi saat ini 414 SR. • 6.3.1.(b)/TTC: Masih perlunya upaya mempertahankan dan meningkatkan rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja, kondisi saat inisebesar 0,12%. • 6.3.2.(b)/TTC: Masih perlunya mempertahankan dan meningkatkan kualitas air sungai, kondisi saat ini sebesar 28,46. • 6.4.1.(b)/TAD: belum adanya data Insentif penghematan air pertanian/ perkebunan dan industri.

Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
 <p>11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN</p>	<p>Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 11.1.1.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau. • 11.3.2.(b)/TTC: Belum adanya data jumlah lembaga pembiayaan infrastruktur. • 11.4.1.(a)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan jumlah kota pusaka di kawasan perkotaan metropolitan, kota besar, kota sedang dan kota kecil berada di atas target nasional. • 11.5.1*/SST: Perlu penurunan jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang, kondisi saat ini masih adanya korban yang terkena dampak bencana sebanyak 0,53 per 100.000 orang. • 11.5.1.(a)/SBT: Masih tingginya nilai Indeks Risiko Bencana sebesar 80,24. • 11.5.1.(c)/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dan meningkatkan jumlah sistem peringatan dini cuaca dan iklim serta kebencanaan, kondisi saat ini memiliki 2 sistem. • 11.5.2.(a)/SST: Masih adanya kerugian ekonomi langsung akibat bencana sebesar Rp.2.123.314.343,00. • 11.6.1.(a)/SBT: Masih perlunya upaya meningkatkan persentase sampah perkotaan yang tertangani, kondisi saat ini masih sebesar 17,19%. • 11.b.2*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah, dan dan melakukan pembaharuan secara berkala.
 <p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB</p>	<p>Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 12.4.2.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri), kondisi saat ini masih sebesar 31,04%. • 12.5.1.(a)/TTC: Belum adanya data jumlah timbunan sampah yang didaur ulang. • 12.6.1.(a)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah perusahaan yang menerapkan sertifikasi SNI ISO 14001, kondisi saat ini masih sebanyak 2 perusahaan. • 12.7.1.(a)/TAD 2: Belum adanya data terkait jumlah produk ramah lingkungan yang teregister. • 12.8.1.(a)/TAD: Belum adanya data jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.
 <p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>	<p>Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 13.1.1*/SST: Masih perlunya upaya mempertahankan dokumen strategi Pengurangan Risiko Bencana (PRB) tingkat daerah dan melakukan pembaharuan secara berkala. • 13.1.2*/SST: Masih adanya korban yang terkena dampak bencana sebanyak 0,53 per 100.000 orang.
 <p>14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT</p>	<p>Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan</p>	

Goals	Tujuan TPB	Permasalahan Pencapaian TPB Dalam Rekomendasi KLHS RPJMD
	<p>Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 15.1.1.(a)/TBC: Perlunya peningkatan proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan, kondisi saat ini masih 3701,4 Ha. • 15.3.1.(a)/SST: Masih adanya luas lahan kritis yang belum direhabilitasi. • 15.6.1*/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait kerangka legislasi, administrasi dan kebijakan untuk memastikan pembagian keuntungan yang adil dan merata. • 15.9.1.(a)/TTC: Belum adanya data dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati dalam target daerah.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		
	<p>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • 16.1.1.(a)/SBT: Masih perlunya penurunan jumlah kasus kejahatan pembunuhan pada satu tahun terakhir. • 16.1.4*/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait proporsi penduduk yang merasa aman berjalan sendirian di area tempat tinggalnya. • 16.2.1.(a)/TAD: Belum adanya data proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuh dalam setahun terakhir. • 16.2.3.(a)/TBC: Belum adanya data proporsi perempuan dan laki-laki muda umur 18-24 tahun yang mengalami kekerasan seksual sebelum umur 18 tahun. • 16.6.1*/SBT: Masih perlunya peningkatan proporsi pengeluaran utama pemerintah terhadap anggaran yang disetujui. • 16.6.1.(c)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase penggunaan <i>e-procurement</i> terhadap belanja pengadaan. • 16.6.2.(a)/SBT: Masih perlunya peningkatan persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/ Kota). • 16.10.2.(c)/TBC: Masih perlunya peningkatan jumlah kepemilikan sertifikat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) untuk mengukur kualitas PPID dalam menjalankan tugas dan fungsi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. • 16.b.1.(a)/TAD: Belum memiliki sistem informasi pendataan terkait jumlah kebijakan yang diskriminatif dalam 12 bulan lalu berdasarkan pelarangan diskriminasi menurut hukum HAM internasional.








Keterangan :


- SST : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan dan sudah mencapai target nasional
 SBT : Indikator TPB yang sudah dilaksanakan tetapi belum mencapai target nasional
 TTC : Indikator TPB tidak ada target daerah tetapi tercapai
 TBC : Indikator TPB tidak ada target daerah dan belum tercapai
 TAD : Indikator TPB belum ada data

Dari hasil KLHS RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026, diperoleh hasil analisis untuk isu prioritas dari capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan sebanyak 7 isu prioritas sebagaimana terlihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.2
Isu Prioritas Indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
Kabupaten Klaten

Goals	Tujuan TPB	Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah
Pilar Sosial		
	Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun	Adanya kerawanan terhadap bencana alam berupa rawan bencana letusan gunung api, tanah longsor, banjir dan angin topan di Kabupaten Klaten.
	Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Belum terwujudnya konsumsi pangan yang beragam, bergizi, dan berimbang dan aman disebabkan pengetahuan, budaya dan kebiasaan makan. • Sekitar 48% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang sangat tinggi terhadap penyediaan bahan pangan.
	Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Semua Usia	Pemulihan ekonomi daerah akibat adanya Pandemi Covid-19.
	Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua	Perlunya pendidikan dasar untuk penanggulangan dan mitigasi bencana.
	Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan	-
Pilar Ekonomi		
	Menjamin Akses Energi yang Terjangkau, Andal, Berkelanjutan dan Modern untuk Semua	Terdapat kegiatan pertambangan kaki gunung Merapi.
	Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua	<ul style="list-style-type: none"> • PDRB Perkapita Kabupaten Klaten menurun di tahun 2020. • Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun 6,60%. • Peningkatan ekonomi daerah dengan pengembangan sektor pariwisata melalui KSPN Prambanan.
	Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi	<ul style="list-style-type: none"> • Terdapat beberapa titik lokasi di Kabupaten Klaten yang memiliki kandungan NO2 dan CO tinggi • Terdapat rencana pembangunan jalan tol Jogja-Solo.
	Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara	-

Goals	Tujuan TPB	Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah
 <p>17 KEMITRAAN UNTUK MENCAPAI TUJUAN</p>	Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kondisi ruang fiskal pada Pemerintah Kab Klaten pada tahun 2018 sebesar Rp855.982.298.429,42 dan pada tahun 2019 menurun menjadi Rp.816.131.902.974,44. Kemandirian APBD Kab Klaten mengalami penurunan di tahun 2019 dengan kemandirian sebesar 16,81% yang sebelumnya 21,66% di tahun 2018.
Pilar Lingkungan		
 <p>6 AKSES AIR BERSIH DAN SANITASI</p>	Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Kebutuhan air pada tahun 2019 sebesar 391.926.128,25 m³/th. Persentase penduduk memiliki air minum layak masih 91,14% Sekitar 52% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem yang tinggi terhadap penyediaan air. Cakupan pelayanan akses dasar sanitasi 100%. Persentase layanan air limbah 97,82%. Indeks kualitas air masih 28,46. Masih adanya kegiatan pengeboran air tanah yang dilakukan tanpa ijin.
 <p>11 KOTA DAN KOMUNITAS YANG BERKELANJUTAN</p>	Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> Masih adanya kawasan permukiman kumuh. Perlunya peningkatan sarana persampahan. Masih rendahnya kesadaran masyarakat tentang pengelolaan sampah. Kondisi RTH eksisting seluas 222 Ha dan RTH rencana seluas 8.556 Ha.
 <p>12 KONSUMSI DAN PRODUKSI YANG BERTANGGUNGJAWAB</p>	Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan	Perlu peningkatan dalam pengolahan sampah.
 <p>13 PENANGANAN PERUBAHAN IKLIM</p>	Mengambil Tindakan Cepat untuk Mengatasi Perubahan Iklim dan Dampaknya	<ul style="list-style-type: none"> Terdapat daerah rawan bencana alam tanah longsor, meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Gantiwarno, Kemalang, Manisrenggo, Prambanan dan Wedi. Terdapat daerah rawan bencana alam banjir, meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi dan Wonosari. Terdapat daerah rawan bencana angin topan yang meliputi seluruh wilayah di Kabupaten Klaten.
 <p>14 MENJAGA EKOSISTEM LAUT</p>	Melestarikan dan Memanfaatkan secara Berkelanjutan Sumber Daya Kelautan dan Samudera untuk Pembangunan Berkelanjutan	-
 <p>15 MENJAGA EKOSISTEM DARAT</p>	Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi Lahan, serta Menghentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati	Kondisi biodiversitas berbasis jasa ekosistem, sekitar 50% luasan Kabupaten Klaten memiliki jasa ekosistem sedang.
Pilar Hukum dan Tata Kelola		

Goals	Tujuan TPB	Isu Strategis TPB terkait Kondisi Lingkungan Hidup dan Kondisi Keuangan Daerah
	<p>Menguatkan Masyarakat yang Inklusif dan Damai untuk Pembangunan Berkelanjutan, Menyediaan Akses Keadilan untuk Semua, dan Membangun Kelembagaan yang Efektif, Akuntabel, dan Inklusif di Semua Tingkatan</p>	-

Sumber: KLHS RPJMD Kab Klaten Tahun 2021-2026

2. Revolusi Industri 4.0

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah dunia sebagaimana revolusi generasi pertama melahirkan sejarah ketika tenaga manusia dan hewan digantikan oleh kemunculan mesin. Berikutnya, pada revolusi industri generasi kedua ditandai dengan kemunculan pembangkit tenaga listrik dan motor pembakaran dalam (*combustion chamber*). Penemuan ini memicu kemunculan pesawat telepon, mobil, pesawat terbang, dll yang mengubah wajah dunia secara signifikan. Kemudian, revolusi industri generasi ketiga ditandai dengan kemunculan teknologi digital dan internet. Pada revolusi industri generasi keempat, ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kendaraan tanpa pengemudi, editing genetik dan perkembangan neuroteknologi yang memungkinkan manusia untuk lebih mengoptimalkan fungsi otak.

Pada era industri generasi keempat ini, ukuran besar perusahaan tidak menjadi jaminan, namun kelincahan perusahaan menjadi kunci keberhasilan meraih prestasi dengan cepat. Ini membuktikan bahwa yang cepat dapat memangsa yang lambat dan bukan yang besar memangsa yang kecil. Berbagai penelitian menggambarkan bagaimana Industri 4.0 mewakili pendekatan revolusi industri keempat, di mana Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) membentuk fondasi infrastruktur untuk teknologi industri inovatif besar.

Industri 4.0 awalnya diperkenalkan pada Pameran Hannover pada 2011 dan diumumkan secara resmi pada 2013 sebagai inisiatif strategis Jerman untuk mengambil peran perintis dalam industri yang saat ini sedang merevolusi sektor manufaktur. Industri 4.0 mewakili trend teknologi otomasi saat ini di industri manufaktur, dan itu terutama mencakup teknologi yang memungkinkan seperti sistem fisik siber (*Cyber Physical System - CPS*), *Internet of Things (IoT)* dan komputasi Cloud (Hermann, Pentek, dan Otto 2016). Industri 4.0 merepresentasikan evolusi teknologi dari *embedded system ke cyber physical systems*. Dalam Industri 4.0, sistem tertanam, komunikasi mesin-ke-mesin semantik, teknologi IoT dan CPS mengintegrasikan ruang virtual dengan dunia fisik. Generasi baru dari sistem industri ini hadir, seperti pabrik pintar muncul untuk menghadapi kompleksitas produksi di lingkungan siber (GTAI 2014). Integrasi Industri dan Integrasi Informasi Industri memainkan peran penting. Hari ini, kita berada di puncak Revolusi Industri Keempat di mana dunia produksi dan konektivitas jaringan diintegrasikan melalui IoT dan CPS untuk menjadikan Industri 4.0 kenyataan (GTAI 2014). Industri 4.0 memiliki dampak strategis jangka panjang yang penting pada pengembangan industri global.

Bagi dunia birokrasi, isu Industri 4.0 ini juga harus mendapatkan respon secara baik jika birokrasi tidak mau menjadi artefak di tengah perkembangan teknologi yang semakin berkembang. Cara kerja yang tidak efisien sudah saatnya untuk diakhiri.

Indonesia memasuki era Revolusi Industri 4.0. Itu setidaknya yang tercermin dari peluncuran program Making Indonesia 4.0 oleh Presiden Joko Widodo awal April 2018. Revolusi Industri 4.0 tak hanya menawarkan sisi positif (*“the promises”*) tapi juga negatif (*“the perils”*). Revolusi yang ditopang oleh teknologi-teknologi abad 21 seperti machine learning, artificial intelligence, internet of things, hingga 3D printing. Pemerintah dan Pemerintah Daerah harus mempersiapkan diri, merencanakan, dan menyusun strategi di tingkat pusat dan daerah untuk menghadapinya. Untuk bisa mengelola Revolusi Industri 4.0 diperlukan gaya pemerintahan yang kreatif, adaptif, cepat, dan mumpuni dalam mengelola perubahan eksponensial yang dihasilkan oleh Revolusi Industri 4.0. Teknologi pintar sebagai produk revolusi Industri 4.0 harus dimanfaatkan untuk kepentingan pelayanan publik yang lebih baik. Desain program sebagai cara untuk menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat baik sosial maupun ekonomi mau tidak mau harus mempertimbangkan produk revolusi industri sebab masyarakat berkembang sejalan dengan perkembangan dunia yang terjadi. Dalam menghadapi Revolusi Industri 4.0 perlu adanya kolaborasi secara intens dengan seluruh elemen stakeholders (bisnis, akademis, komunitas, masyarakat) dalam menuntun proses transformasi digital di level pemerintah, industri, dan masyarakat secara luas.

3. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 yang ditetapkan merupakan tahapan penting dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 karena akan mempengaruhi pencapaian target pembangunan dalam RPJPN. Pada saat itu, pendapatan per kapita Indonesia diperkirakan sudah masuk ke dalam kelompok negara-negara berpenghasilan menengah atas (*upper-middle income countries*) yang memiliki infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Sesuai arahan RPJPN 2005-2025, sasaran pembangunan jangka menengah 2020-2024 adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Visi Misi Presiden 2020-2024 disusun berdasarkan arahan RPJPN 2020-2025. RPJMN 2020-2024 dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.

VISI

Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong

MISI



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Gambar 4.2
Visi dan Misi Presiden 2020-2024

RPJMN 2020-2024 merupakan titik tolak untuk mencapai sasaran Visi Indonesia 2045 yaitu Indonesia Maju. Untuk itu, penguatan proses transformasi ekonomi dalam rangka mencapai tujuan pembangunan tahun 2045 menjadi fokus utama dalam rangka pencapaian infrastruktur, kualitas sumber daya manusia, layanan publik, serta kesejahteraan rakyat yang lebih baik.

Presiden menetapkan 5 (lima) arahan utama sebagai strategi dalam pelaksanaan misi Nawacita dan pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045. Kelima arahan tersebut mencakup Pembangunan Sumber Daya Manusia, Pembangunan Infrastruktur, Penyederhanaan Regulasi, Penyederhanaan Birokrasi, dan Transformasi Ekonomi.



Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industri dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi.

1 | Pembangunan SDM

Membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerjasama industri dan talenta global.

2 | Pembangunan Infrastruktur

Melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

3 | Penyederhanaan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *Omnibus Law*, terutama menerbitkan 2 undang-undang. Pertama, UU Cipta Lapangan Kerja. Kedua, UU Pemberdayaan UMKM.

4 | Penyederhanaan Birokrasi

Memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5 | Transformasi Ekonomi

Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

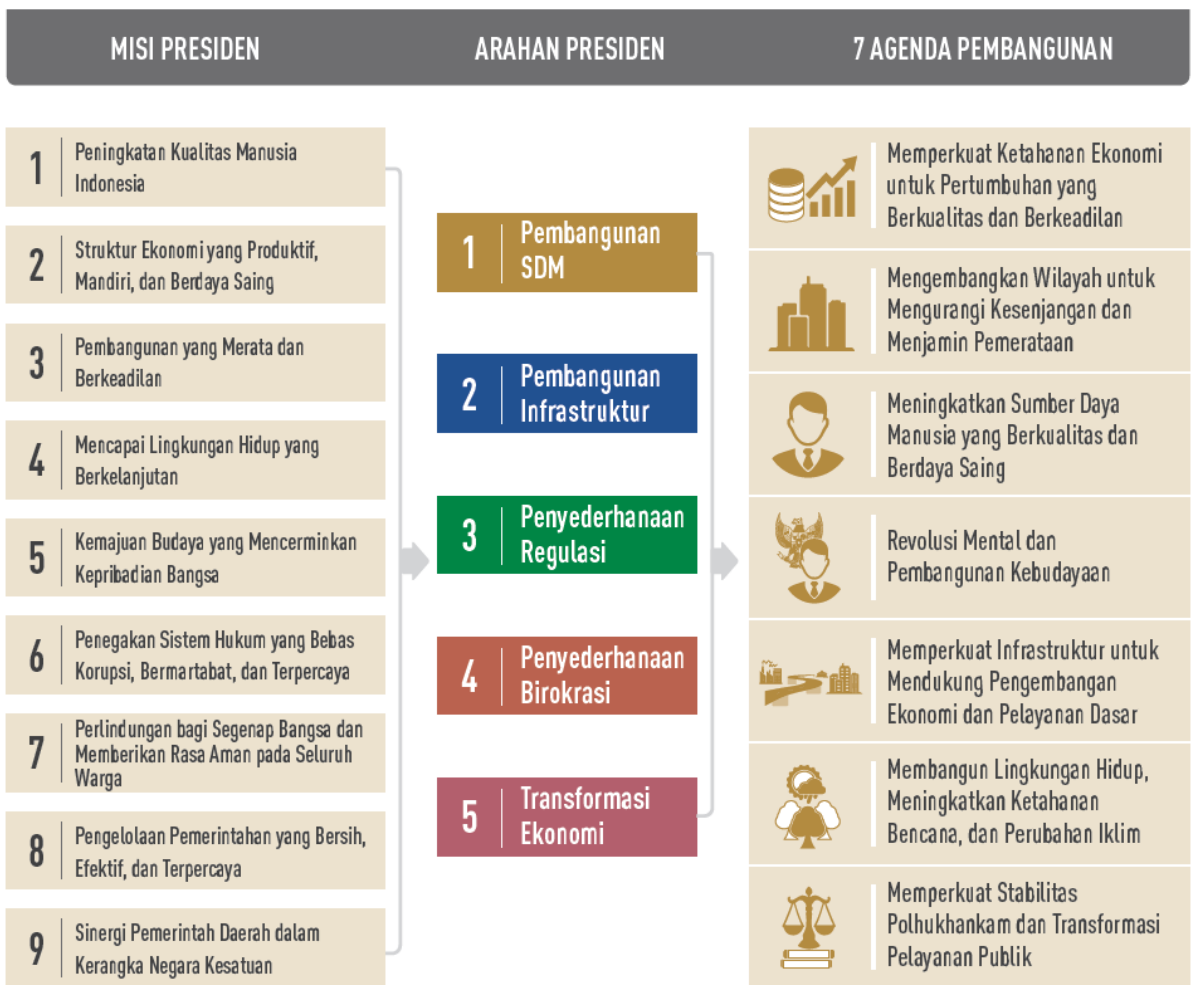
Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Gambar 4.3 **Strategi Pencapaian Visi 2045**

RPJPN 2005-2025, Visi Indonesia 2045, dan Visi Misi Presiden menjadi landasan utama penyusunan RPJMN 2020-2024, yang selanjutnya diterjemahkan ke dalam 7 agenda pembangunan.

VISI PRESIDEN

*Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat,
Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan
Gotong Royong*



Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Gambar 4.4
7 Agenda Pembangunan Nasional

Dalam sasaran makro pembangunan 2020-2024 dalam RPJMN 2020-2024, tentunya dalam pencapaian secara Nasional tersebut, membutuhkan sinergitas dan komitmen antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota.



Keterangan: Sasaran Makro Pembangunan 2020-2024
 Sumber: Perpres No. 18 Tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024

Gambar 4.5
Sasaran Makro Pembangunan Nasional 2020-2024

Sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka pembangunan Kabupaten Klaten ke depan harusnya selaras dengan cita-cita dan tujuan pembangunan nasional. Oleh karena itu dalam setiap perencanaan program dan kegiatan hendaknya mengacu pada isu-isu strategis pembangunan nasional pada periode yang sama. Isu-isu strategis pembangunan dalam RPJMN yang harus dijadikan salah satu acuan pembangunan Kabupaten Klaten 5 tahun ke depan yaitu:

- a. Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing sebagai berikut:
 - 1). Pengendalian penduduk dan penguatan tata kelola kependudukan;
 - 2). Perlindungan sosial bagi seluruh penduduk;
 - 3). Pemenuhan layanan dasar;
 - 4). Peningkatan kualitas anak, perempuan, dan pemuda;
 - 5). Pengentasan kemiskinan; dan
 - 6). Peningkatan produktivitas dan daya saing.
- b. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa sebagai berikut:
 - 1). Melemahnya ideologi pancasila dan ketahanan budaya bangsa;
 - 2). Belum optimalnya pemajuan kebudayaan indonesia;
 - 3). Masih lemahnya pemahaman dan pengamalan nilai-nilai ajaran agama;
 - 4). Belum kukuhnya moderasi beragama untuk memperkuat toleransi dan kerukunan;
 - 5). Belum optimalnya peran keluarga; dan
 - 6). Rendahnya Budaya Literasi, Inovasi, dan Kreativitas.
- c. Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas sebagai berikut:
 - 1). Keberlanjutan sumber daya alam;
 - 2). Efektivitas tata kelola sumber daya ekonomi;
 - 3). Transformasi struktural berjalan lambat; dan
 - 4). Revolusi industri 4.0 dan ekonomi digital
- d. Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar sebagai berikut:

- 1). Infrastruktur Pelayanan Dasar;
 - 2). Infrastruktur Ekonomi;
 - 3). Infrastruktur Perkotaan; dan
 - 4). Energi dan Ketenagalistrikan
- e. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan
Isu strategis utama pembangunan kewilayahan adalah masih adanya ketimpangan antarwilayah.
- f. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim sebagai berikut:
- 1). Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2). Peningkatan Ketahanan Bencana dan Iklim; dan
 - 3). Pembangunan Rendah Karbon
- g. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik sebagai berikut:
- 1). Konsolidasi Demokrasi;
 - 2). Optimalisasi Kebijakan Luar Negeri;
 - 3). Penegakan Hukum Nasional;
 - 4). Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola; dan
 - 5). Menjaga Stabilitas Keamanan Nasional.

Didalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, Kabupaten Klaten termasuk pada wilayah pengembangan Jawa-Bali dan koridor pemerataan Provinsi Jawa Tengah bersama 4 (empat) kabupaten lainnya yaitu Kabupaten Cilacap, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Kebumen, dan Kabupaten Magelang. Kabupaten Klaten akan menerima manfaat dari beberapa program/proyek prioritas sebagai berikut:

1. Pengembangan kawasan strategis, meliputi percepatan pengembangan destinasi pariwisata prioritas;
2. Pengembangan sektor unggulan meliputi kawasan tanaman substitusi impor (tebu), peningkatan produksi perikanan tangkap, peningkatan produksi perikanan budidaya.
3. Pengembangan daerah tertinggal, kawasan perbatasan, perdesaan dan transmigrasi, meliputi pengembangan desa terpadu.

Berdasarkan arahan presiden dan agenda pembangunan tersebut, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penyusunan dokumen RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.3
Hasil Telaahan Terhadap RPJMN Tahun 2020-2024

Arahan Presiden	Agenda Pembangunan	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan SDM • Pembangunan infrastruktur • Penyederhanaan regulasi • Penyederhanaan birokrasi • Transformasi ekonomi 	Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
	Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah
	Meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat

Arahan Presiden	Agenda Pembangunan	Implikasi
		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak
	Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing
	Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah • Meningkatkan capaian universal access (100-0-100)
	Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan • Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana
	Memperkuat stabilitas polhukhankam dan transformasi pelayanan publik	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Sumber: Tim Penyusun, 2021

4. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang

Arah pengembangan pembangunan ekonomi Kabupaten Klaten sesuai Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019. Percepatan dan pemerataan pembangunan ekonomi pada kawasan tersebut dilakukan secara terpadu dan terintegrasi dalam Rencana Induk Pembangunan Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang. Rencana Induk dimaksud menjadi pedoman/acuan bagi kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan dan program/kegiatan sektoral dalam rangka pelaksanaan percepatan pembangunan Kawasan Kedungsepur, Kawasan Purwomanggung, Kawasan Bregasmalang, dengan didukung pengembangan Kawasan Barlingmascakeb, Kawasan Petanglong, Kawasan Wanarakuti, Kawasan Banglor, dan Kawasan Subosukawonosraten.

Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 didalamnya memuat 270 proyek yang ditargetkan selesai hingga akhir tahun 2030. Daftar proyek di Kabupaten Klaten sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pengendalian Banjir S. Dengkeng, S. Bengawan Solo
2. Revitalisasi Rowojombor

Percepatan pembangunan ekonomi kawasan dalam Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 dalam rangka mempercepat peningkatan investasi dan pertumbuhan ekonomi Kawasan yang diharapkan akan berdampak pada perekonomian regional dan nasional.

5. Penelaahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah lima tahun kedepan. Visi dan misi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018-2023 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

Visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2018-2023 merupakan implementasi dari visi Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah periode tahun 2018-2023 yaitu:

“Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” Tetep Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Jawa Tengah tahun 2018-2023, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota;
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran; dan
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Isu strategis pembagunan jangka menengah Provinsi Jawa Tengah tahun 2018-2023 yang harus diperhatikan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten adalah:

- a. Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia;
- b. Penanggulangan Kemiskinan;
- c. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha;
- d. Kedaulatan pangan dan energi;
- e. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya Alam;
- f. Kesenjangan wilayah; dan
- g. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah.

Tabel 4.4
Hasil Telaahan Terhadap RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023

Isu Strategis	Misi	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia 	Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyub untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan perwujudan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing
<ul style="list-style-type: none"> • Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah 	Mempercepat reformasi birokrasi yang dinamis serta memperluas sasaran ke pemerintahan Kabupaten/Kota	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah • Meningkatkan kualitas pelayanan publik

Isu Strategis	Misi	Implikasi
<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan Kemiskinan • Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha • Kesenjangan wilayah 	<p>Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat
<ul style="list-style-type: none"> • Peningkatan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia • Kedaulatan pangan dan energi • Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian Sumber Daya • Alam 	<p>Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing • Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat • Meningkatkan kesejahteraan masyarakat • Meningkatkan keberdayaan perempuan dan anak • Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi • Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan • Meningkatkan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana

Sumber: Tim Penyusun, 2021

6. Isu Pandemi Covid-19

Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan dunia saat ini. Dalam waktu yang relatif singkat, virus ini telah mengubah drastis arah pembangunan global dari optimisme pemulihan ekonomi yang di awal 2020 diyakini masih akan terjadi, menjadi ancaman krisis kesehatan serta resesi yang tak terhindarkan. Menurut *World Health Organization (WHO)*, Covid-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus *SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus-2)* yang menyerang sistem pernapasan. Namun tingkat penularan yang sangat cepat serta belum ditemukannya vaksin atas penyakit tersebut membuat Covid-19 memberikan ancaman serius pada kesehatan publik, terutama terlihat dari tingkat kematian yang terus meningkat.

Pandemi Covid-19 yang telah memicu serangkaian tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya oleh negara-negara untuk menanggulangi penyebaran Pandemi Covid-19 dan mengurangi kondisi terburuk akibat Pandemi Covid-19, yaitu Kasus Kematian. Pada awal Maret 2020, corona virus telah dikonfirmasi penyebarannya di Indonesia. Pada 11 Maret 2020, ketika jumlah kasus di seluruh dunia mencapai lebih dari 127.000 dan angka kematian telah melewati 4.700 orang, WHO menyatakan wabah global corona virus sebagai Pandemi dan pada bulan April 2020, Pandemi telah menyebar ke semua provinsi di Indonesia.

Pandemi virus corona (Covid-19) tak hanya mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, tetapi juga berdampak terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals (TPB/ SDGs)*. Covid-19 berdampak besar bagi ekonomi

nasional maupun daerah, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Selain itu minat investasi juga akan menurun dengan signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk menyediakan berbagai paket kebijakan, baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif).

Pemerintah memberlakukan status Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dan menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sejak tanggal 31 Maret 2020. Sebelumnya, Pemerintah juga telah memberlakukan larangan penerbangan termasuk dari dan ke Tiongkok, membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, memberlakukan kebijakan *physical distancing*, serta menetapkan status keadaan darurat bencana Covid-19. Berbagai himbauan termasuk menganjurkan dan bahkan melarang masyarakat untuk tidak melakukan pulang kampung termasuk dalam rangka mudik Hari Raya Idul Fitri 1441 Hijriah telah dilakukan. Anjuran untuk meningkatkan pola hidup bersih dan sehat juga terus digencarkan. Langkah-langkah tersebut diimplementasikan dengan dasar bahwa kesehatan dan keselamatan masyarakat adalah prioritas. Namun demikian, langkah-langkah tersebut menimbulkan penurunan aktivitas ekonomi yang cukup signifikan.

Dampak dari Covid-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun sisi penawaran (*supply*), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat Covid-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Selain melakukan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, Pemerintah juga sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa, antara lain, *refocusing* dan realokasi APBN, serta pemberian stimulus fiskal, moneter dan sektor keuangan. Fokus utama kebijakan Pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah mendukung anggaran kesehatan, memperluas *Social Safety Net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga diperlukan fleksibilitas APBN yang memastikan ketersediaan anggaran dengan tetap menjaga kesinambungan keuangan negara.

Langkah-langkah pemberian stimulus bertujuan untuk membantu pelaku ekonomi bertahan menghadapi dampak Covid-19, menjaga daya beli masyarakat, memberikan kemudahan ekspor-impor, meminimalisir jumlah pemutusan hubungan kerja (PHK), membantu perbankan memberikan relaksasi dan likuiditas, dan mencegah terjadinya krisis ekonomi dan

keuangan. Namun demikian, efektivitas stimulus tersebut akan sangat tergantung pada efektivitas kebijakan pencegahan dan penanganan kasus Covid-19 di Indonesia. Tidak hanya sangat tergantung dari skenario efektivitas penanganan Covid-19, proyeksi pertumbuhan perekonomian Indonesia juga akan tergantung pada unsur ketidakpastian atas gangguan di sisi penawaran, pengetatan di pasar keuangan, perubahan pola belanja masyarakat, dan fluktuasi harga komoditas global. Berdasarkan kondisi-kondisi tersebut Pemerintah menyusun dua skenario pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2020, yaitu skenario berat dan skenario sangat berat. Dalam skenario-skenario tersebut, Pemerintah berusaha keras agar krisis saat ini tidak menjadi krisis keuangan. Pemerintah menggunakan skenario-skenario rambatan dan dampak Pandemi Covid-19 tersebut karena perkembangan situasi penyebaran Covid-19 yang sangat cepat serta potensi dampak yang menimbulkan ketidakpastian tinggi dalam perekonomian menyulitkan penentuan *outlook* perekonomian.

Tingginya ketidakpastian kondisi perekonomian dunia dan domestik saat ini juga tercermin dari beragamnya proyeksi tingkat pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk tahun 2020 oleh lembaga-lembaga ekonomi internasional. Ketidakpastian tersebut menyebabkan terjadinya perbedaan penilaian atas tingkat efektivitas kebijakan pencegahan Covid-19 dan kebijakan ekonomi yang tercermin dari perbedaan skenario yang dipergunakan. Hal ini menyebabkan angka proyeksi menjadi sangat dinamis dan sangat beragam tidak konvergen ke suatu angka tertentu, namun semuanya mengarah kepada pemburukan perekonomian.

Pemerintah mulai menempatkan rencana untuk menstabilkan ekonomi dan mendukung mata pencaharian masyarakat, Pemerintah Indonesia telah membuat dan memberikan beberapa kebijakan melalui stimulus ekonomi dan program kompensasi untuk menanggulangi dampak-dampak yang belum pernah terjadi sebelumnya dari Pandemi Covid-19. Meskipun Pemerintah telah memiliki skema perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, namun data menunjukkan bahwa program yang ada dan jumlah peserta iuran belum mencakup seluruh penduduk dan belum optimalnya nilai manfaat program bansos yang diberikan.

Meskipun Covid-19 diprediksi dapat menyebabkan krisis ekonomi, pemerintah saat ini relatif lebih siap karena memiliki program bantuan dan perlindungan sosial yang dapat dijadikan jangkar untuk mengurangi beban masalah sosial-ekonomi. Kebijakan pemerintah untuk memberikan stimulus guna mengantisipasi Pandemi Covid-19 dengan meningkatkan dan memperluas jaring pengaman sosial dinilai tepat. Program bantuan dan perlindungan sosial yang menjadi jangkar dapat menjadi instrumen awal dalam meningkatkan manfaat program, dengan pemerintah secara paralel memperluas cakupan penerima manfaat.

Terbitnya Undang Undang No. 2 Tahun 2020 dan Perpres No. 54/2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi sosial dan ekonomi. Pada Pasal 2 Ayat (1) huruf (i) Undang Undang No. 2 Tahun 2020 memberikan instrumen baru untuk meminimalkan dampak Pandemi Covid-19 terhadap perekonomian desa, disebutkan bahwa perlu dilakukan pengutamaan penggunaan alokasi anggaran untuk kegiatan tertentu (*refocusing*), penyesuaian alokasi, dan/atau pemotongan/ penundaan penyaluran anggaran transfer ke daerah

dan dana desa, dengan kriteria tertentu. Selanjutnya dalam penjelasan Undang-Undang tersebut disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “pengutamakan penggunaan dana desa” adalah dana desa dapat digunakan antara lain untuk bantuan langsung tunai bagi penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan Pandemi Covid-19. Selanjutnya berbagai regulasi dalam penanganan Pandemi Covid-19 juga diterbitkan oleh Pemerintah, diantaranya:

- (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
- (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2017 tentang Penanggulangan Bencana;
- (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan;
- (4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang;
- (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- (6) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional;
- (7) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
- (8) Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocusing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- (9) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19;
- (10) Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19;
- (11) Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional;
- (12) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021;
- (13) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Syarat Pemberian Asimilasi dan Hak Integrasi Bagi Narapidana dan Anak dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19;
- (14) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;

- (15) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 25 Tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi Selama Masa Mudik Idul Fitri 1441H Dalam Rangka Pencegahan Penyebaran Covid-19;
- (16) Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- (17) Keputusan Bersama Mendagri dan Menkeu Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Covid-19, serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional;
- (18) Surat Menteri Keuangan Nomor SE-6/MK.02/2020 tanggal 15 Maret 2020 tentang Refocusing Kegiatan dan Realokasi Anggaran K/L Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- (19) Surat Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020;
- (20) Surat Edaran LKPP Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 23 Maret 2020, tentang Penjelasan Atas Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Penanganan Covid-19;
- (21) Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19;
- (22) Surat Edaran KPK Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 Terkait Dengan Pencegahan Tindak Pidana Korupsi;
- (23) Surat Edaran KPK Nomor 11 Tahun 2020 tanggal 21 April 2020 tentang Penggunaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan Data Non-DTKS Dalam Pemberian Bantuan Sosial ke Masyarakat.

Berdasarkan hasil survei demografi BPS diikuti sebanyak 87.379 responden, adanya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) akibat Pandemi Covid-19 terjadi perubahan perilaku dan aktivitas ekonomi, dan pendapatan dari semua lapisan masyarakat menurun.

(1) Penurunan Pendapatan Masyarakat

Adapun masyarakat dengan penghasilan sampai Rp 1,8 juta per bulan sebanyak 70,53% masyarakat atau responden mengalami penurunan pendapatan, penghasilan Rp 1,8 juta sampai Rp 3 juta 46,77% pendapatannya mengalami penurunan. Adapula masyarakat dengan pendapatan Rp 3 juta sampai Rp 4,8 juta 37,19% pendapatannya mengalami penurunan.

Sementara itu, masyarakat dengan penghasilan Rp 4,8 juta sampai Rp 7,2 juta sebanyak 31,67% mengalami penurunan pendapatan. Dan masyarakat dengan pendapatan yang di atas Rp 7,2 juta, 30,34% mengalami penurunan pendapatan.

Survei demografi yang dipaparkan tersebut diikuti sebanyak 87.379 responden, di mana secara rata-rata 35,78% yang masih bekerja mengalami penurunan pendapatan. Dari sebanyak responden itu pula diketahui sebanyak 56,4% bekerja, 18,34% dirumahkan sementara, 2,52% terkena PHK, dan 22,74% tidak bekerja.

(2) Konsumsi Rumah Tangga Melambat

Hal lain yang membuat angka kemiskinan naik yakni pertumbuhan pengeluaran konsumsi rumah tangga pada PDB (Produk Domestik

Bruto) melambat. Di mana pengeluaran konsumsi rumah tangga pada kuartal I-2020 hanya tumbuh 2,84% dibandingkan periode yang sama tahun 2019 yang sebesar 5,02%.

(3) Pariwisata Terpuruk

Pariwisata yang merupakan salah satu penyumbang devisa Indonesia terbesar terbilang terpuruk. Jumlah kunjungan wisata mancanegara (wisman) ke Indonesia pada Maret 2020 mengalami penurunan sebesar 64,11% dibandingkan Maret 2019.

(4) Harga Bahan Pokok Naik

BPS juga mencatat, faktor lain yang membuat angka kemiskinan meningkat, karena adanya kenaikan harga eceran beberapa komoditas bahan pokok. Pada periode September 2019 - Maret 2020, secara nasional harga eceran beberapa komoditas pokok seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, dan gula pasir mengalami kenaikan. Selama periode September 2019-Maret 2020, beras naik 1,78%, daging ayam ras naik 5,53%, minyak goreng naik 7,06%, telur ayam ras naik 11,1%, dan gula pasir naik 13,35%.

Dampak terbesar dari Pandemi Covid-19 adalah di sektor kesehatan dan perekonomian. Beberapa aspek perekonomian di Jawa Tengah, termasuk kabupaten/kota di wilayahnya, yang terdampak langsung dengan adanya Pandemi Covid-19 antara lain :

a. Dampak ekonomi makro antara lain :

- 1). Penurunan daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan yang kehilangan pekerjaan/PHK;
- 2). Tingkat pengangguran terbuka meningkat;
- 3). Inflasi cenderung meningkat;
- 4). Angka kemiskinan meningkat; dan
- 5). Kontraksi ekonomi (pertumbuhan melambat, bahkan bisa negatif).

b. Dampak ekonomi mikro antara lain :

- 1). Jasa retail kehilangan pasar;
- 2). Industri pariwisata, hotel dan rumah makan mengalami penurunan; dan
- 3). Jasa transportasi mengalami penurunan.

Adanya Eskalasi Covid-19 dan perlambatan ekonomi yang tajam di Jawa Tengah maupun kabupaten/kota di wilayahnya harus dimitigasi dampaknya pada kesehatan dan kesejahteraan masyarakat, kesinambungan dunia usaha serta stabilitas sektor keuangan melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*, diantaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka pendek antara lain :

- a. Pertanian bahan makanan, peternakan dan perikanan serta rangkaian rantai pasoknya meliputi kredit usaha (kemudahan memperoleh kredit usaha, keringanan bunga, kelonggaran cicilan), ketersediaan input dan jaminan harga produk;
- b. Produsen/industri pengolahan bahan makanan dan rantai pasoknya meliputi kredit usaha, ketersediaan dan kemudahan memperoleh bahan baku, jaminan harga produk;
- c. Menjaga daya beli masyarakat berpenghasilan rendah dan atau yang kehilangan pekerjaan/PHK melalui penciptaan kesempatan kerja yang bersifat padat karya dari proyek-proyek pembangunan fisik.

Seiring dengan adanya mitigasi dampak Pandemi Covid-19 di Jawa Tengah, guna memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran merupakan salah satu misi RPJMD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018–2023. Misi itu dimaknai sebagai misi yang diemban untuk menciptakan stabilitas ekonomi daerah yang berkualitas, menyebar, dan inklusif berbasis potensi unggulan. Lebih lanjut, sisi ini juga dimaknai sebagai upaya untuk meningkatnya pertumbuhan sektor unggulan daerah dan peran investasi terhadap ekonomi daerah, yang didukung dengan meningkatnya produksi dan produktivitas serta kualitas produk di semua sektor. Pelaksanaan upaya mencapai misi tersebut perlu adanya arah kebijakan ekonomi daerah yang tepat.

Dukungan partisipasi desa dalam mencegah Covid-19 dengan menggunakan sumber pendanaan yang berasal dari dana desa perlu ditingkatkan. Demikian juga ragam model kegiatannya, baik kegiatan preventif maupun kegiatan kekarya. Beberapa kegiatan yang direkomendasikan dalam upaya pencegahan di antaranya: (1) Mendukung kegiatan sosialisasi/promotif; (2) Membuat data penduduk yang datang/kembali ke desa; (3) Memantau pergerakan masyarakat yang terindikasi sebagai orang dalam pemantauan (ODP) dan pasien dalam pengawasan (PDP) berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan; (4) Mengidentifikasi fasilitas umum yang layak dan dapat dijadikan ruang isolasi (sementara), seperti balai pertemuan, masjid/musala, ruangan kantor desa, dan sekolah; (5) Melakukan pemantauan pergerakan penduduk desa dengan mendata keluar-masuknya warga atau pendatang/tamu; (6) Mendukung peningkatan kapasitas melalui pelatihan bidan desa atau kader kesehatan desa agar mampu melakukan penanganan awal penduduk desa yang terduga terpapar Covid-19.

Prioritas kegiatan setidaknya memenuhi unsur pencegahan dan penanganan Covid-19, yang meliputi: (1) Pemberdayaan masyarakat, seperti pencegahan Covid-19 melalui disinfeksi lingkungan, pengelolaan sampah, pengelolaan limbah, pengelolaan lingkungan permukiman, dan pendistribusian makanan tambahan bagi anak (bayi dan balita); (2) Pembangunan dan/atau rehabilitasi sarana prasarana perdesaan sesuai dengan kewenangan desa, seperti penyediaan fasilitas umum sebagai ruang isolasi dengan mengikuti persyaratan teknis dari dinas kesehatan, penyediaan air bersih, pengolahan sampah, perbaikan aliran sungai dan irigasi, serta pembangunan dan/atau perbaikan jalan dan jembatan skala desa; (3) Pemanfaatan lahan untuk menjaga kebutuhan pangan, termasuk di kawasan hutan, seperti untuk pertanian, perhutanan, perkebunan, peternakan, dan perikanan.

Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi pada tahun 2020, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka arah dan strategi kebijakan fiskal 2021 merupakan bagian yang tidak lepas dari arah dan strategi kebijakan fiskal jangka menengah dan panjang. Hal ini dimaksudkan agar kebijakan jangka pendek tetap dijaga konsistensinya dengan arah kebijakan jangka menengah dan panjang. Selaras dengan hal tersebut maka tahun 2021 merupakan waktu untuk melakukan upaya pemulihan (*recovery*), sekaligus menjadi momentum yang baik untuk melakukan reformasi sektoral maupun fiskal. Oleh karena itu tema

kebijakan fiskal di tahun 2021 diarahkan pada upaya “Percepatan Pemulihan Ekonomi dan Penguatan Reformasi”.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengancam keselamatan jiwa tetapi juga berdampak signifikan bagi kehidupan sosial masyarakat, aktivitas ekonomi dan stabilitas sektor keuangan. Sejalan dengan hal tersebut, saat ini Indonesia sedang berjuang untuk mendorong percepatan penanganan Covid-19 untuk mencegah meluasnya penyebaran dan bertambahnya korban jiwa. Pada saat yang sama, Pemerintah juga melakukan berbagai langkah mitigasi dampak sosial ekonomi secara besar-besaran untuk melindungi kelompok masyarakat miskin dan kelompok rentan agar dapat menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya serta memberikan dukungan terhadap dunia usaha untuk mencegah kebangkrutan dan PHK masal. Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat mendukung proses percepatan pemulihan kinerja ekonomi tahun 2021.

Tahun 2021 merupakan masa transisi dari penanganan Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 yang berdampak pada sosial, ekonomi dan keuangan, menuju periode normal untuk pemulihan. Kebijakan ekonomi makro dan fiskal tahun 2021 diarahkan untuk mempercepat pemulihan pasca Pandemi Covid-19 serta menjadi momentum untuk melakukan reformasi kebijakan dalam rangka mempersiapkan pondasi yang kokoh untuk melaksanakan transformasi ekonomi mencapai Visi Indonesia Maju 2045, dengan arah kebijakan sebagai berikut:

(1) Pemulihan Sosial Ekonomi

Pemulihan sosial ekonomi dilakukan dengan berbagai langkah stimulus ekonomi baik melalui jalur konsumsi untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan maupun stimulus dukungan terhadap dunia usaha. Stimulus dunia usaha diharapkan dapat membantu aktivitas produksi untuk tidak terdampak secara permanen. Ketika Pandemi Covid-19 berakhir, aktivitas produksi diharapkan dapat kembali pulih sesuai dengan kapasitas normalnya dalam waktu yang tidak terlalu lama.

Dalam kerangka Undang-Undang Nomor 2 tahun 2020, untuk merespon Pandemi Covid-19, Pemerintah telah melakukan kebijakan *countercyclical* untuk percepatan penanganan Covid-19 sekaligus akselerasi pemulihan sosial-ekonomi. Secara garis besar respon kebijakan stimulus fiskal tersebut difokuskan untuk pencegahan, pengendalian dan penanganan Covid-19 dengan dukungan tambahan anggaran di Bidang Kesehatan dan perlindungan sosial bagi masyarakat miskin dan rentan melalui program jaring pengaman sosial.

Di samping itu, untuk memitigasi pemburukan di berbagai sektor ekonomi yang terdampak, Pemerintah juga memberikan dukungan stimulus untuk dunia usaha diberikan dalam beberapa menu baik bagi usaha ultra-mikro dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) maupun bagi Industri dan BUMN. Pemulihan ekonomi nasional diterapkan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan keberlangsungan pelaku usaha baik di sektor riil maupun sektor keuangan agar tetap mampu menjalankan usahanya dan terhindar dari pemburukan yang semakin dalam.

(2) Reformasi Kesehatan

Pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi reformasi bidang kesehatan untuk membangun sistem kesehatan nasional yang kuat dan sehingga siap menghadapi kemungkinan keadaan darurat munculnya Pandemi di masa yang akan datang.

Pertama, dalam jangka pendek, Pemerintah akan fokus pada percepatan penanggulangan Pandemi Covid-19. Hal ini dilakukan melalui peningkatan secara signifikan pendanaan pengadaan dan perluasan fasilitas kesehatan (faskes), peralatan kesehatan (alkes), dan tenaga kesehatan (nakes). Selain itu, upaya pemerataan dsitribusi faskes dan nakes khususnya di daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan juga terus dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini hanya dapat terlaksana dengan terbangunnya koordinasi yang kuat antara Pemerintah, Pemda, BUMN/D, dan swasta.

Kedua, komitmen untuk membangun SDM yang unggul akan terus dilanjutkan. Percepatan penurunan stunting melalui melalui konvergensi program antar K/L serta sinergi lintas sektoral terus dilakukan untuk mencapai target prevalensi stunting 19 persen di tahun 2024. Cakupan penurunan stunting diperluas menjadi 360 kabupaten/kota di tahun 2021, dari sebelumnya 260 kabupaten/kota di tahun 2020. Selain itu, upaya promotif dan preventif juga perlu diperkuat untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat antara lain melalui Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS). Melalui program ini diharapkan dapat membentuk budaya dan perilaku sehat di masyarakat sehingga risiko terkena penyakit baik menular dan tidak menular dapat diminimalkan dan kualitas kesehatan masyarakat meningkat.

Ketiga, perlu penguatan sinergi dan koordinasi antara Pemerintah dan Pemda. Pemda memegang peranan yang penting dalam reformasi sistem kesehatan sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Untuk, itu perlu adanya sinergi dan koordinasi yang kuat dalam perencanaan penganggaran antara Pemerintah (Bappenas dan Kemenkeu) serta Pemda untuk memastikan kesesuaian alokasi anggaran program dengan target pembangunan yang telah ditetapkan (*money follow program*). Koordinasi Pemerintah dan Pemda diperlukan untuk percepatan pemenuhan kebutuhan faskes dan nakes yang memadai, serta pembiayaan JKN, serta penguatan program-program yang bersifat preventif.

Keempat, Pemerintah perlu membangun kerangka dasar sistem *health security preparedness* (HSP) untuk menghadapi berbagai kemungkinan kondisi darurat kesehatan di masa depan. Pemerintah menyadari bahwa HSP dapat membantu kecepatan dan ketepatan implementasi langkah-langkah tanggap darurat kesehatan di masa mendatang. Oleh karena itu, penguatan HSP perlu dilakukan melalui peningkatan alokasi anggaran terutama terkait penguatan kesiapan sektor kesehatan dalam pencegahan, deteksi dan respon atas berbagai ancaman terhadap kesehatan publik sesuai dengan standar. Upaya ini juga perlu disertai dengan penguatan Kerangka Kerja Kedaruratan Kesehatan (*health emergency framework*). Selain itu, kerangka dasar sistem HSP juga mencakup sistem informasi kesehatan yang terintegrasi dari pusat hingga unit gugus tugas terkecil di daerah,

untuk menjamin kejelasan dan keakuratan data dan informasi kesehatan dalam rangka memudahkan langkah-langkah penanganan dan pengendalian keadaan darurat kesehatan di masa datang.

Kelima, reformasi program JKN menjadi kunci penting untuk mewujudkan *Universal Health Coverage* (UHC). Konsep UHC tidak sebatas menjadikan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta program JKN tetapi juga mencakup peningkatan kualitas layanan kesehatan dengan biaya yang terjangkau. Reformasi JKN diarahkan untuk membangun JKN yang sehat dan berkesinambungan melalui perbaikan kondisi DJS Kesehatan, yang selama ini mengalami defisit, khususnya melalui upaya penyesuaian iuran JKN yang proporsional dan berkeadilan. Untuk itu penetapan iuran JKN dilakukan sesuai dengan standar praktik aktuarial dengan mempertimbangkan antara lain kemampuan membayar peserta, inflasi, kebutuhan jaminan kesehatan dan kesinambungan pendanaan JKN. Selain itu, penguatan sinergi PBPU kelas III perlu dilakukan, dibarengi dengan sinergi Pemerintah Pusat dan Pemda untuk pembiayaan iuran PBI JKN dan subsidi iuran kelompok meningkatkan kepatuhan pembayaran iuran oleh Peserta. Lebih lanjut, peningkatan ketepatan sasaran PBI JKN juga terus dilakukan melalui perbaikan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

(3) Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi

Program perlindungan sosial memiliki kontribusi penting dalam pembangunan ekonomi nasional. Program perlindungan sosial pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu masyarakat miskin dan rentan agar mampu menjangkau kebutuhan-kebutuhan dasarnya seperti pangan, pendidikan dan kesehatan agar terhindar dari berbagai risiko kemunduran sosial sehingga dalam jangka panjang diharapkan akan mampu memotong rantai kemiskinan.

Program perlindungan sosial juga berkontribusi mendorong pertumbuhan ekonomi, baik secara langsung melalui penguatan konsumsi masyarakat maupun secara tak langsung melalui penguatan SDM yang berdampak pada produktivitas ekonomi. Program perlindungan sosial juga merupakan bentuk kebijakan afirmatif Pemerintah untuk mengatasi ketimpangan sosial.

Konsep dasar perlindungan sosial mencakup tiga hal, yaitu bantuan sosial (Bansos) dan jaminan sosial (Jamsos) serta jaring pengaman sosial (*social safety net*). Perbedaan antara bansos dan jamsos terletak pada sumber dana dan target dari program perlindungan sosial. Bansos berfokus pada masyarakat miskin dan rentan (*Bottom 40*) dengan sumber dana dari Pemerintah (*Non-Contributory System*). Program bansos di Indonesia yang diberikan oleh pemerintah pusat mencakup Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Program Indonesia Pintar, Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah, Bantuan Iuran Program Jaminan Kesehatan Nasional, serta asistensi untuk penduduk usia lanjut dan disabilitas.

Sedangkan program jamsos berfokus pada seluruh penduduk atau pekerja dengan sumber dana dari individu atau pemberi kerja (*Contributory System*). Program Jamsos di Indonesia mencakup program Jaminan Kesehatan Nasional untuk seluruh penduduk yang dikelola

oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan program Jaminan Ketenagakerjaan (Jaminan Kematian, Kecelakaan Kerja, Hari Tua, dan Pensiun) seluruh pekerja yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Saat ini, Jaminan Ketenagakerjaan untuk PNS dan TNI/Polri masih dikelola oleh PT Taspen dan PT Asabri. Sementara program jaring pengaman sosial esensinya program yang disiapkan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan dari kemunduran sosial akibat guncangan perekonomian atau bencana.

Reformasi kebijakan perlindungan sosial dengan mengintegrasikan dan mensinergikan program. Hal ini dibutuhkan untuk menjamin ketepatan sasaran dan efektif yang dilakukan secara bertahap.

Pertama, integrasi program perlindungan sosial dilakukan pada program PKH dan PIP karena keduanya memiliki sasaran yang sama, namun dalam pelaksanaannya masih terjadi masalah komplementaritas. Untuk itu, akan lebih efisien dengan integrasi kedua program ini.

Kedua, integrasi secara bertahap Bansos Kartu Sembako yang lebih berbasis pada target penerima (*beneficiaries*) dengan program subsidi energi (listrik dan LPG) yang berbasis komoditas untuk meningkatkan efektivitasnya baik dalam meminimalisir inclusion error maupun dalam pencapaian sasaran penurunan angka kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. Untuk itu, proses integrasi dapat dilakukan dengan menambah cakupan jenis barang yang dapat dibeli dari kartu sembako.

Ketiga, meningkatkan efektivitas penurunan tingkat kemiskinan kiranya perlu mereview target dan atau besaran bantuan secara berkala pada PKH, Kartu Sembako, serta PIP.

Keempat, sinergi program perlindungan sosial dengan program pemberdayaan seperti Kelompok Usaha Bersama (KUBE), Usaha Mikro, Kredit Usaha Rakyat (KUR) serta program ketenagakerjaan juga perlu dilakukan untuk menjamin kesinambungan pendapatan ketika penerima bansos sudah dapat naik kelas pendapatan. Termasuk program Kartu Pra-Kerja yang merupakan program *reskilling* dan *upskilling* yang dibarengi dengan pemberian insentif kas. Saat ini, program tersebut tidak masuk dalam skema perlindungan sosial, namun kedepannya program ini perlu diintegrasikan dengan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan mulai diprioritas pada pekerja formal atau informal dari lapisan penduduk yang termiskin. Program ini juga dapat menjadi bantalan ketika ada resesi ekonomi yang mengakibatkan banyaknya PHK.

Kelima, Penyempurnaan program perlindungan sosial juga dapat dilakukan dengan memisahkan program bantuan untuk lansia dan penyandang disabilitas dari PKH. Berdasarkan tujuan program, PKH diarahkan untuk memutus rantai kemiskinan dengan meningkatkan kualitas modal manusia pada anak dalam keluarga. Selain itu, adanya kesulitan penduduk lansia dan penyandang disabilitas dalam mengakses layanan keuangan ketika ingin mengambil bantuan juga membuat program bantuan akan lebih baik dibuat terpisah dengan PKH. Ke depannya, program Asistensi Sosial Lanjut Usia Terlantar (ASLUT) dan Asistensi Sosial Penyandang Disabilitas Berat (ASPDB)

dapat diperkuat sebagai dampak dari kondisionalitas penduduk lansia dan penyandang disabilitas yang dikeluarkan dari PKH.

Keenam, di sisi jaminan sosial kesehatan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendorong efektivitas program JKN antara lain melalui penyesuaian iuran JKN termasuk iuran PBI, pemberian bantuan iuran bagi peserta PBPU dan BP oleh Pemerintah dan Pemda. Perbaikan data kepesertaan dilakukan dengan pemutakhiran DTKS untuk penetapan PBI yang tepat saran dan pertukaran data kepesertaan antara penyelenggara/pengelola program jaminan sosial. Selain itu, perlu mendorong efisiensi biaya penyelenggaraan JKN antara lain melalui kebijakan manfaat layanan kesehatan sesuai kebutuhan dasar kesehatan dan kelas rawat inap standar yang diterapkan secara bertahap serta mendorong pencegahan/pengendalian *fraud*. Sedangkan pada jaminan ketenagakerjaan, untuk memberikan perlindungan bagi pekerja miskin dan rentan, dapat diberikan bantuan iuran bagi pekerja miskin dan rentan untuk program Jaminan Kematian (JKm) dan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Selain itu, untukantisipasi penuaan populasi, dapat diberikan tambahan kontribusi Jaminan Hari Tua (JHT) atau *Matching-Defined Contribution (MDC)*. Skema ini memungkinkan pemerintah menambahkan kontribusi yang nilainya sama dengan nilai kontribusi peserta ke dalam akun peserta sebagai insentif bagi peserta.

Ketujuh, mendorong program Jaring Pengaman Sosial (*Social Safety Net*) yang dapat berfungsi sebagai komponen *automatic stabilizer* kebijakan stimulus dimana akan secara otomatis berlaku jika terjadi gejala ekonomi yang cukup signifikan sebagai pemicunya (*trigger*). Jaring pengaman sosial yang didesain bekerja secara otomatis memenuhi tiga kriteria efektivitas stimulus fiskal, yakni *timely* (tepat waktu karena dapat implementasinya segera, tanpa ada time lag); *targeted* (menyasar pada targetnya, kelompok miskin dan rentan, sehingga berdampak langsung pada konsumsi, *hand to mouth*); dan *temporary* (berlaku temporer karena akan selesai seiring dengan pulihnya ekonomi).

(4) Reformasi Pendidikan

Dalam menjalankan pembelajaran holistik dalam mengembangkan SDM Indonesia yang unggul, Pemerintah menempuh lima strategi yang terintegrasi dalam platform teknologi yang holistik. Diharapkan kedepannya pelajar Indonesia menjadi pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila yaitu berakhlak mulia, mandiri, kebinekaan global, gotong-royong, kreatif, dan bernalar kritis. Secara garis besarnya, kelima strategi yang ditempuh, yaitu:

Pertama, transformasi kepemimpinan sekolah yang dilakukan melalui pemilihan generasi baru kepala sekolah dari guru-guru terbaik. Selain itu, Pemerintah akan mengembangkan *marketplace* Bantuan Operasional Sekolah (BOS) online. Marketplace BOS online tersebut bertujuan untuk memberikan kepala sekolah fleksibilitas, transparansi, dan waktu meningkatkan kualitas pembelajaran.

Kedua, transformasi pendidikan dan pelatihan guru yang akan dilaksanakan melalui transformasi Pendidikan Profesi Guru (PPG)

untuk menghasilkan generasi guru baru. Pemerintah juga akan mendorong munculnya kurang lebih 10.000 sekolah penggerak yang akan menjadi pusat pelatihan guru dan katalis bagi transformasi sekolah-sekolah lain.

Ketiga, mengajar sesuai tingkat kemampuan siswa. Strategi ini akan dilakukan dengan cara menyederhanakan kurikulum sehingga lebih fleksibel dan berorientasi pada kompetensi. Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan personalisasi dan segmentasi pembelajaran berdasarkan asesmen berkala.

Keempat, standar penilaian global. Asesmen Kompetensi Minimum (AKM) akan digunakan untuk mengukur kinerja sekolah berdasarkan literasi dan numerasi siswa, dua kompetensi inti yang menjadi fokus tes internasional seperti PISA, *Trends in International Mathematics and Science Study (TIMSS)*, dan *Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS)*. Pemerintah juga akan menggunakan Survei Karakter dan Survei Lingkungan Belajar dalam mengukur aspek-aspek non-kognitif untuk mendapatkan gambaran mutu pendidikan secara holistik.

Kelima, kemitraan daerah dan masyarakat sipil. Kemitraan dengan Pemerintah Daerah dilakukan melalui indikator kinerja untuk urusan pendidikan di daerah. Pemerintah juga akan mendorong ratusan Organisasi Penggerak untuk mendampingi guru-guru di Sekolah Penggerak, penggunaan platform teknologi pendidikan berbasis mobile dan bermitra dengan perusahaan teknologi pendidikan (*education technology*) kelas dunia, serta menggerakkan puluhan ribu mahasiswa dari kampus-kampus terbaik untuk mengajar anak-anak di seluruh Indonesia sebagai bagian dari kebijakan Kampus Merdeka.

(5) Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) merupakan instrumen utama dalam implementasi desentralisasi fiskal, terutama untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, serta untuk mendukung capaian prioritas nasional.

Dalam rangka memperkuat *quality control* atas pelaksanaan TKDD pada masa mendatang, maka perlu dilakukan reformasi TKDD yang secara konsisten juga diikuti dengan reformasi APBD. Secara umum, reformasi TKDD akan diarahkan untuk:

- (i) Mendorong upaya peningkatan *quality control* atas pelaksanaan kegiatan yang didanai dari TKDD;
- (ii) Mendorong Pemda dalam pelaksanaan pemulihan ekonomi, antara lain melalui pembangunan dan perbaikan fasilitas layanan sektor dengan karakteristik penciptaan lapangan kerja, dan pemberian dukungan insentif kepada daerah untuk menarik investasi;
- (iii) Sinergi pendanaan TKDD dengan pendanaan yang bersumber dari K/L dalam mendukung pembangunan *human capital* (Pendidikan dan Kesehatan), antara lain melalui penguatan mandatory spending DTU untuk Pendidikan dan Kesehatan, dukungan untuk program merdeka belajar, peningkatan kemampuan pelayanan RS dan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP), dan penanganan *stunting*;

- (iv) Percepatan penyediaan infrastuktur di daerah, antara lain melalui pembiayaan kreatif dan *integrated funding* dari berbagai sumber pendanaan dan pembiayaan; serta
- (v) Mendorong *redesain* pengelolaan Dana Otonomi Khusus dengan memperhatikan perbaikan di sisi perencanaan dan penganggaran yang berbasis kinerja, penguatan monitoring dan evaluasi, peningkatan akuntabilitas, serta dengan tetap memperhatikan aspirasi masyarakat.

Sementara itu, reformasi pengelolaan APBD dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi tata kelola pengelolaan keuangan daerah, akan dilakukan dengan:

- (i) Mengimplementasikan secara konsisten Perpres No 33 tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional. Terdapat 5 (lima) komponen yang diatur yaitu pengaturan mengenai honorarium, perjalanan dinas dalam negeri, rapat/pertemuan di dalam dan di luar kantor, pengadaan kendaraan dinas dan pemeliharaan sarana dan prasarana. Dengan pengaturan ini diharapkan akan menghasilkan efisiensi sekitar 20-30 persen;
 - (ii) Perbaikan dalam pengaturan Tambahan Penghasilan Pegawai di Daerah atau tunjangan kinerja daerah. Hal ini selain guna meningkatkan efisiensi belanja juga bertujuan untuk meminimalkan ketimpangan pendapatan PNSD antardaerah yang dapat berpotensi menimbulkan demotivasi bagi PNS antardaerah;
 - (iii) Perbaikan dalam penyusunan program dan kegiatan pada Organisasi Perangkat Daerah melalui penyusunan Bagan Akun Standar. Hal ini selain dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran APBD, juga untuk memudahkan sinergi perencanaan antara belanja pusat dan daerah karena akan menggunakan nomenklatur yang relatif sama, termasuk mempermudah penyusunan laporan keuangan antara Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dengan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- (6) Reformasi Penganggaran (*Zero Based Budgeting*)

Secara nominal, belanja negara terus mengalami peningkatan, baik komponen belanja operasional maupun komponen belanja terkait program-program pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, pengentasan kemiskinan serta pembangunan infrastruktur. Meningkatnya frekuensi gejolak dan ketidakpastian ekonomi serta risiko terkait bencana alam juga meningkatkan kebutuhan *fiscal buffer* untuk upaya antisipasi dan mitigasi dampak yang ditimbulkan. Menurunnya kinerja penerimaan pasca berakhirnya era *commodity boom*, di sisi lain juga menjadi tantangan tersendiri bagi pendanaan program-program prioritas yang terus meningkat. Oleh karena itu, upaya penguatan efisiensi dan efektivitas belanja negara mutlak perlu dilakukan melalui reformasi penganggaran (*budgeting*).

Tren menurunnya kinerja penerimaan negara yang dibarengi dengan meningkatnya kebutuhan pendanaan program-program pemulihan ekonomi pasca Pandemi Covid-19 serta program prioritas pembangunan lainnya menjadi momentum bagi Pemerintah untuk

melakukan reformasi belanja negara dalam rangka penguatan efisiensi untuk belanja kebutuhan dasar, efektivitas belanja prioritas dengan penekanan pada pelaksanaan anggaran berbasis pada hasil (*result based*) serta penguatan kapasitas kebijakan *countercyclical* baik melalui penguatan *automatic stabilizer* maupun pencadangan belanja *anticipatory*.

Reformasi pengelolaan belanja negara perlu dilakukan secara komprehensif dari hulu sampai hilir. Pada sisi hulu, pemerintah harus melakukan efisiensi pada belanja kebutuhan dasar, memfokuskan belanja prioritas, serta memperkuat sinkronisasi belanja pemerintah pusat dan belanja pemerintah daerah. Pada sisi hilir, pemantauan dan evaluasi harus diperkuat agar pelaksanaan anggaran berbasis hasil (*result based execution*). Ke depannya, belanja *anticipatory* juga perlu diperkuat sebagai untuk mengantisipasi dan mitigasi dampak yang timbul apabila terjadi gejolak yang tidak diperkirakan sebelumnya. Hal ini diperlukan agar ketika adanya risiko perekonomian (krisis global, bencana alam atau wabah penyakit) dapat lebih cepat ditangani.

Reformasi pengelolaan belanja negara dapat dilakukan melalui kerangka *zero-based budgeting*, yaitu perencanaan anggaran tiap tahunnya harus dimulai dari awal (*zero basis*) tanpa mengacu pada rencana kegiatan atau hasil kegiatan di periode sebelumnya (*incremental basis*).

Pengalokasian anggaran melalui konsep *zero-based budgeting* dapat diusulkan menjadi tiga kelompok jenis belanja, yaitu *basic spending*, *intervention (priority) spending* dan *anticipatory spending*.

- (i) *Basic spending* pada dasarnya adalah jenis belanja yang harus tersedia pada setiap K/L dalam mendukung operasional dan pemberian layanan kepada masyarakat, antara lain mencakup anggaran-anggaran operasional atau anggaran birokrasi. Pada *basic spending*, anggaran harus distandarisasi berdasarkan kegiatan, harga, serta wilayahnya. Bagi K/L yang tidak memiliki fungsi intervensi, maka hanya akan dialokasikan anggaran *basic spending*.
- (ii) *Intervention spending* merupakan belanja-belanja yang bersifat intervensi yang akan difokuskan untuk mendukung program prioritas dalam rangka pencapaian sasaran-sasaran pembangunan nasional. Jenis belanja ini akan dialokasikan pada BA BUN dan pengalokasikan ke masing-masing K/L serta evaluasinya akan dilakukan oleh Komite Penilai (*reviewer committee*) yang beranggotakan Kementerian Koordinator, Kemenkeu, serta Bappenas. Alokasi belanja intervensi berdasarkan proposal dari K/L yang berisikan rincian anggaran, target output dan outcome, rencana aksi, indikator baku, serta manajemen risiko. Proses penganggaran menggunakan *Performance Based Budgeting*, yaitu Komite Penilai membuat indikator baku untuk penilaian agar alokasi sesuai kebutuhan, sesuai prioritas dan sinkron antara K/L dan sinkron pula antara pusat dan daerah. Sedangkan proses pelaksanaan anggarannya menggunakan *Result Based Execution*, yaitu pelaksanaan anggaran berbasis hasil yang dicapai.
- (iii) *Anticipatory Spending*, yakni belanja yang disiapkan sebagai buffer untuk menghadapi berbagai risiko gejolak seperti resesi ekonomi,

bencana alam, serta penyebaran wabah penyakit. Mekanisme pelaksanaan *Anticipatory Spending* harus dibuat dengan menyesuaikan berbagai risiko tersebut. Sebagai contoh, Ketika menghadapi resesi ekonomi yang menyebabkan banyak PHK atau adanya bencana alam/sosial, alokasi *Anticipatory Spending* dapat berfungsi sebagai social safety net untuk menjaga daya beli masyarakat.

7. Isu Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Klaten Tahun 2005-2025

Banyak kemajuan yang telah dicapai oleh pemerintah Kabupaten Klaten, tetapi banyak pula tantangan atau masalah ke depan yang belum sepenuhnya terselesaikan. Perlu upaya-upaya penanganan dalam pembangunan daerah hingga akhir tahun perencanaan (tahun 2025) di berbagai bidang/aspek/sektor pembangunan.

a. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama

Pembangunan kependudukan dan sumber daya manusia dalam kurun waktu 20 tahun yang akan datang masih dihadapkan pada tingkat pertumbuhan, kualitas dan mobilitas penduduk. Paradigma pembangunan yang bertumpu pembangunan manusia difokuskan pada upaya pemberdayaan penduduk guna peningkatan, kemajuan, kebebasan dan kapabilitas, pemberdayaan masyarakat melalui investasi di bidang pendidikan.

Di bidang ketenagakerjaan tantangan yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara pertumbuhan jumlah angkatan kerja dan ketersediaan kesempatan kerja dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran. Bahwa sumber daya manusia merupakan salah satu penentu keberhasilan pembangunan di Kabupaten Klaten. Salah satu tantangan yang dihadapi yaitu masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, sehingga belum mampu mendukung pelaksanaan pembangunan secara maksimal.

Pembangunan di bidang kebudayaan tantangan yang dihadapi antara lain menipisnya nilai moral, budaya dan agama, sebagai dampak negatif perkembangan Ilmu Pengetahuan, teknologi informasi serta eksese dari ketimpangan kondisi sosial ekonomi serta pengaruh globalisasi. Mengenai jumlah penduduk miskin yang masih relatif banyak, tantangannya adalah bagaimana mewujudkan pemenuhan hak-hak dasarnya dan jiwa kewirausahaan yang masih perlu ditingkatkan terus.

b. Ekonomi

Sumber daya alam daerah yang potensial untuk dikembangkan sesuai *core competence* daerah Kabupaten Klaten adalah kegiatan pertanian dalam arti luas yang meliputi pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan. Untuk itu pemerintah Kabupaten perlu menjalin kerjasama kemitraan dengan dunia usaha swasta dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pengolahan sumber daya alam. Selain itu pemerintah Kabupaten perlu menyusun strategi pengembangan investasi daerah dengan menyiapkan sarana promosi, penyiapan gelar potensi sumber daya alam unggulan dalam rangka meningkatkan daya tarik daerah bagi investor. Perlu juga

dilakukan perencanaan yang berkesinambungan tentang reklamasi lahan galian tambang golongan C.

Secara geografis, Kabupaten Klaten terletak diantara dua kota besar, yaitu Yogyakarta dan Surakarta yang menjadikan wilayah ini sebagai jalur utama Surakarta-Yogyakarta. Selain itu batas-batas wilayah Kabupaten ini, seperti Kabupaten Gunung Kidul dan Sleman merupakan wilayah-wilayah yang memiliki obyek wisata andalan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini tentu sangat berpengaruh pada minat wisatawan untuk berkunjung ke wilayah Kabupaten Klaten, yang didukung oleh kemudahan sarana transportasi yang cukup memadai. Bahkan untuk sampai ke wilayah obyek wisata pun saat ini sangat mudah pencapaiannya karena sudah ditunjang dengan keberadaan sarana transportasi umum hingga ke lokasi yang dikehendaki.

Pembangunan ekonomi di Klaten sampai saat ini telah menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan, namun masih belum dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja secara memadai. Oleh karena itu tantangan kedepan (20 tahun kedepan) adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas yang mampu meningkatkan pendapatan perkapita serta pemerataan sehingga secara bertahap dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pada sisi lain, makin intensifnya pasar bebas/globalisasi menuntut peningkatan kualitas produk barang dan jasa secara lebih kompetitif. Untuk itu, dalam rangka mendorong kemandirian ekonomi dan daya saing produk-produk lokal di pasar regional atau internasional. Tantangan ke depan adalah meningkatkan kualitas dan produktivitas barang dan jasa secara bertahap dengan tetap mengacu pada standar mutu nasional maupun standar mutu internasional.

c. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Tantangan yang dihadapi dalam bidang IPTEK adalah rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang mampu bersaing dalam penerapan dan pengembangan teknologi, informasi dan komunikasi serta ketersediaan perangkat teknologi dalam menghadapi perkembangan global menuju ekonomi dan masyarakat yang berbasis pengetahuan serta tuntutan penyediaan pemerintahan yang baik.

Untuk itu tantangan kedepan diperlukan aparatur pemerintah daerah yang maju, mandiri, cerdas, sejahtera dan lestari perlu melibatkan secara intensif para pelaku penelitian baik dari perguruan tinggi dan organisasi profesi lainnya.

d. Sarana dan Prasarana

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan aktivitasnya di bidang sosial budaya dan perekonomian pada kurun waktu dua puluh tahun kedepan akan membawa konsekuensi terhadap ketersediaan sarana dan prasarana wilayah yang memadai. Apabila dilihat kondisi sarana dan prasarana saat ini untuk dapat memenuhi cakupan layanan dan kenyamanan bagi masyarakat yang berkualitas, maka hal tersebut merupakan tantangan yang cukup berat pada masa mendatang.

Perkembangan daerah Klaten ditunjang ketersediaan infrastruktur, yaitu jalan dan jembatan, tersedianya jenis transportasi yang menghubungkan antar kota Kecamatan, tempat wisata dan tempat-tempat yang strategis. Disamping itu dengan ditunjang angkutan antar Kota Kecamatan dan antar kota yang lain serta angkutan pedesaan yang cukup banyak, maka tantangan ke depan yaitu bagaimana memberdayakan ekonomi daerah ke depan yang lebih dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat, sehingga kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan.

Tantangan dalam bidang perumahan dan permukiman yaitu ketersediaannya harus mampu memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat baik di kawasan perkotaan maupun di daerah pedesaan, yang bersih dan nyaman sebagai tempat tinggal.

Tantangan pembangunan sarana dan prasarana sumber daya air dalam rangka menunjang ketahanan pangan dan memenuhi pasokan air baku yang semakin meningkat. Untuk itu 20 tahun kedepan perlu dibangun sistem irigasi yang baik untuk mendukung struktur pertanian menuju kemandirian pangan di Kabupaten Klaten.

e. Politik dan Tata Pemerintahan

Perkembangan dalam bidang politik dan tata Pemerintahan seiring dengan makin meningkatnya kesadaran politik dan implementasi kebijakan desentralisasi menjadi fokus perhatian bagi pemerintah maupun masyarakat. Oleh karena itu, tantangan ke depan bidang politik dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai bidang adalah meningkatkan kedewasaan politik bagi masyarakat dan pengembangan budaya politik, sehingga mampu mendorong demokratisasi yang lebih transparan dan lebih bertanggung jawab, non diskriminatif serta mampu menciptakan iklim kondusif yang didukung oleh tata pemerintahan yang baik.

Tantangan dalam pembangunan perdesaaan dihadapkan pada tata pengelolaan pemerintahan desa yang partisipatif, sehingga memberikan akses dan saran-usul bagi masyarakat pedesaan dalam proses Musrenbangda dalam rangka penyusunan berbagai program pembangunan daerah.

f. Keamanan dan Ketertiban

Dengan adanya Globalisasi dan kemajuan Teknologi Informasi yang semakin canggih akan sangat mempengaruhi kondisi keamanan dan ketertiban di daerah. Tantangan ke depan adalah mewujudkan komitmen bersama dalam meningkatkan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan daya saing perekonomian daerah dan kehidupan berbagai potensi ancaman dan gangguan kamtibmas perlu ditingkatkan bersama dengan peningkatan sistem pengelolaan keamanan dan ketertiban yang komprehensif dan partisipatif dalam rangka mewujudkan kemandirian di bidang keamanan dan SISKAMLING bersama.

g. Hukum dan Aparatur

Tantangan yang dihadapi dalam bidang hukum adalah penegakan hukum secara adil dan tidak diskriminatif. Di samping itu,

peningkatan jaminan akan kepastian, rasa keadilan dan perlindungan hukum, serta harmonisasi produk hukum daerah. Hal ini sejalan dengan semakin besarnya tuntutan untuk membentuk tata peraturan daerah yang baik disertai dengan peningkatan kinerja lembaga dan aparatur hukum serta peningkatan kesadaran hukum masyarakat dan HAM.

Tantangan di bidang aparatur adalah bagaimana menciptakan aparatur Pemerintah Daerah yang mampu bekerja secara transparan, akuntabel dan profesional untuk memenuhi kinerja pelayanan publik yang prima.

h. Wilayah dan Tata ruang

Meningkatnya dinamika dan aktivitas penduduk sejalan dengan semakin mantapnya pelaksanaan otonomi daerah, pengaruh arus perdagangan bebas dan penurunan kualitas sumber daya air. Dalam kondisi seperti ini ruang akan menjadi komoditi yang sangat strategis. Untuk itu, pelaksanaan penataan ruang yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan merupakan tantangan ke depan yang harus dihadapi dan dipersiapkan bersama dengan seluruh stakeholder. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan ruang, maka kebutuhan akan lahan juga meningkat pula, sehingga tantangan di bidang pertanahan bagaimana meningkatkan pelayanan administrasi pertanahan yang berpihak kepada kepentingan masyarakat.

i. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Lingkungan hidup yang menunjang kehidupan manusia adalah lingkungan yang terbebas dari pencemaran, baik air, udara maupun zat padat. Pencemaran-pencemaran tersebut telah melebihi ambang batas, terutama yang sudah tidak diperbolehkan akan membahayakan bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Pada tahun 2004 dan 2005 kasus pencemaran air masing hanya berlangsung sekali (1), dan tahun 2004 ada 3 kasus pencemaran dan pada tahun 2005 turun menjadi 2 kasus saja. Untuk tahun 2005 ada 1 kasus Pencemaran air dan tahun 2006 meningkat menjadi 2 kasus dan tahun 2007 terjadi 3 kasus. Untuk kasus pencemaran zat padat selama tiga tahun tidak pernah ditemukan.

Untuk mengendalikan pencemaran harus terjalin kerja sama yang sinergis antara pemerintah dan masyarakat. pertama, kesadaran masyarakat dalam menjaga kondisi kebersihan dan kerapian lingkungan. Kedua, masyarakat harus lebih waspada terhadap gejala potensi pencemaran di lingkungannya. Ketiga, pemerintah harus pro aktif memberikan penyuluhan tentang bahaya pencemaran dan cara-cara mengendalikannya, disamping perlu memberikan sanksi bagi perorangan yang membuat sumber pencemaran.

8. Isu Strategis Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten

Sistem perkotaan wilayah merupakan sistem yang menggambarkan sebaran kota, fungsi kota-kota dan hierarki fungsional kota-kota yang terkait dengan pola transportasi dan prasarana wilayah lainnya dalam ruang wilayah daerah. Penetapan rencana pusat-pusat pelayanan di Kabupaten Klaten harus mengacu pada produk tata ruang di atasnya, dalam hal ini

RTRWN dan RTRW Provinsi Jawa Tengah. Dalam Lampiran II (Sistem Perkotaan Nasional) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Klaten ditetapkan sebagai PKW (II/C/1). Artinya bahwa wilayah Klaten berada dalam tahapan pengembangan dengan revitalisasi dan percepatan pengembangan kota-kota pusat pertumbuhan nasional melalui pengembangan atau peningkatan fungsi.

Dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah, perkotaan Klaten termasuk dalam RTRW Kawasan Strategis Subosukowonostraten sebagai PKW (Pusat Kegiatan Wilayah). Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala regional atau provinsi. Suatu PKW harus mempunyai fasilitas-fasilitas yang jangkauan pelayanannya minimal meliputi lebih dari satu kabupaten, seperti misalnya pusat pendidikan berskala provinsi atau nasional, baik negeri ataupun swasta, atau juga, atau juga kegiatan industri manufaktur dan perdagangan yang aktivitasnya mencakup skala Provinsi Jawa Tengah.

Berdasarkan arahan RTRW Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029, Kabupaten Klaten termasuk ke dalam pengembangan kerjasama strategis daerah kabupaten yang tergabung dalam regional Subosukawonosraten (Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten) dengan fungsi pengembangan sebagai Pusat Pelayanan Lokal, Provinsi, Nasional, dan Internasional. Secara geografis, ketujuh wilayah kabupaten tersebut memiliki keterkaitan erat dalam hal jenis kondisi dan struktur geologis.

Kabupaten Klaten merupakan lumbung padi Jawa Tengah serta termasuk dalam penyokong ketahanan pangan nasional. Berdasar keterkaitan antar ruang, Kawasan Andalan Subosuka – Wonosraten dengan PKN Surakarta, PKW Boyolali, dan PKW Klaten yang terhubung dengan akses ke dan dari Pelabuhan Tanjung Emas Semarang dan Bandar Udara Adi Sumarmo di Surakarta. Keberadaan Kabupaten Klaten sebagai hinterland dari Kota Surakarta serta Yogyakarta memberikan pengaruh dalam penyediaan pangan termasuk pendistribusian hasil pertanian, perdagangan dan jasa sepanjang koridor DI Yogyakarta – Surakarta serta pariwisata Kawasan Strategis Nasional (KSN) Candi Prambanan.

Dari segi posisi dalam sistem pergerakan provinsi maupun nasional, Kabupaten Klaten dilewati jalur strategis penghubung Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta-Surakarta, namun Kabupaten Klaten saat ini bukan sebagai simpul (hanya dilewati saja oleh jalur antar provinsi) serta hirarki pelayanan Kabupaten Klaten yang lebih rendah jika dibandingkan Kota Surakarta dan Daerah Istimewa Yogyakarta menyebabkan pengembangan potensi kawasan kurang optimal. Sebagai kabupaten yang dalam tahap berkembang serta masih memiliki potensi lahan yang cukup luas, Kabupaten Klaten menjadi tujuan baru untuk pengembangan permukiman, industri pengolahan dan pariwisata yang sekaligus menangkap peluang demand dari kabupaten sekitar. Dampak dari pengembangan ini adalah munculnya simpul-simpul aktivitas baru yang mendorong perkembangan pemanfaatan ruang ke depannya.

Wilayah Pertumbuhan Strategis (WPS) 10 berada di DI Yogyakarta dan Jawa Tengah yang di dalamnya mencakup Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga, Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Kota Magelang,

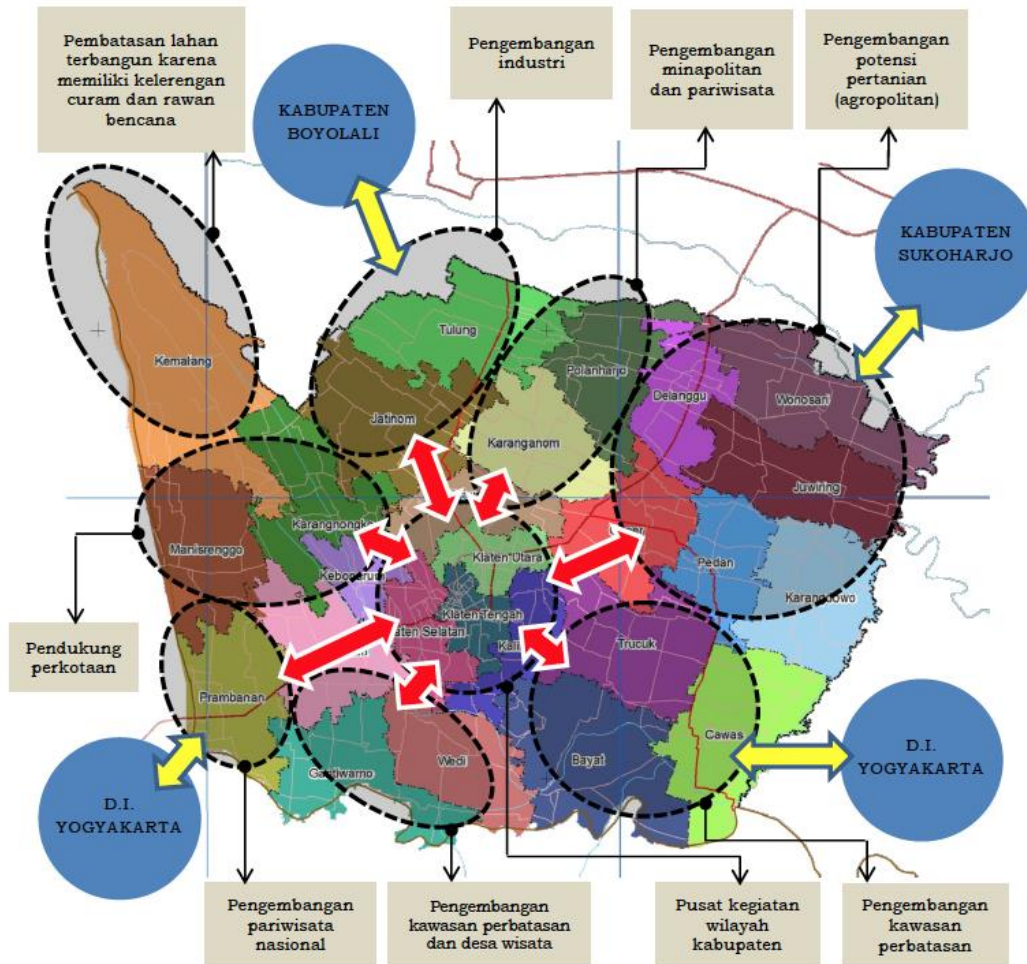
Kabupaten Magelang, Kota Surakarta, Kabupaten Boyolali, dan Kabupaten Klaten. Kabupaten Klaten berperan sebagai simpul pertanian dengan konsep mewujudkan Wilayah Pengembangan Strategis Yogyakarta - Solo - Semarang (WPS 10) sebagai pusat industri dan pariwisata, serta kawasan pertanian yang unggul, berkarakter, dan resilient. Berdasar konsep Kawasan Pertumbuhan Strategis, Kabupaten Klaten termasuk dalam KPS 3 (Surakarta - Klaten - Boyolali) dengan pengembangan kegiatan pertanian, pariwisata, industri pengolahan, dan perkotaan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten berdasarkan RTRW Kabupaten Klaten Tahun 2011-2031 adalah “Mewujudkan Ruang Wilayah Kabupaten yang Aman, Nyaman, Produktif, dan Berkelanjutan dengan Pelaksanaan Pembangunan yang Berbasis Pertanian, Industri, dan Pariwisata”

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten, maka ditetapkan kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten, serta penjabaran kebijakan penataan ruang wilayah kabupaten ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui strategi penataan ruang wilayah Kabupaten Klaten.

Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten disusun dengan memadukan: (1) Konsep pertumbuhan ekonomi wilayah; (2) Konsep pengembangan wilayah terpadu; (3) Konsep pengembangan ekonomi lokal; (4) Konsep pengembangan wilayah berbasis karakteristik sumber daya; dan (5) Konsep pengembangan wilayah berbasis klaster.

Pengembangan wilayah diarahkan pada pengembangan wilayah berbasis potensi sumber daya lokal yang teraglomerasi dengan wilayah sekitarnya, sehingga antara satu kecamatan dengan kecamatan lain saling mendorong pertumbuhan wilayah, dan mengurangi ketimpangan antar wilayah. Konsep pengembangan wilayah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 4.6
Konsep Pengembangan Wilayah Kabupaten Klaten

9. Isu Strategis RPJM Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.



Gambar 4.7
Penentuan Isu Strategis Kabupaten Klaten

Isu strategis pembangunan dapat dipengaruhi oleh isu strategis di tingkat internasional, nasional dan daerah. Beberapa isu strategis di tingkat internasional dan nasional adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5
Isu Strategis Pembangunan di Tingkat Internasional dan Nasional

No	Tingkat Isu	Isu Strategis Pembangunan	Faktor Penentu Keberhasilan
1	Internasional	<ul style="list-style-type: none"> a. Pemulihan perekonomian global b. Krisis kesehatan c. Stabilitas politik global yang dinamis d. Perkembangan teknologi informasi yang sangat cepat dengan menembus batas-batas negara (globalisasi) e. Pencapaian SDGs di tahun 2030 f. Industri 4.0 g. Perubahan iklim 	<ul style="list-style-type: none"> • Potensi ekonomi • Kemajuan teknologi • SDM
2	Nasional	<ul style="list-style-type: none"> a. kebhinekaan bangsa Indonesia dari segi geografis, etnis, ras, budaya, dan agama. b. kebijakan pembangunan nasional di Jawa Tengah (proyek strategis nasional) antara lain Jalan tol Solo-Yogyakarta, KSN Prambanan, KSN Taman Nasional Gunung Merapi, Rawa Jombor c. Pemulihan ekonomi, sosial dan kesehatan akibat Pandemi Covid-19 d. Ketahanan pangan e. Perubahan iklim dan mitigasi bencana 	<ul style="list-style-type: none"> • skenario penanganan Pandemi Covid-19, • produktivitas daya saing dan iklim investasi. • SDM • SDA dan LH

Sumber : Penyusun, 2021

Isu strategis pembangunan di tingkat daerah yang teridentifikasi dari berbagai dokumen kajian di Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 4.6
Perumusan Isu Strategis Pembangunan di Kabupaten Klaten

RPJMN 2020-2024	RPJM Prov Jateng 2018-2023	Pandemi Covid-19 2020	RPJPD Kab. Klaten Tahun 2005-2025	Revisi RTRW Kab. Klaten Tahun 2010-2030	SDGs (KLHS RPJMD Tahun 2021-2026)	RPJMD Kab. Klaten Tahun 2021-2026
<ol style="list-style-type: none"> 1. SDM Berkualitas dan Berdaya Saing. 2. Membangun Kebudayaan dan Karakter Bangsa 3. Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas 4. Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan Dasar 5. Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan 6. Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana dan Perubahan Iklim 7. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas dan daya saing SDM 2. Penanggulangan Kemiskinan 3. Daya saing ekonomi dan peningkatan kesempatan berusaha 4. Kedaulatan pangan dan energi 5. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA 6. Kesenjangan wilayah 7. Keberlanjutan Pembangunan Dengan Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan dan Kelestarian SDA 8. Tata kelola pemerintahan dan kondusivitas wilayah. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemulihan Sosial Ekonomi 2. Reformasi Kesehatan 3. Reformasi Perlindungan Sosial dan Subsidi 4. Reformasi Pendidikan 5. Reformasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) 6. Reformasi Penganggaran (Zero Based Budgeting) 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosial Budaya dan Kehidupan Beragama 2. Ekonomi 3. Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 4. Sarana dan Prasarana 5. Politik dan Tata Pemerintahan 6. Keamanan dan Ketertiban 7. Hukum dan Aparatur 8. Wilayah dan Tata ruang 9. Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perkembangan Koridor Jalan Surakarta-Yogyakarta 2. Perkembangan Kawasan Prambanan 3. Perkembangan Kawasan Pedan 4. Perkembangan Kawasan Industri 5. Pengembangan Kawasan Permukiman 6. Konversi Lahan Produktif Dan Urban Sprawl 7. Pembangunan jalan tol Solo-Jogja 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prevalensi penduduk dengan kerawanan pangan sedang atau berat. 2. Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana 3. Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI). 4. Persentase sampah perkotaan yang tertangani 5. Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kesejahteraan dan kualitas hidup 2. Infrastruktur Pengembangan wilayah, dan Antisipasi Dampak Pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta 3. Kondusivitas wilayah 4. Tata kelola pemerintahan, Klaten Smart City, dan Inovasi Daerah 5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan 6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Isu-isu strategis yang menjadi prioritas pembangunan dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

1. Kesejahteraan dan Kualitas Hidup

Kesejahteraan dan kualitas hidup berkaitan erat dengan masalah sosial, pendidikan, kesehatan, keluarga berencana, pengangguran, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, akses disabilitas, pemberdayaan pemuda. Tujuan yang diharapkan dari peningkatan kesejahteraan dan kualitas hidup adalah pengurangan kemiskinan.

Masalah kemiskinan menjadi isu strategis paling utama, karena kondisi ekonomi akan berpengaruh terhadap kualitas sosial budaya dan ekologi. Terlebih lagi dengan adanya Pandemi Covid-19 yang semakin menambah jumlah penduduk miskin dan pengangguran. Oleh sebab itu pada tahun awal RPJMD akan difokuskan pada pemulihan ekonomi dan kesehatan masyarakat.

Peningkatan pelayanan kesehatan terutama untuk pemulihan kasus penyakit menular maupun tidak menular akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan pelayanan kesehatan dalam bentuk peningkatan sarana/fasilitas kesehatan, penyediaan obat dan sarana pendukung medis, ketersediaan tenaga medis, jaminan kesehatan untuk masyarakat miskin, hingga pengelolaan terhadap limbah medis yang semakin meningkat akibat Pandemi Covid-19.

Pemerataan kualitas pendidikan dalam hal ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas, tenaga pendidik yang memiliki kompetensi, kurikulum yang inovatif untuk membentuk jiwa kreatif dan inovatis siswa, termasuk penggunaan teknologi informasi dalam pembelajaran serta ketersediaan jaringan infrastruktur pendukungnya. Dengan pemerataan kualitas pendidikan ke semua wilayah maka akan mendorong keberhasilan peningkatan pendidikan. Harapannya akan muncul sumber daya manusia yang berkualitas, kreatif dan inovatif, sehingga memiliki jiwa kemandirian yang tinggi.

Kesetaraan gender merupakan bagian penting dalam upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkualitas. Dalam kaitan itu, pembangunan daerah harus memenuhi prinsip pemenuhan hak asasi manusia dan selayaknya memberikan akses dan manfaat yang memadai bagi orang dewasa, pemuda dan anak-anak, baik perempuan maupun laki-laki, kelompok rentan seperti kaum disabilitas, untuk berpartisipasi dalam pembangunan, untuk mendapatkan akses dan memanfaatkan hasil-hasil pembangunan secara adil.

2. Infrastruktur Pengembangan Wilayah, Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP), dan Antisipasi Dampak Pembangunan Jalan Tol Solo-Yogyakarta dan

Infrastruktur dan konektivitas wilayah adalah pengelompokan isu permasalahan yang berasal dari permasalahan terkait pekerjaan umum, penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman.

Infrastruktur antara lain meliputi jaringan jalan, jaringan pelayanan air minum aman dan berkelanjutan, sanitasi sehat, pengurangan sampah dari sumbernya, pengolahan limbah industri dan limbah B3. Peningkatan ketersediaan dan kualitas jaringan jalan akan mendukung pertumbuhan ekonomi, konektivitas antar wilayah, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah. Sedangkan peningkatan ketersediaan dan kualitas air minum,

sanitasi, sampah dan limbah akan meningkatkan kualitas kesehatan manusia dan kualitas lingkungan hidup. Pemanfaatan energi baru terbarukan juga menjadi tujuan penyediaan jaringan energi.

Permasalahan infrastruktur dan konektivitas juga terkait dengan penyediaan sarana hunian dan pendukungnya, bagaimana menyediakan rumah layak huni dan peningkatan kualitas permukiman. Ketaatan terhadap rencana tata ruang wilayah yang sudah disusun juga menjadi salah satu permasalahan terkait dengan perwujudan infrastruktur dan rencana pola ruang yang sesuai dengan dokumen perencanaan.

Isu tata ruang di Kabupaten Klaten lebih mengutamakan konsep tata ruang untuk mengurangi kesenjangan antara wilayah utara, tengah dan selatan. Diharapkan dengan adanya rencana struktur ruang kabupaten dapat menumbuhkan pusat-pusat kegiatan di wilayah utara dan selatan akan pemeratakan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten baik dari segi fisik, ekonomi, maupun sosial. Sedangkan dengan adanya rencana pola ruang akan dapat mengarahkan lokasi pembangunan sesuai dengan daya dukung lingkungan.

Dengan ditetapkannya Kawasan Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) merupakan program super prioritas nasional yang tertuang dalam Rencana Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 pada nomor urut ke 2 (dua), yakni Danau Toba (Sumatera Utara), Bromo-Tengger-Semeru (Jawa Timur), Borobudur dan sekitarnya (Jawa Tengah), Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Lombok (Nusa Tenggara Barat), Tanjung Kelayang (Bangka-Belitung), Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur), Morotai (Maluku Utara), Manado-Likupang-Bitung (Sulawesi Utara), dan Raja Ampat (Papua Barat), dan telah disusun perencanaan secara terpadu berupa Rencana Induk Pariwisata Terpadu (RIPT) atau Integrated Tourism Master Plan (ITMP) dan telah dibuatnya rencana Integrated Tourism Masterplan (ITMP) atau Program Pembangunan Pengembangan Pariwisata yang Berintegrasi dan Berkelanjutan (BP3B) dalam rangka untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Dengan adanya rencana pengembangan program tersebut perlu adanya kerjasama yang terpadu dari berbagai sektor baik infrastruktur, pariwisata, pertanian, perindustrian, perdagangan, sosial, budaya, jasa, Bumdes dan lain-lain, dengan memperhatikan potensi lokal yang dimiliki dan melibatkan masyarakat. Dengan adanya program tersebut diharapkan dapat meningkatkan jumlah pengunjung wisata baik domestik maupun mancanegara dan menjadi daerah tujuan wisata yang bukan hanya sebagai daerah ampiran, menciptakan lapangan kerja, meningkatkan perekonomian lokal serta dapat menarik investor untuk menanamkan sahamnya sehingga investasi dapat meningkat dengan harapan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang akan berdampak pada pengurangan angka pengangguran dan pengentasan kemiskinan serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi.

Sebagai daerah penyangga Kawasan Strategi Pariwisata Nasional Borobudur-Yogyakarta-Prambanan (KSPN-BYP) yaitu wilayah kecamatan Prambanan meliputi Desa Bugisan, Kebondalem Kidul, Kebondalem Lor, Pereng, Kokosan, Sengon, Taji, Kemudo dan Desa Tlogo dengan potensi utama obyek wisata Candi Prambanan, Candi Plaosan dan Candi Sojiwan.

Sebagai tarikan atau kawasan strategi pendukung untuk menghidupkan kawasan strategi Solo-Sangiran, untuk Wilayah Tengah yaitu Jogonalan dan Kebonarum dan Ngawen dengan potensi wisata Heritage PG. Gondang Baru dan Agrowisata. Untuk Wilayah Timur yaitu Kecamatan Wedi, Gantiwarno, Bayat, Cawas dan Juwiring dengan potensi wisata Wisata Kerajinan (Keramik), Wisata Budaya (Lurik dan Batik) dan Wisata Agro (Tembakau). Wilayah Utara meliputi Kecamatan Karanganyam, Jatinom, Polanharjo, Tulung, Manisrenggo dan Kemalang, sebagai tarikan/kawasan pendukung untuk menghidupkan kawasan strategis Merapi - Merbabu dengan potensi wisata Wisata Air dan Agrowisata (Agropolitan dan Minapolitan).

Posisi KSPN Prambanan dan sekitarnya yang terletak dalam kawasan Joglosemarkerto sehingga diperlukan adanya aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenities yang mampu mendukung pengembangan kawasan wisata Joglosemarkerto. Aksesibilitas konektivitas, akomodasi dan amenities menjadi kunci di dalam pengembangan KSPN di Jawa Tengah.

Pembangunan kawasan strategis di Kabupaten Klaten selain pembangunan KSPN Prambanan dan sekitarnya, antara lain KSN Merapi dan sekitarnya, *Geo Heritage* Bayat dan Rawa Jombor, agropolitan dan minapolitan. Kawasan Candi Prambanan telah ditetapkan sebagai kawasan cagar budaya dunia oleh UNESCO yang termuat dalam dokumen *Nomination File World Heritage List* No.C-642 tahun 1991. Melihat urgensi kawasan tersebut, PP No. 26/2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) juga telah menetapkan Kawasan Candi Prambanan sebagai Kawasan Strategis Nasional (KSN) dari sudut kepentingan sosial budaya.

Dalam rencana struktur ruang RTRW Kabupaten Klaten menetapkan Kecamatan Prambanan sebagai Pusat Kegiatan Lokal (PKL) dengan fungsi pengembangan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, permukiman perkotaan, pariwisata, pertanian, industri, pelayanan perekonomian dan sosial untuk skala regional. Dengan penetapan Kecamatan Prambanan menjadi PKL tentunya dimaksudkan agar Kecamatan Prambanan berkembang menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten yang melayani aktivitas skala regional terutama wilayah kecamatan yang ada di sekitarnya. Perkembangan yang terjadi di Kecamatan Prambanan sebenarnya sudah sesuai dengan rumusan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW. Saat ini Kecamatan Prambanan terus tumbuh menjadi pusat pertumbuhan baru di Kabupaten Klaten. Berbagai fasilitas dengan skala pelayanan regional juga telah berkembang. Selain itu, banyaknya investasi yang akan masuk di Kecamatan Prambanan juga akan dapat memicu pertumbuhan kawasan sesuai dengan yang telah direncanakan dalam RTRW.

Sesuai arahan dalam Lampiran III Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang RTRWN, wilayah Kabupaten Klaten termasuk dalam pengembangan jalan bebas hambatan Yogyakarta-Solo (II/6) yang melalui wilayah Kecamatan Polanharjo, Karanganyam, Ngawen, Kebonarum, dan Prambanan.

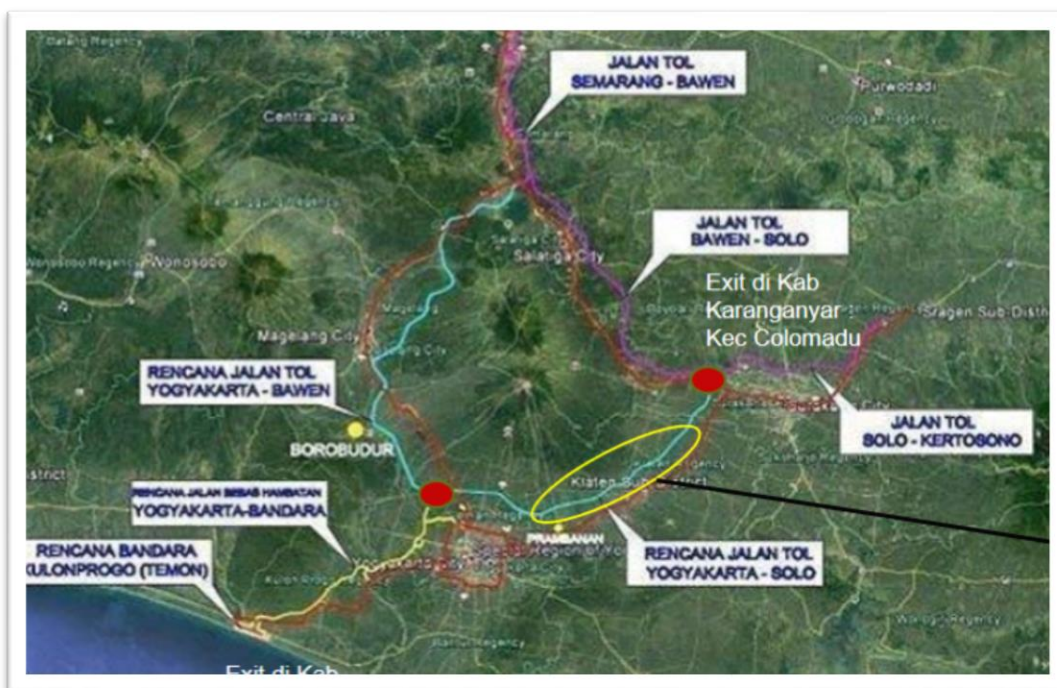
Jalan tol Solo-Yogyakarta membentang dari wilayah Kecamatan Gamping di Kabupaten Sleman, DIY di sebelah barat hingga ke Kecamatan Banyudono Boyolali di sebelah timur. Di bagian timur, jalan tol akan tersambung di Simpang Susun Colomadu dan akan tersambung ke Jalan Tol

Semarang–Solo dan Jalan Tol Solo-Ngawi. Sedangkan di barat, jalan tol akan terhubung ke Bandara Internasional Yogyakarta yang menjadi bagian Jalan Tol Yogyakarta-Cilacap. Tol ini dibangun melayang (*elevated*) di sepanjang Ring Road Utara Yogyakarta, kemudian berlanjut sepanjang Selokan Mataram hingga sampai ke simpang susun di daerah Maguwoharjo.

Dari simpang susun Purwomartani, jalan ini berbelok ke utara lalu timur laut menuju wilayah Kabupaten Klaten di sekitar perbatasan Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Manisrenggo. Dari sana jalan tol melewati beberapa kecamatan di Kabupaten Klaten yaitu Kecamatan Jogonalan, Karangnongko, Kebonarum, Ngawen, Karangnom, Klaten Utara, Ceper, Polanharjo dan Delanggu. Kemudian jalan tol melewati wilayah Kabupaten Boyolali di Kecamatan Banyudono dan Kecamatan Sawit. *Exit tol* yang melalui Kabupaten Klaten berada di Desa Kuncen Kecamatan Ceper; Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen; Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.

Dengan adanya pembangunan jalan tol Solo-Yogyakarta akan berdampak pada perubahan pola ruang pada lokasi yang akan dijadikan jalur jalan tol dan disekitar exit tol. Dimana sebagian besar lahan yang digunakan sebagai jalur jalan tol berupa lahan pertanian. Total lahan terdampak jalan tol di wilayah Kabupaten Klaten sebanyak 4.071 bidang dengan luasan 377,5 hektare. Inlet outlet jalan tol di Kabupaten Klaten melalui:

- Desa Kuncen, Kecamatan Ceper;
- Desa Ngawen, Kecamatan Ngawen;
- Desa Borangan, Kecamatan Manisrenggo; dan
- Desa Somopuro, Kecamatan Jogonalan.



Sumber: Revisi RTRW Kab Klaten, 2020

Gambar 4.8
Rencana Jalan Tol Solo-Yogya

3. Kondusivitas Wilayah

Permasalahan terkait ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah masih tingginya tingkat pelanggaran K3 maupun pelanggaran perda. Oleh sebab itu perlu kesadaran masyarakat dalam menjaga ketertiban dan menaati peraturan, disamping perlu adanya personil untuk pelaksanaan penertiban, pengawasan dan penegakan perda.

Kondusivitas wilayah juga terkait dengan permasalahan nasionalisme kebangsaan, toleransi beragama yang juga mempengaruhi kondisi sosial budaya dan kehidupan beragama. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya dan kehidupan beragama menjadi bagian penting dalam pembangunan kondusivitas wilayah dalam rangka meningkatkan kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten dengan meningkatkan komunikasi antar masyarakat. Partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor perwujudan kondusivitas wilayah, sebagai bentuk keterlibatan aktif masyarakat dalam pembangunan.

4. Tata Kelola Pemerintahan, Klaten *Smart City*, dan Inovasi Daerah

Isu strategis yang berkaitan dengan tata kelola pemerintahan adalah pelayanan publik belum seluruhnya terakses dengan mudah, peningkatan akuntabilitas kinerja, penggunaan sistem data dan informasi belum terintegrasi. Klaten *Smart City* berkaitan dengan permasalahan pemanfaatan teknologi informasi, komunikasi dan informatika, persandian, kearsipan dan pelayanan umum. Perwujudan Klaten *Smart City* bertujuan untuk membangun keterbukaan data dan informasi yang mudah diakses bagi masyarakat yang membutuhkan, serta membangun masyarakat yang cerdas dan tanggap terhadap globalisasi.

Kelitbangan dan inovasi adalah pengelompokan permasalahan terkait dengan pelaksanaan riset, penelitian, inovasi dan kreativitas masyarakat. Pada saat ini inovasi dan kreativitas menjadi hal penting untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan untuk meningkatkan daya saing daerah. Pemerintah Kabupaten Klaten dalam mewujudkan Klaten *Smart City* dan Inovasi Daerah perlu adanya dukungan dan komitmen, serta kemitraan dengan lembaga kelitbangan, lembaga penunjang inovasi, lembaga pendidikan, dunia usaha dan masyarakat.

5. Daya Saing Ekonomi dan Ketahanan Pangan

Kontribusi sektor perdagangan, pariwisata, industri dan UMKM saat ini cenderung mengalami penurunan, terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19. Penurunan sektor ekonomi berdampak pada pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. Oleh sebab itu perlu upaya-upaya inovatif dalam membangkitkan kembali sektor perekonomian supaya tidak mengalami penurunan.

Investasi dan penanaman modal merupakan salah satu penggerak pertumbuhan pembangunan (*engine of growth of development*). Terlebih dengan adanya Pandemi Covid-19 yang menyebabkan sebagian kegiatan industri tidak dapat beroperasi, dan semakin berkurangnya investasi. Oleh sebab itu perlu menjaga eksistensi kegiatan industri yang sudah ada, kemudian meningkatkan iklim yang kondusif supaya investor tertarik untuk berinvestasi ke Kabupaten Klaten.

Disamping itu potensi lokal lain yang juga perlu dikembangkan di Kabupaten Klaten adalah produk unggulan daerah yang mana produk

unggulan ini telah dilaksanakan pengembangannya melalui sistem atau pola klaster UMKM. Klaster UMKM yang ada di Kabupaten Klaten ada 11 (sebelas) klaster dan yang termasuk dalam produk unggulan ada 7 (tujuh) klaster yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati Klaten Nomor 050/84 Tahun 2016 sebanyak 7 Produk Unggulan Daerah antara lain Batik, Lurik, Konveksi, Keramik, Logam, Tembakau (Asepan dan Rajangan), dan mebel.

Dalam masa Pandemi Covid-19 ini sebagian besar klaster unggulan dimaksud mengalami kesulitan dalam hal pemasaran, permodalan, produksi serta penyediaan bahan baku. Untuk itu guna meningkatkan kontinuitas produksi produk unggulan daerah di Kabupaten Klaten yang akan mendukung daya saing daerah diperlukan upaya strategis pengembangan produk-produk unggulan dimaksud, disamping itu dalam peningkatan daya saing UMKM juga diperlukan adanya fasilitasi untuk Hak Paten dan Merk Dagang, sehingga harapannya produk tersebut dapat bersaing dengan produk luar negeri, sehingga dapat meningkatkan produk eksport.

Selanjutnya untuk kondisi pangan di Kabupaten Klaten saat ini berada pada kondisi surplus khususnya untuk komoditas beras, namun indikasinya ketersediaan pangan semakin menurun akibat berkembangnya aktivitas masyarakat yang membutuhkan alih fungsi lahan dari lahan pertanian menjadi lahan budidaya. Oleh sebab itu perlu menjaga ketahanan pangan masyarakat melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (yang melarang alih fungsi LP2B), pemberian insentif dan disinsentif untuk LP2B misal dengan keringanan pajak, bantuan pupuk, obat tanaman, sarana pertanian, penyediaan jaringan irigasi dan jalan usaha tani, penerapan sistem agribisnis. Walaupun dari sisi konsumsi pangan penduduk sudah baik, akan tetapi untuk tahun 2020 mengalami penurunan, sehingga masih perlu adanya peningkatan diversifikasi pangan agar masyarakat tidak hanya tergantung pada satu jenis bahan pokok saja guna mengantisipasi terjadinya krisis pangan dan untuk mempertahankan ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan.

Guna mendukung ketahanan pangan masyarakat yang berkelanjutan perlu dikembangkan potensi sumber daya alam yang ada di Kabupaten Klaten adalah pertanian baik pertanian tanaman pangan, hortikultura, buah-buahan maupun tanaman perkebunan. Padi merupakan salah satu produk unggulan bidang pertanian di Kabupaten Klaten, varietas padi unggulan lokal yang saat ini sedang dikembangkan yaitu varietas jenis padi Rajalele Srinuk dan Srinar. Selain itu terdapat potensi lain yang bisa dikembangkan varietas unggulan lokal seperti jagung, kedelai. Dan bibit unggul durian sebagai durian khas Klaten, dll.

Pembangunan pertanian mempunyai peran yang sangat penting dan strategis serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pembangunan ekonomi daerah baik untuk sektor pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan. Kabupaten Klaten sangat kaya akan potensi hasil produksi pertanian, dan potensi terbesar adalah bidang tanaman pangan dengan komoditas padi dan jagung yang sampai saat ini Kabupaten Klaten masih menjadi salah satu daerah penyangga pangan di Jawa Tengah.

Dulu Kabupaten Klaten memiliki komoditas unggulan yang menjadi kebanggaan Kabupaten Klaten yaitu berupa varietas padi Rojolele. Namun seiring perjalanan waktu, padi Rojolele mulai menghilang dan hanya sedikit sekali petani yang mau menanam, dikarenakan membutuhkan waktu tanam

yang lebih lama yaitu sekitar 4-5 bulan. Oleh karena itu diperlukan sentuhan teknologi yang dapat memperbaiki lama waktu tanam dan tinggi tanaman dapat diperpendek. Untuk itu guna membangkitkan kembali masa kejayaan tersebut telah dilakukan pemurnian varietas padi Rojolele bekerjasama dengan Badan tenaga Nuklir Republik Indonesia (Batan RI) sejak tahun 2012.

Uji multi lokasi dilakukan melalui pengembangan demplot di desa Gempol Kecamatan Karanganyam, Desa Sekaran Kecamatan Wonosari, Desa Glagah Wangi Kecamatan Polanharjo dan Desa Tlobong Kecamatan Delanggu, serta saat ini telah dilaksanakan berbagai uji lainnya, seperti uji hama penyakit, uji kualitas hasil, uji aroma dan uji rasa sehingga memunculkan varietas baru yang diberi nama Srinar dan Srinuk, dan saat ini masih dalam proses pengurusan Hak Patent sedang dalam tahap uji substansi serta proses pengembangan dan budidaya oleh masyarakat. Untuk menjaga kemurnian kualitas benih, produksi benih Rojolele saat ini hanya dilaksanakan oleh UPT ATP Klaten, Dinas Pertanian, Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Klaten. Sedangkan untuk proses penanaman dan menjamin ketersediaan stok produksi beras di laksanakan oleh kelompok-kelompok tani tertentu yang ditunjuk dan dalam pengawasan langsung Dinas Pertanian.

Selanjutnya untuk pemasaran, untuk menjamin pemasaran hasil produksi padi Rojolele ini, pemerintah Kabupaten Klaten membantu penyalurannya melalui Surat Edaran Bupati Klaten Nomor 1 Tahun 2021 tanggal 16 Juni 2021, agar para ASN dan pegawai BUMD Kabupaten Klaten diminta untuk memasyarakatkan beras rojolele Srinar dan Srinuk milik petani, dimana mekanisme pembelina melalui Perusda Aneka Usaha Klaten.

Sejalan dengan hal tersebut, maka untuk dapat mempercepat pengembangan komoditas padi Rojolele menjadi produk unggulan daerah, selain diperlukan komitmen dan membangun kesadaran para petani agar mau menanam dan mengembangkan varietas tersebut, juga diperlukan pola pendampingan, pembinaan dan penyuluhan secara lebih intensif.

Sedangkan untuk sektor perikanan, di Kabupaten Klaten telah dibentuk Klaster Minapolitan Jilid I yang terkenal dengan sebutan Kalungharjo, yang meliputi Kecamatan Karanganyam, Tulung dan Polanharjo dengan komoditas unggulan ikan Nila Merah. Kawasan Minapolitan tersebut bisa dikembangkan menjadi Kota Wisata karena telah didukung dengan adanya wisata kuliner, wisata edukasi, pancingan dan souvenir. Untuk itu perlu strategi untuk peningkatan daya tarik wisata, penguatan kelembagaan dan peningkatan kapasitas SDM, pengembangan kawasan wisata, penyiapan moda transportasi serta promosi dan pemasaran. Sedangkan untuk Minapolitan Jilid II meliputi kecamatan Klaten Selatan, Ngawen dan Kebonharum.

Untuk komoditas perkebunan, Kabupaten Klaten mempunyai produk unggulan berupa Tembakau Rajangan dan Tembakau Asepan. Produksi tanaman untuk tembakau tersebut di wilayah Klaten banyak dibudidayakan di Kecamatan Prambanan, Gantiwarno, Trucuk, Manisrenggo dan sebagian wilayah Jogonalan.

Namun demikian di dalam pelaksanaan pembangunan pertanian yang berkelanjutan di Kabupaten Klaten sampai saat ini masih ditemui berbagai permasalahan utama, antara lain; rendahnya kualitas dan kuantitas produksi pertanian, belum optimalnya pemanfaatan sumber daya alam,

terbatasnya terhadap akses sumber daya produktif, belum berkembangnya sentra agribisnis, rendahnya produktivitas, nilai tambah ekonomi dan daya saing, terbatasnya sumber daya manusia, dan sumberdaya lainnya dalam memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat.

6. Kelestarian Lingkungan Hidup dan Mitigasi Bencana

Pembangunan yang dilakukan dengan memanfaatkan lingkungan sesuai dengan potensi dan sumber dayanya, secara tidak langsung akan mengakibatkan menurunnya kualitas lingkungan dan keanekaragaman hayati. Dalam melestarikan kualitas lingkungan, berbagai upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup perlu dilakukan dimulai dari tahapan perencanaan sampai dengan pelaksanaan pembangunan. Dengan adanya perencanaan, kemungkinan dampak buruk di lingkungan sekitar bisa diantisipasi terlebih dahulu, sehingga kerusakan lingkungan dapat dikurangi atau bahkan dicegah sama sekali.

Kawasan rawan bencana di Kabupaten Klaten ditetapkan untuk kawasan rawan bencana gerakan tanah termasuk tanah longsor, dan kawasan rawan bencana letusan gunung berapi. Kawasan rawan bencana gerakan tanah merupakan wilayah dengan kondisi permukaan tanah mudah longsor/bergerak, karena pada daerah tersebut terdapat zona tanah bergerak atau wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah.

Berdasarkan kriterianya, kawasan rawan tanah longsor di Kabupaten Klaten merupakan daerah yang rentan terhadap gerakan tanah dan termasuk kawasan gerakan tanah dengan tingkat menengah dan tinggi. Kejadian bencana tanah longsor diakibatkan karena kondisi geomorfologi terutama faktor kemiringan lereng, kondisi batuan maupun tanah penyusun lereng dan kondisi hidrologi atau tata air pada lereng. Selain itu, adanya aktivitas yang tidak terkendali seperti eksploitasi alam. Sedangkan menurut Permen ESDM No 11 Tahun 2016, Kawasan rawan bencana gunungapi adalah kawasan yang pernah terlanda atau diidentifikasi berpotensi terancam bahaya erupsi gunungapi baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan adanya rawan bencana tersebut perlu upaya mitigasi bencana yang efektif untuk dapat mengurangi resiko dampaknya.

Upaya mitigasi bencana dalam rangka penanganan banjir, perlu upaya pembangunan dan pemeliharaan prasarana sumber daya air pada daerah rawan banjir di Kabupaten Klaten yang meliputi Kecamatan Bayat, Cawas, Ceper, Gantiwarno, Juwiring, Karangdowo, Pedan, Prambanan, Trucuk, Wedi, dan Wonosari. Penanganan banjir dilakukan dengan kegiatan rehabilitasi/ pemeliharaan jaringan irigasi, operasi irigasi, pengadaan sarana prasarana pengelolaan irigasi, pembangunan embung, pemeliharaan dan rehabilitasi embung, pemeliharaan dan penataan kawasan waduk, serta rehabilitasi kawasan sumber air. Penguatan talud/tebing sungai, juga dilakukan sesuai dengan kewenangan kabupaten.

BAB V

VISI MISI TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan gambaran penjabaran visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten selama lima tahun kedepan. Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2021-2026 kemudian dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah untuk dapat diimplementasikan dalam program/ kegiatan prioritas pembangunan daerah, dengan tetap memperhatikan isu strategis dan lingkungan strategis global serta nasional, dan pencapaian tujuan pembangunan jangka panjang daerah.

5.1. Visi

Visi pembangunan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 merupakan implementasi dari visi Bupati dan Wakil Bupati periode tahun 2021-2026 yaitu:

“Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”

Visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan keberlanjutan dari cita-cita pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2016-2021. Makna yang terkandung dalam visi sebagai berikut:

Kabupaten Klaten, suatu nama daerah otonom, yang mempunyai batas-batas wilayah yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus pemerintahan dan kepentingan masyarakat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maju, merupakan perwujudan kondisi masyarakat yang tumbuh dan berkembang baik secara ekonomi, sosial, kependudukan, dan politik.

- Ditinjau dari aspek ekonomi masyarakat maju, yang diukur dari tingkat kemakmuran yang tercermin dari tingkat pendapatan yang lebih tinggi dari pendapatan rata-rata dan pembagian yang lebih merata.
- Ditinjau dari aspek sosial, masyarakat yang maju berkaitan dengan kualitas sumberdaya manusianya, yang dicerminkan terpenuhinya kebutuhan dasar dan kualitas hidupnya.
- Ditinjau dari aspek kependudukan, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang sehat, usia harapan hidup yang tinggi, kualitas sosial yang baik, dan tingkat pertumbuhan penduduk yang lebih kecil.
- Ditinjau dari aspek politik, masyarakat yang maju adalah masyarakat yang telah mampu mengembangkan sistem dan kelembagaan politik yang demokratis dan mantap, warganya terjamin hak-haknya, dan adanya peran serta masyarakat secara nyata dan efektif dalam segala aspek kehidupan.

Mandiri, perwujudan kondisi masyarakat Kabupaten Klaten yang mampu bertemu pada kondisi, potensi, dan kemampuan sendiri, tanpa harus meninggalkan kerja sama dengan para pihak untuk melaksanakan pembangunan serta memiliki semangat kuat dalam menghadapi tantangan-tantangan serta menjaga kelangsungan proses dan hasil-hasil pembangunan daerah.

Sejahtera, perwujudan kondisi masyarakat yang tercukupi dan terpenuhi kebutuhan dasarnya serta meningkatkan taraf hidup dan kualitas hidupnya yang meliputi: sandang, pangan, papan dan kesehatan maupun kebutuhan batiniah yang meliputi rasa aman, tentram, dan damai, selain itu setiap pelaksanaan pembangunan harus memiliki tujuan akhir bagi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Klaten, artinya bahwa setiap aktifitas kegiatan pembangunan yang dihasilkan diharapkan dapat dirasakan oleh masyarakat secara fisik maupu non fisik, yaitu meliputi terbentuknya lapangan kerja, berkurangnya pengangguran, peningkatan kualitas pelayanan sosial, pendidikan, kesehatan, dan lain sebagainya sehingga masyarakat merasa terpenuhi kebutuhan hidupnya.

5.2. Misi

Dalam rangka upaya menuju pencapaian visi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah yaitu:

1. Mewujudkan Tatanan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian;
2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab, dan anti korupsi;
3. Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
4. Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah;
5. Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
6. Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

5.3. Program Unggulan

Visi dan Misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 didukung dengan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati Klaten tahun 2021-2026, yaitu:

1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi

Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan investasi daerah. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditetapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas, dan

meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya diprioritaskan pada peningkatan kerukunan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan.

4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan dalam rangka peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada *clean and good governance*.

6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur

Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman.

5.4. Tujuan dan Sasaran

Agar visi dan misi pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 lebih terarah dalam implementasinya ke depan, maka visi dan misi tersebut dijabarkan secara operasional dalam tujuan dan sasaran, disertai dengan indikator kinerjanya. Penjabaran tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi 6 tujuan dan 14 sasaran, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Misi 1: Mewujudkan Tatahan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, yang didukung dengan sasaran yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas), dengan indikator sasarannya: 1) Persentase Potensi Konflik Ideologi, Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan; dan 2) Persentase Perda Dan Perkada Yang Ditegakkan.

2. Misi 2: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi, dengan indikator sasarannya: 1) Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI); 2) peringkat/ nilai SAKIP; 3) Opini laporan keuangan; 4) Indeks SPBE; 5) indeks penerapan sistem merit ASN; dan 6) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

3. Misi 3: Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, yang didukung dengan 2 sasaran yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator pertumbuhan ekonomi, dengan 6 indikator sasarannya: 1) Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan; 2) Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan; 3) Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan; 4) Pertumbuhan PAD sektor pariwisata; dan 5) Persentase peningkatan investasi PMDN; dan 6) Persentase peningkatan investasi PMA.

4. Misi 4: Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah Yang Berkualitas Sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, yang didukung 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian *universal access* (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas, dengan indikator sasarannya: 1) Persentase jalan dalam kondisi mantap; 2) Persentase drainase dalam kondisi baik; 3) Persentase saluran irigasi dalam kondisi baik; 4) Persentase capaian *universal access* (kumuh, air minum dan

sanitasi); 5) Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; dan 6) Kinerja lalu lintas (*Level Of Service*).

5. Misi 5: Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi ini memiliki tujuan meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, yang didukung dengan 4 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Tujuan misi ini diukur dengan menggunakan indikator: 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender, dengan indikator sasarannya: 1) Harapan Lama Sekolah (HLS); 2) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS); 3) Persentase pemajuan kebudayaan; 4) Usia Harapan Hidup (UHH); 5) Persentase PMKS yang tertangani; 6) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT); 7) Indeks Desa Membangun; 8) Indeks Pemberdayaan Gender (IDG); dan 9) Skor Kabupaten Layak Anak.

6. Misi 6: Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan

Misi ini memiliki tujuan mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, yang didukung dengan 3 sasaran yaitu: 1) Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan; 2) Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3) dan 3) Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Tujuan pada misi ini diukur dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan indikator sasarannya: 1) Indeks kualitas air; 2) Indeks kualitas udara; 3) Indeks kualitas tutupan lahan; 4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS); dan 5) Indeks Ketahanan Daerah (IKD).

Tabel 5.1
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait	
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026			
Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian	Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkepribadian berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.		Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	NA	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,75	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik	
		Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik
			Persentase perda dan perkara yang ditegakkan	%	91,60	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	94,00	94,00	94,00	1.05. Ketentraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.	Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)		Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,55	57,55*	60,01	60,62	64	66	70	70	Seluruh Urusan	
		Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	NA	NA	81	81	82	83	83	83	83	6.01. Pengawasan
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	NA	NA	62	62,5	63	64	65	65	65	4.01 Sekretariat Daerah 5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian dan Pengembangan
			Opini Laporan Keuangan	Opin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	5.02. Keuangan Daerah

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	2.16. Komunikasi dan Informatika
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	NA	NA	180	200	225	250	260	260	2.21 Persandian 2.20 Statistik
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84	5.03 Kepegawaian 5.04 Pendidikan dan Pelatihan
													2.12. Kependudukan dan Pencatatan Sipil 2.23 Perpustakaan 2.24. Kearsipan 7.01 Kecamatan 4.02 Sekretariat DPRD
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan	Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan		Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,18	1,03	2,52	3,51	4,45	5,13	5,47	5,47	Seluruh Urusan
		Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	(1,21)	0,05	1,47	2,24	3,38	3,84	4,09	4,09	3.31. Perindustrian
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	(4,79)	(0,85)	1,24	1,79	2,29	3,43	3,96	3,96	2.17. Koperasi dan UMKM
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14	3.30 Perdagangan
			Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	-64	NA	10	10	10	10	10	50	3.26 Pariwisata
			Persentase peningkatan investasi PMA	%	-59	NA	1	1	1	1	1	5	2.18 Penanaman Modal

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah		Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	74,58	75,45	76,11	76,72	77,18	77,51	77,72	77,72	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
			Rasio konektivitas	Rasio	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	2.15. Perhubungan
		Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	90,86	91,06	91,26	91,46	91,66	91,86	91,86	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	61,48	61,50	61,51	61,52	61,52	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
			Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	39,2	41,5	43,6	44,9	45,6	46,2	46,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian universal access (100-0-100)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	98,87	99,43	99,99	100,00	100,00	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan dan Kawasan Permukiman
		Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang;	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89,0	89,2	89,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 2.10. Pertanahan
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan;	Kinerja Lalu Lintas (Level Of Service)	Nilai	0,65	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54	2.15. Perhubungan
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran		Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,46	76,88	77,30	77,73	78,15	78,15	1.01. Pendidikan 1.02. Kesehatan
			Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,49	11,69	11,09	10,49	9,89	9,89	Semua Urusan
			Indeks Pembangunan	Indeks	96,17	96,42*	96,66	96,90	97,14	97,38	97,62	97,62	2.08. Pemberdayaan

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
			Gender (IPG)										Perempuan dan Perlindungan Anak
		Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,25*	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94	1.01. Pendidikan
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,58	8,58*	8,64	8,72	8,80	8,88	8,96	8,96	1.01. Pendidikan
			Persentase pemajuan kebudayaan	%	10,9	0	5	5	5	5	5	25	2.22 Kebudayaan
		Sasaran 5.1.2: Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,78*	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02	1.02. Kesehatan 2.19. Pemuda dan Olahraga
		Sasaran 5.1.3: Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Persentase PMKS yang tertangani	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5	1.06. Sosial
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,46	5,31	5,16	4,97	4,50	4,25	4,25	4,25	2.07. Tenaga Kerja
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6934	0,6934	0,6956	0,6974	0,6974	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
		Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	72,35	72,68	73,34	73,67	74,00	74,33	74,66	74,66	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
			Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	NA	710	725	740	755	770	785	785	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan	Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	52,85	54,35	54,68	55,01	55,34	55,67	55,99	55,99	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Indeks kualitas air	Indeks	36,15	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks kualitas udara	Indeks	76,82	77,31	77,80	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76	2.11. Lingkungan Hidup
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,54	42,72	42,90	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62	2.11. Lingkungan Hidup
		Sasaran 6.1.2: Meningkatnya	Indeks Kinerja Pengelolaan	Indeks	56,95	58,95	59,95	61,95	63,95	65,95	66,95	66,95	2.11. Lingkungan Hidup

Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator	Satuan	Kondisi Awal (2020)		Target Capaian					Kondisi Akhir	Urusan Pemerintahan Terkait
					2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
		penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	Sampah (IKPS)										
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	1.05. Ketenteraman dan ketertiban serta perlindungan masyarakat

Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya

BAB VI

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kabupaten Klaten tahun 2021-2026, dirumuskan strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah. Strategi dan arah kebijakan pembangunan ini merupakan panduan dalam menentukan program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan kedepan.

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Strategi untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada setiap misi dijabarkan sebagai berikut.

1. Mewujudkan Tata Nalunan Kehidupan Masyarakat yang Berahlak dan Berkepribadian

Misi pertama ini bertujuan untuk mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkarakter dan berkepribadian pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas).

Sasaran yang ingin diciptakan, yaitu: terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat.
- b. Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas.
- c. Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran.

2. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Professional, Jujur, Bersih, Transparan, Bertanggungjawab dan Anti Korupsi

Misi kedua ini bertujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (*Good and Clean Governance*), dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Reformasi Birokrasi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah, dan 2) Meningkatnya kualitas pelayanan publik. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah.
- b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru.
- c. Meningkatkan pengelolaan keuangan dan barang milik daerah.
- d. Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko.
- e. Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah.
- f. Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah.
- g. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang *Smart City*.
- h. Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi.

- i. Meningkatkan implementasi pengembangan single data Kabupaten Klaten.
- j. Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian.
- k. Meningkatkan ASN yang berkualitas.
- l. Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah.
- m. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
- n. Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
- o. Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan.
- p. Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah.
- q. Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan.
- r. Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD.

3. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Daerah Berbasis Sektor Unggulan Daerah Berdasarkan Ekonomi Kerakyatan

Misi ketiga ini bertujuan untuk meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan, dengan indikator kinerja tujuan adalah pertumbuhan ekonomi. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 2 hal, yaitu: 1) Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi dan 2) Meningkatnya investasi daerah. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif.
- b. Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan.
- c. Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing.
- d. Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui e-commerce untuk menunjang Smart City.
- e. Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian.
- f. Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap, pengembangan produk olahan ikan dan meningkatkan tingkat konsumsi ikan.
- g. Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol.

4. Mewujudkan Pemerataan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkualitas sesuai Rencana Tata Ruang Wilayah

Misi keempat ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Infrastruktur wilayah dalam kondisi baik dan 2) Rasio konektivitas. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya kualitas pembangunan

infrastruktur daerah; 2) Meningkatnya capaian *universal access* (100-0-100); 3) Terkendalinya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang; dan 4) Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah.
- b. Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian.
- c. Meningkatkan kualitas bangunan gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat.
- d. Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih
- e. Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis
- f. Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh
- g. Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya
- h. Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi.

5. Mewujudkan Kualitas Sumber Daya Manusia Yang Cerdas, Sehat, Berbudaya, dan Responsif Gender

Misi kelima ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran, dengan indikator kinerja tujuan adalah 1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM); 2) Persentase Penduduk Miskin; dan 3) Indeks Pembangunan Gender. Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 4 hal, yaitu: 1) Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing; 2) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat; 3) Meningkatnya kesejahteraan masyarakat; dan 4) Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs
- b. Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan
- c. Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat
- d. Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga
- e. Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat
- f. Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat
- g. Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga Berencana
- h. Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
- i. Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes
- j. Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (skill) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.
- k. Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah.
- l. Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan

6. Mewujudkan Kualitas Pengelolaan Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan

Misi keenam ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan, dengan indikator kinerja tujuan adalah Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH). Sasaran yang ingin diciptakan terdiri dari 3 hal, yaitu: 1) meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan, dan 2) meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3); 3) meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana. Strategi yang dilakukan untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut yaitu:

- a. Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau;
- c. Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan;
- d. Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana.

Keterkaitan misi, tujuan, sasaran, dan strategi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten tertuang dalam tabel berikut:

Tabel 6.1
Strategi Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 1 : mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian.	Tujuan 1.1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berkepribadian berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berwawasan kebangsaan.	Sasaran 1.1.1: Terwujudnya ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian konflik sosial dan kesadaran politik masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas pencegahan dan pengendalian konflik sosial; penguatan sistem peringatan dini di lingkungan masyarakat 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Pembinaan revolusi mental berlandaskan ideologi Pancasila 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pendidikan politik bagi masyarakat terutama pelajar, kelompok pemuda dan tokoh agama 			✓		
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan sinergitas kerjasama dalam penyelenggara pemilihan umum yang aman dan damai 			✓		
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penegakan perda dan pemberdayaan linmas 	<ul style="list-style-type: none"> Pengkoordinasian penyusunan Perkada sebagai tindak lanjut Perda yang mengandung sanksi; optimalisasi pelaksanaan patroli; meningkatkan kuantitas anggota Satpol PP, dan Pemberdayaan petugas linmas 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja pemadaman kebakaran 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kuantitas dan kompetensi anggota Damkar 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sarana prasarana pemadam kebakaran. 	✓	✓		✓	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, professional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.	Tujuan 2.1: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (<i>Good and Clean Governance</i>).	Sasaran 2.1.1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kematangan organisasi perangkat daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penguatan perangkat daerah terkait sistem perencanaan pembangunan; monitoring dan pengendalian pelaksanaan tugas; perbaikan sistem pengendalian intern pemerintah; pencegahan tindak pidana korupsi; pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; penjaminan mutu layanan; penerapan SOP; diklat aparatur; analisis kebijakan dan pemecahan masalah tugas; manajemen sumberdaya peralatan dan perlengkapan kerja yang terukur; manajemen resiko pelaksanaan tugas aparatur; pengukuran kinerja daerah; pengembangan inovasi layanan, dan budaya organisasi. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah melalui intensifikasi pajak dan retribusi daerah serta ekstensifikasi dengan penciptaan sumber-sumber pendapatan baru. 	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah; dan perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah; Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD; pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah; penertiban ijin usaha. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan keuangan dan Barang Milik Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Pengamanan administrasi (dan pengamanan fisik Barang Milik Daerah serta perbaikan tata kelola Barang Milik Daerah. 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengawasan intern dan pengawasan khusus, serta pengendalian risiko 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; pengembangan zona integritas, dan peningkatan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaiki mekanisme dan harmonisasi dalam perumusan kebijakan, dan penguatan kapasitas aparatur perencana perangkat daerah. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat inovasi dan tata kelola kelitbangan dalam mendukung pencapaian prioritas daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi perangkat daerah untuk melakukan inovasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 				✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk menunjang <i>Smart City</i>. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan jaringan, sarana prasarana, dan aplikasi teknologi penunjang smart city 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pemanfaatan persandian dalam pengamanan informasi 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan persandian dalam pengamanan informasi 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan implementasi pengembangan <i>single data</i> Kabupaten Klaten. 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan sistem informasi dan meta data terintegrasi 	✓				
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penyediaan data dan informasi <i>single data</i> Kabupaten 		✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Klaten					
			<ul style="list-style-type: none"> Mengoptimalkan penerapan merit sistem dalam manajemen kepegawaian 	<ul style="list-style-type: none"> Perbaikan perencanaan kebutuhan, pengembangan karier, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, sistem informasi kepegawaian. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan ASN yang berkualitas 	<ul style="list-style-type: none"> Penerimaan ASN sesuai dengan kebutuhan, dan peningkatan kompetensi ASN dengan pendidikan dan pelatihan. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan sinergitas peran dunia usaha dalam pembangunan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan forum <i>Corporate Social Responsibility</i> (CSR). 	✓	✓	✓	✓	✓
		Sasaran 2.1.2: Meningkatnya kualitas pelayanan publik.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan publik 	<ul style="list-style-type: none"> Optimalisasi penyelenggaraan pelayanan publik di perangkat daerah 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil 	<ul style="list-style-type: none"> Pelayanan dokumen administrasi dan kependudukan dengan jemput bola; pelayanan keliling ke desa dan kelurahan; pelayanan bagi masyarakat difabel dan penduduk rentan administrasi kependudukan, serta peningkatan pemanfaatan data kependudukan. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan perpustakaan 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan dan peningkatan kualitas SDM Pustakawan; Pengembangan bahan bacaan dan perbaikan sarana prasarana perpustakaan; 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan layanan buku digital 	✓	✓			
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan layanan kearsipan dan pengelolaan arsip secara baku di seluruh Perangkat Daerah 	<ul style="list-style-type: none"> Penambahan dan Peningkatan kualitas SDM Arsiparis, dan peningkatan sarana dan prasarana Kearsipan. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan dan penyelenggaraan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan dan pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada kecamatan. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas layanan sekretariat DPRD kepada DPRD. 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan layanan sekretariat DPRD kepada DPRD yang berkualitas 	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.	Tujuan 3.1: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan.	<ul style="list-style-type: none"> Sasaran 3.1.1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kunjungan wisata melalui pengembangan destinasi wisata, optimalisasi promosi dan pemasaran, serta pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan Kawasan Pariwisata, desa wisata dan destinasi wisata berbasis potensi lokal yang terintegrasi dengan program nasional dalam menciptakan Klaten sebagai salah satu daerah tujuan wisata (<i>single destination tourism</i>) dan peningkatan kemitraan antar pelaku industri pariwisata. 	✓	✓	✓		
				<ul style="list-style-type: none"> Penerapan CHSE (<i>Cleanliness</i> (Kebersihan), <i>Health</i> (Kesehatan), <i>Safety</i> (Keamanan), dan <i>Environment</i> (Ramah lingkungan)); 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				penyelenggaraan event budaya dan MICE; promosi digital dan partisipasi dalam pemasaran pariwisata tingkat nasional dan internasional.					
				• Pengembangan ekonomi kreatif berbasis potensi unggulan didukung basis data ekonomi kreatif yang terintegrasi.	✓	✓	✓	✓	✓
			• Meningkatkan kinerja ekspor dan perdagangan	• Pengembangan kemitraan pemasaran produk unggulan daerah; mengembangkan promosi dan pameran; meningkatkan pengawasan harga bahan kebutuhan pokok masyarakat; pengendalian ijin pasar modern dan perlindungan konsumen.	✓	✓	✓	✓	✓
				• Peningkatan kualitas pasar tradisional;	✓	✓			
			• Mengembangkan industri kecil berbahan baku lokal yang produktif, kreatif, inovatif dan berdaya saing	• Penambahan display khas produk klaten; Pemutakhiran basis data Industri Kecil Menengah; dan pengembangan kawasan peruntukan industri yang selaras dengan tata ruang;	✓	✓			
				• Penguatan sentra industri dan 11 klaster industri; fasilitasi pemberdayaan IKM, mengintensifkan pembinaan teknologi produksi, perijinan usaha dan akses pemasaran produk melalui <i>e-commerce</i> untuk	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				menunjang <i>Smart City</i> ; fasilitasi sertifikasi pekerja industri, serta pengembangan pola kemitraan industri kecil dengan industri menengah dan besar					
			<ul style="list-style-type: none"> Mengembangkan usaha mikro dan koperasi melalui pembinaan dan pemberdayaan manajemen usaha, teknologi produksi dan pemasaran produk melalui <i>e-commerce</i> untuk menunjang <i>Smart City</i>, 	<ul style="list-style-type: none"> Membranding produk unggulan dan penguatan gerakan “Aku Cinta Produk Klaten” dan pengembangan basis data koperasi dan UKM 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kapasitas sumber daya manusia; penguatan kelembagaan koperasi dan UKM; pemberdayaan Klaster UKM berbasis teknologi informasi; fasilitasi akses permodalan dengan program subsidi bunga; dan serta peningkatan daya saing UKM dan koperasi. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan produktivitas pertanian melalui penyediaan sarana prasarana dan pengendalian bencana pertanian. 	<ul style="list-style-type: none"> Penetapan sawah lestari dan penyediaan basis data pertanian dan 	✓				
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan branding padi Rojolele varietas Srinar dan Srinuk; pengembangan ternak unggul berbasis potensi lokal; peningkatan dan pengembangan produk unggulan perkebunan; 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan pertanian organik; intensifikasi pengolahan; pembangunan pertanian berbasis kawasan dan teknologi; intensifikasi usaha tani; 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				penggunaan benih bermutu dan bersertifikat; pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi; pemanfaatan teknologi mekanisasi pertanian; pencegahan, pengendalian, dan penanganan pasca panen serta promosi pemasaran;					
				• Pengembangan infrastruktur pertanian;	✓	✓	✓	✓	✓
				• Pemantauan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);	✓	✓	✓	✓	✓
				• Peningkatan kompetensi sumberdaya manusia pertanian, revitalisasi penyuluhan pertanian dan penguatan kelompok tani,	✓	✓	✓	✓	✓
				• Peningkatan dan pengembangan Lumbung Pangan; dan penguatan kelembagaan pangan;	✓	✓	✓	✓	✓
			• Peningkatan produktivitas perikanan budidaya dan perikanan tangkap	• Penyediaan basis data sektor perikanan	✓				
				• Pemberdayaan usaha nelayan tangkap dan pembudidaya ikan skala kecil; peningkatan fasilitasi usaha; pengembangan produk olahan ikan; dan meningkatkan konsumsi ikan dikalangan masyarakat	✓	✓	✓	✓	✓
				• Penyediaan dan pendistribusian benih unggul; <i>restocking</i> di perairan umum; penguatan	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				teknologi pemasaran produksi perikanan					
		Sasaran 3.1.2: Meningkatnya investasi daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan investasi sesuai rencana induk penanaman modal daerah terutama pada sektor pertanian, pariwisata dan potensi investasi dengan adanya jalan tol 	<ul style="list-style-type: none"> Kemudahan perijinan dengan optimalisasi teknologi informasi dan mall pelayanan publik; dan penyediaan basis data informasi investasi. 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatkan iklim investasi dan promosi investasi berkelanjutan sesuai potensi dan peluang investasi; peningkatan kapasitas SDM; pengembangan pola kemitraan dan kerjasama investasi. 	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.	Tujuan 4.1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan memperhatikan tata ruang wilayah.	Sasaran 4.1.1: Meningkatnya kualitas pembangunan infrastruktur daerah.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pembangunan jalan dan penataan sistem drainase untuk menunjang konektivitas dan pengembangan wilayah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan serta sistem drainase termasuk dukungan dalam pengendalian banjir khususnya Sungai Dengkeng, Sungai Bengawan Solo 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan infrastruktur sumberdaya air untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pembangunan dan rehabilitasi dan revitalisasi sarana dan prasaran sumberdaya air irigasi sumberdaya air secara merata termasuk di Rowojombor untuk menunjang irigasi pertanian, air minum, dan aktivitas pembidayaan perikanan 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas bangunan 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan Pembangunan gedung 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			gedung guna mendukung pelayanan publik bagi masyarakat.	pemerintah daerah					
		Sasaran 4.1.2: Meningkatnya capaian <i>universal access</i> (100-0-100).	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses rumah tangga terhadap air bersih 	<ul style="list-style-type: none"> Pengembangan dan peningkatan layanan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) perpipaan dan non perpipaan. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan akses sanitasi dan perilaku higienis 	<ul style="list-style-type: none"> Penerapan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) dengan mendorong penciptaan lingkungan yang kondusif, peningkatan kebutuhan sanitasi, dan peningkatan penyediaan akses sanitasi. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penyediaan rumah layak huni dan penanganan kawasan kumuh 	<ul style="list-style-type: none"> Pencegahan tumbuh dan berkembangnya permukiman kumuh dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh melalui pemugaran (rehabilitasi), peremajaan (revitalisasi) dan permukiman kembali (relokasi). 	✓	✓	✓	✓	✓
		Sasaran 4.1.3: Terkendalinya pemanfaatan Kawasan sesuai dengan peruntukan tata ruang.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas penataan ruang dan penataan bangunan dan lingkungannya 	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan rencana tata ruang 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian perijinan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana struktur ruang dan pola ruang serta rencana detail tata ruang. 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL). 			✓	✓	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Sasaran 4.1.4: Meningkatnya kualitas manajemen rekayasa lalu lintas penyelenggaraan angkutan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kualitas pelayanan lalu lintas angkutan terintegrasi 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan perencanaan jaringan lalu lintas angkutan jalan; perencanaan dan penataan jaringan trayek; 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Pengelelolaan terminal tipe C; penyediaan fasilitas perlengkapan dan keselamatan jalan; penyediaan angkutan orang dan barang; penataan parkir, dan mendorong kepemilikan KIR kendaraan bermotor. 	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 5 : Mewujudkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender.	Tujuan 5.1: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran.	Sasaran 5.1.1: Meningkatnya SDM yang cerdas dan berdaya saing.	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan partisipasi dan mutu pendidikan PAUD, SD/MI dan SMP/MTs 	<ul style="list-style-type: none"> Pencanangan Gerakan ayo sekolah untuk PAUD; dan Pendataan ulang penduduk usia 7-12 tahun dan 13-15 tahun yang tidak sekolah 	✓				
				<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Sarana dan prasarana PAUD; 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Pemberian insentif berupa beasiswa kepada masyarakat yang kurang mampu. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan partisipasi pendidikan kesetaraan 	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi penduduk usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah dan sudah tidak sekolah; 	✓				
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan fasilitas pendidikan kesetaraan. 		✓		✓	
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan aktualisasi budaya dalam kehidupan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Pembangunan taman budaya dan museum daerah 	✓				
			<ul style="list-style-type: none"> Perindungan, pengembangan dan pemanfaatan 10 objek pemajuan 	✓	✓	✓	✓	✓	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
				kebudayaan dan cagar budaya						
		Sasaran 5.1.2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat berbasis keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Pengendalian Covid-19 melalui pelaksanaan vaksin, penerapan protokol kesehatan, dan gerakan masyarakat hidup bersih dan sehat 	✓					
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan pelayanan kesehatan ibu, bayi dan balita; optimalisasi penanganan penyakit, peningkatan edukasi terkait permasalahan kesehatan; peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana kesehatan; peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi kesehatan, 		✓	✓	✓	✓	
				<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kualitas konsumsi pangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan pangan yang merata diseluruh wilayah, terjangkau dan terjamin keamanannya serta didukung penyediaan cadangan pangan pemerintah daerah berbasis sumber daya lokal. 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kegemaran dan budaya olahraga dikalangan masyarakat 	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana olahraga; meningkatkan pembinaan olahraga; meningkatkan kapasitas dan sertifikasi pelatih olahraga, serta meningkatkan kapasitas pemuda pelopor dan wirausaha muda. 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengendalian penduduk melalui program Keluarga 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan menggunakan metode kontrasepsi jangka panjang dan pengembangan Kampung KB untuk meningkatkan Partisipasi Kelompok Kegiatan (BKB, BKR, BKL, UPPKS, 	✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
			Berencana	PIK-R).					
		Sasaran 5.1.3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan rehabilitasi sosial dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar; penguatan terhadap fungsi rumah singgah serta pemberdayaan potensi dan sumber kesejahteraan sosial. 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Penyempurnaan sistem perlindungan sosial termasuk didalamnya optimalisasi, verifikasi dan validasi Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 	✓	✓			
				<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas secara terpadu dan lintas sektor. 	✓	✓	✓	✓	✓
			<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kemandirian desa melalui pembangunan desa terpadu dan pengembangan BUMDes 	<ul style="list-style-type: none"> Memperkuat kapasitas aparatur desa dalam tata kelola pemerintahan desa yang baik, termasuk pengelolaan anggaran dan aset desa; 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Pembentukan dan penguatan tata kelola BUMDes dalam pengembangan potensi unggulan desa, dan mengembangkan kerjasama antar desa. 	✓	✓	✓	✓	✓
		<ul style="list-style-type: none"> Menyiapkan tenaga kerja yang memiliki keahlian (<i>skill</i>) sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan jenis pelatihan berdasarkan klaster kompetensi dunia usaha dan industri melalui Balai Latihan Kerja; Peningkatan peran lembaga pelatihan kerja swasta dan Balai Latihan Kerja 	✓	✓	✓	✓	✓	

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
				Komunitas; pelatihan wirausaha; perluasan kesempatan kerja melalui kegiatan padat karya; tenaga kerja mandiri (TKM); terapan teknologi tepat guna (TTG); tenaga kerja sukarela (TKS);					
			<ul style="list-style-type: none"> Fasilitasi dan penguatan partisipasi dunia usaha dalam pembangunan daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan penempatan tenaga kerja melalui <i>Job fair</i> dan Bursa Kerja <i>online</i>; fasilitasi hubungan industrial ketenagakerjaan dan industri; peningkatan pelayanan dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja luar negeri, serta kepesertaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja; 	✓	✓	✓	✓	✓
		Sasaran 5.1.4: Meningkatnya keberdayaan perempuan dan anak	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak melalui percepatan pelaksanaan pengarusutamaan gender dan pemenuhan hak anak di berbagai bidang pembangunan	Peningkatan pemberdayaan perempuan; implementasi perencanaan dan penganggaran responsif gender dan anak, serta penguatan sistem perlindungan perempuan dan anak berbasis keluarga.	✓	✓	✓	✓	✓
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan.	Tujuan 6.1: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan.	Sasaran 6.1.1: Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan.	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan pengelolaan lingkungan hidup Meningkatkan pemenuhan ruang terbuka hijau 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan ketaatan pelaku usaha terhadap ketentuan dokumen lingkungan dan pemantauan kualitas air, tanah dan udara secara berkala. Pembangunan taman; pengelolaan hutan kota, taman kota dan ruang publik lainnya. 	✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓

Misi	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026
		Sasaran 6.1.2 Meningkatnya penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun berbahaya (B3)	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatkan kinerja pengelolaan persampahan melalui 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan kesadaran dan peran serta masyarakat dalam mengelola sampah; optimalisasi kinerja TPA; pengurangan sampah dengan TPS 3R dan Bank Sampah; serta pengawasan dan pengendalian terhadap limbah dan bahan bercun berbahaya (B3) 	✓	✓	✓	✓	✓
				<ul style="list-style-type: none"> Pemenuhan sarana dan prasarana persampahan hingga tingkat desa 	✓	✓			
		Sasaran 6.1.3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana.	Memperkuat kapasitas dalam upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana, penanganan masa darurat bencana, dan penanganan pasca bencana	Penataan sistem dasar penanggulangan bencana serta peningkatan kualitas jalur evakuasi bencana, dan pelayanan informasi kebencanaan;	✓	✓			
				Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan bencana; pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; penanganan pasca bencana; peningkatan kerjasama dan pembinaan relawan.	✓	✓	✓	✓	✓

Sumber: Hasil Analisis dan olah data, 2021

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan sesuai dengan visi dan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Klaten, ditetapkan arah kebijakan tahunan dalam RKPD tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026. Arah kebijakan tahunan ini menjadi acuan dan penentuan prioritas dan fokus pembangunan setiap tahunnya.

Perincian arah kebijakan perencanaan tahunan pada RKPD Tahun 2022 sampai dengan RKPD Tahun 2026 diuraikan sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Tahun 2022

Pembangunan tahun 2022 diarahkan pada: **“Pemulihan Ekonomi melalui Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Pengembangan Potensi Lokal”**

Prioritas pembangunan tahun 2022 diarahkan pada:

- a. Pengembangan ekonomi lokal;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur;
- c. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- e. Kelestarian lingkungan hidup dan pengurangan resiko bencana; dan
- f. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.

2. Arah Kebijakan Tahun 2023

Pembangunan tahun 2023 diarahkan pada: **“Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi melalui Penguatan Sumber Daya Manusia dan Sarana Prasarana Wilayah yang Berkelanjutan”**

Prioritas pembangunan tahun 2023 diarahkan pada:

- a. Penguatan pertumbuhan ekonomi berbasis potensi lokal;
- b. Pengurangan tingkat kemiskinan dan pengangguran;
- c. Pengembangan kualitas sumber daya manusia;
- d. Percepatan peningkatan kualitas sarana dan prasarana wilayah;
- e. Peningkatan kualitas pengelolaan lingkungan hidup; dan
- f. Peningkatan kualitas pelayanan publik dan reformasi birokrasi.

3. Arah Kebijakan Tahun 2024

Pembangunan tahun 2024 diarahkan pada: **“Peningkatan kemajuan daerah didukung pemanfaatan sumber daya ekonomi yang berkelanjutan”**

Prioritas pembangunan tahun 2024 diarahkan pada:

- a. Penciptaan lapangan kerja dan penguatan daya saing ekonomi;
- b. Pengembangan sumber daya manusia dan pengurangan kemiskinan;
- c. Penguatan peningkatan sarana prasarana wilayah yang berkualitas;
- d. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik dan kondusifitas wilayah; dan
- e. Pelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesiapsiagaan bencana.

4. Arah Kebijakan Tahun 2025

Pembangunan tahun 2025 diarahkan pada: **“Peningkatan kemandirian daerah didukung penguatan daya saing ekonomi lokal dan tata kelola pemerintahan yang baik”**

Prioritas pembangunan tahun 2025 diarahkan pada:

- a. Penguatan investasi dan daya saing potensi ekonomi daerah;
- b. Pengentasan kemiskinan dan perluasan kesempatan kerja;
- c. Penguatan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi;

- d. Penguatan keunggulan dan daya saing sumberdaya manusia; dan
- e. Pemantapan infrastruktur yang berkualitas dan pelestarian lingkungan hidup.

5. Arah Kebijakan Tahun 2026

Pembangunan tahun 2026 diarahkan pada: **“Peningkatan kualitas hidup masyarakat Klaten yang Maju, Mandiri dan Sejahtera”**

Prioritas pembangunan tahun 2026 diarahkan pada:

- a. Perwujudan kehidupan masyarakat yang berkualitas, berakhlak dan berkepribadian;
- b. Perwujudan kemandirian ekonomi berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan;
- c. Perwujudan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender;
- d. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi; dan
- e. Perwujudan sarana prasarana yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah.

6.3. Penjabaran Implementasi Program Unggulan Daerah

Program unggulan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 yang merupakan program unggulan Bupati dan Wakil Bupati dalam 5 (lima) tahun ke depan, sebagaimana telah dijelaskan pada bab sebelumnya, dijabarkan dalam strategi rencana tindak lanjut sebagai berikut:

1. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi

Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi ditetapkan dalam rangka meningkatkan pengelolaan potensi daerah agar berdaya saing dan meningkatkan daya tarik Kabupaten Klaten sebagai daerah tujuan wisata dan tujuan investasi daerah. Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi diprioritaskan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten. Bentuk implementasi peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan, pengembangan daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif, serta peningkatan dan pengembangan produk asli Kabupaten Klaten adalah program Klaten Mapan, Klaten Keren, Klaten Laris dan Klaten Santer.

Klaten Mapan, Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri Pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.

Klaten Keren, Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen.

Klaten Laris, Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.

Klaten Santer, Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintegrasi dan Kabupaten Klaten merupakan Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).

2. Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran

Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran ditetapkan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan. Percepatan penanggulangan kemiskinan diprioritaskan pada sinergitas dan harmonisasi penanganan kemiskinan berbagai sektor dan berbagai unsur pemangku kepentingan. Perluasan lapangan pekerjaan diprioritaskan pada peningkatan kualitas SDM tenaga kerja. Bentuk implementasi percepatan penanggulangan kemiskinan dan perluasan lapangan pekerjaan adalah program Klaten Subur, Klaten Cetar, dan Klaten Tangkis.

Klaten Subur, Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi UMKM dengan cara memberikan subsidi bunga Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 80% dari bunga bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.

Klaten Cetar, Cetar singkatan dari Cerdas dan Trampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi *soft skill* dan *hard skill* dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.

Klaten Tangkis, Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin.

3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia ditetapkan dalam rangka meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas kesehatan, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Peningkatan nilai-nilai sosial dan budaya diprioritaskan pada peningkatan kerukunan masyarakat Kabupaten Klaten. Peningkatan kualitas kesehatan diprioritaskan pada peningkatan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor. Peningkatan kualitas pendidikan diprioritaskan pada peningkatan kualitas pendidikan masyarakat Kabupaten Klaten.

Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan. Kesetaraan gender dapat dicapai dengan mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan, serta memperoleh manfaat dari pembangunan. Bentuk implementasi meningkatkan nilai-nilai sosial dan budaya, meningkatkan kualitas, dan meningkatkan kualitas pendidikan adalah program Klaten Toleran, Klaten Waras, dan Klaten Tuntas.

Klaten Toleran, Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat “Gotong Royong” masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan.

Klaten Waras, Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita) dan Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain.

Klaten Tuntas, Tuntas singkatan dari turunkan anak tidak sekolah. Penanganan anak tidak sekolah merupakan wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, yaitu bahwa semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan.

4. Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, Sumber Daya Alam, dan Pengurangan Resiko Bencana

Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana ditetapkan dalam rangka peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten. Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan diprioritaskan pada pengelolaan persampahan dan penyediaan Ruang Terbuka Hijau. Peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten diprioritaskan pada peningkatan kapasitas masyarakat Kabupaten Klaten dalam menghadapi bencana.

Bentuk implementasi peningkatan perwujudan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam yang berkualitas secara berkelanjutan, serta peningkatan kesiapsiagaan bencana masyarakat Kabupaten Klaten adalah Program Klaten Tangguh dan Klaten Lestari.

Klaten Tangguh, Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami.

Klaten Lestari, Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.

5. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik ditetapkan dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan kualitas pelayanan publik diprioritaskan pada peningkatan inovasi pelayanan publik secara profesional, transparan dan akuntabel berorientasi pada *good and clean*

governance. Bentuk implementasi peningkatan kualitas pelayanan publik adalah program Klaten Cerdas dan Klaten Cekatan.

Klaten Cerdas, Cerdas adalah Klaten *Smart City*, merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten *Smart City* mencakup *Smart Governance*, *Smart Economy*, *Smart Society*, *Smart Branding*, *Smart Living* dan *Smart Environment*, salah satu upayanya dalam mendorong Klaten Cerdas dengan mengupayakan internet masuk desa.

Klaten Cekatan. Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel dan Transparan, merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip *good governance*, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), Sipon Keduten, Matur Dokter, Titip Bandaku, dan lain-lain. Peningkatan pelayanan publik didorong agar berkualitas melalui digitalisasi pelayanan.

6. **Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur**

Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur ditetapkan dalam rangka peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat. Pemerataan kualitas dan kuantitas infrastruktur diprioritaskan pada peningkatan kualitas jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung, serta kualitas perumahan dan kawasan permukiman. Bentuk implementasi peningkatan aksesibilitas pusat-pusat pengembangan perekonomian wilayah dan penyediaan sarana prasarana dasar yang memadai bagi masyarakat adalah program Klaten Mantap.

Klaten Mantap, Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.

Penjabaran rencana Implementasi Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 ke dalam nomenklatur Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.2
Rencana Implementasi Program Unggulan Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Penguatan Ekonomi Lokal dan Iklim Investasi						
1.1	KLATEN MAPAN	Mapan singkatan dari Mandiri Pangan. Mandiri Pangan yang dimaksud adalah Kabupaten Klaten mampu memenuhi kebutuhan bahan pangan pokok utama (Padi dan Jagung) masyarakat secara mandiri dan menjadi penyangga kebutuhan pangan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Mandiri pangan juga dapat diartikan pada peningkatan nilai tambah dan daya saing komoditas pangan.	Pertanian	1. Pengembangan Padi Rojolele Varietas Srinar dan Srinuk 2. Pengembangan ternak unggul Sapi dan/Kambing 3. Diseminasi pengembangan Pupuk Organik 4. Demplot budidaya pertanian organik Pengembangan Pertanian Terpadu Berbasis Teknologi	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian 3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.03.2.03. Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota 3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota 3.27.02.2.02. Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	3.27.02.2.02.01. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman 3.27.03.2.03.01. Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak 3.27.02.2.02.03. Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman 3.27.02.2.02.01. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan/Tanaman
				1. Diseminasi Perda LP2B 2. Fasilitasi penyiapan insentif dan disinsentif sesuai	3.27.02. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01. Pengembangan Prasarana Pertanian	3.27.03.2.01. Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pangan

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
				Perda LP2B 3. Penegakkan Perda LP2B			Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B
			Penelitian dan Pengembangan	Perbaikan varietas durian khas klaten	5.05.02 Program penelitian dan pengembangan	5.05.02.2.03 Penelitian dan pengembangan bidang ekonomi dan pembangunan	5.05.02.2.03.04 Penelitian dan pengembangan pertanian, perkebunan dan pangan
			Kelautan dan perikanan	Peningkatan dan pengembangan budidaya ikan berbasis minapolitan	3.25.04 Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	3.25.04.2.02 Pemberdayaan Pembudidaya Ikan Kecil	3.25.04.2.02.01 Pengembangan Kapasitas Pembudidaya Ikan Kecil
			Pangan	Pengembangan Lumbung Pangan	2.09.02. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	2.09.02.2.01 Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan Sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.09.02.2.01.01 Penyediaan Infrastruktur Lumbung Pangan
				Pengembangan KRPL (Kawasan Rumah Pangan Lestari)	3.27.03. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Pertanian	3.27.03.2.01 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	3.27.03.2.01.02 Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
1.2	KLATEN KEREN	Keren berarti Kabupaten Klaten memiliki berbagai daya Tarik wisata dan ekonomi kreatif yang dapat dimanfaatkan	Pariwisata	1. Menuju 100 Desa Wisata 2. Fasilitasi dan pengembangan Kawasan Strategi Pariwisata (KSP)	3.26.02 Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	3.26.02.2.01 Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	3.26.02.2.01.01 Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota 3.26.02.2.01.03 Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/ Kota

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		dalam rangka meningkatkan jumlah dan lama kunjungan wisatawan dan membelanjakan uangnya di Klaten, sehingga mampu meningkatkan pendapatan masyarakat Katen.				3.26.02.2.02 Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.02.2.02.02 Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
							3.26.02.2.02.03 Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
							3.26.02.2.02.04 Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
							3.26.02.2.02.07 Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
					3.26.05 Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	3.26.05.2.01 Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	3.26.05.2.01.01 Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
							3.26.05.2.01.04 Sertifikasi Kompetensi Bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata
			Pariwisata	Desiminasi dan branding “Aku Cinta Produk Klaten”	3.26.03 Program Pemasaran Pariwisata	3.26.03.2.01 Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi Dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	3.26.03.2.01.02 Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Perdagangan		2.30.07 Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	2.30.07.2.01 Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	2.30.07.2.01.01 Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota 2.30.07.2.01.02 Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota
			Kebudayaan	Museum Daerah Taman Budaya	2.22.04 Program pembinaan sejarah	2.22.4.2.01 Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.22.4.2.01.03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah
					2.22.05 Program pelestarian dan pengelolaan Cagar Budaya	2.22.05.2.01 Penetapan Cagar Budaya Peringkat	2.22.05.2.01.1 Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya 2.22.05.2.01.2 Penetapan Cagar Budaya
						2.22.05.2.02 Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	2.22.05.2.02.1 Pelindungan Cagar Budaya 2.22.05.2.02.2 Pengembangan Cagar Budaya
					2.22.6 Program pengelolaan permuseuman	2.22.6.2.01 Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota	2.22.06.2.01.04 Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum 2.22.06.2.01.05 Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum
1.3	KLATEN LARIS	Laris berarti sebuah ajakan untuk membeli dan	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah	1. Optimalisasi Show room produksi UMKM Kab.	2.17.07 Program Pemberdayaan Usaha Menengah,	2.17.07.2.01 Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui	2.17.07.2.01.03 Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)			
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		mencintai produk asli Kabupaten Klaten diharapkan adanya peningkatan pendapatan masyarakat.		Klaten 2. Peningkatan kapasitas kelembagaan Kluster UKM 3. Digitalisasi produk UKM, Asistensi Usaha mikro berbasis Kluster	Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (Umkm)	Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	2.17.07.2.01.04 Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	
					2.17.08 Program Pengembangan UMKM	2.17.08.2.01 Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	2.17.08.2.01.01 Fasilitasi Usaha mikro Menjadi Usaha kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	
				Sekretariat Daerah	4. Subsidi bunga bagi UMKM dan Petani yang disalurkan melalui Bank yang ditunjuk	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil
				Perdagangan,	5. Revitalisasi Pasar Pemkab	2.30.03 Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	2.30.03.2.01 Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	2.30.03.2.01 Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan
					6. Peningkatan daya saing produk industri daerah	2.30.05 Program Pengembangan Ekspor	2.30.05.2.01 Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	2.30.05.2.01.01 Pembinaan dan Pengembangan Usaha Produk Ekspor Unggulan Kabupaten/Kota 2.30.05.2.01.06 Pembinaan Pelaku Usaha Ekspor
1.4	KLATEN SANTER		Santer singkatan dari Sahabat Investor, dimana Kabupaten	Penanaman Modal	1. Implementasi Undang-Undang Cipta Kerja	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Klaten merupakan wilayah strategis yang berada diantara Kota Yogyakarta dan Kota Surakarta, yang memiliki keunggulan kepariwisataan, pertanian dan zona Industri, serta memiliki konektivitas yang terintegrasi dan Kabupaten Klaten merupakan daerah penyangga Kawasan Strategis Prioritas Nasional (KSPN).				Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik 2.18.04.2.01.02 Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal
			2. Penyediaan database informasi investasi	2.18.06 Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	2.18.06.2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan Yang Terintegrasi Pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.18.06.2.01.01 Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	
			3. Peningkatan investasi daerah	2.18.02 Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	2.18.02.2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/ Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.02.2.01.01 Penetapan Kebijakan Daerah mengenai Pemberian Fasilitas/ Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal	
2.	Pengurangan Tingkat Kemiskinan dan Pengangguran						
2.1	KLATEN SUBUR	Subur singkatan dari Subsidi Bunga Ringan, berarti memberikan kemudahan akses permodalan usaha bagi pelaku usaha mikro dengan cara memberikan subsidi	Sekretariat Daerah	Subsidi Bunga Bagi Pelaku Usaha Mikro yang disalurkan melalui bank yang ditunjuk	4.01.03 Program Perekonomian dan Pembangunan	4.01.03.2.01 Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	4.01.03.2.01.03 Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		bunga sebesar 80% dari suku bunga kredit bank penyalur yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Klaten.					
2.2	KLATEN CETAR	Cetar singkatan dari Cerdas dan Terampil, berarti meningkatkan kapasitas tenaga kerja di Kabupaten Klaten dari sisi soft skill dan hard skill dan memiliki kompetensi yang sesuai dengan potensi pasar kerja, serta mampu menciptakan lapangan kerja/beriwirausaha.	Tenaga Kerja	Peningkatan Kompetensi SDM (pencari kerja)	2.07.03 Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	2.07.03.2.01 Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan unit Kompetensi	2.07.03.2.01.01 Proses pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja berdasarkan klaster kompetensi
				Peningkatan Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04 Program Penempatan Tenaga Kerja	2.07.04.2.01 Pelayanan Antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	2.07.04.2.01.03 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja 2.07.04.2.01.05 Perluasan Kesempatan Kerja
			Sosial	Kelompok Usaha Bersama (KUBE) Berprestasi	1.06.02 Program Pemberdayaan Sosial	1.06.02.2.03 Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/ Kota	1.06.02.2.03.04 Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/ Kota
			Perpustakaan	Ulat Kupu (Pelatihan Komputer untuk Masyarakat Kurang Mampu)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	2.23.02.2.02 Pembudayaan gemar membaca tingkat daerah kabupaten/kota	2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial
2.3	KLATEN TANGKIS	Tangkis singkatan dari Tangani Kemiskinan oleh seluruh perangkat daerah, didukung peran serta dunia	Perencanaan	Optimalisasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah	5.01.03 Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	5.01.03.2.01 Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	5.01.03.2.01.08 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		usaha dan masyarakat. Penanganan kemiskinan dilaksanakan melalui program-program yang mengarah pada peningkatan akses pekerjaan yang layak, peningkatan pendapatan, dan pengurangan beban pengeluaran, dan perlindungan sosial penduduk miskin.		Fasilitasi dan Penguatan Partisipasi Dunia Usaha Dalam Pembangunan Klaten “Dunia Usaha mBangun Klaten”		5.01.03.2.02 Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	5.01.03.2.02.04 Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian
			Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)	2.13.04 Program administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01 Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa	2.13.04.2.01.08 Pembinaan dan pemberdayaan Bum desa dan lembaga kerja sama antar desa
			Sosial	Pusat layanan Kesejahteraan Anak Integratif (PLKSAI)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.09 Pemberian Layanan Data dan Pengaduan
				Rumah Singgah (Rusi)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.02 Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan HIV AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial	1.06.04.2.02.03 Penyediaan Permakanan
				Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dan Pusat Kesejahteraan Sosial (Puskesos)	1.06.04 Program Rehabilitasi Sosial	1.06.04.2.01 Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	1.06.04.2.01.11 Pemberian Layanan Rujukan
				1.06.04 Program	1.06.04.2.02 Rehabilitasi	1.06.04.2.02.13 Pemberian	

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					Rehabilitasi Sosial	Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya bukan HIV/AIDS dan NAPZA diluar panti Sosial	Layanan Rujukan
			Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Desa/Kelurahan Layak Anak (Dekela)	2.08.06 Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	2.08.06.2.02 Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	2.08.06.2.02.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Pendampingan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
							2.08.06.2.02.03 Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak Bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
3. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia							
3.1	KLATEN TOLERAN	Toleran berarti kerukunan masyarakat di Kabupaten Klaten terus terjaga salah satunya melalui peningkatan semangat "Gotong Royong" masyarakat dalam proses pembangunan, peningkatan nilai-nilai	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satuan anti Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati (SANGGAR PEDATI)	1.05.02 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum	1.05.02.2.02 Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	1.05.02.2.02.01 Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.02 Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota 1.05.02.2.02.03 Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		keagamaan, pengembangan kebudayaan, pembentukan FKUB (Forum Kerukunan Antar Umat Beragama) dan FKDM (Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat) hingga tingkat Desa/Kelurahan.					Bupati/Wali Kota
3.2	KLATEN WARAS	Waras berarti memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten yang melibatkan lintas program dan lintas sektor dalam rangka peningkatan kesehatan ibu dan anak, pengembangan pelayanan kesehatan, pemberantasan penyakit menular, dan peningkatan lingkungan kesehatan masyarakat, seperti Program Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita) dan	Kesehatan	Waskita (Klaten Wajib Awasi Bersama Untuk Kesehatan Ibu Bayi Dan Balita)	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.01 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil 1.02.02.2.02.02 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin 1.02.02.2.02.03 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir 1.02.02.2.02.04 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita 1.02.02.2.02.06 Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	e-Kartu Kembang Anak/el-Karana	2.14.04 Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	2.14.04.2.01 Pelaksanaan pembangunan Keluarga melalui pembinaan ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	2.14.04.2.01.07 Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		Program Seruling Bambu (Serbu dan Buru Stunting, Bekali Anak Menjadi Bibit Unggul), dan lain-lain.					
3.3	KLATEN TUNTAS	Tuntas singkatan dari Turunkan Angka Anak Tidak Sekolah sebagai wujud pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan, dimana semua warga negara berhak mendapatkan pendidikan, serta didukung peningkatan budaya membaca dan pengembangan kerjasama inovasi daerah.	Pendidikan	Sekolah Penggerak	1.01.02 Program Pengelolaan Pendidikan	1.01.02.2.01 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	1.01.02.2.01.17 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1.01.02.2.01.21 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar 1.01.02.2.01.23 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.01.02.2.01.29 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
						1.01.02.2.02 Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	1.01.02.2.02.28 Pengadaan Perlengkapan Siswa 1.01.02.2.02.32 Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama 1.01.02.2.02.36 Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik 1.01.02.2.02.42 Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
						1.01.02.2.03 Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini	1.01.02.2.03.18 Pengelolaan Dana BOP PAUD

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
						1.01.02.2.04 Pengelolaan Pendidikan Non Formal/ Kesetaraan	1.01.02.2.04.12 Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/ Kesetaraan 1.01.02.2.04.13 Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan di Pendidikan Nonformal/ Kesetaraan 1.01.02.2.04.16 Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/ Kesetaraan 1.01.02.2.04.17 Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/ Kesetaraan
			Perpustakaan	Bejanaku (Bus Jemput Anak Sekolah Baca Buku)	2.23.02 Program Pembinaan Perpustakaan	2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	2.23.02.2.02.01 Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi Pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus Serta Masyarakat 2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
4.	Peningkatan Kelestarian Lingkungan Hidup, SDA, dan Pengurangan Resiko Bencana						
4.1	KLATEN TANGGUH	Tangguh berarti masyarakat Kabupaten Klaten	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Satpol PP dan Damkar <i>Go To School</i>	1.05.04 Program Pencegahan, Penanggulangan,	1.05.04.2.01 Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan	1.05.04.2.01.01 Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
		mampu beradaptasi dan menghadapi ancaman bencana, serta mampu memulihkan diri dari dampak bencana yang dialami.			Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	
				Ayo Siaga Brasta Dahana		1.05.04.2.04 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	1.05.04.2.04.01 Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat
							1.05.04.2.04.02 Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran
				PRB Inklusif	1.05.03 Program Penanggulangan Bencana	1.05.03.2.02 Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	1.05.03.2.02 Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
				Desa Tangguh Bencana (Destana)			1.05.03.2.02.06 Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
4.2	KLATEN LESTARI	Lestari berarti mewujudkan lingkungan hidup yang berkualitas secara berkelanjutan dan memiliki sistem pengelolaan sampah yang terpadu didukung peran serta	Lingkungan Hidup	Penyediaan ruang terbuka hijau hingga tingkat RW	2.11.04 Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	2.11.04.2.01 Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.11.04.2.01.02 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati di Luar Kawasan Hutan
							2.11.04.2.01.04 Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)
							2.11.04.2.01.05 Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)			
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan	
		masyarakat, serta penyediaan pembangunan Ruang Terbuka Hijau (RTH) sampai ke tingkat Desa/Kelurahan.		1. Pengelolaan persampahan (TPS) dengan budidaya maggot	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.02 Pengurangan Sampah dengan melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali 2.11.11.2.01.04 Peningkatan Peran serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	
				2. Pengembangan TPS Desa/ Kelurahan	2.11.11 Program Pengelolaan Persampahan	2.11.11.2.01 Pengelolaan sampah	2.11.11.2.01.07 Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	
				3. Reboisasi lahan kritis	2.11.03 Program Pengendalian Pencemaran dan/ atau Kerusakan Lingkungan Hidup	2.11.03.2.01 Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	2.11.03.2.01.01 Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	
				Pertanahan	Perencanaan penatagunaan tanah	2.10.10 Program Penatagunaan Tanah	2.10.10.2.01 Penggunaan Tanah yang Hamparannya dalam satu Daerah Kabupaten/ Kota	2.10.10.2.01.01 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Penggunaan Tanah
				Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Pemanfaatan ruang terkait zona tambang	1.03.12 Program penyelenggaraan penataan Ruang	1.03.12.2.04 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	1.03.12.2.04.02 Koordinasi dan Sinkronisasi Penertiban dan Penegakan Hukum Bidang Penataan Ruang
5.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
5.1	KLATEN CERDAS	Cerdas adalah Klaten <i>Smart City</i> , merupakan Kota yang memanfaatkan berbagai sumberdaya secara efektif dan efisien untuk menyelesaikan berbagai persoalan Kota yang dapat meningkatkan kualitas hidup warganya. Klaten Smart City mencakup Smart Governance, Smart Economy, Smart Society, Smart Branding, Smart Living dan Smart Environment.	Komunikasi dan Informatika	Implementasi Materplan Klaten <i>Smart City</i>	2.16.03.2 Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	2.16.03.2.02 Pengelolaan <i>e-government</i> di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.16.03.2.02.07 Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik 2.16.03.2.02.09 Pengembangan dan Pengelolaan Ekosistem Kabupaten/Kota Cerdas dan Kota Cerdas
			Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pelayanan Adminduk yang Inovatif Berbasis Teknologi Informasi dan Sistem Layanan Terintegrasi	2.12.03 Program Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01 Pelayanan Pencatatan Sipil	2.12.03.2.01.01 Pencatatan, Penatausahaan dan Penerbitan Dokumen atas Pelaporan Peristiwa Penting
					2.12.04 Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	2.12.04.2.01 Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	2.12.04.2.01.01 Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
						2.12.04.2.03 Penyelenggaraan Pengelolaan informasi administrasi kependudukan	2.12.04.2.03.05 Fasilitasi terkait pengelolaan informasi administrasi kependudukan
					2.12.05 Program Pengelolaan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01 Penyusunan Profil Kependudukan	2.12.05.2.01.01 Penyediaan Data Kependudukan Kabupaten/ Kota
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Elektronik Rumah Dataku (ELDATAKU)	2.14.02 Program pengendalian penduduk	2.14.02.2.02 Pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/kota	2.14.02.2.02.08 Membentuk Rumah Data Kependudukan di Kampung KB Untuk Memperkuat Integrasi Program KKBPK di Sektor Lain

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							2.14.02.2.02.1 Penyediaan Data dan Informasi Keluarga
5.2	KLATEN CEKATAN	Cekatan singkatan dari Cepat, Kreatif, Akuntabel, Transparan), merupakan program unggulan untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat sesuai standar, kreatif (inovatif), transparan dan akuntabel sesuai dengan prinsip good governance, seperti Mall Pelayanan Publik (MPP), sipon keduten, matur dokter, titip bandaku, dan lain-lain.	Penanaman Modal	Mall Pelayanan Publik (MPP)	2.18.04 Program Pelayanan Penanaman Modal	2.18.04.2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	2.18.04.2.01.01 Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
			Kesehatan	Matur Dokter	1.02.02 Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	1.02.02.2.02 Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.02.02.2.02.38 Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
			Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Distribusi Alokasi melalui Ojek Online (DISKON OJOL)	2.14.03 Pembinaan keluarga Berencana	2.14.03.2.03 Pengendalian dan pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi serta pelayanan KB di daerah Kabupaten/Kota	2.14.03.2.03.01 Pengendalian dan pendistribusian alat dan obat kontrasepsi sarana penunjang pelayanan KB ke sabilitas kesehatan termasuk jejaring dan jejaringnya
			Pengawasan	1. Sekolah Pengelolaan Administrasi Desa	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02.01 Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
2. Cafe Integritas	6.01.03 Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	6.01.03.2.02 Pendampingan dan Asistensi		6.01.03.2.02.04 Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas Pemberantasan Korupsi			

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
			Kearsipan	Titip Bandaku (Titip Berkas Arsip Digitalku)	2.24.03 Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip statis dan Arsip hasil alih media kabupaten/kota	2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip
6. Pemerataan Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur							
6.1	KLATEN MANTAP	Mantap berarti Kabupaten Klaten dengan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah dalam kondisi mantap.	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Penataan kualitas infrastruktur (jalan, drainase perkotaan, irigasi, dan bangunan gedung), kualitas perumahan dan kawasan permukiman, serta konektivitas wilayah	1.03.10 Program Penyelenggaraan Jalan	1.03.10.2.01 Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	1.03.10.2.01.06 Pelebaran Jalan Menuju Standart 1.03.10.2.01.08 Rekonstruksi Jalan 1.03.10.2.01.09 Rehabilitasi Jalan 1.03.10.2.01.10 Pemeliharaan Berkala Jalan 1.03.10.2.01.11 Pemeliharaan Rutin Jalan 1.03.10.2.01.16 Penggantian Jembatan 1.03.10.2.01.17 Pelebaran Jembatan 1.03.10.2.01.19 Pemeliharaan Rutin Jembatan 1.03.10.2.01.20 Pemeliharaan Berkala Jembatan 1.03.06.2.01.05 Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan
					1.03.06 Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	1.03.06.2.01 Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam daerah Kabupaten/Kota	

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
					1.03.02 Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	1.03.02.2.02 Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada daerah Irigasi yang Luasnya di bawah 1.000 Hektar dalam 1 (satu) daerah	1.03.02.2.02.14 Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.15 Rehabilitasi Bendung Irigasi 1.03.02.2.02.21 Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan 1.03.02.2.02.22 Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi 1.03.02.2.02.27 Operasional Unit Pengelola Irigasi
			Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman		1.04.03 Program Kawasan Permukiman	1.04.03.2.03 Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	1.04.03.2.03.02 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (DAK) 1.04.03.2.03.05 Pemberian Bantuan Uang Sewa Rumah Tinggal Sementara bagi Masyarakat yang Terkena Program Peremajaan Permukiman Kumuh 1.04.03.2.03.06 Pelaksanaan Pembangunan Pemugaran/ Peremajaan Permukiman Kumuh
					1.04.04 Program Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.04.04.2.01 Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	1.04.04.2.01.01 Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh diluar Kawasan Permukiman Kumuh

No.	Program Unggulan	Deskripsi Program Unggulan	Urusan	Rincian	Indikasi Rencana Implementasi (Permendagri No. 90 Tahun 2019 Jo. Kepmendagri No. 050-3708 Tahun 2020)		
					Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
							dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha
			Perhubungan		2.15.02 Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	2.15.02.2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02.2.0201 Pembangunan prasarana jalan di jalan Kabupaten/ Kota
							2.15.02.2.0202 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota
							2.15.02.2.0203 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan
							2.15.02.2.0204 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan

Sumber: Hasil Analisis dan olah data, 2021

Pagu indikatif untuk program prioritas pembangunan daerah yang menggambarkan keterpaduan program prioritas terhadap sasaran pembangunan melalui tujuan, sasaram, strategi dan kebijakan yang dirumuskan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 6.3
Program Pembangunan Daerah Yang Disertai Pagu Indikatof Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Usuan Pemerintahan Terkini		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
Misi 1 : Mewujudkan tatanan kehidupan masyarakat yang berahlak dan berkepribadian																			
Tujuan 1: Mewujudkan masyarakat yang mempunyai tatanan kehidupan berakarater dan berkepribadian Pancasila, berjiwa gotong royong dan berkeadilan			Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	NA	0,63	0,68		0,68		0,7		0,73		0,78	0,78	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik		
	Sasaran 1: Terwujudnya ketertarikan, ketertarikan umum dan perlindungan masyarakat.		Presentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (pelekaobud) yang diselesaikan	%	100	100	100		100		100		100		100	100	8.01 Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Presentase perdamaian dan perdamaian yang ditegakkan	%	100	100	100		100		100		100		100	100	1.05. Ketertarikan dan ketertarikan serta perlindungan masyarakat		
		Program Peningkatan Ketertarikan dan Ketertarikan Umum															Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran		
			Presentase Satlumas yang terlatih dan dikukuhkan	%	41,50	42,00	42,00	-	43,00	-	44,00	-	45,00	-	47,00	-	47,00		
			Presentase Perdamaian dan Perdamaian yang ditegakkan	%	-	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentase gangguan Translumbus yang dapat dicegah	%	91,60	92,00	92,00	-	92,40	-	92,80	-	93,20	-	93,60	-	93,60		
			Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan sbluat peragakan hukum termasuk pelanggaran perdamaian dan perdamaian	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
		Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik															Badan Kesatuan Bangsa dan Politik		
			Presentase potensi konflik sosial yang terselesaikan	%	100,0	NA	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0		
			Presentase deteksi dini potensi konflik sosial	%	-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0		
Misi 2 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang baik, profesional, jujur, bersih, transparan, bertanggungjawab dan anti korupsi.																			

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Penerimaan Terkualifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
Tujuan 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih (Good and Clean Governance)			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,55	57,55	60,01		60,62		64		66		70		70	Seluruh Urusan	
	Sasaran 1: Meningkatnya akuntabilitas dan transparansi dan kinerja pemerintah daerah		Indeks Survei Persepsi Integritas (SPI)	Indeks	NA	NA	81		81		82		83		83		83	6.01. Pengawasan	
			Peringkat/ Nilai SAKIP	Nilai	NA	NA	62		62,5		63		64		65		65	4.01 Sekretariat Daerah 5.01 Perencanaan 5.05 Penelitian dan	
			Opini Laporan Keuangan	Opin	WTP	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	5.02. Keuangan Daerah	
			Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Indeks	3,0	3,0	3,2		3,4		3,6		3,8		4		4	2.16. Komunikasi dan Informatika 2.21 Perundangan 2.20 Statistik	
			Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	NA	NA	180		200		225		250		260		260	5.03. Manajemen 5.04 Pendidikan dan Pelatihan	
		Program Penyelenggaraan Pengawasan						1.256.843.000		1.287.977.000		1.432.184.000		1.414.386.000		1.555.636.000		6.947.026.000	Inspektorat
			Persentase pelaksanaan penggunaan wilayah 1	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase pelaksanaan penggunaan wilayah 2	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase pelaksanaan penggunaan wilayah 3	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase pelaksanaan penggunaan wilayah 4	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	500,00	-	
			Persentase pelaksanaan penggunaan kawasan	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Program Administrasi Umum						39.805.879.000		39.920.057.000		40.393.230.000		40.681.484.000		40.663.745.000		201.464.395.000	Sekretariat Daerah
			Persentase Dokumen Pendukung Pencapaian SAKIP Aspek Pelayanan yang terwujud	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase perangkat daerah yang kelengkapananya dievaluasi	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase kepatuhan OPD terhadap pemenuhan Standar Pelayanan Publik	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase Pelayanan Protokol dan Komunikasi Pimpinan terlaksana dengan baik	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
			Persentase pelayanan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terlaksana dengan baik	%	94,60	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan Pemerintahan Terkait
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Presentase layanan didukung administrasi kersekretarian Sisdas yg sesuai SOP	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
		Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah						2.228.781.000		2.197.807.000		2.190.230.000		2.186.020.000		2.742.709.000		11.545.517.000	Badan Perencanaan, Pengendalian dan Pengembangan Daerah
			Presentase komitmen penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Status kinerja pembangunan daerah dalam program RKPD	%	53,69	NA	77,00	-	78,00	-	79,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		
		Program Pengelolaan Keuangan Daerah						603.137.876.000		602.495.713.000		624.735.446.000		611.562.689.000		618.869.429.000		3.060.901.153.000	Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah
			Presentase OPD menyusun LK tepat waktu (2 bulan setelah TA berakhir)	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentase OPD menyusun Rencana Kegiatan Anggaran tepat waktu (sebelum Surat Edaran Bupati)	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentase penyerapan anggaran belanja Pemerintah Daerah	%	83,36	83,00	84,00	-	84,50	-	85,00	-	85,50	-	86,00	-	86,00		
		Program Pengelolaan Aplikasi Informatika						4.243.101.000		4.468.563.000		7.702.172.000		8.770.994.000		9.057.296.000		34.242.126.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
			Presentase penambahan akses (jistik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	50,00	54,90	58,82	-	62,75	-	66,67	-	70,59	-	74,51	-	74,51		
			Presentase penambahan akses internet di ruang publik	%	70,00	80,00	67,50	-	75,00	-	82,50	-	90,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentase layanan publik yang diintegrasikan secara online dan terintegrasi	%	40,74	53,70	62,96	-	72,22	-	81,48	-	90,74	-	100,00	-	100,00		
		Program Kepegawaian Daerah						2.106.368.000		2.271.856.000		2.312.144.000		2.269.309.000		2.251.909.000		11.211.586.000	Badan Kepegawaian dan Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
			Presentase Kualifikasi Calon ASN sesuai format	%	82,80	83,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		
			Presentase Kinerja ASN bernilai baik	%	100,00	100,00	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00	-	90,00		
			Presentase Kasus kepegawaian yang terselesaikan	%	100,00	100,00	90,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urutan Prioritas/ Urusan Terkait
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase Mutasi Pegawai Sesuai Kebutuhan Perangkat Daerah	%	100,00	100,00	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00		
	Sasaran 2: Meningkatkan kualitas pelayanan publik		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Indeks	81,89	NA	82	-	82,5	-	83	-	83,5	-	84	-	84	2.12. Keperluan dan Pencatatan Sipil 2.23 Perencanaan 2.24. Kearsipan 7.01 Kecamatan 4.02 Sekretariat	
		Program Pendafaran Penduduk						643.259.000		669.030.000		654.177.000		634.787.000		700.995.000		3.302.248.000	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
			Persentase perolehan KTP elektronik	%	97,87	97,87	99,02	-	99,03	-	99,04	-	99,05	-	99,06	-	99,06		
			Cakupan kepemilikan KK	%	97,80	97,80	97,90	-	98,00	-	98,02	-	98,04	-	98,06	-	98,06		
			Persentase anak usia tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	46,84	46,84	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	90,00		
		Program Pembinaan Perpustakaan						215.125.000		233.951.000		338.917.000		620.675.000		695.782.000		2.104.450.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Eksemplar	49.796		49.962	-	51.962	-	52.962	-	52.162	-	52.262	-	52.262		
			Persentase perpustakaan yang akses	%	21,99	24,55	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	25		
		Program Perindugan dan Penyelamatan Asap						46.619.000		61.544.000		89.344.000		192.019.000		201.132.000		590.658.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
			Asap asal rumah	Meter lari	0,00	0,00	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00		
			Persentase asap yang dihidmatkan	%	25,85	19,96	20,00	-	20,91	-	21,82	-	22,73	-	24,55	-	24,55		
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						80.140.901.200		80.264.210.200		82.155.000.200		80.599.428.200		86.458.994.200		409.618.534.000	Semua Kecamatan
			Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
		Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik						184.744.000		204.984.000		229.474.000		233.066.000		298.619.000		1.150.887.000	Semua Kecamatan
			Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urusan Pemerintahan Terkait
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan					9.374.610.000	9.279.691.000		9.974.391.000	9.532.778.000	12.330.297.000	50.491.767.000	Semua Kecamatan					
		Presentase lembaga masyarakat aktif	%	100,00	100,00	93,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	17.071.350.000	Semua Kecamatan
		Program Koordinasi Ketertarikan dan Keterlibatan umum					3.137.048.000	3.097.676.000		3.435.108.000	3.308.058.000	4.093.460.000	17.071.350.000	Semua Kecamatan					
		Presentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Keterlibatan Umum di Wilayah Kecamatan	%	100,00	100,00	96,00	-	96,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	3.577.984.000	Semua Kecamatan
		Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum					479.527.000	618.699.000		742.959.000	724.361.000	1.012.438.000	17.591.010.000	Semua Kecamatan					
		Presentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	80,00	80,00	96,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	17.591.010.000	Semua Kecamatan
		Program Pembinaan dan Penguasaan Pemerintahan Desa					2.642.906.000	3.009.960.000		3.544.828.000	3.584.989.000	4.808.327.000	17.591.010.000	Semua Kecamatan					
		Presentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100,00	100,00	95,00	-	97,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00	-	-	-
		Presentase desa tertib administrasi	%	100,00	100,00	94,00	-	95,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	-	-
		Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah					814.434.000	909.219.000		988.096.000	911.603.000	1.058.590.000	4.681.942.000	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan					
		Presentase pemanfaatan hasil penelitian	%	63,00	63,00	54,80	-	59,40	-	64,00	-	68,60	-	73,20	-	73,20	-	-	-
		Pertumbuhan inovasi perangkat daerah	%	11,12	13,34	14,68	-	15,00	-	15,50	-	16,50	-	16,50	-	16,50	-	-	-
		Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD					18.395.698.000	19.760.051.000		21.996.330.000	21.563.534.000	22.672.994.000	104.388.607.000	Sekretariat DPRD					
		Presentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitas	%	66,67	75,00	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	75,00	-	-	-
		Presentase pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungan tugas dan fungsi DPRD dalam hal Fasilitas	%	100,00	NA	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Perencanaan Terkai
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan pelayanan sekretariat DPRD terhadap Dukungannya tugas dan fungsi DPRD Kabupaten Purbalingga	%	100,00	NA	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
Misi 3 : Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi kerakyatan																			
Tujuan 3: Meningkatkan kemandirian ekonomi daerah berbasis sektor unggulan daerah berdasarkan ekonomi			Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,18	1,03	2,52		3,51		4,45		5,13		5,47		5,47	Seluruh Urusan	
Sasaran 1: Mengoptimalkan sektor unggulan dalam pertumbuhan ekonomi			Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	-1,21	0,05	1,47		2,24		3,38		3,84		4,09		4,09	3.31. Perindustrian 2.17. Koperasi dan UKM	
			Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	-4,79	-0,85	1,24		1,79		2,29		3,43		3,96		3,96	3.30 Perdagangan	
			Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	2,52	2,63		2,68		2,88		3,04		3,14		3,14	3.27 Pertanian 3.25 Kelautan dan Perikanan	
			Pertumbuhan PAD sektor	%	2,59	2,84	3,13		3,44		3,79		4,16		4,58		4,58	3.26 Pariwisata	
		Program Perencanaan dan Pembangunan Industri					2.292.481.000		1.199.732.000		1.501.905.000		1.774.716.000		2.059.438.000		8.828.272.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Penyediaan Industri Kecil Menengah (IKM) yang dibina	%	11,40	13,20	17,31	-	21,44	-	25,50	-	29,48	-	33,46	-	33,46		
		Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan					4.021.897.000		4.511.388.000		6.373.216.000		6.355.145.000		6.365.972.000		27.527.618.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Penyediaan pasar rakyat/tradisional tervehadami	%	34,00	38,00	42,00	-	46,00	-	50,00	-	54,00	-	58,00	-	58,00		
			Penyediaan PKL yang terbina	%	25,70	34,20	43,80	-	51,40	-	60,00	-	68,50	-	77,00	-	77,00		
			Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	#####	#####	#####	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####	-	#####		
		Program Pengembangan Ekspor					281.369.000		287.540.000		681.786.000		669.155.000		664.025.000		2.553.875.000	Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan	
			Jumlah komoditas yang mampu ekspor	jenis	2	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-		
		Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian					1.985.812.000		2.835.730.000		4.540.299.000		3.660.957.000		3.502.969.000		16.525.767.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	67,22	66,98	66,99	-	67,01	-	67,03	-	67,07	-	67,13	-	67,13		
			Produktivitas cabe	Kw/Ha	8,92	8,90	8,98	-	9,06	-	9,15	-	9,25	-	9,34	-	9,34		
			Produktivitas tembakau rajang	Kw/Ha	12	12,10	12,2	-	12,21	-	12,22	-	12,25	-	12,28	-	12,28		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Saasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Uraian Pemertarikan Terkini		
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026			Kondisi Akhir	
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		Target	Rp
			Produktivitas tambahan asupan	Kw/Ha	9,81	9,81	9,83	-	9,86	-	9,88	-	9,9	-	9,91	-	9,91		
		Program Penggalian Perikanan Tangkap					30.165.000		49.576.000		49.405.000		72.735.000		115.483.000		317.364.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Produksi perikanan tangkap	ton	184	537	543	-	547	-	552	-	557	-	562	-	562		
		Program Penggalian Perikanan Budidaya					975.310.000		1.274.096.000		1.432.739.000		1.561.362.000		1.342.484.000		6.585.991.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	
			Produksi perikanan budidaya	ton	27.604	28.315	29.165	-	30.039	-	30.940	-	31.500	-	32.000	-	32.000		
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata					1.913.443.390		2.180.000.000		6.050.000.000		5.810.000.000		5.850.000.000		21.773.443.390	Dinas Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga serta Pariwisata	
			Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata (sustainable)	%	72,00	73,00		74,00		75,00		78,00		80,00		80,00			
		Program Pemasaran Pariwisata					155.849.000		173.515.000		1.012.798.000		1.076.467.000		1.183.696.000		3.602.325.000	Dinas Kebudayaan, Kepemanduan dan Olahraga serta	
			Tingkat intensitas promosi pariwisata	%	68,00	NA	68,00		70,00		72,00		73,00		75,00		75,00		
	Sasaran 2. Meningkatnya investasi daerah		Persentase peningkatan investasi PMDN	%	-64	NA	10		10		10		10		10		50	2.18 Penanaman Modal	
			Persentase peningkatan investasi PMA	%	-59	NA	1		1		1		1		1		5	2.18 Penanaman Modal	
		Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal					301.643.000		133.855.000		424.882.000		417.010.000		413.813.000		1.691.203.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	N/A	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		
		Program Promosi Penanaman Modal					703.832.000		208.218.000		1.086.905.000		1.042.525.000		1.058.590.000		4.100.070.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	0	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		
		Program Pelayanan Penanaman Modal					351.916.000		173.515.000		172.917.000		189.110.000		173.224.000		1.060.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Penerimaan Terkualifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal					326.780.000		49.576.000			74.108.000		72.735.000		48.118.000		571.317.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	N/A	N/A	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	
Misi 4: Mewujudkan pemerataan sarana prasarana wilayah yang berkualitas sesuai rencana tata ruang wilayah																			
Tujuan 4: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur yang merata dan		Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	74,58	75,45	76,11	-	76,72	-	77,18	-	77,51	-	77,72	-	77,72	-	77,72	Seluruh Urusan
		Rasio konektivitas	Rasio	0,09	0,09	0,12	-	0,12	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	0,15	-	0,15	2.15. Perhubungan
Sasaran 1: Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur daerah		Presentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	90,86	91,06	-	91,26	-	91,46	-	91,66	-	91,86	-	91,86	-	91,86	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Presentase drainase dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	-	61,48	-	61,50	-	61,51	-	61,52	-	61,52	-	61,52	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Presentase rigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	39,2	41,5	-	43,6	-	44,9	-	45,6	-	46,2	-	46,2	-	46,2	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
	Program Penyelenggaraan Jalan					97.344.238.000		111.739.678.000			122.818.452.000		124.493.449.000		196.577.057.000		652.969.871.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Presentase jalan kondisi baik	%	66,25	67,62	67,72	-	67,82	-	67,93	-	68,05	-	68,22	-	68,22	-	68,22	
		Presentase jembatan kabupaten dalam kondisi baik	%	63,90	63,90	64,22	-	65,81	-	66,77	-	68,05	-	70,61	-	70,61	-	70,61	
	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase					251.369.000		3.470.299.000			3.952.382.000		3.879.160.000		3.849.416.000		15.402.626.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Presentase drainase perkotaan dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	-	61,46	-	61,50	-	61,51	-	61,52	-	61,52	-	61,52	
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)					12.065.689.000		24.926.658.000			16.367.801.000		23.895.622.000		17.384.925.000		94.640.695.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Rasio luas daerah rigasi perencanaan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	%	0,21	0,33	0,31	-	0,31	-	0,31	-	0,31	-	0,31	-	0,31	-	0,31	
	Sasaran 2: Meningkatkan capaian universal access (100-d-100)																		
		Presentase capaian universal access (tunah, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	-	98,87	-	99,43	-	99,99	-	100	-	100,00	-	100,00	1.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 1.04. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Program Kawasan Permukiman					1.457.938.000		1.983.028.000			2.124.406.000		2.085.049.000		2.069.062.000		9.719.483.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Presentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Me stens Ataman	%	100,00	100,00	0,05	-	0,05	-	0,04	-	0,03	-	0,02	-	0,02	-	0,02	

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Urutan Prioritas/ Urutan Terkini
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh					2.337.728.000		2.456.074.000		3.544.032.000		3.279.636.000		3.187.536.000		14.805.006.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	94,03	94,03	95,23	-	96,43	-	97,63	-	98,83	-	100,00	-	100,00		
		Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum					1.357.390.000		4.957.570.000		4.446.430.000		4.848.950.000		4.330.593.000		19.940.933.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase Rumah Tangga yang Memenuhi Hunian dengan Akses Air Minum Layak	%	18,16	92,45	94,02	-	95,59	-	97,16	-	98,73	-	100,00	-	100,00		
		Program Pengelolan dan Pengembangan Sistem Air					5.127.918.000		4.957.570.000		4.446.430.000		5.382.334.000		4.715.535.000		24.629.787.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase rumah tangga yang menempati hunian dengan akses sanitasi (air limbah domestik) layak dan aman	%	0,85	1,06	1,27	-	1,48	-	1,69	-	1,90	-	2,21	-	2,21		
	Sasaran 3: Terwujudnya pemanfaatan kawasan sesuai dengan peruntukannya		Persentase kerangkaan penataan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88	88,2	88,4	-	88,6	-	88,8	-	89,0	-	89,2	-	89,2	I.03. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
		Program Penyelenggaraan Penataan Ruang					2.212.043.000		2.116.882.000		2.371.429.000		2.497.209.000		3.320.122.000		12.517.685.000	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			Persentase dokumen Rencana Tata Ruang yang disusun	%	29,00	29,00	70,50	-	70,50	-	70,50	-	70,50	-	100,00	-	100,00		
			Persentase pelayanan ketatarungannya	%	50,00	50,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase pengendalian pemanfaatan ruang	%	25,00	25,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
		Program Peningkatan Tanah					251.369.000		198.303.000		247.024.000		242.448.000		240.589.000		1.179.733.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	
			Persentase dokumen penatausahaan tanah yang terwujud	%	0,00	NA	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
	Sasaran 4: Meningkatnya kualitas manajemen pelayanan publik		Kinerja Laba Lulus (Level Of Service)	Nilai	0,65	0,64	0,62	-	0,61	-	0,58	-	0,56	-	0,54	-	0,54	2.15. Peningkatan	

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Pemertanahan Terkualifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Penyelenggaraan Lahu Lintas dan Angkutan Jalan (LALAH)	Perentase kecekaman lahu lintas	%	0,90	0,90	0,80	-	0,70	-	0,60	-	0,50	-	0,40	-	0,40	Dinas Perhubungan	
Misi 5 : Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang cerdas, sehat, berbudaya, dan responsif gender																			
Tujuan 5: Meningkatkan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing dengan mengedepankan budaya ketimuran			Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,46	-	76,88	-	77,3	-	77,73	-	78,15	-	78,15	1.01. Pendidikan	
			Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,49	-	11,69	-	11,09	-	10,49	-	9,89	-	9,89	1.02. Kesehatan	
			Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,17	96,17*	96,46	-	96,75	-	97,04	-	97,33	-	97,62	-	97,62	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
Sasaran 1: Meningkatkan SDM yang cerdas dan berdaya saing			Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,25*	13,52	-	13,62	-	13,73	-	13,84	-	13,94	-	13,94	1.01. Pendidikan	
			Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,58	8,58*	8,64	-	8,72	-	8,8	-	8,88	-	8,96	-	8,96	1.01. Pendidikan	
			Persentase pemajuan kebudayaan	%	10,9	0	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	25	-	2.22. Kebudayaan
		Program Pengelolaan Pendidikan						154.069.667.000		157.196.245.000		161.631.992.000		156.126.865.000		157.373.144.000		786.399.913.000	Dinas Pendidikan - SD Negeri - SMP Negeri - SIK Cemas
			APM SD/Me/Paket A	%	88,54	88,54	88,70	-	88,95	-	89,20	-	89,45	-	90,00	-	90,00		
			APM SMP/MTs/Paket B	%	71,14	71,14	71,35	-	71,60	-	71,85	-	72,10	-	72,35	-	72,35		
			APK PAUD	%	80,60	80,60	80,90	-	80,15	-	80,45	-	80,70	-	90,00	-	90,00		
			Persentase Pradiklat yang	%	99,59	99,59	99,65	-	99,75	-	99,80	-	99,90	-	99,95	-	99,95		
			Persentase Guru yang	%	87,97	87,97	88,10	-	88,70	-	89,20	-	89,85	-	90,00	-	90,00		
			Persentase SD berakreditasi minimal B	%	97,81	97,81	97,90	-	98,00	-	98,25	-	98,60	-	98,90	-	98,90		
			Persentase SMP berakreditasi minimal B	%	86,13	86,13	86,50	-	86,90	-	87,10	-	87,35	-	88,00	-	88,00		
			Persentase PAUD dan PNF berakreditasi minimal B	%	36,70	36,70	36,75	-	36,95	-	37,10	-	37,55	-	37,85	-	37,85		
			APK SD/Me/Paket A	%	88,54	88,54	96,45	-	96,90	-	97,10	-	97,87	-	98,00	-	98,00		
			APK SMP/MTs /Paket B	%	100,48	100,48	98,00	-	98,45	-	98,60	-	98,70	-	98,90	-	98,90		
			APK Pendidikan Kesetaraan lain 16-18 tahun	%	0,00	0,00	1,50	-	1,85	-	1,95	-	2,10	-	2,50	-	2,50		
		Program Pengembangan Kebudayaan						1.156.296.000		1.165.029.000		3.056.156.000		2.796.317.000		2.911.121.000		11.086.919.000	Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga dan Pariwisata
			Perentase adat istiadat dan nilai yang dilestarikan	%	0	25	20	-	25	-	25	-	30	-	30	-	30		
		Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya						418.780.000		356.945.000		523.691.000		545.992.000		543.730.000		2.389.138.000	Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga dan Pariwisata

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Pemertahanan Terkai
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	9,8	13,6	14	-	17	-	21	-	25	-	28	-	28		
		Program Pengelolaan Perencanaan																Dinas Kebudayaan, Kependidikan dan Olahraga dan Pariwisata	
			Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan	%	0	0	0	-	0	-	50	-	50	-	50	-	50		
	Sasaran 2: Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,78*	76,84	-	76,89	-	76,93	-	76,98	-	77,02	-	77,02	1.02. Kesehatan 2.19. Pmsda dan Olahraga	
		Program Pemecahan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat					86.465.858.000	-	104.205.633.000	-	108.668.574.000	-	101.591.433.000	-	94.170.760.000	-	495.102.258.000	- Dinas Kesehatan - RSD Bagan Waras - 34 Puskesmas	
			Persentase Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan ibu hamil	%	93,44	93,27	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase Ibu bersalin mendapatkan pelayanan prenatal	%	99,99	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan ibu dan bayi	%	96,70	97,80	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	%	92,71	95,77	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan	%	31,13	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining	%	73,26	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,14	74,50	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,28	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,76	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan	%	88,32	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase orang terduga TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar	%	29,28	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV	%	86,08	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Saasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Penerimaan Teknis
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Penyediaan atuning (pendek dan sangat pendek) pada anak	%	10,61	14,08	11,30	-	11,00	-	10,70	-	10,50	-	10,30	-	10,30		
			Cakupan STBM	%	24,90	50,00	70,00	-	90,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Cakupan Dewa/keharusan Universal Child Immunisation (UCI)	%	24,90	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Cakupan KLB yang dilakukikan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Cakupan halita penunamia yang ditangani	%	29,30	12,00	12,00	-	15,00	-	20,00	-	25,00	-	30,00	-	30,00		
			Penderita diare yang ditangani	%	4,40	5,00	6,00	-	7,00	-	8,00	-	9,00	-	10,00	-	10,00		
			Angka Kejadian HIV	/1000 penduduk	0,14	0,14	0,19	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18		
			Insiden Tuberkulosis (ITB) per	/100.000	24,26	30,00	35,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-	55,00	-	55,00		
			Angka kejadian Malaria	/100.000	0,003	< 1	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1		
			Presentasi orang yang memerlukan intervensi	%	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00		
			Angka Kejadian DBD	/100.000	33,45	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00		
			Presentasi Prilaku Memakai JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	89,00	91,00	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00		
			Presentasi Puskesmas	%	100,00	97,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentasi RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentasi puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentasi pelayanan lab klinis dan lab air	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentasi Sistem Informasi Kesehatan	%	60,00	60,00	60,00	-	70,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00		
		Program Pembinaan Keluarga							8.782.305.000		8.871.602.000		9.524.923.000		9.436.318.000		9.372.627.000	45.987.775.000 Dinas Sosial PPPA serta Daiduk dan KB	
			Angka pemenuhan kontanemp/CFR	%	70,9	NA	71,5	-	72	-	72,5	-	73	-	73,5	-	73,5		
			Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi	%	16,95	NA	15,95	-	15,45	-	14,95	-	14,45	-	13,95	-	13,95		
		Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)							928.355.000		915.465.000		953.315.000		945.352.000		947.727.000	4.690.214.000 Dinas Sosial PPPA serta Daiduk dan KB	
			Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	79	NA	82	-	83	-	84	-	85	-	86	-	86		
			Cakupan Anggota BKR yang menjadi peserta KB	%	70,71	NA	75,42	-	75,92	-	76,42	-	76,92	-	77,42	-	77,42		

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Penerimaan Terkualifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Cakupan Anggota BKI yang menjadi peserta KB	%	73,89	NA	64,88	-	65,38	-	65,88	-	66,38	-	66,88	-	66,88		
			Cakupan Anggota UPPKS yang menjadi peserta KB	%	69,24	NA	63,29	-	63,79	-	64,29	-	64,79	-	65,29	-	65,29		
			Indeks Pembangunan Keluarga (IPK)		NA	NA	0,00	-	0,00	-	54,00	-	55,00	-	56,00	-	56,00		
	Sasaran 3: Meningkatkan kesejahteraan masyarakat		Persentase PMS yang terlayani	%	90,32	65	67,5	-	68	-	68,5	-	69	-	69,5	-	69,5	1.06. Sosial	
			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,46	5,31	5,16	-	4,97	-	4,50	-	4,25	-	4,25	-	4,25	2.07. Tenaga Kerja	
			Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	-	0,6934	-	0,6934	-	0,6956	-	0,6974	-	0,6974	2.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
		Program Pemberdayaan Sosial																Dinas Sosial PPA serta Dinkes dan KB	
			Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan peningkatan	%	96,00	NA	97,00	-	97,50	-	98,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
		Program Rehabilitasi Sosial																Dinas Sosial PPA serta Dinkes dan KB	
			Persentase PMS yang memperoleh layanan rehabilitasi sosial dihar pasti	%	80,00	NA	65,50	-	66,00	-	66,50	-	67,00	-	67,50	-	67,50		
		Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja																Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase tenaga kerja terserap di komunitas	%	3,51	3,6	3,75	-	4,12	-	4,61	-	5,22	-	5,95	-	5,95		
		Program Pempatan Tenaga Kerja																Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
			Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21,11	21,50	21,00	-	22,50	-	23,00	-	24,00	-	24,50	-	24,50		
		Program Administrasi Pemerintahan Desa																Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
			Persentase BUMDes berkembang dan Maki	%	8,68	12,30	12,79	-	15,86	-	19,18	-	21,23	-	24,3	-	24,3		
			Persentase desa yang telah menerapkan aplikasi SISKEUPDES dalam	%	66,67	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
	Sasaran 4: Meningkatkan keberdayaan perempuan dan		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	72,35	72,68	73,34	-	73,67	-	74,00	-	74,33	-	74,66	-	74,66	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Pemertanahan Terkini
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
					Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
			Sisa Kelengkapan Layak Anak	Nilai	NA	710	725		740		755		770		785		785	2.08. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
		Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan					300.894.000		237.964.000		268.762.000		373.370.000		322.389.000		1.403.379.000	Dinas Sosial PPPA serta Daiduk dan KB	
			Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,2	NA	0,4	-	0,6	-	0,7	-	0,8	-	0,9	-	0,9		
		Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)					300.838.000		323.234.000		311.281.000		368.521.000		384.942.000		1.688.786.000	Dinas Sosial PPPA serta Daiduk dan KB	
			Persentase desa/kecamatan layak anak	%	65,10	NA	70,10	-	76,30	-	82,50	-	86,30	-	100,00	-	100,00		
Misi 6 : Mewujudkan kualitas pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan																			
Tujuan 6: Mewujudkan pengelolaan lingkungan hidup yang berkualitas dan berkelanjutan			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	52,85	54,35	54,68		55,01		55,34		55,67		55,99		55,99	2.11. Lingkungan Hidup	
	Sasaran 1: Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		Indeks kualitas air	Indeks	36,15	36,39	36,63		36,87		37,11		37,35		37,59		37,59	2.11. Lingkungan Hidup	
			Indeks kualitas udara	Indeks	76,82	77,31	77,80		78,29		78,78		79,27		79,76		79,76	2.11. Lingkungan Hidup	
			Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,54	42,72	42,9		43,08		43,26		43,44		43,62		43,62	2.11. Lingkungan Hidup	
		Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup					1.829.963.000		1.779.768.000		2.324.495.000		2.220.819.000		1.737.049.000		9.892.094.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Cakupan pemantauan kualitas air	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Persentase kampanye iklim yang terbentuk	%	10	10	30	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100		
		Program Pengelolaan Kelembagaan Hayati (Kehati)					5.716.120.000		5.902.395.000		8.716.975.000		8.775.350.000		11.779.807.000		40.890.647.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan	
			Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	66,66	66,66	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
	Sasaran 2: Meningkatkan penanganan dan pengurangan sampah serta limbah dan bahan beracun		Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	56,95	58,95	59,95		61,95		63,95		65,95		66,95		66,95	2.11. Lingkungan Hidup	

Misi/ Tujuan Pembangunan Daerah	Sasaran	Program Pembangunan Daerah	Indikator	Satuan	Kondisi Awal		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Uraian Penerimaan Terkualifikasi
					Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi Akhir		
							Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Program Pengeluaran Pemangkuhan					12.359.860.000		12.188.253.000		12.146.232.000		11.921.210.000		11.829.804.000		60.445.359.000	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebumahaan	
			Presentase timbulan sampah perkotaan yang tertangani	%	98,09	71,94	74,09	-	76,32	-	78,61	-	80,96	-	83,39	-	83,39		
			Presentase jumlah sampah yang terkurangi	%	52,73	24,00	26,00	-	28,00	-	30,00	-	32,00	-	34,00	-	34,00		
	Sasaran 3: Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana		Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,92	0,92	-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	0,92	-	0,92	1.05. Keteraturan dan ketertibn serta perlindungan masyarakat	
		Program Pemanggulangan Bencana					5.047.480.000		4.959.673.000		5.224.566.000		5.016.152.000		5.056.876.000		25.304.747.000	Badan Pemanggulangan Bencana Daerah	
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00		
			Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyuluhan dan evakuasi korban bencana	%	70,12	72,78	72,78	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00		
			Presentase kelompok rentan bencana yang aktif	%	40,00	40,00	50,00	-	51,00	-	52,00	-	53,00	-	55,00	-	55,00		
			Presentase pemulihan pasca bencana yang terrealisasi	%	100,00	60,00	61,00	-	62,00	-	63,00	-	65,00	-	70,00	-	70,00		

BAB VII

KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Kerangka pendanaan pembangunan dan program Perangkat Daerah memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dalam Renstra perangkat daerah beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatifnya. Perangkat daerah bertanggungjawab terhadap pencapaian kinerja sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya. Kerangka Pendanaan Pembangunan Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 meliputi :

1. Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Berdasarkan perkembangan capaian pendapatan daerah selama kurun waktu tahun 2016-2019, pendapatan daerah Kabupaten Klaten mengalami peningkatan setiap tahunnya. Saat Pandemi Covid-19 yang melanda tahun 2020, pendapatan daerah mengalami penurunan.

Untuk mengetahui kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada kebijakan Pendapatan, Pembelanjaan serta Pembiayaan dalam APBD. Pengelolaan keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi Pendapatan Daerah, efisiensi dan efektivitas Belanja Daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi Pembiayaan Daerah. Efisiensi serta efektifitas Belanja dan Pembiayaan Daerah dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap proporsi penggunaan anggaran dan analisis pembiayaan.

Untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah diperlukan strategi dan kebijakan yang tepat, antara lain:

- a. Menyusun kajian potensi pajak dan retribusi daerah;
- b. Perbaikan regulasi pajak dan retribusi daerah;
- c. Peningkatan kapasitas kelembagaan pengelola PAD;
- d. Pemanfaatan teknologi informasi dalam penarikan pajak dan retribusi daerah;
- e. Penertiban ijin usaha.

2. Belanja Daerah

Belanja Daerah merupakan belanja yang menjadi kewenangan daerah, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja daerah diklasifikasikan menjadi 4 (empat) jenis belanja, yaitu Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer. Adapun kerangka pendanaan belanja daerah diantaranya diarahkan untuk :

- a. Melaksanakan program prioritas sesuai dengan visi dan misi Kepala Daerah;
- b. Melaksanakan pemenuhan belanja daerah yang sifatnya wajib untuk menjamin pelayanan dasar masyarakat sesuai dengan SPM (Standar Pelayanan Minimum)
- c. Melaksanakan urusan-urusan yang menjadi kewenangan daerah;

3. Pembiayaan

Pembiayaan Daerah meliputi semua penerimaan yang dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang perlu di bayar kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Untuk pembiayaan daerah, pengeluaran pembiayaan diperlukan dalam rangka penyiapan dana cadangan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah ataupun untuk penyertaan (investasi) daerah. Untuk penyertaan modal tersebut diantaranya digunakan untuk pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Secara keseluruhan struktur pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah Kabupaten Klaten dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 7.1.
Proyeksi Struktur Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Kabupaten Klaten

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4	PENDAPATAN	2.520.987.884.551	2.508.342.505.200	2.536.777.602.200	2.567.152.606.200	2.599.068.166.200	2.687.852.118.200
4.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH	249.063.886.351	274.449.465.000	302.884.562.000	333.259.566.000	365.175.126.000	453.959.078.000
4.1.1	Pajak Daerah	103.372.962.000	113.710.259.000	126.281.284.000	138.909.413.000	153.800.355.000	170.180.390.000
4.1.2	Retribusi Daerah	13.967.805.000	15.673.215.000	17.325.109.000	18.566.543.000	19.862.311.000	22.291.856.000
4.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	12.197.839.911	13.273.183.000	14.586.842.000	16.916.184.000	19.261.993.000	23.625.093.000
4.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	119.525.279.440	131.792.808.000	144.691.327.000	158.867.426.000	172.250.467.000	237.861.739.000
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.148.491.398.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200	2.110.460.440.200
4.2.1	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT	1.968.844.129.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000	1.930.813.171.000
4.2.1.1	Dana Perimbangan	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000	1.539.236.676.000
4.2.1.1.1	Dana Bagi Hasil (DBH)	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000	38.345.857.000
4.2.1.1.2	Dana Alokasi Umum (DAU)	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000	1.149.421.184.000
4.2.1.1.3	Dana Transfer Khusus	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000	351.469.635.000
4.2.1.2	Dana Insentif Daerah (DID)	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000	10.729.894.000
4.2.1.5	Dana Desa	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000	380.846.601.000
4.2.2	TRANSFER ANTAR DAERAH	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200	179.647.269.200
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000	123.432.600.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
4.3.1	Pendapatan Hibah	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000	13.040.000.000
4.3.3	Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000	110.392.600.000
5	BELANJA	3.250.527.783.541	2.666.268.973.200	2.687.641.205.200	2.803.037.995.200	2.747.343.549.200	2.831.093.513.200
5.1	BELANJA OPERASI	1.856.311.721.298	1.853.589.539.200	1.800.879.808.200	1.946.300.592.200	1.881.622.430.200	1.921.982.120.200
5.1.1	Belanja Pegawai	1.217.830.195.949	1.223.919.345.200	1.230.038.941.200	1.236.189.136.200	1.242.370.083.200	1.248.581.933.200
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	591.166.498.849	578.636.597.000	519.331.950.000	613.602.539.000	587.743.430.000	621.891.270.000
5.1.4	Belanja Subsidi	2.000.000.000	2.024.680.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000	2.500.000.000
5.1.5	Belanja Hibah	37.920.026.500	39.422.057.000	39.422.057.000	84.422.057.000	39.422.057.000	39.422.057.000
5.1.6	Belanja Bantuan Sosial	7.395.000.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000	9.586.860.000
5.2	BELANJA MODAL	202.968.198.796	229.117.780.000	304.777.451.000	273.366.501.000	280.731.546.000	322.240.862.000
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	15.000.000.000	11.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000	8.000.000.000
5,4	BELANJA TRANSFER	598.542.381.800	572.561.654.000	573.983.946.000	575.370.902.000	576.989.573.000	578.870.531.000
5.4.1	Belanja Bagi Hasil	11.734.076.700	12.938.348.000	14.360.640.000	15.747.596.000	17.366.267.000	19.247.225.000
5.4.2	Belanja Bantuan Keuangan	586.808.305.100	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000	559.623.306.000
	SURPLUS/(DEFISIT)	(189.865.375.343)	(157.926.468.000)	(150.863.603.000)	(235.885.389.000)	(148.275.383.000)	(143.241.395.000)
6	PEMBIAYAAN DAERAH						
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	240.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000

KODE	URAIAN	2021 (Rp)	2022 (Rp)	2023 (Rp)	2024 (Rp)	2025 (Rp)	2026 (Rp)
6.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA)	208.865.375.343	177.926.468.000	170.863.603.000	195.885.389.000	168.275.383.000	163.241.395.000
6.1.2	Pencairan Dana Cadangan	-	-	-	45.000.000.000	-	-
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	19.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000	5.000.000.000	20.000.000.000	20.000.000.000
6.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	15.000.000.000	15.000.000.000	15.000.000.000	-	15.000.000.000	15.000.000.000
6.2.2	Penyertaan Modal Daerah	4.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000	5.000.000.000
	PEMBIAYAAN NETTO	189.865.375.343	157.926.468.000	150.863.603.000	235.885.389.000	148.275.383.000	143.241.395.000
	Sisa Lebih Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-	-	-

Sumber : Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2021, diolah

Rencana program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan tahun 2021-2026 dijabarkan dalam 6 (enam) urusan wajib berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, 6 (delapan) urusan pilihan, 2 (dua) unsur pendukung urusan pemerintahan, 5 (enam) unsur penunjang urusan pemerintahan, 1 (satu) unsur pengawasan urusan pemerintahan, dan 1 (satu) unsur pemerintahan umum.

7.1. Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pendidikan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan;
- b. Program Pengembangan Kurikulum;
- c. Program Pendidikan dan Tenaga Kependidikan;
- d. Program Pengembangan Bahasa dan Sastra.

2. Kesehatan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesehatan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pekerjaan umum dan penataan ruang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Jalan;
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- c. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- d. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- e. Program Pengembangan Permukiman;
- f. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang;
- g. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- h. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah;
- i. Program Penataan Bangunan Gedung;
- j. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- k. Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional.

4. Perumahan dan Kawasan Permukiman

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perumahan dan kawasan permukiman tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
- b. Program Kawasan Permukiman;
- c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh;
- d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU);
- e. Program Peningkatan Pelayanan Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

5. Ketentraman Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan ketentraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- b. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
- c. Program Penanggulangan Bencana.

6. Sosial

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan sosial tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Rehabilitasi Sosial;
- c. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- d. Program Penanganan Bencana;
- e. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan.

7.2. Urusan Pemerintah Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan wajib pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Kerja

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan tenaga kerja tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Tenaga Kerja;
- b. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- c. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- d. Program Hubungan Industrial.

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- c. Program Perlindungan Perempuan;
- d. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA);
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan.

4. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan;
- b. Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan;
- c. Program Redistribusi Tanah, dan Ganti Kerugian Program Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee;
- d. Program Penatagunaan Tanah.

5. Lingkungan Hidup

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan lingkungan hidup tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- i. Program Pengelolaan Persampahan.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Kependudukan dan Pencatatan Sipil tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Pengelolaan Profil Kependudukan

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pemberdayaan masyarakat dan desa tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- b. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- c. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat.

8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengendalian Penduduk
- b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
- c. Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS).

9. Perhubungan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perhubungan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

10. Komunikasi dan Informatika

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan komunikasi dan informatika tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik;
- b. Program Pengelolaan Aplikasi Informatika.

11. Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah;

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan koperasi usaha kecil dan menengah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam;
- b. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
- c. Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi;
- d. Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian;
- e. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
- f. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil dan Usaha Mikro (UMKM);
- g. Program Pengembangan UMKM.

12. Penanaman Modal

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penanaman modal tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
- b. Program Promosi Penanaman Modal;
- c. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- d. Program Pelayanan Penanaman Modal;
- e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal.

13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepemudaan dan olahraga tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
- b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan statistik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan persandian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

16. Kebudayaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kebudayaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Kebudayaan;
- b. Program Pengembangan Kesenian Tradisional;
- c. Program Pembinaan Sejarah;
- d. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya;
- e. Program Pengelolaan Permuseuman.

17. Perpustakaan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perpustakaan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembinaan Perpustakaan

18. Kearsipan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kearsipan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip.

7.3. Urusan Pemerintahan Pilihan

Nomenklatur Program yang akan digunakan di urusan pemerintahan pilihan adalah sebagai berikut:

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kelautan dan perikanan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pariwisata tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual;
- d. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

3. Pertanian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pertanian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Perdagangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perdagangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan;

- b. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- c. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- d. Program Pengembangan Ekspor;
- e. Program Standarisasi dan Perlindungan Konsumen;
- f. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk dalam Negeri.

5. Perindustrian

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perindustrian tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengelolaan Sistem Industri Nasional.

6. Transmigrasi

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan transmigrasi tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi

7.4. Urusan Penunjang Pemerintah

Nomenklatur program yang akan digunakan di urusan penunjang pemerintahan adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat Daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/ kota;
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan Sekretariat DPRD tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD

3. Perencanaan Pembangunan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan perencanaan pembangunan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Keuangan Daerah

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan keuangan daerah tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah.

5. Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Kepegawaian Daerah

- b. Program Pengembangan Sumber Daya Manusia

6. Penelitian dan Pengembangan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan penelitian dan pengembangan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

7. Pengawasan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan pengawasan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah;
- b. Program Penyelenggaraan Pengawasan;
- c. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi;

8. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kesatuan bangsa dan politik tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik;
- b. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- c. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- d. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi dan Sosial Budaya;
- e. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik.

9. Kewilayahan

Program yang akan dilaksanakan untuk urusan kewilayahan tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- b. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- c. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Program prioritas beserta indikator kinerja, target kinerja dan pagu indikatif masing-masing perangkat daerah sebagaimana tercantum pada Tabel 7.1.

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab		
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026						
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			
		Persentase orang usia 15- 59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,26	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	%	73,14	74,50	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	32,28	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	%	90,76	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	%	88,32	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase orang serangga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	%	29,28	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	%	86,08	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun /salia	%	10,61	14,08	11,30	-	11,00	-	10,70	-	10,50	-	10,30	-	10,30	-	10,30	-	
		Cakupan STBM	%	24,90	50,00	70,00	-	90,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan Desa/keurahan Universal Child Immunisation (UCI)	%	24,90	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan KLB yang dilakukan penyelidikan epidemiologi < 24 jam	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan balita pneumonia yang ditangani	%	29,30	12,00	12,00	-	15,00	-	20,00	-	25,00	-	30,00	-	30,00	-	30,00	-	
		Penderita diare yang ditangani	%	4,40	5,00	6,00	-	7,00	-	8,00	-	9,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	
		Angka Kejadian HIV /1000 penduduk yang tidak terinfeksi HIV		0,14	0,14	0,19	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	0,18	-	
		Insiden Tuberkulosis (Tb) per 100.000 penduduk	/100.000 penduduk	24,26	30,00	35,00	-	40,00	-	45,00	-	50,00	-	55,00	-	55,00	-	55,00	-	
		Angka kejadian Malaria	/100.000	0,003	< 1	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	< 1	-	
		Persentase orang yang memerlukan intervensi terhadap penyakit tropis yang terabaikan (Filariasis dan Kusta)	%	10,00	10,00	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	10,00	-	
		Angka Kejadian DBD	/100.000	33,45	20,00	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	20,00	-	
		Persentase Penduduk Memiliki JKN untuk mencapai UHC (Universal Health Coverage)	%	89,00	91,00	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	
		Persentase Puskesmas terakreditasi minimal Madya	%	100,00	97,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase RSUD terakreditasi minimal Madya	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase puskesmas terpenuhi obat dan vaksin	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase pelayanan lab klinis dan lab air	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase Sistem Informasi Kesehatan	%	60,00	60,00	60,00	-	70,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	
1.02.03	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN						2.765.054.000		2.149.602.000		2.127.172.000		1.830.964.000		1.865.042.000		10.737.834.000		Dinas Kesehatan - RSD Bagas Waras - 34 Puskesmas	
		Persentase Puskesmas memiliki tenaga kesehatan sesuai standar	%	100,00	56,03	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase dokter IGD RSUD yang sudah mengikuti pelatihan kewardaruratan sesuai standar	%	87,00	87,00	90,00	-	92,00	-	95,00	-	97,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
1.02.04	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN						326.780.000		355.283.000		384.518.000		392.731.000		393.470.000		1.852.782.000		Dinas Kesehatan	
		Persentase Apotek, Toko Obat, Toko Alkes, Optikal dan Usaha Mikro Obat Tradisional yang memenuhi ketentuan	%	50,00	50,00	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
		Persentase industri rumah tangga pangan, tempat pengolahan makanan dan sekolah/ sentra makanan jajanan yang memenuhi ketentuan	%	25,00	25,00	30,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	50,00	-	
1.02.05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN						685.938.000		804.118.000		749.836.000		735.780.000		709.023.000		3.684.692.000		Dinas Kesehatan	
		Cakupan Desa Siaga Aktif	%	57,60	57,60	62,00	-	62,00	-	64,00	-	64,00	-	66,00	-	66,00	-	66,00	-	
1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						203.270.931.000		206.580.943.000		226.304.515.000		229.404.419.000		302.388.116.000		1.167.948.924.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						34.387.212.000		33.389.228.000		33.279.053.000		32.667.371.000		32.421.706.000		166.144.570.000		Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase Warga Negara yang terkena resiko akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
1.04.03	PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN						1.457.938.000			1.983.028.000			2.124.406.000			2.085.049.000		9.719.483.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 Ha yang ditangani	%	100,00	100,00	0,05	-	0,05	-	0,04	-	0,03	-	0,02	-	0,02	-		
1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH						2.337.728.000			2.456.074.000			3.544.032.000			3.279.636.000		14.805.006.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Rumah Tidak Layak Huni yang tertangani	%	94,03	94,03	95,23	-	96,43	-	97,63	-	98,83	-	100,00	-	100,00	-		
1.04.05	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)						301.643.000			446.182.000			790.477.000			775.832.000		3.084.018.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Prasarana sarana utilitas umum (PSU) kondisi baik	%	N/A	N/A	49,65	-	62,24	-	74,13	-	86,01	-	100,00	-	100,00	-		
		Persentase PSU yang diserahterimakan oleh pengembang perumahan	%	0,70	7,43	23,53	-	38,61	-	52,76	-	66,07	-	78,61	-	78,61	-		
1.04.06	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN SERTIFIKASI, KUALIFIKASI, KLASIFIKASI, DAN REGISTRASI BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN									49.576.000			49.405.000			48.490.000		195.589.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase Sertifikasi dan Registrasi bagi Orang atau Badan Hukum yang Melaksanakan Perancangan dan Perencanaan Rumah serta Perencanaan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum PSU yang diterbitkan	%	0,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETERTIBAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						14.002.956.000			13.963.306.000			17.341.131.000			14.977.046.000		15.131.197.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran - Badan Penanggulangan Bencana Daerah
1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.390.337.000			7.197.500.000			9.078.171.000			7.347.128.000		7.464.980.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETERTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						1.053.352.000			1.211.224.000			1.976.191.000			1.823.387.000		1.598.869.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
		Persentase Satlimas yang terlatih dan dikukuhkan	%	41,50	42,00	42,00	-	43,00	-	44,00	-	45,00	-	47,00	-	47,00	-		
		Persentase Perda dan Perkada yang ditugaskan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
		Persentase pengisian Transibum yang dapat dieksekusi	%	91,60	92,00	92,00	-	92,40	-	92,80	-	93,20	-	93,60	-	93,60	-		
		Persentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran perda dan perkada	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA						5.047.480.000			4.959.673.000			5.224.566.000			5.016.152.000		5.056.876.000	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-		
		Persentase Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	%	70,12	72,78	72,78	-	73,00	-	74,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-		
		Persentase kelompok relawan bencana yang aktif	%	40,00	40,00	50,00	-	51,00	-	52,00	-	53,00	-	55,00	-	55,00	-		
		Persentase pemulihan pasca bencana yang terealisasi	%	100,00	60,00	61,00	-	62,00	-	63,00	-	65,00	-	70,00	-	70,00	-		
1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN						511.787.000			594.909.000			1.062.203.000			790.379.000		1.010.472.000	Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA						744.051.000		872.533.000		2.984.049.000		3.660.957.000		3.632.887.000		11.894.477.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase tenaga kerja bersertifikat kompetensi	%	3,51	3,6	3,75	-	4,12	-	4,61	-	5,22	-	5,95	-	5,95	-	
2.07.04	PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA						1.251.816.000		3.048.905.000		5.721.073.000		3.782.181.000		4.359.464.000		18.163.439.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase Tenaga Kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan antar kerja dalam wilayah kabupaten/kota	%	21,11	21,50	21,00	-	22,50	-	23,00	-	24,00	-	24,50	-	24,50	-	
2.07.05	PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL						407.217.000		456.097.000		464.405.000		460.651.000		457.119.000		2.245.489.000	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
		Persentase sengketa hubungan industrial yang terselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						1.429.583.000		1.467.243.000		1.520.481.000		1.771.614.000		1.707.987.000		7.896.908.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
							200.894.000		237.964.000		268.762.000		373.370.000		322.389.000		1.403.379.000	
2.08.02	PROGRAM PENGARUS UTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN						200.894.000		237.964.000		268.762.000		373.370.000		322.389.000		1.403.379.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG) pada belanja langsung APBD	%	0,2	NA	0,4	-	0,6	-	0,7	-	0,8	-	0,9	-	0,9	-	
2.08.03	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN						234.677.000		238.359.000		223.704.000		252.533.000		251.559.000		1.200.832.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase kasus kekerasan terhadap perempuan yang tertangani sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.08.04	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA						175.958.000		148.728.000		182.798.000		242.448.000		211.718.000		961.650.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase lembaga layanan bagi keluarga yang mendapatkan pembinaan dan penguatan kelembagaan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.08.05	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK						30.165.000		34.703.000		49.405.000		53.339.000		57.742.000		225.354.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase perangkat daerah yang memiliki data gender dan anak	%	28,80	NA	40,40	-	46,20	-	51,90	-	57,70	-	67,30	-	67,30	-	
2.08.06	PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)						300.838.000		323.234.000		311.251.000		368.521.000		384.942.000		1.688.786.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase desa/kelurahan layak anak	%	65,10	NA	70,10	-	76,30	-	82,50	-	86,30	-	100,00	-	100,00	-	
2.08.07	PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK						487.051.000		484.255.000		484.561.000		481.403.000		479.637.000		2.416.907.000	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN						2.026.033.000		2.325.102.000		2.924.764.000		2.856.034.000		2.478.064.000		12.609.997.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
2.09.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAUATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN						774.216.000		817.999.000		1.136.310.000		1.042.525.000		842.060.000		4.613.110.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Ketersediaan pangan utama / beras	Ton	267.611	270.287	272.990	-	275.720	-	278.477	-	281.262	-	284.075	-	284.075	-	
2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT						1.050.721.000		1.284.011.000		1.506.846.000		1.522.571.000		1.337.673.000		6.701.822.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		Ketersediaan energi	kkal/ kapita/ hari	3.003	3.015	3.030	-	3.045	-	3.060	-	3.075	-	3.090	-	3.090	-	
		Ketersediaan protein	kkal/ kapita/ hari	80,87	84,50	85,2	-	85,5	-	85,8	-	86,1	-	86,4	-	86,4	-	
2.09.04	PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN						145.794.000		158.643.000		212.441.000		218.203.000		221.342.000		956.423.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase penanganan daerah rawan pangan	%	8,00	8,00	10,00	-	12,00	-	14,00	-	16,00	-	18,00	-	18,00	-	
2.09.05	PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN						55.302.000		64.449.000		69.167.000		72.735.000		76.989.000		338.642.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase pangan segar asal tumbuhan yang aman	%	79,00	79,00	80,00	-	81,00	-	82,00	-	83,00	-	84,00	-	84,00	-	
2.10	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						553.012.000		793.214.000		839.883.000		824.323.000		818.004.000		3.828.436.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
2.10.04	PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN						201.095.000		148.728.000		148.215.000		145.469.000		144.354.000		787.861.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase sengketa tanah garapan yang diselesaikan	%	0,00	0,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.10.05	PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN						100.548.000		148.728.000		148.215.000		145.469.000		144.354.000		687.314.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase pengadaan tanah untuk pembangunan yang selesai tepat waktu	%	NA	NA	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.10.06	PROGRAM REDISTRIBUSI TANAH, DAN GANTI KERUGIAN PROGRAM TANAH KELEBIHAN MAKSIMUM DAN TANAH ABSENTEE								297.455.000		296.429.000		290.937.000		288.707.000		1.173.528.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase tanah milik pemerintah daerah yang terfasilitasi pensertifikatannya	%	0,00	35,00	42,5	-	50	-	57,5	-	65	-	72,5	-	72,5	-	
2.10.10	PROGRAM PENATAGUNAAN TANAH						251.369.000		198.303.000		247.024.000		242.448.000		240.589.000		1.179.733.000	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
		Persentase dokumen penatagunaan tanah yang terusun	%	0,00	NA	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						26.275.152.000		26.441.621.000		32.020.317.000		31.347.202.000		31.728.183.000		147.812.475.000	Dinas Lingkungan Hidup
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						5.263.185.000		5.202.913.000		7.226.957.000		6.756.932.000		5.659.753.000		30.109.740.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						452.464.000		624.654.000		395.239.000		533.385.000		144.354.000		2.150.096.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase ketersediaan dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP						1.829.963.000		1.779.768.000		2.324.495.000		2.220.819.000		1.737.049.000		9.892.094.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Cakupan pemantauan kualitas air	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan pemantauan kualitas udara	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase kampung iklim yang terbentuk	%	10	10	30	-	40	-	60	-	80	-	100	-	100	-	
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						5.716.120.000		5.902.395.000		8.716.975.000		8.775.350.000		11.779.807.000		40.890.647.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase RTH publik yang dikelola dengan baik	%	66,66	66,66	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						100.548.000		79.322.000		187.739.000		184.261.000		81.801.000		633.671.000	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase fasilitasi pemenuhan komitmen izin pengelolaan limbah B3	%	83	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						100.548.000		99.152.000		222.322.000		218.203.000		72.177.000		712.402.000	Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		Persentase Pembinaan dan Pengawasan terkait ketepatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	%	N/A	N/A	60,00	-	65,00	-	70,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-	
2.11.08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					100.548.000	-	128.897.000	-	247.024.000	-	242.448.000	-	96.236.000	-	815.153.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase kelompok masyarakat (KSM) yang memperoleh pendidikan, pelatihan dan penyuluhan lingkungan hidup	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase sakti kalpataru yang dibina	%	N/A	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT					351.916.000	-	396.606.000	-	494.048.000	-	436.406.000	-	288.707.000	-	1.967.683.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah Tokoh/ Lembaga Masyarakat / Sekolah/Dunia Usaha yang mendapat penghargaan lingkungan tingkat kabupaten	orang	N/A	3	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	3	-	
		Persentase sekolah yang sudah melaksanakan PPLHS (Berbudaya Lingkungan Hidup di Sekolah) tingkat kabupaten	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						-	39.661.000	-	59.286.000	-	58.188.000	-	38.495.000	-	195.630.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase pengaduan masyarakat terkait izin lingkungan, izin PPLH dan PPU LH yang ditangani	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN					12.359.860.000	-	12.188.253.000	-	12.146.232.000	-	11.921.210.000	-	11.829.804.000	-	60.445.359.000	-	Dinas Lingkungan Hidup
		Persentase timbulan sampah diperkotaan yang tertangani	%	98,09	71,94	74,09	-	76,32	-	78,61	-	80,96	-	83,39	-	83,39	-	
		Persentase jumlah sampah yang terkurangi	%	52,73	24,00	26,00	-	28,00	-	30,00	-	32,00	-	34,00	-	34,00	-	
2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL					6.267.109.000	-	6.262.304.000	-	8.282.784.000	-	7.826.142.000	-	6.844.814.000	-	35.483.153.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2.12.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					5.263.185.000	-	5.202.913.000	-	7.226.957.000	-	6.756.932.000	-	5.659.753.000	-	30.109.740.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK					643.259.000	-	669.030.000	-	654.177.000	-	634.787.000	-	700.995.000	-	3.302.248.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase Perakaman KTP Elektronik	%	97,87	97,87	99,02	-	99,03	-	99,04	-	99,05	-	99,06	-	99,06	-	
		Cakupan kepemilikan KK	%	97,80	97,80	97,90	-	98,00	-	98,02	-	98,04	-	98,06	-	98,06	-	
		Persentase anak usia 0-17 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	%	46,84	46,84	50,00	-	60,00	-	70,00	-	80,00	-	90,00	-	90,00	-	
2.12.03	PROGRAM PENCATATAN SIPIL					326.478.000	-	331.860.000	-	341.751.000	-	326.954.000	-	351.260.000	-	1.678.303.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penduduk umur 0-18 tahun memiliki akta kelahiran	%	91,87	91,87	97	-	98	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan penerbitan akta kematian	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan penerbitan akta perkawinan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan penerbitan akta perceraian	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan penerbitan akta pengesahan anak	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Cakupan penerbitan pengangkatan anak	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.12.04	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN					20.110.000	-	44.619.000	-	46.016.000	-	84.093.000	-	103.935.000	-	298.773.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan database kependudukan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerjasama	%	0	13,73	17,65	-	22,00	-	25,00	-	29,00	-	33,00	-	33,00	-	
2.12.05	PROGRAM PENGELOLAAN PROFIL KEPENDUDUKAN					14.077.000	-	13.882.000	-	13.883.000	-	23.376.000	-	28.871.000	-	94.089.000	-	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase ketersediaan profil kependudukan tahunan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.13	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					9.720.328.000	-	12.038.032.000	-	13.877.019.000	-	13.586.636.000	-	13.741.360.000	-	62.963.375.000	-	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab						
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026										
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp							
2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						13.709.108.000			13.858.200.000			17.496.668.000			18.958.638.000			19.166.826.000			83.189.440.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.16.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.711.128.000			7.654.487.000			7.892.412.000			8.102.595.000			8.040.468.000			39.401.090.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK						1.754.879.000			1.735.150.000			1.902.084.000			2.085.049.000			2.069.062.000			9.546.224.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase pengembangan dan pemberdayaan kelompok informasi masyarakat di tingkat kecamatan	%	0	NA	18,18	-	36,36	-	54,55	-	72,73	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Nilai Pemeringkatan keterbukaan informasi publik	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA						4.243.101.000			4.468.563.000			7.702.172.000			8.770.994.000			9.057.296.000			34.242.126.000	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Persentase penambahan akses (titik) internet di OPD yang disediakan Dinas Kominfo	%	55,00	54,90	58,82	-	62,75	-	66,67	-	70,59	-	74,51	-	74,51	-	74,51	-	74,51	-	74,51	-	
		Persentase penambahan akses internet di ruang publik	%	70,00	80,00	67,50	-	75,00	-	82,50	-	90,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
		Persentase layanan publik yang disintegrasikan secara online dan terintegrasi	%	40,74	53,70	62,96	-	72,22	-	81,48	-	90,74	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH						20.355.850.000			21.149.127.000			23.192.257.000			23.084.359.000			23.254.918.000			111.036.511.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						19.385.564.000			19.468.508.000			21.186.420.000			21.018.704.000			21.060.748.000			102.119.944.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	
2.17.02	PROGRAM PELAYANAN IZIN USAHA SIMPAN PINJAM						50.274.000			39.661.000			59.286.000			58.188.000			67.365.000			274.774.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase permohonan izin usaha simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	%	16,70	20,51	23,93	-	26,82	-	29,52	-	33,52	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-	35,00	-	
		Persentase permohonan izin pembukaan cabang cabang pembantu dan kantor kas simpan pinjam yang memperoleh rekomendasi	%	6,30	7,40	8,80	-	9,30	-	10,20	-	11,00	-	12,20	-	12,20	-	12,20	-	12,20	-	12,20	-	
2.17.03	PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI						150.822.000			69.406.000			197.620.000			193.958.000			202.095.000			813.901.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase koperasi aktif	%	66,94	67,54	69,5	-	71,2	-	72,65	-	73,85	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-	
		Persentase koperasi yang patuh	%	23,1	23,9	24,83	-	25,9	-	26,94	-	27,95	-	30	-	30	-	30	-	30	-	30	-	
2.17.04	PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI						75.411.000			69.406.000			88.929.000			126.073.000			129.918.000			489.737.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase KSP/USP yang terilai kesehatan koperasinya	%	9,34	7,6	14,75	-	17	-	17,65	-	18,05	-	18,5	-	18,5	-	18,5	-	18,5	-	18,5	-	
2.17.05	PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN						150.822.000			99.152.000			247.024.000			242.448.000			288.707.000			1.028.153.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase pengurus/pengawas/pengelola koperasi yang telah mendapatkan pendidikan dan pelatihan	%	25,84	27,85	30,2	-	31,6	-	31,9	-	32,2	-	32,5	-	32,5	-	32,5	-	32,5	-	32,5	-	
2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI						-			19.831.000			29.643.000			38.792.000			48.118.000			136.384.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase Koperasi yang telah mengakses lembaga keuangan	%	17,8	18,2	18,2	-	18,9	-	19,45	-	20,2	-	20,95	-	20,95	-	20,95	-	20,95	-	20,95	-	
2.17.07	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)						492.683.000			1.085.708.000			1.037.501.000			1.066.769.000			1.097.084.000			4.779.745.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Pertumbuhan usaha mikro	%	0,11	0,12	0,13	-	0,14	-	0,15	-	0,16	-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	0,17	-	
		Persentase UMKM yang melakukan kemitran	%	0,25	0,27	0,3	-	0,32	-	0,35	-	0,38	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	0,4	-	
2.17.08	PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM						50.274.000			297.455.000			348.834.000			339.427.000			360.883.000			1.393.873.000	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan	
		Persentase usaha mikro yang diberikan fasilitas/ Pendampingan	%	3,86	3,1	3,3	-	3,5	-	3,7	-	4	-	4,2	-	4,2	-	4,2	-	4,2	-	4,2	-	
2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						11.060.218.000			4.815.214.000			5.983.824.000			5.860.982.000			5.909.241.000			33.629.479.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
2.18.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						8.747.625.000											23.254.216.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Presentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-
2.18.02	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL						301.643.000											1.691.203.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase peningkatan pengembangan iklim investasi	%	80	N/A	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
2.18.03	PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL						703.832.000											4.100.070.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase Potensi investasi yang siap ditawarkan	%	0	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
2.18.04	PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL						351.916.000											1.060.682.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase peningkatan pelayanan penanaman modal	%	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL						628.422.000											2.951.991.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase pengendalian penanaman modal	%	80,00	80,00	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
2.18.06	PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL						326.790.000											571.317.000	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Persentase peningkatan pengelolaan data dan sistem informasi penanaman modal	%	N/A	N/A	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-	80,00	-
2.19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						2.607.580.000											14.620.710.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
2.19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN						648.531.000											3.342.183.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	%	1,02	NA	1,04	-	1,08	-	1,12	-	1,17	-	1,3	-	1,3	-	1,3	-
2.19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DATA SAING KEOLAHRAGAAN						1.959.049.000											11.278.527.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Persentase atlet berprestasi	%	9	NA	2,85	-	4,29	-	5,71	-	7,4	-	7,14	-	7,14	-	7,14	-
2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						201.095.000											1.382.974.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL						201.095.000											1.382.974.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase ketersediaan statistik sektoral yang memiliki standar data dan metadata sesuai dengan prinsip satu data Indonesia	%	25,00	25,00	30,00	-	40,00	-	50,00	-	60,00	-	70,00	-	70,00	-	70,00	-
2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN						150.822.000											1.165.586.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI						150.822.000											1.165.586.000	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase sistem informasi perangkat daerah yang diamankan dengan sertifikat elektronik	%	38	35	35	-	38	-	39	-	40	-	41	-	41	-	41	-
		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi (e-sign/tanda tangan elektronik) dalam komunikasi Perangkat Daerah	%	-	19,61	29,41	-	39,22	-	49,02	-	58,82	-	68,63	-	68,63	-	68,63	-
2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						1.846.555.000											16.928.088.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN						1.156.296.000											11.086.919.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Persentase adat istiadat dan situs yang dilestarikan	%	0	25	20	-	25	-	25	-	30	-	30	-	30	-	30	-
2.22.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL						150.822.000											1.092.214.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab				
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026							
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp		
2.22.04	PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase pelaku seni tradisional yang kompeten	%	0	0	30	-	40	-	50	-	60	-	70	-	70	-	1.054.668.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata		
		Persentase Pembinaan Sejarah	%	0	NA	30	-	35	-	40	-	45	-	50	-	50	-	259.836.000			
2.22.05	PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA						418.780.000				356.945.000						543.730.000	2.389.138.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata		
		Persentase objek cagar budaya yang dilestarikan	%	9,8	13,6	14	-	17	-	21	-	25	-	28	-	28	-				
2.22.06	PROGRAM PENGELOLAAN PERMUSEUMAN										464.405.000						384.942.000	1.305.149.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata		
		Persentase Koleksi Museum yang dilestarikan	%	0	0	0	-	0	-	50	-	50	-	50	-	50	-				
2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						215.125.000				233.951.000						620.675.000	695.782.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN						215.125.000				233.951.000						620.675.000	695.782.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	eksemplar	49.786		49.962	-	51.962	-	52.062	-	52.162	-	52.262	-	52.262	-	52.262			
		Persentase perpustakaan yang dibangun	%	21,99	24,55	21	-	22	-	23	-	24	-	25	-	25	-				
2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN						4.782.479.000				4.790.528.000						6.174.646.000	6.174.895.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
2.24.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						4.504.015.000				4.481.531.000						5.524.825.000	5.492.586.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintahan daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-				
2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP						231.845.000				247.453.000						455.802.000	481.177.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Persentase arsip yang diakuisisi	%	100,00	0,00	77,00	-	78,00	-	79,00	-	80,00	-	81,00	-	81,00	-	81,00			
		Persentase pengawasan kearsipan internal	%	9,80	49,02	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00			
2.24.03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP						46.619.000				61.544.000						89.344.000	192.019.000	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan		
		Arsip usul mudah	Meter lari	0,00	0,00	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00	-	60,00			
		Persentase arsip yang diahimmediakan	%	25,85	19,96	20,00	-	20,91	-	21,82	-	22,73	-	24,55	-	24,55	-	24,55			
3	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						73.823.230.000				78.432.677.000						91.410.816.000	90.253.662.000	91.164.686.000	425.085.071.000	
3.25	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN						1.156.297.000				1.507.103.000						1.674.824.000	1.876.545.000	1.712.992.000	7.927.761.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.25.03	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP						30.165.000				49.576.000						49.405.000	72.735.000	115.483.000	317.364.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi perikanan tangkap	ton	184	537	543	-	547	-	552	-	557	-	562	-	562	-	562			
3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA						975.310.000				1.274.096.000						1.432.739.000	1.561.362.000	1.342.484.000	6.585.991.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produksi perikanan budidaya	ton	27.604	28.315	29.165	-	30.039	-	30.940	-	31.500	-	32.000	-	32.000	-	32.000			
3.25.05	PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN						50.274.000				74.364.000						74.108.000	121.224.000	120.295.000	440.265.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Cakupan tabur benih ikan (Restocking) perairan umum	%	N/A	8,00	15,00	-	23,00	-	30,00	-	38,00	-	46,00	-	46,00	-	46,00			
3.25.06	PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN						100.548.000				109.067.000						118.572.000	121.224.000	134.730.000	584.141.000	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Jumlah produk olahan ikan	kg	682.000	1.050.400	1.168.588	-	1.191.958	-	1.214.800	-	1.237.240	-	1.266.100	-	1.266.100	-	1.266.100			
3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						10.024.039.000				9.980.188.000						15.681.225.000	15.282.800.000	15.292.989.000	66.261.241.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata
3.26.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						7.790.032.000				7.526.190.000						8.053.126.000	7.509.933.000	7.319.884.000	38.199.165.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00			
3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						1.923.918.000				2.131.755.000						5.977.978.000	5.634.479.000	5.629.771.000	21.297.901.000	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026				
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target
		Persentase daya tarik wisata, kawasan strategis pariwisata dan destinasi pariwisata terkelola	%	72,00	NA	73,00	-	74,00	-	75,00	-	78,00	-	80,00	-	80,00	-	
3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA					155.849.000	-	173.515.000	-	1.012.798.000	-	1.076.467.000	-	1.183.696.000	-	3.602.325.000	-	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Tingkat intensitas promosi pariwisata	%	68,00	NA	68,00	-	70,00	-	72,00	-	73,00	-	75,00	-	75,00	-	
3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL					40.219.000	-	29.746.000	-	158.096.000	-	227.901.000	-	221.342.000	-	677.304.000	-	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Jumlah pelaku ekraf yang difasilitasi HKI	Orang	5		10	-	15	-	20	-	25	-	30	-	100	-	
3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF					114.021.000	-	118.982.000	-	479.227.000	-	834.020.000	-	938.296.000	-	2.484.546.000	-	Dinas Kebudayaan, Kepemudanan dan Olah Raga, dan Pariwisata
		Persentase SDM pariwisata yang kompeten	%	21,29		25,00	-	30,00	-	35,00	-	40,00	-	45,00	-	45,00	-	
3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN					49.843.615.000	-	52.345.273.000	-	56.459.286.000	-	55.048.620.000	-	56.270.887.000	-	269.967.681.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
3.27.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					37.707.530.000	-	38.432.844.000	-	39.393.393.000	-	39.055.520.000	-	39.433.058.000	-	194.022.345.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang urusan pemerintah daerah	%	80,00	80,00	82	-	82	-	83	-	83	-	84	-	84	-	
3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN					1.985.812.000	-	2.835.730.000	-	4.540.299.000	-	3.660.957.000	-	3.502.969.000	-	16.525.767.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Kw/Ha	67,22	66,98	66,99	-	67,01	-	67,03	-	67,07	-	67,13	-	67,13	-	
		Produktivitas cabe	Kw/Ha	8,92	8,90	8,98	-	9,06	-	9,15	-	9,25	-	9,34	-	9,34	-	
		Produktivitas tembakau rajang	Kw/Ha	12	12,10	12,2	-	12,21	-	12,22	-	12,25	-	12,28	-	12,28	-	
		Produktivitas tembakau asepian	Kw/Ha	9,81	9,81	9,83	-	9,86	-	9,88	-	9,9	-	9,91	-	9,91	-	
3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN					8.147.870.000	-	8.437.783.000	-	9.149.764.000	-	9.091.780.000	-	9.604.293.000	-	44.431.490.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase Infrastruktur irigasi dalam kondisi baik / fungsional	%	34	36	37	-	38	-	39	-	40	-	40	-	40	-	
		Persentase ketersediaan Prasarana Penyuluhan Pertanian	%	N/A	26	35	-	42	-	50	-	58	-	60	-	60	-	
		Jumlah populasi ternak ruminansia (besar dan kecil)	ekor	265000	277.500	286000	-	288384	-	297039	-	305947	-	315125	-	315125	-	
3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER					673.668.000	-	961.769.000	-	1.185.715.000	-	1.255.878.000	-	1.419.473.000	-	5.496.503.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	%	22	22	22	-	22	-	22	-	22	-	22	-	22	-	
3.27.05	PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					553.011.000	-	867.575.000	-	1.309.227.000	-	1.042.525.000	-	1.371.355.000	-	5.143.693.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Cakupan penanganan gangguan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) dan potensi bencana pertanian lainnya	%	55	55,3	58	-	60	-	62	-	64	-	66	-	66	-	
3.27.07	PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN					775.724.000	-	809.572.000	-	880.888.000	-	941.960.000	-	939.739.000	-	4.347.883.000	-	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian
		Persentase kelompok tani madya dan utama	%	0	8,33	8,63	-	9,13	-	9,63	-	10,13	-	10,63	-	10,63	-	
3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN					5.062.564.000	-	5.602.056.000	-	8.724.885.000	-	8.286.857.000	-	8.473.530.000	-	36.149.892.000	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN						-	34.703.000	-	69.167.000	-	82.433.000	-	110.671.000	-	296.974.000	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Persentase Rekomendasi Ijin Usaha Perdagangan yang diterbitkan	%	98,00	80,00	83,00	-	90,00	-	91,00	-	92,00	-	93,00	-	93,00	-	
3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN					4.021.897.000	-	4.511.388.000	-	6.373.216.000	-	6.255.145.000	-	6.365.972.000	-	27.527.618.000	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan
		Persentase pasar rakyat/tradisional terrevitalisasi	%	34,00	38,00	42,00	-	46,00	-	50,00	-	54,00	-	58,00	-	58,00	-	
		Persentase PKL yang terbinas	%	25,70	34,20	43,80	-	51,40	-	60,00	-	68,50	-	77,00	-	77,00	-	
		Jumlah pendapatan retribusi pasar	Rp	4.616.866.333	4.616.866.333	4.650.000.000	-	4.700.000.000	-	4.750.000.000	-	4.800.000.000	-	4.850.000.000	-	23.750.000.000	-	
3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING					186.013.000	-	158.643.000	-	335.953.000	-	329.729.000	-	336.824.000	-	1.347.162.000	-	Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab	
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 3	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan wilayah 4	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
		Persentase pelaksanaan pendampingan dan asistensi Pengawasan khusus	%	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
7	UNSUR KEWILAYAHAN						95.959.736.200		96.475.220.200		100.081.760.200		97.982.680.200		109.002.135.200		499.501.532.000		
7.01	KECAMATAN						95.959.736.200		96.475.220.200		100.081.760.200		97.982.680.200		109.002.135.200		499.501.532.000		Kecamatan Kelurahan
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						80.140.901.200		80.264.210.200		82.155.000.200		80.599.428.200		86.458.994.200		409.618.534.000		Kecamatan Kelurahan
		Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
7.01.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK						184.744.000		204.984.000		229.474.000		233.066.000		298.619.000		1.150.887.000		Kecamatan
		Persentase masyarakat yang terfasilitasi pelayanan publik (PATEN)	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN						9.374.610.000		9.279.691.000		9.974.391.000		9.532.778.000		12.330.297.000		50.491.767.000		Kecamatan Kelurahan
		Persentase lembaga masyarakat kecil	%	100,00	100,00	93,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	95,00	-	-	-
7.01.04	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM						3.137.048.000		3.097.676.000		3.435.108.000		3.308.058.000		4.093.460.000		17.071.350.000		Kecamatan
		Persentase Penyelesaian Gangguan Ketertarikan dan Keteriban Umum di Wilayah Kecamatan	%	100,00	100,00	96,00	-	96,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	-	-
7.01.05	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM						479.527.000		618.699.000		742.959.000		724.361.000		1.012.438.000		3.577.984.000		Kecamatan
		Persentase potensi konflik sosial di kecamatan yang tertangani	%	80,00	80,00	96,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	97,00	-	-	-
7.01.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA						2.642.906.000		3.009.960.000		3.544.828.000		3.584.989.000		4.808.327.000		17.591.010.000		Kecamatan
		Persentase desa yang menyelesaikan dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan tepat waktu	%	100,00	100,00	95,00	-	97,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00	-	98,00	-	-	-
		Persentase desa tertib administrasi	%	100,00	100,00	94,00	-	95,00	-	96,00	-	96,00	-	97,00	-	97,00	-	-	-
8	UNSUR PEMERINTAHAN UMUM						5.157.759.000		5.185.494.000		8.155.291.000		5.267.313.000		5.602.119.000		29.367.976.000		
8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK						5.157.759.000		5.185.494.000		8.155.291.000		5.267.313.000		5.602.119.000		29.367.976.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA						3.212.356.000		3.073.756.000		3.691.262.000		3.138.807.000		3.140.599.000		16.256.780.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN						22.121.000		56.517.000		438.715.000		69.158.000		69.290.000		645.801.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase kelompok masyarakat yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	60,00	-	1,00	-	4,00	-	7,00	-	10,00	-	13,00	-	13,00	-	-	-
		Persentase pelajar yang memperoleh peningkatan wawasan kebangsaan	%	12,00	-	0,00	-	4,00	-	7,00	-	11,00	-	15,00	-	15,00	-	-	-
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK						1.142.027.000		1.121.213.000		2.226.979.000		1.143.197.000		1.134.432.000		6.767.848.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik	%	-	-	2,00	-	4,00	-	6,00	-	8,00	-	10,00	-	10,00	-	-	-
		Persentase parpol yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban LPJ bantuan keuangan parpol yang tepat waktu	%	100,00	-	60,00	-	65,00	-	70,00	-	75,00	-	80,00	-	80,00	-	-	-
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN						402.190.000		431.309.000		680.798.000		421.859.000		668.837.000		2.604.993.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Organisasi Kemasyarakatan yg dibina dan mendapatkan pengawasan	%	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA						52.285.000		91.220.000		392.274.000		81.463.000		107.784.000		725.026.000		Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase Pembentukan Paguyuban Kerukunan Umat Beragama Tingkat Desa Terbentuk	%	0,00	0,00	34,00	-	67,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	100,00	-	-	-

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Satuan	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggungjawab
				Kondisi Kinerja pada Awal RPJMD		Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Target	Rp	
				2020	2021	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
		Cakupan pembinaan dan perubahan narkoba pada pelajar	%	20,00	26,00	6,00	-	12,00	-	18,00	-	25,00	-	31,00	-	31,00	-	-
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL						326.780.000		411.479.000		725.263.000		422.829.000		481.177.000		2.367.528.000	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
		Persentase potensi konflik sosial yang terselesaikan		100,0	NA	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	100,0	-	-
		Persentase deteksi dini potensi konflik sosial		-	-	-	-	80,0	-	80,0	-	85,0	-	85,0	-	85,0	-	-
		TOTAL					2.666.268.973.200		2.687.641.205.200		2.803.037.995.200		2.747.343.549.200		2.831.093.513.200		13.735.385.236.000	

BAB VIII

KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir periode masa jabatan.

8.1 Penetapan Indikator Kinerja Utama

Penetapan indikator kinerja utama bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Klaten dari sisi penyelenggaraan pemerintahan daerah pada akhir periode masa jabatan. Indikator kinerja daerah secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator tujuan (*impact*) daerah sebagaimana termuat pada Bab V RPJMD. Suatu indikator kinerja utama dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja sasaran berkenaan setelah program prioritas ditetapkan.

Penetapan target indikator kinerja utama dalam pencapaian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, dan Arah Kebijakan pada RPJMD Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026 telah diselaraskan dengan persoalan pembangunan daerah dalam waktu 5 tahun ke depan, utamanya kondisi pandemi *Coronavirus Disease 2019 (Covid-19)* telah menjadi tantangan terberat bagi perkembangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat saat ini. Covid-19 berdampak besar bagi bidang kesehatan, pendidikan dan ekonomi secara nasional maupun daerah, banyak masyarakat kehilangan pekerjaan dan penghasilan. Selain itu minat investasi juga akan menurun dengan signifikan, sehingga pertumbuhan investasi baru akan melambat. Penanganan Covid-19 mengharuskan pemerintah pusat dan daerah bekerja keras untuk menyediakan berbagai paket kebijakan, baik untuk mengobati pasien Covid-19 (kuratif) dan mencegah eskalasi penyebaran virus tersebut (preventif). Kondisi ini sangat mempengaruhi keuangan daerah, sehingga dalam hal penganggaran pada RPJPD belum bisa dipedomani, karena keuangan daerah selama kurun waktu 15 tahun yang lalu tidak lagi relevan dengan kondisi saat ini.

Dampak dari Covid-19 pada sektor riil dalam perekonomian ditimbulkan dari ancaman kesehatan masyarakat serta langkah penanganan Covid-19 yang *extraordinary* dan membuat aktivitas ekonomi menurun tajam. Di sektor riil, tekanan terjadi baik pada sisi permintaan (*demand*) maupun sisi penawaran (*supply*), yang pada gilirannya akan menekan pertumbuhan ekonomi. Menurunnya aktivitas ekonomi menciptakan ancaman pemutusan hubungan kerja yang berakibat pada penurunan pendapatan masyarakat yang pada gilirannya berimplikasi pada tingkat konsumsi. Aktivitas produksi juga terhambat seiring terganggunya rantai pasokan dan aliran distribusi, serta turunnya investasi. Beberapa sektor terdampak langsung dari kejadian ini seperti sektor transportasi, perdagangan, serta pariwisata. Sektor informal juga

diperkirakan akan terdampak signifikan dari disupsi ekonomi akibat Covid-19 ini. Terlebih jauh, gangguan pada aktivitas ekonomi secara mendalam dapat berdampak pada profitabilitas, solvabilitas, serta keberlangsungan usaha.

Oleh karena itu, kondisi keuangan daerah Kabupaten Klaten mempengaruhi penetapan target indikator kinerja utama Kabupaten Klaten. Namun dalam pencapaian target dalam pencapaian visi misi Bupati dan wakil Bupati Klaten telah dijabarkan kedalam Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan, kemudian dalam arah kebijakan tersebut dijabarkan ke dalam Program Prioritas Daerah yang dijabarkan sesuai dengan tema tahunan daerah. Implementasi program prioritas tersebut berupa Program Unggulan dimana Pemerintah Kabupaten Klaten mulai menempatkan langkah-langkah pengamanan dan pencegahan terjadinya krisis kesehatan, sudah melakukan langkah-langkah kebijakan ekonomi berupa rencana untuk menstabilkan perekonomian dan mendukung mata pencaharian masyarakat, refocusing dan realokasi APBD dalam penanganan Covid-19. Langkah-langkah *extraordinary* ini membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga kebijakan ini tidak terlepas dari dukungan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan fokus utama kebijakan dalam mendukung anggaran kesehatan, skema perlindungan sosial untuk memberikan perlindungan sosial bagi penduduk, memperluas *social safety net* untuk menjaga daya beli, serta mendukung dunia usaha dan industri melalui kebijakan luar biasa atau *extraordinary*, diantaranya melalui pemberian stimulus dan/atau hibah bagi sektor/pelaku ekonomi yang perlu mendapat prioritas dalam jangka pendek.

Dengan memperhatikan dinamika yang terjadi akibat kondisi pandemi Covid-19, serta memperhatikan tantangan fundamental jangka menengah, maka ditetapkan indikator kinerja utama Kabupaten Klaten sebagaimana ditampilkan pada Tabel 8.1.

Tabel 8.1
Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1.	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Skor hasil survei yang mencakup dimensi gotong royong, dimensi toleransi dan dimensi rasa aman	Indeks	NA	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,75
2.	Indeks Reformasi Birokrasi	Skor hasil evaluasi mandiri Reformasi Birokrasi	Indeks	57,55	57,55*	60,01	60,62	64	66	70	70
3.	Pertumbuhan Ekonomi	(PDRB ADHK tahun n dikurangi PDRB ADHK tahun sebelumnya) dibagi PDRB ADHK tahun sebelumnya dikali 100	%	-1,18	1,03	2,52	3,51	4,45	5,13	5,47	5,47
4.	Infrastruktur wilayah kondisi baik	Rata-rata dari 7 indikator infrastruktur (Persentase kawasan perkotaan non kumuh; Persentase Penduduk mengakses Air Minum layak; Persentase Penduduk mengakses Sanitasi layak; Persentase jalan mantap; Persentase daerah irigasi kondisi baik; Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang; persentase drainase kondisi baik)	%	74,58	75,45	76,11	76,72	77,18	77,51	77,72	77,72
5.	Rasio konektivitas	Perhitungan ratio konektivitas sesuai permendagri 18/2020	Rasio	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15
6.	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	$IPM = \sqrt[3]{I_{\text{kesehatan}} \times I_{\text{pendidikan}} \times I_{\text{pengeluaran}}} \times 100$	Indeks	75,56	75,56*	76,46	76,88	77,30	77,73	78,15	78,15
7.	Persentase Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin dibagi	%	12,89	12,89*	12,49	11,69	11,09	10,49	9,89	9,89

No	Indikator Kinerja Utama	Formulasi Indikator	Satuan	Kondisi Kinerja Awal RPJMD		Target Kinerja					Target Akhir RPJMD
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
	Miskin	Jumlah Penduduk dikali 100									
8.	Indeks Pembangunan Gender	IPM perempuan dibagi IPM Laki-laki dikali 100	Indeks	96,17	96,17*	96,46	96,75	97,04	97,33	97,62	97,62
9.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	(30% dikali IKA) ditambah (30% dikali IKU) ditambah (40% dikali IKTL)	Indeks	52,85	54,35	54,68	55,01	55,34	55,67	55,99	55,99

Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya

8.2 Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Penyajian indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) dibagi menjadi 3 aspek, yaitu: aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, serta aspek daya saing daerah. Indikator pada aspek kesejahteraan masyarakat menggambarkan suatu kondisi indikator makro ekonomi dan sosial, seperti laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, persentase penduduk miskin, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Indikator pada aspek Pelayanan Umum memberikan tolok ukur atas pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan urusan pemerintahan, baik wajib maupun pilihan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Indikator kinerja pada aspek daya saing daerah memberikan gambaran daya dukung mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan.

Penetapan indikator kinerja daerah terhadap capaian penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten Klaten tertuang pada Tabel 8.2.

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kabupaten Klaten Tahun 2021-2026

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
A	Aspek Kesejahteraan Masyarakat										
1)	Indeks Pembangunan Masyarakat (IPMas)	Indeks	NA	0,63	0,65	0,68	0,70	0,73	0,75	0,75	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2)	Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	57,55	57,55*	60,01	60,62	64	66	70	70	
3)	Pertumbuhan Ekonomi	%	-1,18	1,03	2,52	3,51	4,45	5,13	5,47	5,47	
4)	Infrastruktur wilayah kondisi baik	%	74,58	75,45	76,11	76,72	77,18	77,51	77,72	77,72	
5)	Rasio konektivitas	Rasio	0,09	0,09	0,12	0,12	0,15	0,15	0,15	0,15	
6)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	Indeks	75,56	75,56*	76,46	76,88	77,30	77,73	78,15	78,15	
7)	Persentase Penduduk Miskin	%	12,89	12,89*	12,49	11,69	11,09	10,49	9,89	9,89	
8)	Indeks Pembangunan Gender	Indeks	96,17	96,17*	96,46	96,75	97,04	97,33	97,62	97,62	
9)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Indeks	52,85	54,35	54,68	55,01	55,34	55,67	55,99	55,99	
B	Aspek Pelayanan umum										
1)	Urusan Pendidikan										Dinas Pendidikan
10)	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Tahun	13,25	13,25*	13,52	13,62	13,73	13,84	13,94	13,94	
11)	Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Tahun	8,58	8,58*	8,64	8,72	8,80	8,88	8,96	8,96	
2)	Urusan Kesehatan										Dinas Kesehatan
12)	Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	76,78	76,78*	76,84	76,89	76,93	76,98	77,02	77,02	
3)	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang										Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13)	Persentase jalan dalam kondisi mantap	%	90,08	90,86	91,06	91,26	91,46	91,66	91,86	91,86	
14)	Persentase drainase dalam kondisi baik	%	61,44	61,45	61,47	61,48	61,50	61,51	61,52	61,52	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
15)	Persentase irigasi kabupaten dalam kondisi baik	%	36,17	39,2	41,5	43,6	44,9	45,6	46,2	46,2	
16)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	98,87	99,43	99,99	100,00	100,00	
17)	Persentase kesesuaian pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	%	88	88,2	88,4	88,6	88,8	89	89,2	89,2	
4)	Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman										Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman
18)	Persentase capaian universal access (kumuh, air minum dan sanitasi)	%	97,21	97,76	98,32	98,87	99,43	99,99	100,00	100,00	
5)	Urusan Ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat;										
19)	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Indeks	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	0,92	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
20)	Persentase perda dan perkada yang ditegakkan	%	91,6	92,00	92,40	92,80	93,20	93,60	94,00	94,00	Satuan Polisi Pamong Praja
6)	Urusan Sosial										Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
21)	Persentase PMKS yang tertangani	%	90,32	65	67,5	68	68,5	69	69,5	69,5	
7)	Urusan Tenaga Kerja										Dinas Perindustrian Dan Tenaga Kerja
22)	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	%	5,46	5,31	5,16	4,97	4,50	4,25	4,25	4,25	
8)	Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak										Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
23)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indek	72,35	72,68	73,34	73,67	74,00	74,33	74,66	74,66	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
24)	Skor Kabupaten Layak Anak	Nilai	NA	710	725	740	755	770	785	785	
9)	Urusan Pangan										Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
25)	Skor Pola Pangan Harapan	Skor	84,80	90,25	90,50	90,75	91	91,25	91,5	91,5	
10)	Urusan Pertanahan										Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
26)	Persentase lahan milik pemerintah yang bersertifikat	%	55,66	56,15	56,63	57,12	57,60	58,08	58,57	58,57	
11)	Urusan Lingkungan Hidup										Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
27)	Indeks kualitas air	Indeks	36,15	36,39	36,63	36,87	37,11	37,35	37,59	37,59	
28)	Indeks kualitas udara	Indeks	76,82	77,31	77,80	78,29	78,78	79,27	79,76	79,76	
29)	Indeks Kualitas Tutupan Lahan	Indeks	42,54	42,72	42,9	43,08	43,26	43,44	43,62	43,62	
30)	Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)	Indeks	56,95	58,95	59,95	61,95	63,95	65,95	66,95	66,95	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
12)	Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil										Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
31)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Terhadap Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Indeks	82,92	83,1	83,28	83,46	83,64	83,82	84,00	84,00	
13)	Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa										Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
32)	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,6854	0,6874	0,6894	0,6934	0,6934	0,6956	0,6974	0,6974	
14)	Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana										Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan
33)	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	0,3	0,3	0,28	0,26	0,24	0,22	0,20	0,20	

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
											Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana
15)	Urusan Perhubungan										Dinas Perhubungan
34)	Kinerja Lalu Lintas (<i>Level Of Service</i>)	Nilai	0,65	0,64	0,62	0,61	0,58	0,56	0,54	0,54	
16)	Urusan Komunikasi dan Informatika										Dinas Komunikasi dan Informatika
35)	Indeks SPBE	Indeks	3,0	3,0	3,2	3,4	3,6	3,8	4,0	4,0	
17)	Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah										Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
36)	Pertumbuhan Usaha Mikro	%	0,11	0,12	0,13	0,14	0,15	0,16	0,17	0,17	
18)	Urusan Penanaman Modal										Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu
37)	Persentase peningkatan investasi PMDN	%	-64	10	10	10	10	10	10	50	
38)	Persentase peningkatan investasi PMA	%	-59	1	1	1	1	1	1	5	
19)	Urusan Kepemudaan dan Olahraga										Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
39)	Tingkat prestasi pemuda dan olahraga	%	0	0	38	40	24	44	46	46	
20)	Urusan Statistik										Dinas Komunikasi dan Informatika
40)	Persentase ketersediaan data pada portal satu data daerah	%	25	NA	30	40	50	60	70	70	
21)	Urusan Persandian										Dinas Komunikasi dan Informatika
41)	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Indeks	0	NA	60	68	76	84	92	92	
22)	Urusan Kebudayaan										Dinas Pariwisata Kebudayaan Pemuda Dan Olahraga
42)	Persentase Pemajuan Kebudayaan	%	10,9	0	5	5	5	5	5	25	
23)	Urusan Perpustakaan										Dinas Arsip Dan

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
43)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Perpustakaan	Indeks	77,92	77,92*	77,95	78,01	78,25	78,26	79	79	Perpustakaan
24)	Urusan Kearsipan										Dinas Arsip Dan Perpustakaan
44)	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kearsipan	Indeks	77,92	77,92*	77,95	78,01	78,25	78,26	79	79	Dinas Arsip Dan Perpustakaan
25)	Urusan Kelautan dan Perikanan										Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
45)	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya dan Produksi Perikanan Tangkap	ton	27.788	28.852	29.708	30.586	31.492	32.057	32.562	32.562	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
26)	Urusan Pariwisata										Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
46)	Pertumbuhan PAD sektor pariwisata	%	2,59	2,84	3,13	3,44	3,79	4,16	4,58	4,58	Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Pemuda Dan Olahraga
27)	Urusan Pertanian										Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
47)	Pertumbuhan PDRB Sektor Pertanian dan Perikanan	%	2,12	2,52	2,63	2,68	2,88	3,04	3,14	3,14	Dinas Pertanian Ketahanan Pangan Dan Perikanan
28)	Urusan Perdagangan										Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
48)	Pertumbuhan PDRB Sektor perdagangan	%	(4,79)	(0,85)	1,24	1,79	2,29	3,43	3,96	3,96	Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah
29)	Urusan Perindustrian										Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
49)	Pertumbuhan PDRB sektor industri pengolahan	%	(1,21)	0,05	1,47	2,24	3,38	3,84	4,09	4,09	Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja
37)	Sekretariat Daerah										Sekretariat Daerah
50)	Peringkat/ Nilai SAKIP	Skor	NA	NA	62	62,5	63	64	65	65	Sekretariat Daerah
51)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		81,88	NA	82	82,5	83	83,5	84	84	Sekretariat Daerah
38)	Sekretariat DPRD										Sekretariat DPRD
52)	Indeks Kepuasan DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	Indeks	77,25	77,28	77,98	81,56	81,98	82,23	83,75	83,75	Sekretariat DPRD

No	Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Kondisi Kinerja Awal Tahun Ke		Target Kinerja Tahun Ke-					Target Akhir RPJMD	Perangkat Daerah
			2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
31)	Unsur Penunjang Perencanaan										
53)	Skor Capaian Aspek Perencanaan dalam SAKIP Pemerintah Daerah	Skor	20,98	22,50*	23,00	24,00	25,00	26,00	27,00	27,00	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
32)	Unsur Penunjang Keuangan										
54)	Opini Laporan Keuangan	Opin	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Badan Pengelolaan Keuangan Daerah
33)	Unsur Penunjang Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan										
55)	Indeks Penerapan Sistem Merit ASN	Indeks	NA	NA	180	200	225	250	260	260	Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah
34)	Unsur Penunjang Penelitian dan Pengembangan										
56)	Indeks Inovasi Daerah	Skor	1.888	NA	2.001	2.051	2.101	2.151	2.201	2.201	Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Daerah
39)	Unsur Penunjang Pengawasan										
57)	Indeks Survey Penilaian Integritas (SPI)	Indeks	NA	NA	81	81	82	83	83	83	Inspektorat
37)	Unsur Penunjang Kewilayahan										
58)	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Layanan Kecamatan	Indeks	79,49	79,99	80,49	80,99	81,49	81,99	82,49	82,49	Kecamatan
38)	Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik										
59)	Persentase potensi konflik ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya (ipoleksosbud) yang diselesaikan	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
C	Aspek Daya Saing Daerah										
60)	Indeks Daya Saing Daerah	Indeks	2,9675	3,00	3,10	3,15	3,20	3,25	3,30	3,30	Seluruh Perangkat Daerah

Keterangan: *) realisasi tahun sebelumnya

BAB IX PENUTUP

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah, serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 merupakan pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Klaten serta pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pembangunan. Agar pelaksanaan RPJMD dapat berjalan dengan baik, perlu diatur beberapa pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

9.1. Pedoman Transisi

RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 berlaku untuk kurun waktu lima tahun sejak tahun 2021 hingga tahun 2026. Untuk menjaga kesinambungan pembangunan serta mengisi kekosongan perencanaan setelah RPJMD tahun berakhir, maka RPJMD ini menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD dan RAPBD tahun 2027.

9.2. Kaidah Pelaksanaan

- a. Bupati Klaten berkewajiban menyebarluaskan peraturan daerah tentang RPJMD kepada masyarakat;
- b. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dan pemangku kepentingan agar melaksanakan program-program RPJMD dengan sebaik-baiknya mengarah pada pencapaian target-target yang telah ditetapkan dalam RPJMD;
- c. Seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten berkewajiban melakukan penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah mengacu pada RPJMD. Renstra tersebut akan menjadi pedoman dalam penyusunan Renja Perangkat Daerah tahun 2022 sampai dengan tahun 2026;
- d. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah berkewajiban melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil RPJMD.

Semoga rencana pembangunan yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Klaten tahun 2021-2026 ini dapat berjalan dengan baik dan dapat mencapai target-target yang telah ditetapkan, sehingga Visi jangka menengah Kabupaten Klaten yaitu: “**Terwujudnya Kabupaten Klaten Yang Maju, Mandiri dan Sejahtera**” dapat terwujud.

